TAHUN ANGGARAN

2023

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

(AUDITED)

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Salakan, 24 Mei 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GRAFIK xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL) 3
NERACA 4
LAPORAN OPERASIONAL (LO) 6
LAPORAN ARUS KAS (LAK) 8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) 11
BAB I PENDAHULUAN 11
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 11
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 12
1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 14
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 17
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 19
2.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 . 19
2.2. Ekonomi Makro 19
2.3. Kebijakan Keuangan 27
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 43
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 43
3.2. Ikhtisar Realisasi Pemenuhan Dukungan Program Nasional dan *Mandatory Spending* 58
3.3. Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 65
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 68
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 68
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 68

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 71
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah 149
4.5. Asumsi Dasar Akuntansi 150
4.6. Pengguna Laporan Keuangan 150
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 151
A. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-pos Keuangan 151
5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 151
5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 195
5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 198
5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 250
5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas 271
5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 279
B. Pengungkapan Informasi yang Tidak Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 282
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 284
6.1 Gambaran Umum Kabupaten Banggai Kepulauan 284
6.2 Struktur Organisasi 287
BAB VII PENUTUP 290

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banggai Kepulauan 20
Tabel 2. 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan 21
Tabel 2. 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan 21
Tabel 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Kepulauan..... 21
Tabel 2. 5 Rasio Kabupaten Banggai Kepulauan 22
Tabel 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia 23
Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan 24
Tabel 2. 8 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 26
Tabel 2. 9 Rencana Target dan Realisasi dari Struktur APBD 30
Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Organisasi 43
Tabel 3. 2 Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi . 44
Tabel 3. 3 Realisasi Pembiayaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah dan Organisasi 58
Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi Alokasi Fungsi Pendidikan Tahun 2023..... 59
Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Alokasi Fungsi Kesehatan Tahun 2023 60
Tabel 3. 6 Perhitungan Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah/Desa .. 61
Tabel 3. 7 Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2023..... 61
Tabel 3. 8 Perhitungan Transfer Bagi Hasil ke Desa Tahun 2023 62
Tabel 3. 9 Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2023..... 62
Tabel 3. 10 Perhitungan Kegiatan Pengawasan Tahun 2023 63
Tabel 3. 11 Perhitungan Alokasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 63
Tabel 3. 12 Rekapitulasi Data Program Penanganan Penurunan Prevalensi Stunting .. 64
Tabel 4. 1 Komponen Biaya Perolehan 113
Tabel 4. 2 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap 117
Tabel 4. 3 Masa Manfaat Aset Tetap..... 118
Tabel 4. 4 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap 120
Tabel 4. 5 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud..... 138
Tabel 5. 1 Rincian Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 151
Tabel 5. 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022 152
Tabel 5. 3 Rincian Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022 152
Tabel 5. 4 Rincian Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022..... 155
Tabel 5. 5 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 159

Tabel 5. 6 Rincian Penerima Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 160
Tabel 5. 7 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022 160
Tabel 5. 8 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022 162
Tabel 5. 9 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022 ... 163
Tabel 5. 10 Rincian Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022 163
Tabel 5. 11 Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 164
Tabel 5. 12 Rincian Dana Alokasi Umum Tahun 2023 dan 2022 165
Tabel 5. 13 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 165
Tabel 5. 14 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus 166
Tabel 5. 15 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022 168
Tabel 5. 16 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 168
Tabel 5. 17 Rincian Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 170
Tabel 5. 18 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan 2022 170
Tabel 5. 19 Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan 2022 170
Tabel 5. 20 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2023 171
Tabel 5. 21 Rincian Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022 172
Tabel 5. 22 Rincian Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022 172
Tabel 5. 23 Rincian Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 173
Tabel 5. 24 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 175
Tabel 5. 25 Rincian Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022 176
Tabel 5. 26 Rincian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 177
Tabel 5. 27 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 178
Tabel 5. 28 Rincian Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 181
Tabel 5. 29 Rincian Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022 182
Tabel 5. 30 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 182
Tabel 5. 31 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 185
Tabel 5. 32 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022 186
Tabel 5. 33 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 187
Tabel 5. 34 Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 dan 2022 187
Tabel 5. 35 Rincian Belanja Transfer Tahun 2023 dan 2022 188

Tabel 5. 36 Rincian Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 188
Tabel 5. 37 Rincian Dana Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2023 189
Tabel 5. 38 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 190
Tabel 5. 39 Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022 191
Tabel 5. 40 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 191
Tabel 5. 41 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 192
Tabel 5. 42 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 192
Tabel 5. 43 Rincian Penyertaan Modal Daerah Tahun 2023 dan 2022 193
Tabel 5. 44 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 dan 2022 193
Tabel 5. 45 Rincian SiLPA Terikat Tahun 2023 194
Tabel 5. 46 Rincian SiLPA Tahun 2023 195
Tabel 5. 47 Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2023 dan 2022 195
Tabel 5. 48 Rincian Penggunaan SAL Tahun 2023 dan 2022 196
Tabel 5. 49 Rincian Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 196
Tabel 5. 50 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 197
Tabel 5. 51 Rincian Sisa Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 dan 2022 197
Tabel 5. 52 Rincian Aset Daerah 198
Tabel 5. 53 Rincian Aset Lancar 198
Tabel 5. 54 Rincian Kas di Kas Daerah 199
Tabel 5. 55 Penjelasan Selisih Kas 199
Tabel 5. 56 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 200
Tabel 5. 57 Kas di Bendahara Pengeluaran 200
Tabel 5. 58 Rincian Kas Dana BOS 201
Tabel 5. 59 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP 202
Tabel 5. 60 Rincian Kas Lainnya 203
Tabel 5. 61 Rincian Piutang Pajak Daerah 203
Tabel 5. 62 Rincian Piutang Retribusi Daerah 206
Tabel 5. 63 Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 207
Tabel 5. 64 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah 208
Tabel 5. 65 Rekapitulasi Penyisihan Piutang 209
Tabel 5. 66 Rincian Persediaan 210
Tabel 5. 67 Rincian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas 210
Tabel 5. 68 Persediaan Isi Tabung Gas 212

Tabel 5. 69 Rincian Persediaan Bahan Lainnya 212
Tabel 5. 70 Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan 213
Tabel 5. 71 Persediaan Alat Tulis Kantor 215
Tabel 5. 72 Rincian Persediaan Bahan Cetakan 217
Tabel 5. 73 Persediaan Alat Listrik 218
Tabel 5. 74 Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 218
Tabel 5. 75 Rincian Persediaan Natura dan Pakan Natura 220
Tabel 5. 76 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen 222
Tabel 5. 77 Rincian Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulteng 222
Tabel 5. 78 Rincian Penyertaan Modal Pada PDAM Air Malino 224
Tabel 5. 79 Rincian Aset Tetap 226
Tabel 5. 80 Rincian Aset Tetap Tanah 226
Tabel 5. 81 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin 228
Tabel 5. 82 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan 234
Tabel 5. 83 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 237
Tabel 5. 84 Rincian Aset Tetap Lainnya 240
Tabel 5. 85 Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan 241
Tabel 5. 86 Rincian Aset Lainnya 243
Tabel 5. 87 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 244
Tabel 5. 88 Rincian Aset Lain-lain 244
Tabel 5. 89 Rincian Kewajiban Jangka Pendek 245
Tabel 5. 90 Rincian Utang PFK 246
Tabel 5. 91 Rincian Utang Belanja 246
Tabel 5. 92 Rincian Utang Belanja Pegawai 247
Tabel 5. 93 Rincian Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 247
Tabel 5. 94 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa 248
Tabel 5. 95 Rincian Utang Belanja Modal Tanah 248
Tabel 5. 96 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 248
Tabel 5. 97 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 249
Tabel 5. 98 Rincian Pendapatan Daerah - LO 250
Tabel 5. 99 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO 251
Tabel 5. 100 Rincian Pajak Daerah - LO 251
Tabel 5. 101 Penjelasan Selisih Lebih Pajak Daerah - LO dan LRA 252
Tabel 5. 102 Rincian Retribusi Daerah - LO 252

Tabel 5. 103 Penjelasan Selisih Lebih Retribusi Daerah - LO dan LRA 253
Tabel 5. 104 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 254
Tabel 5. 105 Rincian Lain-lain PAD yang Sah - LO 254
Tabel 5. 106 Penjelasan Selisih Lebih Lain-lain PAD yang Sah - LO dan LRA 255
Tabel 5. 107 Rincian Pendapatan Transfer - LO 255
Tabel 5. 108 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 255
Tabel 5. 109 Penjelasan Selisih Lebih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 257
Tabel 5. 110 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO 257
Tabel 5. 111 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO 258
Tabel 5. 112 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO 258
Tabel 5. 113 Rincian Pendapatan Hibah - LO 259
Tabel 5. 114 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO 259
Tabel 5. 115 Rincian Beban Operasi - LO 260
Tabel 5. 116 Rincian Beban Pegawai - LO 260
Tabel 5. 117 Penjelasan Selisih Beban Pegawai - LO dan LRA 261
Tabel 5. 118 Rincian Beban Barang dan Jasa – LO 262
Tabel 5. 119 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa – LO 262
Tabel 5. 120 Rincian Beban Hibah – LO 263
Tabel 5. 121 Penjelasan Selisih Lebih Beban Hibah - LO dan LRA 264
Tabel 5. 122 Rincian Beban Bantuan Sosial - LO 264
Tabel 5. 123 Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO 265
Tabel 5. 124 Penjelasan Selisih Beban Penyisihan Piutang - LO dan Neraca 265
Tabel 5. 125 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO 266
Tabel 5. 126 Rincian Beban Penyusutan – LO 266
Tabel 5. 127 Rincian Beban Transfer - LO 267
Tabel 5. 128 Rincian Beban Bagi Hasil - LO 267
Tabel 5. 129 Rincian Beban Bantuan Keuangan - LO 267
Tabel 5. 130 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO 268
Tabel 5. 131 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 268
Tabel 5. 132 Surplus Non Operasional 268
Tabel 5. 133 Defisit Non-Operasional-LO 269
Tabel 5. 134 Rincian Pos Luar Biasa 270
Tabel 5. 135 Perhitungan Surplus/(Defisit)-LO 270

Tabel 5. 136 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi 271
Tabel 5. 137 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 271
Tabel 5. 138 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 273
Tabel 5. 139 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi 274
Tabel 5. 140 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 275
Tabel 5. 141 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 275
Tabel 5. 142 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 276
Tabel 5. 143 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 276
Tabel 5. 144 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 277
Tabel 5. 145 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas 277
Tabel 5. 146 Rincian Saldo Awal Kas 277
Tabel 5. 147 Rincian Koreksi SiLPA Tahun Lalu 278
Tabel 5. 148 Rincian Saldo Akhir Kas 278
Tabel 5. 149 Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 279
Tabel 5. 150 Surplus/(Defisit) – LO Tahun 2023 dan 2022 279
Tabel 5. 151 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 280
Tabel 6. 1 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 289

DAFTAR GRAFIK

Diagram 01 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023.....151
Diagram 02 Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2023.....172

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01	Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2023
Lampiran 02	Daftar Perhitungan Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023
Lampiran 03	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2023
Lampiran 04	Kas Dana BOS SATDIKNAS Negeri per 31 Desember 2023
Lampiran 05	Kas Dana BOP PAUD dan dan BOP Pendidikan Kesetaraan per 31 Desember 2023
Lampiran 06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023
Lampiran 07	Kas di Bendahara BOK Tahun Anggaran 2023
Lampiran 08	Rekapitulasi Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023
Lampiran 09	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023
Lampiran 10	Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023
Lampiran 11	Daftar Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Lampiran 12	Gaji dan Tunjangan Angsuran Piutang PT. Taspen (Persero) Tahun Anggaran 2023
Lampiran 13	Daftar Piutang Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023
Lampiran 14	Laporan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi per 31 Desember 2023
Lampiran 15	Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023
Lampiran 16	Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023
Lampiran 17	Hibah Obat Buffer Stock dari Provinsi Sulteng Tahun 2023
Lampiran 18	Hibah Obat BKKBN Provinsi Sulteng Tahun 2023
Lampiran 19	Saldo Persediaan per 31 Desember 2023
Lampiran 20	Daftar Obat Expire Date (ED) dan Rusak-Usang TA 2023
Lampiran 21	Rekap Utang PFK Satuan Pendidikan Negeri per 31 Des 2023
Lampiran 22	Daftar Utang Beban Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja TA 2023
Lampiran 23	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Tahun 2023
Lampiran 24	Utang Belanja Pegawai BLUD tahun 2023
Lampiran 25	Utang Belanja barang dan Jasa BLUD (Utang Kepada PMI) Tahun 2023
Lampiran 26	Rincian Saldo Belanja Operasi per OPD Tahun 2023

Lampiran 27 Rincian Saldo Belanja Pegawai per OPD Tahun 2023
Lampiran 28 Rincian Saldo Belanja BBJ per OPD Tahun 2023
Lampiran 29 Rincian Saldo Belanja Modal per OPD Tahun 2023
Lampiran 30 Rincian Saldo Belanja Modal Tanah per OPD Tahun 2023
Lampiran 31 Rincian Saldo Belanja Modal Alat-Mesin per OPD Tahun 2023
Lampiran 32 Rincian Saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2023
Lampiran 33 Daftar Belanja Modal Tahun 2023
Lampiran 33a Daftar Aset Tetap Tanah Tahun 2023
Lampiran 33b Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Tahun 2023
Lampiran 33c Daftar Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Tahun 2023
Lampiran 33d Daftar Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi Tahun 2023
Lampiran 33e Daftar Aset Tetap Lainnya Tahun 2023
Lampiran 33f Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023
Lampiran 34a Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023
Lampiran 34b Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2023
Lampiran 35 Dari Hasil Penilaian Tanah Tahun 2023
Lampiran 36 Hibah Ke Masyarakat Tahun 2023
Lampiran 37 Reklasifikasi Akun Dari Tanah Tahun 2023
Lampiran 38 Reklasifikasi Akun Dari Jalan Irigasi Dan Jaringan Tahun 2023
Lampiran 39 Reklasifikasi Akun Ke Beban Barang Dan Jasa Tahaun 2023
Lampiran 40 Reklasifikasi Akun Dari Peralatan Dan Mesin Tahun 2023
Lampiran 41 Ekstracom Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Tahun 2023
Lampiran 42 Penghapusan Tetap Dan Aset Lainnya Tahun 2023
Lampiran 43 Koreksi Kurang Nilai Pencatatan Tahun 2023
Lampiran 44 Hasil Dari Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2023
Lampiran 45 Hibah Dari Kementrian Tahun 2023
Lampiran 46 Reklasifikasi Akun Dari Barang Dan Jasa Tahun 2023
Lampiran 47 Reklasifikasi Akun Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2023
Lampiran 48 Hutang Belanja Modal Tahun 2023
Lampiran 49 Reklasifikasi Akun Dari Gedung Dan Bangunan Tahun 2023
Lampiran 50 Reklas Akun Dari Aset Tetap Lainnya Tahun 2023
Lampiran 51 Ekstracom Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

Lampiran 52 Piutang Pihak ke Tiga Tahun 2023
Lampiran 53 Daftar Pembayaran Yang Diluncurkan Tahun 2024 (Retensi 5%) Tahun 2023
Lampiran 54 Laporan Keuangan Unaudited PDAM Tahun 2023
Lampiran 55 Laporan Keuangan RS Pratama Billabanggai Tahun 2023
Lampiran 56 Laporan Keuangan RSUD Trikora Salakan Tahun 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN TA 2023	REALISASI TA 2023	(%)	REALISASI TA 2022
PENDAPATAN DAERAH	**5.1.1**	**860.045.753.599,00**	**827.853.187.730,31**	**96,26**	**811.071.133.450,26**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**5.1.1.1**	**41.060.725.094,00**	**41.330.438.640,31**	**100,66**	**33.146.420.283,26**
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	6.348.922.837,00	6.627.541.142,85	104,39	6.281.792.225,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	13.816.841.258,00	13.903.900.977,00	100,63	18.590.032.806,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	4.231.364.872,00	4.231.364.872,00	100,00	2.934.152.411,84
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	16.663.596.127,00	16.567.631.648,46	99,42	5.340.442.840,42
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**	**815.007.805.657,00**	**783.226.137.466,00**	**96,10**	**755.670.384.454,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**5.1.1.2.1**	**784.250.989.569,00**	**752.451.260.771,00**	**95,95**	**727.334.250.998,00**
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	671.005.167.569,00	635.301.295.771,00	94,68	618.257.263.998,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1	5.734.069.000,00	5.734.069.000,00	100,00	4.584.136.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.1	107.511.753.000,00	111.415.896.000,00	103,63	104.492.851.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**5.1.1.2.2**	**30.756.816.088,00**	**30.774.876.695,00**	**100,06**	**28.336.133.456,00**
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2	29.526.816.088,00	29.544.876.695,00	100,06	28.336.133.456,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	100,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**5.1.1.3**	**3.977.222.848,00**	**3.296.611.624,00**	**82,89**	**22.254.328.713,00**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.1	3.977.222.848,00	3.296.611.624,00	82,89	22.254.328.713,00
BELANJA DAERAH	**5.1.2**	**936.937.268.812,00**	**849.032.765.461,21**	**90,62**	**818.476.608.308,43**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**624.319.448.894,00**	**547.076.049.093,21**	**87,63**	**536.100.878.785,43**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	373.972.907.406,00	332.586.846.754,00	88,93	324.897.549.199,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	213.350.782.625,00	191.836.809.175,21	89,92	190.882.105.372,43
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	33.016.621.863,00	18.792.120.164,00	56,92	10.843.624.410,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	3.979.137.000,00	3.860.273.000,00	97,01	9.477.599.804,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**151.052.856.292,00**	**137.246.465.854,00**	**90,86**	**127.148.619.652,00**
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	4.551.020.000,00	3.418.849.908,00	75,12	4.426.560.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	17.992.755.382,00	17.125.860.281,00	95,18	22.303.443.478,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	61.196.411.022,00	56.180.176.865,00	91,80	40.647.675.416,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	67.176.212.100,00	60.393.603.200,00	89,90	59.626.725.958,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	136.457.788,00	127.975.600,00	93,78	144.214.800,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**1.191.363.962,00**	**1.105.880.000,00**	**92,82**	**721.724.500,00**
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00	92,82	721.724.500,00
BELANJA TRANSFER	**5.1.2.4**	**160.373.599.664,00**	**163.604.370.514,00**	**102,01**	**154.505.385.371,00**
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	3.160.953.364,00	2.487.581.214,00	78,70	2.258.875.971,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	157.212.646.300,00	161.116.789.300,00	102,48	152.246.509.400,00
SURPLUS/DEFISIT		**(76.891.515.213,00)**	**(21.179.577.730,90)**	**27,54**	**(7.405.474.858,17)**

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN TA 2023	REALISASI TA 2023	(%)	REALISASI TA 2022
PEMBIAYAAN DAERAH	**5.1.3**	**76.891.515.213,00**	**76.773.513.365,49**	**99,85**	**87.656.990.071,66**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.3.1**	**80.251.515.213,00**	**80.133.513.365,49**	**99,85**	**91.016.990.071,66**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	80.251.515.213,00	80.133.513.365,49	99,85	91.016.990.071,66
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**80.251.515.213,00**	**80.133.513.365,49**	**99,85**	**91.016.990.071,66**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.1.3.2**	**3.360.000.000,00**	**3.360.000.000,00**	**100,00**	**3.360.000.000,00**
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00	3.360.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**3.360.000.000,00**	**3.360.000.000,00**	**100,00**	**3.360.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO		**76.891.515.213,00**	**76.773.513.365,49**	**99,85**	**87.656.990.071,66**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**5.1.4**	**0,00**	**55.593.935.634,59**	**0,00**	**80.251.515.213,49**

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	80.251.515.213,49	91.010.156.874,32
PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	80.133.513.365,49	91.016.990.071,66
Sub Total		**118.001.848,00**	**(6.833.197,34)**
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	55.593.935.634,59	80.251.515.213,49
Sub Total		**55.711.937.482,59**	**80.244.682.016,15**
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	(118.001.848,00)	6.833.197,34
LAIN-LAIN		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**5.2.5**	**55.593.935.634,59**	**80.251.515.213,49**

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ASET	**5.3.1**	**3.711.224.365.542,62**	**3.696.976.950.810,23**
ASET LANCAR	5.3.1.1	**76.501.962.691,98**	**114.481.571.170,75**
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	52.339.525.020,53	79.457.432.002,98
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	44.136.400,00	56.750,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	21.596.569,00	367.316,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4	1.820.146.100,00	0,00
Kas Dana BOS	5.3.1.1.5	368.192.188,06	667.618.111,51
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.6	1.000.339.357,00	469.208.361,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.7	433.487.309,00	1.502.945.170,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	1.016.269.425,00	693.694.813,10
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9	342.783.923,00	3.765.075.436,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.10	2.218.491.931,00	67.904.900,18
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.11	4.065.188.546,00	4.126.264.911,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.12	(1.196.223.510,77)	(1.098.456.570,18)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.13	0,00	226.250.000,00
Persediaan	5.3.1.1.14	14.028.029.434,16	24.603.209.969,16
JUMLAH ASET LANCAR		76.501.962.691,98	114.481.571.170,75
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	39.745.037.434,00	40.853.996.752,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.1	39.745.037.434,00	40.853.996.752,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		39.745.037.434,00	40.853.996.752,00
ASET TETAP	5.3.1.3	3.446.483.075.006,97	3.444.178.888.719,11
Tanah	5.3.1.3.1	2.035.150.506.456,97	2.012.396.228.548,97
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	431.034.010.115,81	418.529.641.928,81
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	746.494.583.550,54	703.838.625.342,54
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.415.948.157.635,67	1.355.400.353.335,67
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	11.738.833.085,00	11.801.742.079,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	27.376.857.469,00	26.268.823.348,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.221.259.873.306,02)	(1.084.056.525.863,88)
JUMLAH ASET TETAP		3.446.483.075.006,97	3.444.178.888.719,11
ASET LAINNYA	5.3.1.4	148.494.290.409,67	97.462.494.168,37
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	38.536.814.473,00	37.949.831.428,00
Aset Lain-lain	5.3.1.4.2	36.700.212.936,67	55.215.963.708,37
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.3	73.257.263.000,00	4.296.699.032,00
JUMLAH ASET LAINNYA		148.494.290.409,67	97.462.494.168,37
JUMLAH ASET		**3.711.224.365.542,62**	**3.696.976.950.810,23**

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
KEWAJIBAN	**5.3.2**	**8.815.398.040,00**	**13.261.716.768,00**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	**8.815.398.040,00**	**13.261.716.768,00**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	210.912.267,00	343.167.328,00
Utang Belanja	5.3.2.1.2	8.576.485.773,00	11.415.954.270,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	28.000.000,00	1.502.595.170,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		8.815.398.040,00	13.261.716.768,00
JUMLAH KEWAJIBAN		**8.815.398.040,00**	**13.261.716.768,00**
EKUITAS	**5.3.3**	**3.702.408.967.502,62**	**3.683.715.234.042,23**
EKUITAS	5.3.3	3.702.408.967.502,62	3.683.715.234.042,23
JUMLAH EKUITAS	5.3.3	3.702.408.967.502,62	3.683.715.234.042,23
JUMLAH EKUITAS		**3.702.408.967.502,62**	**3.683.715.234.042,23**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**3.711.224.365.542,62**	**3.696.976.950.810,23**

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

INSAN BASIR

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1	789.214.097.385,08	744.490.272.914,04	44.723.824.471,04	6,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	39.424.299.523,18	30.289.415.511,83	9.134.884.011,35	30,16
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	6.952.178.174,12	6.250.691.371,75	701.486.802,37	11,22
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	9.893.970.328,78	15.855.772.625,00	(5.961.802.296,22)	(37,60)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	4.231.364.872,00	2.934.152.411,84	1.297.212.460,16	44,21
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	18.346.786.148,28	5.248.799.103,24	13.097.987.045,04	249,54
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	740.681.729.069,00	656.147.912.553,00	84.533.816.516,00	12,88
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.2.1	709.995.928.739,00	627.138.099.030,00	82.857.829.709,00	13,21
Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1	704.261.859.739,00	622.553.963.030,00	81.707.896.709,00	13,12
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.4.1.2.1	5.734.069.000,00	4.584.136.000,00	1.149.933.000,00	25,09
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.2	30.685.800.330,00	29.009.813.523,00	1.675.986.807,00	5,78
Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.2	29.483.800.330,00	29.009.813.523,00	473.986.807,00	1,63
Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.2	1.202.000.000,00	0,00	1.202.000.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3	9.108.068.792,90	58.052.944.849,21	(48.944.876.056,31)	(84,31)
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	5.811.457.168,90	35.798.616.136,21	(29.987.158.967,31)	(83,77)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	3.296.611.624,00	22.254.328.713,00	(18.957.717.089,00)	(85,19)
BEBAN DAERAH	5.4.2	727.831.326.079,76	710.219.053.038,89	17.612.273.040,87	2,48
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	675.642.851.565,76	660.206.518.667,89	15.436.332.897,87	2,34
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	329.822.082.553,00	316.216.008.804,00	13.606.073.749,00	4,30
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	197.633.844.593,77	202.427.659.431,10	(4.793.814.837,33)	(2,37)
Beban Hibah	5.4.2.1.3	20.038.483.341,00	11.184.720.346,00	8.853.762.995,00	79,16
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	3.870.273.000,00	9.477.599.804,00	(5.607.326.804,00)	(59,16)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	378.202.024,74	286.918.558,77	91.283.465,97	31,82
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	123.899.966.053,25	120.613.611.724,02	3.286.354.329,23	2,72
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	52.188.474.514,00	50.012.534.371,00	2.175.940.143,00	4,35
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	2.487.581.214,00	2.258.875.971,00	228.705.243,00	10,12
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	49.700.893.300,00	47.753.658.400,00	1.947.234.900,00	4,08
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	61.382.771.305,32	34.271.219.875,15	27.111.551.430,17	79,11
KEGIATAN NON OPERASIONAL-LO					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.5	28.858.522.575,34	931.387.542,00	27.927.135.033,34	2.998,44
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.5	821.273.539,00	931.387.542,00	(110.114.003,00)	(11,82)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.5	28.037.249.036,34	0,00	28.037.249.036,34	100,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(28.858.522.575,34)	(931.387.542,00)	(27.927.135.033,34)	2.998,44
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		32.524.248.729,98	33.339.832.333,15	(815.583.603,17)	(2,45)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
POS LUAR BIASA	5.4.6	(1.105.880.000,00)	(721.724.500,00)	(384.155.500,00)	53,23
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	5.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	5.4.6	1.105.880.000,00	721.724.500,00	384.155.500,00	53,23
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.4.7	31.418.368.729,98	32.818.107.833,15	(1.199.739.103,17)	(3,68)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR

LAPORAN ARUS KAS

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

PEMERINTAHAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.5.1**	**115.729.687.323,10**	**119.737.893.793,83**
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	5.5.1.1	***827.515.986.930,31***	***811.065.882.450,26***
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	6.627.541.142,85	6.281.792.225,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1	13.903.900.977,00	18.590.032.806,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	4.231.364.872,00	2.934.152.411,84
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	5.5.1.1	16.230.430.848,46	5.335.191.840,42
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1	44.156.169.532,00	77.483.168.576,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1	459.375.692.731,00	440.978.979.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1	55.071.492.302,00	38.662.018.701,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.1	76.697.941.206,00	61.133.097.721,00
Penerimaan Dana Insentif	5.5.1.1	5.734.069.000,00	4.584.136.000,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1	111.415.896.000,00	104.492.851.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1	29.544.876.695,00	28.336.133.456,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1	1.230.000.000,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1	3.296.611.624,00	22.254.328.713,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	5.5.1.1	**827.515.986.930,31**	**811.065.882.450,26**
Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	5.5.1.2	***711.786.299.607,21***	***691.327.988.656,43***
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	332.586.846.754,00	324.897.549.199,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2	191.836.809.175,21	190.882.105.372,43
Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2	18.792.120.164,00	10.843.624.410,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	3.860.273.000,00	9.477.599.804,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2	1.105.880.000,00	721.724.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.2	2.487.581.214,00	2.258.875.971,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	5.5.1.2	161.116.789.300,00	152.246.509.400,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	5.5.1.2	**711.786.299.607,21**	**691.327.988.656,43**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	5.5.1	**115.729.687.323,10**	**119.737.893.793,83**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**5.5.2**	**(140.269.265.054,00)**	**(130.503.368.652,00)**
Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	5.5.2.1	***337.200.800,00***	***5.251.000,00***
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	294.703.600,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1	6.812.000,00	5.251.000,00
Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1	35.685.200,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	5.5.2.1	**337.200.800,00**	**5.251.000,00**
Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	5.5.2.2	***140.606.465.854,00***	***130.508.619.652,00***
Perolehan Tanah	5.5.2.2	3.418.849.908,00	4.426.560.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	17.125.860.281,00	22.303.443.478,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	56.180.176.865,00	40.647.675.416,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.2.2	60.393.603.200,00	59.626.725.958,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	127.975.600,00	144.214.800,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	5.5.2.2	***140.606.465.854,00***	***130.508.619.652,00***
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	5.5.2	**(140.269.265.054,00)**	**(130.503.368.652,00)**

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**5.5.3**	**(343.167.328,00)**	**297.336.728,34**
Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	5.5.3.1	***42.007.486.748,00***	***40.533.632.939,34***
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.1	42.007.486.748,00	40.526.799.742,00
Kiriman Uang Masuk	5.5.3.1	0,00	6.833.197,34
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	5.5.3.1	***42.007.486.748,00***	***40.533.632.939,34***
Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	5.5.3.2	***42.350.654.076,00***	***40.236.296.211,00***
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.2	42.350.654.076,00	40.236.296.211,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	5.5.3.2	***42.350.654.076,00***	***40.236.296.211,00***
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.3	**(343.167.328,00)**	**297.336.728,34**
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	**5.5.4**	**(24.882.745.058,90)**	**(10.468.138.129,83)**
SALDO AWAL KAS	**5.5.5**	**80.594.682.541,49**	**91.062.820.671,32**
KOREKSI SILPA TAHUN LALU	**5.5.6**	**(118.001.848,00)**	**0,00**
SALDO AKHIR KAS	**5.5.7**	**55.593.935.634,59**	**80.594.682.541,49**
Kas di Kas Daerah	5.5.7	52.339.525.020,53	79.457.432.002,98
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7	21.596.569,00	367.316,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.7	44.136.400,00	56.750,00
Kas di BLUD	5.5.7	1.820.146.100,00	0,00
Kas Dana BOS	5.5.7	368.192.188,06	667.618.111,51
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.5.7	1.000.339.357,00	469.208.361,00
SALDO AKHIR KAS	**5.5.7**	**55.593.935.634,59**	**80.594.682.541,49**

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
EKUITAS AWAL	**5.6.1**	3.683.715.234.042,23	3.553.220.090.570,93
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	**5.6.2**	31.418.368.729,98	32.618.107.833,15
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**5.6.3**	(12.724.635.269,59)	97.877.035.638,15
Koreksi Ekuitas - Kas	5.6.3	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang	5.6.3	932.489.170,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	5.6.3	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	5.6.3	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Persediaan	5.6.3	(9.331.514.510,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Investasi	5.6.3	(3.647.685.779,00)	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3	12.424.697.792,30	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.3	200.759.446,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Lainnya	5.6.3	(13.303.381.388,89)	97.877.035.638,15
EKUITAS AKHIR	**5.6.4**	3.702.408.967.502,62	3.683.715.234.042,23

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

BAB I

PENDAHULUAN

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selama satu periode pelaporan, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menemukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta bermanfaat dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan cara:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil–hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber–sumber penerimaan baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Informasi tersebut di atas sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan suatu daerah. Lebih jauh lagi, laporan keuangan juga

menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah seperti keputusan investasi, pembiayaan maupun optimalisasi pendapatan dari aset produktif. Bagi pihak luar laporan keuangan dapat merupakan proposal investasi apabila daerah memiliki daya tarik dalam suatu industri tertentu.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai bentuk kepatuhan terhadap antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang lampirannya diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

21. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

1.3.1 Unsur Laporan Keuangan

Unsur laporan keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

   Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasi dalam periode satu tahun.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

   Adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, Penggunaan SAL, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL Akhir.
3. Neraca

   Laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), kewajiban (utang) dan ekuitas dana dari suatu entitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

   a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,

baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban pemerintah daerah.

4. Laporan Operasional (LO)

   Menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan Daerah-LO, Beban Daerah dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dari suatu entitas yang disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

   Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

   Merupakan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO, dan Koreksi Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   Merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA dan Neraca. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan karena menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

   a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

   b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama Tahun pelaporan;

c. Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas seluruh transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
d. Informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja;
e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.3.2 Entitas

Entitas Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Litbang;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Ketahanan Pangan;
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Pariwisata;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Dinas Perhubungan;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

24. Dinas Pertanian;
25. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
26. Dinas Sosial;
27. Inspektorat;
28. Kecamatan Buko;
29. Kecamatan Buko Selatan;
30. Kecamatan Bulagi;
31. Kecamatan Bulagi Utara;
32. Kecamatan Bulagi Selatan;
33. Kecamatan Peling Tengah;
34. Kecamatan Liang;
35. Kecamatan Tinangkung;
36. Kecamatan Tinangkung Utara;
37. Kecamatan Tinangkung Selatan;
38. Kecamatan Totikum;
39. Kecamatan Totikum Selatan;
40. Satuan Polisi Pamong Praja;
41. Sekretariat Daerah;
42. Sekretariat DPRD.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023
- 2.2. Ekonomi Makro
- 2.3. Kebijakan Keuangan

Bab III Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Ikhtisar Realisasi Pemenuhan Dukungan Program Nasional dan *Mandatory Spending*
3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah
4.5. Asumsi Dasar Akuntansi
4.6. Pengguna Laporan Keuangan
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
A. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan atas Pos-Pos LRA
5.2. Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL
5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.6 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
B. Pengungkapan Informasi yang Tidak Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
6.1. Gambaran Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
6.1. Struktur Organisasi
Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 adalah "**Meningkatkan Daya Saing Kabupaten Banggai Kepulauan Melalui Penyediaan Infrastruktur Daerah Yang Memadai**".

Berdasarkan Tema tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 yakni:

1. Peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (*public service quality*);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; dan
3. Peningkatan infrastruktur daerah dalam rangka peningkatan daya asing.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2023, maka dirumuskan 4 (empat) agenda prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Tahun 2023 yaitu:

1. Tersedianya sarana dan prasarana Pelabuhan Salakan dan penataan kawasan ibukota;
2. Memaksimalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dan jalan untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta optimalisasi percepatan penurunan stunting; dan
4. Optimalisasi pelayanan publik dan sektor pendukung ekonomi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.2 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,90%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,56%;
3. *Gini Ratio* 0,272%;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,05%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,94%;
6. Tingkat Inflasi sebesar 4,15%;
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp4.925,53 (dalam miliar rupiah).

2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Banggai Kepulauan periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah–wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, semakin parah kemiskinannya.

Tabel 2. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Jiwa	18.380	17.540	16.700	16.330	16.070	15.500
2.	Persentase (%)	15,65	14,84	14,04	13,72	13,44	12,90

Sumber Data: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 sebesar 13,44%, dan berhasil ditekan hingga menjadi 12,90% pada Tahun 2023. Persentase penduduk miskin Kabupaten Banggai Kepulauan masih di bawah provinsi dan di atas nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2. 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,99	1,89	1,79	2,23	0,44
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	2,58	2,43	2,41	2,12	(0,29)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,67	1,56	1,53	(0,03)

Sumber Data: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Tabel 2. 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,47	0,42	0,35	0,63	0,28
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,77	0,64	0,68	0,54	(0,14)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,39	0,38	(0,01)

Sumber Data: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari:

1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai data BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Kepulauan dalam dua tahun terakhir sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,47	2,95	1,68	1,56	(0,12)
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	3,77	3,75	3,00	2,95	(0,05)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	7,07	6,49	5,86	5,32	(0,54)

Sumber Data: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 menurut data BPS Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan angka 1,56 atau turun 0,12% dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2022 sebesar 1,68%. Namun dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Kepulauan masih lebih rendah dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran terbuka Provinsi/Nasional yang sebesar 3% dan sebesar 5,86%.

2.2.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Dari sudut pandang ekonomi, ketimpangan perekonomian penduduk dapat diidentifikasi melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Indeks Gini. Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih mendetail:

1. Indeks Gini < 3 = Ketimpangan Rendah
2. 3 =<Indeks Gini <=5 = Ketimpangan Moderat
3. Indeks Gini >5 = Ketimpangan Tinggi

Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan Indeks Gini. Semakin tinggi Indeks Gini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin besar. Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Banggai Kepulauan dalam dua tahun terakhir sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5 Rasio Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Indeks Gini	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/ turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,298	0,279	0,280	0,272	(0,008)
2	Tingkat Provinsi	0,326	0,316	0,308	0,304	(0,004)
3	Tingkat Nasional	0,381	0,384	0,381	0,388	0,000

Sumber Data: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan yang diukur oleh *Gini Ratio*, adalah sebesar 0,272 poin, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,008% dibandingkan pada Tahun 2022 sebesar 0,280 poin. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan semakin berkurang.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pencapaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh proses pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari seberapa besar kualitas manusia di suatu wilayah. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standar hidup layak *(decent standard of living)*. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), IPM dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (<60)
2. Sedang (60≤IPM<70)
3. Tinggi (70≤IPM<80)
4. Sangat Tinggi (>80)

Sesuai dengan data BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Banggai Kepulauan dalam dua tahun terakhir sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1.	Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota	65,42	65,61	66,08	67,05	1,97
2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi	69,55	69,79	70,28	71,66	1,38
3	Indeks Pembangunan Manusia Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	1,48

Sumber Data: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 adalah sebesar 67,05 poin, atau naik 0,97 poin dibandingkan dengan pencapaian IPM Tahun 2022 sebesar 66,08 poin. IPM Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional yang sebesar 71,66 poin dan 74,39 poin.

Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Standar Hidup, berkaitan dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan bagaimana kemakmuran rakyat karena dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Uraian	Kabupaten/Kota				Provinsi Tahun 2023	Nasional Tahun 2023
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	PDRB (harga konstan 2010) (dalam ribu rupiah)	2.586,5	2.735,2	-	-	-	-
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,02	(2,36)	5,07	3,94	4,96	5,04

Sumber Data: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Selama kurun waktu satu tahun, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan sebesar 1,13% dibandingkan laju

pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 5,07%.

2.2.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Namun, apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation)*
   Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
2. Inflasi Sedang *(Galloping Inflation)*
   Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
3. Inflasi Berat *(High Inflation)*
   Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiper inflasi *(Hyperinflation)*
   Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai data dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan, tingkat inflasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 sebesar 4,15% dengan kategori ringan, terjadi penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 7,70%.

2.2.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan

Struktur perekonomian adalah suatu susunan elemen-elemen yang berfungsi untuk mengatur suatu rumah tangga. Struktur perekonomian dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Pengertian lebih luasnya adalah suatu bagian yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga negara tersebut. Sektor yang

dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dalam suatu perekonomian.

Dimaksud dalam sektor perekonomian yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor perekonomian yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga yang terbesar. Sektor perekonomian yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Struktur perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banggai Kepulauan

(*dalam miliaran rupiah*)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.836,92	1.958,20	2.190,23	2.362,05
2	Pertambangan dan Penggalian	32,47	34,23	38,47	44,01
3	Industri Pengolahan	104,85	110.76	119,78	122,93
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,60	0,64	0,71	0,75
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,50	4,82	5,16	5,41
6	Konstruksi	102,98	107,75	115,57	124,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	727,21	812,58	909.40	997,05
8	Transportasi dan Pergudangan	101,27	107,68	123,88	132,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,85	18,08	19,64	21,43
10	Informasi dan Komunikasi	128,41	140,48	149,28	159,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	103,05	124,47	141,21	144,09
12	Real Estate	68,49	70,71	76,54	86,81
13	Jasa Perusahaan	3,82	3,94	4,33	4,71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	218,31	229,92	243,92	256,34
15	Jasa Pendidikan	212,78	216,68	227,71	241,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113,05	126,41	135,92	149,11
17	Jasa Lainnya	58,91	62,70	67,03	72,37
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**3.833,54**	**4.130,11**	**4.568,79**	**4.925,53**

Sumber Data: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) menunjukkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 4.925.53 miliar rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan sebesar 356,74 juta rupiah atau 7,24% dari Tahun sebelumnya.

Berdasarkan PDRB ADHK Tahun dasar 2010, sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial serta jasa pendidikan merupakan empat sektor dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan sektor lainnya dalam perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2023, nilai PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan adalah yang terbesar, yaitu mencapai 2.362,05 miliar rupiah atau sebesar 47,96% dari total PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan. Di posisi kedua, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 20,24% atau 997,05 miliar rupiah di Tahun 2023. Di posisi ketiga, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial berkontribusi sebesar 5,20% atau 256,34 miliar rupiah. Selanjutnya, sektor Jasa Pendidikan menghasilkan PDRB sebesar 241,38 juta rupiah atau 4,90% dari total PDRB.

2.3 Kebijakan Keuangan

Paradigma baru pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian bersama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan Perundang-undangan yang sangat strategis yang menjadi landasan konstitusional bagi aparat penyelenggara negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Landasan hukum penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya dalam rangka memberi arahan khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk aspirasi yang

berkembang ditengah-tengah masyarakat. Struktur APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, sesuai dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, maka KUA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020-2024 serta KUA Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 mengacu kepada perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banggai

Kepulauan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023. Perubahan APBD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan laporan realisasi anggaran semester pertama Tahun 2023.

Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Menampung kembali kebijakan belanja atas keadaan mendesak yang telah ditetapkan dalam perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
2. Penyesuaian terhadap asumsi pendapatan daerah antara lain:
   a. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN-FKTP);
   b. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 untuk Gerakan Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (GERCEP GASKAN BERDAYA);
   c. Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, Rumah Sakit Bilabanggai dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
   d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun Anggaran 2023;
   e. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;
   f. Penyesuaian terhadap target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023;
   g. Asumsi kurang salur Dana Bagi Hasil Pusat sampai Tahun Anggaran 2022.
3. Penyesuaian terhadap belanja daerah antara lain:
   a. Realokasi anggaran dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
   b. Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN-FKTP);
   c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 untuk Gerakan Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (GERCEP GASKAN BERDAYA);

d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, Rumah Sakit Bilabanggai dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
e. Gaji dan tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan realisasi anggaran semester pertama Tahun 2023;
f. Dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun Anggaran 2023;
g. Penganggaran kembali Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2022;
h. Penambahan alokasi anggaran *Universal Health Coverage* (UHC) Tahun 2023;
i. Penyesuaian belanja Bantuan Operasional Sekolah;
j. Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pemilu bagi KPUD, BAWASLU, TNI dan POLRI;
k. Pengalokasian anggaran penanganan Stunting, Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, belanja jasa tenaga kontrak daerah bulan November dan Desember 2023, belanja jasa dokter *internship*, seleksi penerimaan calon ASN serta Penyesuaian belanja terhadap pemenuhan target capaian kinerja untuk mendukung prioritas daerah yang dialokasikan pada Perubahan APBD.

4. Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II; dan
5. Penyesuaian terhadap pembiayaan daerah pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah.

Secara garis besar rencana target dan realisasi dari struktur APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Rencana Target dan Realisasi dari Struktur APBD

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	860.045.753.599,00	827.853.187.730,31	96,26
2	Belanja	776.563.669.148,00	685.428.394.947,21	88,26
3	Transfer	160.373.599.664,00	163.604.370.514,00	102,01

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	**Surplus (Defisit)**	**(76.891.515.213,00)**	**(21.179.577.730,90)**	**27,54**
5	Pembiayaan Neto	76.891.515.213,00	76.773.513.365,49	99,85
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**0,00**	**55.593.935.634,59**	**0,00**

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Kebijakan atas Pendapatan, belanja dan pembiayaan diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Pendapatan Daerah

2.3.1.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan. Kemandirian APBD berkaitan erat dengan pendapatan daerah, karena semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat. Secara umum pendapatan daerah dipengaruhi oleh investasi pemerintah untuk mendukung sarana dan prasarana jasa pelayanan kepada masyarakat, terutama jasa layanan yang menghasilkan retribusi daerah.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dan penyesuaian berdasarkan evaluasi atas realisasi semester 1 (satu) serta analisis keadaan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap asumsi pendapatan daerah sebagaimana telah ditampung dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap :
   a. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN-FKTP) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023;
   b. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 untuk Gerakan Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (GERCEP GASKAN BERDAYA) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 900.1.3/276/BPKAD-G.ST/2023.
   c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) JKN-FKTP Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil audit BPK.

2. Penyesuaian target Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Trikora Salakan dan Puskesmas berdasarkan realisasi Januari - Juni Tahun Anggaran 2023.
3. Realokasi target retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Trikora Salakan dan Puskesmas menjadi Pendapatan BLUD, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
4. Penyesuaian target Pendapatan JKN-FKTP berdasarkan realisasi Januari - Juni Tahun Anggaran 2023.
5. Realokasi target Pendapatan JKN-FKTP pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menjadi Pendapatan BLUD.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023.
7. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 900.1.14.3/23/BAPENDA.G-ST/2023 tentang Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
8. Alokasi kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 900.1.14.3/81/BAPENDA.G-ST/2023 tentang Alokasi kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
9. Penyesuaian terhadap komponen penerimaan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berdasarkan realisasi yang ada.
10. Penyesuaian penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari asumsi kurang salur Dana Bagi Hasil.
11. Tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023.
12. Tambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan/atau rekening kas OPD yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran. Struktur pendapatan

daerah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :
   a. Transfer Pemerintah Pusat;
   b. Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
   a. Hibah;
   b. Dana Darurat; dan/atau
   c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Dengan diterapkan Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah tersebut, berdampak pada capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2023. Target dan realisasi jenis-jenis pendapatan daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   Pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp41.060.725.094,00 dan direalisasikan sebesar Rp41.330.438.640,31 atau 100,66% dari anggarannya.
2. Pendapatan Transfer
   Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp815.007.805.657,00 dan direalisasikan sebesar Rp783.226.137.466,00 atau 96,10% dari anggarannya.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
   Lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp3.977.222.848,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.296.611.624,00 atau 82,89% dari anggarannya.

2.3.2 Belanja Daerah

2.3.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana mengelola Belanja Daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat Banggai Kepulauan dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat asas, efisien, efektif, transparan, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat. Proses perencanaan dan penganggaran melibatkan banyak pihak sebagai pemangku kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat terwujud secara maksimal.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan,

yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan pemerintahan pilihan;
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
7. Unsur kewilayahan;
8. Unsur pemerintahan umum.

Struktur belanja Kabupaten Banggai Kepulauan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal

   Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

   a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
   c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

3. Belanja Tidak Terduga

   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah Tahun-Tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

   Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode satu Tahun anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan belanja daerah disusun berdasarkan dengan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan belanja merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam mengupayakan target capaian prioritas anggaran daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang terkait kebijakan anggaran APBD yang lebih fokus terhadap sasaran program kegiatan prioritas yang berorientasi produktif dan memiliki efektivitas belanja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta melaksanakan kebijakan pemerintah pusat ketentuan. Kebijakan terkait dengan perubahan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 antara lain :

1. Menampung kembali kebijakan belanja atas keadaan mendesak yang telah ditetapkan dalam perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, sebagai berikut:

a. Pengalihan anggaran kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA) dari Dinas Pemuda dan Olahraga ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta penambahan anggaran pada Dinas Perhubungan untuk gaji dan tunjangan Calon Pegawai Negeri Sipil 2023 melalui sekolah kedinasan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;

b. Realokasi anggaran dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dengan penyesuaian pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN-FKTP), penganggaran kembali sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) JKN-FKTP Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 900.1.3/276/BPKAD-G.ST/2023 tentang Rincian dan Besaran bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 untuk Gerakan Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (GERCEP GASKAN BERDAYA) berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Menampung kembali kebijakan belanja atas kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) antara lain:

a. SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik sampai dengan Tahun 2022;

b. SiLPA dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Negeri Tahun 2022;

c. Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) dan kegiatan-kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2023 (Luncuran);

d. Utang jasa pelayanan kesehatan sampai dengan Tahun 2022;

e. SiLPA Dana Insentif Daerah Tahun 2022;

f. SiLPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022.

3. Penyesuaian belanja Gaji dan Tunjangan berdasarkan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2023;
4. Penyesuaian belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
5. Penyesuaian belanja dalam rangka Pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada:
   a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 299 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Trikora Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
   b. Rumah Sakit Pratama Bilabanggai berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 300 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Bilabanggai di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
   c. Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 301 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Penyesuaian belanja program jaminan kesehatan untuk mencapai kepesertaan *Universal Health Coverage* (UHC);
7. Penyesuaian belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023.
8. Penyesuaian belanja Bantuan Operasional Sekolah Kinerja bagi sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak dan Sekolah yang memiliki prestasi serta bagi sekolah yang memiliki Kemajuan Terbaik Tahun 2023;
9. Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pemilu bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum, TNI dan POLRI;

10. Penyesuaian belanja berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi anggaran semester pertama Tahun Anggaran 2023, yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, Program, Kegiatan, dan jenis belanja;
11. Pengalokasian anggaran penanganan Stunting, Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, belanja jasa tenaga kontrak daerah bulan November dan Desember 2023, belanja jasa dokter internship, seleksi penerimaan calon ASN serta penyesuaian belanja terhadap pemenuhan target capaian kinerja untuk mendukung prioritas daerah yang dialokasikan pada Perubahan APBD.

2.3.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengklasifikasikan belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Target dan realisasi jenis-jenis belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp624.319.488.894,00 dan direalisasikan sebesar Rp547.076.049.093,21 atau 87,63% dari anggarannya.
2. Belanja Modal

   Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp151.052.856.292,00 dan direalisasikan sebesar Rp137.246.465.854,00 atau 90,86% dari anggarannya.
3. Belanja Tak Terduga

   Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp1.191.363.962,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.105.880.000,00 atau 92,82% dari anggarannya.
4. Belanja Transfer

   Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp160.373.599.664,00 dan direalisasikan sebesar Rp163.604.370.514,00 atau 102,01% dari anggarannya.

2.3.3 Pengelolaan Pembiayaan

2.3.3.1 Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah,

organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada Perangkat Daerah selaku SKPKD. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan Anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; dan
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

Struktur Pembiayaan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
   a. SiLPA;
   b. Pencairan Dana Cadangan;
   c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
   e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
   a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
   b. Penyertaan Modal Daerah;
   c. Pembentukan Dana Cadangan;
   d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembiayaan Neto

2.3.3.2 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2023 masih dititikberatkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA) serta

efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan tahun lalu. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2023 pada sisi SiLPA ditargetkan nol.

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diasumsikan sebesar Rp80.251.515.213,00 bertambah sebesar Rp31.296.094.001,00 atau naik 63,93% dari proyeksi awal pada APBD Induk sebesar Rp48.955.421.212,00. Penyesuaian tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2.3.3.3 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pada Tahun 2023 Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp3.360.000.000,00 yang diarahkan penggunaannya pada Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2019 dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2019.

Penyertaan modal tersebut tidak mengalami perubahan dari target awal yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

2.3.3.4 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah menurut APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

   Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp80.251.515.213,00 dan direalisasikan sebesar Rp80.133.513.365,49 atau 99,85% dari nilai anggaran.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

   Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.360.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.360.000.000,00 atau 100% dari nilai anggaran.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan secara ringkas sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp860.045.753.599,00 dan telah terealisasi sebesar Rp827.853.187.730,31 atau 96,26%, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Organisasi

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
I.	**PENDAPATAN DAERAH**	**860.045.753.599,00**	**827.853.187.730,31**	**(32.192.565.868,69)**	**96,26**
1.	**Urusan Wajib Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	**24.709.554.010,00**	**23.390.409.795,76**	**(1.319.144.214,24)**	**94,66**
1.1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	4.736.488,76	4.736.488,76	0,00
1.2.	Dinas Kesehatan	24.494.554.010,00	23.072.558.568,00	(1.421.995.442,00)	94,19
1.3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	215.000.000,00	313.114.739,00	98.114.739,00	145,63
2.	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	**1.000.818.319,00**	**888.978.100,00**	**(111.840.219,00)**	**88,83**
2.1.	Dinas Lingkungan Hidup	385.000.000,00	330.069.000,00	(54.931.000,00)	85,73
2.2.	Dinas Perhubungan	293.971.071,00	285.409.100,00	(8.561.971,00)	97,09
2.3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00
2.4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	301.847.248,00	273.500.000,00	(28.347.248,00)	90,61
3.	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**120.000.000,00**	**78.768.000,00**	**(41.232.000,00)**	**65,64**
3.1.	Dinas Perikanan	105.000.000,00	56.811.000,00	(48.189.000,00)	54,11
3.2.	Dinas Pertanian	15.000.000,00	21.957.000,00	6.957.000,00	146,38
4.	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**834.215.381.270,00**	**803.495.031.834,55**	**(30.720.349.435,45)**	**96,32**
4.1.	Badan Pendapatan Daerah	6.453.922.837,00	6.789.705.727,15	335.782.890,15	105,20
4.2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	827.761.458.433,00	796.705.326.107,40	(31.056.132.325,60)	96,25
	TOTAL	**860.045.753.599,00**	**827.853.187.730,31**	**(32.192.565.868,69)**	**96,26**

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp936.937.268.812,00 dan telah terealisasi sebesar Rp849.032.765.461,21 atau 90,62%, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
I.	**BELANJA**	**936.937.268.812,00**	**849.032.765.461,21**	**(87.904.503.350,79)**	**90,62**
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	482.998.631.688,00	428.225.693.203,00	(54.772.938.485,00)	88,66
1.1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	225.566.447.209,00	196.287.121.924,00	(29.279.325.285,00)	87,02
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	225.566.447.209,00	215.429.870.653,21	(10.136.576.555,79)	95,51
	BELANJA DAERAH	225.566.447.209,00	215.429.870.653,21	(10.136.576.555,79)	95,51
	BELANJA OPERASI	173.444.669.372,00	166.397.387.527,21	(7.047.281.844,79)	95,94
	Belanja Pegawai	144.529.563.217,00	139.571.691.698,00	(4.957.871.519,00)	96,57
	Belanja Barang dan Jasa	23.218.840.555,00	21.350.273.069,21	(1.868.567.485,79)	91,95
	Belanja Hibah	5.696.265.600,00	5.475.422.760,00	(220.842.840,00)	96,12
	BELANJA MODAL	52.121.777.837,00	49.032.483.126,00	(3.089.294.711,00)	94,07
	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	99.906.000,00	(94.000,00)	99,91
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.679.756.349,00	7.521.302.810,00	(158.453.539,00)	97,94
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.268.811.700,00	41.346.534.716,00	(2.922.276.984,00)	93,40
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	73.209.788,00	64.739.600,00	(8.470.188,00)	88,43
1.1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	140.712.071.742,00	125.704.215.510,00	(15.007.856.232,00)	89,33
	DINAS KESEHATAN	140.712.071.742,00	125.704.215.510,00	(15.007.856.232,00)	89,33
	BELANJA DAERAH	140.712.071.742,00	125.704.215.510,00	(15.007.856.232,00)	89,33
	BELANJA OPERASI	132.254.020.837,00	118.844.064.057,00	(13.409.956.780,00)	89,86
	Belanja Pegawai	58.090.190.501,00	55.500.671.404,00	(2.589.519.097,00)	95,54
	Belanja Barang dan Jasa	73.018.830.336,00	62.273.392.653,00	(10.745.437.683,00)	85,28
	Belanja Hibah	1.145.000.000,00	1.070.000.000,00	(75.000.000,00)	93,45
	BELANJA MODAL	8.458.050.905,00	6.860.151.453,00	(1.597.899.452,00)	81,11
	Belanja Modal Tanah	145.889.000,00	145.889.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.268.960.583,00	1.615.037.577,00	(653.923.006,00)	71,18
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.589.146.322,00	4.645.332.876,00	(943.813.446,00)	83,11
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	454.055.000,00	453.892.000,00	(163.000,00)	99,96
1.1.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	88.302.365.630,00	78.899.227.734,00	(9.403.137.896,00)	89,35
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	88.302.365.630,00	78.899.227.734,00	(9.403.137.896,00)	89,35
	BELANJA DAERAH	88.302.365.630,00	78.899.227.734,00	(9.403.137.896,00)	89,35

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	BELANJA OPERASI	17.395.633.530,00	15.770.299.553,00	(1.625.333.977,00)	90,66
	Belanja Pegawai	5.608.199.600,00	5.513.987.835,00	(94.211.765,00)	98,32
	Belanja Barang dan Jasa	11.683.033.930,00	10.151.961.718,00	(1.531.072.212,00)	86,89
	Belanja Bantuan Sosial	104.400.000,00	104.350.000,00	(50.000,00)	99,95
	BELANJA MODAL	70.906.732.100,00	63.128.928.181,00	(7.777.803.919,00)	89,03
	Belanja Modal Tanah	3.875.131.000,00	3.066.057.908,00	(809.073.092,00)	79,12
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	602.581.000,00	600.930.000,00	(1.651.000,00)	99,73
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.300.808.000,00	6.630.814.273,00	(669.993.727,00)	90,82
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.128.212.100,00	52.831.126.000,00	(6.297.086.100,00)	89,35
1.1.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.486.893.513,00	7.938.409.413,00	(548.484.100,00)	93,54
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8.486.893.513,00	7.938.409.413,00	(548.484.100,00)	93,54
	BELANJA DAERAH	8.486.893.513,00	7.938.409.413,00	(548.484.100,00)	93,54
	BELANJA OPERASI	4.761.816.533,00	4.441.772.213,00	(320.044.320,00)	93,28
	Belanja Pegawai	2.528.686.308,00	2.486.970.696,00	(41.715.612,00)	98,35
	Belanja Barang dan Jasa	2.171.920.225,00	1.954.801.517,00	(217.118.708,00)	90,00
	Belanja Bantuan Sosial	61.210.000,00	0,00	(61.210.000,00)	0,00
	BELANJA MODAL	3.725.076.980,00	3.496.637.200,00	(228.439.780,00)	93,87
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.781.980,00	132.781.000,00	(980,00)	100,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.592.295.000,00	3.363.856.200,00	(228.438.800,00)	93,64
1.1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.403.364.179,00	13.003.201.758,00	(400.162.421,00)	97,01
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.443.146.387,00	8.176.262.738,00	(266.883.649,00)	96,84
	BELANJA DAERAH	8.443.146.387,00	8.176.262.738,00	(266.883.649,00)	96,84
	BELANJA OPERASI	8.190.754.387,00	7.924.154.738,00	(266.599.649,00)	96,75
	Belanja Pegawai	2.955.284.102,00	2.864.038.255,00	(91.245.847,00)	96,91
	Belanja Barang dan Jasa	5.235.470.285,00	5.060.116.483,00	(175.353.802,00)	96,65
	BELANJA MODAL	252.392.000,00	252.108.000,00	(284.000,00)	99,89
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.392.000,00	252.108.000,00	(284.000,00)	99,89
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.960.217.792,00	4.826.939.020,00	(133.278.772,00)	97,31
	BELANJA DAERAH	4.960.217.792,00	4.826.939.020,00	(133.278.772,00)	97,31
	BELANJA OPERASI	3.199.217.792,00	3.073.083.020,00	(126.134.772,00)	96,06

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	Belanja Pegawai	1.660.751.792,00	1.616.892.349,00	(43.859.443,00)	97,36
	Belanja Barang dan Jasa	1.538.466.000,00	1.456.190.671,00	(82.275.329,00)	94,65
	BELANJA MODAL	1.761.000.000,00	1.753.856.000,00	(7.144.000,00)	99,59
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.000.000,00	356.966.000,00	(3.034.000,00)	99,16
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	79.800.000,00	(200.000,00)	99,75
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.321.000.000,00	1.317.090.000,00	(3.910.000,00)	99,70
1.1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.527.489.415,00	6.393.516.864,00	(133.972.551,00)	97,95
	DINAS SOSIAL	6.527.489.415,00	6.393.516.864,00	(133.972.551,00)	97,95
	BELANJA DAERAH	6.527.489.415,00	6.393.516.864,00	(133.972.551,00)	97,95
	BELANJA OPERASI	6.527.489.415,00	6.393.516.864,00	(133.972.551,00)	97,95
	Belanja Pegawai	1.972.887.340,00	1.930.470.568,00	(42.416.772,00)	97,85
	Belanja Barang dan Jasa	1.705.547.075,00	1.671.051.296,00	(34.495.779,00)	97,98
	Belanja Bantuan Sosial	2.849.055.000,00	2.791.995.000,00	(57.060.000,00)	98,00
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	61.798.792.497,00	58.374.380.585,00	(3.424.411.912,00)	94,46
1.2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.075.962.540,00	3.009.752.214,00	(66.210.326,00)	97,85
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	3.075.962.540,00	3.009.752.214,00	(66.210.326,00)	97,85
	BELANJA DAERAH	3.075.962.540,00	3.009.752.214,00	(66.210.326,00)	97,85
	BELANJA OPERASI	2.629.842.540,00	2.563.632.214,00	(66.210.326,00)	97,48
	Belanja Pegawai	1.573.405.600,00	1.534.688.274,00	(38.717.326,00)	97,54
	Belanja Barang dan Jasa	984.436.940,00	956.943.940,00	(27.493.000,00)	97,21
	Belanja Hibah	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	446.120.000,00	446.120.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.120.000,00	34.120.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	412.000.000,00	412.000.000,00	0,00	100,00
1.2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.628.800.000,00	1.276.047.856,00	(352.752.144,00)	78,34
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.628.800.000,00	1.276.047.856,00	(352.752.144,00)	78,34
	BELANJA DAERAH	1.628.800.000,00	1.276.047.856,00	(352.752.144,00)	78,34
	BELANJA OPERASI	1.628.800.000,00	1.276.047.856,00	(352.752.144,00)	78,34
	Belanja Barang dan Jasa	1.479.800.000,00	1.127.347.856,00	(352.452.144,00)	76,18

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	49.000.000,00	48.700.000,00	(300.000,00)	99,39
1.2.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.796.331.742,00	3.725.248.026,00	(71.083.716,00)	98,13
	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.796.331.742,00	3.725.248.026,00	(71.083.716,00)	98,13
	BELANJA DAERAH	3.796.331.742,00	3.725.248.026,00	(71.083.716,00)	98,13
	BELANJA OPERASI	3.762.661.742,00	3.691.578.026,00	(71.083.716,00)	98,11
	Belanja Pegawai	2.105.576.142,00	2.053.991.422,00	(51.584.720,00)	97,55
	Belanja Barang dan Jasa	1.075.237.600,00	1.055.738.604,00	(19.498.996,00)	98,19
	Belanja Bantuan Sosial	581.848.000,00	581.848.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	33.670.000,00	33.670.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.670.000,00	33.670.000,00	0,00	100,00
1.2.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	382.500.000,00	380.753.200,00	(1.746.800,00)	99,54
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	382.500.000,00	380.753.200,00	(1.746.800,00)	99,54
	BELANJA DAERAH	382.500.000,00	380.753.200,00	(1.746.800,00)	99,54
	BELANJA OPERASI	362.500.000,00	360.753.200,00	(1.746.800,00)	99,52
	Belanja Barang dan Jasa	362.500.000,00	360.753.200,00	(1.746.800,00)	99,52
	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
1.2.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4.491.875.269,00	4.400.430.312,00	(91.444.957,00)	97,96
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.491.875.269,00	4.400.430.312,00	(91.444.957,00)	97,96
	BELANJA DAERAH	4.491.875.269,00	4.400.430.312,00	(91.444.957,00)	97,96
	BELANJA OPERASI	4.452.825.769,00	4.362.230.312,00	(90.595.457,00)	97,97
	Belanja Pegawai	1.858.039.234,00	1.788.994.923,00	(69.044.311,00)	96,28
	Belanja Barang dan Jasa	2.594.786.535,00	2.573.235.389,00	(21.551.146,00)	99,17
	BELANJA MODAL	39.049.500,00	38.200.000,00	(849.500,00)	97,82
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.049.500,00	38.200.000,00	(849.500,00)	97,82
1.2.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.986.870.122,00	3.867.504.231,00	(119.365.891,00)	97,01
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.986.870.122,00	3.867.504.231,00	(119.365.891,00)	97,01
	BELANJA DAERAH	3.986.870.122,00	3.867.504.231,00	(119.365.891,00)	97,01
	BELANJA OPERASI	3.621.380.497,00	3.502.015.231,00	(119.365.266,00)	96,70

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	Belanja Pegawai	2.530.287.388,00	2.458.150.141,00	(72.137.247,00)	97,15
	Belanja Barang dan Jasa	1.091.093.109,00	1.043.865.090,00	(47.228.019,00)	95,67
	BELANJA MODAL	365.489.625,00	365.489.000,00	(625,00)	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	365.489.625,00	365.489.000,00	(625,00)	100,00
1.2.7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.428.591.645,00	4.937.523.260,00	(491.068.385,00)	90,95
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.428.591.645,00	4.937.523.260,00	(491.068.385,00)	90,95
	BELANJA DAERAH	5.428.591.645,00	4.937.523.260,00	(491.068.385,00)	90,95
	BELANJA OPERASI	5.357.180.525,00	4.866.477.260,00	(490.703.265,00)	90,84
	Belanja Pegawai	1.847.271.105,00	1.772.944.825,00	(74.326.280,00)	95,98
	Belanja Barang dan Jasa	3.509.909.420,00	3.093.532.435,00	(416.376.985,00)	88,14
	BELANJA MODAL	71.411.120,00	71.046.000,00	(365.120,00)	99,49
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.411.120,00	71.046.000,00	(365.120,00)	99,49
1.2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.689.336.860,00	7.439.038.340,00	(250.298.520,00)	96,74
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.689.336.860,00	7.439.038.340,00	(250.298.520,00)	96,74
	BELANJA DAERAH	7.689.336.860,00	7.439.038.340,00	(250.298.520,00)	96,74
	BELANJA OPERASI	7.689.336.860,00	7.439.038.340,00	(250.298.520,00)	96,74
	Belanja Pegawai	2.928.961.860,00	2.790.406.519,00	(138.555.341,00)	95,27
	Belanja Barang dan Jasa	4.760.375.000,00	4.648.631.821,00	(111.743.179,00)	97,65
1.2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	9.250.633.175,00	8.878.116.044,00	(372.517.131,00)	95,97
	DINAS PERHUBUNGAN	9.250.633.175,00	8.878.116.044,00	(372.517.131,00)	95,97
	BELANJA DAERAH	9.250.633.175,00	8.878.116.044,00	(372.517.131,00)	95,97
	BELANJA OPERASI	6.588.538.255,00	6.402.436.044,00	(186.102.211,00)	97,18
	Belanja Pegawai	2.677.565.244,00	2.602.077.403,00	(75.487.841,00)	97,18
	Belanja Barang dan Jasa	3.910.973.011,00	3.800.358.641,00	(110.614.370,00)	97,17
	BELANJA MODAL	2.662.094.920,00	2.475.680.000,00	(186.414.920,00)	93,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	512.494.920,00	512.380.000,00	(114.920,00)	99,98
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	348.000.000,00	347.880.000,00	(120.000,00)	99,97
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.801.600.000,00	1.615.420.000,00	(186.180.000,00)	89,67
1.2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.640.900.820,00	4.565.930.496,00	(74.970.324,00)	98,38

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.640.900.820,00	4.565.930.496,00	(74.970.324,00)	98,38
	BELANJA DAERAH	4.640.900.820,00	4.565.930.496,00	(74.970.324,00)	98,38
	BELANJA OPERASI	4.109.246.820,00	4.034.276.496,00	(74.970.324,00)	98,18
	Belanja Pegawai	1.629.325.120,00	1.567.246.671,00	(62.078.449,00)	96,19
	Belanja Barang dan Jasa	2.479.921.700,00	2.467.029.825,00	(12.891.875,00)	99,48
	BELANJA MODAL	531.654.000,00	531.654.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	531.654.000,00	531.654.000,00	0,00	100,00
1.2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.541.157.790,00	3.385.583.799,00	(155.573.991,00)	95,61
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	3.541.157.790,00	3.385.583.799,00	(155.573.991,00)	95,61
	BELANJA DAERAH	3.541.157.790,00	3.385.583.799,00	(155.573.991,00)	95,61
	BELANJA OPERASI	3.446.157.790,00	3.290.845.799,00	(155.311.991,00)	95,49
	Belanja Pegawai	2.452.380.000,00	2.388.264.173,00	(64.115.827,00)	97,39
	Belanja Barang dan Jasa	993.777.790,00	902.581.626,00	(91.196.164,00)	90,82
	BELANJA MODAL	95.000.000,00	94.738.000,00	(262.000,00)	99,72
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.000.000,00	94.738.000,00	(262.000,00)	99,72
1.2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.733.407.120,00	3.683.541.994,00	(49.865.126,00)	98,66
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.733.407.120,00	3.683.541.994,00	(49.865.126,00)	98,66
	BELANJA DAERAH	3.733.407.120,00	3.683.541.994,00	(49.865.126,00)	98,66
	BELANJA OPERASI	3.694.614.824,00	3.644.749.698,00	(49.865.126,00)	98,65
	Belanja Pegawai	2.619.259.704,00	2.575.793.073,00	(43.466.631,00)	98,34
	Belanja Barang dan Jasa	1.075.355.120,00	1.068.956.625,00	(6.398.495,00)	99,40
	BELANJA MODAL	38.792.296,00	38.792.296,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.792.296,00	38.792.296,00	0,00	100,00
1.2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.613.348.573,00	3.312.002.469,00	(301.346.104,00)	91,66
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.613.348.573,00	3.312.002.469,00	(301.346.104,00)	91,66
	BELANJA DAERAH	3.613.348.573,00	3.312.002.469,00	(301.346.104,00)	91,66
	BELANJA OPERASI	3.478.348.573,00	3.183.202.469,00	(295.146.104,00)	91,51
	Belanja Pegawai	2.154.036.078,00	2.054.273.929,00	(99.762.149,00)	95,37
	Belanja Barang dan Jasa	504.012.495,00	378.628.540,00	(125.383.955,00)	75,12
	Belanja Hibah	820.300.000,00	750.300.000,00	(70.000.000,00)	91,47

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	BELANJA MODAL	135.000.000,00	128.800.000,00	(6.200.000,00)	95,41
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.000.000,00	128.800.000,00	(6.200.000,00)	95,41
1.2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.762.220.000,00	1.824.024.000,00	(938.196.000,00)	66,03
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.762.220.000,00	1.824.024.000,00	(938.196.000,00)	66,03
	BELANJA DAERAH	2.762.220.000,00	1.824.024.000,00	(938.196.000,00)	66,03
	BELANJA OPERASI	1.039.370.000,00	839.909.000,00	(199.461.000,00)	80,81
	Belanja Barang dan Jasa	1.039.370.000,00	839.909.000,00	(199.461.000,00)	80,81
	BELANJA MODAL	1.722.850.000,00	984.115.000,00	(738.735.000,00)	57,12
	Belanja Modal Tanah	430.000.000,00	106.997.000,00	(323.003.000,00)	24,88
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.270.000.000,00	854.268.000,00	(415.732.000,00)	67,27
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.850.000,00	22.850.000,00	0,00	100,00
1.2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.576.856.841,00	3.491.060.344,00	(85.796.497,00)	97,60
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.576.856.841,00	3.491.060.344,00	(85.796.497,00)	97,60
	BELANJA DAERAH	3.576.856.841,00	3.491.060.344,00	(85.796.497,00)	97,60
	BELANJA OPERASI	3.283.813.156,00	3.198.028.659,00	(85.784.497,00)	97,39
	Belanja Pegawai	2.282.234.866,00	2.226.934.428,00	(55.300.438,00)	97,58
	Belanja Barang dan Jasa	1.001.578.290,00	971.094.231,00	(30.484.059,00)	96,96
	BELANJA MODAL	293.043.685,00	293.031.685,00	(12.000,00)	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.645.685,00	252.645.685,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	40.398.000,00	40.386.000,00	(12.000,00)	99,97
1.2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	200.000.000,00	197.824.000,00	(2.176.000,00)	98,91
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	200.000.000,00	197.824.000,00	(2.176.000,00)	98,91
	BELANJA DAERAH	200.000.000,00	197.824.000,00	(2.176.000,00)	98,91
	BELANJA OPERASI	119.218.000,00	117.043.000,00	(2.175.000,00)	98,18
	Belanja Barang dan Jasa	119.218.000,00	117.043.000,00	(2.175.000,00)	98,18
	BELANJA MODAL	80.782.000,00	80.781.000,00	(1.000,00)	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.782.000,00	80.781.000,00	(1.000,00)	100,00
1.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26.879.298.789,00	24.950.372.137,00	(1.928.926.652,00)	92,82
1.3.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.328.468.108,00	10.215.473.032,00	(1.112.995.076,00)	90,18
	DINAS PERIKANAN	11.328.468.108,00	10.215.473.032,00	(1.112.995.076,00)	90,18

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	BELANJA DAERAH	11.328.468.108,00	10.215.473.032,00	(1.112.995.076,00)	90,18
	BELANJA OPERASI	11.182.468.108,00	10.119.473.032,00	(1.062.995.076,00)	90,49
	Belanja Pegawai	2.496.879.708,00	2.416.541.989,00	(80.337.719,00)	96,78
	Belanja Barang dan Jasa	2.867.088.400,00	2.280.678.902,00	(586.409.498,00)	79,55
	Belanja Hibah	5.818.500.000,00	5.422.252.141,00	(396.247.859,00)	93,19
	BELANJA MODAL	146.000.000,00	96.000.000,00	(50.000.000,00)	65,75
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	50,00
1.3.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.718.992.647,00	2.567.913.783,00	(151.078.864,00)	94,44
	DINAS PARIWISATA	2.718.992.647,00	2.567.913.783,00	(151.078.864,00)	94,44
	BELANJA DAERAH	2.718.992.647,00	2.567.913.783,00	(151.078.864,00)	94,44
	BELANJA OPERASI	2.687.242.541,00	2.537.368.320,00	(149.874.221,00)	94,42
	Belanja Pegawai	1.662.112.770,00	1.591.451.542,00	(70.661.228,00)	95,75
	Belanja Barang dan Jasa	1.025.129.771,00	945.916.778,00	(79.212.993,00)	92,27
	BELANJA MODAL	31.750.106,00	30.545.463,00	(1.204.643,00)	96,21
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.750.106,00	30.545.463,00	(1.204.643,00)	96,21
1.3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	11.262.325.434,00	10.624.155.974,00	(638.169.460,00)	94,33
	DINAS PERTANIAN	11.262.325.434,00	10.624.155.974,00	(638.169.460,00)	94,33
	BELANJA DAERAH	11.262.325.434,00	10.624.155.974,00	(638.169.460,00)	94,33
	BELANJA OPERASI	10.616.243.944,00	10.046.305.974,00	(569.937.970,00)	94,63
	Belanja Pegawai	6.639.588.878,00	6.550.239.184,00	(89.349.694,00)	98,65
	Belanja Barang dan Jasa	2.841.270.066,00	2.669.092.790,00	(172.177.276,00)	93,94
	Belanja Hibah	1.135.385.000,00	826.974.000,00	(308.411.000,00)	72,84
	BELANJA MODAL	646.081.490,00	577.850.000,00	(68.231.490,00)	89,44
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.408.490,00	124.208.000,00	(1.200.490,00)	99,04
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	242.403.000,00	242.203.000,00	(200.000,00)	99,92
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	278.270.000,00	211.439.000,00	(66.831.000,00)	75,98
1.3.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.309.886.000,00	1.308.380.000,00	(1.506.000,00)	99,89
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1.309.886.000,00	1.308.380.000,00	(1.506.000,00)	99,89
	BELANJA DAERAH	1.309.886.000,00	1.308.380.000,00	(1.506.000,00)	99,89

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	BELANJA OPERASI	1.309.886.000,00	1.308.380.000,00	(1.506.000,00)	99,89
	Belanja Barang dan Jasa	1.309.886.000,00	1.308.380.000,00	(1.506.000,00)	99,89
1.3.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	224.786.600,00	199.609.348,00	(25.177.252,00)	88,80
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	224.786.600,00	199.609.348,00	(25.177.252,00)	88,80
	BELANJA DAERAH	224.786.600,00	199.609.348,00	(25.177.252,00)	88,80
	BELANJA OPERASI	205.444.600,00	180.789.348,00	(24.655.252,00)	88,00
	Belanja Barang dan Jasa	205.444.600,00	180.789.348,00	(24.655.252,00)	88,00
	BELANJA MODAL	19.342.000,00	18.820.000,00	(522.000,00)	97,30
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.342.000,00	18.820.000,00	(522.000,00)	97,30
1.3.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	34.840.000,00	34.840.000,00	0,00	100,00
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	34.840.000,00	34.840.000,00	0,00	100,00
	BELANJA DAERAH	34.840.000,00	34.840.000,00	0,00	100,00
	BELANJA OPERASI	34.840.000,00	34.840.000,00	0,00	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	34.840.000,00	34.840.000,00	0,00	100,00
1.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	100.311.494.723,00	66.688.482.341,00	(33.623.012.382,00)	66,48
1.4.1	SEKRETARIAT DAERAH	72.856.760.778,00	42.167.445.063,00	(30.689.315.715,00)	57,88
	SEKRETARIAT DAERAH	72.856.760.778,00	42.167.445.063,00	(30.689.315.715,00)	57,88
	BELANJA DAERAH	72.856.760.778,00	42.167.445.063,00	(30.689.315.715,00)	57,88
	BELANJA OPERASI	70.495.113.278,00	39.829.365.563,00	(30.665.747.715,00)	56,50
	Belanja Pegawai	52.441.752.243,00	22.111.657.733,00	(30.330.094.510,00)	42,16
	Belanja Barang dan Jasa	16.745.861.035,00	16.410.207.830,00	(335.653.205,00)	98,00
	Belanja Hibah	1.262.500.000,00	1.262.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	2.361.647.500,00	2.338.079.500,00	(23.568.000,00)	99,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.399.647.500,00	1.379.922.500,00	(19.725.000,00)	98,59
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	962.000.000,00	958.157.000,00	(3.843.000,00)	99,60
1.4.2	SEKRETARIAT DPRD	27.454.733.945,00	24.521.037.278,00	(2.933.696.667,00)	89,31
	SEKRETARIAT DPRD	27.454.733.945,00	24.521.037.278,00	(2.933.696.667,00)	89,31
	BELANJA DAERAH	27.454.733.945,00	24.521.037.278,00	(2.933.696.667,00)	89,31
	BELANJA OPERASI	26.504.408.945,00	23.587.721.278,00	(2.916.687.667,00)	89,00

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	Belanja Pegawai	11.783.224.787,00	11.476.019.286,00	(307.205.501,00)	97,39
	Belanja Barang dan Jasa	14.721.184.158,00	12.111.701.992,00	(2.609.482.166,00)	82,27
	BELANJA MODAL	950.325.000,00	933.316.000,00	(17.009.000,00)	98,21
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	719.525.000,00	704.816.000,00	(14.709.000,00)	97,96
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	216.900.000,00	214.600.000,00	(2.300.000,00)	98,94
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	100,00
1.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	204.451.759.173,00	205.258.942.568,00	807.183.395,00	100,39
1.5.1	PERENCANAAN	7.430.589.524,00	7.152.315.820,00	(278.273.704,00)	96,26
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	7.430.589.524,00	7.152.315.820,00	(278.273.704,00)	96,26
	BELANJA DAERAH	7.430.589.524,00	7.152.315.820,00	(278.273.704,00)	96,26
	BELANJA OPERASI	7.147.993.946,00	6.870.673.020,00	(277.320.926,00)	96,12
	Belanja Pegawai	3.538.926.614,00	3.465.895.298,00	(73.031.316,00)	97,94
	Belanja Barang dan Jasa	3.609.067.332,00	3.404.777.722,00	(204.289.610,00)	94,34
	BELANJA MODAL	282.595.578,00	281.642.800,00	(952.778,00)	99,66
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	282.595.578,00	281.642.800,00	(952.778,00)	99,66
1.5.2	KEUANGAN	188.613.690.585,00	190.037.761.889,00	1.424.071.304,00	100,76
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.189.584.165,00	4.844.499.157,00	(345.085.008,00)	93,35
	BELANJA DAERAH	5.189.584.165,00	4.844.499.157,00	(345.085.008,00)	93,35
	BELANJA OPERASI	5.081.084.165,00	4.736.210.157,00	(344.874.008,00)	93,21
	Belanja Pegawai	3.500.901.350,00	3.237.530.628,00	(263.370.722,00)	92,48
	Belanja Barang dan Jasa	1.580.182.815,00	1.498.679.529,00	(81.503.286,00)	94,84
	BELANJA MODAL	108.500.000,00	108.289.000,00	(211.000,00)	99,81
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.500.000,00	108.289.000,00	(211.000,00)	99,81
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	183.424.106.420,00	185.193.262.732,00	1.769.156.312,00	100,96
	BELANJA DAERAH	183.424.106.420,00	185.193.262.732,00	1.769.156.312,00	100,96
	BELANJA OPERASI	21.581.642.794,00	20.209.512.218,00	(1.372.130.576,00)	93,64
	Belanja Pegawai	15.748.762.795,00	15.206.586.502,00	(542.176.293,00)	96,56
	Belanja Barang dan Jasa	5.832.879.999,00	5.002.925.716,00	(829.954.283,00)	85,77
	BELANJA MODAL	277.500.000,00	273.500.000,00	(4.000.000,00)	98,56
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	277.500.000,00	273.500.000,00	(4.000.000,00)	98,56

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00	(85.483.962,00)	92,82
	Belanja Tidak Terduga	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00	(85.483.962,00)	92,82
	BELANJA TRANSFER	160.373.599.664,00	163.604.370.514,00	3.230.770.850,00	102,01
	Belanja Bagi Hasil	3.160.953.364,00	2.487.581.214,00	(673.372.150,00)	78,70
	Belanja Bantuan Keuangan	157.212.646.300,00	161.116.789.300,00	3.904.143.000,00	102,48
1.5.3	KEPEGAWAIAN	7.273.325.064,00	7.119.932.302,00	(153.392.762,00)	97,89
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.273.325.064,00	7.119.932.302,00	(153.392.762,00)	97,89
	BELANJA DAERAH	7.273.325.064,00	7.119.932.302,00	(153.392.762,00)	97,89
	BELANJA OPERASI	6.616.698.064,00	6.463.505.302,00	(153.192.762,00)	97,68
	Belanja Pegawai	3.171.350.064,00	3.127.233.527,00	(44.116.537,00)	98,61
	Belanja Barang dan Jasa	3.445.348.000,00	3.336.271.775,00	(109.076.225,00)	96,83
	BELANJA MODAL	656.627.000,00	656.427.000,00	(200.000,00)	99,97
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	656.627.000,00	656.427.000,00	(200.000,00)	99,97
1.5.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.134.154.000,00	948.932.557,00	(185.221.443,00)	83,67
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	1.134.154.000,00	948.932.557,00	(185.221.443,00)	83,67
	BELANJA DAERAH	1.134.154.000,00	948.932.557,00	(185.221.443,00)	83,67
	BELANJA OPERASI	1.134.154.000,00	948.932.557,00	(185.221.443,00)	83,67
	Belanja Barang dan Jasa	1.134.154.000,00	948.932.557,00	(185.221.443,00)	83,67
1.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.741.061.163,00	8.652.822.117,00	(88.239.046,00)	98,99
1.6.1	INSPEKTORAT DAERAH	8.741.061.163,00	8.652.822.117,00	(88.239.046,00)	98,99
	INSPEKTORAT	8.741.061.163,00	8.652.822.117,00	(88.239.046,00)	98,99
	BELANJA DAERAH	8.741.061.163,00	8.652.822.117,00	(88.239.046,00)	98,99
	BELANJA OPERASI	8.672.561.163,00	8.584.322.117,00	(88.239.046,00)	98,98
	Belanja Pegawai	4.036.142.208,00	3.948.664.612,00	(87.477.596,00)	97,83
	Belanja Barang dan Jasa	4.636.418.955,00	4.635.657.505,00	(761.450,00)	99,98
	BELANJA MODAL	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	100,00
1.7	UNSUR KEWILAYAHAN	30.449.034.072,00	29.703.577.271,00	(745.456.801,00)	97,55
1.7.1	KECAMATAN	30.449.034.072,00	29.703.577.271,00	(745.456.801,00)	97,55
	KECAMATAN TOTIKUM	2.402.308.570,00	2.338.898.019,00	(63.410.551,00)	97,36

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	BELANJA DAERAH	2.402.308.570,00	2.338.898.019,00	(63.410.551,00)	97,36
	BELANJA OPERASI	2.402.308.570,00	2.338.898.019,00	(63.410.551,00)	97,36
	Belanja Pegawai	1.991.266.870,00	1.933.533.019,00	(57.733.851,00)	97,10
	Belanja Barang dan Jasa	411.041.700,00	405.365.000,00	(5.676.700,00)	98,62
	KECAMATAN TOTIKUM SELATAN	2.293.156.783,00	2.249.352.347,00	(43.804.436,00)	98,09
	BELANJA DAERAH	2.293.156.783,00	2.249.352.347,00	(43.804.436,00)	98,09
	BELANJA OPERASI	2.069.656.783,00	2.026.153.347,00	(43.503.436,00)	97,90
	Belanja Pegawai	1.651.209.878,00	1.610.668.247,00	(40.541.631,00)	97,54
	Belanja Barang dan Jasa	418.446.905,00	415.485.100,00	(2.961.805,00)	99,29
	BELANJA MODAL	223.500.000,00	223.199.000,00	(301.000,00)	99,87
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	214.000.000,00	213.699.000,00	(301.000,00)	99,86
	KECAMATAN TINANGKUNG	3.016.597.101,00	2.927.824.988,00	(88.772.113,00)	97,06
	BELANJA DAERAH	3.016.597.101,00	2.927.824.988,00	(88.772.113,00)	97,06
	BELANJA OPERASI	2.752.402.951,00	2.663.930.838,00	(88.472.113,00)	96,79
	Belanja Pegawai	2.149.960.528,00	2.077.122.615,00	(72.837.913,00)	96,61
	Belanja Barang dan Jasa	540.157.093,00	524.522.893,00	(15.634.200,00)	97,11
	Belanja Hibah	62.285.330,00	62.285.330,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	264.194.150,00	263.894.150,00	(300.000,00)	99,89
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.194.150,00	113.894.150,00	(300.000,00)	99,74
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
	KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN	1.799.070.620,00	1.727.784.770,00	(71.285.850,00)	96,04
	BELANJA DAERAH	1.799.070.620,00	1.727.784.770,00	(71.285.850,00)	96,04
	BELANJA OPERASI	1.751.744.120,00	1.680.484.770,00	(71.259.350,00)	95,93
	Belanja Pegawai	1.398.412.920,00	1.334.375.972,00	(64.036.948,00)	95,42
	Belanja Barang dan Jasa	353.331.200,00	346.108.798,00	(7.222.402,00)	97,96
	BELANJA MODAL	47.326.500,00	47.300.000,00	(26.500,00)	99,94
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.326.500,00	47.300.000,00	(26.500,00)	99,94
	KECAMATAN TINANGKUNG UTARA	1.932.587.213,00	1.886.483.499,00	(46.103.714,00)	97,61
	BELANJA DAERAH	1.932.587.213,00	1.886.483.499,00	(46.103.714,00)	97,61

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	BELANJA OPERASI	1.932.587.213,00	1.886.483.499,00	(46.103.714,00)	97,61
	Belanja Pegawai	1.612.996.788,00	1.572.020.047,00	(40.976.741,00)	97,46
	Belanja Barang dan Jasa	319.590.425,00	314.463.452,00	(5.126.973,00)	98,40
	KECAMATAN LIANG	2.897.343.698,00	2.856.530.128,00	(40.813.570,00)	98,59
	BELANJA DAERAH	2.897.343.698,00	2.856.530.128,00	(40.813.570,00)	98,59
	BELANJA OPERASI	2.602.343.698,00	2.564.200.128,00	(38.143.570,00)	98,53
	Belanja Pegawai	2.239.795.692,00	2.202.622.126,00	(37.173.566,00)	98,34
	Belanja Barang dan Jasa	362.548.006,00	361.578.002,00	(970.004,00)	99,73
	BELANJA MODAL	295.000.000,00	292.330.000,00	(2.670.000,00)	99,09
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.000.000,00	292.330.000,00	(2.670.000,00)	99,09
	KECAMATAN PELING TENGAH	2.640.272.374,00	2.590.135.628,00	(50.136.746,00)	98,10
	BELANJA DAERAH	2.640.272.374,00	2.590.135.628,00	(50.136.746,00)	98,10
	BELANJA OPERASI	2.370.272.374,00	2.320.567.628,00	(49.704.746,00)	97,90
	Belanja Pegawai	2.108.863.770,00	2.059.385.024,00	(49.478.746,00)	97,65
	Belanja Barang dan Jasa	261.408.604,00	261.182.604,00	(226.000,00)	99,91
	BELANJA MODAL	270.000.000,00	269.568.000,00	(432.000,00)	99,84
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.000.000,00	119.800.000,00	(200.000,00)	99,83
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.768.000,00	(232.000,00)	99,85
	KECAMATAN BULAGI	3.616.031.164,00	3.560.893.056,00	(55.138.108,00)	98,48
	BELANJA DAERAH	3.616.031.164,00	3.560.893.056,00	(55.138.108,00)	98,48
	BELANJA OPERASI	3.486.151.164,00	3.431.013.056,00	(55.138.108,00)	98,42
	Belanja Pegawai	2.819.874.314,00	2.765.474.631,00	(54.399.683,00)	98,07
	Belanja Barang dan Jasa	571.896.850,00	571.158.425,00	(738.425,00)	99,87
	Belanja Bantuan Sosial	94.380.000,00	94.380.000,00	0,00	100,00
	BELANJA MODAL	129.880.000,00	129.880.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.880.000,00	24.880.000,00	0,00	100,00
	KECAMATAN BULAGI SELATAN	2.960.186.782,00	2.916.755.092,00	(43.431.690,00)	98,53
	BELANJA DAERAH	2.960.186.782,00	2.916.755.092,00	(43.431.690,00)	98,53

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	BELANJA OPERASI	2.750.186.782,00	2.709.285.092,00	(40.901.690,00)	98,51
	Belanja Pegawai	1.409.197.282,00	1.369.895.592,00	(39.301.690,00)	97,21
	Belanja Barang dan Jasa	1.340.989.500,00	1.339.389.500,00	(1.600.000,00)	99,88
	BELANJA MODAL	210.000.000,00	207.470.000,00	(2.530.000,00)	98,80
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	107.470.000,00	(2.530.000,00)	97,70
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
	KECAMATAN BULAGI UTARA	2.826.891.868,00	2.783.419.951,00	(43.471.917,00)	98,46
	BELANJA DAERAH	2.826.891.868,00	2.783.419.951,00	(43.471.917,00)	98,46
	BELANJA OPERASI	2.706.741.868,00	2.663.769.951,00	(42.971.917,00)	98,41
	Belanja Pegawai	1.956.258.868,00	1.918.966.951,00	(37.291.917,00)	98,09
	Belanja Barang dan Jasa	556.239.000,00	550.803.000,00	(5.436.000,00)	99,02
	Belanja Bantuan Sosial	194.244.000,00	194.000.000,00	(244.000,00)	99,87
	BELANJA MODAL	120.150.000,00	119.650.000,00	(500.000,00)	99,58
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.500.000,00	(500.000,00)	99,50
	KECAMATAN BUKO	2.285.283.510,00	2.158.343.651,00	(126.939.859,00)	94,45
	BELANJA DAERAH	2.285.283.510,00	2.158.343.651,00	(126.939.859,00)	94,45
	BELANJA OPERASI	2.285.283.510,00	2.158.343.651,00	(126.939.859,00)	94,45
	Belanja Pegawai	1.930.587.910,00	1.805.427.051,00	(125.160.859,00)	93,52
	Belanja Barang dan Jasa	354.695.600,00	352.916.600,00	(1.779.000,00)	99,50
	KECAMATAN BUKO SELATAN	1.779.304.389,00	1.707.156.142,00	(72.148.247,00)	95,95
	BELANJA DAERAH	1.779.304.389,00	1.707.156.142,00	(72.148.247,00)	95,95
	BELANJA OPERASI	1.729.354.389,00	1.657.206.142,00	(72.148.247,00)	95,83
	Belanja Pegawai	1.401.773.714,00	1.329.672.842,00	(72.100.872,00)	94,86
	Belanja Barang dan Jasa	327.580.675,00	327.533.300,00	(47.375,00)	99,99
	BELANJA MODAL	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100,00
1.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.307.196.707,00	8.035.746.510,00	(13.271.450.197,00)	37,71
1.8.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21.307.196.707,00	8.035.746.510,00	(13.271.450.197,00)	37,71
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21.307.196.707,00	8.035.746.510,00	(13.271.450.197,00)	37,71

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
	BELANJA DAERAH	21.307.196.707,00	8.035.746.510,00	(13.271.450.197,00)	37,71
	BELANJA OPERASI	21.173.196.707,00	7.901.772.510,00	(13.271.424.197,00)	37,32
	Belanja Pegawai	2.279.162.254,00	2.177.373.750,00	(101.788.504,00)	95,53
	Belanja Barang dan Jasa	1.989.648.520,00	1.974.012.827,00	(15.635.693,00)	99,21
	Belanja Hibah	16.904.385.933,00	3.750.385.933,00	(13.154.000.000,00)	22,19
	BELANJA MODAL	134.000.000,00	133.974.000,00	(26.000,00)	99,98
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.000.000,00	133.974.000,00	(26.000,00)	99,98
	TOTAL	**936.937.268.812,00**	**849.032.765.461,21**	**(87.904.503.350,79)**	**90,62**

3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp76.891.515.213,00 dan telah terealisasi sebesar Rp76.773.513.365,49 atau 99,85%, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Realisasi Pembiayaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah dan Organisasi

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**76.891.515.213,00**	**76.773.513.365,49**	**(118.001.847,51)**	**99,85**
4.2	KEUANGAN	76.891.515.213,00	76.773.513.365,49	(118.001.847,51)	99,85
4.2.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	76.891.515.213,00	76.773.513.365,49	(118.001.847,51)	99,85
	PEMBIAYAAN DAERAH	76.891.515.213,00	76.773.513.365,49	(118.001.847,51)	99,85
	TOTAL	**76.891.515.213,00**	**76.773.513.365,49**	**(118.001.847,51)**	**99,85**

3.2 Ikhtisar Realisasi Pemenuhan Dukungan Program Nasional dan *Mandatory Spending*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus serta kepada

masyarakat dan *mandatory spending*, sehingga terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah.

Realisasi *mandatory spending* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehubungan dengan pelayanan penyelenggaraan pendidikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menganggarkan sebesar Rp227.191.611.209,00 atau sebesar 24,25% dan terealisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp217.121.977.777,21 atau sebesar 27,14% dari yang dianggarkan dengan rincian penganggaran dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi Alokasi Fungsi Pendidikan Tahun 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	**a) Belanja pada Dinas Pendidikan:**	**225.281.947.209,00**	**215.258.306.653,21**
	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	141.112.248.071,00	136.121.680.022,00
	2) Program Pengelolaan Pendidikan	79.084.157.978,00	74.137.725.871,21
	3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.085.541.160,00	4.998.900.760,00
	b) Belanja pada Dinas Kepegawaian dan Pengembangan SDM:	**1.909.664.000,00**	**1.863.671.124,00**
	1) Program Pengembangan SDM	0,00	0,00
	- Pengembangan Kompetensi Teknis	0,00	0,00
	- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	0,00	0,00
	2) Program Kepegawaian Daerah	1.909.664.000,00	1.863.671.124,00
	- Pengembangan Kompetensi ASN	1.909.664.000,00	1.863.671.124,00
	c) Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	**0,00**	**0,00**
	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
	2) Program Pengelolaan Pendidikan	0,00	0,00
	3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	0,00
2	**Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c)**	**227.191.611.209,00**	**217.121.977.777,21**
3	**Total Belanja Daerah**	**936.937.268.812,00**	**800.068.947.864,00**
4	**Rasio Anggaran Pendidikan**	**24,25%**	**27,14%**

b. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, peraturan tersebut menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,

kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menganggarkan sebesar Rp140.812.071.742,00 atau sebesar 20,74% dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp125.704.215.510,00 atau sebesar 21,84% dari yang dianggarkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Alokasi Fungsi Kesehatan Tahun 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	**a) Belanja pada Dinas Kesehatan:**	**140.812.071.742,00**	**125.704.215.510,00**
	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58.568.941.158	53.724.781.422,00
	b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	60.416.564.829,00	52.830.870.897,00
	c) Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	21.826.565.755,00	19.148.563.191,00
	d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	0,00	0,00
	e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,00	0,00
	b) Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	**0,00**	**0,00**
	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
	2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	0,00	0,00
	3) Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	0,00	0,00
2	**Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)**	**140.812.071.742,00**	**125.704.215.510,00**
3	**Total Belanja Daerah**	**936.937.268.812,00**	**800.068.947.864,00**
4	**Gaji ASN**	**258.545.680.156,00**	**224.551.214.187,00**
5	**Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)**	**678.391.588.656,00**	**575.517.733.677,00**
	Rasio Anggaran Kesehatan	**20,76%**	**21,84%**

c. Dalam rangka pelayanan peningkatan dan penguatan belanja infrastruktur kepada kesejahteraan masyarakat serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 yang menyebutkan Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, konektivitas daerah, pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengarahkan penggunaan DTU untuk penguatan belanja infrastruktur sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Perhitungan Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah/Desa Tahun 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	**Penerimaan**		
	Dana Transfer Umum		
	a) DAU	457.166.599.000,00	459.375.692.731,00
	b) DBH	72.172.064.569,00	44.156.169.532,00
	Jumlah Penerimaan	**529.338.663.569,00**	**503.531.862.263,00**
2	**Pengurangan**		
	a) DBH CHT	17.786.302,00	18.855.557,00
	b) DBH DR	0,00	0,00
	c) ADD	107.511.753.000,00	111.415.896.000,00
	Jumlah Pengurangan	**107.529.539.302,00**	**111.434.751.557,00**
3	**Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan**	**636.868.202.871,00**	**614.966.613.820,00**

Tabel 3. 7 Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah Tahun 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	a) Belanja Modal		
	1) Tanah	4.551.020.000,00	3.418.849.908,00
	2) Peralatan dan Mesin	17.992.755.382,00	15.457.854.075,00
	3) Gedung dan Bangunan	61.196.411.022,00	56.180.176.865,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	67.176.212.100,00	60.393.603.200,00
	5) Aset Tetap Lainnya	136.457.788,00	63.236.000,00
	b) Belanja Pemeliharaan	5.406.980.050,00	5.373.784.269,00
2	a) Belanja Hibah	33.016.621.863,00	18.792.120.164,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	3.979.137.000,00	3.860.273.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	157.212.646.300,00	161.116.789.300,00
	d) Belanja Gaji Guru Non ASN / Guru PPPK	40.157.543.820,00	18.035.272.678,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	390.825.785.325,00	342.691.959.459,00
4	**Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat Umum**	**61,37**	**55,73**

d. Dalam rangka dukungan pelaksanaan pemerintahan desa serta sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan tersebut menyebutkan Transfer Desa paling sedikit 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima kabupaten. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan merealisasikan transfer bagi hasil ke desa dengan rincian formulasi perhitungan sebagai berikut.

Tabel 3. 8 Perhitungan Transfer Bagi Hasil ke Desa Tahun 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	a) Pajak Daerah	6.348.922.837,00	6.627.541.142,85
	b) Retribusi Daerah	13.816.841.258,00	13.865.446.577,00
2	Total Pajak dan Retribusi Daerah (a+b)	20.165.764.095,00	20.492.987.719,85
3	Transfer Desa	3.160.953.364,00	2.487.581.214,00
4	**Rasio Transfer Desa**	**15,67**	**12,14**

e. Dalam rangka dukungan pelaksanaan pemerintahan desa serta sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan merealisasikan Alokasi Dana Desa dengan rincian formulasi perhitungan sebagai berikut.

Tabel 3. 9 Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Penerimaan		
	a) DAU	457.166.599.000,00	459.375.692.731,00
	b) DBH	72.172.064.569,00	44.156.169.532,00
	c) DAK	141.666.504.000,00	131.835.306.050,00
	Jumlah Penerimaan	671.005.167.569,00	635.367.168.313,00
2	Pengurangan		
	a) DAK Fisik	57.589.342.000,00	55.071.492.302,00
	b) DAK Non Fisik	84.077.162.000,00	76.763.813.748,00
	Jumlah Pengurangan	141.666.504.000,00	131.835.306.050,00
3	Jumlah Alokasi Dana Desa	107.511.753.000,00	111.415.896.000,00
4	**Rasio Alokasi Dana Desa**	**20,31%**	**22,13%**

f. Dalam rangka kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, peraturan tersebut menyebutkan kategori tarif penganggaran kegiatan pengawasan berdasarkan total belanja daerah sebagai berikut:

1) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 1,00%;

2) diatas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 0,75% dan diatas Rp10.000.000.000.000,00; dan
3) diatas Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 0,50% dan diatas Rp15.000.000.000.000,00.

Tabel 3. 10 Perhitungan Kegiatan Pengawasan Tahun 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	a) Belanja pada Inspektorat	8.741.061.163,00	8.652.822.117,00
	1) Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.141.251.000,00	3.140.639.990,00
	2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	0,00	0,00
	3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.599.810.163,00	5.512.182.127,00
	b) Belanja di Luar Inspektorat yang menunjang Pengawasan, antara lain:	0,00	0,00
	1) Program Penyelenggaraan Pengawasan	0,00	0,00
	2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	0,00	0,00
	3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
2	Anggaran Fungsi Pengawasan (a+b)	8.741.061.163,00	8.652.822.117,00
3	Total Belanja Daerah	936.937.268.812,00	800.068.947.864,00
4	**Rasio Anggaran Pengawasan**	**0,93%**	**1,08%**

h. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, peraturan tersebut menyebutkan bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menganggarkan dan merealisasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 terkait pengalokasian penyediaan penerangan jalan sebagai berikut.

Tabel 3. 11 Perhitungan Alokasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Penerimaan		
	Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	2.800.000.000,00	2.793.562.564,00
	Jumlah Penerimaan	**2.800.000.000,00**	**2.793.562.564,00**
2	Pengurangan		
	Belanja Pajak Penerangan Jalan Umum	737.872.900,00	737.763.274,00
	Jumlah Pengurangan	**737.872.900,00**	**737.763.274,00**
3	**Rasio Anggaran Penerangan Jalan Umum**	**26,35%**	**26,41%**

i. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan

Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai bentuk dukungan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertujuan menginformasikan komitmen penggunaan produk dalam negeri dan realisasinya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah nilai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui penyedia sebanyak 6.753 paket dengan nilai keseluruhan sebesar Rp312.428.520.348,00. Dari nilai pengadaan barang dan jasa tersebut, yang dikomitmenkan untuk menggunakan produk dalam negeri sebesar Rp87.281.794.459,00.

k. Dalam rangka implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan target sebesar 14% di Tahun 2024, perlu penurunan secara rata-rata sebesar 3,8% per tahun. Terkait kewajiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menganggarkan dan merealisasikan percepatan penurunan prevalensi stunting pada program dan kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3. 12 Rekapitulasi Data Program Penanganan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2023

Program	Kegiatan	Tahun 2023	
		Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.321.628.831,00	5.752.221.724,00
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.085.541.160,00	4.998.900.760,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24.459.855.865,00	19.055.453.917,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.956.708.964,00	33.775.416.980,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	21.826.565.755,00	19.148.563.191,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.892.401.930,00	6.076.569.570,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	203.725.500,00	184.365.500,00

Program	Kegiatan	Tahun 2023	
		Anggaran	Realisasi
Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.600.000,00
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	489.963.950,00	473.748.950,00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	290.000.000,00	277.652.000,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.900.725.000,00	2.849.195.984,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	120.000.000,00	119.840.000,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.274.639.600,00	1.940.170.845,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	669.999.840,00	624.785.464,00
Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	222.600.000,00	222.600.000,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya	1.043.800.000,00	1.023.931.000,00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.532.940.000,00	1.040.726.000,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	815.815.500,00	799.155.500,00
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	241.701.883,00	220.151.903,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	585.727.400,00	569.048.700,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.054.877.718,00	20.939.653.145,00
TOTAL		**138.019.218.896,00**	**120.121.751.133,00**

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam rangka memaksimalkan peningkatan pendapatan dan realisasi belanja yang efektif dan efisien memang dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam melakukan tindakan nyata di lapangan dalam melakukan terobosan-terobosan yang cepat, tepat dan aktual secara berimbang dan dinamis. Kendala/hambatan dalam pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2023, antara lain:

3.3.1 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Pendapatan

Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 sebesar Rp827.789.179.621,31 dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp860.045.753.599,00. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pencapaian target pendapatan adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2. Keterbatasan personil dalam penarikan pajak daerah;
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya intensifikasi retribusi daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mengatasi hambatan tersebut di atas antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah;
2. Optimalisasi personel melalui peningkatan keterampilan aparat pemungut pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan penggunaan transaksi non tunai dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

3.3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Belanja

Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp936.937.268.812,00 dengan tingkat penyerapan 94,88% atau sebesar Rp849.032.765.461,21. Penyerapan anggaran tersebut belum optimal atau belum mencapai 100% dari anggaran. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:

1. Perubahan aturan pengelolaan keuangan daerah yang diikuti dengan penggunaan aplikasi baru yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
2. Perangkat daerah kurang memahami perencanaan belanja terutama pada penyesuaian belanja dengan rekening belanja, sehingga menunda pencairan dana dan pencairan menumpuk di akhir Tahun dan/atau menunggu setelah perubahan anggaran;
3. Perangkat daerah kurang disiplin dalam mengajukan pencairan dana program kegiatan sesuai anggaran kas yang ditetapkan sehingga mengakibat tertundanya pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir Tahun;
4. Perubahan peraturan teknis terkait pelaksanaan belanja daerah.

5. Satuan pendidikan dasar negeri belum memahami tentang perubahan dari Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
6. FKTP Puskesmas belum memahami tentang proses perubahan Anggaran JKN ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (JKN)
7. FKTP Puskesmas dan Rumah Sakit belum memahami tentang proses pengelolaan keuangan BLUD.
8. Meningkatkan pengawasan internal terkait penggunaan anggaran.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mengatasi hambatan tersebut di atas antara lain:

1. Dilaksanakannya asistensi perencanaan penganggaran kepada setiap OPD agar memahami dalam menyusun perencanaan belanja;
2. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir tidak efektif pelaksanaan suatu kegiatan;
3. Meningkatkan pemahaman aparatur perencana dan penganggaran dalam merumuskan bentuk kegiatan dibandingkan dengan pola penganggaran;
4. Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
5. Melakukan peningkatan pemahaman mengenai keuangan daerah terhadap pengelola keuangan di satuan pendidikan dasar negeri.
6. Melakukan peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah terhadap pengelola keuangan di FKTP Puskesmas.
7. Melakukan peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah terhadap BLUD di Puskesmas dan Rumah Sakit.
8. Kurangnya pengawasan internal terkait penggunaan anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Prinsip akuntansi dan laporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati penyelenggara akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

a. Basis Akuntansi

1) Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2) Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
3) Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4) LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
5) Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan daerah berbasis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu Tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode Tahun anggaran dimaksud atau membayar hutang.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan ini yang dapat diikuti oleh setiap entitas sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.

2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Pendapatan-LRA

1) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

3) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

4) Pendapatan-LRA terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah-LRA;

b) Pendapatan Transfer-LRA; dan

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

d. Pengakuan Pendapatan LRA

1) Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

a) kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

b) kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

c) kas atas pendapatan tersebut telah diterima satuan kerja/Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

d) kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

e) kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Pengukuran Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah–LRA (PAD–LRA)

a. Definisi PAD-LRA

1) PAD-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

2) PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

b. Pengakuan PAD-LRA

PAD-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

c. Pengukuran PAD-LRA

PAD-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam bukti penerimaan atau surat tanda setoran.

d. Penyajian dan Pengungkapan PAD-LRA

PAD-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.3.1.1.2. Pendapatan Transfer –LRA

a. Definisi Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer-LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA

1) Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer-LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

2) Pendapatan Transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD.

c. Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.3.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LRA

a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer-LRA.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah-LRA;
2) Dana Darurat-LRA; dan
3) Pendapatan Lainnya-LRA.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui oleh SKPKD.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.3.1.2. Pendapatan-LO

a. Tujuan menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang lingkup kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

c. Definisi Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Pengakuan Pendapatan-LO

1) Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

2) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

a) tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;

b) ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;

c) dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;

d) sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);

e) sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama Tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:

- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
- Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

5) Pengukuran Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Tujuan Kebijakan

Akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

c. Definisi Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.
3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
12) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
13) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
    a) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Perangkat Daerah Pengguna Anggaran; dan

b) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

15) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam BAS.

d. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

(1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

(2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil.

(3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

e. Pengukuran Belanja

1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

f. Penyajian dan Pengungkapan Belanja

1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a) Belanja Operasi;

b) Belanja Modal;

c) Belanja Tidak Terduga; dan

d) Belanja Transfer.

dan dijelaskan dalam CaLK.

2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal

dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Tujuan

1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran bersangkutan maupun Tahun-Tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2) Pembiayaan terdiri dari :
   a) Penerimaan pembiayaan; dan
   b) Pengeluaran pembiayaan.

4.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Definisi

1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2) Transaksi penerimaan pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.

b. Pengakuan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

c. Pengukuran penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Definisi

1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD.

b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

e. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana

bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4.3.3.3 Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Definisi

1) SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
3) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
4) SAL terdiri dari: Surplus/Defisit-LRA;
   a) Pembiayaan Neto;
   b) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan
   c) Perubahan SAL.
5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6) Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL.

b. Pengakuan SAL

1) Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Beban

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.
3) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain.

5) Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11) Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
12) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

13) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
15) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16) Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
17) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

d. Pengakuan Beban

1) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   (a) beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   (b) beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   (c) beban diakui setelah pengeluaran kas.

6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, di mana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, di mana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
    (a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
    (b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
    (c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir Tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    (d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir Tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    (e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan
    (f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

e. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

f. Penyajian dan Pengungkapan Beban

1) Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK, yaitu:

(a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan dan Beban Penyusutan;

(b) Beban Transfer, yang terdiri dari: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak,

(c) Beban Non Operasional; dan

(d) Beban Tidak Terduga.

2) Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Beban, antara lain:

(a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;

(b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan

(c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengukuran aset adalah kas dicatat sebesar nilai nominal, investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, piutang dicatat sebesar nilai nominal dan persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Aset

diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan.

b. Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertiannya:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

3) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.3.5.1.1. Aset Lancar

A. Kas dan Setara Kas

1) Definisi Kas dan Setara Kas

a. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

b. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

c. Kas terdiri dari:

- kas di Kas Daerah;
- kas di Bendahara Penerimaan;
- kas di Bendahara Pengeluaran;
- kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- kas lainnya.

d. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

e. Setara kas terdiri dari:

- simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
- investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

f. Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

a. Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

b. Atas dasar butir a) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

c. Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

d. Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

3) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
b. Rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

B. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi Investasi Jangka Pendek

a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

a. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di

masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

- nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

b. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.

c. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar

b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
- jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
- penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
- perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

C. Piutang

1) Definisi Piutang

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain .

c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. d) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Piutang

a. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
   - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
   - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur. c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

c. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir Tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

e. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

f. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu Tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

g. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K)/ Surat Keterangan (SKTJM)/Dokumen Tanggung yang jawab

dipersamakan, Mutlak yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

3) Pengukuran Piutang

a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut
   - Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
   - Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
   - Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
   - Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam Tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
   - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

e. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

f. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

h. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   - kualitas Piutang Lancar;
   - kualitas Piutang Kurang Lancar;
   - kualitas Piutang Diragukan; dan
   - kualitas Piutang Macet.

i. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
   - Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self-assessment*); dan
   - Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

j. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self-assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

***Kualitas Lancar**, dengan kriteria:*
- Umur piutang kurang dari 1 Tahun;
- Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- Wajib Pajak kooperatif;
- Wajib Pajak likuid; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

***Kualitas Kurang Lancar**, dengan kriteria:*
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 Tahun;
- Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- Wajib Pajak menyetujui pemeriksaan; dan/atau sebagian hasil
- Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

***Kualitas Diragukan**, dengan kriteria:*
- Umur piutang lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun;
- Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
- Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

***Kualitas Macet**, dengan kriteria:*
- Umur piutang di atas 3 Tahun;
- Wajib Pajak tidak ditemukan;
- Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

k. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

***Kualitas Lancar**, dengan kriteria:*

- Umur piutang kurang dari 1 Tahun;
- Wajib Pajak kooperatif;
- Wajib Pajak likuid; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

***Kualitas Kurang Lancar**, dengan kriteria:*

- Umur piutang lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun;
- Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

***Kualitas Diragukan**, dengan kriteria:*

- Umur piutang lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun;
- Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

***Kualitas Macet**, dengan kriteria:*

- Umur piutang di atas 3 Tahun;
- Wajib Pajak tidak ditemukan;
- Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau l)
- Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

l. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

m. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

- Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Daerah/Negara. Panitia Urusan Piutang

n. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
- 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

o. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

p. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

4) Pemberhentian Pengakuan

a. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

b. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

c. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

d. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

e. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

f. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.

- Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
- Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima milyar rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas lima milyar rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

i) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

(1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

(2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

(3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

(4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga di kapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.

(5) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

(6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan /peraturan *write off* di negara lain.

(7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

j) Pengungkapan Piutang

(1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

(a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

(b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

(c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

(d) jaminan atau sita jaminan jika ada.

(2) TP-TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

(3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

(4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D. Beban Dibayar Dimuka

1) Definisi Beban Dibayar Dimuka. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

E. Persediaan

1) Definisi Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
   (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
   (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
   (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
   (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

c. Klasifikasi persediaan meliputi:
   (1) Persediaan Alat Tulis Kantor;
   (2) Persediaan Barang Cetakan;
   (3) Persediaan Obat dan Alat Kesehatan;
   (4) Persediaan Hewan dan Tanaman;
   (5) Persediaan Aspal;
   (6) Persediaan Suku Cadang;
   (7) Persediaan Bahan Makanan Pokok
   (8) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga jaga; dan
   (9) Persediaan Lain-lain.

2) Pengakuan Persediaan

a) Persediaan diakui:
   (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
   (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

b) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada digudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

c) Beban Persediaan. Beban Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan

berkurangnya jumlah persediaan. Beban Persediaan ini diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan.

3) Pengukuran Persediaan

a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) pada akhir periode dengan menggunakan harga perolehan terakhir untuk selain obat dan alat kesehatan, sedangkan untuk obat dan alat kesehatan menggunakan FIFO. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan jumlah persediaan.

b) Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

(1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(2) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

G. Aset Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Perangkat Daerah dan entitas akuntansi SKPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara Perangkat Daerah dengan SKPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K Perangkat Daerah. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi SKPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi Perangkat Daerah.
2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi Perangkat Daerah.
3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

4.3.5.1.2. Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

1) Definisi Investasi Jangka Panjang
   a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
   b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan berkelanjutan.
   c) untuk dimiliki secara Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

d) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

f) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; dan

(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

(1) deviden tunai;

(2) deviden saham; dan

(3) bagian laba.

c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).

d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investor yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.

(2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka non permanen yaitu:

(1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

(2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan misalnya perekonomian dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

(3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

(4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

(5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
(1) metode biaya;
(2) metode ekuitas; dan
(3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investor*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

i) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

(1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

(2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

(3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir mengacu pada Peraturan Bupati.

(4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian adalah sebagai berikut : Tidak melampaui jatuh tempo 0%, Jatuh tempo 0-3 bulan 20%, Jatuh Tempo 4-9 bulan 50%, Jatuh Tempo 10-12 bulan 75% dan Jatuh Tempo Lebih dari 12 bulan 100%

(5) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

4.3.5.2. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

e. Masa manfaat adalah:
   - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
   - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

h. Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

j. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

k. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

l. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
   - Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
   - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
   - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
   - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

m. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

n. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

o. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

p. Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Aset Tetap

a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

c. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

d. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

e. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

f. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3) Pengukuran Aset Tetap

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

b. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

d. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

e. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

f. Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, pematangan, biaya pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan memperoleh gedung untuk dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

g. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat di kapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

h. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

i. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4) Penilaian Awal Aset Tetap Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5) Perolehan Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6) Aset Tetap Digunakan Bersama

a. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Banggai Kepulauan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

7) Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum

a. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset

tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

8) Pertukaran Aset *(Exchange of Asets)*

a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat *(carrying amount)* atas aset yang dilepas.

c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan *(impairment)* nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai bukukan *(written down)* dan nilai setelah diturun-nilai bukukan *(written down)* merupakan nilai aset yang diterima. tersebut

Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

9) Aset Donasi

a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan

sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

10) Pengeluaran Setelah Perolehan *(Subsequent Expenditures)*

a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap *(subsequent expenditures)* adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap *(subsequent expenditures)* yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

b. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan di kapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
- bertambah ekonomis/efisien;
- bertambah umur ekonomis;
- bertambah volume; dan/atau
- bertambah kapasitas produksi.

b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan *(capitalization thresholds).*

c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang kapasitas/volume, dalam bentuk peningkatan peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja perbaikan/penambahan adalah yang pemeliharaan/merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang

dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang di maksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin / Set / Satuan (Rp)
1.	**Tanah**	**0,00**
2.	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, terdiri atas**	
2.1	Alat – alat Berat	1.500.000, 00
2.2	Alat – alat Angkutan	1.500.000, 00
2.3	Alat – alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000, 00
2.4	Alat – alat Pertanian/Peternakan	1.000.000, 00
2.5	Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga :	
	- Alat – alat Kantor	1.500.000, 00
	- Alat – alat Rumah Tangga	1.000.000, 00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000, 00
2.7	Alat – alat Kedokteran	1.500.000, 00
2.8	Alat – alat Laboratorium	1.500.000, 00
2.9	Alat - Keamanan	1.000.000, 00
3	**Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000 ,00
3.2	Bangunan Monumen	10.000.000 ,00
4.	**Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terdiri atas :**	
4.1	Jalan dan Jembatan	20.000.000 ,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	10.000.000 ,00
4.3	Instalasi	5.000.000, 00
4.4	Jaringan	5.000.000, 00
5.	**Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang terdiri atas :**	
5.1	Buku dan Perpustakaan	300.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	300.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000,00
	b. Ternak	300.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	300.000,00
6.	**Pemeliharaan Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**10.000.000,00**

11) Penyusutan

a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus *(straight line method)* berdasarkan Tahun perolehan.

b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

- Nilai residu 0;
- Ada nilai residu konsekuensi dengan peraturan bupati penilaian barang

c. Untuk aset yang diperoleh pada tahun berjalan penyusutan dilakukan pada penyusunan Laporan Keuangan tahun berkenaan.

d. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	15

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat Sar	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan dan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara / Perambuan	40
	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu / Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan 25 Pengaman Sungai/Pantai 10 dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4

e. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan ternak, dan Tanaman.

f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan *Aset Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

h. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi.

Tabel 4. 4 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi / *Overhaul* dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan MasaManfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	6
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		Aset	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi / *Overhaul* dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan MasaManfaat (Tahun)
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan Pertanian	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat laboratorium			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi / *Overhaul* dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan MasaManfaat (Tahun)
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi / *Overhaul* dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan MasaManfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi / *Overhaul* dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan MasaManfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi / *Overhaul* dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan MasaManfaat (Tahun)
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Pengaman Sungai / Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi / *Overhaul* dariNilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan MasaManfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi / Overhaul	>0% s.d. 100%	5

12) Penilaian Kembali Aset Tetap *(Revaluation)*

a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

13) Penghentian dan pelepasan Aset Tetap Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

14) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

a. Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b. Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount*);

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :

- penambahan;
- pelepasan;
- akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
- mutasi aset tetap lainnya.

c) informasi penyusutan, meliputi:

- nilai penyusutan;
- metode penyusutan yang digunakan;
- masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

a) aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
b) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
c) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
d) Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah *(heritage asets)* di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
e) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.
f) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
g) Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
h) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya *(carrying amount).*
i) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

4.3.5.2.1. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

2) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

3) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   - biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
   - biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
   - biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
   - biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
   - biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

d. Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
   a) asuransi;
   b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
   c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
   d) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
      - rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian penyelesaiannya; dan jangka waktu
      - nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
      - jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar uang muka kerja yang diberikan; dan
      - retensi.

4.3.5.2.2. Dana Cadangan

1) Definisi Dana Cadangan

a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun anggaran.

b. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk

pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

c. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2) Pengakuan Dana Cadangan Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

3) Pengukuran Dana Cadangan

a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

b. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan

c. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

a. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK.

4.3.5.3. Aset Lainnya

1 Definisi Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- Aset Tidak Berwujud; dan
- Aset Lain-lain.

c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

d. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. TP-TGR diakui ketika keputusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K.

e. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
   - Aset Kerja sama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun menyelenggarakan /kemitraan. atau digunakan kegiatan untuk kerja sama
   - Bangun, Guna, Serah–BGS *(Build, Operate, Transfer–BOT)*, adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BGS.
   - Bangun, Serah, Guna–BSG *(Build, Transfer, operate–BTO)* adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
   - Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
   - Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerja sama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan.

f. Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

g. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

- *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan /saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- *Royalti* adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- *Software. Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
- Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
- Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu Tahun

anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan *(intangible aset – work in progress)*, dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

h. Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

i. Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar.

2) Pengakuan Aset Lainnya

a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau berpindah. ke penguasaannya

b. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

c. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

- telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
- telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

- Aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerja sama/kemitraan.
- Aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

- Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
- Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerja sama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerja sama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

e. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

f. Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran Aset Lainnya

a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

c. Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

- Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian

atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kerja sama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah perjanjian setelah berakhirnya dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

f. Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
- biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

g. Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

- Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat di kapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

h. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

i. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

j. Aset lain–lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

k. Proses penghapusan terhadap aset lain–lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

a. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.

b. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

c. Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

d. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

e. Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- masa manfaat dan metode amortisasi;
- nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud; dan
- penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

f. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

g. Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dapat dibedakan menjadi:
   - Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas *(finite life)* yaitu Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, Software, Lisensi, Hasil Kajian, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan dengan;
   - Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas *(indefinite life*) yaitu *Goodwill.*

4.3.5.4. Amortisasi

1) Definisi

   a. Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

   b. Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

2) Pengakuan Amortisasi Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir Tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

3) Pengukuran Amortisasi

   a. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

   b. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam berikut ini:

Tabel 4. 5 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TIDAK BERWUJUD	
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	20
Royalti	20
Software	5
Lisensi	10
Hasil Kajian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	5

4) Pengungkapan Amortisasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai “Beban Amortisasi”.

5) Penyajian Amortisasi Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari "Aset Tidak Berwujud"

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Tujuan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2) Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:

- akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan
- perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

c. Definisi Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara c.q. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

b. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.
2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.
3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.
4) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi
   a. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan Perangkat Daerah.
   b. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPKD dengan Perangkat Daerah. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPKD atau Rekening Koran SKPKD . Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.

c. Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

d. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

2) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi Perangkat Daerah.

3) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan

a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

4) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

b. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

Pendapatan Diterima Dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

Utang Beban

1) Definisi Utang Beban Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*). Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a. adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
b. pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
c. pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
d. pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban Utang Beban diakui pada saat:
a. beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
b. terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
c. barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK. Utang Jangka Pendek Lainnya
a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.
c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.
d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

4.3.6.2. Kewajiban Jangka Panjang

Utang Dalam Negeri

1) Definisi Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
   a. Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;
   b. Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;
   c. Utang Dalam Negeri-obligasi;
   d. Utang Pemerintah Pusat;
   e. Utang Pemerintah Provinsi; dan
   f. Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
2) Pengakuan Utang Dalam Negeri
   a. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
   b. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
3) Pengukuran Utang Dalam Negeri
   a. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut,

sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

b. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

c. Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

Utang Luar Negeri

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

1) Definisi Utang Luar Negeri

a. Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

b. Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

2) Pengakuan Utang Luar Negeri Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran Utang Luar Negeri

a. Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

b. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat *(carrying amount)* utang tersebut.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

a. Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat *(carrying amount).*

b. Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

c. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

b. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).

c. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

d. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

e. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

b. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

b. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK.

b. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1) Tujuan

a. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2) Ruang Lingkup Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini

diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3) Definisi Ekuitas

a. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.

c. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.

d. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

e. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K Perangkat Daerah ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

4) Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

5) Pengukuran Ekuitas Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

6) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan

pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "auditable" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).

4.5 Asumsi Dasar Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 telah disusun berdasarkan asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi yaitu:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

4.6 Pengguna Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

1. Masyarakat;
2. Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Walaupun kebutuhan pengguna laporan keuangan masing-masing berbeda, diharapkan seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan, terutama bagi pemerintah serta masyarakat.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Keuangan

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun Anggaran 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Rincian Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	41.060.725.094,00	41.330.438.640,31	100,66	33.146.420.283,26
Pendapatan Transfer	815.007.805.657,00	783.226.137.466,00	96,10	755.670.384.454,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	3.977.222.848,00	3.296.611.624,00	82,89	22.254.328.713,00
Jumlah	**860.045.753.599,00**	**827.853.187.730,31**	**96,26**	**811.071.133.450,26**

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

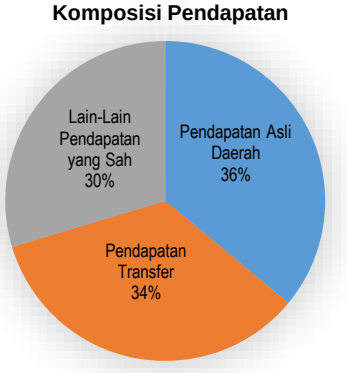

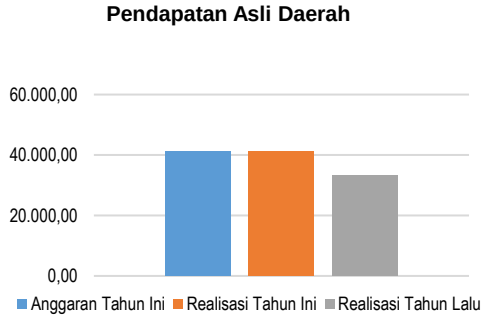

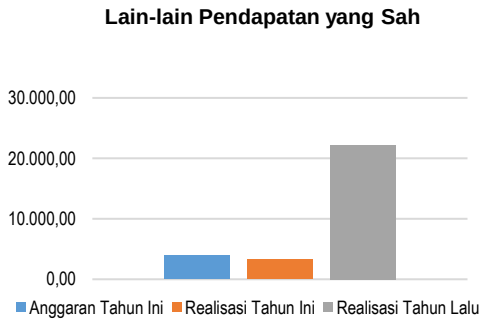

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	6.348.922.837,00	6.627.541.142,85	104,39	6.281.792.225,00
Retribusi Daerah	13.816.841.258,00	13.903.900.977,00	100,63	18.590.032.806,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.231.364.872,00	4.231.364.872,00	100,00	2.934.152.411,84
Lain-Lain PAD yang Sah	16.663.596.127,00	16.567.631.648,46	99,42	5.340.442.840,42
Jumlah	**41.060.725.094,00**	**41.330.438.640,31**	**100,66**	**33.146.420.283,26**

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Rincian Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	123.470.492,00	128.451.700,10	104,03	106.573.600,00
Pajak Restoran	930.207.511,00	1.154.422.502,00	124,10	1.220.332.675,00
Pajak Hiburan	1.500.000,00	1.875.000,00	125,00	1.151.250,00
Pajak Reklame	40.000.000,00	36.584.483,00	91,46	49.571.242,00
Pajak Penerangan Jalan	2.800.000.000,00	2.793.562.564,00	99,77	2.623.592.836,00
Pajak Air Tanah	1.000.000,00	1.084.000,00	108,40	1.086.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.102.744.834,00	1.038.461.088,75	94,17	914.461.319,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.300.000.000,00	1.409.160.895,00	108,40	1.299.490.962,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000,00	63.938.910,00	127,88	65.532.341,00
Jumlah	**6.348.922.837,00**	**6.627.541.142,85**	**104,39**	**6.281.792.225,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pajak hotel terealisasi sebesar Rp128.451.700,10 atau 104,03% dari anggaran sebesar Rp123.470.492,00 disebabkan karena adanya penambahan Objek Pajak Baru. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp106.573.600,00 mengalami peningkatan sebesar Rp21.878.100,10 atau 20,53%.
   b. Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp1.154.422.502,00 atau 124,10% dari anggaran sebesar Rp930.207.511,00 disebabkan karena pembayaran Pajak Restoran yang bersumber dari belanja makan minum di sekolah (Dana BOS) maupun di Dana Desa. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.220.332.675,00 mengalami penurunan sebesar Rp65.910.173,00 atau 5,40%.
   c. Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp1.875.000,00 atau 125,00% dari anggaran sebesar Rp1.500.000,00 disebabkan karena adanya objek Pajak Hiburan atas pertandingan olahraga sepakbola. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.151.250,00 mengalami peningkatan sebesar Rp723.750,00 atau 62,87%.
   d. Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp36.584.483,00 atau 91,46% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00 disebabkan karena kurangnya reklame dari pihak ketiga seperti perusahaan rokok yang melaksanakan reklame. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp49.571.242,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.986.759,00 atau 26,20%.
   e. Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar Rp2.793.562.564,00 atau 99,77% dari anggaran sebesar Rp2.800.000.000,00 disebabkan karena penetapan target yang agak tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.623.592.836,00 mengalami peningkatan sebesar Rp169.969.728,00 atau 6,48%.

f. Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp1.084.000,00 atau 108,40% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,00 disebabkan karena adanya penambahan objek pajak baru. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.086.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.000,00 atau 0,18%.
g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar Rp1.038.461.088,75 atau 94,17% dari anggaran sebesar Rp1.102.744.834,00 disebabkan karena penetapan target yang terlalu tinggi, terdapat pula pekerjaan fisik yang diluncurkan pada tahun berikutnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp914.461.319,00 mengalami peningkatan sebesar Rp123.999.769,75 atau 13,56%.
h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terealisasi sebesar Rp1.409.160.895,00 atau 108,40% dari anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 disebabkan karena adanya usulan objek pajak baru dari desa/perseorangan, penetapan lebih tinggi dari target, dan adanya penyetoran piutang. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.299.490.962,00 mengalami peningkatan sebesar Rp109.669.933,00 atau 8,44%.
i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar Rp63.938.910,00 atau 127,88% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 disebabkan karena, penetapan lebih tinggi dari target. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp65.532.341,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.593.431,00 atau 2,43%.

2. Pemungutan Pajak Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah sebagai berikut:
   a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
   b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
   c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
   d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
   e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
   f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

g. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Rincian Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum				
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.376.022.939,00	12.439.827.606,00	100,52	17.406.689.511,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	385.000.000,00	330.069.000,00	85,73	318.539.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	160.971.071,00	138.315.000,00	85,93	158.302.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	286.847.248,00	261.500.000,00	91,16	255.650.000,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	20.000.000,00	0,00	0,00	18.386.400,00
Retribusi Jasa Usaha				
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260.000.000,00	437.011.271,00	168,08	187.958.595,00
• Retribusi Tempat Pelelangan	100.000.000,00	51.811.000,00	51,81	0,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	15.000.000,00	21.957.000,00	146,38	4.550.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	125.000.000,00	137.514.600,00	110,01	156.856.300,00
• Retribusi Penyeberangan Air	8.000.000,00	9.579.500,00	119,74	7.714.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	60.000.000,00	59.316.000,00	98,86	56.387.000,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15.000.000,00	12.000.000,00	80,00	0,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	19.000.000,00
Jumlah	**13.816.841.258,00**	**13.903.900.977,00**	**100,63**	**18.590.032.806,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Retribusi Jasa Umum
      1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp12.439.827.606,00 atau 100,52% dari anggaran sebesar Rp12.376.022.939,00 disebabkan

karena masih ada klaim BPJS tahun 2022 yang belum dibayarkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp17.406.689.511,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.966.861.905,00 atau 28,53%.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp330.069.000,00 atau 85,73% dari anggaran sebesar Rp385.000.000,00 disebabkan karena terdapat beberapa pelanggan sudah tutup, target terlalu tinggi dan tidak sesuai potensi. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp318.539.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.530.000,00 atau 3,62%.

3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp138.315.000,00 atau 85,93% dari anggaran sebesar Rp160.971.071,00 disebabkan karena ada potensi yang tidak dilakukan penagihan dan rendahnya arus transportasi pelabuhan. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp158.302.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.987.000,00 atau 12,63%.

4) Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp261.500.000,00 atau 91,16% dari anggaran sebesar Rp286.847.248,00 disebabkan karena ada terjadi kebakaran pasar di Salakan sehingga tidak dilakukan penagihan pada bulan November dan Desember serta menurunnya pemanfaatan sewa pasar di wilayah kecamatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp255.650.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.850.000,00 atau 2,29%.

5) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00 disebabkan karena telah dilakukan koordinasi dan surat penyampaian penagihan ke pihak perusahaan tetapi tidak ada realisasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.386.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.386.400,00 atau 100%.

b. Retribusi Jasa Usaha

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp437.011.271,00 atau 168,08% dari anggaran sebesar Rp260.000.000,00 disebabkan karena adanya penambahan potensi baru dan peningkatan penggunaan jasa sewa alat berat. Sedangkan jika

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp187.958.595,00 mengalami peningkatan sebesar Rp249.052.676,00 atau 132,50%.

2) Retribusi Tempat Pelelangan terealisasi sebesar Rp51.811.000,00 atau 51,81% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 disebabkan karena kurangnya pengendalian pengawasan di tempat pelelangan ikan. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang tidak dianggarkan.

3) Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp21.957.000,00 atau 146,38% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00 disebabkan karena terjadi peningkatan penjualan hewan ternak khususnya sapi keluar wilayah Banggai Kepulauan sehingga banyak pemeriksaan *antemortem* sebelum keluar wilayah. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.550.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp17.407.000,00 atau 382,57%.

4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terealisasi sebesar Rp137.514.600,00 atau 110,01% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00 disebabkan karena penambahan potensi jasa labuh kapal dan arus transportasi di pelabuhan. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp156.856.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.341.700,00 atau 12,33%.

5) Retribusi Penyeberangan Air terealisasi sebesar Rp9.579.500,00 atau 119,74% dari anggaran sebesar Rp8.000.000,00 disebabkan karena terjadi peningkatan arus transportasi di atas air. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.714.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.865.500,00 atau 24,18%.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp59.316.000,00 atau 98,86% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00 disebabkan karena belum disosialisasikan secara maksimal ke masyarakat. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp56.387.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.929.000,00 atau 5,19%.

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terealisasi sebesar Rp12.000.000,00 atau 80,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00 disebabkan karena kurangnya kesadaran pengusaha untuk mengurus izin

usaha penjualan minuman beralkohol. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang tidak terealisasi.

3) Retribusi Izin Usaha Perikanan terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 disebabkan karena perubahan regulasi untuk izin usaha perikanan. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp19.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.000.000,00 atau 73,68%.

2. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah sebagai berikut:
   a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
   d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
   e. Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
   f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
   g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
   h. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
   i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
   j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
   k. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
   l. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
   m. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022 yang merupakan pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.206.364.872,00	4.206.364.872,00	100,00	2.916.652.411,84
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	17.500.000,00
Jumlah	**4.231.364.872,00**	**4.231.364.872,00**	**100,00**	**2.934.152.411,84**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) terealisasi sebesar Rp4.206.364.872,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.206.364.872,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.916.652.411,84 mengalami peningkatan sebesar Rp1.289.712.460,16 atau 44,22%.
   b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) terealisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp17.500.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.500.000,00 atau 42,86%.
2. Rincian penerimaan atas pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Rincian Penerima Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT Bank Sulteng	4.206.364.872,00	4.206.364.872,00	100,00	2.916.652.411,84
PDAM Air Malino	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	17.500.000,00
Jumlah	**4.231.364.872,00**	**4.231.364.872,00**	**100,00**	**2.934.152.411,84**

3. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT. BPD Sulteng diakui berdasarkan RUPS Luar Biasa dengan Akta Notaris FARID, SH. Nomor 23 tanggal 12 Februari 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	337.200.800,00	337,20	5.251.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	24.986.000,00	24,99	6.270.000,00
Jasa Giro	1.024.500.000,00	1.383.372.931,76	135,03	2.613.325.263,00
Pendapatan Bunga	500.000,00	105.999.434,00	21.199,89	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	1.366.927.685,39	91,13	478.882.412,92
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	80.000.000,00	820.598.213,68	1.025,75	1.874.806.438,50
Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000,00	17.406.452,30	17,406,45	5.654.456,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.739.965.056,00	1.873.261.001,33	107,66	352.270.263,00
Pendapatan BLUD	12.118.531.071,00	10.637.879.130,00	87,78	0,00
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	0,00	0,00	3.983.007,00
Jumlah	**16.663.596.127,00**	**16.567.631.648,46**	**99,42**	**5.340.442.840,42**

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp337.200.800,00 atau 337,20% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 disebabkan karena pada tahun 2023 ada penjualan kendaraan dinas sebesar Rp329.288.000,00 dan penjualan hasil bongkaran bangunan sebesar Rp7.912.800,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.251.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp331.949.800,00 atau 6.321,65%.
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp24.986.000,00 atau 24,99% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 disebabkan karena adanya sewa pemanfaatan gedung dan bangunan. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.270.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp18.716.000,00 atau 298,50%.
3. Jasa Giro terealisasi sebesar Rp1.383.372.931,76 atau 135,03% anggaran sebesar Rp1.024.500.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.613.325.263,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.229.952.331,24 atau 49,06%.
4. Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp105.999.434,00 atau 21.199,89% dari anggaran sebesar Rp500.000,00 disebabkan karena adanya penerimaan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp105.999.434,00 sedangkan jika dibandingkan Tahun 2022 yang tidak dianggarkan.
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp1.366.927.685,39 atau 91,13% dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp478.882.412,92 mengalami peningkatan sebesar Rp888.045.272,47 atau 185,44%.
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp820.598.213,68 atau 1.025,75% anggaran sebesar Rp80.000.000,00 disebabkan karena adanya penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp820.598.213,68. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.874.806.438,50 mengalami penurunan sebesar Rp1.054.208.224,82 atau 56,23%.
7. Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp17.406.452,30 atau 17.406,45% dari anggaran sebesar Rp100.000,00 disebabkan karena adanya penerimaan denda pajak mineral bukan logam batuan sebesar Rp62.533,00 dan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp17.343.919,30.

Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.654.456,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.751.996,30 atau 207,84%.

8. Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp1.873.261.001,33 atau 107,66% dari anggaran sebesar Rp1.739.965.056,00 disebabkan karena adanya pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp40.000.000,00, pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan tempat kerja sebesar Rp1.143.537,73, pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp1.498.583.230,60 dan pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp84.037.129,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp352.270.263,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.520.990.738,33 atau 431,77%.
9. Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp10.637.879.130,00 atau 87,78% dari anggaran sebesar Rp12.118.531.071,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang tidak dianggarkan.
10. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf tahun 2023 tidak dianggarkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.983.007,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 8 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	784.250.989.569,00	752.451.260.771,00	95,95	727.334.250.998,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.756.816.088,00	30.774.876.695,00	100,06	28.336.133.456,00
Jumlah	**815.007.805.657,00**	**783.226.137.466,00**	**96,10**	**755.670.384.454,00**

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan

direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 9 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	671.005.167.569,00	635.301.295.771,00	94,68	618.257.263.998,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.734.069.000,00	5.734.069.000,00	100,00	4.584.136.000,00
Dana Desa	107.511.753.000,00	111.415.896.000,00	103,63	104.492.851.000,00
Jumlah	**784.250.989.569,00**	**752.451.260.771,00**	**95,95**	**727.334.250.998,00**

Penjelasan:

1. Rincian Saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Rincian Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➢ Dana Bagi Hasil	72.172.064.569,00	44.156.169.532,00	61,18	77.483.168.576,00
➢ Dana Alokasi Umum	457.166.599.000,00	459.375.692.731,00	100,48	440.978.979.000,00
➢ Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.589.342.000,00	55.071.492.302,00	95,63	38.662.018.701,00
➢ Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	84.077.162.000,00	76.697.941.206,00	91,22	61.133.097.721,00
Jumlah	**671.005.167.569,00**	**635.301.295.771,00**	**94,68**	**618.257.263.998,00**

Penjelasan:

a. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp44.156.169.532,00 atau 61,18% dari anggaran sebesar Rp72.172.064.569,00 disebabkan karena adanya penerimaan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp2.415.893.676,00, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp8.663.990.292,00, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara-Royalty Rp21.399.899.243,00 dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp4.100.954.211,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp77.483.168.576,00 mengalami penurunan sebesar Rp33.326.999.044,00 atau 43,01%.

2) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp459.375.692.731,00 atau 100,48% dari anggaran sebesar Rp457.166.599.000,00 disebabkan karena

adanya penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp459.375.692.731,00 Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp440.978.979.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp18.396.713.731,00 atau 4,17%.

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp55.071.492.302,00 atau 95,63% dari anggaran sebesar Rp57.589.342.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp38.662.018.701,00 mengalami peningkatan sebesar Rp16.409.473.601,00 atau 42,44%.

4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp76.697.941.206,00 atau 91,22% dari anggaran sebesar Rp84.077.162.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp61.133.097.721,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.564.843.845,00 atau 25,46%.

b. Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 11 Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.824.580.000,00	3.422.353.048,00	121,16	6.045.137.955,00
DBH PPh Pasal 21	4.833.869.081,00	3.972.883.793,00	82,19	3.728.400.339,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	141.934.646,00	76.143.642,00	53,65	152.527.070,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.786.302,00	18.855.557,00	106,01	12.854.725,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.190.572.000,00	2.415.893.676,00	110,29	4.726.154.769,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	9.348.191.975,00	8.663.990.292,00	92,68	25.247.474.577,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	48.828.002.396,00	21.399.889.243,00	43,83	35.469.369.141,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	97.927.169,00	85.206.070,00	87,01	142.939.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.889.201.000,00	4.100.954.211,00	105,44	1.958.311.000,00
Jumlah	**72.172.064.569,00**	**44.156.169.532,00**	**61,18**	**77.483.168.576,00**

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp44.156.169.532,00 ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 untuk Kabupaten Banggai Kepulauan pada Lampiran V.02 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan pada PPH Pasal 21 sebesar Rp3.617.606.000,00 dan PPH Pasal 25/29 sebesar Rp67.582.000,00, Lampiran V.05 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Gas Bumi sebesar Rp7.222.617.000,00, Lampiran V.06 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Alam Mineral dan Batubara pada Royalti sebesar Rp19.982.341.000,00 dan Lampiran V.07 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan pada PSDH sebesar Rp69.750.000,00. Adapun tidak sesuainya penerimaan tersebut Tahun 2023 karena sudah terakumulasi dengan sisa realisasi tahun-tahun sebelumnya;

c. Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 12 Rincian Dana Alokasi Umum Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	457.166.599.000,00	459.375.692.731,00	100,48	440.978.979.000,00
Jumlah	**457.166.599.000,00**	**459.375.692.731,00**	**100,48**	**440.978.979.000,00**

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp459.375.692.731,00 ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 yang diatur pada Lampiran V.10 tentang Rincian Dana Alokasi Umum. Adapun tidak sesuainya penerimaan tersebut karena pada lampiran V.10 Perpres untuk DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp256.573.710.000,00, DAU yang ditentukan penggunaannya pada penggajian formasi PPPK sebesar Rp55.010.334.000,00, pada pendanaan kelurahan sebesar Rp600.000.000,00, pada bidang pendidikan sebesar Rp59.647.171.000,00, pada bidang kesehatan sebesar Rp42.752.315.000,00, dan bidang pekerjaan umum sebesar Rp42.583.069.000,00;

d. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 13 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.016.759.000,00	2.015.618.169,00	99,94	305.916.500,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.644.815.000,00	8.573.940.918,00	99,18	3.599.689.550,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.776.429.000,00	9.019.937.545,00	92,26	4.985.277.430,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	646.444.900,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	261.329.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	1.143.070.650,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	2.259.905.954,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan	224.654.000,00	199.900.000,00	88,98	617.135.375,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	949.799.300,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	1.703.529.000,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	2.062.723.00,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.350.000.000,00	2.225.538.941,00	94,70	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	29.573.775.000,00	0,00	0,00	6.161.144.550,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	28.395.681.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	5.733.220.500,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.900.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.332.832.792,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.002.910.000,00	4.640.875.729,00	92,76	0,00
Jumlah	**57.589.342.000,00**	**55.071.492.302,00**	**95,63**	**38.662.018.701,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp55.071.492.302,00 ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus. Adapun tidak sesuainya penerimaan Tahun 2023 tersebut karena pada lampiran V.11 dalam Perpres untuk bidang pendidikan-PAUD sebesar Rp2.016.759.000,00, bidang pendidikan-SD sebesar Rp8.644.815.000,00, bidang pendidikan-SMP sebesar Rp9.776.429.000,00, bidang kesehatan-pengendalian penyakit sebesar Rp224.654.000,00, bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan sebesar Rp5.002.910.000,00, bidang jalan-jalan mendukung konektivitas daerah sebesar Rp29.573.775.000,00 dan bidang kelautan dan perikanan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sebesar Rp2.350.000.000,00;

e. Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 14 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik-BOS Reguler	19.849.740.000,00	19.803.561.613,00	99,77	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	32.610.991.000,00	30.479.136.637,00	93,46	29.582.667.889,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.210.750.000,00	1.705.879.919,00	77,16	1.366.250.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.087.632.000,00	1.087.632.000,00	100,00	1.245.075.600,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.822.400.000,00	2.830.791.000,00	100,30	624.600.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.043.820.000,00	2.007.863.760,00	98,24	13.500.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.493.588.000,00	13.980.384.277,00	75,60	23.913.807.382,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.965.241.000,00	3.373.802.000,00	85,08	2.110.858.600,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	1.650.710.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	480.000.000,00	477.100.000,00	99,40	250.428.250,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	438.800.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	513.000.000,00	512.990.000,00	100,00	375.200.000,00
Jumlah	**84.077.162.000,00**	**76.697.941.206,00**	**91,22**	**61.133.097.721,00**

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp76.697.941.206,00 ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V.12 tentang Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Adapun tidak sesuainya penerimaan Tahun 2023 tersebut karena pada lampiran V.12 untuk bantuan operasional sekolah sebesar Rp19.849.740.000,00, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD sebesar Rp2.822.400.000,00, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebesar Rp2.043.820.000,00, tunjangan profesi guru sebesar Rp32.610.991.000,00, tambahan penghasilan guru sebesar Rp2.210.750.000,00, tunjangan khusus guru sebesar Rp1.087,632.000,00, BOK Dinas sebesar Rp4.996.618.000,00, BOK puskesmas sebesar Rp13.496.970.000,00, bantuan operasional keluarga berencana sebesar Rp3.526.441.000,00, dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp438.800.000,00, dana fasilitas penanaman modal sebesar Rp480.000.000,00 dan dana ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp513.000.000,00.

2. Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp5.734.069.000,00 ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V.16 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal. Adapun tidak sesuainya penerimaan tersebut karena Kabupaten Banggai Kepulauan tidak mendapatkan alokasi anggarannya;
3. Dana Desa yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp111.415.896.000,00 ***tidak*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V.15 tentang Rincian Dana Desa dengan total alokasi sebesar Rp107.511.753.000,00. Adapun tidak sesuainya penerimaan Tahun 2023 tersebut dikarenakan adanya penambahan Dana Desa untuk beberapa

daerah salah satunya Banggai Kepulauan yang berdasarkan PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK 201/PMK-07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa dengan tambahan dana sebesar Rp3.904.143.000,00.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 15 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➢ Pendapatan Bagi Hasil	29.526.816.088,00	29.544.876.695,00	100,06	28.336.133.456,00
➢ Bantuan Keuangan	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**30.756.816.088,00**	**30.774.876.695,00**	**100,06**	**28.336.133.456,00**

Penjelasan:

1. Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 16 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.052.784.532,00	4.594.726.489,00	90,93	3.622.285.803,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.281.448.789,00	4.828.839.657,00	91,43	4.811.747.046,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.291.468.320,00	11.310.898.631,00	100,17	11.295.055.742,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	314.630.674,00	437.099.085,00	138,92	63.356.697,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.586.483.773,00	8.373.312.833,00	110,37	8.543.688.168,00
Jumlah	**29.526.816.088,00**	**29.544.876.695,00**	**100,06**	**28.336.133.456,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp4.594.726.489,00 atau 90,93% dari anggaran sebesar Rp5.052.784.532,00 disebabkan karena penyaluran untuk bulan desember Tahun 2023 disalurkan di Tahun 2024 sehingga masih ada sisa yang belum disalurkan. Sedangkan

jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.622.285.803,00 mengalami peningkatan sebesar Rp972.440.686,00 atau 26,85%.

b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp4.828.839.657,00 atau 91,43% dari anggaran sebesar Rp5.281.448.789,00 disebabkan karena penyaluran untuk bulan desember Tahun 2023 disalurkan di Tahun 2024 sehingga masih ada sisa yang belum disalurkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.811.747.046,00 mengalami peningkatan sebesar Rp17.092.611,00 atau 0,36%.

c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp11.310.898.631,00 atau 100,17% dari anggaran sebesar Rp11.291.468.320,00 disebabkan karena dana bagi hasil Tahun 2023 proses penagihan dan pembayarannya direalisasikan sesuai target yang telah ditentukan. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.295.055.742,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.842.889,00 atau 0,14%.

d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan terealisasi sebesar Rp437.099.085,00 atau 138,92% dari anggaran sebesar Rp314.630.674,00 disebabkan karena adanya perubahan pembayaran tarif pajak air permukaan di Tahun 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp63.356.697,00 mengalami peningkatan sebesar Rp373.742.388,00 atau 589,90%.

e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp8.373.312.833,00 atau 110,37% dari anggaran sebesar Rp7.586.483.773,00 disebabkan karena pembagian dana bagi hasil pajak rokok disalurkan sesuai pembagian dari pusat ke provinsi sampai kabupaten ada peningkatan produksi setelah Pandemi *Covid-19*. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.543.688.168,00 mengalami penurunan sebesar Rp170.375.335,00 atau 1,99%.

2. Rincian Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 17 Rincian Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**1.230.000.000,00**	**1.230.000.000,00**	**100,00**	**0,00**

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp1.230.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2022 yang tidak dianggarkan.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 18 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.977.222.848,00	3.296.611.624,00	82,89	22.254.328.713,00
Jumlah	**3.977.222.848,00**	**3.296.611.624,00**	**82,89**	**22.254.328.713,00**

5.1.1.3.1. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 dan 2022 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 19 Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-Lain Pendapatan				
• Pendapatan Hibah Dana BOS	1.091.440.000,00	0,00	0,00	17.285.214.392,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.885.782.848,00	3.296.611.624,00	114,24	4.969.114.321,00
Jumlah	**3.977.222.848,00**	**3.296.611.624,00**	**82,89**	**22.254.328.713,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pendapatan Hibah Dana BOS tidak terealisasi dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp17.285.214.392,00. Tidak terealisasi TA 2023 disebabkan karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Penganggaran Dana BOS, dana BOP PAUD dan dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN merupakan bagian dari DAK Non Fisik yang dialokasikan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.
   b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi sebesar Rp3.296.611.624,00 atau 114,24% dari anggaran sebesar Rp2.885.782.848,00 disebabkan karena adanya ketambahan kepesertaan BPJS melalui *Universal Health Coverage* (UHC) sehingga terjadi peningkatan pendapatan FKTP Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.969.114.321,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.672.502.697,00 atau 33,66%.
2. Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP untuk masing-masing FKTP dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5. 20 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023 Realisasi
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Totikum	293.719.974,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Salakan	451.354.464,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tataba	187.772.169,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lolantang	183.013.389,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bulagi	287.818.158,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Patukuki	218.482.263,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sabang	238.348.800,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lumbi-Lumbia	176.428.175,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mansamat	196.529.493,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Saleati	189.294.072,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tinangkung Utara	220.914.251,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Totikum Selatan	211.888.712,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bakalan Raya	108.028.537,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bonepuso	30.588.323,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN RSP Bilabanggai	302.430.844,00
Jumlah	**3.296.611.624,00**

5.1.2. Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 21 Rincian Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	624.319.448.894,00	547.076.049.093,21	87,63	536.100.878.785,43
Belanja Modal	151.052.856.292,00	137.246.465.854,00	90,86	127.148.619.652,00
Belanja Tidak Terduga	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00	92,82	721.724.500,00
Belanja Transfer	160.373.599.664,00	163.604.370.514,00	102,01	154.505.385.371,00
Jumlah	**936.937.268.812,00**	**849.032.765.461,21**	**90,62**	**818.476.608.308,43**

5.1.2.1. Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 22 Rincian Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	373.972.907.406,00	332.586.846.754,00	88,93	324.897.549.199,00
Belanja Barang dan Jasa	213.350.782.625,00	191.836.809.175,21	89,92	190.882.105.372,43
Belanja Hibah	33.016.621.863,00	18.792.120.164,00	56,92	10.843.624.410,00
Belanja Bantuan Sosial	3.979.137.000,00	3.860.273.000,00	97,01	9.477.599.804,00
Jumlah	**624.319.448.894,00**	**547.076.049.093,21**	**87,63**	**536.100.878.785,43**

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

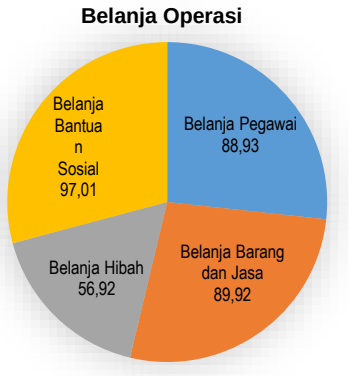

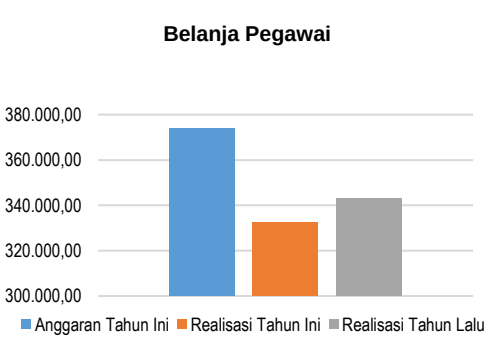

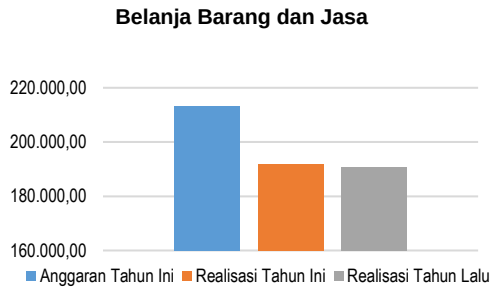

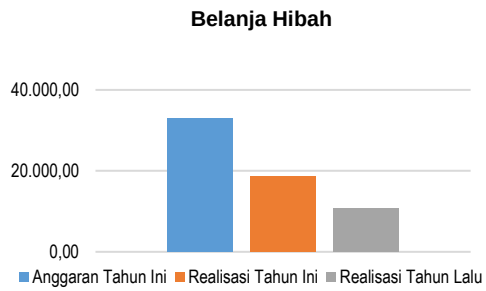

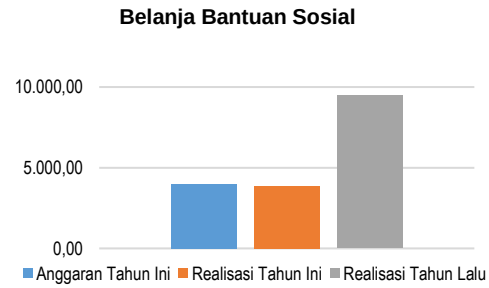

Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 26.***

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 23 Rincian Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	258.545.680.156,00	224.551.214.187,00	86,85	207.068.681.442,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	41.474.600.785,00	40.410.424.301,00	97,43	47.737.560.008,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.984.430.361,00	51.167.219.143,00	89.79	55.734.425.972,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.371.100.804,00	9.068.011.173,00	96,77	8.430.417.162,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	55.036.800,00	45.360.000,00	82,42	90.210.315,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	410.880.000,00	100,00	397.300.000,00
Belanja Pegawai BOS	5.026.358.500,00	4.951.020.500,00	98.50	5.438.954.300,00
Belanja Pegawai BLUD	2.104.820.000,00	1.982.717.450,00	94,20	0,00
Jumlah	**373.972.907.406,00**	**332.586.846.754,00**	**88.93**	**324.897.549.199,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp224.551.214.187,00 atau 86,85% dari anggaran sebesar Rp258.545.680.156,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp207.068.681.442,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp17.482.532.745 atau 8,44%.
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp40.410.424.301,00 atau 97,43% dari anggaran sebesar Rp41.474.600.785,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp47.737.560.008,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.327.135.707,00 atau 15.35%.
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp51.167.219.143,00 atau 89,79% dari anggaran sebesar Rp56.984.430.361,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp55.734.425.972,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.567.206.829,00 atau 8.19%.
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp9.068.011.173,00 atau 96,77% dari anggaran sebesar Rp9.371.100.804,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.430.417.162,00 mengalami peningkatan sebesar Rp637.594.011,00 atau 7.56%.
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp45.360.000,00 atau 82,42% dari anggaran sebesar Rp55.036.800,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp90.210.315,00 mengalami penurunan sebesar Rp44.850.315,00 atau 49.72%.
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp410.880.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp410.880.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp397.300.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp13.580.000,00 atau 3.42%.
g. Belanja Pegawai BOS terealisasi sebesar Rp4.951.020.500,00 atau 98,50% dari anggaran sebesar Rp5.026.358.500,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.438.954.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp487.933.800,00 atau 8.97%.
h. Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp1.982.717.450,00 atau 94,20% dari anggaran sebesar Rp2.104.820.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 tidak ada realisasi sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp1.982.717.450,00 atau 100%.

2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 27.***

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 24 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	44.981.314.876,00	40.068.149.237,00	89,08	38.042.110.557,004
Belanja Jasa	85.700.784.491,00	79.476.937.340,00	92,74	83.590.094.133,00
Belanja Pemeliharaan	5.406.980.050,00	5.373.784.269,00	99,39	2.396.836.133,00
Belanja Perjalanan Dinas	53.825.608.149,00	47.069.701.592,00	87,45	55.731.442.880,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	459.230.000,00	451.819.500,00	98,39	661.471.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	12.851.909.020,00	12.659.283.819,21	98,50	10.460.150.669,43
Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.124.956.039,00	6.737.133.418,00	66,54	0,00
Jumlah	**213.350.782.625,00**	**191.836.809.175,21**	**89,92**	**190.882.105.372,43**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp40.068.149.237,00 atau 89,08% dari anggaran sebesar Rp44.981.314.876,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp38.042.110.557,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.026.038.680,00 atau 5,33%.
   b. Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp79.476.937.340,00 atau 92,74% dari anggaran sebesar Rp85.700.784.491,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp83.590.094.133,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.113.156.793,00 atau 4,92%.
   c. Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp5.373.784.269,00 atau 99,39% dari anggaran sebesar Rp5.406.980.050,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.396.836.133,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.976.948.136,00 atau 124,20%.

d. Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp47.069.701.592,00 atau 87,45% dari anggaran sebesar Rp53.825.608.149,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp55.731.442.880,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.661.741.288,00 atau 15,54%.
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp451.819.500,00 atau 98,39% dari anggaran sebesar Rp459.230.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp661.471.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp209.651.500,00 atau 31,69%.
f. Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp12.659.283.819,21 atau 98,50% dari anggaran sebesar Rp12.851.909.020,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.460.150.669,43 mengalami kenaikan sebesar Rp2.199.133.149,78 atau 21,02%.
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp6.737.133.418,00 atau 66,54% dari anggaran sebesar Rp10.124.956.039,00. Hal ini disebabkan karena pagu belanja tidak bisa diklaim/digunakan semuanya atau realisasi berdasarkan rill *cost*.

2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 28***.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 25 Rincian Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
• Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.546.235.930,00	18.321.734.231,00	56,29	10.373.238.450,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	470.385.933,00	470.385.933,00	100,00	470.385.960,000
Jumlah	**33.016.621.863,00**	**18.792.120.164,00**	**56,92**	**10.843.624.410,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp18.321.734.231,00 atau 56,29% dari anggaran sebesar Rp32.546.235.930,00 disebabkan karena yang menggunakan dana hibah tersebut tidak memenuhi administrasi yang diperlukan dalam pencairan diantaranya yakni belum siapnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar untuk pencairan dana hibah. Dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp10.373.238.450,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.948.495.781,00 atau 76,63%.
   b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp470.385.933,00 atau 100% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp470.385.960,00.
2. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2019-2024 yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 26 Rincian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 dan 2022

Partai Politik	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	87.833.944,00	87.833.944,00	100,00	87.840.000,00
Partai Amanat Nasional (PAN)	62.350.013,00	62.350.013,00	100,00	62.350.500,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	70.087.678,00	70.087.678,00	100,00	70.087.678,00
Partai Demokrat	53.403.624,00	53.403.624,00	100,00	53.403.624,00
Partai Perindo	12.133.025,00	12.133.025,00	100,00	12.133.025,00
Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	47.506.516,00	47.506.516,00	100,00	47.500.000,00
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	30.282.199,00	30.282.199,00	100,00	30.282.199,00
Partai Nasional Demokrasi (NasDem)	89.967.525,00	89.967.525,00	100,00	89.967.525,00
Partai Bulan Bintang	16.821.409,00	16.821.409,00	100,00	16.821.409,00
Jumlah	**470.385.933,00**	**470.385.933,00**	**100,00**	**470.385.960,00**

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 27 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	928.580.000,00	899.520.000,00	96,87	1.779.140.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.900.000,00	10.900.000,00	100,00	414.358.804,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.450.000.000,00	1.382.000.000,00	95,31	5.690.000.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	996.082.000,00	974.578.000,00	97,84	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	100.000.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	94.575.000,00	94.575.000,00	100,00	1.494.101.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	49.000.000,00	48.700.000,00	99,39	0,00
Jumlah	**3.979.137.000,00**	**3.860.273.000,00**	**97,01**	**9.477.599.804,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu terealisasi sebesar Rp899.520.000,00 atau 96,87% dari anggaran sebesar Rp928.580.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.779.140.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp879.620.000,00 atau 49,44%.
   b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu terealisasi sebesar Rp10.900.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp10.900.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp414.358.804,00 mengalami penurunan sebesar Rp403.458.804,00 atau 97,37%.
   c. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp1.382.000.000,00 atau 95,31% dari anggaran sebesar

Rp1.450.000.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.690.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.308.000.000,00 atau 75,71%.

d. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp974.578.000,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp996.082.000,00. Sedangkan jika dibandingkan Tahun 2022 yang tidak terealisasi mengalami kenaikan sebesar Rp974.578.000,00.

e. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp450.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp100.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp350.000.000,00 atau 350,00%.

f. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp94.575.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp94.575.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.494.101.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.399.526.000,00 atau 93,67%.

g. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) terealisasi sebesar Rp48.700.000,00 atau 99,39% dari anggaran sebesar Rp49.000.000,00. Sedangkan jika dibandingkan Tahun 2022 yang tidak terealisasi mengalami kenaikan sebesar Rp48.700.000,00.

2. Pemberian bantuan sosial di atas, dilandasi peraturan-peraturan sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 406 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Kegiatan Kesehatan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

b. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 480 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

c. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 240 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Bagi Lanjut Usia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

d. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 385 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang untuk Anak-Anak Sekolah Luar Biasa Negeri, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Furqon dan Tiberias Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
e. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 481 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Penerima Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahun 2023;
f. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 149 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahun 2023;
g. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 188 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Penerima Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahun 2023;
h. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 338 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Penerima Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Tahun 2023;
i. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 471 Tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Uang bagi Lanjut Usia Non Potensial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
j. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 479 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Sosial Usaha Bersama/KUBE Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
k. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 378 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
l. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nama Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023;
m. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 249 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

n. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 215 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pangan Penanganan Inflasi pada Daerah Terindikasi Kemiskinan Ekstrem Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
o. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 194 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
p. Keputusan Lurah Sabang Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dudukan dan Tong Fiber di Kelurahan Sabang Tahun Anggaran 2023;
q. Keputusan Lurah Bulagi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dudukan dan Tong Fiber di Kelurahan Bulagi I Tahun Anggaran 2023.

5.1.2.2. Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 28 Rincian Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah	4.551.020.000,00	3.418.849.908,00	75,12	4.426.560.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.992.755.382,00	17.125.860.281,00	95,18	22.303.443.478,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.196.411.022,00	56.180.176.865,00	91,80	40.647.675.416,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.176.212.100,00	60.393.603.200,00	89,90	59.626.725.958,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.457.788,00	127.975.600,00	93,78	144.214.800,00
Jumlah	**151.052.856.292,00**	**137.246.465.854,00**	**90,86**	**127.148.619.652,00**

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 29***.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023,

persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 29 Rincian Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	632.639.000,00	583.761.000,00	92,27	4.296.599.000,00
Belanja Modal Lapangan	3.918.381.000,00	2.835.088.908,00	72,35	129.961.000,00
Jumlah	**4.551.020.000,00**	**3.418.849.908,00**	**75,12**	**4.426.560.000,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Tanah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Tanah Persil terealisasi sebesar Rp583.761.000,00 atau 92,27% dari anggaran sebesar Rp632.639.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.296.599.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.712.838.000,00 atau 86,41%.
   b. Belanja Modal Lapangan terealisasi sebesar Rp2.835.088.908,00 atau 72,35% dari anggaran sebesar Rp3.918.381.000,00 Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp129.961.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.705.127.908,00 atau 2.081,49%.
2. Rincian saldo Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 30.***

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 30 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	360.000.000,00	357.538.000,00	99,32	235.727.440,00
Belanja Modal Alat Angkutan	394.494.920,00	379.650.000,00	96,24	1.303.199.550,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.005.000,00	7.005.000,00	100,00	171.132.350,00
Belanja Modal Alat Pertanian	26.250.000,00	26.203.000,00	99,82	287.630.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.307.427.364,00	7.119.883.409,00	97,43	6.086.597.266,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	801.548.200,00	793.754.095,00	99,03	3.643.223.403,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.401.013.500,00	1.103.769.500,00	78,78	1.918.335.937,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	16.659.500,00	16.659.300,00	100,00	337.197.500,00
Belanja Modal Komputer	6.888.543.505,00	6.791.739.815,00	98,59	8.107.086.132,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.150.000,00	7.146.000,00	99,94	199.985.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	150.000.000,00	149.980.000,00	99,99	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	240.700.000,00	240.650.000,00	99,98	13.328.900,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	378.963.393,00	118.882.162,00	31,37	0,00
Jumlah	**17.992.755.382,00**	**17.125.860.281,00**	**95,18**	**22.303.443.478,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Alat Besar terealisasi sebesar Rp357.538.000,00 atau 99,32% dari anggaran Rp360.000.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp235.727.440,00 mengalami peningkatan sebesar Rp121.810.560,00 atau 51,67%.
   b. Belanja Modal Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp379.650.000,00 atau 96,24% dari anggaran sebesar Rp394.494.920,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.303.199.550,00 mengalami penurunan sebesar Rp923.549.550,00 atau 70,87%.
   c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terealisasi sebesar Rp7.005.000,00 atau 100% dari anggaran Rp7.005.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp171.132.350,00 mengalami penurunan sebesar Rp164.127.350,00 atau 95,91%.
   d. Belanja Modal Alat Pertanian terealisasi sebesar Rp26.203.000,00 atau 99,82% dari anggaran Rp26.250.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp287.630.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp261.427.000,00 atau 90,89%.
   e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp7.119.883.409,00 atau 97,43% dari anggaran Rp7.307.427.364,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.086.597.266,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.033.286.143,00 atau 16,98%.

f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terealisasi sebesar Rp793.754.095,00 atau 99,03% dari anggaran Rp801.548.200,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.643.223.403,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.849.469.308,00 atau 78,21%.
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan terealisasi sebesar Rp1.103.769.500,00 atau 78,78% dari anggaran Rp1.401.013.500,00 Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.918.335.937,00 mengalami penurunan sebesar Rp814.566.437,00 atau 42,46%.
h. Belanja Modal Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp16.659.300,00 atau 100% dari anggaran Rp16.659.500,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp337.197.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp320.538.200,00 atau 95,06%.
i. Belanja Modal Komputer terealisasi sebesar Rp6.791.739.815,00 atau 98,59% dari anggaran Rp6.888.543.505,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.107.086.132,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.315.346.317,00 atau 16,22%.
j. Belanja Modal Alat Eksplorasi terealisasi sebesar Rp13.000.000,00 atau 100% dari anggaran Rp13.000.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00.
k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja terealisasi sebesar Rp7.146.000,00 atau 99,94% dari anggaran Rp7.150.000,00 sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp199.985.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp192.839.000,00 atau 96,43%.
l. Belanja Modal Rambu-Rambu terealisasi sebesar Rp149.980.000,00 atau 99,99% dari anggaran Rp150.000.000,00 jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00.
m. Belanja Modal Peralatan Olahraga terealisasi sebesar Rp240.650.000,00 atau 99,98% dari anggaran Rp240.700.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp13.328.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp227.321.100,00 atau 1.705,48%.
n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terealisasi sebesar Rp118.882.162,00 atau 31,37% dari anggaran Rp378.963.393,00 disebabkan

karena sulitnya mencari pihak ketiga yang bersedia menyediakan barang dengan estimasi waktu yang ditentukan akhir desember.

2. Rincian saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 31***.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 31 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	57.998.534.422,00	53.319.770.065,00	91,93	39.563.492.416,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.197.876.600,00	2.860.406.800,00	89,45	1.084.183.000,00
Jumlah	**61.196.411.022,00**	**56.180.176.865,00**	**91,80**	**40.647.675.416,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp53.319.770.065,00 atau 91,93% dari anggaran Rp57.998.534.422,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp39.563.492.416,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.756.277.649,00 atau 34,77%.
   b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti terealisasi sebesar Rp2.860.406.800,00 atau 89,45% dari anggaran Rp3.197.876.600,00 sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.084.183.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.776.223.800,00 atau 163,83%.
2. Rincian saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 32***.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan 2022 yaitu

rincian atas saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	47.589.268.100,00	45.440.961.600,00	95,49	33.845.355.258,00
Belanja Modal Bangunan Air	16.751.814.000,00	12.432.028.600,00	74,21	11.938.789.500,00
Belanja Modal Instalasi	2.556.290.000,00	2.243.421.000,00	87,76	13.555.090.300,00
Belanja Modal Jaringan	278.840.000,00	277.192.000,00	99,41	287.490.900,00
Jumlah	**67.176.212.100,00**	**60.393.603.200,00**	**89,90**	**59.626.725.958**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp45.440.961.600,00 atau 95,49% dari anggaran Rp47.589.268.100,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp33.845.355.258,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.595.606.342,00 atau 34,26%.
   b. Belanja Modal Bangunan Air terealisasi sebesar Rp12.432.028.600,00 atau 74,21% dari anggaran Rp16.751.814.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.938.789.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp493.239.100,00 atau 4,13%.
   c. Belanja Modal Instalasi terealisasi sebesar Rp2.243.421.000,00 atau 87,76% dari anggaran sebesar Rp2.556.290.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp13.555.090.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.311.669.300,00 atau 83,45%.
   d. Belanja Modal Jaringan terealisasi sebesar Rp277.192.000,00 atau 99,41% dari anggaran Rp278.840.000,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp277.192.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp287.490.900,00 atau 3,58%.
2. Rincian saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 33***.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian

atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 33 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	109.623.188,00	101.141.000,00	92,26	144.214.800,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	26.834.600,00	26.834.600,00	100	0,00
Jumlah	**136.457.788,00**	**127.975.600,00**	**93,78**	**144.214.800,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak terealisasi sebesar Rp101.141.000,00 atau 92,26% dari anggaran Rp109.623.188,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 144.214.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp43.073.800,00 atau 29,87%.
   b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga terealisasi sebesar Rp 26.834.600,00 atau 100,00 %.
2. Rincian saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada ***Lampiran 33***.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 34 Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00	92,82	721.724.500,00

Penjelasan:

1. Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp1.105.880.000,00 atau 92,82% dari anggaran Rp1.191.363.962,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp721.724.500,00 mengalami peningkatan sebesar Rp384.155.500,00 atau 53,23%.
2. Belanja Tidak Terduga tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka penanggulangan bencana berupa bencana kekeringan sebesar Rp367.870.000,00, dan bencana kekeringan dan kebakaran sebesar Rp738.010,000,00.

5.1.2.4. Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Transfer TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Transfer – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 35 Rincian Belanja Transfer Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil	3.160.953.364,00	2.487.581.214,00	78,70	2.258.875.971,00
Belanja Bantuan Keuangan	157.212.646.300,00	161.116.789.300,00	102,48	152.246.509.400,00
Jumlah	**160.373.599.664,00**	**163.604.370.514,00**	**102,01**	**154.505.385.371,00**

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bagi Hasil TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 36 Rincian Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	661.849.284,00	628.573.289,00	94,97	592.810.829,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.499.104.080,00	1.859.007.925,00	74,39	1.666.065.142,00
Jumlah	**3.160.953.364,00**	**2.487.581.214,00**	**78,70**	**2.258.875.971,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bagi Hasil di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa terealisasi sebesar Rp628.573.289,00 atau 94,97% dari anggaran sebesar Rp661.849.284,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp592.810.829,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.762.460,00 atau 6,03%.
   b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa terealisasi sebesar Rp1.859.007.925,00 atau 74,39% dari anggaran sebesar Rp2.499.104.080,00. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.666.065.142,00 mengalami kenaikan sebesar Rp192.942.783,00 atau 11,58%.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyalurkan dana Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.14.3/23/BAPENDA.G.ST/2023 Tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2023.
3. Rincian dana Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 5. 37 Rincian Dana Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2023

Pemerintah Daerah		Nilai Transfer
1.	Kota Palu	94.151.027.827,00
2.	Kabupaten Parigi Moutong	55.154.858.365,00
3.	Kabupaten Poso	62.066.614.711,00
4.	Kabupaten Morowali	52.179.427.557,00
5.	Kabupaten Banggai	58.395.263.826,00
6.	Kabupaten Banggai Kepulauan	25.400.551.177,00
7.	Kabupaten Tolitoli	38.780.177.282,00
8.	Kabupaten Buol	29.298.564.649,00
9.	Kabupaten Tojo Una-Una	33.094.744.147,00
10.	Kabupaten Donggala	38.965.695.466,00
11.	Kabupaten Sigi	36.252.638.458,00
12.	Kabupaten Banggai Laut	22.824.726.469,00
13.	Kabupaten Morowali Utara	35.304.860.066,00
Jumlah		**581.869.150.000,00**

4. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 141 Desa yang didasarkan pada Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2022. Rincian desa penerima Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 34a.***

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 38 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	49.700.893.300,00	49.700.893.300,00	100,00	47.753.658.400,00
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	107.511.753.000,00	111.415.896.000,00	103,63	104.492.851.000,00
Jumlah	**157.212.646.300,00**	**161.116.789.300,00**	**102,48**	**152.246.509.400,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp49.700.893.300,00 atau 100% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp47.753.658.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.947.234.900,00 atau 4,08%.
   b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp111.415.896.000,00 atau 103,63% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp104.492.851.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.923.045.000,00 atau 6,63%. Pelampauan realisasi TA 2023 disebabkan karena adanya penambahan Dana Desa sebesar Rp3.904.143.000,00 sesuai dengan PMK Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas PMK 201/PMK-07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disalurkan kepada 141 Desa dengan rincian dapat dilihat pada ***Lampiran 34b.***
   a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
   b. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian, Tata Cara Pengalokasian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2023.

5.1.3. Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Tabel 5. 39 Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	80.251.515.213,00	80.133.513.365,49	99,85	91.016.990.071,66
Pengeluaran Pembiayaan	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00	3.360.000.000,00
Jumlah	**76.891.515.213,00**	**76.773.513.365,49**	**99,85**	**87.656.990.071,66**

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 40 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.251.515.213,00	80.133.513.365,49	99,85	91.016.990.071,66
Jumlah	**80.251.515.213,00**	**80.133.513.365,49**	**99,85**	**91.016.990.071,66**

Penjelasan:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terealisasi sebesar Rp80.133.513.365,49 atau 99,85% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp91.016.990.071,66 mengalami penurunan sebesar Rp10.883.476.706,17 atau 11,96%.

5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 41 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	2.043.478.940,66
Pelampauan Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	489.858.483,00	489.858.483,92	100,00	0,00
Penghematan Belanja	79.761.656.730,00	79.761.656.729,57	100,00	88.973.511.131,00
Sisa Belanja Lainnya	0,00	(118.001.848,00)	0,00	0,00
Jumlah	**80.251.515.213,00**	**80.133.513.365,49**	**99,85**	**91.016.990.071,66**

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 42 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00	3.360.000.000,00
Jumlah	**3.360.000.000,00**	**3.360.000.000,00**	**100,00**	**3.360.000.000,00**

Penjelasan:

Penyertaan modal daerah pada BUMD terealisasi sebesar Rp3.360.000.000,00 atau 100% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.360.000.000,00.

5.1.3.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 43 Rincian Penyertaan Modal Daerah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
• PT. Bank Sulteng	2.360.000.000,00	2.360.000.000,00	100,00	2.360.000.000,00
• PDAM Air Malino	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Jumlah	**3.360.000.000,00**	**3.360.000.000,00**	**100,00**	**3.360.000.000,00**

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada TA 2023 telah melakukan penyertaan modal pada:

1. PT. Bank Sulteng sebesar Rp2.360.000.000,00 atau sebanyak 166.175 lembar saham dengan harga per lembar Rp100.000,00 dengan porsi kepemilikan 3,57%. Total penyertaan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini sebesar Rp27.640.000.000,00. Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Air Molino sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga menambah total penyertaan dari tahun 2005 sampai dengan saat ini sebesar Rp10.749.805.000,00. Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 508 Tahun 2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan TA 2023.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - SiLPA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - SiLPA TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Tabel 5. 44 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➢ **Pendapatan Daerah**				
✓ Pendapatan Asli Daerah	41.060.725.094,00	41.330.438.640,31	100,66	33.146.420.283,26
✓ Pendapatan Transfer	815.007.805.657,00	783.226.137.466,00	96,10	755.670.384.454,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	3.977.222.848,00	3.296.611.624,00	82,89	22.254.328.713,00
➢ **Belanja Daerah**				
✓ Belanja Operasi	624.319.448.894,00	547.076.049.093,21	87,63	536.100.878.785,43
✓ Belanja Modal	151.052.856.292,00	137.246.465.854,00	90,86	127.148.619.652,00
✓ Belanja Tak Terduga	1.191.363.962,00	1.105.880.000,00	92,82	721.724.500,00
✓ Belanja Transfer	160.373.599.664,00	163.604.370.514,00	102,01	154.505.385.371,00
➢ **Pembiayaan Daerah**				
✓ Penerimaan Pembiayaan	80.251.515.213,06	80.133.513.365,49	99,85	91.016.990.071,66

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
✓ Pengeluaran Pembiayaan	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00	3.360.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**55.593.935.634,59**	**0,00**	**80.251.515.213,49**

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada TA 2023 memiliki SiLPA sebesar Rp55.593.935.634,59 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 45 Rincian SiLPA Terikat Tahun 2023

Uraian	Nilai
➢ **Dana SiLPA Terikat**	
✓ Dana pada Kas di BLUD	1.820.146.100,00
✓ Dana pada Kas Dana BOS	249.470.563,30
✓ Dana pada Kas Dana BOP PAUD	94.344.200,00
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	33.990.822,00
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP di RKUD	1.107.495.039,00
✓ Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	966.201.968,00
✓ **Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:**	
• **Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:**	
» DAK Reguler	4.100.115.615,00
» DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penugasan-PAUD/SD/SMP	489.940.679,00
» DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.101.448.544,00
» DAK Fisik Bidang Pertanian	150.001,00
» DAK Fisik Sanitasi	17.251.191,00
» DAK Fisik Perumahan dan Pemukiman	45.800.000,00
» DAK Fisik Air Minum	2.445.525.200,00
» DAK Penugasan	1.612.197.190,00
» DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penugasan-PAUD/SD/SMP	201.306.964,00
» DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	1.283.686.697,0
» DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	116.035.310,00
» DAK Fisik Penugasan Irigasi	6.237.000,00
» DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik	4.289.219,00
» DAK Fisik IKM	522.000,00
» DAK Fisik Perumahan dan Pemukiman	120.000,00
» DAK Afirmasi	169.285.294,00
» DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	19.007.037,00
» DAK Fisik Bidang Pendidikan-SD/SMP	111.498.250,00
» DAK Fisik Transportasi Perdesaan	10.620.200,00
» DAK Fisik Air Minum	28.159.807,00
» DAK Fisik Penugasan Cadangan	400,00
» DAK Fisik Kelautan dan Perikanan	400,00
Total DAK Fisik	**5.881.598.499,00**
• **Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:**	
» Dana Non Fisik – BOKKB-BOKB	74.565.000,00
» Dana Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	648.298.476,00
» Dana Non Fisik – Bantuan Operasional Puskesmas (BOK)	966.189.952,00
» Dana Non Fisik – Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	34.442.144,00
» Dana Non Fisik – Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP)	500.000,00

Uraian	Nilai
» Dana Non Fisik – Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)	2.400.000,00
» Dana Non Fisik – Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	666.938.765,00
» Dana Non Fisik – Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD	333.379.919,00
» Dana Non Fisik – Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	23.967.000,00
» Dana Non Fisik – Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.000.159,00
Total DAK Non Fisik	**2.753.681.415,00**
✓ **Dana Insentif Daerah**	1.101.566.356,00
✓ **Dana Bagi Hasil CHT**	8.612.869,00
✓ **Dana Alokasi Umum *Earmarked***	26.726.342.817,00
TOTAL SILPA TERIKAT	**40.743.450.648,30**

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5. 46 Rincian SiLPA Tahun 2023

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	52.339.525.020,53
Kas di Bendahara Penerimaan	44.136.400,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	21.596.569,00
Kas di BLUD	1.820.146.100,00
Kas Dana BOS termasuk Dana BOP PAUD dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan	368.192.188,06
Kas Dana Kapitasi pada FKTP termasuk Dana BOK	1.000.339.357,00
Jumlah	**55.593.935.634,59**

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada ***Poin 5.5.6*** dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada ***Poin 5.2.1*** dan ***Poin 5.2.5***.

5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5. 47 Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah (tidak termasuk PFK)	79.114.264.674,98	90.117.635.388,72
Kas di Bendahara Penerimaan	56.750,00	9.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran (tidak termasuk PFK)	367.316,00	338.580,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Dana BOS termasuk Dana BOP PAUD dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan	667.618.111,51	486.286.131,60
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	469.208.361,00	405.887.774,00
Jumlah	**80.251.515.213,49**	**91.010.156.874,32**

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5. 48 Rincian Penggunaan SAL Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	80.133.513.365,49	91.016.990.071,66

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada TA 2022 dan 2021 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama TA 2023 dan 2022. Untuk saldo SiLPA TA 2022, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2022 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada TA 2022 sebagaimana diungkapkan dalam catatan ***poin 5.2.4*** di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5. 49 Rincian Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	55.593.935.634,59	80.251.515.213,49

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada TA 2023 dan 2022 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1.4***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin 5.2.5*** di bawah.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5. 50 Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi atas Saldo Awal Pajak	0,00	5.832.196,00
Koreksi Saldo Awal atas Kurang Pengakuan Pendapatan tahun 2021	0,00	1.000.000,00
Koreksi Saldo Awal atas Kesalahan Catat	0,00	1.001,34
Koreksi Saldo Awal atas Kas Dana Kapitasi pada FKTP (Puskesmas Salakan)	(29.972.678,00)	0,00
Koreksi Saldo Awal atas Reklas Bendahara Pengeluaran ke TGR (Sekretariat DPRD)	(88.029.170,00)	0,00
Jumlah	**(118.001.848,00)**	**6.833.197,34**

5.2.5 Sisa Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5. 51 Rincian Sisa Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah (tidak termasuk PFK)	52.339.525.020,53	79.114.264.674,98
Kas di Bendahara Penerimaan	44.136.400,00	56.750,00
Kas di Bendahara Pengeluaran (tidak termasuk PFK)	21.596.569,00	367.316,00
Kas di BLUD	1.820.146.100,00	0,00
Kas Dana BOS termasuk Dana BOP PAUD dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan	368.192.188,06	667.618.111,51
Kas Dana Kapitasi pada FKTP termasuk Dana BOK	1.000.339.357,00	469.208.361,00
Jumlah	**55.593.935.634,59**	**80.251.515.213,49**

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin 5.2.3*** di atas.

5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022. Berikut ini disajikan penjelasan atas saldo akun yang tercantum dalam Neraca posisi 31 Desember 2023.

5.3.1 Aset

Total Aset Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.711.224.365.542,62 dan Rp3.696.976.950.810,23. Jumlah tersebut terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 52 Rincian Aset Daerah

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
Aset Lancar	76.501.962.691,98	114.481.571.170,75	(37.979.608.478,77)
Investasi Jangka Panjang	39.745.037.434,00	40.853.996.752,00	(1.108.959.318)
Aset Tetap	3.446.483.075.006,97	3.444.178.888.719,11	2.304.186.287,86
Aset Lainnya	148.494.290.409,67	97.462.494.168,37	51.031.796.241,30
Jumlah	**3.711.224.365.542,62**	**3.696.976.950.810,23**	**14.247.414.732,39**

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara keseluruhan terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Aset lancar Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp37.979.608.478,77 atau 33,18%. Investasi jangka panjang Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.108.959.318,00 atau 2,71%. Aset tetap Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.304.186.287,86 atau 0,07%. Aset lainnya Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp51.031.796.241,30 atau 52,36%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian besar dari aset tetap yaitu 92,87%.

5.3.1.1 Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp76.501.962.691,98 dibandingkan dengan Tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp114.481.571.170,75 terdapat penurunan sebesar Rp37.979.608.478,77 atau 33,18%. Rincian Aset Lancar disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 53 Rincian Aset Lancar

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
➢ Kas di Kas Daerah	52.339.525.020,53	79.457.432.002,98	(27.117.906.982,45)
➢ Kas di Bendahara Penerimaan	44.136.400,00	56.750,00	44.079.650,00
➢ Kas di Bendahara Pengeluaran	21.596.569,00	367.316,00	21.229.253,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
➢ Kas di BLUD	1.820.146.100,00	0,00	1.820.146.100,00
➢ Kas Dana BOS	368.192.188,06	667.618.111,51	(299.425.923,45)
➢ Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.000.339.357,00	469.208.361,00	531.130.996,00
➢ Kas Lainnya	433.487.309,00	1.502.945.170,00	(1.069.457.861,00)
➢ Piutang Pajak Daerah	1.016.269.425,00	693.694.813,10	322.574.611,90
➢ Piutang Retribusi Daerah	342.783.923,00	3.765.075.436,00	(3.422.291.513,00)
➢ Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.218.491.931,00	67.904.900,18	2.150.587.030,82
➢ Piutang Transfer Antar Daerah	4.065.188.546,00	4.126.264.911,00	(61.076.365,00)
➢ Penyisihan Piutang	(1.196.223.510,77)	(1.098.456.570,18)	(97.766.940,59)
➢ Beban Dibayar Dimuka	0,00	226.250.000,00	(226.250.000,00)
➢ Persediaan	14.028.029.434,16	24.603.209.969,16	(10.575.180.535,00)
Jumlah	**76.501.962.691,98**	**114.481.571.170,75**	**(37.979.608.478,77)**

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo akun Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.339.525.020,53 yang disajikan dalam neraca merupakan saldo kas buku kas umum BUD. Kas di Kas Daerah tersimpan dalam satu rekening. Adapun rincian saldo Kas di Kas Daerah berdasarkan rekening koran bank per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 54 Rincian Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
Bank Sulteng Cabang Salakan No. Rek. 006.01.03.00002.0	52.477.768.800,53	78.615.522.214,23	(26.137.753.413,70)
BRI Unit Salakan No. Rek. 5164-01-00188-30-6	0,00	636.617.340,75	(636.617.340,75)
Jumlah	**52.477.768.800,53**	**79.252.139.554,98**	**(26.774.370.754,45)**

Saldo Kas di Kas Daerah merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut buku kas umum per tanggal neraca dengan saldo menurut rekening koran pada bank tersebut di atas (rincian selengkapnya dapat dilihat dalam ***Lampiran 1***). Penjelasan selisih antara buku kas umum dan rekening koran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 55 Penjelasan Selisih Kas

Uraian	Saldo Menurut BKU	Saldo Menurut Rekening Koran
Saldo Per 31 Desember 2022	52.339.525.020,53	**52.477.768.800,53**
Tambah:		
• Dobel cair SP2D Tahun 2015-2016		15.563.559,00
• Kelebihan pembayaran pajak Tahun 2018-2023		97.094.288,00
Kurang:		
• Dana pihak ketiga yang masih di Kasda karena pajak disetor langsung Tahun 2016		(1.717.367,00)
• Dana pihak lain akibat kesalahan pengembalian dobel cair SP2D		(32.491.836,00)
• Kurang bayar SP2D		(101.045,00)
• *Outstanding* Pajak		(216.591.379,00)
Saldo setelah Rekonsiliasi	**52.339.525.020,53**	**52.339.525.020,53**

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.136.400,00 merupakan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp39.500,00, retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebesar Rp5.642.500,00 dan retribusi pemakaian alat sebesar Rp38.454.400,00. Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp44.136.400,00 dan Rp56.750,00, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 56 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

OPD	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
➢ Badan Pendapatan Daerah	0,00	56.750,00	(56.750,00)
➢ Dinas Kesehatan	5.682.000,00	0,00	5.682.000,00
➢ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.454.400,00	0,00	38.454.400,00
Jumlah	**44.136.400,00**	**56.750,00**	**44.079.650,00**

Dibandingkan Tahun 2022 Kas di Bendahara Penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp44.079.650,00 atau 77.673,39%.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 pada masing-masing sebesar Rp21.596.569,00 dan Rp367.316,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 57 Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
➢ Sisa Uang Persediaan	19.397.368,00	0,00	19.397.368,00
➢ Pungutan pajak (PPN dan (PPh) yang belum disetor ke kas Negara	0,00	0,00	0,00
➢ Jasa giro yang belum disetor	2.199.201,00	367.316,00	1.831.885,00
Jumlah	**21.596.569.,00**	**367.316,00**	**21.229.253,00**

Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1) Sisa UP TA 2023 yang belum disetor ke Kas Daerah pada 2 (dua) Bendahara Pengeluaran yaitu Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp8.205.400,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp11.191.968,00. Rinciannya dapat dilihat pada ***Lampiran 2***.
2) Jasa Giro yang belum disetor per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.199.201,00 terdiri dari beberapa OPD yang rinciannya dapat dilihat pada ***Lampiran 2.***

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.820.146.100,00, saldo kas tahun sebelumnya belum ada karena penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah mulai berlaku pada Tahun 2023. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan surat keputusan sebagai berikut:

1) Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 299 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Trikora Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
2) Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 300 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pratama Bilabanggai di Kabupaten Banggai Kepulauan.
3) Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 301 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 16 terdiri dari 2 Rumah Sakit dan 14 Puskesmas. Adapun Rincian Saldo Kas di BLUD dapat dilihat pada ***Lampiran 3.***

5.3.1.1.5 Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp368.192.188,06 mengalami penurunan sebesar Rp299.425.923,45 atau 44,85% dibanding saldo Tahun 2022 sebesar Rp667.618.111,51. Adapun nilai Kas yang disajikan dalam neraca merupakan selisih lebih antara Pendapatan dengan Belanja dan Jasa Giro yang belum disetor per 31 Desember 2023 pada 154 Sekolah Dasar Negeri, 51 Sekolah Menengah Pertama Negeri, 30 TK Negeri dan 1 SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau total 236 Satuan Pendidikan Negeri penerima dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023 dengan rincian tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 58 Rincian Kas Dana BOS

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
➢ Dana BOS SD	196.081.439,06	257.422.061,51	(61.340.622,45)
➢ Dana BOS SMP	77.227.365,00	178.401.080,00	(101.173.715,00)
➢ Dana BOP PAUD	94.874.382,00	231.778.394,00	(136.904.012,00)
➢ Dana BOP Pendidikan Kesetaraan	9.002,00	16.576,00	(7.574,00)
Jumlah	**368.192,188,06**	**667.618.111,51**	**(299.425.923,45)**

Rincian saldo Kas Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar dapat dilihat pada ***Lampiran 4*** dan Saldo Kas BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan dapat dilihat pada ***Lampiran 5.***

5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.000.339.357,00 dan Rp469.208.361,00. Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan pos untuk menampung saldo kas penerimaan pada 14 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit di Kabupaten Banggai Kepulauan. Penerimaan ini berasal dari BPJS untuk pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pada Tahun 2023 kas dana kapitasi pada FKTP terdiri dari sisa dana kapitasi tahun 2022 dan 2023 yang belum disetor ke kas daerah karena peralihan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD dan tempat penampungan sisa dana BOK Puskesmas tahun 2023. Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 59 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
➢ Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada Puskesmas	34.137.389,00	468.389.431,00	(434.252.042,00)
➢ Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada RS Pratama Bilabanggai	0,0	818.930,00	(818.930,00)
➢ Kas Dana BOK	966.201.968,00	0,00	966.201.968,00
Jumlah	**1.000.339.357,00**	**469.208.361,00**	**531.130.996,00**

Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp531.130.996,00 atau 113,20%. Kas Dana Kapitasi pada FKTP di 14 Puskesmas dan RS Pratama Bilabanggai dijelaskan sebagai berikut:

a. Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada 14 Puskesmas

   Kas Dana Kapitasi pada FKTP di 14 Puskesmas sebesar Rp34.137.389,00 merupakan sisa dana kapitasi yang belum disetor ke kas daerah akibat peralihan pengelolaan keuangan dari JKN FKTP ke BLUD sebesar Rp33.990.822,00 dan jasa giro yang belum disetor sebesar Rp146.567,00 rincian dapat dilihat pada ***Lampiran 6***.

b. Kas Dana Kapitasi pada FKTP RS Pratama Bilabanggai

   Kas Dana Kapitasi pada FKTP di Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sebesar Rp0,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 6.***

c. Kas Dana BOK

Kas Dana BOK pada 13 Puskesmas merupakan selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp966.201.968,00 dapat dilihat pada ***Lampiran 7***.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp433.487.309,00. Saldo Kas Lainnya penurunan sebesar Rp1.069.457.861,00 atau 71,16% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.502.945.170,00. Kas Lainnya merupakan Saldo Dana CSR dari Bank Sulteng, dan pajak yang belum disetorkan oleh bendahara dana BOS, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 60 Rincian Kas Lainnya

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
➢ Saldo Awal Pembukaan Rekening	0,00	2.261.529,00	(2.261.529,00)
➢ Uang Pribadi Bendahara	0,00	639.867,00	(639.867,00)
➢ Dana CSR dari Bank Sulteng	222.575.042,00	350.000,00	222.225.042,00
➢ Jasa Giro belum disetor	0,00	376.185,00	(376.185,00)
➢ SP2D LS yang belum ditarik	0,00	847.760.986,00	(847.760.986,00)
➢ Dana Umum Pelayanan Kesehatan	0,00	525.165.509,00	(525.165.509,00)
➢ Pajak yang belum disetor oleh bendahara dana BOS dan FKTP	210.912.267,00	126.391.094,00	84.521.173,00
Jumlah	**433.487.309,00**	**1.502.945.170,00**	**(1.069.457.861,00)**

Selengkapnya dapat dilihat pada ***Lampiran 8.***

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.016.269.425,00. Saldo Piutang Pajak Daerah naik sebesar Rp322.574.611,90 atau 46,50% dari disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp693.694.813,10. Piutang Pajak Daerah merupakan tagihan pajak kepada Wajib Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah diterbitkan, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Keseluruhan Piutang Pajak Daerah tersebut dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 61 Rincian Piutang Pajak Daerah

Jenis Piutang Pajak Daerah	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Piutang Pajak Hotel	5.299.000,10	41.046.500,00	703.000,10	45.642.500,00	40.343.499,90
2. Piutang Pajak Restoran	24.315.000,00	3.486.000,00	860.000,00	26.941.000,00	2.626.000,00
3. Piutang Pajak Hiburan	1.680.000,00	0,00	500.000,00	1.180.000,00	(500.000,00)
4. Piutang Pajak Reklame	33.980.218,00	3.654.685,00	161.250,00	37.473.653,00	3.493.435,00

Jenis Piutang Pajak Daerah	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
5. Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	268.497.163,00	0,00	268.497.163,00	268.497.163,00
6. Piutang Pajak Air Tanah	744.000,00	104.000,00	0,00	848.000,00	104.000,00
7. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	393.464.281,00	1.738.888,00	0,00	395.203.169,00	1.738.888,00
8. Piutang PBB-PP	230.308.814,00	14.515.332,00	8.243.706,00	236.580.440,00	6.271.626,00
9. Piutang BPHTB	3.903.500,00	0,00	0,00	3.903.500,00	0,00
Jumlah	**693.694.813,10**	**333.042.568,00**	**10.467.956,10**	**1.016.269.425,00**	**322.574.611,90**

Selengkapnya data saldo Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 9.***
Rincian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.642.000,00, dibandingkan dengan Piutang Pajak Hotel Tahun 2022 sebesar Rp5.299.000,10 terdapat kenaikan sebesar Rp40.343.499,90 atau 761,34,00%. Pada Tahun 2023 terdapat penambahan piutang sebesar Rp41.046.500,00 dan pengurangan atas pelunasan piutang Tahun 2021 sebesar Rp28.000,10 dan Tahun 2022 sebesar Rp675.000,00, sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp45.642.500,00.

b. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.941.000,00, dibandingkan dengan Piutang Pajak Restoran Tahun 2022 sebesar Rp24.315.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.626.000,00 atau 10,80%. Pada Tahun 2023 terdapat penambahan piutang sebesar Rp3.486.000,00 dan pengurangan piutang atas pelunasan piutang Tahun 2022 sebesar Rp860.000,00 sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp26.941.000,00.

c. Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.180.000,00, dibandingkan dengan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022 sebesar Rp1.680.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp500.000,00 atau 29,76%, sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp1.180.000,00.

d. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp37.473.653,00, dibandingkan dengan Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 sebesar Rp33.980.218,00 terdapat kenaikan sebesar Rp3.493.435,00 atau 10,28%. Pada Tahun 2023 terdapat penambahan piutang sebesar Rp3.654.685,00 dan pengurangan atas penyetoran piutang Tahun 2022 sebesar Rp161.250,00, sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp37.473.653,00.

e. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp268.497.163,00 merupakan Pajak Penerangan Jalan bulan Desember 2023 yang belum disetor oleh PT. PLN.

f. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp848.000,00, dibandingkan dengan piutang Tahun 2022 sebesar Rp744.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp104.000,00 atau 13,98%.

g. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp395.203.169,00 dibandingkan dengan piutang Tahun 2022 sebesar Rp393.464.281,00 terdapat kenaikan sebesar Rp1.738.888,00 atau 0,44%.

h. Piutang PBB-PP

Piutang PBB-PP sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp236.580.440,00 dibandingkan dengan piutang Tahun 2022 sebesar Rp230.308.814,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.271.626,00 atau 2,72%. Pada Tahun 2023 terdapat penambahan sebesar Rp14.515.332,00 dan pengurangan piutang atas pelunasan piutang Tahun sebelumnya sebesar Rp7.285.792,00 serta adanya pengurangan piutang akibat koreksi saldo awal berdasarkan SPPT Pembetulan PBB Tahun 2019 sebesar Rp957.914,00 .

i. Piutang BPHTB

Piutang BPHTB sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.903.500,00 disajikan sama dengan piutang Tahun 2022.

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp342.783.923,00 merupakan tagihan retribusi kepada Wajib Retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah terbit, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dilunasi. Saldo piutang retribusi terdapat pada beberapa OPD, yaitu:

- Badan Pendapatan Daerah.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Dinas Perhubungan.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5. 62 Rincian Piutang Retribusi Daerah

Jenis Piutang Pajak Daerah	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.598.694.520,00	866.011.800,00	4.464.706.320,00	0,00	(3.598.694.520,00)
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.200.000,00	0,00	2.000.000,00	6.200.000,00	(2.000.000,00)
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	93.629.500,00	24.640.000,00	13.370.000,00	104.899.500,00	11.270.000,00
✓ Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	56.004.416,00	167.133.007,00	0,00	223.137.423,00	167.133.007,00
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
✓ Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.097.000,00	0,00	0,00	6.097.000,00	0,00
Jumlah	**3.765.075.436,00**	**1.057.784.807,00**	**4.480.076.320,00**	**342.783.923,00**	**(3.422.291.513,00)**

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

   Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan disajikan sebesar Rp0,00 karena telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2023.

2. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

   Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan piutang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp6.200.000,00.

3. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

   Piutang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan piutang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp104.899.500,00. Saldo awal piutang sebesar Rp93.629.500,00 telah disetor sebesar Rp13.370.000,00 yang merupakan piutang dari Tahun 2018 sebesar Rp100.000,00, Tahun 2020 sebesar Rp300.000,00, Tahun 2021 sebesar Rp465.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp12.505.000,00. Pada Tahun 2023 terdapat penambahan piutang sebesar Rp24.640.000,00.

4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

   Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp223.137.423,00 merupakan piutang pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp159.004.000,00. dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp64.133.423,00.

5. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

   Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan piutang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.450.000,00.

6. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

   Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah piutang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.097.00,00.

Daftar piutang retribusi selengkapnya dapat dilihat pada ***Lampiran 10.***

5.3.1.1.10 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp2.218.491.931,00 terdiri dari:

Tabel 5. 63 Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Jenis Piutang Pajak Daerah	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)	0,00	2.994.781,00	0,00	2.994.781,00	2.994.781,00
2. Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.042.080,18	0,00	1.042.080,18	0,00	(1.042.080,18)
3. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	66.862.820,00	76.377.370,00	80.684.490,00	62.555.700,00	(4.307.120,00)
4. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Berat Apung-Kapal Tarik	0,00	226.250.000,0	0,00	226.250.000,00	226.250.000,00
5. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	46.516.950,0	0,000	46.516.950,00	46.516.950,00
6. Piutang Pendapatan BLUD	0,00	1.880.174.500,00	0,00	1.880.174.500,00	1.880.174.500,00
Jumlah	**67.904.900,18**	**2.232.313.601,00**	**81.726.570,18**	**2.218.491.931,00**	**2.150.587.030,82**

Rincian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp2.994.781,00 merupakan remunerasi atas DBH yang di bayarkan melalui fasilitas TDF
2. Piutang Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp1.042.080,18 merupakan remunerasi atas DBH yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dan telah disalurkan ke RKUD pada tanggal 26 April 2023.
3. Piutang Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan adalah kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada ASN yang telah pensiun. Daftar piutang lain-lain PAD yang sah selengkapnya lihat ***Lampiran 11.***
4. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Berat Apung-Kapal Tarik sebesar Rp226.250.000,00 merupakan pembayaran atas pengadaan barang yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 barang tersebut belum ada. Pengadaan barang tersebut adalah uang muka 25% Pengadaan Kapal Penangkapan Ikan 3 GT pada Dinas Perikanan Tahun 2017 senilai Rp236.250.000,00. Sesuai dengan surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 523.870/175/DISKAN/2020 tentang Pemberitahuan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan telah

meminta kepada Direktur CV. Wultom untuk melakukan pengembalian uang muka senilai Rp236.250.000,00 dengan batas waktu sampai dengan 30 Juni 2020, dan pada tanggal 10 September 2020 CV. Wultom melakukan telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp10.000.000,00.

5. Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp46.516.950,00 merupakan kelebihan pembayaran kepada CV. Sinar Baruta atas pekerjaan rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SDN inpres Sambiut sesuai kontrak Nomor: 800/207/SPK/DIKBUD-BANGKEP/IX/2023.
6. Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp1.880.174.500,00 merupakan Piutang pada 14 BLUD. Rincian Piutang masing-masing BLUD dapat di lihat pada ***Lampiran 12.***

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp4.065.188.546,00 merupakan jumlah alokasi bagi hasil pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas pajak-pajak Provinsi sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.14.3/29/BAPENDA-G.ST/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 64 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah

Jenis Piutang Pajak Daerah	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.182.964.082,00	1.001.422.626,00	1.182.964.082,00	1.001.422.626,00	(181.541.456,00)
2. Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	831.155.271,00	849.838.683,00	831.155.271,00	849.838.683,00	18.683.412,00
3. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.089.959.115,00	2.130.989.211,00	2.089.959.115,00	2.130.989.211,00	41.030.096,00
4. Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	22.186.443,00	82.938.026,00	22.186.443,00	82.938.026,00	60.751.583,00
Jumlah	**4.126.264.911,00**	**4.065.188.546,00**	**4.126.264.911,00**	**4.065.188.546,00**	**(61.076.365,00)**

Piutang dana bagi hasil provinsi Tahun 2022 sebesar Rp4.126.264.911,00 telah masuk ke kas daerah seluruhnya pada tanggal 5 Desember 2023, sehingga saldo piutang per 31 Desember sebesar Rp4.065.188.546,00.

Data piutang transfer antar daerah selengkapnya dapat dilihat pada ***Lampiran 13.***

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Kabupaten Banggai Kepulauan selama Tahun 2023 sebesar (Rp1.196.223.510,77) jika dibandingkan dengan penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.098.456.570,18) terjadi kenaikan sebesar (97.766.940,59) atau 8,90%.

Rekapitulasi Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 65 Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023	Penyisihan Piutang	Piutang Bersih Per 31 Desember 2023
1. Piutang Pajak Daerah	1.016.269.425,00	(679.138.982,47)	337.130.442,53
2. Piutang Retribusi Daerah	342.783.923,00	(218.877.955,80)	123.905.967,20
3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.218.491.931,00	(298.206.572,50)	1.920.285.358,50
4. Piutang Transfer Antar Daerah	4.065.188.546,00	0,00	4.065.188.546,00
Jumlah	**7.642.733.825,00**	**(1.196.223.510,77)**	**6.446.510.314,23**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa piutang neto tahun 2023 sebesar Rp6.446.510.314,23. Rincian Perhitungan penyisihan piutang pajak daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 14***, penyisihan piutang retribusi daerah dapat dilihat pada ***Lampiran 15*** dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada ***Lampiran 16.***

5.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp226.250.000,00 dari saldo per 31 Desember 2022, karena nilai tersebut telah direklasifikasi ke akun piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Berat Apung-Kapal Tarik.

5.3.1.1.14 Persediaan

Saldo persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di OPD. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 yang disajikan merupakan nilai persediaan pada OPD berdasarkan hasil pemeriksaan fisik persediaan (*stock opname*) yang dilakukan oleh OPD. Dasar perhitungan/pencatatan persediaan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menggunakan Metode FIFO Periodik. Saldo Persediaan per

31 Desember 2023 sebesar Rp14.028.029.434,16 mengalami penurunan sebesar Rp10.575.180.535,00 atau 42,98% dari saldo persediaan Tahun 2022 sebesar Rp24.603.209.969,16. Adapun rincian persediaan tersebut terdiri atas:

Tabel 5. 66 Rincian Persediaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).	%
✓ **Persediaan Bahan**				
a. Bahan Bakar Minyak/Gas	3.228.200,00	5.824.000,00	(2.595.800,00)	(44,57)
b. Isi tabung gas	59.033.400,00	49.297.500,00	9.735.900,00	19,75
c. Bahan Lainnya	4.613.975.919,61	4.535.384.324,39	78.591.595,22	1,73
d. Bahan/Bibit Tanaman	0,00	9.999.000,00	(9.999.000,00)	(100,00)
✓ **Persediaan Suku Cadang**				
Suku Cadang Alat Angkutan	39.612.588,00	33.789.299,00	5.823.289,00	17,23
✓ **Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor**				
a. Alat Tulis Kantor	229.784.350,00	26.217.900,00	203.566.450,00	776,44
b. Bahan Cetakan	343.207.215,00	599.134.350,00	(255.927.135,00)	(42,72)
c. Benda Pos	0,00	144.000,00	(144.000,00)	(100,00)
e. Alat Listrik	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
f. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.145.000,00	27.132.327,00	(23.987.327,00)	(88,41)
g. Suvenir/Cendera Mata	0,00	6.020.532,00	(6.020.532,00)	(100,00)
✓ **Persediaan Obat-obatan**				
a. Obat	8.620.457.861,55	18.472.800.813,77	(9.852.342.952,22)	(53,33)
✓ **Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga**				
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	71.324.200,00	478.741.250,00	(407.417.050,00)	(85,10)
✓ **Persediaan Natura dan Pakan Natura**				
Natura	24.985.700,00	339.449.673,00	(314.463.973,00)	(92,64)
✓ **Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat**				
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**14.028.029.434,16**	**24.603.209.969,16**	**(10.575.180.535,00)**	**(42,98)**

Penurunan saldo persediaan sebesar Rp10.575.180.535,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Persediaan Bahan

a. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.228.200,00, jika dibandingkan saldo persediaan bahan bakar dan pelumas per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.824.000,00 turun sebesar Rp2.595.800,00 atau sebesar 44,57%. Saldo persediaan bahan bakar dan pelumas per OPD dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5. 67 Rincian Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	88.100.000	88.100.000,00	0,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	5.824.000,00	70.022.000,00	72.617.800,00	3.228.200,00	(2.595.800,00)
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	53.030.000,00	53.030.000,00	0,00	0,00
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	63.067.750,00	63.067.750,00	0,00	0,00

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	40.895.000,00	40.895.000,00	0,00	0,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	119.709.000,00	119.709.000,00	0,00	0,00
7. Dinas Sosial	0,00	21.896.000,00	21.896.000,00	0,00	0,00
8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0,00	47.585.090,00	47.585.090,00	0,00	0,00
9. Dinas Ketahanan Pangan	0,00	44.780.000,00	44.780.000,00	0,00	0,00
10. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	316.881.000,00	316.881.000,00	0,00	0,00
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	129.035.000,00	129.035.000,0	0,00	0,00
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	81.980.000,00	81.980.000,00	0,00	0,00
14. Dinas Perhubungan	0,00	137.401.171,00	137.401.171,00	0,00	0,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00
16. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	65.810.000,00	65.810.000,00	0,00	0,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	22.628.250,00	22.628.250,00	0,00	0,00
18. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	13.670.500,00	13.670.500,00	0,00	0,00
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	43.321.500,00	43.321.500,00	0,00	0,00
20. Dinas Perikanan	0,00	53.615.000,00	53.615.000,00	0,00	0,00
21. Dinas Pariwisata	0,00	31.435.000,00	31.435.000,00	0,00	0,00
22. Dinas Pertanian	0,00	19.048.971,00	19.048.971,00	0,00	0,00
23. Bagian Tata Pemerintahan	0,00	17.811.000,00	17.811.000,00	0,00	0,00
24. Bagian Hukum	0,00	38.005.000,00	38.005.000,00	0,00	0,00
25. Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	27.075.000,00	27.075.000,00	0,00	0,00
26. Bagian Perekonomian	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
27. Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	48.536.500,00	48.536.500,00	0,00	0,00
28. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00	57.320.000,00	57.320.000,00	0,00	0,00
29. Bagian Organisasi	0,00	23.470.000,00	23.470.000,00	0,00	0,00
30. Bagian Umum	0,00	827.242.000,00	827.242.000,00	0,00	0,00
31. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Sekretariat DPRD	0,00	227.180.872,00	227.180.872,00	0,00	0,00
33. Kecamatan Totikum	0,00	35.836.000,00	35.836.000,00	0,00	0,00
34. Kecamatan Bulagi Selatan	0,00	66.913.000,00	66.913.000,00	0,00	0,00
35. Kecamatan Bulagi	0,00	22.871.000,00	22.871.000,00	0,00	0,00
36. Kecamatan Liang	0,00	19.995.000,00	19.995.000,00	0,00	0,00
37. Kecamatan Tinangkung	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00
38. Kecamatan Buko	0,00	38.240.000,00	38.240.000,00	0,00	0,00
39. Kecamatan Tinangkung Selatan	0,00	41.466.000,00	41.466.000,00	0,00	0,00
40. Kecamatan Totikum Selatan	0,00	51.059.500,00	51.059.500,00	0,00	0,00
41. Kecamatan Peling Tengah	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00
42. Kecamatan Bulagi Utara	0,00	32.010.000,00	32.010.000,00	0,00	0,00
43. Kecamatan Buko Selatan	0,00	46.355.000,00	46.355.000,00	0,00	0,00
44. Kecamatan Tinangkung Utara	0,00	25.243.027,00	25.243.027,00	0,00	0,00
45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	153.230.000,00	153.230.000,00	0,00	0,00
46. Inspektorat	0,00	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00
47. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	206.814.645,00	206.814.645,00	0,00	0,00
48. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	124.205.000,00	124.205.000,00	0,00	0,00
49. Badan Pendapatan Daerah	0,00	117.103.000,00	117.103.000,00	0,00	0,00
50. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	38.920.000,00	38.920.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**5.824.000,00**	**3.856.077.776,00**	**3.858.673.576,00**	**3.228.200,00**	**(2.595.800,00)**

Saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.228.200,00 merupakan saldo Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Kesehatan yaitu RSUD Trikora Salakan.

b. Persediaan Isi Tabung Gas

Saldo Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.033.400,00 jika dibandingkan saldo persediaan isi tabung gas per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.297.500,00 naik sebesar Rp9.735.900,00 atau sebesar 19,75%.

Persediaan Isi Tabung Gas per 31 Desember 2023 terdiri dari saldo persediaan isi tabung gas pada Dinas Kesehatan yaitu RSUD Trikora Salakan sebesar Rp44.055.900,00 dan Dinas Perikanan sebesar Rp14.977.500,00. Saldo persediaan isi tabung gas tersebut dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5. 68 Persediaan Isi Tabung Gas

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Dinas Kesehatan	34.320.000,00	590.386.700,00	580.650.800,00	44.055.900,00	9.735.900,00
2. Dinas Perikanan	14.977.500,00	0,00	0,00	14.977.500,00	0,00
Jumlah	**49.297.500,00**	**590.386.700,00**	**580.650.800,00**	**59.033.400,00**	**9.735.900,00**

c. Persediaan Bahan Lainnya

Saldo Persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.613.975.919,61 jika dibandingkan saldo persediaan bahan lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.535.384.324,39 naik sebesar Rp78.591.595,22 atau sebesar 1,73%.

Saldo persediaan Bahan Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.613.975.919,61 adalah saldo Persediaan Bahan Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.501.990.919,61 yaitu pada RSUD Trikora Salakan berupa Regulator Oksigen dan Dinas Kesehatan berupa Bahan Medis Habis Pakai, Dinas Perikanan sebesar Rp8.350.000,00 berupa gayung, ember, sepatu boot, topi, masker dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp103.635.000,00 berupa tikar, selimut, sarung, perlengkapan bayi, handuk, gayung plastik, dan baju. Saldo persediaan bahan lainnya tersebut dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5. 69 Rincian Persediaan Bahan Lainnya

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	4.488.209.324,39	5.147.345.450,80	5.133.855.563,58	4.501.990.919,61	13.781.595,22
3. Dinas Pekerjaan Umum, Dan Penataan Ruang	0,00	8.769.000,00	8.769.000,00	0,00	0,00

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
5. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00
6. Dinas Ketahanan Pangan	0,00	7.682.000,00	7.682.000,00	0,00	0,00
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	38.163.600,00	38.163.600,00	0,00	0,00
9. Dinas Perikanan	14.625.000,00	0,00	6.275.000,00	8.350.000,00	(6.275.000)
10. Dinas Pariwisata	0,00	24.953.652,00	24.953.652,00	0,00	0,00
11. Dinas Pertanian	0,00	20.928.000,00	20.928.000,00	0,00	0,00
12. Bagian Umum	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	0,00
13. Sekretariat DPRD	0,00	4.829.000,00	4.829.000,00	0,00	0,00
14. Kecamatan Bulagi Selatan	0,000	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.550.000,00	107.420.000,00	36.335.000,00	103.635.000,00	71.085.000,00
16. Badan Pendapatan Daerah	0,00	91.232.565,00	91.232.565,00	0,00	0,00
17. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**4.535.384.324,39**	**5.543.073.267,80**	**5.464.481.672,58**	**4.613.975.919,61**	**78.591.595,22**

Persediaan Suku Cadang

a. Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan

Saldo Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.612.588,00 jika dibandingkan saldo persediaan suku cadang alat angkutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.789.299,00 naik sebesar Rp5.823.289,00 atau sebesar 17,23%. Saldo persediaan suku cadang alat angkutan per OPD tersebut dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5. 70 Rincian Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	13.175.000	13.175.000	0,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	33.789.299,00	49.081.400,00	43.258.111,00	39.612.588,00	5.823.289,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	94.920.020,00	94.920.020,00	0,00	0,00
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	43.955.000,00	43.955.000,00	0,00	0,00
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	110.037.725,00	110.037.725,00	0,00	0,00
7. Dinas Sosial	0,00	49.523.732,00	49.523.732,00	0,00	0,00
8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0,00	19.727.500,00	19.727.500,00	0,00	0,00
9. Dinas Ketahanan Pangan	0,00	12.565.000,00	12.565.000,00	0,00	0,00
10. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	67.506.500,00	67.506.500,00	0,00	0,00
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	10.435.000,00	10.435.000,00	0,00	0,00

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	32.603.000,00	32.603.000,00	0,00	0,00
14. Dinas Perhubungan	0,00	147.273.801,00	147.273.801,00	0,00	0,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00
16. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	47.565.000,00	47.565.000,00	0,00	0,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
18. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	7.725.250,00	7.725.250,00	0,00	0,00
19. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	14.635.000,00	14.635.000,00	0,00	0,00
20. Dinas Perikanan	0,00	74.415.000,00	74.415.000,00	0,00	0,00
21. Dinas Pariwisata	0,00	13.710.000,00	13.710.000,00	0,00	0,00
22. Dinas Pertanian	0,00	20.057.565,00	20.057.565,00	0,00	0,00
23. Bagian Tata Pemerintahan	0,00	5.929.000,00	5.929.000,00	0,00	0,00
24. Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00
25. Bagian Perekonomian	0,00	27.377.000,00	27.377.000,00	0,00	0,00
26. Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00
27. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00
28. Bagian Organisasi	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00
29. Bagian Umum	0,00	332.535.000,00	332.535.000,00	0,00	0,00
30. Sekretariat DPRD	0,00	190.985.928,00	190.985.928,00	0,00	0,00
31. Kecamatan Totikum	0,00	2.621.000,00	2.621.000,00	0,00	0,00
32. Kecamatan Bulagi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
33. Kecamatan Buko	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
34. Kecamatan Tinangkung Selatan	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00
35. Kecamatan Totikum Selatan	0,00	7.417.400,00	7.417.400,00	0,00	0,00
36. Kecamatan Buko Selatan	0,00	5.785.000,00	5.785.000,00	0,00	0,00
37. Inspektorat	0,00	28.150.750,00	28.150.750,00	0,00	0,00
38. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	56.870.000,00	56.870.000,00	0,00	0,00
39. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	25.020.000,00	25.020.000,00	0,00	0,00
40. Badan Pendapatan Daerah	0,00	56.824.000,00	56.824.000,00	0,00	0,00
41. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**33.789.299,00**	**1.670.296.571,00**	**1.664.473.282,00**	**39.612.588,00**	**5.823.289,00**

Saldo persediaan suku cadang alat angkutan per 31 Desember 2023 merupakan saldo persediaan suku cadang alat angkutan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp39.612.588,00 yaitu pada RSUD Trikora berupa velg mobil, pulp pump, dan aki mobil.

Persediaan Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor

a. Persediaan Alat Tulis Kantor

Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp229.784.350,00 jika dibandingkan saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.217.900,00 naik sebesar Rp203.566.450,00 atau sebesar 776,44%. Persediaan alat tulis kantor per OPD dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5. 71 Persediaan Alat Tulis Kantor

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	151.960.267	148.547.467,00	3.412.800,00	3.412.800,00
2. Dinas Kesehatan	68.700,00	168.372.900,00	168.441.600,00	0,00	(68.700,00)
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	131.032.050,00	131.032.050,00	0,00	0,00
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	33.259.275,00	33.259.275,00	0,00	0,00
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	33.702.650,00	33.702.650,00	0,00	0,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	27.563.650,00	27.563.650,00	0,00	0,00
7. Dinas Sosial	0,00	39.160.350,00	39.160.350,00	0,00	0,00
8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0,00	24.310.750,00	24.310.750,00	0,00	0,00
9. Dinas Ketahanan Pangan	0,00	18.230.800,00	18.230.800,00	0,00	0,00
10. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	18.747.400,00	18.747.400,00	0,00	0,00
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.579.900,00	253.954.700,00	60.635.800,00	213.898.800,00	193.318.900,00
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	40.376.800,00	40.376.800,00	0,00	0,00
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	215.008.200,00	215.008.200,00	0,00	0,00
14. Dinas Perhubungan	0,00	28.777.051,00	28.777.051,00	0,00	0,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	17.757.875,00	17.757.875,00	0,00	0,00
16. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	38.613.800,00	38.613.800,00	0,00	0,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	28.667.950,00	28.667.950,00	0,00	0,00
18. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	21.372.550,00	21.372.550,00	0,00	0,00
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	25.095.500,00	25.095.500,00	0,00	0,00
20. Dinas Perikanan	0,00	52.235.549,00	52.235.549,00	0,00	0,00
21. Dinas Pariwisata	0,00	15.657.750,00	15.657.750,00	0,00	0,00
22. Dinas Pertanian	0,00	86.889.849,00	86.889.849,00	0,00	0,00
23. Bagian Tata Pemerintahan	0,00	20.775.998,00	20.775.998,00	0,00	0,00
24. Bagian Hukum	0,00	31.161.800,00	31.161.800,00	0,00	0,00
25. Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	18.102.300,00	18.102.300,00	0,00	0,00
26. Bagian Perekonomian	0,00	11.974.900,00	11.974.900,00	0,00	0,00
27. Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	8.629.295,00	8.629.295,00	0,00	0,00
28. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00	17.670.750,00	17.670.750,00	0,00	0,00
29. Bagian Organisasi	0,00	23.080.000,00	23.080.000,00	0,00	0,00
30. Bagian Umum	0,00	140.295.050,00	140.295.050,00	0,00	0,00
31. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	14.482.800,00	14.482.800,00	0,00	0,00
32. Sekretariat DPRD	0,00	64.440.550,00	64.440.550,00	0,00	0,00
33. Kecamatan Totikum	0,00	16.619.500,00	16.619.500,00	0,00	0,00
34. Kecamatan Bulagi Selatan	0,00	17.709.500,00	17.709.500,00	0,00	0,00
35. Kecamatan Bulagi	0,00	6.030.200,00	6.030.200,00	0,00	0,00
36. Kecamatan Liang	0,00	18.803.796,00	18.803.796,00	0,00	0,00
37. Kecamatan Tinangkung	0,00	21.353.096,00	21.353.096,00	0,00	0,00
38. Kecamatan Buko	0,00	10.595.600,00	10.595.600,00	0,00	0,00
39. Kecamatan Tinangkung Selatan	0,00	10.293.599,00	10.293.599,00	0,00	0,00

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
40. Kecamatan Totikum Selatan	0,00	16.283.500,00	16.283.500,00	0,00	0,00
41. Kecamatan Peling Tengah	0,00	9.285.000,00	9.285.000,00	0,00	0,00
42. Kecamatan Bulagi Utara	0,00	12.876.300,00	12.876.300,00	0,00	0,00
43. Kecamatan Buko Selatan	0,00	11.112.800,00	11.112.800,00	0,00	0,00
44. Kecamatan Tinangkung Utara	0,00	17.259.400,00	17.259.400,00	0,00	0,00
45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.108.250,00	3.108.250,00	0,00	0,00
46. Inspektorat	0,00	69.383.650,00	69.383.650,00	0,00	0,00
47. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	78.779.500,00	78.779.500,00	0,00	0,00
48. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.882.300,00	184.596.849,00	184.039.149,00	5.440.000,00	557.700,00
49. Badan Pendapatan Daerah	687.000,00	76.874.500,00	70.528.750,00	7.032.750,00	6.345.750,00
50. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	57.661.500,00	57.661.500,00	0,00	0,00
Jumlah	**26.217.900,00**	**2.459.987.649,00**	**2.256.421.199,00**	**229.784.350,00**	**203.566.450,00**

Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp229.784.350,00 terdiri dari saldo persediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan sebesar Rp3.412.800,00 berupa amplop, binder clips, gunting, isi hekter dan kertas HVS Folio. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp213.898.800,00 berupa kertas F4 80 gram, Tinta printer, film printer KTP-el, Ribbon, dan cleaning card. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp5.440.000,00 berupa stopmap biasa, stopmap snelhekter plastik, dan tinta printer. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp7.032.750,00 berupa tinta printer warna.

b. Persediaan Bahan Cetakan

Saldo Persediaan Bahan Cetakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp343.207.215,00 jika dibandingkan saldo persediaan bahan cetakan per 31 Desember 2022 sebesar Rp599.134.350,00 turun sebesar Rp255.927.135,00 atau sebesar 42,72%.

Saldo Persediaan Bahan Cetakan per 31 Desember 2023 terdiri dari saldo persediaan bahan cetakan Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi sebesar Rp31.840.000,00 berupa kartu AK I dan kartu AK II. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp180.490.000,00 berupa formulir pelaporan perkawinan, kelahiran, permohonan KK, Pindah datang WNI, akta kematian, dan formulir kependudukan lainnya. Dinas Perhubungan sebesar Rp859.500,00, berupa blangko kontrol kendaraan angkutan barang, pelat uji kendaraan dan kelengkapannya, buku uji kir, stiker tanda samping kendaraan, stiker tanda kendaraan. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp130.017.715,00 berupa retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pasar, dan blangko Pajak dan Retribusi.

Persediaan bahan cetakan per OPD dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5. 72 Rincian Persediaan Bahan Cetakan

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	146.017.252,00	146.017.252,00	0,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	25.634.455,00	188.910.400,00	214.544.855,00	0,00	(25.634.455,00)
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	60.054.500,00	60.054.500,00	0,00	0,00
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	12.526.700,00	12.526.700,00	0,00	0,00
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	37.521.499,00	37.521.499,00	0,00	0,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	18.431.220,00	18.431.220,00	0,00	0,00
7. Dinas Sosial	0,00	31.747.500,00	31.747.500,00	0,00	0,00
8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	38.516.000,00	6.545.000,00	13.221.000,00	31.840.000,00	(6.676.000,00)
9. Dinas Ketahanan Pangan	0,00	23.031.000,00	23.031.000,00	0,00	0,00
10. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	21.613.000,00	21.613.000,00	0,00	0,00
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	426.037.500,00	38.617.000,00	284.164.500,00	180.490.000,00	(245.547.500,00)
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	41.190.500,00	41.190.500,00	0,00	0,00
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	362.224.500,00	362.224.500,00	0,00	0,00
14. Dinas Perhubungan	859.500,00	17.085.250,00	17.085.250,00	859.500,00	0,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	85.848.500,00	85.848.500,00	0,00	0,00
16. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	35.721.000,00	35.721.000,00	0,00	0,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	38.827.500,00	38.827.500,00	0,00	0,00
18. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	10.768.500,00	10.768.500,00	0,00	0,00
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	44.643.900,00	44.643.900,00	0,00	0,00
20. Dinas Perikanan	0,00	26.812.500,00	26.812.500,00	0,00	0,00
21. Dinas Pariwisata	0,00	25.573.500,00	25.573.500,00	0,00	0,00
22. Dinas Pertanian	0,00	55.206.500,00	55.206.500,00	0,00	0,00
23. Bagian Tata Pemerintahan	0,00	25.955.500,00	25.955.500,00	0,00	0,00
24. Bagian Hukum	0,00	43.292.000,00	43.292.000,00	0,00	0,00
25. Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	5.476.000,00	5.476.000,00	0,00	0,00
26. Bagian Perekonomian	0,00	7.011.999,00	7.011.999,00	0,00	0,00
27. Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	11.685.500,00	11.685.500,00	0,00	0,00
28. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
29. Bagian Organisasi	0,00	23.049.500,00	23.049.500,00	0,00	0,00
30. Bagian Umum	0,00	132.399.000,00	132.399.000,00	0,00	0,00
31. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	3.291.000,00	3.291.000,00	0,00	0,00
32. Sekretariat DPRD	0,00	226.436.000,00	226.436.000,00	0,00	0,00
33. Kecamatan Totikum	0,00	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00
34. Kecamatan Bulagi Selatan	0,00	47.524.500,00	47.524.500,00	0,00	0,00
35. Kecamatan Bulagi	0,00	13.459.000,00	13.459.000,00	0,00	0,00
36. Kecamatan Liang	0,00	10.868.000,00	10.868.000,00	0,00	0,00
37. Kecamatan Tinangkung	0,00	8.837.000,00	8.837.000,00	0,00	0,00
38. Kecamatan Buko	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
39. Kecamatan Tinangkung Selatan	0,00	3.489.000,00	3.489.000,00	0,00	0,00
40. Kecamatan Totikum Selatan	0,00	4.442.000,00	4.442.000,00	0,00	0,00
41. Kecamatan Peling Tengah	0,00	7.373.000,00	7.373.000,00	0,00	0,00
42. Kecamatan Bulagi Utara	0,00	4.585.000,00	4.585.000,00	0,00	0,00
43. Kecamatan Buko Selatan	0,00	7.480.500,00	7.480.500,00	0,00	0,00
44. Kecamatan Tinangkung Utara	0,00	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	0,00
45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	10.935.500,00	10.935.500,00	0,00	0,00
46. Inspektorat	0,00	48.566.375,00	48.566.375,00	0,00	0,00
47. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	0,00	173.971.500,00	173.971.500,00	0,00	0,00
48. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	274.993.500,00	274.993.500,00	0,00	0,00
49. Badan Pendapatan Daerah	108.086.895,00	135.339.000,00	113.408.180,00	130.017.715,00	21.930.820,00
50. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	86.742.000,00	86.742.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**599.134.350,00**	**2.683.964.595,00**	**2.939.891.730,00**	**343.207.215,00**	**(255.927.135,00)**

c. Persediaan Alat Listrik

Saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2023 sebesar Rp275.000,00 jika dibandingkan saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2022 sebesar Rp275.000,00 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Persediaan alat listrik per OPD dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5. 73 Persediaan Alat Listrik

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Dinas Kesehatan	275.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	275.000,00	0,00
2. Dinas Pekerjaan Umum, Dan Penataan Ruang	0,00	7.484.000,00	7.484.000,00	0,00	0,00
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	4.879.860,00	4.879.860,00	0,00	0,00
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	1.951.200,00	1.951.200,00	0,00	0,00
5. Dinas Sosial	0,00	5.491.700,00	5.491.700,00	0,00	0,00
6. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00	2.308.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00
7. Dinas Perhubungan	0,00	8.208.700,00	8.208.700,00	0,00	0,00
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	5.907.500,00	5.907.500,00	0,00	0,00
9. Dinas Pertanian	0,00	4.630.500,00	4.630.500,00	0,00	0,00
10. Bagian Umum	0,00	78.225.150,00	78.225.150,00	0,00	0,00
11. Sekretariat DPRD	0,00	18.221.650,00	18.221.650,00	0,00	0,00
12. Kecamatan Bulagi	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	4.295.250,00	4.295.250,00	0,00	0,00
14. Inspektorat	0,00	4.927.250,00	4.927.250,00	0,00	0,00
15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	9.228.500,00	9.228.500,00	0,00	0,00
16. Badan Pendapatan Daerah	0,00	10.461.000,00	10.461.000,00	0,00	0,00
17. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**275.000,00**	**218.220.260,00**	**218.220.260,00**	**275.000,00**	**0,00**

Saldo Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2023 merupakan saldo persediaan alat listrik pada Dinas Kesehatan yaitu pada RSUD Trikora berupa stop kontak dan saklar.

d. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.145.000,00, jika dibandingkan saldo persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.132.327,00 turun sebesar Rp23.987.327,00 atau sebesar 88,41%.

Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya per OPD dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5. 74 Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	4.797.300,00	4.797.300,00	0,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	4.005.000,00	154.059.999,00	158.064.999,00	0,00	(4.005.000,00)
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	9.421.100,00	9.421.100,00	0,00	0,00
4. Dinas Sosial	0,00	2.969.470,00	2.969.470,00	0,00	0,00

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
5. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0,00	1.256.600,00	1.256.600,00	0,00	0,00
6. Dinas Ketahanan Pangan	0,00	826.000,00	826.000,00	0,00	0,00
7. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	16.857.600,00	16.857.600,00	0,00	0,00
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	3.626.250,00	3.626.250,00	0,00	0,00
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	356.379.000,00	356.379.000,00	0,00	0,00
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	4.386.500,00	4.386.500,00	0,00	0,00
11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.557.875,00	1.557.875,00	0,00	0,00
12. Dinas Pemuda Dan Olahraga	0,00	2.367.600,00	2.367.600,00	0,00	0,00
13. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	1.988.585,00	1.988.585,00	0,00	0,00
14. Dinas Perikanan	6.675.000,00	21.181.201,00	25.096.201,00	2.760.000,00	(3.915.000,00)
15. Dinas Pariwisata	13.952.327,00	5.766.000,00	19.718.327,00	0,00	(13.952.327,00)
16. Dinas Pertanian	0,00	6.846.200,00	6.846.200,00	0,00	0,00
17. Bagian Tata Pemerintahan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
18. Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
19. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
20. Bagian Umum	0,00	22.679.350,00	22.679.350,00	0,00	0,00
21. Sekretariat DPRD	0,00	15.443.900,00	15.443.900,00	0,00	0,00
22. Kecamatan Bulagi Selatan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
23. Kecamatan Bulagi	0,00	1.432.475,00	1.432.475,00	0,00	0,00
24. Kecamatan Liang	0,00	1.132.700,00	1.132.700,00	0,00	0,00
25. Kecamatan Tinangkung	0,00	1.441.200,00	1.441.200,00	0,00	0,00
26. Kecamatan Tinangkung Selatan	0,00	7.964.199,00	7.964.199,00	0,00	0,00
27. Kecamatan Totikum Selatan	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00
28. Kecamatan Bulagi Utara	0,00	2.364.700,00	2.364.700,00	0,00	0,00
29. Kecamatan Tinangkung Utara	0,00	4.143.025,00	4.143.025,00	0,00	0,00
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.500.000,00	0,00	2.115.000,00	385.000,00	(2.115.000,00)
31. Inspektorat	0,00	9.292.450,00	9.292.450,00	0,00	0,00
32. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	16.405.800,00	16.405.800,00	0,00	0,00
33. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	11.070.500,00	11.070.500,00	0,00	0,00
34. Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**27.132.327,00**	**699.387.579,00**	**723.374.906,00**	**3.145.000,00**	**(23.987.327,00)**

Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2023 merupakan saldo persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya pada Dinas Perikanan sebesar Rp2.760.000,00 berupa ember dan keranjang sampah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp385.000,00 berupa gayung.

Persediaan Obat-Obatan

a. Persediaan Obat

Saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.620.457.861,55 jika dibandingkan saldo persediaan obat per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.472.800.813,77 turun sebesar Rp9.852.342.952,22 atau 53,33%.

Saldo Persediaan Obat per 31 Desember 2023 terdiri dari saldo persediaan obat pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan sudah termasuk obat yang ada di gudang Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK), Puskesmas, RSUD Trikora Salakan dan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai. Sedangkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan persediaan obat terdiri dari persediaan obat yang ada di gudang

farmasi, apotek rawat inap, apotek rawat jalan dan ruangan yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan. Pada Tahun 2023 Dinas Kesehatan menerima hibah obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp3.979.312.830,90 dapat dilihat pada ***Lampiran 17***.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan saldo persediaan obat Tahun 2022 sebesar Rp42.573.516,00 ditambah hibah dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp906.517.661,00 dikurangi pengeluaran sebesar Rp294.696.233,00. Saldo persediaan obat per 31 Desember 2023 masih tersisa sebesar Rp654.394.944,00. Rincian hibah obat-obatan dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada ***Lampiran 18***.

Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

Saldo Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.324.200,00 jika dibandingkan saldo persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga per 31 Desember 2022 sebesar Rp478.741.250,00 turun sebesar Rp407.417.050,00 atau sebesar 85,10%.

Saldo Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga per 31 Desember 2023 merupakan saldo persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp478.741.250 dikurangi pengeluaran sebesar Rp407.417.050,00

Persediaan Natura dan Pakan Natura

Saldo Persediaan Natura dan Pakan Natura per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.985.700,00 jika dibandingkan saldo persediaan natura dan pakan natura per 31 Desember 2022 sebesar Rp339.449.673,00 turun sebesar Rp314.463.973,00 atau sebesar 92,64%.

Saldo Persediaan Natura dan Pakan Natura per 31 Desember 2023 terdiri dari saldo persediaan natura dan pakan natura pada Dinas Ketahanan Pangan berupa beras sebesar Rp22.400.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.585.700,00 berupa bahan sandang dan pangan.

Persediaan Natura dan Pakan Natura per OPD dapat dilihat pada rincian berikut:

Tabel 5. 75 Rincian Persediaan Natura dan Pakan Natura

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
1. Dinas Sosial	0,00	169.137.500,00	169.137.500,00	0,00	0,00
2. Dinas Ketahanan Pangan	339.449.673,00	141.400.000,00	458.449.673,00	22.400.000,00	(317.049.673,00)
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	15.020.000,00	15.020.000,00	0,00	0,00

OPD	Saldo Awal 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp).
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	1.110.600.000,00	1.110.600.000,00	0,00	0,00
5. Dinas Perikanan	0,00	7.523.000,00	7.523.000,00	0,00	0,00
6. Dinas Pariwisata	0,00	1.040.354,00	1.040.354,00	0,00	0,00
7. Bagian Umum	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00
8. Sekretariat DPRD	0,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	0,00
9. Kecamatan Tinangkung	0,00	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	0,00
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	92.000.000,00	89.414.300,00	2.585.700,00	2.585.700,00
11. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00
12. Puskesmas Totikum Selatan	0,00	232.482.707,00	232.482.707,00	0,00	0,00
13. Puskesmas Totikum	0,00	315.449.022,00	315.449.022,00	0,00	0,00
14. Puskesmas Tinangkung Utara	0,00	205.636.023,00	205.636.023,00	0,00	0,00
15. Puskesmas Tataba	0,00	190.382.837,00	190.382.837,00	0,00	0,00
16. Puskesmas Saleati	0,00	198.166.048,00	198.166.048,00	0,00	0,00
17. Puskesmas Salakan	0,00	475.107.737,00	475.107.737,00	0,00	0,00
18. Puskesmas Sabang	0,00	169.698.381,00	169.698.381,00	0,00	0,00
19. Puskesmas Patukuki	0,00	199.456.770,00	199.456.770,00	0,00	0,00
20. Puskesmas Lumbi-lumbia	0,00	167.867.093,00	167.867.093,00	0,00	0,00
21. Puskesmas Bulagi	0,00	301.112.792,00	301.112.792,00	0,00	0,00
22. Puskesmas Bonepuso	0,00	27.259.290,00	27.259.290,00	0,00	0,00
23. Puskesmas Bakalan Raya	0,00	102.739.337,00	102.739.337,00	0,00	0,00
24. Puskesmas Mansamat	0,00	177.361.448,00	177.361.448,00	0,00	0,00
25. RS Pratama Bilabanggai	0,00	285.793.152,00	285.793.152,00	0,00	0,00
Jumlah	**339.449.673,00**	**5.791.033.491,00**	**6.105.497.464,00**	**24.985.700,00**	**(314.463.973,00)**

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp19.000.000,00 yang berupa *fish finder* pada Dinas Perikanan yang merupakan saldo persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2022 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum diserahkan kepada masyarakat.

Semua jenis persediaan yang dilaporkan di neraca pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Daftar persediaan per OPD dan jenis persediaan disajikan pada ***Lampiran 19*** dan Daftar Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang *Expired Date* (ED) dan Rusak disajikan pada ***Lampiran 20***.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri atas investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen. Pemerintah Banggai Kepulauan tidak memiliki investasi jangka panjang non permanen sehingga saldo investasi jangka

panjang per 31 Desember 2023 merupakan investasi jangka panjang permanen sebesar Rp39.745.037.434,00.

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.745.037.434,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.108.959.318,00 atau 2,71% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp40.853.996.752,00. Investasi Jangka Panjang Permanen dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 76 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada 2. PT. Bank Sulteng	27.640.000.000,00	25.280.000.000,00	2.360.000.000,00	9,34
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Bangkep	10.195.238.265,00	13.664.197.583,00	(3.468.959.318,00)	(25,39)
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada 5. PT. Trikora Salakan	1.909.799.169,00	1.909.799.169,00	0,00	0,00
Jumlah	**39.745.037.434,00**	**40.853.996.752,00**	**(1.108.959.318,00)**	**(2,71)**

Berdasarkan tabel di atas, penyajian investasi permanen pada Bank Sulteng, PDAM Paisu Malino Kabupaten Banggai Kepulauan dan PT. Trikora Salakan (BUMD) dijelaskan sebagai berikut:

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Sulteng berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 134 Tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dengan mekanisme pencairan melalui SP2D nomor 18.02/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.29. 0000/P.02/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 dengan nilai Rp2.360.000.000,00.

Penyertaan modal pada PT. Bank Sulteng dicatat dengan metode biaya (*cost method*). Akumulasi penyertaan modal pada PT. Bank Sulteng sejak 2005 sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.640.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 77 Rincian Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulteng

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)	Saldo (Rp)
Tahun 2005	100.000.000,00	100.000.000,00
Tahun 2006	300.000.000,00	400.000.000,00
Tahun 2007	400.000.000,00	800.000.000,00

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)	Saldo (Rp)
Tahun 2008	200.000.000,00	1.000.000.000,00
Tahun 2009	200.000.000,00	1.200.000.000,00
Tahun 2010	200.000.000,00	1.400.000.000,00
Tahun 2011	200.000.000,00	1.600.000.000,00
Tahun 2012	200.000.000,00	1.800.000.000,00
Tahun 2013	200.000.000,00	2.000.000.000,00
Tahun 2014	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Tahun 2015	2.200.000.000,00	5.200.000.000,00
Tahun 2016	3.250.000.000,00	8.450.000.000,00
Tahun 2017	3.250.000.000,00	11.700.000.000,00
Tahun 2018	3.250.000.000,00	14.950.000.000,00
Tahun 2019	3.250.000.000,00	18.200.000.000,00
Tahun 2020	2.360.000.000,00	20.560.000.000,00
Tahun 2021	2.360.000.000,00	22.920.000.000,00
Tahun 2022	2.360.000.000,00	25.280.000.000,00
Tahun 2023	2.360.000.000,00	27.640.000.000,00

Pada Tahun 2023 pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah memperoleh bagian keuntungan berupa deviden sebesar Rp4.206.364.782,00 untuk Tahun Buku 2022 yang diterima melalui rekening kas umum daerah di Bank Sulteng pada tanggal 14 Agustus 2023.

2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Air Malino Kabupaten Banggai Kepulauan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Air Malino Kabupaten Banggai Kepulauan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan penyertaan modal pada PDAM Air Malino berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 508 Tahun 2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dengan mekanisme pencairan melalui SP2D Nomor 18.02/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.00.29.0000/P.05/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 dengan nilai Rp1.000.000.000,00. Kepemilikan Modal PDAM Air Malino 100% milik Pemerintah Banggai Kepulauan dan Bagian Laba/Rugi diatribusikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 100%. Penyertaan modal pada PDAM Air Malino sampai dengan per 31 Desember 2023

dalam bentuk penyetoran tunai sebesar Rp10.749.805.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 78 Rincian Penyertaan Modal Pada PDAM Air Malino

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)	Saldo (Rp)
Tahun 2005	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
Tahun 2008	200.000.000,00	1.900.000.000,00
Tahun 2010	300.000.000,00	2.200.000.000,00
Tahun 2011	199.805.000,00	2.399.805.000,00
Tahun 2012	100.000.000,00	2.499.805.000,00
Tahun 2013	1.000.000.000,00	3.499.805.000,00
Tahun 2014	500.000.000,00	3.999.805.000,00
Tahun 2015	500.000.000,00	4.499.805.000,00
Tahun 2016	0,00	4.499.805.000,00
Tahun 2017	1.125.000.000,00	5.624.805.000,00
Tahun 2018	1.125.000.000,00	6.749.805.000,00
Tahun 2019	0,00	6.749.805.000,00
Tahun 2020	1.000.000.000,00	7.749.805.000,00
Tahun 2021	1.000.000.000,00	8.749.805.000,00
Tahun 2022	1.000.000.000,00	9.749.805.000,00
Tahun 2023	1.000.000.000,00	10.749.805.000,00

Metode penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dicatat menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sehingga berimplikasi pada pengakuan laba rugi perusahaan terhadap nilai penyertaan. Untuk tahun anggaran 2023 PDAM Air Malino belum menyampaikan Laporan keuangan. Pemerintah Daerah telah meminta melalui surat Nomor: 900/162/BPKAD/2024 tanggal 6 Februari 2024. Laporan Keuangan PDAM Air Malino Tahun 2023 yang disajikan sesuai laporan keuangan *Unaudit*. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a) Penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 Rp 10.749.805.000,00

b) Modal yang berasal dari hibah Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Rp 2.623.752.862,00

c) Modal yang berasal dari Hibah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Rp 10.673.138.116,00

d) Laba/(Rugi) PDAM:
   - Akumulasi Rugi PDAM s.d. Tahun 2022 Rp (13.030.184.174,00)
   - Kerugian PDAM Tahun 2023 berdasarkan Laporan *Unaudit* 2023 Rp (577.146.368,00)

▪ Koreksi Laba PDAM berdasarkan Laporan Keuangan PDAM *Unaudit* 2023	Rp	(244.127.171,00)
Jumlah Akumulasi rugi s.d. 2023	Rp	(13.851.457.713,00)
Jumlah Nilai Investasi pada PDAM Air Malino per 31 Desember 2023	**Rp**	**10.195.238.265,00**

3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Trikora Jaya Salakan

PT. Trikora Jaya Salakan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Jaya Salakan dan melakukan penyertaan modal pertama kali berdasarkan atas Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal kepada Perusahaan PT. Trikora Jaya Salakan pada Tahun 2018 sebesar Rp2.500.000.000,00. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Trikora Jaya Salakan dicatat dengan memakai metode ekuitas (*equity method*), sehingga berimplikasi pada pengakuan laba rugi perusahaan terhadap nilai penyertaan. Laporan Keuangan PT. Trikora Jaya Salakan Tahun 2019 belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Nilai investasi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a)	Penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada PT. Trikora Jaya Salakan Tahun 2018		2.500.000.000,00
b)	Laba/(Rugi) PT. Trikora Jaya:		
	▪ Kerugian Tahun 2018	Rp	(567.724.908,00)
	▪ Kerugian Tahun 2019	Rp	(22.475.923,00)
	Jumlah akumulasi rugi s.d. 2019	Rp	(590.200.831,00)
	Jumlah Nilai Investasi pada PT. Trikora Jaya per 31 Desember 2019	**Rp**	**1.909.799.169,00**

Nilai Investasi pada PT. Trikora Jaya Salakan per 31 Desember 2023 disajikan sama dengan Tahun 2022 karena sampai dengan diterbitkannya Laporan keuangan Pemerintah Daerah PT. Trikora Jaya Salakan tidak menyampaikan laporan keuangan. Pemerintah Daerah telah meminta laporan keuangan melalui surat pada tanggal 6 Februari 2024 yang ditujukan kepada Direktur PT. Trikora Salakan dengan nomor surat 900/161/BPKAD/2024 perihal permintaan laporan keuangan PT

Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dan 2023 (*Audited*), dalam surat tersebut pemerintah daerah memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 tetapi sampai dengan batas waktu tersebut laporan keuangan tidak disampaikan.

5.3.1.3 Aset Tetap

Saldo aset tetap sebesar Rp3.446.483.075.006,97 merupakan nilai seluruh aset tetap Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2023. Daftar saldo aset tetap pada setiap OPD tercantum pada penjelasan masing-masing jenis aset tetap dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 79 Rincian Aset Tetap

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Tanah	2.012.396.228.548,97	23.547.378.408,00	(793.100.500,00)	2.035.150.506.456,97
➢ Peralatan dan Mesin	418.529.641.928,81	18.618.200.281,00	(6.113.832.094,00)	431.034.010.115,81
➢ Gedung dan Bangunan	703.838.625.342,54	63.411.529.225,00	(20.755.571.017,00)	746.494.583.550,54
➢ Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.355.400.353.335,67	64.277.370.100,00	(3.729.565.800,00)	1.415.948.157.635,67
➢ Aset Tetap Lainnya	11.801.742.079,00	211.475.600,00	(274.384.594,00)	11.738.833.085,00
➢ Konstruksi Dalam Pengerjaan	26.268.823.348,00	10.794.574.051,00	(9.686.539.930,00)	27.376.857.469,00
Jumlah (Aset Tetap)	**4.528.235.414.582,99**	**180.860.527.665,00**	**(41.352.993.935,00)**	**4.667.742.948.312,99**
➢ Akumulasi Penyusutan	(1.084.056.525.863,88)			(1.221.259.873.306,02)
Jumlah (Aset Tetap + Penyusutan)	**3.444.178.888.719,11**			**3.446.483.075.006,97**

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.035.150.506.456,97 berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 80 Rincian Aset Tetap Tanah

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal	4.874.561.530,00	11.219.989.000,00	0,00	16.094.550.530,00
➢ Tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan	9.295.994.038,00	0,00	0,00	9.295.994.038,00
➢ Tanah untuk bangunan industri	1.060.033.000,00	0,00	0,00	1.060.033.000,00
➢ Tanah untuk bangunan tempat kerja	60.384.933.786,00	5.551.788.500,00	(686.103.500,00)	65.250.618.786,00
➢ Tanah untuk bangunan gedung sarana olah raga	843.643.000,00	0,00	0,00	843.643.000,00
➢ Tanah persil lainnya	0,00	752.104.000,00	0,00	752.104.000,00
➢ Tanah kering	1.989.848.308,00	0,00	0,00	1.989.848.308,00
➢ Tanah perkebunan	495.995.000,00	0,00	0,00	495.995.000,00
➢ Tanah non persil lainnya	313.750.000,00	0,00	0,00	313.750.000,00
➢ Tanah lapangan olah raga	9.848.940.398,97	3.131.908.000,00	0,00	12.980.848.398,97
➢ Tanah lapangan parkir	49.879.000,00	0,00	0,00	49.879.000,00
➢ Tanah lapangan penimbunan barang	891.039.200,00	0,00	0,00	891.039.200,00

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Tanah untuk jalan	1.912.924.425.028,00	0,00	0,00	1.912.924.425.028,00
➢ Tanah untuk bangunan air	69.360.000,00	10.000.000,00	0,00	79.360.000,00
➢ Tanah untuk bangunan instalasi	49.874.000,00	0,00	0,00	49.874.000,00
➢ Tanah untuk bangunan jaringan	68.738.510,00	0,00	0,00	68.738.510,00
➢ Tanah untuk bangunan bersejarah	0,00	106.997.000,00	(106.997.000,00)	0,00
➢ Tanah untuk makam	411.957.000,00	0,00	0,00	411.957.000,00
➢ Tanah untuk taman	8.447.850.500,00	2.774.591.908,00	0,00	11.222.442.408,00
➢ Tanah kampung	375.406.250,00	0,00	0,00	375.406.250,00
Jumlah	**2.012.396.228.548,97**	**23.547.378.408,00**	**(793.100.500,00)**	**2.035.150.506.456,97**

Nilai Aset Tetap tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2023 berdasarkan mutasi penambahan dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Awal 1 Januari 2023	**Rp**	**2.012.396.228.548,97**
Mutasi Tambah Tahun 2023:		
1. Belanja Modal Aset Tetap Tanah	Rp	3.418.849.908,00
2. Hasil Penilaian Aset Tetap Tanah	Rp	20.128.528.500,00
Jumlah Mutasi Penambahan	**Rp**	**23.547.378.408,00**
Mutasi Kurang:		
1. Hibah ke Masyarakat	Rp	(552.236.500,00)
2. Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	(133.867.000,00)
3. Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	(106.997.000,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	**Rp**	**(793.100.500,00)**
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**2.035.150.506.456,97**

Penjelasan mutasi tersebut di atas sebagai berikut:

1) Belanja Modal Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.418.849.908,00 dengan rincian pada ***Lampiran 33***;
2) Hasil Penilaian Aset Tetap Tanah sebesar Rp20.128.528.500,00 dengan rincian pada ***Lampiran 35***;
3) Hibah ke Masyarakat sebesar Rp552.236.500,00 dengan rincian pada ***Lampiran 36***;
4) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp133.867.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 37***;
5) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp106.997.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 37***.

Penjelasan mengenai mutasi Aset Tetap Tanah setiap OPD dengan rincian pada ***Lampiran 33a.***

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp431.034.010.115,81 berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian nilai peralatan dan mesin dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 5. 81 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ *Hauler*	699.600.000,00	0,00	0,00	699.600.000,00
➢ *Compacting equipment*	1.568.152.000,00	0,00	0,00	1.568.152.000,00
➢ *Aggregate and concrete equipment*	260.509.438,00	0,00	0,00	260.509.438,00
➢ *Loader*	1.273.809.000,00	0,00	0,00	1.273.809.000,00
➢ Alat pengangkat	1.318.085.500,00	0,00	0,00	1.318.085.500,00
➢ Mesin proses	581.600.090,00	0,00	0,00	581.600.090,00
➢ Mesin proses apung	810.414.514,00	0,00	0,00	810.414.514,00
➢ Alat besar apung lainnya	0,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
➢ Alat penarik	1.037.170.000,00	0,00	0,00	1.037.170.000,00
➢ *Compressor*	218.580.000,00	0,00	0,00	218.580.000,00
➢ *Electric generating set*	5.126.018.312,00	0,00	0,00	5.126.018.312,00
➢ Pompa	214.346.750,00	0,00	0,00	214.346.750,00
➢ Peralatan selam	144.599.600,00	192.538.000,00	(8.989.500,00)	328.148.100,00
➢ Kendaraan dinas bermotor perorangan	13.663.032.400,00	0,00	(1.397.450.000,00)	12.265.582.400,00
➢ Kendaraan bermotor penumpang	20.166.356.213,00	0,00	0,00	20.166.356.213,00
➢ Kendaraan bermotor angkutan barang	7.617.184.661,00	0,00	0,00	7.617.184.661,00
➢ Kendaraan bermotor beroda dua	14.722.336.733,00	182.250.000,00	(16.168.628,00)	14.888.418.105,00
➢ Kendaraan bermotor khusus	22.207.414.699,00	0,00	0,00	22.207.414.699,00
➢ Alat angkutan darat bermotor lainnya	262.675.818,00	0,00	0,00	262.675.818,00
➢ Kendaraan tak bermotor angkutan barang	25.473.500,00	0,00	0,00	25.473.500,00
➢ Kendaraan tak bermotor penumpang	49.665.000,00	0,00	0,00	49.665.000,00
➢ Alat angkutan darat tak bermotor lainnya	33.878.000,00	0,00	0,00	33.878.000,00
➢ Alat angkutan apung bermotor untuk barang	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
➢ Alat angkutan apung bermotor untuk penumpang	11.770.215.803,00	1.172.400.000,00	0,00	12.942.615.803,00
➢ Alat angkutan apung bermotor khusus	382.885.000,00	0,00	0,00	382.885.000,00
➢ Alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang	407.797.000,00	0,00	0,00	407.797.000,00
➢ Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi	668.532.000,00	0,00	0,00	668.532.000,00
➢ Perkakas bengkel listrik	3.371.054.282,00	0,00	0,00	3.371.054.282,00
➢ Perkakas bengkel service	133.609.750,00	0,00	0,00	133.609.750,00
➢ Perkakas bengkel kayu	111.218.100,00	0,00	0,00	111.218.100,00
➢ Perkakas bengkel khusus	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
➢ Peralatan las	12.018.000,00	0,00	0,00	12.018.000,00
➢ Perkakas pabrik es	768.438.100,00	0,00	0,00	768.438.100,00
➢ Alat bengkel bermesin lainnya	35.971.000,00	0,00	0,00	35.971.000,00
➢ Perkakas bengkel konstruksi logam	9.475.000,00	0,00	0,00	9.475.000,00

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Perkakas bengkel listrik	743.160.000,00	0,00	0,00	743.160.000,00
➢ Perkakas bengkel service	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00
➢ Perkakas khusus (*special tools*)	26.532.000,00	0,00	0,00	26.532.000,00
➢ Perkakas bengkel kerja	93.500.000,00	0,00	0,00	93.500.000,00
➢ Peralatan tukang besi	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
➢ Peralatan tukang kayu	16.732.500,00	4.005.000,00	0,00	20.737.500,00
➢ Peralatan ukur, gip dan feeting	34.531.000,00	0,00	0,00	34.531.000,00
➢ Peralatan bengkel khusus peladam	53.291.448,00	0,00	0,00	53.291.448,00
➢ Alat ukur universal	1.505.119.854,00	0,00	0,00	1.505.119.854,00
➢ Alat ukur/test klinis lain	11.525.000,00	0,00	0,00	11.525.000,00
➢ Alat kalibrasi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
➢ Universal tester	94.359.800,00	0,00	0,00	94.359.800,00
➢ Alat ukur/pembanding	307.358.000,00	0,00	0,00	307.358.000,00
➢ Alat ukur lain-lain	1.029.175.000,00	0,00	0,00	1.029.175.000,00
➢ Alat timbangan/biara	69.688.005,00	3.000.000,00	(12.906.795,00)	59.781.210,00
➢ Anak timbangan/biara	69.284.000,00	0,00	0,00	69.284.000,00
➢ Alat pengolahan tanah dan tanaman	817.315.682,00	0,00	0,00	817.315.682,00
➢ Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak	54.654.000,00	0,00	0,00	54.654.000,00
➢ Alat panen	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
➢ Alat penyimpan hasil percobaan pertanian	964.341.041,00	0,00	0,00	964.341.041,00
➢ Alat laboratorium pertanian	645.270.609,00	0,00	0,00	645.270.609,00
➢ Alat prosesing	17.828.000,00	0,00	0,00	17.828.000,00
➢ Alat pasca panen	449.583.000,00	0,00	0,00	449.583.000,00
➢ Alat produksi perikanan	164.615.000,00	0,00	0,00	164.615.000,00
➢ Alat-alat peternakan	847.930.600,00	26.203.000,00	0,00	874.133.600,00
➢ Alat pengolahan lainnya	3.545.789.000,00	0,00	0,00	3.545.789.000,00
➢ Mesin ketik	1.964.515.451,00	0,00	0,00	1.964.515.451,00
➢ Mesin hitung/mesin jumlah	59.385.000,00	0,00	0,00	59.385.000,00
➢ Alat reproduksi (penggandaan)	377.998.603,00	0,00	0,00	377.998.603,00
➢ Alat penyimpan perlengkapan kantor	6.116.922.056,00	97.444.000,00	(2.490.000,00)	6.211.876.056,00
➢ Alat kantor lainnya	7.315.551.934,60	44.794.367,00	(12.825.719,00)	7.347.520.582,60
➢ Meubelair	30.237.673.387,00	5.660.886.171,00	(3.028.100.151,00)	32.870.459.407,00
➢ Alat pengukur waktu	144.358.000,00	1.500.000,00	0,00	145.858.000,00
➢ Alat pembersih	1.707.700.044,00	35.896.000,00	0,00	1.743.596.044,00
➢ Alat pendingin	11.072.575.178,00	499.978.450,00	(12.470.000,00	11.560.083.628,00
➢ Alat dapur	1.168.438.420,00	14.872.400,00	(1.372.400,00)	1.181.938.420,00
➢ Alat rumah tangga lainnya (home use)	25.089.848.536,00	720.627.171,00	(202.411.071,00)	25.608.064.636,00
➢ Alat pemadam kebakaran	473.188.000,00	0,00	0,00	473.188.000,00
➢ Meja kerja pejabat	2.301.296.713,00	23.550.000,00	(9.700.000,00)	2.315.146.713,00
➢ Meja rapat pejabat	256.389.000,00	0,00	0,00	256.389.000,00
➢ Kursi kerja pejabat	2.034.669.528,00	84.850.000,00	(16.250.000,00)	2.103.269.528,00

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Kursi rapat pejabat	22.600.000,00	0,00	0,00	22.600.000,00
➢ Kursi hadap depan meja kerja pejabat	74.030.150,00	0,00	0,00	74.030.150,00
➢ Kursi tamu di ruangan pejabat	436.248.070,00	0,00	0,00	436.248.070,00
➢ Lemari dan arsip pejabat	6.131.585.258,00	0,00	0,00	6.131.585.258,00
➢ Peralatan studio audio	3.421.473.727,00	269.507.095,00	(2.250.000,00)	3.688.730.822,00
➢ Peralatan studio video dan film	5.170.498.898,00	174.475.500,00	(75.350.356,00)	5.269.624.042,00
➢ Peralatan studio gambar	20.000.000,00	69.321.500,00	0,00	89.321.500,00
➢ Peralatan cetak	153.924.900,00	0,00	0,00	153.924.900,00
➢ Peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah	169.332.500,00	0,00	0,00	169.332.500,00
➢ Alat komunikasi telepon	1.512.948.838,00	117.950.000,00	(1.800.000,00)	1.629.098.838,00
➢ Alat komunikasi radio SSB	786.636.000,00	0,00	0,00	786.636.000,00
➢ Alat komunikasi radio HF/FM	68.060.000,00	0,00	0,00	68.060.000,00
➢ Alat komunikasi radio VHF	74.500.000,00	0,00	0,00	74.500.000,00
➢ Alat komunikasi sosial	294.118.000,00	0,00	0,00	294.118.000,00
➢ Alat-alat sandi	41.646.000,00	0,00	0,00	41.646.000,00
➢ Alat komunikasi khusus	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
➢ Alat komunikasi lainnya	16.650.000,00	0,00	0,00	16.650.000,00
➢ Peralatan pemancar VHF/FM	94.259.000,00	0,00	0,00	94.259.000,00
➢ Peralatan pemancar SHF	149.996.000,00	0,00	0,00	149.996.000,00
➢ Peralatan antena MF/MW	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
➢ Peralatan antena VHF/FM	15.910.000,00	0,00	0,00	15.910.000,00
➢ Peralatan antena UHF	33.540.000,00	0,00	0,00	33.540.000,00
➢ Peeralatan antena SHF/parabola	64.249.627,00	0,00	0,00	64.249.627,00
➢ Peralatan translator UHF/UHF	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
➢ Switcher antena	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
➢ Switcher/menara antena	50.154.782,00	0,00	0,00	50.154.782,00
➢ Program input equipment	119.368.400,00	0,00	0,00	119.368.400,00
➢ Peralatan perlengkapan radio	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
➢ Sumber tenaga	2.698.200.000,00	0,00	0,00	2.698.200.000,00
➢ Peralatan komunikasi navigasi lainnya	3.825.000,00	19.000.000,00	0,00	22.825.000,00
➢ Alat kedokteran umum	27.398.411.947,68	0,00	0,00	27.398.411.947,68
➢ Alat kedokteran gigi	1.158.518.077,00	0,00	0,00	1.158.518.077,00
➢ Alat kedokteran keluarga berencana	880.704.141,97	0,00	0,00	880.704.141,97
➢ Alat kedokteran bedah	6.919.722.453,00	0,00	0,00	6.919.722.453,00
➢ Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	4.573.254.062,16	0,00	0,00	4.573.254.062,16
➢ Alat kedokteran THT	325.479.808,00	0,00	0,00	325.479.808,00
➢ Alat kedokteran bagian penyakit dalam	777.926.544,00	0,00	0,00	777.926.544,00
➢ Alat kedokteran anak	558.162.328,00	0,00	0,00	558.162.328,00
➢ Alat kedokteran poliklinik	694.087.875,00	0,00	0,00	694.087.875,00
➢ Alat kesehatan rehabilitasi medis	200.370.658,00	0,00	0,00	200.370.658,00
➢ Alat kedokteran neurologi (syaraf)	550.527.020,00	0,00	0,00	550.527.020,00

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Alat kedokteran jantung	55.275.400,00	0,00	0,00	55.275.400,00
➢ Alat kedokteran radiodiagnostic	1.606.677.500,00	0,00	0,00	1.606.677.500,00
➢ Alat kedokteran kulit dan kelamin	15.450.000,00	0,00	0,00	15.450.000,00
➢ Alat kedokteran gawat darurat	14.039.721.723,00	0,00	0,00	14.039.721.723,00
➢ Alat kedokteran ICU	920.295.975,00	0,00	0,00	920.295.975,00
➢ Alat kesehatan matra laut	31.600.000,00	0,00	0,00	31.600.000,00
➢ Alat kesehatan kepolisian	21.450.000,00	0,00	0,00	21.450.000,00
➢ Alat kesehatan olah raga	9.944.000,00	0,00	0,00	9.944.000,00
➢ Alat kesehatan umum lainnya	23.129.617,00	146.821.868,00	(3.270.000,00)	166.681.485,00
➢ Alat laboratorium kimia air teknik penyehatan	71.277.000,00	0,00	0,00	71.277.000,00
➢ Alat laboratorium micro biologi teknik penyehatan	21.722.700,00	0,00	0,00	21.722.700,00
➢ Alat laboratorium hidrokimia	70.077.500,00	0,00	0,00	70.077.500,00
➢ Alat laboratorium batuan/geologi	133.299.000,00	0,00	0,00	133.299.000,00
➢ Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	574.377.200,00	0,00	0,00	574.377.200,00
➢ Alat laboratorium aspal, cat dan kimia	183.744.750,00	0,00	0,00	183.744.750,00
➢ Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan	125.299.500,00	0,00	0,00	125.299.500,00
➢ Alat laboratorium logam, mesin dan listrik	283.520.500,00	0,00	0,00	283.520.500,00
➢ Alat laboratorium umum	3.907.361.162,00	0,00	0,00	3.907.361.162,00
➢ Alat laboratorium microbiologi	354.202.000,00	0,00	0,00	354.202.000,00
➢ Alat laboratorium kimia	198.424.500,00	0,00	0,00	198.424.500,00
➢ Alat laboratorium patologi	1.397.963.176,00	0,00	0,00	1.397.963.176,00
➢ Alat laboratorium immunologi	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
➢ Alat laboratorium hematologi	173.175.600,00	0,00	0,00	173.175.600,00
➢ Alat laboratorium film	398.729.125,00	0,00	0,00	398.729.125,00
➢ Alat laboratorium makanan	33.045.000,00	0,00	0,00	33.045.000,00
➢ Alat laboratorium farmasi	30.130.000,00	0,00	0,00	30.130.000,00
➢ Alat laboratorium fisika	406.860.000,00	0,00	(5.720.000,00)	401.140.000,00
➢ Alat laboratorium pasir	4.396.000,00	0,00	0,00	4.396.000,00
➢ Alat laboratorium uji proses pengelasan	5.673.750,00	0,00	0,00	5.673.750,00
➢ Alat laboratorium proses pembuatan logam	13.904.000,00	0,00	0,00	13.904.000,00
➢ Alat laboratorium proses teknologi tekstil	9.834.000,00	0,00	0,00	9.834.000,00
➢ Alat laboratorium uji kulit, karet dan plastik	355.685.600,00	0,00	0,00	355.685.600,00
➢ Alat laboratorium pertanian	605.248.054,00	0,00	0,00	605.248.054,00
➢ Alat laboratorium elektronika dan daya	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
➢ Alat laboratorium energi surya	2.041.434.500,00	0,00	0,00	2.041.434.500,00
➢ Alat laboratorium oseanografi	54.972.500,00	0,00	0,00	54.972.500,00
➢ Alat laboratorium biologi perairan	340.246.662,00	0,00	0,00	340.246.662,00
➢ Alat laboratorium biologi	360.786.750,00	0,00	(5.476.950,00)	355.309.800,00
➢ Alat laboratorium geofisika	30.448.000,00	0,00	0,00	30.448.000,00
➢ Alat laboratorium proses/teknik kimia	60.350.000,00	0,00	0,00	60.350.000,00

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Laboratorium hematologi dan urinalisis	484.963.786,00	0,00	0,00	484.963.786,00
➢ Alat laboratorium lain	4.949.134.848,00	0,00	0,00	4.949.134.848,00
➢ *Analytical instrument*	27.795.000,00	0,00	0,00	27.795.000,00
➢ *General laboratory tool*	11.897.500,00	0,00	0,00	11.897.500,00
➢ *Laboratory safety equipment*	199.500.000,00	0,00	0,00	199.500.000,00
➢ Alat peraga praktek sekolah bidang studi : Bahasa Indonesia	532.733.090,00	0,00	(25.487.000,00)	507.246.090,00
➢ Alat peraga praktek sekolah bidang studi : Matematika	377.883.580,00	0,00	0,00	377.883.580,00
➢ Alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA Dasar	278.196.336,00	0,00	0,00	278.196.336,00
➢ Alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA Lanjutan	148.020.250,00	0,00	0,00	148.020.250,00
➢ Alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA Menengah	1.157.466.147,00	0,00	(62.644.967,00)	1.094.821.180,00
➢ Alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPA Atas	287.104.352,00	0,00	(143.552.176,00)	143.552.176,00
➢ Alat peraga praktek sekolah bidang studi : IPS	214.911.844,00	0,00	(13.970.880,00)	200.940.964,00
➢ Alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan	134.900.000,00	0,00	0,00	134.900.000,00
➢ Alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian	1.636.237.046,00	5.165.300,00	(61.950.000,00)	1.579.452.346,00
➢ Alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga	1.871.043.938,00	1.500.000,00	(19.975.200,00)	1.852.568.738,00
➢ Alat peraga praktek sekolah bidang studi : PKN	15.018.000,00	0,00	0,00	15.018.000,00
➢ Alat peraga kejuruan	1.001.415.000,00	0,00	0,00	1.001.415.000,00
➢ Alat peraga PAUD/TK	49.199.500,00	4.000.000,00	0,00	53.199.500,00
➢ Alat peraga praktik sekolah lainnya	0,00	5.994.000,00	0,00	5.994.000,00
➢ *Modular counting and scientific electronic*	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
➢ *Assembly/counting system*	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
➢ *Recorder display*	53.766.000,00	0,00	(3.630.000,00)	50.136.000,00
➢ *System/power supply*	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00
➢ *Measuring/testing device*	114.376.105,00	0,00	0,00	114.376.105,00
➢ Alat kesehatan kerja	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
➢ Proteksi lingkungan	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00
➢ *Meteorological equipment*	9.702.810,00	0,00	0,00	9.702.810,00
➢ *Non destructive test* (NDT) *device*	164.340.000,00	0,00	0,00	164.340.000,00
➢ Peralatan hidrologi	170.500.905,00	0,00	0,00	170.500.905,00
➢ Alat laboratorium kualitas air dan tanah	1.045.946.500,00	0,00	0,00	1.045.946.500,00
➢ Alat laboratorium kualitas udara	302.440.000,00	0,00	0,00	302.440.000,00
➢ Alat laboratorium kebisingan dan getaran	8.640.000,00	0,00	0,00	8.640.000,00
➢ Laboratorium lingkungan	235.102.000,00	0,00	0,00	235.102.000,00
➢ Alat laboratorium penunjang	305.330.500,00	0,00	0,00	305.330.500,00
➢ *Data accquisition and analyzing system*	688.239.000,00	0,00	0,00	688.239.000,00
➢ Peralatan umum	31.600.000,00	4.725.000,00	0,00	36.325.000,00
➢ Permesinan : *propeller model workshop*	1.644.500,00	0,00	0,00	1.644.500,00
➢ MOB	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00
➢ Alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain	25.875.000,00	0,00	0,00	25.875.000,00
➢ Senjata lain-lain	53.940.000,00	0,00	0,00	53.940.000,00

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Alat keamanan	100.184.500,00	0,00	0,00	100.184.500,00
➢ Laser	44.071.250,00	0,00	0,00	44.071.250,00
➢ Komputer jaringan	2.614.064.714,00	0,00	(49.538.947,00)	2.564.525.767,00
➢ Personal komputer	62.260.650.359,00	3.883.299.739,00	(751.437.022,00)	65.392.513.076,00
➢ Peralatan mainframe	316.069.814,00	0,00	0,00	316.069.814,00
➢ Peralatan mini komputer	1.044.530.572,00	0,00	(112.299.000,00)	932.231.572,00
➢ Peralatan personal komputer	12.387.836.504,40	2.137.597.075,00	(38.988.967,00)	14.486.444.612,40
➢ Peralatan jaringan	4.073.373.417,00	778.469.500,00	(7.705.500,00)	4.844.137.417,00
➢ Peralatan komputer lainnya	95.425.000,00	4.963.145,00	(800.865,00)	99.587.280,00
➢ Ukur/instrumen	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
➢ Alat deteksi lainnya	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	0,00
➢ Alat penolong	0,00	3.996.000,00	0,00	3.996.000,00
➢ Alat pendukung pencarian	3.830.181.000,00	0,00	0,00	3.830.181.000,00
➢ Alat sar lainnya	199.985.000,00	0,00	0,00	199.985.000,00
➢ Rambu bersuar	348.905.000,00	0,00	0,00	348.905.000,00
➢ Rambu tidak bersuar	2.852.692.350,00	1.642.320.000,00	0,00	4.495.012.350,00
➢ Rambu-rambu lalu lintas darat lainnya	4.921.460.550,00	0,00	0,00	4.921.460.550,00
➢ Peralatan permainan	186.365.900,00	233.150.000,00	(3.700.000,00)	415.815.900,00
➢ Peralatan senam	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
➢ Peralatan olah raga lainnya	13.730.000,00	7.500.000,00	0,00	21.230.000,00
Jumlah	**418.529.641.928,81**	**18.618.200.281,00**	**(6.113.832.094,00)**	**431.034.010.115,81**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 merupakan saldo berdasarkan mutasi penambahan, pengurangan atau koreksi dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2023	**Rp**	**418.529.641.928,81**
Mutasi selama 2023:		
Mutasi Tambah:		
1. Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	17.125.860.281,00
2. Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	1.492.340.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	**Rp**	**18.618.200.281,00**
Mutasi Kurang:		
1. Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa	Rp	(119.528.000,00)
2. Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	(19.500.000,00)
3. Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya atas Sisa Hibah ke Banggai Laut	Rp	(841.629.084,00)
4. Ekstra Kompatabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	(3.035.222.926,00)
5. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	(2.097.952.084,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan	**Rp**	**(6.113.832.094,00)**
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**431.034.010.115,81**

Penjelasan atas mutasi tambah dan mutasi kurang yang terkait aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

1) Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.125.860.281,00, dengan rincian pada ***Lampiran 33***;
2) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.492.340.000,00, dengan rincian pada ***Lampiran 38***;
3) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp119.528.000,00, dengan rincian pada ***Lampiran 39***;
4) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.500.000,00, dengan rincian pada ***Lampiran 40***;
5) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Sisa Hibah ke Banggai Laut sebesar Rp841.629.084,00, dengan rincian pada ***Lampiran 40***;
6) Ekstra Kompatabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.035.222.926,00, dengan rincian pada ***Lampiran 41***;
7) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.097.952.084,00, dengan rincian pada ***Lampiran 42***.

Penjelasan mengenai mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin setiap OPD dengan rincian pada ***Lampiran 33b.***

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp746.494.583.550,54 berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian nilai gedung dan bangunan sebagai berikut:

Tabel 5. 82 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Bangunan gedung kantor	118.634.986.963,90	9.771.050.670,00	(1.273.153.626,00)	127.132.884.007,90
➢ Bangunan gudang	9.689.174.394,00	0,00	(144.195.850,00)	9.544.978.544,00
➢ Bangunan gedung untuk bengkel/hanggar	80.850.000,00	0,00	0,00	80.850.000,00
➢ Bangunan gedung instalasi	2.239.954.980,00	2.919.471.369,00	(2.919.471.369,00)	2.239.954.980,00
➢ Bangunan gedung laboratorium	14.476.683.748,00	6.945.307.856,00	(621.168.412,00)	20.800.823.192,00
➢ Bangunan kesehatan	110.709.832.155,00	1.058.014.357,00	(397.590.000,00)	111.370.256.512,00
➢ Bangunan gedung tempat ibadah	2.829.123.610,00	525.034.000,00	(96.097.000,00)	3.258.060.610,00
➢ Bangunan gedung tempat pertemuan	19.245.557.730,00	313.141.000,00	0,00	19.558.698.730,00
➢ Bangunan gedung tempat pendidikan	173.805.290.359,00	24.928.404.827,00	(12.181.589.492,00)	186.552.105.694,00
➢ Bangunan gedung tempat olah raga	18.279.083.531,03	482.712.159,00	0,00	18.761.795.690,03
➢ Bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar	22.936.789.684,00	865.200.000,00	0,00	23.801.989.684,00

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Bangunan gedung untuk pos jaga	3.551.566.201,00	334.913.000,00	(80.247.000,00)	3.806.232.201,00
➢ Bangunan gedung garasi/pool	7.019.766.213,61	0,00	0,00	7.019.766.213,61
➢ Bangunan gedung pemotong hewan	150.610.000,00	199.816.000,00	0,00	350.426.000,00
➢ Bangunan gedung perpustakaan	18.178.431.654,00	2.163.109.033,00	(779.720.866,00)	19.561.819.821,00
➢ Bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara	28.984.397.096,00	223.960.000,00	(275.132.277,00)	28.933.224.819,00
➢ Bangunan pengujian kelaikan	93.400.000,00	0,00	0,00	93.400.000,00
➢ Bangunan terbuka	1.562.618.158,00	1.086.074.000,00	(34.248.000,00)	2.614.444.158,00
➢ Bangunan tempat pelelangan ikan (TP)	223.933.000,00	0,00	0,00	223.933.000,00
➢ Bangunan industri	0,00	18.820.000,00	0,00	18.820.000,00
➢ Bangunan peternakan/perikanan	388.644.550,00	0,00	0,00	388.644.550,00
➢ Bangunan gedung tempat kerja lainnya	12.234.376.004,00	0,00	(199.818.000,00)	12.034.558.004,00
➢ Bangunan fasilitas umum	230.828.000,00	0,00	0,00	230.828.000,00
➢ Bangunan parkir	306.277.500,00	0,00	0,00	306.277.500,00
➢ Bangunan gedung pabrik	5.418.111.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	5.418.111.000,00
➢ Taman	1.387.192.000,00	4.828.920.253,00	(483.258.000,00)	5.732.854.253,00
➢ Bangunan gedung tempat kerja lainnya	2.266.269.340,00	0,00	0,00	2.266.269.340,00
➢ Rumah negara golongan i	14.641.520.104,00	430.222.000,00	(11.900.000,00)	15.059.842.104,00
➢ Rumah negara golongan ii	22.801.662.408,00	0,00	(667.600.000,00)	22.134.062.408,00
➢ Rumah negara golongan iii	55.121.388.153,00	2.734.506.901,00	0,00	57.855.895.054,00
➢ Mes/wisma/bungalo/tempat peristirahatan	3.403.844.095,00	389.570.000,00	0,00	3.793.414.095,00
➢ Asrama	191.716.500,00	0,00	0,00	191.716.500,00
➢ Bangunan gedung tempat tinggal lainnya	540.916.400,00	0,00	0,00	540.916.400,00
➢ Tugu	2.216.482.600,00	0,00	0,00	2.216.482.600,00
➢ Bangunan peninggalan	1.351.130.756,00	0,00	0,00	1.351.130.756,00
➢ Candi/tugu peringatan/prasasti lainnya	39.950.000,00	0,00	0,00	39.950.000,00
➢ Bangunan menara perambuan lainnya	148.149.000,00	19.500.000,00	0,00	167.649.000,00
➢ Tugu/tanda batas administrasi	3.344.929.886,00	0,00	0,00	3.344.929.886,00
➢ Pilar/tugu/tanda lainnya	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	0,00
➢ Pagar	25.113.187.569,00	3.119.781.800,00	(536.381.125,00)	27.696.588.244,00
Jumlah	**703.838.625.342,54**	**63.411.529.225,00**	**(20.755.571.017,00)**	**746.494.583.550,54**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 merupakan nilai saldo awal 1 Januari 2023 dengan mutasi penambahan dan pengurangan atau koreksi selama tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2023		**Rp**	**703.838.625.342,54**
Mutasi selama 2023			
Mutasi Tambah:			
1.	Koreksi Kurang Nilai Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	204.147.160,00
2.	Hasil Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	64.225.000,00
3.	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	56.180.176.865,00
4.	Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	865.200.000,00
5.	Reklasifikasi Akun dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	2.500.000,00
6.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	133.867.000,00
7.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	19.500.000,00
8.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	5.913.072.850,00
9.	Hutang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	28.840.350,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	**Rp**	**63.411.529.225,00**
Mutasi Kurang:			
1.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	(237.440.000,00)

2.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	(8.644.081.751,00)
3.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa	Rp	(69.900.000,00)
4.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya atas Sisa Hibah ke Banggai Laut	Rp	(293.896.850,00)
5.	Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	(11.463.735.466,00)
6.	Piutang Pihak Ketiga	Rp	(46.516.950,00)
Jumlah Mutasi Pengurangan		**Rp**	**(20.755.571.017,00)**
	Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**746.494.583.550,54**

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang di atas adalah sebagai berikut:

1) Koreksi Kurang Nilai Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp204.147.160,00 dengan rincian pada ***Lampiran 43***;
2) Hasil Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp64.225.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 44***;
3) Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp56.180.506.865,00 dengan rincian pada ***Lampiran 33***;
4) Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp865.200.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 45***;
5) Reklasifikasi Akun dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.500.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 46***;
6) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp133.867.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 37***;
7) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.500.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 40***;
8) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.913.072.850,00 dengan rincian pada ***Lampiran 47***;
9) Hutang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.840.350,00 dengan rincian pada ***Lampiran 48***;
10) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp237.440.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 49***;
11) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp8.644.081.751,00 dengan rincian pada ***Lampiran 48***;
12) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp69.900.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 39***;

13) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya atas Sisa Hibah ke Banggai Laut sebesar Rp293.896.850,00 dengan rincian pada ***Lampiran 49***;
14) Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.463.735.466,00, dengan rincian pada ***Lampiran 42***;
15) Piutang Pihak Ketiga sebesar Rp46.516.950,00, dengan rincian pada ***Lampiran 52***.

Penjelasan mengenai mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan setiap OPD dengan rincian pada ***Lampiran 33c***.

5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.415.948.157.635,67 berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 83 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Jalan kabupaten	604.241.734.120,18	44.805.778.300,00	(1.963.531.300,00)	647.083.981.120,18
➢ Jalan desa	43.780.325.939,00	2.830.053.200,00	(1.450.000,00)	46.608.929.139,00
➢ Jalan khusus	238.585.041.393,82	798.837.000,00	(145.600.000,00)	239.238.278.393,82
➢ Jalan lainnya	1.144.273.000,00	212.000.000,00	0,00	1.356.273.000,00
➢ Jembatan pada jalan kabupaten	21.569.066.179,81	0,00	0,00	21.569.066.179,81
➢ Jembatan pada jalan desa	8.005.154.406,00	0,00	0,00	8.005.154.406,00
➢ Jembatan pada jalan khusus	604.124.000,00	0,00	0,00	604.124.000,00
➢ Jembatan penyeberangan	527.030.000,00	0,00	0,00	527.030.000,00
➢ Jembatan labuh/sandar pada terminal	149.990.000,00	423.900.000,00	0,00	573.890.000,00
➢ Bangunan pengambilan irigasi	11.913.665.742,00	0,00	0,00	11.913.665.742,00
➢ Bangunan pembawa irigasi	16.206.839.154,38	0,00	0,00	16.206.839.154,38
➢ Bangunan pembuang irigasi	16.112.551.367,00	0,00	0,00	16.112.551.367,00
➢ Bangunan pengaman irigasi	24.661.054.049,11	147.314.000,00	0,00	24.808.368.049,11
➢ Bangunan pelengkap irigasi	1.780.528.750,00	0,00	0,00	1.780.528.750,00
➢ Bangunan sawah irigasi	0,00	184.650.000,00	0,00	184.650.000,00
➢ Bangunan air irigasi lainnya	99.419.000,00	184.700.000,00	0,00	284.119.000,00
➢ Bangunan pengaman pasang surut	16.342.239.900,00	0,00	0,00	16.342.239.900,00
➢ Bangunan pelengkap pengembangan rawa	384.631.525,00	0,00	0,00	384.631.525,00
➢ Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam	3.196.579.000,00	3.334.965.000,00	(20.980.000,00)	6.510.564.000,00
➢ Bangunan pembawa pengaman sungai/pantai	409.493.250,00	0,00	0,00	409.493.250,00
➢ Bangunan pembuang pengaman sungai	9.999.051.730,00	0,00	0,00	9.999.051.730,00
➢ Bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai	73.868.892.631,37	1.100.715.000,00	0,00	74.969.607.631,37

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam lainnya	727.484.500,00	140.080.000,00	0,00	867.564.500,00
➢ Bangunan pengaman pengembangan sumber air	1.493.102.000,00	0,00	0,00	1.493.102.000,00
➢ Bangunan pengambilan air bersih/air baku	728.089.806,00	0,00	0,00	728.089.806,00
➢ Bangunan pembawa air bersih/air baku	8.183.711.950,00	0,00	0,00	8.183.711.950,00
➢ Bangunan pelengkap air bersih/air baku	5.965.108.616,00	0,00	0,00	5.965.108.616,00
➢ Bangunan air bersih/air baku lainnya	35.949.543.564,00	4.462.000.000,00	0,00	40.411.543.564,00
➢ Bangunan pembawa air kotor	18.408.314.314,00	698.921.000,00	(80.414.000,00)	19.026.821.314,00
➢ Bangunan pembuang air kotor	5.605.570.196,00	1.831.768.000,00	0,00	7.437.338.196,00
➢ Bangunan pelengkap air kotor	1.657.038.200,00	601.075.600,00	0,00	2.258.113.800,00
➢ Instalasi air sumber / mata air	247.500.000,00	0,00	0,00	247.500.000,00
➢ Instalasi air bersih / air baku lainnya	39.805.627.335,00	13.900.000,00	(13.900.000,00)	39.805.627.335,00
➢ Instalasi air buangan domestik	9.945.131.000,00	0,00	0,00	9.945.131.000,00
➢ Instalasi air buangan industri	523172000	0,00	0,00	523.172.000,00
➢ Instalasi pengolahan sampah lainnya	14.170.000,00	0,00	0,00	14.170.000,00
➢ Instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)	3.279.612.250,00	0,00	0,00	3.279.612.250,00
➢ Instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM)	259.306.000,00	0,00	0,00	259.306.000,00
➢ Instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)	9.644.991.375,00	677.680.000,00	0,00	10.322.671.375,00
➢ Instalasi pembangkit listrik tenaga biogas (PLTB)	697.159.750,00	0,00	0,00	697.159.750,00
➢ Instalasi pembangkit listrik tenaga samudera / gelombang samudera	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
➢ Instalasi gardu listrik induk	181.931.000,00	0,00	0,00	181.931.000,00
➢ Instalasi gardu listrik distribusi	563.598.667,00	0,00	0,00	563.598.667,00
➢ Instalasi pusat pengatur listrik	309.207.450,00	0,00	0,00	309.207.450,00
➢ Instalasi gardu listrik lainnya	603.296.000,00	0,00	0,00	603.296.000,00
➢ Instalasi lain	0,00	1.550.340.500,00	(1.503.690.500,00)	46.650.000,00
➢ Jaringan pembawa	58.601.079.692,00	0,00	0,00	58.601.079.692,00
➢ Jaringan cabang distribusi	264.729.000,00	0,00	0,00	264.729.000,00
➢ Jaringan sambungan ke rumah	17.943.962.109,00	96.992.000,00	0,00	18.040.954.109,00
➢ Jaringan transmisi	4.124.518.900,00	0,00	0,00	4.124.518.900,00
➢ Jaringan distribusi	35.686.332.524,00	181.700.500,00	0,00	35.868.033.024,00
➢ Jaringan telepon di atas tanah	87.488.000,00	0,00	0,00	87.488.000,00
➢ Jaringan telepon di bawah tanah	135.267.000,00	0,00	0,00	135.267.000,00
➢ Jaringan pipa dinas	137.625.000,00	0,00	0,00	137.625.000,00
Jumlah	**1.355.400.353.335,67**	**64.277.370.100,00**	**(3.729.565.800,00)**	**1.415.948.157.635,67**

Nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 merupakan nilai saldo awal 1 Januari 2023 dengan mutasi penambahan dan koreksi/penyesuaian selama Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2023	**Rp**	**1.355.400.353.335,67**
Mutasi Tambah:		

1.	Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	60.393.603.200,00
2.	Reklasifikasi Akun dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi		
3.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	5.000.000,00
4.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	237.440.000,00
		Rp	3.641.326.900,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	**Rp**	**64.277.370.100,00**
Mutasi Kurang:			
1.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	(1.492.340.000,00)
2.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	(2.043.495.300,00)
3.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Beban Barang dan Jasa	Rp	(193.730.500,00)
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**Rp**	**(3.729.565.800,00)**
Saldo per 31 Desember 2023		**Rp**	**1.415.948.157.635,67**

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang tersebut di atas sebagai berikut:

1) Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp60.393.603.200,00 dengan rincian pada ***Lampiran 33***;
2) Reklasifikasi Akun dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp5.000.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 46***;
3) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp237.440.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 49***;
4) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.641.326.900,00 dengan rincian pada ***Lampiran 47***;
5) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.492.340.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 38***;
6) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp2.043.495.300,00 dengan rincian pada ***Lampiran 38***;
7) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp193.730.500,00 dengan rincian pada ***Lampiran 39***.

Penjelasan mengenai mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi setiap OPD dengan rincian pada ***Lampiran 33d.***

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.738.833.085,00 berdasarkan hasil penilaian aset dan pengadaan yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian nilai aset tetap lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 84 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Buku umum	8.584.573.051,00	161.503.100,00	(221.050.994,00)	8.525.025.157,00
➢ Buku agama	16.378.840,00	7.175.800,00	(7.175.800,00)	16.378.840,00
➢ Buku ilmu sosial	90.660.000,00	0,00	0,00	90.660.000,00
➢ Buku ilmu bahasa	0,00	2.149.400,00	(399.400,00)	1.750.000,00
➢ Buku matematika dan pengetahuan alam	5.876.000,00	378.800,00	(378.800,00)	5.876.000,00
➢ Buku ilmu pengetahuan praktis	24.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	20.000.000,00
➢ Buku arsitektur, kesenian, olah raga	20.700.000,00	13.433.900,00	(8.124.600,00)	26.009.300,00
➢ Buku geografi, biografi, sejarah	90.682.000,00	0,00	0,00	90.682.000,00
➢ Audio visual	6.350.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00
➢ Bahan kartografi	31.381.790,00	0,00	0,00	31.381.790,00
➢ Musik lainnya	0,00	3.984.600,00	0,00	3.984.600,00
➢ Karya grafika (*graphic material*)	206.949.000,00	0,00	0,00	206.949.000,00
➢ Alat musik	2.219.501.398,00	22.850.000,00	(32.755.000,00)	2.209.596.398,00
➢ Lukisan	122.650.000,00	0,00	0,00	122.650.000,00
➢ Pahatan	113.800.000,00	0,00	0,00	113.800.000,00
➢ Maket, miniatur, replika, foto dokumen dan benda bersejarah	40.490.000,00	0,00	0,00	40.490.000,00
➢ Barang kerajinan	27.250.000,00	0,00	0,00	27.250.000,00
➢ Tanaman	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Jumlah	**11.801.742.079,00**	**211.475.600,00**	**(274.384.594,00)**	**11.738.833.085,00**

Nilai aset tetap lainnya merupakan nilai saldo awal 1 Januari 2023 dan mutasi tambah serta mutasi kurang selama tahun 2023 sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2023		**Rp**	**11.801.742.079,00**
Mutasi Tambah:			
1.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	127.975.600,00
2.	Reklasifikasi Akun dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Lainnya	Rp	83.500.000,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	**Rp**	**211.475.600,00**
Mutasi Kurang:			
1.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya atas Sisa Hibah ke Banggai Laut	Rp	(24.874.500,00)
2.	Ekstra Kompatabel Aset Tetap Lainnya	Rp	(72.635.974,00)
3.	Penghapusan Aset Tetap Lainnya	Rp	(176.874.120,00)
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**Rp**	**(274.384.594,00)**
Saldo per 31 Desember 2023		**Rp**	**11.738.833.085,00**

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang di atas sebagai berikut:

1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp127.975.600,00 dengan rincian pada ***Lampiran 33***;
2) Reklasifikasi Akun dari Beban Barang dan Jasa ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp83.500.000,00 dengan rincian pada ***Lampiran 46***;
3) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya atas Sisa Hibah ke Banggai Laut sebesar Rp24.874.500,00 dengan rincian pada ***Lampiran 50***;
4) Ekstra Kompatabel Aset Tetap Lainnya sebesar Rp72.635.974,00, dengan rincian pada ***Lampiran 51***;
5) Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp176.874.120,00, dengan rincian pada ***Lampiran 42***.

Penjelasan mengenai mutasi Aset Tetap Lainnya setiap OPD dengan rincian pada ***Lampiran 33e***.

5.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp27.376.857.469,00 merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan yang diperoleh baik melalui swakelola maupun melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Konstruksi dalam pengerjaan diakui senilai biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 85 Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ Tanah Dalam Pengerjaan	0,00	106.997.000,00	0,00	106.997.000,00
➢ Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	9.391.344.585,00	8.644.081.751,00	(6.045.213.030,00)	11.990.213.306,00
➢ Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	11.221.993.768,00	2.043.495.300,00	(3.641.326.900,00)	9.624.162.168,00
➢ Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	5.655.484.995,00	0,00	0,00	5.655.484.995,00
Jumlah	**26.268.823.348,00**	**10.794.574.051,00**	**(9.686.539.930,00)**	**27.376.857.469,00**

Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023 merupakan nilai saldo awal 1 Januari 2023 dengan mutasi penambahan dan pengurangan atau koreksi sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2023	**Rp**	**26.268.823.348,00**
Mutasi Tambah:		
1. Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	106.997.000,00
2. Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	8.644.081.751,00

3.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	2.043.495.300,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	**Rp**	**10.794.574.051,00**
Mutasi Kurang:			
1.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	(5.913.072.850,00)
2.	Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	(3.641.326.900,00)
3.	Penghapusan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	(132.140.180,00)
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**Rp**	**(9.686.539.930,00)**
Saldo per 31 Desember 2023		**Rp**	**27.376.857.469,00**

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang tersebut di atas sebagai berikut:

1) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp106.997.000,00dengan rincian pada ***Lampiran 37***;
2) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp8.644.081.751,00 dengan rincian pada ***Lampiran 49***;
3) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ke Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp2.043.495.300,00 dengan rincian pada ***Lampiran 38***;
4) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.913.072.850,00 dengan rincian pada ***Lampiran 47***;
5) Reklasifikasi Akun dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.641.326.900,00 dengan rincian pada ***Lampiran 47***;
6) Penghapusan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp132.140.180,00 dengan rincian pada ***Lampiran 42***.

Penjelasan mengenai mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan setiap OPD dengan rincian pada ***Lampiran 33f.***

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan aset tetap pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun ke tahun sampai tanggal neraca. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Nilai aset yang disusutkan merupakan nilai perolehan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun ditentukan dengan menggunakan dengan pendekatan per semester dimana penyusutan dihitung bulanan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (1.221.259.873.306,02) dapat disajikan sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (348.811.591.615,81)
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (117.282.638.226,80)
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi (755.164.393.463,41)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (1.250.000,00)

5.3.1.4. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp148.494.290.409,67 dan Rp97.462.494.168,37 dengan rincian nilai pada tabel berikut.

Tabel 5. 86 Rincian Aset Lainnya

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
➢ Tagihan Jangka Panjang	38.536.814.473,00	37.949.831.428,00	586.983.045,00
➢ Aset Lain-Lain	36.700.212.936,67	55.215.963.708,37	(18.515.750.771,70)
➢ Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	73.257.263.000,00	4.296.699.032,00	68.960.563.968,00
Jumlah	**148.494.290.409,67**	**97.462.494.168,37**	**51.031.796.241,30**

Penjelasan mengenai rincian mutasi perubahan aset lainnya dijelaskan dalam penjelasan per akun.

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang yang disajikan sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.536.814.473,00 mengalami kenaikan sebesar Rp586.983.045,00 atau 1,55% dibandingkan Tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp37.949.831.428,00. Nilai Tagihan jangka panjang terdiri atas Tuntutan ganti kerugian daerah yang merupakan tuntutan perbendaharaan/tuntutan atas kerugian daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 87 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	**934.243.010,00**	**118.001,848,00**	**1.300.000,00**	**1.050.944.858,00**	**116.701.848,00**
➢ Sisa UP/TUP TA 2008 s.d. 2010 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah	701.259.932,00	0,00	0,00	701.259.932,00	0,0
➢ Reklasifikasi Kas Dana BOS	232.983.078,00	0,00	1.300.000,00	231.683.078,00	(1.300.000,00)
➢ Reklasifikasi Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	29.972.678,00	0,00	29.972.678,00	29.972.678,00
➢ Reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	88.029.170,00	0,00	88.029.170,00	88.029.170,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	**37.015.588.418,00**	**501.894.450,00**	**31.613.253,00**	**37.485.869.615,00**	**470.281.197,00**
➢ Reklasifikasi Kas Daerah ke Aset Lainnya	36.908.346.779,00	0,00	0,00	36.908.346.779,00	0,00
➢ Reklasifikasi Kas dana BOS	31.613.253,00	0,00	31.613.253,00	0,00	(31.613.253,00)
➢ Reklasifikasi Kas Dana Kapitasi pada FKTP	75.628.386,00	0,00	0,00	75.628.386,00	0,00
➢ Koreksi nila Persediaan BPBD dan Dinas Ketahanan Pangan	0,00	501.894.450,00	0,00	501.894.450,00	501.894.450,00
Jumlah	**37.949.831.428,00**	**619.896.298,00**	**32.913.253,00**	**38.536.814.473,00**	**586.983.045,00**

5.3.1.4.2. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain yang disajikan sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.700.212.936,67 mengalami penurunan sebesar Rp18.515.750.791,70 dibandingkan dengan aset lain-lain tahun 2022 yang disajikan sebesar Rp55.215.963.708,37. Aset lain-lain yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 88 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
➢ **PINJAM PAKAI**	**29.485.750.067,00**	**1.135.525.934,00**	**(9.989.042.338,0)**	**20.632.233.663,00**
• Sisa Hibah Banggai Laut Tahap II (Peralatan dan Mesin)	0,00	841.629.084,00	0,00	841.629.084,00
• Sisa Hibah Banggai Laut Tahap II (Gedung dan Bangunan)	0,00	293.896.850,00	0,00	293.896.850,00
• Aset Tanah Bangunan SMA/SMK yang Akan Diserahkan Ke Pemerintah Prov. Sulteng	1.234.218.000,00	0,00	(1.034.968.000,00)	199.250.000,00
• Aset Gedung Bangunan Yang Akan Dihibahkan Oleh Masyarakat Kelurahan Sabang Kec. Bulagi Utara	491.810.000,00	0,00	(491.810.000,00)	0,00
• Aset Gedung Bangunan SMA/SMK Yang Akan Diserahkan Ke Pemerintah Prov. Sul-Teng	10.359.659.696,00	0,00	(7.554.480.658,00)	2.805.179.038,00
• Aset Gedung Dan Bangunan Yang Dikuasai Oleh Instansi Vertikal/Pihak Lain	17.214.788.691,00	0,00	(725.000.000,00)	16.489.788.691,00
• Aset Peralatan Dan Mesin Yang Akan Di Hibahkan Ke Sekolah SD/SMP Swasta	185.273.680,00	0,00	(182.783.680,00)	2.490.000,00
➢ **ASET TIDAK BERWUJUD**	**368.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**368.005.000,00**
➢ **ASET RUSAK BERAT**	**17.016.615.773,67**	**24.874.500,00**	**(1.341.516.000,00)**	**15.699.974.273,67**
• Peralatan Mesin Aset Rusak Berat/Usang	12.471.704.371,67	0,00	(944.700.000,00)	11.527.004.371,67
• Gedung Dan Bangunan Aset Rusak Berat/Usang	3.652.315.446,00	0,00	(396.816.000,00)	3.255.499.446,00
• Jalan Irigasi Dan Jaringan Aset Rusak Berat/Usang	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
• Hibah Balut Tahap II (Peralatan dan Mesin)	797.645.956,00	0,00	0,00	797.645.956,00
• Sisa Hibah Balut Tahap II (Gedung dan Bangunan)	49.950.000,00	0,00	0,00	49.950.000,00

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Mutasi (+) (Rp)	Mutasi (-) (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
• Sisa Hibah Balut Tahap II (Aset Tetap Lainnya)	0,00	24.874.500,00	0,00	24.874.500,00
➢ **Obat *Expired Date***	**8.345.592.867,70**	**0,00**	**(8.345.592.867,70)**	**0,00**
Jumlah	**55.215.963.708,37**	**1.160.400.434,00**	**(19.676.151.205,70)**	**36.700.212.936,67**

5.3.1.4.3. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang disajikan sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.257.263.00,00 merupakan TDF tahun 2023 sesuai informasi dari aplikasi Simtrada dan surat dari KPPN Luwuk Nomor: S-71/KPN.2703/2024 tanggal 19 Januari 2024. Sedangkan untuk Dana TDF Tahun 2022 telah disalurkan pada Tahun 2023 sebesar Rp4.296.699.032,00.

5.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.815.398.040,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.446.318.728,00 atau 33,53% dari Tahun 2022 sebesar Rp13.261.716.768,00. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 merupakan utang atau kewajiban perhitungan pihak ketiga (PFK), utang belanja dan utang jangka pendek lainnya sebagai berikut:

Tabel 5. 89 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
➢ Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	343.167.328,00	210.912.267,00	343.167.328,00	210.912.267,00	(132.255.061,00)
➢ Utang Belanja	11.415.954.270,00	9.567.131.347,00	12.406.599.844,00	8.576.485.773,00	(2.839.468.497,00)
➢ Utang Jangka Pendek Lainnya	1.502.595.170,00	28.000.000,00	1.502.595.170,00	28.000.000,00	(1.474.595.170,00)
Jumlah	**13.261.716.768,00**	**9.806.043.614,00**	**14.252.362.342,00**	**8.815.398.040,00**	**(4.446.318.728,00)**

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp210.912.267,00 yang merupakan utang PFK yang belum disetor ke Kas Negara

hingga akhir Tahun 2023 dan jika dibandingkan dengan saldo utang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp343.167.328,00 terjadi penurunan utang PFK pada Tahun 2023 sebesar Rp132.255.061,00 atau 38,54% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 90 Rincian Utang PFK

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
Utang PPh 21	32.171.963,00	0,00	32.171.963,00	0,00	(32.171.963,00)
Utang PPh 22	6.176.478,00	0,00	6.176.478,00	0,00	(6.176.478,00)
Utang PPh 23	498.119,00	0,00	498.119,00	0,00	(498.119,00)
Utang PPh Pasal 4 (2)	57.203.487,00	0,00	57.203.487,00	0,00	(57.203.487,00)
Utang PPN Pusat	227.999.079,00	210.912.267,00	227.999.079,00	210.912.267,00	(17.086.812,00)
Utang Taperum	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	(470.000,00)
IWP	18.648.202,00	0,00	18.648.202,00	0,00	(18.648.202,00)
Jumlah	**343.167.328,00**	**210.912.267,00**	**343.167.328,00**	**210.912.267,00**	**(132.255.061,00)**

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2023 merupakan utang PFK pada Satuan Pendidikan Negeri yang belum disetor sebesar Rp210.912.267,00. Rincian nama Satuan Pendidikan yang memiliki utang PFK dapat dilihat pada ***Lampiran 21.***

5.3.2.1.2. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.576.485.773,00 dan jika dibandingkan dengan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.415.954.270,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.839.468.497,00 atau 24,87%. Utang Belanja merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul sehubungan dengan adanya pemakaian atau konsumsi barang/jasa namun kas belum dilakukan pembayaran. Rincian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 91 Rincian Utang Belanja

	Uraian	Per 1 Jan 2023 (Rp)	Mutasi		Per 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
1	Utang Belanja Pegawai	10.681.734.441,00	9.412.770.997,00	12.378.294.644,00	7.716.210.794,00	(2.965.523.647,00)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	40.137.200,00	125.520.000,00	28.305.200,00	137.352.000,00	97.214.800,00
3	Utang Belanja Modal Tanah	37.203.370,00	0,00	0,00	37.203.370,00	0,00
4	Utang Belanja Gedung dan Bangunan	99.661.000,00	28.840.350,00	0,00	128.501.350,00	28.840.350,00
5	Utang Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	557.218.259,00	0,00	0,00	557.218.259,00	0,00
Jumlah		**11.415.954.270,00**	**9.567.131.347,00**	**12.406.599.844,00**	**8.576.485.773,00**	**(2.839.468.497,00)**

1) Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai berupa utang belanja gaji dan tunjangan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 92 Rincian Utang Belanja Pegawai

Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.306.099.557,00	3.187.727.080,00	3.306.099.557,00	3.187.727.080,00	(118.372.477,00)
Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	15.964.200,00	33.146.400,00	15.964.200,00	33.146.400,00	17.182.200,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.359.670.684,00	4.197.444.667,00	9.056.230.887,00	2.500.884.464,00	(4.858.786.220,00)
Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	1.994.452.850,00	0,00	1.994.452.850,00	1.994.452.850,00
Jumlah	**10.681.734.441,00**	**9.412.770.997,00**	**12.378.294.644,00**	**7.716.210.794,00**	**(2.965.523.647,00)**

Penjelasan rincian utang belanja pegawai adalah sebagai berikut.

a. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp3.187.727.080,00. Selengkapnya lihat ***Lampiran 22.***

b. Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)-PNSD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap dua orang guru sebesar Rp33.146.400,00

c. Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp2.500.884.464,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 93 Rincian Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
RSUD Trikora Salakan	6.652.288.195,00	3.655.872.953,00	8.805.643.820,00	1.502.517.328,00	(5.149.770.867,00)
Dinas Kesehatan	707.382.489,00	541.571.714,00	250.587.067,00	998.367.136,00	290.984.647,00
Jumlah	**7.359.670.684,00**	**4.197.444.667,00**	**9.056.230.887,00**	**2.500.884.464,00**	**(4.858.786.220,00)**

Rincian Utang dapat dilihat pada **Lampiran 23.**

d. Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp1.994.452.850,00 merupakan utang pada BLUD RSUD Trikora. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 24.**

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp141.912.000,00 berasal dari utang belanja jasa pelayanan pasien umum, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 94 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	40.137.200,00	0,00	28.305.200,00	11.832.000,00	(28.305.200,00)
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	125.520.000,00	0,00	125.520.000,00	125.520.000,00
Jumlah	**40.137.200,00**	**125.520.000,00**	**28.305.200,00**	**137.352.000,00**	**97.214.800,00**

Penjelasan rincian utang belanja pegawai sebagai berikut:

a. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp11.832.000,00 merupakan utang pada Dinas Kesehatan (Puskesmas Sabang) tahun 2021.

b. Utang Belanja Barang dan jasa BLUD sebesar Rp125.520.000,00 merupakan utang BLUD RSUD Trikora kepada PMI. Rincian dapat dilihat pada ***Lampiran 25.***

3) Utang Belanja Modal Tanah

Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp37.203.370,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 95 Rincian Utang Belanja Modal Tanah

Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.300.450,00	0,00	0,00	13.300.450,00	0,00
Dinas Kesehatan	7.679.700,00	0,00	0,00	7.679.700,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.223.220,00	0,00	0,00	16.223.220,00	0,00
Jumlah	**37.203.370,00**	**0,00**	**0,00**	**37.203.370,00**	**0,00**

4) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp99.661.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 96 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian		Saldo Awal 1 Jan 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
I.	**Utang Belanja Modal Bangunan Gedung**					
1	Bagian Umum	6.491.250,00	0,00	0,00	6.491.250,00	0,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.845.000,00	0,00	0,00	3.845.000,00	0,00
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.275.000,00	0,00	0,00	3.275.000,00	0,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.895.000,00	17.525.350,00	0,00	30.420.350,00	17.525.350,00
5	Dinas Kesehatan	11.638.350,00	11.315.000,00	0,00	22.953..350,00	11.315.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	3.388.250,00	0,00	0,00	3.388.250,00	0,00
7	Dinas P3AP2 dan Keluarga Berencana	6.855.000,00	0,00	0,00	6.855.000,00	0,00
8	Dinas Perikanan	4.452.500,00	0,00	0,00	4.452.500,00	0,00

	Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		
9	Dinas Pertanian	3.744.450,00	0,00	0,00	3.744.450,00	0,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	11.152.500,00	0,00	0,00	11.152.500,00	0,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.950.100,00	0,00	0,00	7.950.100,00	0,00
12	Sekretariat DPRD	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	Jumlah (I)	**79.438.100,00**	**28.840.350,00**	**0,00**	**108.278.450,00**	**28.840.350,00**
II.	**Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**					
1	Sekretariat DPRD	20.222.900,00	0,00	0,00	20.222.900,00	0,00
	Jumlah (II)	**20.222.900,00**	**0,00**	**0,00**	**20.222.900,00**	**0,00**
	Total (I + II)	**99.661.000,00**	**28.840.350,00**	**0,00**	**128.501.350,00**	**28.840.350,00**

5) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Utang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp557.218.259,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 97 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

	Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
			Penambahan	Pengurangan		
I.	**Utang Belanja Modal Jalan dan Jembatan**					
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	457.914.474,00	0,00	0,00	457.914.474,00	0,00
	Jumlah (I)	**457.914.474,00**	**0,00**	**0,00**	**457.914.474,00**	**0,00**
II.	**Utang Belanja Modal Bangunan Air**					
1	Dinas Perhubungan	2.997.300,00	0,00	0,00	2.997.300,00	0,00
2	Dinas Pertanian	5.242.600,00	0,00	0,00	5.242.600,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.631.000,00	0,00	0,00	68.631.000,00	0,00
4	Sekretariat DPRD	4.491.135,00	0,00	0,00	4.491.135,00	0,00
	Jumlah (II)	**81.362.035,00**	**0,00**	**0,00**	**81.362.035,00**	**0,00**
III.	**Utang Belanja Modal Instalasi**					
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.467.850,00	0,00	0,00	7.467.850,00	0,00
	Jumlah (III)	**7.467.850,00**	**0,00**	**0,00**	**7.467.850,00**	**0,00**
IV.	**Utang Belanja Modal Jaringan**					
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.990.400,00	0,00	0,00	7.990.400,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.483.500,00	0,00	0,00	2.483.500,00	0,00
	Jumlah (IV)	**10.473.900,00**	**0,00**	**0,00**	**10.473.900,00**	**0,00**
	Total (I + II + III + IV)	**557.218.259,00**	**0,00**	**0,00**	**557.218.259,00**	**0,00**

5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.000.000,00 dan jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.502.595.170,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.474.595.170,00 atau 98,14%.

utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp28.000.000,00 merupakan utang kelebihan pembayaran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi. Utang ini merupakan program gerak cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan (GERCEP GASKAN BERDAYA) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dana yang disalurkan oleh pemerintah Provinsi sebesar Rp1.230.000.000,00 namun yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp1.202.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp28.000.000,00 masih di Rekening Kas Umum Daerah dan akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi.

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan pos selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.702.408.967.502,62 mengalami kenaikan sebesar Rp18.693.733.460,39 atau 0,51% dari Tahun 2022 sebesar Rp3.683.715.234.042,23.

5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 98 Rincian Pendapatan Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah – LO	39.424.299.523,18	30.289.415.511,83
Pendapatan Transfer – LO	740.681.729.069,00	656.147.912.553,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	9.108.068.792,90	58.052.944.849,21
Jumlah	**789.214.097.385,08**	**744.490.272.914,04**

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 99 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Daerah – LO	6.952.178.174,12	6.250.691.371,75
Retribusi Daerah – LO	9.893.970.328,78	15.855.772.625,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	4.231.364.872,00	2.934.152.411,84
Lain - Lain PAD yang Sah – LO	18.346.786.148,28	5.248.799.103,24
Jumlah	**39.424.299.523,18**	**30.289.415.511,83**

5.4.1.1.1. Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 100 Rincian Pajak Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Hotel – LO	168.795.200,00	106.774.600,00
Pajak Restoran – LO	1.157.048.502,00	1.219.632.175,00
Pajak Hiburan – LO	1.375.000,00	2.026.250,00
Pajak Reklame – LO	40.077.918,00	50.741.695,75
Pajak Penerangan Jalan – LO	3.062.059.727,00	2.623.592.836,00
Pajak Air Tanah – LO	1.188.000,00	1.056.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.040.199.976,75	904.324.581,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	1.417.494.940,37	1.277.010.893,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	63.938.910,00	65.532.341,00
Jumlah	**6.952.178.174,12**	**6.250.691.371,75**

Penjelasan:

Pengakuan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Pajak Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp324.637.03,27 (Rp6.952.178.174,12 – Rp6.627.541.142,85). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 101 Penjelasan Selisih Lebih Pajak Daerah - LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**324.637.031,27**
Penjelasan Selisih:		
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Piutang Pajak Hotel Tahun 2023	41.046.500,00	
✓ Piutang Pajak Restoran Tahun 2023	3.486.000,00	
✓ Piutang Pajak Hiburan Tahun 2023	0,00	
✓ Piutang Pajak Reklame Tahun 2023	3.654.685,00	
✓ Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber lain Tahun 2023	268.497.163,00	
✓ Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023	104.000,00	
✓ Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023	1.738.888,00	
✓ Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023	14.515.332,00	
✓ Penyisihan Piutang PBBP2 Tahun 2022	1.104.505,37	
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pelunasan Pajak Hotel Tahun 2022	703.000,10	
✓ Pelunasan Pajak Restoran Tahun 2022	860.000,00	
✓ Pelunasan Pajak Hiburan Tahun 2022	500.000,00	
✓ Pelunasan Pajak Reklame Tahun 2022	161.250,00	
✓ Pelunasan Pajak Air Tanah Tahun 2022	0,00	
✓ Pelunasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022	0,00	
✓ Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022	7.285.792,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**324.637.031,27**

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 102 Rincian Retribusi Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Jasa Umum – LO		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	8.251.493.950,78	14.655.326.930,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	330.069.000,00	318.539.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	138.315.000,00	157.802.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar – LO	272.770.000,00	277.770.000,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	0,00	18.386.400,00
Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	604.144.278,00	187.958.595,00
• Retribusi Tempat Pelelangan – LO	51.811.000,00	0,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	21.957.000,00	4.550.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	137.514.600,00	152.338.700,00
• Retribusi Penyeberangan di Air – LO	9.579.500,00	7.714.000,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Retribusi Perizinan Tertentu		
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	59.316.000,00	56.387.000,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	12.000.000,00	0,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO	5.000.000,00	19.000.000,00
Jumlah	**9.893.970.328,78**	**15.855.772.625,00**

Penjelasan:

Pengakuan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp4.009.930.648,22 (Rp9.893.970.328,78 - Rp13.903.900.977,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 103 Penjelasan Selisih Lebih Retribusi Daerah - LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(4.009.930.648,22)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2023	0,00	
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Tahun 2023	0,00	
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2023	0,00	
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Pasar – Los Tahun 2023	13.100.000,00	
✓ Piutang Retribusi Pelayanan Pasar – Kios Tahun 2023	11.540.000,00	
✓ Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2023	153.900.000,00	
✓ Piutang Retribusi Pemakaian Alat Tahun 2023	13.233.007,00	
✓ Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di RSUD Tahun 2022	257.726.328,00	
✓ Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2022	18.646.336,78	
✓ Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022	2.000.000,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2022	121.172.920,00	
✓ Pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Tahun 2022	4.343.533.400,00	
✓ Pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022	2.000.000,00	
✓ Pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Pasar – Los Tahun 2022	6.410.000,00	
✓ Pelunasan piutang Retribusi Pelayanan Pasar – Kios Tahun 2022	6.960.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(4.009.930.648,22)**

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 104 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	4.206.364.872,00	2.916.652.411,84
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) – LO	25.000.000,00	17.500.000,00
Jumlah	**4.231.364.872,00**	**2.934.152.411,84**

Penjelasan:

Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 ini ***sama*** dengan saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp4.231.364.872,00.

5.4.1.1.4. Lain - Lain PAD yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain PAD yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain PAD yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 105 Rincian Lain-lain PAD yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	337.200.800,00	5.251.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	24.986.000,00	6.270.000,00
Jasa Giro – LO	1.387.092.754,76	2.613.325.263,00
Pendapatan Bunga – LO	104.957.353,82	1.042.080,18
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	1.366.927.685,39	478.882.412,92
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	820.598.213,68	1.874.806.438,50
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	17.406.452,30	5.654.456,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	1.769.563.258,33	246.015.801,00
Pendapatan BLUD – LO	12.518.053.630,00	0,00
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf – LO	0,00	17.551.651,64
Jumlah	**18.346.786.148,28**	**5.248.799.103,24**

Penjelasan:

Pengakuan Lain-Lain PAD yang Sah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Lain-Lain PAD yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.779.154.499,82 (Rp18.346.786.148,28 – Rp16.567.631.648,46). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain PAD yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 106 Penjelasan Selisih Lebih Lain-lain PAD yang Sah - LO dan LRA

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**1.779.154.499,82**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun 2023	9.900.000,00
✓ Piutang BLUD Tahun 2023	1.808.174.500,00
✓ Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2023	2.994.781,00
✓ Pendapatan Piutang Jasa Giro CSR Tahun 2023	725.042,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pelunasan Piutang Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah tahun sebelumnya	1.042.080,18
✓ Pelunasan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun sebelumnya	80.684.490,00
✓ Pengembalian Temuan pada SDN Kambal	31.613.253,00
✓ Pengembalian Temuan pada SDN Popidolon	1.300.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**1.779.154.499,82**

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 107 Rincian Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	709.995.928.738,00	627.138.099.030,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	30.685.800.330,00	29.009.813.523,00
Jumlah	**740.681.729.069,00**	**656.147.912.553,00**

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 108 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Dana Perimbangan – LO		
➢ Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak – LO		
✓ DBH PBB-LO	3.302.539.000,00	6.642.911.003,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ DBH PPh Pasal 21-LO	5.542.107.000,00	4.083.678.132,00
✓ DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	144.608.000,00	161.088.712,00
✓ DBH CHT-LO	17.136.500,00	14.573.782,00
➢ Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO		
✓ DBH SDA Minyak Bumi-LO	4.291.306.000,00	4.973.391.445,00
✓ DBH SDA Gas Bumi-LO	38.606.397.000,00	26.688.847.869,00
✓ DBH SDA Mineral dan Batubara Royalti-LO	57.209.738.000,00	36.886.917.384,00
✓ DBH Kehutanan-PSDH-LO	113.701.000,00	158.395.070,00
✓ DBH SDA Perikanan-LO	3.889.201.000,00	2.170.064.211,00
➢ Dana Alokasi Umum (DAU) – LO		
✓ DAU–LO	459.375.692.731,00	440.978.979.000,00
➢ Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO		
DAK Fisik		
✓ DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	2.015.618.169,00	305.916.500,00
✓ DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	8.573.940.918,00	3.599.689.550,00
✓ DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	9.019.937.545,00	4.985.277.430,00
✓ DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	0,00	646.444.900,00
✓ DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	0,00	261.329.200,00
✓ Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	1.143.070.650,00
✓ DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	2.259.905.954,00
✓ DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	199.900.000,00	617.135.375,00
✓ DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	0,00	949.799.300,00
✓ DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	1.703.529.000,00
✓ DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	0,00	2.062.723.000,00
✓ DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	2.225.538.941,00	0,00
✓ DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	6.161.144.550,00
✓ DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	28.395.681.000,00	0,00
✓ DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	5.733.220.500,00
✓ DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	4.900.000.000,00
✓ DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	0,00	3.332.832.792,00
✓ DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	4.640.875.729,00	0,00
DAK Non Fisik		
✓ DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	19.803.561.613,00	0,00
✓ DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	30.479.136.637,00	29.582.667.889,00
✓ DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.705.879.919,00	1.366.250.000,00
✓ DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.087.632.000,00	1.245.075.600,00
✓ DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.830.791.000,00	624.600.000,00
✓ DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	2.007.863.760,00	13.500.000,00
✓ DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	13.980.384.277,00	23.913.807.382,00
✓ DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	3.373.802.000,00	2.110.858.600,00
✓ DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	1.650.710.000,00
✓ DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	477.100.000,00	250.428.250,00
✓ DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	0,00
✓ DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	512.990.000,00	375.200.000,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO		
✓ Dana Insentif Daerah (DID) – LO	5.734.069.000,00	4.584.136.000,00
Jumlah	**709.995.928.739,00**	**627.138.099.030,00**

Penjelasan:

1. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih Kecil*** dari saldo Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp42.455.332.032,00 (Rp709.995.928.739,00 – Rp752.451.260.771,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Lain-Lain PAD yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 109 Penjelasan Selisih Lebih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	**(42.455.332.032,00)**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LO:	
✓ Dana *Treasury Deposit Facility* Transfer ke daerah yang tahun 2023	73.257263.000,00
➢ Pengurangan Pendapatan LO:	
✓ Dana *Treasury Deposit Facility* Transfer ke daerah yang tahun sebelumnya	4.296.699.032,00
✓ Pendapatan Transfer Dana Desa Pemerintah Pusat	111.415.896.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**(42.455.332.032,00)**

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pos Transfer Pendapatan Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 110 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO		
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	4.413.185.033,00	4.412.077.731,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	4.847.523.069,00	4.784.543.345,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	11.351.928.727,00	11.186.914.759,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	497.850.668,00	82.589.520,00
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	8.373.312.833,00	8.543.688.168,00
Bantuan Keuangan – LO		
✓ Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.202.000.000,00	0,00
Jumlah	**30.685.800.330,00**	**29.009.813.523,00**

Penjelasan:

1. Pengakuan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp89.076.365,00 (Rp30.685.800.330,00 – Rp30.774.876.695,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 111 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(89.076.365,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Piutang Tahun 2023 yang menambah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	1.001.422.626,00	
✓ Piutang Tahun 2023 yang menambah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	849.838.683,00	
✓ Piutang Tahun 2023 yang menambah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	2.130.989.211,00	
✓ Piutang Tahun 2022 yang menambah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	82.938.026,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Penyetoran Piutang Tahun Sebelumnya yang tidak diakui sebagai Pendapatan Bagi Hasil Kendaraan-LO	1.182.964.082,00	
✓ Penyetoran piutang tahun sebelumnya yang tidak diakui sebagai Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	831.155.271,00	
✓ Penyetoran piutang tahun sebelumnya yang tidak diakui sebagai Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	2.089.959.115,00	
✓ Penyetoran Piutang tahun Sebelumnya yang tidak diakui sebagai Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	22.186.443,00	
✓ Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi (BANSOS GERCEP-GERMAS)	28.000.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(89.076.365,00)**

5.4.1.3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 112 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah-LO	5.811.457.168,90	35.798.616.136,21
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	3.296.611.624,00	22.254.328.713,00
Jumlah	**9.108.068.792,90**	**58.052.944.849,21**

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 113 Rincian Pendapatan Hibah - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	906.517.661,00	26.786.209.815,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.979.312.830,90	8.825.106.321,21
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	925.626.677,00	187.300.000,00
Jumlah	**5.811.457.168,90**	**35.798.616.136,21**

Penjelasan Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 ini tidak ada perbandingan dengan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 114 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain-Lain Pendapatan		
✓ Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	17.285.214.392,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
✓ Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	3.296.611.624,00	4.969.114.321,00
Jumlah	**3.296.611.624,00**	**22.254.328.713,00**

Penjelasan:

1. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam LO Tahun 2023 ini ***sama*** dengan saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam LRA Tahun 2023.

5.4.2. Beban Daerah

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Konsumsi atas barang dan jasa adalah yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasi pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Selain itu, transaksi beban tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi pengeluaran yang tidak melalui mekanisme APBD.

5.4.2.1. Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 115 Rincian Beban Operasi - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Pegawai	329.822.082.553,00	316.216.008.804,00
Beban Barang dan Jasa	197.633.844.593,77	202.427.659.431,10
Beban Hibah	20.038.483.341,00	11.184.720.346,00
Beban Bantuan Sosial	3.870.273.000,00	9.477.599.804,00
Beban Penyisihan Piutang	378.202.024,74	286.918.558,77
Beban Penyusutan dan Amortisasi	123.899.966.053,25	120.613.611.724,02
Jumlah	**675.642.851.565,76**	**660.206.518.667,89**

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dirinci sebagai berikut.

5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 116 Rincian Beban Pegawai - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	224.551.214.187,00	207.068.681.442,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	40.292.051.824,00	44.923.366.834,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.526.374.569,00	49.867.078.751,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.068.011.173,00	8.430.417.162,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	45.360.000,00	90.210.315,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	397.300.000,00
Beban Pegawai BOS	4.951.020.500,00	5.438.954.300,00
Beban Pegawai BLUD	3.977.170.300,00	0,00
Jumlah	**329.822.082.553,00**	**316.216.008.804,00**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp2.764.764.201,00 (Rp329.822.082.553,00 – Rp332.586.846.754,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 117 Penjelasan Selisih Beban Pegawai - LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**(2.764.764.201,00)**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.187.727.080,00	
✓ Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	33.146.400,00	
✓ Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada Dinas Kesehatan	541.511.714,00	
✓ Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada RSUD Trikora Salakan	1.502.163.178,00	
✓ Utang Belanja Pegawai BLUD pada RSUD Trikora Salakan	3.502.991.628,00	
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.306.099.557,00	
✓ Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	15.964.200,00	
✓ Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada Dinas Kesehatan	250.587.067,00	
✓ Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada RSUD Trikora Salakan	6.451.114.599,00	
✓ Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada Dinas Kesehatan	1.508.538.778,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**(2.764.764.201,00)**

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 118 Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Barang	45.582.839.355,56	46.295.015.252,67
Beban Jasa	79.635.512.140,00	83.554.401.533,00
Beban Pemeliharaan	5.375.134.769,00	5.771.575.096,00
Beban Perjalanan Dinas	47.066.601.592,00	55.731.442.880,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	451.819.500,00	661.471.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS	12.659.283.819,21	10.413.753.669,43
Beban Barang dan Jasa BLUD	6.862.653.418,00	0
Jumlah	**197.633.844.593,77**	**202.427.659.431,10**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar 5.797.035.418,56 (Rp197.633.844.593,77 – Rp191.836.809.175,21). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 119 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa – LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**5.797.035.418,56**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
Beban Barang		
✓ Bahan bakar dan pelumas	5.824.000,00	
✓ Isi tabung gas	49.297.500,00	
✓ Bahan/Bibit Tanaman	9.999.000,00	
✓ Bahan lainnya	4.535.384.324,39	
✓ Suku cadang alat angkutan	33.789.299,00	
✓ Alat tulis kantor	26.217.900,00	
✓ Bahan Cetak	598.274.850,00	
✓ Benda Pos	144.000,00	
✓ Cendera Mata	6.020.532,00	
✓ Alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya dan Pengakuan Ekstracom	3.134.991.227	
✓ Obat	14.027.116.795,67	
✓ Reklas Aset Tetap (Alat Rumah Tangga Lainnya) ke Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	119.528.000,00	
✓ Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga	478.741.250,00	
✓ Natura	376.569.946,00	
Beban Jasa		
✓ Reklas Bangunan Gedung Pabrik ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur	58.000.000,00	
✓ Reklas Jalan Khusus ke Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	145.600.000,00	
✓ Reklas Rumah Negara Golongan I ke Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	11.900.000,00	
✓ Reklas Instalasi Air Bersih ke Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	13.900.000,00	
✓ Reklas Instalasi Lain ke Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	10.000.000,00	
✓ Reklas Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam ke Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur	20.980.000,00	

Uraian	Nilai
✓ Reklas Aset Tetap ke beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	1.350.500,00
Beban Perjalanan Dinas	
✓ Reklas Beban Perjalanan Dinas ke Bangunan Pembuang Air Kotor	1.900.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
✓ Pengakuan utang RSUD Trikora (BLUD) ke PMI	130.080.000,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
Beban Barang Pakai Habis	
✓ Bahan bakar dan pelumas	3.228.200,00
✓ Isi tabung gas	59.033.400,00
✓ Bahan lainnya	4.617.746.919,61
✓ Suku cadang alat angkutan	39.612.588,00
✓ Alat tulis kantor	229.784.350,00
✓ Bahan Cetak	354.847.715,00
✓ Alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3.617.500,00
✓ Obat	11.948.256.709,89
✓ Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga	278.537.850,00
✓ Natura	352.543.273,00
Beban Jasa	
✓ Jasa Tenaga Kesehatan	28.305.200,00
✓ Reklas Beban Jasa Tenaga Ahli Ke BMD (Buku Umum)	67.000.000,00
✓ Reklas Beban Jasa Paket/Pengiriman ke BMD (Buku Umum)	4.000.000,00
✓ Reklas Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur ke BMD (Rumah Negara Golongan I)	1.000.000,00
✓ Reklas Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung ke Rumah Negara Golongan I	1.500.000,00
Beban Perjalanan Dinas	
✓ Reklas Jalan Desa dan Jalan Kabupaten ke Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
✓ Pembayaran utang RSUD Trikora (BLUD) ke PMI	4.560.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**5.797.035.418,56**

5.4.2.1.3. Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 120 Rincian Beban Hibah – LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.568.874.648,00	10.714.334.386,00
Beban Hibah Dana BOS	4.999.222.760,00	0,00
00Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	470.385.933,00	470.385.960,00

Jumlah	**20.038.483.341,00**	**11.184.720.346,00**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.246.363.177,00 (Rp20.038.483.341,00 – Rp18.792.120.164,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 121 Penjelasan Selisih Lebih Beban Hibah - LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**1.246.363.177,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Pengakuan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.246.363.177,00	
➢ Pengurangan Beban LO:	0,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**1.246.363.177,00**

5.4.2.1.4. Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 122 Rincian Beban Bantuan Sosial - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	920.420.000,00	2.193.498.804,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.356.578.000,00	5.690.000.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	544.575.000,00	1.594.101.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	48.700.000,00	0,00
Jumlah	**3.870.273.000,00**	**9.477.599.804,00**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2023 Rp10.000.000,00 (Rp3.870.273.000,00 – Rp3.860.273.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Bantuan Sosial dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Selisih Lebih Beban Bantuan Sosial - LO dan LRA

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**10.000.000,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ Pengakuan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000,00	
➢ Pengurangan Beban LO:	0,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**10.000.000,00**

5.4.2.1.5. Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 123 Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	7.351.737,44	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	72.643.714,80	286.918.558,77
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	298.206.572,50	0,00
Jumlah	**378.202.024,74**	**286.918.558,77**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Penyisihan dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih kecil*** dari/perubahan saldo Penyisihan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp280.435.084,15 [Rp378.202.024,74 - (Rp1.098.456.570,18 – Rp1.196.223.510,77)] Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 124 Penjelasan Selisih Beban Penyisihan Piutang - LO dan Neraca

Uraian	Nilai	
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca		280.435.084,15
Penjelasan Selisih:		
➢ Pengurangan Penyisihan Piutang:		
✓ Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Tahun 2022	257.726.328,00	
✓ Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2022	18.646.336,78	
✓ Pelunasan Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022	2.000.000,00	
✓ Koreksi Penyisihan Piutang PBB	2.062.419,37	
Jumlah Penjelasan Selisih		**280.435.084,15**

5.4.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 125 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	34.163.027.000,00	36.773.876.023,68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.547.630.716,06	13.520.506.958,68
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	76.188.058.337,19	70.319.228.741,66
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.250.000,00	
Jumlah	**123.899.966.053,25**	**120.613.611.724,02**

Penjelasan:

pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 ini lebih kecil dari perubahan saldo Penyusutan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.303.381.388,89 [Rp123.899.966.053,25 - (Rp1.221.259.873.306,02 – Rp1.084056.525.863,88)] Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 126 Rincian Beban Penyusutan – LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	(13.303.381.388,89)
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Penyusutan :	
Koreksi Saldo awal Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	16.021.788.716,05
➢ Pengurangan Penyusutan :	
✓ Koreksi Saldo awal Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.664.480.266,00
✓ Koreksi Saldo awal Penyusutan Gedung dan Bangunan	53.927.061,16
Jumlah Penjelasan Selisih	**(13.303.381.388,89)**

5.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 127 Rincian Beban Transfer - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bagi Hasil	2.487.581.214,00	2.258.875.971,00
Beban Bantuan Keuangan	49.700.893.300,00	47.753.658.400,00
Jumlah	**52.188.474.514,00**	**50.012.534.371,00**

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 128 Rincian Beban Bagi Hasil - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	628.573.289,00	592.810.829,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.859.007.925,00	1.666.065.142,00
Jumlah	**2.487.581.214,00**	**2.258.875.971,00**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam LO Tahun 2023 ini ***sama*** dengan saldo Belanja Bagi Hasil dalam LRA TA 2023 sebesar Rp2.487.581.214,00.

5.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 129 Rincian Beban Bantuan Keuangan - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	49.700.893.300,00	47.753.658.400,00
Jumlah	**49.700.893.300,00**	**47.753.658.400,00**

Penjelasan:

1. Pengakuan Beban Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2023 ini ***sama*** dari Belanja Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp0,00 (Rp49.700.893.300 - Rp49.700.893.300). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 130 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		0,00
Penjelasan Selisih:		
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual	0,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**0,00**

2. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 131 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	61.382.771.305,32	34.271.219.875,15
Jumlah	**61.382.771.305,32**	**34.271.219.875,15**

5.4.4. Surplus Non Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Surplus Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 132 Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus Non Operasional	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.4.5. Defisit Non-Operasional-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 133 Defisit Non-Operasional-LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	821.273.539,00	931.387.542,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	28.037.249.036,34	0,00
Jumlah	**28.858.522.575,34**	**931.387.542,00**

Penjelasan:

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Merupakan Kerugian Badan Usaha Milik Daerah (PDAM) sebesar Rp821.273.539,00 sesuai Laporan keuangan PDAM Tahun 2023Unaudited
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp28.037.249.036,34 diuraikan sebagai berikut:
   a. Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Bagian Umum Tahun 2023 sebesar Rp1.609.200.000,00.
   b. Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Bagian Umum Tahun 2023 sebesar Rp3.919.226.848,34.
   c. Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar Rp21.195.743.731,00.
   d. Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Dinas Perhubungan Tahun 2023 sebesar Rp51.172.277,00
   e. Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Dinas Perikanan Tahun 2023 sebesar Rp132.140.180,00.
   f. Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Kecamatan Buko Tahun 2023 sebesar Rp396.816.000,00.
   g. Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Sekretariat DPRD Tahun 2023 sebesar Rp732.950.000,00.

5.4.6. Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Luas Biasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang

merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 134 Rincian Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		
✓ Beban Tidak Terduga	(1.105.880.000,00)	(721.724.500,00)
✓ Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	**(1.105.880.000,00)**	**(721.724.500,00)**

Penjelasan:

Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2023 ini ***sama*** dengan saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.105.880.000,00.

5.4.7. Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Tabel 5. 135 Perhitungan Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kegiatan Operasional		
➢ **Pendapatan Daerah – LO**		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	39.424.299.523,18	30.289.415.511,83
✓ Pendapatan Transfer – LO	740.681.729.069,00	656.147.912.553,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	9.108.068.792,90	58.052.944.849,21
➢ **Beban Operasional**		
✓ Beban Operasional	727.831.326.079,76	710.219.053.038,89
Kegiatan Non-Operasional		
➢ **Surplus Non-Operasional**		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
➢ **Defisit Non-Operasional**		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	28.858.522.575,34	931.387.542,00
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	1.105.880.000,00	721.724.500,00
Jumlah	**31.418.368.729,98**	**32.618.107.833,15**

Jumlah saldo Surplus/(Defisit)-LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 5.6.2***.

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 136 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	827.515.986.930,31	811.065.882.450,26
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	711.786.299.607,21	691.327.988.656,43
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**115.729.687.323,10**	**119.737.893.793,83**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 137 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Penerimaan Pajak Daerah**		
✓ Pajak Hotel	128.451.700,10	106.573.600,00
✓ Pajak Restoran	1.154.422.502,00	1.220.332.675,00
✓ Pajak Hiburan	1.875.000,00	1.151.250,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Pajak Reklame	36.584.483,00	49.571.242,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	2.793.562.564,00	2.623.592.836,00
✓ Pajak Air Tanah	1.084.000,00	1.086.000,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.038.461.088,75	914.461.319,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.409.160.895,00	1.299.490.962,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	63.938.910,00	65.532.341,00
➢ **Penerimaan Retribusi Daerah**		
✓ **Retribusi Jasa Umum**		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.439.827.606,00	17.406.689.511,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	330.069.000,00	318.539.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	138.315.000,00	158.302.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	261.500.000,00	255.650.000,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	18.386.400,00
✓ **Retribusi Jasa Usaha**		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	437.011.271,00	187.958.595,00
• Retribusi Tempat Pelelangan	51.811.000,00	0,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	21.957.000,00	4.550.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	137.514.600,00	156.856.300,00
• Retribusi Penyeberangan di Air	9.579.500,00	7.714.000,00
✓ **Retribusi Perizinan Tertentu**		
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	59.316.000,00	56.387.000,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	12.000.000,00	0,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.000.000,00	19.000.000,00
➢ **Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.206.364.872,00	2.916.652.411,84
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	25.000.000,00	17.500.000,00
➢ **Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah**		
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	24.986.000,00	6.270.000,00
✓ Jasa Giro	1.383.372.931,76	2.613.325.263,00
✓ Pendapatan Bunga	105.999.434,00	0,00
✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.366.927.685,39	478.882.412,92
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	820.598.213,68	1.874.806.438,50
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	17.406.452,30	5.654.456,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	1.873.261.001,33	352.270.263,00
✓ Pendapatan BLUD	10.637.879.130,00	0,00
✓ Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	3.983.007,00
➢ **Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat**		
✓ Dana Perimbangan	635.301.295.771,00	618.257.263.998,00
✓ Dana Insentif Daerah (DID)	5.734.069.000,00	4.584.136.000,00
✓ Dana Desa	111.415.896.000,00	104.492.851.000,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah**		
✓ **Pendapatan Bagi Hasil**		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.594.726.489,00	3.622.285.803,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.828.839.657,00	4.811.747.046,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.310.898.631,00	11.295.055.742,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	437.099.085,00	63.356.697,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.373.312.833,00	8.543.688.168,00
✓ **Bantuan Keuangan**		
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.230.000.000,00	0,00
➢ **Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**		
✓ **Lain-Lain Pendapatan**		
• Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	17.285.214.392,00
✓ **Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**		
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.296.611.624,00	4.969.114.321,00
Jumlah	**827.515.986.930,31**	**811.065.882.450,26**

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 138 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Pembayaran Belanja Pegawai**		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	224.551.214.187,00	207.068.681.442,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	40.410.424.301,00	47.737.560.008,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	51.167.219.143,00	55.734.425.972,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.068.011.173,00	8.430.417.162,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	45.360.000,00	90.210.315,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	397.300.000,00
✓ Belanja Pegawai BOS	4.951.020.500,00	5.438.954.300,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	1.982.717.450,00	0,00
➢ **Pembayaran Belanja Barang dan Jasa**		
✓ Belanja Barang	40.068.149.237,00	38.042.110.557,00
✓ Belanja Jasa	79.476.937.340,00	83.590.094.133,00
✓ Belanja Pemeliharaan	5.373.784.269,00	2.396.836.133,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	47.069.701.592,00	55.731.442.880,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	451.819.500,00	661.471.000,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	12.659.283.819,21	10.460.150.669,43
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	6.737.133.418,00	0,00
➢ **Pembayaran Belanja Hibah**		
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.321.734.231,00	10.373.238.450,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	470.385.933,00	470.385.960,00
➢ **Pembayaran Belanja Bantuan Sosial**		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	910.420.000,00	2.193.498.804,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.356.578.000,00	5.690.000.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	544.575.000,00	1.594.101.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	48.700.000,00	0,00
➢ **Pembayaran Belanja Tak Terduga**		
✓ Belanja Tak Terduga	1.105.880.000,00	721.724.500,00
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil**		
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	628.573.289,00	592.810.829,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.859.007.925,00	1.666.065.142,00
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan**		
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	161.116.789.300,00	152.246.509.400,00
Jumlah	**711.786.299.607,21**	**691.327.988.656,43**

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	337.200.800,00	5.251.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	140.606.465.854,00	130.508.619.652,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(140.269.265.054,00)**	**(130.503.368.652,00)**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5. 140 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**		
✓ Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	294.703.600,00	0,00
✓ Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	6.812.000,00	5.251.000,00
✓ Hasil Penjualan Aset Lainnya	35.685.200,00	0,00
Jumlah	**337.200.800,00**	**5.251.000,00**

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Perolehan Tanah**		
✓ Belanja Modal Tanah Persil	583.761.000,00	4.296.599.000,00
✓ Belanja Modal Lapangan	2.835.088.908,00	129.961.000,00
➢ **Perolehan Peralatan dan Mesin**		
✓ Belanja Modal Alat Besar	357.538.000,00	235.727.440,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	379.650.000,00	1.303.199.550,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.005.000,00	171.132.350,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	26.203.000,00	287.630.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.119.883.409,00	6.086.597.266,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	793.754.095,00	3.643.223.403,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.103.769.500,00	1.918.335.937,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	16.659.300,00	337.197.500,00
✓ Belanja Modal Komputer	6.791.739.815,00	8.107.086.132,00
✓ Belanja Modal Alat Eksplorasi	13.000.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.146.000,00	199.985.000,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	149.980.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	240.650.000,00	13.328.900,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	118.882.162,00	0,00
➢ **Perolehan Gedung dan Bangunan**		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	53.319.770.065,00	39.563.492.416,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.860.406.800,00	1.084.183.000,00
➢ **Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan**		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	45.440.961.600,00	33.845.355.258,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	12.432.028.600,00	11.938.789.500,00
✓ Belanja Modal Instalasi	2.243.421.000,00	13.555.090.300,00
✓ Belanja Modal Jaringan	277.192.000,00	287.490.900,00
➢ **Perolehan Aset Tetap Lainnya**		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	101.141.000,00	144.214.800,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	26.834.600,00	0,00
➢ **Penyertaan Modal Daerah**		
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00
Jumlah	**140.606.465.854,00**	**130.508.619.652,00**

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk TA 2023. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. 142 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	42.007.486.748,00	40.533.632.939,34
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	42.350.654.076,00	40.236.296.211,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(343.167.328,00)**	**297.336.728,34**

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5. 143 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**		
✓ Iuran Wajib Pegawai	14.231.885.158,00	13.712.853.775,00
✓ Pajak Penghasilan	11.525.052.497,00	11.937.065.880,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	16.250.549.093,00	14.876.880.087,00
➢ **Kiriman Uang Masuk**		
✓ Koreksi atas Saldo Awal Pajak	0,00	5.832.196,00
✓ Koreksi Saldo Awal atas Kurang Pengakuan Pendapatan Tahun 2021	0,00	1.000.000,00
✓ Koreksi Saldo Awal atas Kesalahan Catat	0,00	1.001,34
Jumlah	**42.007.486.748,00**	**40.533.632.939,34**

Untuk Tahun 2023, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5. 144 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
➢ **Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**		
✓ Iuran Wajib Pegawai	14.251.003.360,00	13.694.205.573,00
✓ Pajak Penghasilan	11.621.102.544,00	11.873.933.000,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	16.478.548.172,00	14.668.157.638,00
Jumlah	**42.350.654.076,00**	**40.236.296.211,00**

Untuk Tahun 2023, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas dan sekolah-sekolah pengelola dana BOSP.

5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan ke empat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 145 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	115.729.687.323,10	119.737.893.793,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(140.269.265.054,00)	(130.503.368.652,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(343.167.328,00)	297.336.728,34
Jumlah	**(24.882.745.058,90)**	**(10.468.138.129,83)**

5.5.5 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 202 yang terdiri dari:

Tabel 5. 146 Rincian Saldo Awal Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	79.457.432.002,98	90.167.387.230,72
Kas di Bendahara Penerimaan	56.750,00	9.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	367.316,00	3.250.535,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	667.618.111,51	486.286.131,60
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	469.208.361,00	405.887.774,00
Jumlah	**80.594.682.541,49**	**91.062.820.671,32**

5.5.6 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5. 147 Rincian Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Saldo Awal atas Kas Dana Kapitasi pada FKTP (Puskesmas Salakan)	(29.972.678,00)	0,00
Koreksi Saldo Awal atas Reklas Bendahara Pengeluaran ke TGR (Sekretariat DPRD)	(88.029.170,00)	0,00
Jumlah	**(118.001.848,00)**	**0,00**

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada ***Poin 5.2.4*** di bawah.

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5. 148 Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas di Kas Daerah	52.339.525.020,53	79.457.432.002,98
Kas di Bendahara Penerimaan	44.136.400,00	56.750,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	21.596.569,00	367.316,00
Kas di BLUD	1.820.146.100,00	0,00
Kas Dana BOS	368.192.188,06	667.618.111,51
Kas Dana Kapitasi di FKTP	1.000.339.357,00	469.208.361,00
Jumlah	**55.593.935.634,59**	**80.594.682.541,49**

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2023 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2023.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada ***Poin 5.1.5*** di atas.

5.6 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5. 149 Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	3.683.715.234.042,23	3.553.220.090.570,93

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5. 150 Surplus/(Defisit) – LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Surplus/(Defisit) – LO	31.418.368.729,98	32.618.107.833,15

Pada Tahun 2023 dan 2022, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada ***poin 5.4.6***.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5. 151 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	(8.399.025.340,00)	0,00
Koreksi Ekuitas atas Investasi	(3.647.685.779,00)	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	12.424.697.792,30	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	200.759.446,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Lainnya	(13.303.381.388,89)	97.877.035.638,15
Jumlah Dampak Kumulatif	**(12.724.635.269,59)**	**97.877.035.638,15**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **signifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi tambah sebesar Rp38.364.796.114,54 yang disebabkan sebagai berikut:
   - Koreksi Piutang Awal Tahun 2023 Rp. 932.489.170,00
   - Koreksi Saldo Awal Utang Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Rp. 633.825.346,00
   - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 Rp. 2.111.050.160,54
   - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 Rp. 3.825.489.444,00
   - Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan Tahun 2023 Rp. 1,00
   - Kapitalisasi dari Ekstracom ke Aset Tetap (Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dan Rumah Negara Golongan III) Rp. 64.225.000,00
   - Koreksi Tambah Gedung dan Bangunan Tempat Olah Raga pada Kecamatan Peling Tengah Rp. 204.147.159,00
   - Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian Perdagangan RI ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2023 Rp. 865.200.000,00

- Mutasi Aset Tetap antara OPD Tahun 2023 Rp. 29.728.369.834,00

2. Koreksi Kurang sebesar Rp51.089.431.384,13 terdiri dari:
   - Koreksi penyesuaian saldo Investasi Jangka Panjang Permanen pada PDAM berdasarkan LK *Unaudited* 2023 Rp. 3.647.685.779,00
   - Koreksi Saldo Awal Persediaan Obat Tahun 2022 pada RSUD Trikora Salakan Rp. 9.331.514.510,00
   - Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 Rp. 16.021.788.716,05
   - Koreksi Saldo Awal Utang Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Rp. 433.065.900,00
   - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 Rp. 2.057.123.099,38
   - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 Rp. 1.161.009.178,00
   - Penghapusan Persediaan Obat Tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Rp. 164.461.771,64
   - Penghapusan Aset Lainnya pada Kecamatan Bulagi Utara Tahun 2023 Rp. 491.810.000,00
   - Koreksi Obat *Expired Date* Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Rp. 8.181.131.096,06
   - Mutasi Aset Tetap antar OPD Tahun 2023 Rp. 9.599.841.334,00

5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Saldo Ekuitas Akhir	3.702.408.967.502,62	3.683.715.234.042,23

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***poin 5.6.3.***

B. Pengungkapan Informasi yang Tidak Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

Untuk memberikan gambaran yang lengkap agar memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan dan dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai, perlu kami ungkapkan hal-hal yang belum dijelaskan dalam penjelasan pos-pos laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar perhitungan untuk pengakuan investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan metode ekuitas (*Equity Method*) pada PDAM merupakan Laporan Keuangan *Unaudited* tahun 2023.
2. Nilai penyertaan modal pada PT. Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 disajikan sama dengan Laporan Keuangan PT. Trikora Salakan Tahun 2019 dikarenakan sampai diterbitkannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, PT. Trikora Salakan belum menyampaikan laporan keuangan Tahun 2023.
3. Rumah Sakit Trikora Salakan Surat Keputusan telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 299 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Trikora Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Rumah Sakit Pratama Bilabanggai telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 300 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Pratama Bilabanggai di Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Seluruh FKTP Puskesmas di Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 301 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Sampai dengan terbitnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD Puskesmas se-Kabupaten Banggai Kepulauan belum menyampaikan laporan keuangan BLUD.

7. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mendapatkan Jaminan Bank sebesar 5% atas kontrak belanja modal dari penyedia barang atau jasa yang telah dibayarkan 100% , penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada ***Lampiran 53.***

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Kabupaten Banggai Kepulauan

Secara historis Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan bagian dari Kerajaan Banggai yang berdiri jauh sebelum abad ke-XIII Masehi sampai kemudian dikenal menjadi salah satu wilayah Kerajaan Majapahit menurut buku Negara Kertagama oleh Empu Prapanca pada Tahun Saka 1478 atau 1365 Masehi. Kerajaan Banggai, awalnya hanya meliputi wilayah Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Oleh Adi Cokro yang bergelar Mbumbu Doi Jawa disatukan dengan wilayah Banggai Darat (Luwuk). Mbumbu Doi Jawa merupakan panglima perang dari Kerajaan Ternate yang menikah dengan seorang putri berkebangsaan Portugis kemudian melahirkan putra bernama Maulana Frins Mandapar. Beliau kemudian dikenal sebagai Raja Banggai pertama yang dilantik pada Tahun 1600 oleh Sultan Said Berkat Syam dari Kesultanan Ternate dan bergelar Mbumbu Doi Godong, yang kemudian memimpin sampai Tahun 1625.

Sisa peninggalan Kerajaan Banggai dari abad ke-XVI hingga saat ini masih dapat ditemui adalah Keraton Kerajaan Banggai yang berada di Banggai (ibukota Kabupaten Banggai Laut). Di masa pemerintahan Raja Syukuran Aminuddin Amir, ibukota Kerajaan Banggai yang semula berada di Banggai Laut dipindahkan ke Banggai Darat (Luwuk).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Banggai Laut ditempatkan pejabat yang disebut Bun Ken sedang untuk Banggai Darat disebut Ken Kariken. Seluruh wilayah bekas Kerajaan Banggai kemudian berdasarkan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah menjadi satu kabupaten otonom yang dikenal sebagai Kabupaten Banggai beribukota Luwuk.

Dengan terbitnya Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan berdirilah Kabupaten Banggai Kepulauan yang secara operasional diresmikan pada tanggal 3 November 1999 di Banggai oleh Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Bapak Brigjen Purnawirawan H. B. Paliudju atas nama Menteri Dalam Negeri. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (3) Undang–Undang Nomor 51 Tahun 1999 menyebutkan bahwa ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan yang semula berkedudukan di Banggai, selanjutnya sesuai amanat Pasal 11 selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan, kedudukan ibukota dipindahkan ke Salakan. Tindak lanjut dari Pasal 11 ini kemudian dilaksanakan pada Tahun 2008.

Pada Tahun 2013 dikeluarkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut sebagai pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga kini Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Totikum Selatan;
2. Kecamatan Totikum;
3. Kecamatan Tinangkung Utara;
4. Kecamatan Tinangkung Selatan;
5. Kecamatan Tinangkung;
6. Kecamatan Peling Tengah;
7. Kecamatan Liang;
8. Kecamatan Bulagi Utara;
9. Kecamatan Bulagi Selatan;
10. Kecamatan Bulagi;
11. Kecamatan Buko Selatan;
12. Kecamatan Buko.

Kabupaten Banggai Kepulauan terletak antara 1°06’30 Lintang Selatan sampai dengan 1° 35’ 58” Lintang Selatan dan 122° 37’ 6,3” Bujur Timur sampai dengan 123° 40’ 1,9” Bujur Timur di Jazirah Timur Laut Pulau Sulawesi. Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari gugusan pulau-pulau, yaitu terdiri dari 342 pulau sedang dan kecil.

Berdasarkan letak geografis dan peta Kabupaten Banggai Kepulauan, dapat ditentukan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling;
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai.

Secara administratif Kabupaten Banggai Kepulauan terbagi atas 12 wilayah kecamatan, 3 kelurahan dan 141 desa. Luas wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan kurang lebih 9.160,11 km^2 yang terdiri dari luas darat 2.488,79 km^2 dan luas laut 6.671,32 km^2.

Secara oseanografi wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan umumnya berada di sepanjang pesisir pantai. Selat Peling, Kabupaten Banggai Laut dan Laut Maluku merupakan wilayah perairan yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar dipengaruhi oleh dua musim secara tetap, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan

hidrologi di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari sungai-sungai yang mengalir di pulau Banggai dan Pulau Peling, umumnya sungai-sungai tersebut mempunyai jarak aliran yang pendek dan bersifat perenial atau mengalir sepanjang tahun.

Secara geologi, daerah Banggai Kepulauan terletak pada zona tumbukan antara lempeng mikro kontinen Banggai Sula dari sebelah timur dengan jalur ofiolit Sulawesi Timur di bagian barat. Tumbukan antara kedua lempeng tersebut merupakan fenomena tektonik yang diakomodasi dengan pergerakan sistem sesar sorong yang bergerak ke arah barat dan bersifat mendatar. Pergerakan sesar sorong yang bersifat aktif hingga sekarang ini telah beberapa kali menimbulkan gempa bumi. Kejadian gempa cukup besar terjadi pada tanggal 4 Mei 2000 dengan besaran magnitudo M= 7,6 Skala Richter. Gempa ini menimbulkan kerusakan yang cukup parah terhadap bangunan maupun infrastruktur di daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan hasil evaluasi data potensi desa yang dikonfirmasikan dengan sumber data lainnya, komposisi ketinggian dataran di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari permukaan laut adalah sebagai berikut:

1. Ketinggian <500 Meter = 85,97%
2. Ketinggian 500-700 Meter = 7,80%
3. Ketinggian >700 Meter = 6,23%

Kondisi tanah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari jenis batuan aluvium, formasi Peleng, formasi salodik, formasi buaya, formasi bobong, batuan gunung api mangole, ratas diabas, granit Banggai dan compleks batuan metamorf.

Pada Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 123.420 jiwa, dengan luas wilayah daratan sekitar 2.488,79 km2, rata-rata tingkat kepadatan penduduk secara menyeluruh di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 91 orang per km2.

Potensi unggulan daerah terdiri dari potensi perikanan dan kelautan. Hal ini ditunjang dengan wilayah perairan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang sangat luas, potensi pertanian tanaman pangan dimana sebagian besar penduduk bermata pencaharian disektor ini, potensi tanaman buah-buahan, potensi perkebunan, potensi pertambangan karena di Banggai Kepulauan terdapat jenis tambang yang potensial dapat dikembangkan seperti minyak bumi, mika, batu gamping, batu granit, pasir besi dan tanah lempung. Potensi pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan didominasi oleh sumber daya wisata alam terutama bahari mulai dari daya tarik kepulauan, pantai serta keanekaragaman dan keunikan ekologi laut didalamnya.

6.2 Struktur Organisasi

A. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 9 bagian:
   1. Bagian Umum;
   2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
   3. Bagian Administrasi Pembangunan;
   4. Bagian Perekonomian;
   5. Bagian Hukum;
   6. Bagian Organisasi;
   7. Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
   8. Bagian Tata Pemerintahan;
   9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

B. Sekretariat DPRD, terdiri dari:
   1. Bagian Umum;
   2. Bagian Persidangan, Risalah dan Dokumentasi;
   3. Bagian Perundang-undangan;
   4. Bagian Humas, Perpustakaan dan Penerbitan.

C. Dinas Daerah, terdiri dari:
   1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   2. Dinas Kesehatan;
   3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
   5. Dinas Sosial;
   6. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
   7. Dinas Ketahanan Pangan;
   8. Dinas Lingkungan Hidup;
   9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   12. Dinas Perhubungan;
   13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
   15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
   16. Dinas Pemuda dan Olahraga;

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Pertanian.

D. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Pendapatan Daerah;
7. Inspektorat Daerah;
8. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

E. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Totikum Selatan;
2. Kecamatan Totikum;
3. Kecamatan Tinangkung Utara;
4. Kecamatan Tinangkung Selatan;
5. Kecamatan Tinangkung;
6. Kecamatan Peling Tengah;
7. Kecamatan Liang;
8. Kecamatan Bulagi Utara;
9. Kecamatan Bulagi Selatan;
10. Kecamatan Bulagi;
11. Kecamatan Buko Selatan;
12. Kecamatan Buko.

F. Badan Layanan Umum Daerah, terdiri dari:
1. RSUD Trikora Salakan;
2. RS Pratama Bilabanggai;
3. Puskesmas Salakan;
4. Puskesmas Tinangkung Utara
5. Puskesmas Mansamat;
6. Puskesmas Totikum;
7. Puskesmas Totikum Selatan;

8. Puskesmas Saleati;
9. Puskesmas Patukuki;
10. Puskesmas Bulagi;
11. Puskesmas Lolantang;
12. Puskesmas Lumbi-Lumbia;
13. Puskesmas Bakalan Raya;
14. Puskesmas Bonepuso.

Susunan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini adalah sebagai berikut :

Lembaga Eksekutif

1. Penjabat Bupati : IHSAN BASIR, SH, LLM.
2. Sekretaris Daerah : RUSLI MOIDADY, ST., MT.

Lembaga Legislatif

Ketua DPRD : RUSDIN SINALING
Wakil Ketua DPRD : 1. SUHARDIN SABALINO
2. EKO WAHYUDI, ST.

Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai data yang dapat dihimpun, memiliki 3.007 ASN yang tersebar pada 50 OPD tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		CPNS	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGS.	STAF		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	21	-	-	-	2	-	-	23
Golongan IV/b	-	15	28	-	-	206	2	-	251
Golongan IV/a	-	-	104	-	-	219	-	-	337
Jumlah	**-**	**36**	**132**	**14**	**-**	**427**	**2**	**-**	**611**
Golongan III/d	-	-	23	276	-	303	12	-	613
Golongan III/c	-	-	-	103	-	306	27	-	436
Golongan III/b	-	-	-	29	-	260	91	-	380
Golongan III/a	-	-	-	1	-	316	157	2	476
Jumlah	**-**	**-**	**23**	**409**	**-**	**1.906**	**287**	**2**	**1.905**
Golongan II/d	-	-	-	-	-	64	138	-	202
Golongan II/c	-	-	-	-	-	71	114	2	187
Golongan II/b	-	-	-	-	-	8	63	-	71
Golongan II/a	-	-	-	-	-	2	23	-	25
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**145**	**338**	**2**	**485**
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**-**	**6**
JUMLAH	**-**	**36**	**155**	**423**	**-**	**1.757**	**633**	**4**	**3.007**

BAB VII

PENUTUP

TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 secara keseluruhan. Semoga CaLK ini membantu, mempermudah dan memperjelas pemahaman pembaca laporan keuangan dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 01

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

`REKONSILIASI BANK `

PER - 31 Desember 2023

Saldo Kas Bank, 31 Desember 2023		***52.477.768.800,53***
Tambah:		
- Double Cair oleh Bank OB OB 10491/SP2D-LS/BL/XII/2015	8.904.637,00	
- Double Cair oleh Bank OB OB 9221/SP2D/BUD/2016	6.658.922,00	
- Kelebihan Pembayaran Pajak SP2D No.8423/SP2D/BUD/2018	13.843.637,00	
- Kelebihan Pembayaran Pajak SP2D No.8108/SP2D/BUD/2019	2.671.500,00	
- Kelebihan Pembayaran Pajak SP2D No.8238/SP2D/BUD/2019	8.798.509,00	
- Kelebihan Pembayaran Pajak Bulan September 2020	1.318.478,00	
- Kelebihan Pembayaran Pajak SP2D No.07468/SP2D/BUD/2020	22.139.970,00	
- Kelebihan Pembayaran Pajak SP2D No.07470/SP2D/BUD/2020	5.088.848,00	
- Kelebihan Pembayaran Pajak SP2D No.07408/SP2D/BUD/2020	422.886,00	
- Kelebihan Pembayaran Pajak SP2D No.09413/SP2D/BUD/2020	2.318.182,00	
- Kelebihan Pembayaran Pajak SP2D No.00064/SP2D/BUD/2021	27.836.473,00	
- Kelebihan Pembayaran Pajak SP2D No.19311/SP2D/1-03.0-00.0-00.1.0.0/LS/XII/2022	9,00	
- Double Bayar Pajak SP2D No.18.02/04.0/000025/LS/2.17.3.30.3.31.01.0000/P.02/5/2023	3.981.480,00	
- Lebih Bayar Pajak SP2D No.18.02/04.0/000037/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/P.04/11/2023	10.000,00	
- Double Bayar Pajak SP2D No.18.02/04.0/000041/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023	8.664.316,00	
		112.657.847,00
Kurang :		
- Dana Pihak ketiga yang masih di kasda karena pajak disetor langsung tahun 2016	1.717.367,00	
- Kurang Bayar SP2D 01695 (Nakertrans)	101.045,00	
- Kekeliruan Pembayaran SP2D 8062 Double Cair (Bukan Dobel Cair)	32.491.836,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000663/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P.05/12/2023	9.215.721,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000301/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023	6.496.411,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000375/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023	6.129.730,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000147/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023	1.177.703,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000147/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023	8.636.486,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000047/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/P.04/12/2023	100.000,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000047/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/P.04/12/2023	495.495,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000037/LS/7.01.0.00.0.00.12.0000/P.04/12/2023	11.396,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000083/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023	1.219.500,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000105/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/11/2023	22.500,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000105/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/11/2023	23.625.000,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000105/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/11/2023	26.400.000,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000105/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/11/2023	38.985.000,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000043/LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/P.03/11/2023	163.051,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000133/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/8/2023	413.192,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000287/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P.04/11/2023	33.454.445,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000135/LS/5.02.0.00.0.00.29.0000/P.03/10/2023	51.858,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000086/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.03/9/2023	164.682,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000091/LS/5.02.0.00.0.00.29.0000/P.02/7/2023	312.768,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000031/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P.02/5/2023	2.259.366,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000013/LS/2.19.0.00.0.00.01.0000/P.02/5/2023	369.971,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000009/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/P.01/4/2023	12.338,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.18.02/04.0/000006/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P.01/3/2023	285.585,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.05943/SP2D/1-03.0-00.0-00.1.0.0/LS/VIII/2022	8.798.509,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.17703/SP2D/1-01.2-22.0-00.1.0.0/LS/XII/2022	301.743,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.17500/SP2D/1-02.0-00.0-00.1.0.0/LS/XII/2022	917.829,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.17312/SP2D/1-02.0-00.0-00.1.0.0/LS/XII/2022	242.239,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.17305/SP2D/1-02.0-00.0-00.1.0.0/LS/XII/2022	657.703,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.16148/SP2D/2-07.3-32.0-00.1.0.0/LS/XII/2022	32.354,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.14577/SP2D/1-01.2-22.0-00.1.0.0/LS/XII/2022	14.893.120,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.14521/SP2D/2-15.0-00.0-00.1.0.0/LS/XII/2022	1,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.14403/SP2D/1-03.0-00.0-00.1.0.0/LS/XII/2022	386.911,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.14402/SP2D/1-01.2-22.0-00.1.0.0/LS/XII/2022	370.000,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.12494/SP2D/6-01.0-00.0-00.1.0.0/LS/XI/2022	1,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.00500/SP2D/1-04.2-10.0-00.1.0.0/LS/III/2022	846.301,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.05336/SP2D/BUD/2021	11.925.684,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.05162/SP2D/BUD/2021	2.552.418,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.05161/SP2D/BUD/2021	1.274.614,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.05113/SP2D/BUD/2021	111.602,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.03475/SP2D/BUD/2021	953.209,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.05439/SP2D/BUD/2021	10.856.976,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.06550/SP2D/BUD/2021	28.883,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.06549/SP2D/BUD/2021	969.084,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.02808/SP2D/GJ/BUD/2020	12.000,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.03040/SP2D/GJ/BUD/2020	18.000,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.03814/SP2D/GJ/BUD/2020	2.000,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.03903/SP2D/GJ/BUD/2020	4.000,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.03906/SP2D/GJ/BUD/2020	12.000,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.04079/SP2D/GJ/BUD/2020	42.000,00	
- Outstanding Pajak SP2D No.06197/SP2D/GJ/BUD/2020	380.000,00	
		250.901.627,00
Saldo Bank yang telah disesuaikan		***52.339.525.020,53***
Saldo Kas Bank (Non Tunai di BUD, 31 Desember 2023)		***52.339.525.020,53***
Tambah:		-
Kurang:		-
		52.339.525.020,53

Lampiran 02

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR PERHITUGAN SISA KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PERIODE 1 JANUARI 2023 S.D. 31 DESEMBER 2023

No.	Unit Kerja	Penerimaan SP2D UP/GU/TU/LS	BOS/JKN/BLUD Dana Desa	Pengembali-an GU/TU/LS	Total Belanja	Belanja LRA	Total Pembiayaan	Sisa UP	STS UP Bendahara	Sisa Kas	Koreksi SILPA	Saldo akhir kas dibendahara Pengeluaran			Keterangan
												Sisa UP	Jasa Giro	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)-(7)-(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)=(11)-(12)	(14)	(15)=(13)+(14)	(16)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.122.806.142,00			7.122.806.142,00	7.119.932.302,00		2.873.840,00	2.873.840,00	-		-	-	-	
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.038.140.510,00			8.038.140.510,00	8.035.746.510,00		2.394.000,00	2.394.000,00	-		-	62.391,00	62.391,00	
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.887.109.957,00			4.887.109.957,00	4.826.939.020,00		60.170.937,00	60.170.937,00	-		-	-	-	
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.846.779.153,00			4.846.779.153,00	4.844.499.157,00		2.279.996,00	2.279.996,00	-		-	-	-	
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	73.777.991.652,00	111.415.896.000,00	569.100,00	185.193.318.552,00	185.193.262.732,00		55.820,00	55.820,00	-		-	-	-	
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	8.279.082.297,00			8.279.082.297,00	8.101.248.377,00		177.833.920,00	177.833.920,00	-		-	-	-	
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.906.067.861,00			3.906.067.861,00	3.867.504.231,00		38.563.630,00	38.563.630,00	-		-	52.590,00	52.590,00	
8	DINAS KESEHATAN	101.773.763.426,00	23.942.862.508,00	819.900,00	125.715.806.034,00	125.704.215.510,00		11.590.524,00	11.590.524,00	-		-	1.398.574,00	1.398.574,00	Termasuk realiasasi belanja BLUD
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.844.488.086,00			3.844.488.086,00	3.725.248.026,00		119.240.060,00	119.240.060,00	-		-	43.500,00	43.500,00	
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	3.394.592.214,00			3.394.592.214,00	3.044.592.214,00		350.000.000,00	350.000.000,00	-		-	-	-	
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.573.730.496,00		7.800.000,00	4.565.930.496,00	4.565.930.496,00		-	-	-		-	-	-	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.559.012.812,00			4.559.012.812,00	4.400.430.312,00		158.582.500,00	158.582.500,00	-		-	-	-	
13	DINAS PARIWISATA	2.567.914.441,00			2.567.914.441,00	2.567.913.783,00		658,00	658,00	-		-	-	-	
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	79.090.188.234,00			79.090.188.234,00	78.899.227.734,00		190.960.500,00	190.960.500,00	-		-	50.000,00	50.000,00	
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.960.090.603,00			4.960.090.603,00	4.937.523.260,00		22.567.343,00	22.567.343,00	-		-	-	-	
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.715.365.396,00			8.715.365.396,00	8.715.086.196,00		279.200,00	279.200,00	-		-	-	-	
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.463.002.319,00			3.463.002.319,00	3.312.002.469,00		150.999.850,00	150.999.850,00	-		-	50.000,00	50.000,00	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.741.897.089,00			3.741.897.089,00	3.683.541.994,00		58.355.095,00	58.355.095,00	-		-	50.000,00	50.000,00	
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	192.249.016.146,00	25.020.955.089,21	13.893.325,00	217.256.077.910,21	217.253.894.653,21		2.183.257,00	2.183.257,00	-		-	-	-	
20	DINAS PERHUBUNGAN	8.893.546.089,00			8.893.546.089,00	8.878.116.044,00		15.430.045,00	15.430.045,00	-		-	-	-	
21	DINAS PERIKANAN	10.220.632.132,00		300.000,00	10.220.332.132,00	10.215.473.032,00		4.859.100,00	4.859.100,00	-		-	50.000,00	50.000,00	
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.907.983.161,00			4.907.983.161,00	4.893.573.147,00		14.410.014,00	14.410.014,00	-		-	50.000,00	50.000,00	
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.739.306.958,00			3.739.306.958,00	3.688.884.344,00		50.422.614,00	50.422.614,00	-		-	-	-	
24	DINAS PERTANIAN	10.679.279.930,00		30.500.000,00	10.648.779.930,00	10.624.155.974,00		24.623.956,00	24.623.956,00	-		-	50.000,00	50.000,00	

Lampiran 02

No.	Unit Kerja	Penerimaan SP2D UP/GU/TU/LS	BOS/JKN/BLUD Dana Desa	Pengembali-an GU/TU/LS	Total Belanja	Belanja LRA	Total Pembiayaan	Sisa UP	STS UP Bendahara	Sisa Kas	Koreksi SILPA	Saldo akhir kas dibendahara Pengeluaran			Keterangan
												Sisa UP	Jasa Giro	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(6)-(7)-(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)=(11)-(12)	(14)	(15)=(13)+(14)	(16)
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8.321.126.037,00		1.665.000,00	8.319.461.037,00	8.319.162.613,00		298.424,00	298.424,00	-		-	50.000,00	50.000,00	
26	DINAS SOSIAL	6.438.643.580,00		3.500.000,00	6.435.143.580,00	6.393.516.864,00		41.626.716,00	41.626.716,00	-		-	16.081,00	16.081,00	
27	INSPEKTORAT	8.663.705.541,00			8.663.705.541,00	8.652.822.117,00		10.883.424,00	10.883.424,00	-		-	50.000,00	50.000,00	
28	KECAMATAN BUKO	2.203.191.851,00		3.227.400,00	2.199.964.451,00	2.158.343.651,00		41.620.800,00	41.620.800,00	-		-	50.000,00	50.000,00	
29	KECAMATAN BUKO SELATAN	1.708.073.892,00			1.708.073.892,00	1.707.156.142,00		917.750,00	917.750,00	-		-	50.000,00	50.000,00	
30	KECAMATAN BULAGI	3.562.599.756,00			3.562.599.756,00	3.560.893.056,00		1.706.700,00	1.706.700,00	-		-	-	-	
31	KECAMATAN BULAGI SELATAN	2.921.734.917,00		600.000,00	2.921.134.917,00	2.916.755.092,00		4.379.825,00	4.379.825,00	-		-	-	-	
32	KECAMATAN BULAGI UTARA	2.786.788.651,00			2.786.788.651,00	2.783.419.951,00		3.368.700,00	3.368.700,00	-		-	-	-	
33	KECAMATAN LIANG	2.870.372.722,00			2.870.372.722,00	2.856.530.128,00		13.842.594,00	13.842.594,00	-		-	-	-	
34	KECAMATAN PELING TENGAH	2.590.570.202,00			2.590.570.202,00	2.590.135.628,00		434.574,00	434.574,00	-		-	-	-	
35	KECAMATAN TINANGKUNG	3.027.824.988,00			3.027.824.988,00	2.927.824.988,00		100.000.000,00	100.000.000,00	-		-	8.384,00	8.384,00	
36	KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN	1.732.452.295,00			1.732.452.295,00	1.727.784.770,00		4.667.525,00	4.667.525,00	-		-	-	-	
37	KECAMATAN TINANGKUNG UTARA	1.901.637.799,00			1.901.637.799,00	1.886.483.499,00		15.154.300,00	15.154.300,00	-		-	-	-	
38	KECAMATAN TOTIKUM	2.339.438.369,00			2.339.438.369,00	2.338.898.019,00		540.350,00	540.350,00	-		-	52.199,00	52.199,00	
39	KECAMATAN TOTIKUM SELATAN	2.253.742.047,00			2.253.742.047,00	2.249.352.347,00		4.389.700,00	4.389.700,00	-		-	15.482,00	15.482,00	
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.227.141.150,00		1.500.000,00	8.225.641.150,00	8.176.262.738,00		49.378.412,00	49.378.412,00	-		-	-	-	
41	SEKRETARIAT DAERAH	42.723.442.457,00		61.423.235,00	42.662.019.222,00	42.167.445.063,00		494.574.159,00	486.368.759,00	8.205.400,00		8.205.400,00	50.000,00	8.255.400,00	
42	SEKRETARIAT DPRD	24.647.964.415,00		5.731.000,00	24.642.233.415,00	24.521.037.278,00		121.196.137,00	21.974.999,00	99.221.138,00	88.029.170,00	11.191.968,00	-	11.191.968,00	

Lampiran 03

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KAS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA BLUD	SALDO AWAL	PENDAPATAN BLUD	BELANJA				SALDO AKHIR
				BELANJA PEGAWAI BLUD	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD	JUMLAH	
1	Puskesmas Totikum	0,00	356.568.958,00		315.449.022,00	8.300.000,00	323.749.022,00	32.819.936,00
2	Puskesmas Salakan	0,00	546.310.621,00		475.107.737,00	68.749.150,00	543.856.887,00	2.453.734,00
3	Puskesmas Tataba	0,00	192.527.506,00		190.382.837,00		190.382.837,00	2.144.669,00
4	Puskesmas Lolantang	0,00	234.905.463,00		218.598.754,00		218.598.754,00	16.306.709,00
5	Puskesmas Bulagi	0,00	335.584.068,00		301.112.792,00	19.932.368,00	321.045.160,00	14.538.908,00
6	Puskesmas Patukuki	0,00	213.447.455,00		199.456.770,00		199.456.770,00	13.990.685,00
7	Puskesmas Sabang	0,00	178.597.340,00		169.698.381,00		169.698.381,00	8.898.959,00
8	Puskesmas Lumbi-Lumbia	0,00	214.660.468,00	3.000.000,00	167.867.093,00		170.867.093,00	43.793.375,00
9	Puskesmas Mansamat	0,00	215.707.008,00		177.361.448,00		177.361.448,00	38.345.560,00
10	Puskesmas Saleati	0,00	234.581.253,00		198.166.048,00	820.000,00	198.986.048,00	35.595.205,00
11	Puskesmas Tinangkung Utara	0,00	236.603.855,00		205.636.023,00		205.636.023,00	30.967.832,00
12	Puskesmas Totikum Selatan	0,00	251.106.156,00		232.482.707,00		232.482.707,00	18.623.449,00
13	Puskesmas Bakalan Raya	0,00	110.878.083,00		102.739.337,00	7.000.000,00	109.739.337,00	1.138.746,00
14	Rumah Sakit Pratama Bilabanggai	0,00	380.906.016,00		285.793.152,00		285.793.152,00	95.112.864,00
15	Puskesmas Bonepuso	0	59.219.251,00		27.259.290,00	14.080.644,00	41.339.934,00	17.879.317,00
16	Rumah sakit Umum Daerah TRIKORA Salakan	0	6.876.275.629,00	1.979.717.450,00	3.449.022.027,00		5.428.739.477,00	1.447.536.152,00
Jumlah		**0,00**	**10.637.879.130,00**	**1.982.717.450,00**	**6.716.133.418,00**	**118.882.162,00**	**8.817.733.030,00**	**1.820.146.100,00**

Lampiran 04

KAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SATUAN PENDIDIKAN DASAR (SATDIKDAS) NEGERI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOS - SILPA PEMKAB			MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG						SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BOS - SILPA PEMKAB		
						PENERIMAAN 2023				BELANJA				PENYETORAN ATAS JASA GIRO TAHUN SEBELUMNYA	PENYETORAN ATAS JASA GIRO TAHUN 2023			
			KAS DARI PENDAPATAN DANA BOS - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB	DANA BOS	JASA GIRO	PENGEMBALIAN TEMUAN	JUMLAH MUTASI TAMBAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH MUTASI KURANG			KAS DARI PENDAPATAN DANA BOS - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14) = (11) + (12) + (13)	(15)	(16)	(17)	(18) = (5) + (6) - (15) - (16)	(19) = (17) + (18)
SEKOLAH DASAR (SD)																		
1	Totikum	Sekolah Dasar Inpres Abason	805.432,00	-	805.432,00	58.410.000	24.350,00		58.434.350,00	7.200.000,00	48.695.432,00	3.320.000,00	59.215.432,00	-	24.350,00	-	-	-
2	Totikum	Sekolah Dasar Inpres Bolonan	66.098,00	-	66.098,00	91.080.000	26.548,00		91.106.548,00	25.500.000,00	55.379.598,00	10.266.500,00	91.146.098,00	-	26.548,00	-	-	-
3	Totikum	Sekolah Dasar Inpres Sambiut	60.272,16	11.904,00	72.176,16	65.340.000	25.418,00		65.365.418,00	24.000.000,00	27.438.772,00	13.961.500,00	65.400.272,00	11.904,00	25.418,00	0,16	-	0,16
4	Totikum	Sekolah Dasar Inpres Sampaka	98.331,00	-	98.331,00	38.610.000	8.037,00		38.618.037,00	8.400.000,00	30.308.331,00	-	38.708.331,00	-	8.037,00	-	-	-
5	Totikum	Sekolah Dasar Negeri 1 Kombutokan	100.000,00	-	100.000,00	187.110.000	52.275,00		187.162.275,00	41.000.000,00	130.010.000,00	16.200.000,00	187.210.000,00	-	52.275,00	-	-	-
6	Totikum	Sekolah Dasar Negeri Batangbabasal	2.227.589,00	-	2.227.589,00	79.962.000	47.230,00		80.009.230,00	18.600.000,00	61.589.589,00	1.942.000,00	82.131.589,00	-	47.230,00	58.000,00	-	58.000,00
7	Totikum	Sekolah Dasar Negeri Lopito	2.745.826,00	-	2.745.826,00	118.800.000	45.107,00		118.845.107,00	26.600.000,00	73.630.000,00	18.300.000,00	118.530.000,00	-	45.107,00	3.015.826,00	-	3.015.826,00
8	Totikum	Sekolah Dasar Negeri Pembina Sambiut	-	-	-	45.540.000	18.675,00		45.558.675,00	12.000.000,00	32.430.000,00	1.100.000,00	45.530.000,00	-	18.675,00	10.000,00	-	10.000,00
9	Totikum	Sekolah Dasar Negeri Salangano	761.805,00	-	761.805,00	77.217.050	12.298,00		77.229.348,00	13.500.000,00	50.320.000,00	12.789.420,00	76.609.420,00	-	12.298,00	1.369.435,00	-	1.369.435,00
10	Totikum	Sekolah Dasar Nosuon	354.000,00	-	354.000,00	51.210.000	24.011,00		51.234.011,00	7.440.000,00	33.636.600,00	10.137.400,00	51.214.000,00	-	24.011,00	350.000,00	-	350.000,00
11	Totikum	Sekolah Dasar Negeri Inpres 2 Kombutokan	50.000,00	-	50.000,00	93.060.000	16.830,00		93.076.830,00	20.550.000,00	65.200.000,00	6.960.000,00	92.710.000,00	-	16.830,00	400.000,00	-	400.000,00
12	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Inpres Babang	116,00	42.073,00	42.189,00	89.820.000	31.365,00		89.851.365,00	5.050.000,00	76.770.116,00	8.000.000,00	89.820.116,00	42.073,00		-	31.365,00	31.365,00
13	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Inpres Kokondong	350.000,00	5.836,00	355.836,00	18.439.568	6.834,00		18.446.402,00	7.350.000,00	11.079.000,00	-	18.429.000,00	5.836,00	3.186,00	360.568,00	3.648,00	364.216,00
14	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Inpres Lolantang	6.820.000,00	35.052,00	6.855.052,00	76.558.490	53.590,00		76.612.080,00	11.950.000,00	62.078.490,00	9.350.000,00	83.378.490,00	35.052,00		-	53.590,00	53.590,00
15	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Inpres Palabatu 2	377.500,00	14.818,00	392.318,00	47.890.000	27.783,00		47.917.783,00	7.200.000,00	29.517.500,00	11.200.000,00	47.917.500,00	14.818,00	20.355,00	350.000,00	7.428,00	357.428,00
16	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Inpres Pandaluk	392.500,00	20.518,00	413.018,00	75.240.000	15.150,00		75.255.150,00	10.700.000,00	64.740.000,00	-	75.440.000,00	20.518,00		192.500,00	15.150,00	207.650,00
17	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Inpres Toi-Toi	116.723,00	18.245,00	134.968,00	52.925.400	18.358,71		52.943.758,71	22.900.000,00	30.025.400,00	-	52.925.400,00	18.245,00	18.354,00	116.723,00	4,71	116.727,71
18	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Negeri Balalon	-	16.024,00	16.024,00	87.120.000	29.671,00		87.149.671,00	14.100.000,00	73.020.000,00	-	87.120.000,00	16.024,00	10.971,00	-	18.700,00	18.700,00
19	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Negeri Momotan	56.579,00	10.455,00	67.034,00	26.730.000	13.584,98		26.743.584,98	8.500.000,00	18.272.500,00	-	26.772.500,00	10.455,00	6.424,00	14.079,00	7.160,98	21.239,98
20	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Negeri Osan	29.059.000,00	43.535,00	29.102.535,00	107.286.000	62.027,00		107.348.027,00	30.000.000,00	80.656.500,00	17.169.400,00	127.825.900,00	-		8.519.100,00	105.562,00	8.624.662,00
21	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Negeri Palabatu I	350.000,00	12.801,00	362.801,00	48.880.000	27.662,00		48.907.662,00	5.400.000,00	35.480.000,00	8.350.000,00	49.230.000,00	12.801,00		-	27.662,00	27.662,00
22	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Negeri Pipilogot	350.000,00	7.456,00	357.456,00	27.720.000	11.887,00		27.731.887,00	10.800.000,00	16.920.000,00	-	27.720.000,00	7.456,00	11.887,00	350.000,00	-	350.000,00
23	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Negeri Sabelak	4.872.839,00	30.059,00	4.902.898,00	61.380.000	24.192,00		61.404.192,00	21.000.000,00	44.902.839,00	-	65.902.839,00	30.059,00	21.716,00	350.000,00	2.476,00	352.476,00
24	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Negeri Suit	385.000,00	16.262,00	401.262,00	36.630.000	10.743,00		36.640.743,00	19.800.000,00	16.868.872,00	-	36.668.872,00	16.262,00	1.548,00	346.128,00	9.195,00	355.323,00
25	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Negeri Tatarandang	-	88.089,00	88.089,00	168.030.000	70.687,00		168.100.687,00	54.000.000,00	96.730.000,00	17.300.000,00	168.030.000,00	88.089,00		-	70.687,00	70.687,00
26	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Negeri Unu	2.861.911,00	21.072,00	2.882.983,00	37.270.000	18.856,00		37.288.856,00	16.950.000,00	20.670.000,00	-	37.620.000,00	-		2.511.911,00	39.928,00	2.551.839,00
27	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Negeri Labotankandi	579.100,00	25.030,00	604.130,00	65.501.700	30.204,00		65.531.904,00	16.200.000,00	43.882.300,00	5.998.500,00	66.080.800,00	-		-	55.234,00	55.234,00
28	Bulagi Selatan	Sekolah Dasar Negeri Inpres Bonepuso	1.000.000,00	19.320,00	1.019.320,00	84.150.000	22.518,00	1.400.000,00	85.572.518,00	8.400.000,00	69.400.000,00	7.343.000,00	85.143.000,00	-		1.407.000,00	41.838,00	1.448.838,00
29	Bulagi	Sekolah Dasar Inpres 2 Bulagi	924.500,00	34.762,00	959.262,00	72.350.000	26.471,00		72.376.471,00	36.630.000,00	36.644.500,00	-	73.274.500,00	34.762,00		-	26.471,00	26.471,00
30	Bulagi	Sekolah Dasar Inpres Boloy	4.463,00	10.766,00	15.229,00	35.586.000	10.955,00		35.596.955,00	10.200.000,00	25.390.000,00	-	35.590.000,00	10.766,00		463,00	10.955,00	11.418,00
31	Bulagi	Sekolah Dasar Inpres Komba-Komba	399.718,00	22.485,00	422.203,00	42.220.000	16.393,00		42.236.393,00	21.000.000,00	21.619.718,00	-	42.619.718,00	22.485,00	2.257,00	-	14.136,00	14.136,00
32	Bulagi	Sekolah Dasar Inpres Oluno	377.516,00	60.210,00	437.726,00	106.569.984	23.853,00		106.593.837,00	21.600.000,00	67.624.500,00	17.350.200,00	106.574.700,00	60.210,00	3.032,00	372.800,00	20.821,00	393.621,00
33	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Alul	4.000,00	16.809,00	20.809,00	59.400.000	19.581,63		59.419.581,63	29.700.000,00	29.704.000,00	-	59.404.000,00	16.809,00	5.525,00	-	14.056,63	14.056,63
34	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri I Bulagi	-	33.988,00	33.988,00	67.320.000	18.042,00		67.338.042,00	23.100.000,00	44.220.000,00	-	67.320.000,00	33.988,00		-	18.042,00	18.042,00
35	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Inpres Sumondung	350.000,00	21.721,00	371.721,00	39.250.000	14.539,00		39.264.539,00	18.000.000,00	21.600.000,00	-	39.600.000,00	21.721,00	14.415,00	-	124,00	124,00
36	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Lalanday	20.706,00	18.925,00	39.631,00	38.610.000	14.981,00		38.624.981,00	15.660.000,00	22.970.706,00	-	38.630.706,00	18.925,00		-	14.981,00	14.981,00
37	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Meselesek	14.500,00	29.842,00	44.342,00	61.347.500	21.236,00		61.368.736,00	15.000.000,00	38.005.500,00	8.350.000,00	61.355.500,00	-		6.500,00	51.078,00	57.578,00
38	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Montomisan	20.000,00	9.642,00	29.642,00	37.350.000	20.036,00	200.000,00	37.570.036,00	3.600.000,00	33.770.000,00	-	37.370.000,00	9.642,00	20.036,00	200.000,00	-	200.000,00
39	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Pembina Bulagi	352.000,00	20.957,00	372.957,00	66.060.000	30.894,00		66.090.894,00	9.600.000,00	47.962.000,00	8.850.000,00	66.412.000,00	20.957,00	24.008,00	-	6.886,00	6.886,00
40	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Seasa	350.000,00	49.213,00	399.213,00	90.090.000	47.389,00	900.000,00	91.037.389,00	32.062.500,00	51.027.500,00	-	83.090.000,00	49.213,00	47.389,00	8.250.000,00	-	8.250.000,00
41	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Sosom	49.925,00	14.460,00	64.385,00	34.303.500	9.200,00		34.312.700,00	15.405.000,00	18.948.425,00	-	34.353.425,00	14.460,00		-	9.200,00	9.200,00

Lampiran 04

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOS - SILPA PEMKAB			MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG						SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BOS - SILPA PEMKAB		
						PENERIMAAN 2023				BELANJA				PENYETORAN ATAS JASA GIRO TAHUN SEBELUMNYA	PENYETORAN ATAS JASA GIRO TAHUN 2023			
			KAS DARI PENDAPATAN DANA BOS - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB	DANA BOS	JASA GIRO	PENGEMBALIAN TEMUAN	JUMLAH MUTASI TAMBAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH MUTASI KURANG			KAS DARI PENDAPATAN DANA BOS - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14) = (11) + (12) + (13)	(15)	(16)	(17)	(18) = (5) + (6) - (15) - (16)	(19) = (17) + (18)
42	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Tolo	350.000,00	34.076,00	384.076,00	59.364.000	26.813,00		59.390.813,00	10.800.000,00	31.873.510,00	16.800.000,00	59.473.510,00	34.076,00	9.493,00	240.490,00	17.320,00	257.810,00
43	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Toolon	1.000,00	14.488,00	15.488,00	30.690.000	16.968,00		30.706.968,00	7.800.000,00	22.891.000,00	-	30.691.000,00	14.488,00	8.232,00	-	8.736,00	8.736,00
44	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Inpres Kayubet	350.000,00	15.685,00	365.685,00	22.770.000	2.460,00		22.772.460,00	3.600.000,00	19.520.000,00	-	23.120.000,00	15.685,00		-	2.460,00	2.460,00
45	Bulagi	Sekolah Dasar Negeri Kambal	36.564,00	18.964,00	55.528,00	41.573.000	18.534,00	1.300.000,00	42.891.534,00	18.000.000,00	23.603.000,00	-	41.603.000,00	18.964,00		1.306.564,00	18.534,00	1.325.098,00
46	Liang	Sekolah Dasar 3 Inpres Liang	3.600.000,00	50.885,00	3.650.885,00	109.786.000	35.018,00		109.821.018,00	36.600.000,00	73.082.000,00	-	109.682.000,00	50.885,00		3.704.000,00	35.018,00	3.739.018,00
47	Liang	Sekolah Dasar Inpres Kinandal	-	33.498,00	33.498,00	75.240.000	15.656,00		75.255.656,00	32.400.000,00	42.840.000,00	-	75.240.000,00	33.498,00	15.656,00	-	-	-
48	Liang	Sekolah Dasar Inpres Pinalong	13.480,00	4.242,00	17.722,00	21.780.000	6.928,00		21.786.928,00	14.400.000,00	7.393.480,00	-	21.793.480,00	4.242,00	6.928	-	-	-
49	Liang	Sekolah Dasar Inpres Popidolon	16.886.747,00	31.985,00	16.918.732,00	60.390.000	150.608,00	31.614.000,00	92.154.608,00	18.000.000,00	51.770.000,00	7.500.000,00	77.270.000,00	31.985,00	150.608,00	31.620.747,00	-	31.620.747,00
50	Liang	Sekolah Dasar Inpres Selekan	350.000,00	27.628,00	377.628,00	55.090.000	18.565,00		55.108.565,00	11.725.000,00	43.715.000,00	-	55.440.000,00	27.628,00	8.456,00	-	10.109,00	10.109,00
51	Liang	Sekolah Dasar Negeri 1 Okumel	4.300.000,00	41.469,00	4.341.469,00	60.866.000	26.187,00		60.892.187,00	26.400.000,00	34.420.000,00	4.300.000,00	65.120.000,00	41.469,00	3.757,00	46.000,00	22.430,00	68.430,00
52	Liang	Sekolah Dasar Negeri Apal	-	56.139,00	56.139,00	99.000.000	34.173,00		99.034.173,00	41.700.000,00	51.750.000,00	5.550.000,00	99.000.000,00	56.139,00		-	34.173,00	34.173,00
53	Liang	Sekolah Dasar Negeri Balayon	804.633,00	-	804.633,00	31.330.000	19.011,00	305.633,00	31.654.644,00	12.600.000,00	18.625.000,00	-	31.225.000,00	-	19.011,00	1.215.266,00	-	1.215.266,00
54	Liang	Sekolah Dasar Negeri Basosol	350.000,00	-	350.000,00	55.090.000	16.678,00		55.106.678,00	17.800.000,00	37.640.000,00	-	55.440.000,00	-	16.678,00	-	-	-
55	Liang	Sekolah Dasar Negeri Boyomoute	18.157.043,00	83,00	18.157.126,00	21.129.957	16.501,00	7.000.000,00	28.146.458,00	9.000.000,00	28.112.000,00	350.000,00	37.462.000,00	-	16.501,00	8.825.000,00	83,00	8.825.083,00
56	Liang	Sekolah Dasar Negeri Loolong	-	12.870,00	12.870,00	40.590.000	12.876,00		40.602.876,00	12.000.000,00	28.590.000,00	-	40.590.000,00	12.870,00	5.106,00	-	7.770,00	7.770,00
57	Liang	Sekolah Dasar Negeri Mamulusan	308.538,00	-	308.538,00	48.491.000	16.997,00		48.507.997,00	18.000.000,00	30.677.000,00	-	48.677.000,00	-	16.997,00	122.538,00	-	122.538,00
58	Liang	Sekolah Dasar Negeri Pembina Liang	600.000,00	-	600.000,00	55.440.000	16.181,00		55.456.181,00	6.600.000,00	46.740.000,00	2.700.000,00	56.040.000,00	-	16.181,00	-	-	-
59	Liang	Sekolah Dasar Negeri 2 Inpres Liang	368.645,56	12.830,00	381.475,56	23.410.000	9.158,00		23.419.158,00	5.400.000,00	13.527.845,56	4.850.000,00	23.777.845,56	12.830,00	3.120,00	800,00	6.038,00	6.838,00
60	Liang	Sekolah Dasar Negeri 2 Inpres Okumel	710.801,00	52.608,00	763.409,00	95.940.000	29.576,00	4.000.000,00	99.969.576,00	48.015.000,00	48.268.801,00	-	96.283.801,00	52.608,00	9.504,00	4.367.000,00	20.072,00	4.387.072,00
61	Liang	Sekolah Dasar Negeri Inpres Binuntuli	-	30.300,00	30.300,00	65.340.000	19.834,00		65.359.834,00	16.800.000,00	48.540.000,00	-	65.340.000,00	30.300,00	7.805,00	-	12.029,00	12.029,00
62	Liang	Sekolah Dasar Negeri Inpres Tomboniki	240.000,00	22.781,00	262.781,00	46.530.000	13.225,00		46.543.225,00	16.800.000,00	29.765.000,00	-	46.565.000,00	22.781,00	13.225,00	205.000,00	-	205.000,00
63	Tinangkung	Sekolah Dasar Inpres 1 Salakan	2.700.000,00	-	2.700.000,00	308.880.000	123.856,00		309.003.856,00	84.900.000,00	206.480.400,00	20.171.975,00	311.552.375,00	-	123.856,00	27.625,00	-	27.625,00
64	Tinangkung	Sekolah Dasar Inpres Kautu	4.800.000,00	-	4.800.000,00	170.280.000	78.366,00	2.405.000,00	172.763.366,00	65.000.000,00	86.596.300,00	23.483.700,00	175.080.000,00	-	78.366,00	2.405.000,00	-	2.405.000,00
65	Tinangkung	Sekolah Dasar Inpres Tompudau	29.329,00	-	29.329,00	134.639.800	41.272,00		134.681.072,00	21.600.000,00	105.569.129,00	7.500.000,00	134.669.129,00	-	41.272,00	-	-	-
66	Tinangkung	Sekolah Dasar Negeri 2 Salakan	-	-	-	328.680.000	93.616,00		328.773.616,00	78.000.000,00	225.234.000,00	25.024.950,00	328.258.950,00	-	93.616,00	421.050,00	-	421.050,00
67	Tinangkung	Sekolah Dasar Negeri 3 Salakan	-	-	-	48.510.000	32.718,00		48.542.718,00	21.000.000,00	27.505.000,00	-	48.505.000,00	-	18.354,00	5.000,00	14.364,00	19.364,00
68	Tinangkung	Sekolah Dasar Negeri Ambelang	11.500,00	136,00	11.636,00	144.540.000	38.334,00		144.578.334,00	37.800.000,00	87.740.000,00	18.999.995,00	144.539.995,00	136,00	38.334,00	11.505,00	-	11.505,00
69	Tinangkung	Sekolah Dasar Negeri Bakalan	350.000,00	-	350.000,00	60.040.000	32.018,00	3.000.000,00	63.072.018,00	24.900.000,00	25.640.000,00	9.500.000,00	60.040.000,00	-	32.018,00	3.350.000,00	-	3.350.000,00
70	Tinangkung	Sekolah Dasar Negeri Bulungkobit	4.151,00	-	4.151,00	92.069.849	31.248,00		92.101.097,00	36.000.000,00	45.574.000,00	10.500.000,00	92.074.000,00	-	31.248,00	-	-	-
71	Tinangkung	Sekolah Dasar Negeri Bungin	204.000,00	-	204.000,00	96.030.000	30.186,00		96.060.186,00	30.600.000,00	61.545.000,00	3.885.000,00	96.030.000,00	-	30.186,00	204.000,00	-	204.000,00
72	Tinangkung	Sekolah Dasar Negeri Kuakon	1.051.362,00	-	1.051.362,00	83.487.600	28.729,00		83.516.329,00	18.000.000,00	55.557.600,00	10.800.000,00	84.357.600,00	-	28.729,00	181.362,00	-	181.362,00
73	Tinangkung	Sekolah Dasar Negeri Manggalai	4.006.500,00	-	4.006.500,00	79.423.000	50.713,00	3.250.000,00	82.723.713,00	26.700.000,00	50.483.000,00	6.246.500,00	83.429.500,00	-	50.713,00	3.250.000,00	-	3.250.000,00
74	Tinangkung	Sekolah Dasar Negeri Pembina Salakan	2.120.000,00	232,00	2.120.232,00	497.780.000	197.361,00		497.977.361,00	125.700.000,00	322.520.950,00	49.071.050,00	497.292.000,00	232,00	197.361,00	2.608.000,00	-	2.608.000,00
75	Tinangkung	Sekolah Dasar Negeri Inpres Saiyong	163.700,00	-	163.700,00	57.420.000	32.946,00	3.187.300,00	60.640.246,00	17.550.000,00	38.683.700,00	-	56.233.700,00	-	32.946,00	4.537.300,00	-	4.537.300,00
76	Buko	Sekolah Dasar Inpres 2 Paisubatu	4.000,00	24.749,00	28.749,00	53.460.000	17.335,00		53.477.335,00	17.700.000,00	30.064.000,00	-	47.764.000,00	24.749,00		5.700.000,00	17.335,00	5.717.335,00
77	Buko	Sekolah Dasar Inpres Lalengan	405.486,00	41.927,00	447.413,00	77.220.000	45.029,00		77.265.029,00	18.000.000,00	59.232.159,00	-	77.232.159,00	41.927,00	45.029,00	393.327,00	-	393.327,00
78	Buko	Sekolah Dasar Inpres Okulo	54.955,00	32.202,00	87.157,00	81.180.000	28.887,00		81.208.887,00	22.200.000,00	56.279.955,00	2.725.000,00	81.204.955,00	32.202,00	28.887,00	30.000,00	-	30.000,00
79	Buko	Sekolah Dasar Inpres Palapat	2.388.200,00	40.402,00	2.428.602,00	81.699.800	36.916,00		81.736.716,00	13.950.000,00	59.625.000,00	10.125.000,00	83.700.000,00	40.402,00	-	388.000,00	36.916,00	424.916,00
80	Buko	Sekolah Dasar Negeri 1 Paisubatu	8.273.004,00	72.324,00	8.345.328,00	103.147.000	49.542,00		103.196.542,00	27.600.000,00	79.320.004,00	4.500.000,00	111.420.004,00	72.324,00		-	49.542,00	49.542,00
81	Buko	Sekolah Dasar Negeri Batangono	399.526,65	46.431,00	445.957,65	104.940.000	40.099,00		104.980.099,00	25.200.000,00	79.760.527,00	-	104.960.527,00	-		378.999,65	86.530,00	465.529,65
82	Buko	Sekolah Dasar Negeri Ebenheiser	3.528.000,00	14.378,00	3.542.378,00	31.145.095	19.716,00		31.164.811,00	10.200.000,00	24.454.000,00	-	34.654.000,00	14.378,00		19.095,00	19.716,00	38.811,00
83	Buko	Sekolah Dasar Negeri Leme-Leme	358.163,00	38.377,00	396.540,00	87.120.000	34.832,00		87.154.832,00	22.200.000,00	64.928.163,00	350.000,00	87.478.163,00	38.377,00	0	-	34.832,00	34.832,00
84	Buko	Sekolah Dasar Negeri Olusi	973.098,00	23.531,00	996.629,00	59.400.000	22.937,00	5.546.000,00	64.968.937,00	13.500.000,00	45.134.098,00	1.500.000,00	60.134.098,00	23.531,00	10.363,00	5.785.000,00	12.574,00	5.797.574,00
85	Buko	Sekolah Dasar Negeri Pelinglalomo	2.567.879,00	57.822,00	2.625.701,00	92.068.000	30.750,00		92.098.750,00	10.500.000,00	80.141.692,00	-	90.641.692,00	57.822,00	897,00	3.994.187,00	29.853,00	4.024.040,00
86	Buko	Sekolah Dasar Negeri Pembina Tataba	1.940.269,00	20.970,00	1.961.239,00	60.387.500	22.799,44		60.410.299,44	28.800.000,00	31.618.769,00	-	60.418.769,00	20.970,00	22.797,00	1.909.000,00	2,44	1.909.002,44
87	Buko	Sekolah Dasar Negeri Tatendeng	306.000,00	47.215,00	353.215,00	80.190.000	50.829,00	2.087.910,00	82.328.739,00	37.200.000,00	42.960.000,00	-	80.160.000,00	47.125,00		2.423.910,00	50.919,00	2.474.829,00
88	Buko	Sekolah Dasar Negeri Inpres Malanggong	347.938,00	35.929,00	383.867,00	80.189.270	30.291,00		80.219.561,00	19.200.000,00	61.023.278,00	-	80.223.278,00	35.929,00	30.291,00	313.930,00	-	313.930,00
89	Tinangkung Selatan	Sekolah Dasar Inpres Kampung Baru	4.955.000,00	72.335,00	5.027.335,00	163.350.000	68.295,00		163.418.295,00	22.800.000,00	119.705.000,00	25.800.000,00	168.305.000,00	-	-	-	140.630,00	140.630,00

Lampiran 04

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOS - SILPA PEMKAB			MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG						SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BOS - SILPA PEMKAB		
						PENERIMAAN 2023				BELANJA				PENYETORAN ATAS JASA GIRO TAHUN SEBELUMNYA	PENYETORAN ATAS JASA GIRO TAHUN 2023			
			KAS DARI PENDAPATAN DANA BOS - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB	DANA BOS	JASA GIRO	PENGEMBALIAN TEMUAN	JUMLAH MUTASI TAMBAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH MUTASI KURANG			KAS DARI PENDAPATAN DANA BOS - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14) = (11) + (12) + (13)	(15)	(16)	(17)	(18) = (5) + (6) - (15) - (16)	(19) = (17) + (18)
90	Tinangkung Selatan	Sekolah Dasar Inpres Lomboan	21.491,00	5.077,00	26.568,00	30.420.000	17.789,00		30.437.789,00	-	12.441.491,00	18.000.000,00	30.441.491,00	5.077,00	0	-	17.789,00	17.789,00
91	Tinangkung Selatan	Sekolah Dasar Inpres Mansamat B	1.079.232,00	54.232,00	1.133.464,00	107.910.000	53.695,00	1.304.999,00	109.268.694,00	9.000.000,00	99.989.232,00	-	108.989.232,00	54.232,00	53.695,00	1.304.999,00	-	1.304.999,00
92	Tinangkung Selatan	Sekolah Dasar Negeri Bobu	15.874,00	48.182,00	64.056,00	141.300.000	57.585,00		141.357.585,00	20.580.000,00	94.144.400,00	26.575.600,00	141.300.000,00	48.182,00	0	15.874,00	57.585,00	73.459,00
93	Tinangkung Selatan	Sekolah Dasar Negeri Gansal	1.306.000,00	35.408,00	1.341.408,00	125.460.000	55.150,00		125.515.150,00	12.000.000,00	78.731.500,00	36.034.500,00	126.766.000,00	35.408,00	0	-	55.150,00	55.150,00
94	Tinangkung Selatan	Sekolah Dasar Negeri Mansamat A	818.800,00	43.445,00	862.245,00	99.990.000	31.784,00		100.021.784,00	14.400.000,00	76.408.500,00	9.990.000,00	100.798.500,00	43.445,00	0	10.300,00	31.784,00	42.084,00
95	Tinangkung Selatan	Sekolah Dasar Negeri Paisumosoni	2.222.724,00	24.941,00	2.247.665,00	58.410.000	20.800,00		58.430.800,00	12.575.000,00	45.835.000,00	-	58.410.000,00	24.941,00	0	2.222.724,00	20.800,00	2.243.524,00
96	Tinangkung Selatan	Sekolah Dasar Negeri Sasampean	603.000,00	11.477,00	614.477,00	23.760.000	8.185,00		23.768.185,00	1.500.000,00	22.344.400,00	384.600,00	24.229.000,00	11.477,00	8.185	134.000,00	-	134.000,00
97	Tinangkung Selatan	Sekolah Dasar Negeri Tobing	13.581,00	278.201,00	291.782,00	71.280.000	23.082,00		71.303.082,00	12.000.000,00	45.780.000,00	13.500.000,00	71.280.000,00	278.201,00	23.082	13.581,00	-	13.581,00
98	Tinangkung Selatan	Sekolah Dasar Negeri Inpres Lesantobungin	10.000,00	45.037,00	55.037,00	89.090.000	22.455,00		89.112.455,00	29.400.000,00	50.690.000,00	9.000.000,00	89.090.000,00	45.037,00	22.455,00	10.000,00	-	10.000,00
99	Tinangkung Selatan	Sekolah Dasar Negeri Inpres Tinangkung	55.902,00	54.700,00	110.602,00	106.920.000	24.152,00		106.944.152,00	15.750.000,00	74.191.402,00	17.000.000,00	106.941.402,00	54.700,00	61,00	34.500,00	24.091,00	58.591,00
100	Totikum Selatan	Sekolah Dasar Inpres 1 Kalumbatan	1.055.462,00	194.475,00	1.249.937,00	53.750.000	22.745,00		53.772.745,00	15.600.000,00	38.300.000,00	-	53.900.000,00	194.475,00	-	905.462,00	22.745,00	928.207,00
101	Totikum Selatan	Sekolah Dasar Inpres 2 Kalumbatan	370.000,00	880.472,00	1.250.472,00	135.276.000	37.359,00		135.313.359,00	35.400.000,00	91.600.000,00	7.716.537,00	134.716.537,00	806.584,00		929.463,00	111.247,00	1.040.710,00
102	Totikum Selatan	Sekolah Dasar Inpres 3 Kalumbatan	6.629.097,00	898.758,00	7.527.855,00	232.283.000	41.972,00	6.100.000,00	238.424.972,00	23.000.000,00	190.253.482,00	7.700.000,00	220.953.482,00	898.758,00		24.058.615,00	41.972,00	24.100.587,00
103	Totikum Selatan	Sekolah Dasar Inpres Kanali	13.083,00	19.455,00	32.538,00	44.550.000	7.419,00		44.557.419,00	14.700.000,00	23.663.083,00	6.200.000,00	44.563.083,00	19.455,00	7.419			
104	Totikum Selatan	Sekolah Dasar Negeri Lobuton	717.500,00	625.458,00	1.342.958,00	74.890.000	21.166,00		74.911.166,00	16.000.000,00	53.290.000,00	-	69.290.000,00	200.000,00	-	6.317.500,00	446.624,00	6.764.124,00
105	Totikum Selatan	Sekolah Dasar Negeri Mata	-	35.284,00	35.284,00	86.099.000	26.716,00	403.000,00	86.528.716,00	21.600.000,00	64.499.000,00	-	86.099.000,00	35.284,00		403.000,00	26.716,00	429.716,00
106	Totikum Selatan	Sekolah Dasar Negeri Tobungku	8.087.959,00	214.979,00	8.302.938,00	53.420.000	19.026,00	1.036.000,00	54.475.026,00	10.400.000,00	49.933.549,00	-	60.333.549,00	214.979,00	19.026	2.210.410,00	-	2.210.410,00
107	Totikum Selatan	Sekolah Dasar Negeri Tonuson	2.100.000,00	29.027,00	2.129.027,00	78.911.000	33.798,00		78.944.798,00	19.800.000,00	54.293.560,00	3.212.000,00	77.305.560,00	29.027,00		3.705.440,00	33.798,00	3.739.238,00
108	Peling Tengah	Sekolah Dasar Inpres 2 Patukuki	712.000,00	58.709,00	770.709,00	138.886.000	48.555,00		138.934.555,00	28.500.000,00	73.153.000,00	35.350.000,00	137.003.000,00	58.709,00		2.595.000,00	48.555,00	2.643.555,00
109	Peling Tengah	Sekolah Dasar Inpres Luk	610.000,00	30.158,00	640.158,00	62.031.000	9.744,00		62.040.744,00	22.950.000,00	39.081.000,00	610.000,00	62.641.000,00	-		-	39.902,00	39.902,00
110	Peling Tengah	Sekolah Dasar Inpres Popisi	398.640,00	35.736,00	434.376,00	73.851.360	24.538,00		73.875.898,00	18.600.000,00	48.749.888,00	6.897.873,00	74.247.761,00	35.736,00	3,00	2.239,00	24.535,00	26.774,00
111	Peling Tengah	Sekolah Dasar Inpres Sampekonan	59.715,00	14.187,00	73.902,00	62.370.000	21.519,00		62.391.519,00	23.400.000,00	38.970.000,00	-	62.370.000,00	14.187,00	12.312,00	59.715,00	9.207,00	68.922,00
112	Peling Tengah	Sekolah Dasar Inpres Tabing	396.356,00	11.356,00	407.712,00	46.530.000	17.085,00		46.547.085,00	14.400.000,00	32.130.000,00	350.000,00	46.880.000,00	11.356,00		46.356,00	17.085,00	63.441,00
113	Peling Tengah	Sekolah Dasar Negeri 1 Patukuki	-	40.603,00	40.603,00	107.910.000	27.423,00		107.937.423,00	28.620.000,00	79.290.000,00	-	107.910.000,00	40.603,00		-	27.423,00	27.423,00
114	Peling Tengah	Sekolah Dasar Negeri Bakum	937.500,00	14.640,00	952.140,00	72.560.000	25.481,00		72.585.481,00	14.900.000,00	51.139.000,00	6.500.000,00	72.539.000,00	-		958.500,00	40.121,00	998.621,00
115	Peling Tengah	Sekolah Dasar Negeri Balombong	-	20.376,00	20.376,00	84.150.000	21.206,00		84.171.206,00	21.600.000,00	51.001.800,00	10.599.575,00	83.201.375,00	20.376,00	21.206	948.625,00	-	948.625,00
116	Peling Tengah	Sekolah Dasar Negeri Kolak	-	34.917,00	34.917,00	84.150.000	26.277,00		84.176.277,00	22.200.000,00	57.950.000,00	4.000.000,00	84.150.000,00	34.917,00	12.430,00	-	13.847,00	13.847,00
117	Peling Tengah	Sekolah Dasar Negeri Koyobunga	427.500,30	20.235,00	447.735,30	67.320.000	23.077,00		67.343.077,00	5.400.000,00	59.920.000,00	1.998.000,00	67.318.000,00	20.235,00	22.987,00	429.500,30	90,00	429.590,30
118	Peling Tengah	Sekolah Dasar Negeri Tolulos	4.000,00	32.484,00	36.484,00	67.320.000	24.316,00		67.344.316,00	22.200.000,00	45.124.000,00	-	67.324.000,00	32.484,00		-	24.316,00	24.316,00
119	Peling Tengah	Sekolah Dasar Negeri Inpres Lempek	354.000,00	18.422,00	372.422,00	35.640.000	11.699,00		35.651.699,00	15.600.000,00	20.394.000,00	-	35.994.000,00	18.422,00	11.699,00			
120	Peling Tengah	Sekolah Dasar Negeri Inpres Tombos	317.486,00	16.877,00	334.363,00	90.090.000	29.747,00		90.119.747,00	22.800.000,00	54.944.000,00	12.350.000,00	90.094.000,00	16.877,00	17.060,00	313.486,00	12.687,00	326.173,00
121	Peling Tengah	Sekolah Dasar Negeri Inpres Tunggaling	350.000,00	12.335,00	362.335,00	56.080.000	18.468,00		56.098.468,00	13.800.000,00	38.880.000,00	3.750.000,00	56.430.000,00	12.335,00		-	18.468,00	18.468,00
122	Peling Tengah	Sekolah Dasar Negeri Alakasing	699.999,65	59.399,00	759.398,65	126.720.000	39.810,00		126.759.810,00	30.000.000,00	89.719.999,65	7.700.000,00	127.419.999,65	59.399,00		-	39.810,00	39.810,00
123	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Inpres Lukpanenteng	370.699,00	28.790,00	399.489,00	101.970.000	11.859,00		101.981.859,00	38.000.000,00	62.990.699,00	-	100.990.699,00	28.790,00		1.350.000,00	11.859,00	1.361.859,00
124	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Inpres Mandok	35.226,00	16.937,00	52.163,00	32.670.000	18.079,00		32.688.079,00	10.800.000,00	17.905.226,00	4.000.000,00	32.705.226,00	16.937,00	18.079,00			
125	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Inpres Minanga	2.354.270,00	24.763,00	2.379.033,00	42.551.000	24.161,00		42.575.161,00	8.288.000,00	35.667.270,00	-	43.955.270,00	24.763,00	13.509,00	950.000,00	10.652,00	960.652,00
126	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Inpres Poganda	-	24.807,00	24.807,00	26.730.000	10.074,00		26.740.074,00	9.600.000,00	17.130.000,00	-	26.730.000,00	24.807,00		-	10.074,00	10.074,00
127	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Negeri Bakalinga	186.942,00	47.437,00	234.379,00	99.000.000	58.419,00		99.058.419,00	29.850.000,00	67.903.482,00	-	97.753.482,00	47.437,00		1.433.460,00	58.419,00	1.491.879,00
128	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Negeri Bolubung	378.000,00	7.913,00	385.913,00	51.478.500	15.568,00		51.494.068,00	20.450.000,00	30.506.000,00	-	50.956.000,00	7.913,00	7.614,00	900.500,00	7.954,00	908.454,00
129	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Negeri Montop	6.016.520,39	63.059,00	6.079.579,39	126.720.000	25.577,00		126.745.577,00	40.800.000,00	91.711.471,00	-	132.511.471,00	63.059,00	19.342,00	225.049,39	6.235,00	231.284,39
130	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Negeri Ombuli	-	50.194,00	50.194,00	82.072.750	51.905,00		82.124.655,00	18.000.000,00	56.272.750,00	7.800.000,00	82.072.750,00	50.194,00	51.905,00	-	-	-
131	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Negeri Paisuluno	5.402.000,00	25.103,00	5.427.103,00	38.976.258	45.058,00		39.021.316,00	16.800.000,00	27.577.000,00	-	44.377.000,00	25.103,00	20.091,00	1.258,00	24.967,00	26.225,00
132	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Negeri Sabang	8.761.250,00	40.629,00	8.801.879,00	79.200.000	40.047,00	2.045.000,00	81.285.047,00	13.500.000,00	59.961.250,00	14.500.000,00	87.961.250,00	40.629,00	11.163,00	2.045.000,00	28.884,00	2.073.884,00
133	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Negeri Sambulangan	623.646,00	51.025,00	674.671,00	114.840.000	61.364,00		114.901.364,00	30.000.000,00	85.463.646,00	-	115.463.646,00	51.025,00	38.775,00	-	22.589,00	22.589,00
134	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Inpres Bangunemo	370.702,00	34.839,00	405.541,00	71.280.000	20.280,00		71.300.280,00	26.400.000,00	33.580.000,00	11.300.000,00	71.280.000,00	34.839,00	20.280,00	370.702,00	-	370.702,00
135	Bulagi Utara	Sekolah Dasar Negeri Inpres Koyobunga	759.000,00	16.751,00	775.751,00	38.607.800	16.234,00		38.624.034,00	13.200.000,00	25.790.800,00	-	38.990.800,00	16.751,00	7.968,00	376.000,00	8.266,00	384.266,00
136	Buko Selatan	Sekolah Dasar Inpres 3 Lumbi-Lumbia	2.475.000,00	44.750,00	2.519.750,00	92.070.000	29.736,00		92.099.736,00	31.200.000,00	60.870.000,00	2.473.080,00	94.543.080,00	44.750,00	29.736,00	1.920,00	-	1.920,00
137	Buko Selatan	Sekolah Dasar Inpres Apal	2.110.840,00	49.154,00	2.159.994,00	77.108.400	19.602,00	536.000,00	77.664.002,00	26.400.000,00	41.120.000,00	10.000.000,00	77.520.000,00	49.154,00	-	2.235.240,00	19.602,00	2.254.842,00

Lampiran 04

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOS - SILPA PEMKAB			MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG						SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BOS - SILPA PEMKAB		
						PENERIMAAN 2023				BELANJA				PENYETORAN ATAS JASA GIRO TAHUN SEBELUMNYA	PENYETORAN ATAS JASA GIRO TAHUN 2023			
			KAS DARI PENDAPATAN DANA BOS - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB	DANA BOS	JASA GIRO	PENGEMBALIAN TEMUAN	JUMLAH MUTASI TAMBAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH MUTASI KURANG			KAS DARI PENDAPATAN DANA BOS - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14) = (11) + (12) + (13)	(15)	(16)	(17)	(18) = (5) + (6) - (15) - (16)	(19) = (17) + (18)
138	Buko Selatan	Sekolah Dasar Inpres Buko	43.102,00	20.274,00	63.376,00	24.750.000	10.260,00		24.760.260,00	11.400.000,00	13.393.102,00	-	24.793.102,00	20.274,00	7.155,00	-	3.105,00	3.105,00
139	Buko Selatan	Sekolah Dasar Inpres Labangun	357.933,00	22.812,00	380.745,00	76.526.000	32.111,00		76.558.111,00	24.600.000,00	39.333.933,00	12.600.000,00	76.533.933,00	22.812,00	-	350.000,00	32.111,00	382.111,00
140	Buko Selatan	Sekolah Dasar Inpres Matamaling	-	34.909,00	34.909,00	62.370.000	24.606,00		62.394.606,00	15.500.000,00	46.870.000,00	-	62.370.000,00	34.909,00	22.212,00	-	2.394,00	2.394,00
141	Buko Selatan	Sekolah Dasar Inpres Sapelang	14.500,00	18.505,00	33.005,00	48.208.000	26.978,00		48.234.978,00	5.100.000,00	34.797.500,00	8.325.000,00	48.222.500,00	18.505,00	-	-	26.978,00	26.978,00
142	Buko Selatan	Sekolah Dasar Inpres Seano	15.550.873,00	20.309,00	15.571.182,00	72.990.000	30.231,00		73.020.231,00	16.500.000,00	44.215.873,00	24.525.000,00	85.240.873,00	6.074,00	30.231,00	3.300.000,00	14.235,00	3.314.235,00
143	Buko Selatan	Sekolah Dasar Inpres Taepa	-	15.331,00	15.331,00	113.580.000	36.952,00		113.616.952,00	18.000.000,00	86.385.000,00	9.195.000,00	113.580.000,00	15.331,00	10.380,00	-	26.572,00	26.572,00
144	Buko Selatan	Sekolah Dasar Inpres Tatabau	2.347.416,00	38.983,00	2.386.399,00	77.857.500	25.668,00		77.883.168,00	38.400.000,00	41.792.933,00	-	80.192.933,00	38.983,00	12.656,00	11.983,00	13.012,00	24.995,00
145	Buko Selatan	Sekolah Dasar Negeri 1 Lumbi-Lumbia	494.000,00	72.223,00	566.223,00	157.060.000	53.155,00		157.113.155,00	48.000.000,00	62.410.000,00	40.492.000,00	150.902.000,00	72.223,00	-	6.652.000,00	53.155,00	6.705.155,00
146	Buko Selatan	Sekolah Dasar Negeri Alani	-	8.366,00	8.366,00	15.840.000	5.074,00		15.845.074,00	6.000.000,00	9.840.000,00	-	15.840.000,00	8.366,00	5.074,00	-	-	-
147	Buko selatan	Sekolah Dasar Negeri Inpres 2 Lumbi-Lumbia	349.800,00	68.081,00	417.881,00	121.500.000	49.753,00	350.000,00	121.899.753,00	31.200.000,00	79.300.000,00	11.000.000,00	121.500.000,00	68.081,00	25.524,00	699.800,00	24.229,00	724.029,00
148	Tinangkung Utara	Sekolah Dasar Negeri Lalong	2.059.523,00	62.384,00	2.121.907,00	124.713.850	58.858,00		124.772.708,00	35.760.000,00	67.797.373,00	22.866.000,00	126.423.373,00	62.384,00		350.000,00	58.858,00	408.858,00
149	Tinangkung Utara	Sekolah Dasar Negeri Luksagu	1.231.461,80	12.685,00	1.244.146,80	27.474.500	11.012,00		27.485.512,00	9.600.000,00	18.723.962,00		28.323.962,00	12.685,00		381.999,80	11.012,00	393.011,80
150	Tinangkung Utara	Sekolah Dasar Negeri Palam	922.500,00	68.079,00	990.579,00	136.202.500	64.049,00		136.266.549,00	42.600.000,00	93.228.800,00	1.263.200,00	137.092.000,00	68.079,00	46.512,00	33.000,00	17.537,00	50.537,00
151	Tinangkung Utara	Sekolah Dasar Negeri Ponding-Ponding	1.072.600,00	44.442,00	1.117.042,00	89.242.400	58.292,00		89.300.692,00	27.450.000,00	51.680.000,00	11.164.200,00	90.294.200,00	44.442,00	600,00	20.800,00	57.692,00	78.492,00
152	Tinangkung Utara	Sekolah Dasar Negeri Tatakalai	6.873.832,00	98.452,00	6.972.284,00	149.093.000	64.037,00		149.157.037,00	46.350.000,00	71.489.432,00	37.730.400,00	155.569.832,00	98.452,00		397.000,00	64.037,00	461.037,00
153	Tinangkung Utara	Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangpanga	1.000.000,00	20.550,00	1.020.550,00	55.440.000	11.552,00		55.451.552,00	16.800.000,00	39.640.000,00	-	56.440.000,00	20.550,00		-	11.552,00	11.552,00
154	Tinangkung Utara	Sekolah Dasar Negeri Inpres Luksagu	10.866.413,00	46.251,00	10.912.664,00	96.320.026	55.991,00		96.376.017,00	30.300.000,00	56.313.413,00	16.000.000,00	102.613.413,00	46.251,00		4.573.026,00	55.991,00	4.629.017,00
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)																		
155	Totikum	SMP Negeri 1 Totikum	7.546,00	56.652,00	64.198,00	156.250.000	55.800,00		156.305.800,00	55.716.000,00	67.531.546,00	32.470.000,00	155.717.546,00	56.652,00	23.112,00	540.000,00	32.688,00	572.688,00
156	Totikum	SMP Negeri 2 Totikum	5.798,00	8.979,00	14.777,00	18.750.000	6.222,00		18.756.222,00	7.632.000,00	11.123.798,00	-	18.755.798,00	8.979,00		-	6.222,00	6.222,00
157	Totikum	SMP Negeri 3 Totikum	384.889,00	70.184,00	455.073,00	120.000.000	48.825,00		120.048.825,00	32.400.000,00	69.704.889,00	16.000.000,00	118.104.889,00	70.184,00		2.280.000,00	48.825,00	2.328.825,00
158	Totikum	SMP Negeri 4 Totikum	240.951,00	96.088,00	337.039,00	218.750.000	78.555,00		218.828.555,00	51.200.000,00	145.810.951,00	19.900.000,00	216.910.951,00	96.088,00		2.080.000,00	78.555,00	2.158.555,00
159	Bulagi Selatan	SMP Negeri 1 Bulagi Selatan	42.042,00	94.415,00	136.457,00	155.000.000	44.369,00		155.044.369,00	51.364.000,00	101.678.042,00	-	153.042.042,00	94.415,00	44.146,00	2.000.000,00	223,00	2.000.223,00
160	Bulagi Selatan	SMP Negeri 2 Bulagi Selatan	385.612,00	75.981,00	461.593,00	129.650.000	36.654,00		129.686.654,00	45.980.000,00	80.205.612,00	3.350.000,00	129.535.612,00	75.981,00	33.094,00	500.000,00	3.560,00	503.560,00
161	Bulagi Selatan	SMP Negeri 3 Bulagi Selatan	350.000,00	40.711,00	390.711,00	74.650.000	29.102,00		74.679.102,00	20.808.000,00	47.742.000,00	6.450.000,00	75.000.000,00	40.711,00	1.660,00	-	27.442,00	27.442,00
162	Bulagi Selatan	SMP Negeri Satap Tatarandang	714.030,00	22.833,00	736.863,00	116.800.000	51.176,00		116.851.176,00	18.600.000,00	58.052.000,00	40.848.000,00	117.500.000,00	22.833,00	36.532,00	14.030,00	14.644,00	28.674,00
163	Bulagi	SMP Negeri 1 Bulagi	362.500,00	93.633,00	456.133,00	184.942.000	62.422,00		185.004.422,00	92.500.000,00	92.500.000,00	-	185.000.000,00	-		304.500,00	156.055,00	460.555,00
164	Bulagi	SMP Negeri 2 Bulagi	1.769.964,00	130.410,00	1.900.374,00	168.416.000	89.747,00		168.505.747,00	50.050.000,00	91.669.944,00	26.600.000,00	168.319.944,00	130.410,00		1.866.020,00	89.747,00	1.955.767,00
165	Bulagi	SMP Negeri 3 Bulagi	76.766,00	72.028,00	148.794,00	130.000.000	61.236,00		130.061.236,00	21.900.000,00	105.676.766,00	2.500.000,00	130.076.766,00	72.028,00	42.398,00	-	18.838,00	18.838,00
166	Bulagi	SMP Negeri Satu Atap Alul	138.331,00	15.897,00	154.228,00	47.500.000	23.140,00		47.523.140,00	12.900.000,00	34.276.331,00	350.000,00	47.526.331,00	15.897,00	5.544,00	112.000,00	17.596,00	129.596,00
167	Bulagi	SMP Negeri 5 Satap Bulagi	392.500,00	43.859,00	436.359,00	57.150.000	27.406,00		57.177.406,00	3.840.000,00	48.972.500,00	4.730.000,00	57.542.500,00	43.859,00	15.751,00	-	11.655,00	11.655,00
168	Liang	SMP Negeri 1 Liang	-	112.588,00	112.588,00	215.000.000	124.315,00		215.124.315,00	12.000.000,00	186.250.000,00	16.750.000,00	215.000.000,00	112.588,00	31,00	-	124.284,00	124.284,00
169	Liang	SMP Negeri 2 Liang	1.537.904,00	25.870,00	1.563.774,00	161.250.000	51.779,00		161.301.779,00	21.600.000,00	138.012.904,00	2.800.000,00	162.412.904,00	25.870,00		375.000,00	51.779,00	426.779,00
170	Liang	SMP Negeri 3 Liang	720.660,00	37.681,00	758.341,00	78.535.000	26.580,00		78.561.580,00	33.600.000,00	41.408.660,00	3.500.000,00	78.508.660,00	37.681,00	16.716,00	747.000,00	9.864,00	756.864,00
171	Liang	SMP Negeri Satu Atap Kindandal	3.000,00	21.927,00	24.927,00	84.997.000	37.196,00		85.034.196,00	15.100.000,00	51.030.000,00	18.870.000,00	85.000.000,00	21.927,00	37.196,00	-	-	-
172	Liang	SMP Negeri Satu Atap Mamulusan	350.000,00	13.548,00	363.548,00	27.500.000	13.801,00		27.513.801,00	10.152.000,00	17.348.000,00	350.000,00	27.850.000,00	13.548,00		-	13.801,00	13.801,00
173	Tinangkung	SMP Negeri 1 Tinangkung	11.050.638,00	567.271,00	11.617.909,00	653.730.706	511.862,00		654.242.568,00	99.600.000,00	446.402.340,00	95.516.400,00	641.518.740,00	567.271,00	239.075,00	23.262.604,00	272.787,00	23.535.391,00
174	Tinangkung	SMP Negeri 2 Tinangkung	4.907.000,00	82.321,00	4.989.321,00	153.847.000	65.144,00		153.912.144,00	53.520.000,00	105.234.000,00	-	158.754.000,00	-		-	147.465,00	147.465,00
175	Tinangkung	SMP Negeri 3 Tinangkung	-	51.168,00	51.168,00	268.750.000	82.829,00		268.832.829,00	65.460.000,00	178.555.200,00	24.379.200,00	268.394.400,00	51.168,00	32.127,00	355.600,00	50.702,00	406.302,00
176	Buko	SMP Negeri 1 Buko	20.557.199,00	175.912,00	20.733.111,00	256.250.000	146.673,00	741.287,00	257.137.960,00	73.200.000,00	186.254.199,00	17.333.000,00	276.787.199,00	175.912,00	146.673,00	761.287,00	-	761.287,00
177	Buko	SMP Negeri 2 Buko	355.000,00	41.955,00	396.955,00	137.500.000	48.945,00		137.548.945,00	32.160.000,00	88.021.300,00	10.789.200,00	130.970.500,00	41.955,00	40.662,00	6.884.500,00	8.283,00	6.892.783,00
178	Buko	SMP Negeri Satap Ebenheizer	35.000,00	10.326,00	45.326,00	17.500.000	6.294,00		17.506.294,00	6.324.000,00	11.176.000,00	-	17.500.000,00	10.326,00	-	35.000,00	6.294,00	41.294,00
179	Buko	SMP Negeri Satu Atap Okulo	79.301,00	25.359,00	104.660,00	86.250.000	40.965,00		86.290.965,00	17.520.000,00	59.959.301,00	8.850.000,00	86.329.301,00	25.359,00	40.965,00	-	-	-
180	Buko	SMP Negeri Satu Atap Tatendeng	9.261,00	26.518,00	35.779,00	52.500.000	19.830,00		52.519.830,00	7.560.000,00	44.940.000,00	-	52.500.000,00	26.518,00	19.830,00	9.261,00	-	9.261,00
181	Tinangkung Selatan	SMP Negeri 1 Tinangkung Selatan	-	129.619,00	129.619,00	222.432.000	86.600,00		222.518.600,00	64.080.000,00	155.852.000,00	2.500.000,00	222.432.000,00	129.619,00	59.782,00	-	26.818,00	26.818,00
182	Tinangkung Selatan	SMP Negeri 2 Tinangkung Selatan	42.000,00	30.659,00	72.659,00	64.993.500	21.360,00		65.014.860,00	16.932.000,00	37.603.500,00	10.500.000,00	65.035.500,00	30.659,00	10.324,00	-	11.036,00	11.036,00
183	Totikum Selatan	SMP Negeri 1 Totikum Selatan	113.000.000,00	264.842,00	113.264.842,00	236.250.000	478.984,00		236.728.984,00	94.232.000,00	196.504.000,00	42.422.000,00	333.158.000,00	264.842,00	-	16.092.000,00	478.984,00	16.570.984,00
184	Totikum Selatan	SMP Negeri 2 Satu Atap Totikum Selatan	350.000,00	28.377,00	378.377,00	61.250.000	13.954,00		61.263.954,00	9.640.000,00	50.032.000,00	-	59.672.000,00	28.377,00	13.954	1.928.000,00	-	1.928.000,00

Lampiran 04

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL KAS DI BENDAHARA BOS - SILPA PEMKAB			MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG						SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BOS - SILPA PEMKAB		
						PENERIMAAN 2023				BELANJA				PENYETORAN ATAS JASA GIRO TAHUN SEBELUMNYA	PENYETORAN ATAS JASA GIRO TAHUN 2023			
			KAS DARI PENDAPATAN DANA BOS - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB	DANA BOS	JASA GIRO	PENGEMBALIAN TEMUAN	JUMLAH MUTASI TAMBAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH MUTASI KURANG			KAS DARI PENDAPATAN DANA BOS - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) + (9)	(11)	(12)	(13)	(14) = (11) + (12) + (13)	(15)	(16)	(17)	(18) = (5) + (6) - (15) - (16)	(19) = (17) + (18)
185	Totikum Selatan	SMP Negeri 2 Totikum Selatan	5.065.200,00	17.009,00	5.082.209,00	52.500.000	29.597,00	4.224.000,00	56.753.597,00	21.600.000,00	32.940.606,00	3.000.000,00	57.540.606,00	17.009,00	-	4.248.594,00	29.597,00	4.278.191,00
186	Peling Tengah	SMP Negeri 1 Peling Tengah	500.088,00	127.995,00	628.083,00	255.000.000	75.276,00		255.075.276,00	82.050.000,00	170.075.088,00	3.375.000,00	255.500.088,00	127.995,00	43.007,00	-	32.269,00	32.269,00
187	Peling Tengah	SMP Negeri 2 Peling Tengah	-	36.910,00	36.910,00	121.250.000	41.180,00		121.291.180,00	54.140.000,00	53.750.000,00	7.495.275,00	115.385.275,00	36.910,00		5.864.725,00	41.180,00	5.905.905,00
188	Peling Tengah	SMP Negeri Satu Atap Popisi	350.000,00	19.691,00	369.691,00	35.000.000	15.021,00		35.015.021,00	17.400.000,00	17.600.000,00	-	35.000.000,00	-		350.000,00	34.712,00	384.712,00
189	Peling Tengah	SMP Negeri Satu Atap Tolulos	27.500,00	34.035,00	61.535,00	87.500.000	42.509,00		87.542.509,00	7.200.000,00	79.077.500,00	1.249.766,00	87.527.266,00	34.035,00	42.509,00	234,00	-	234,00
190	Bulagi Utara	SMP Negeri 1 Bulagi Utara	750.000,00	68.776,00	818.776,00	100.900.000	44.166,00		100.944.166,00	6.480.000,00	91.670.000,00	3.500.000,00	101.650.000,00	68.776,00		-	44.166,00	44.166,00
191	Bulagi Utara	SMP Negeri 2 Bulagi Utara	392.000,00	19.467,00	411.467,00	80.000.000	48.865,00		80.048.865,00	18.000.000,00	62.392.000,00	-	80.392.000,00	19.467,00	11.794,00	-	37.071,00	37.071,00
192	Bulagi Utara	SMP Negeri 3 Bulagi Utara	452.448,00	16.761,00	469.209,00	82.500.000	43.960,00		82.543.960,00	31.776.000,00	50.774.000,00	-	82.550.000,00	16.761,00	20.612,00	402.448,00	23.348,00	425.796,00
193	Bulagi Utara	SMP Negeri 4 Bulagi Utara	-	17.801,00	17.801,00	52.500.000	18.655,00		52.518.655,00	18.000.000,00	34.500.000,00	-	52.500.000,00	4.490,00	18.655,00	-	13.311,00	13.311,00
194	Bulagi Utara	SMP Negeri Satu Atap Bakalinga	369.826,00	15.650,00	385.476,00	60.000.000	46.147,00	1.101.000,00	61.147.147,00	17.550.000,00	42.636.000,00	-	60.186.000,00	15.650,00		1.284.826,00	46.147,00	1.330.973,00
195	Bulagi Utara	SMP Negeri Satu Atap Lukpanenteng	29.989,00	47.666,00	77.655,00	76.250.000	42.117,00		76.292.117,00	17.940.000,00	58.339.989,00	-	76.279.989,00	47.666,00	42.117,00	-	-	-
196	Bulagi Utara	SMP Negeri Satu Atap Ombuli	28.959,00	21.804,00	50.763,00	76.248.500	33.269,00		76.281.769,00	20.472.000,00	43.394.459,00	12.411.000,00	76.277.459,00	21.804,00		-	33.269,00	33.269,00
197	Buko Selatan	SMP Negeri 1 Buko Selatan	121.000,00	106.905,00	227.905,00	301.250.000	145.346,00		301.395.346,00	37.800.000,00	203.008.000,00	60.562.134,00	301.370.134,00	106.905,00	-	866,00	145.346,00	146.212,00
198	Buko Selatan	SMP Negeri 2 Buko Selatan	-	25.515,00	25.515,00	50.000.000	15.618,00		50.015.618,00	13.800.000,00	36.200.000,00	-	50.000.000,00	25.515,00	15.618,00		-	-
199	Buko Selatan	SMP Negeri 3 Buko Selatan	6.450.000,00	48.703,00	6.498.703,00	115.000.000	59.385,00		115.059.385,00	12.000.000,00	87.710.000,00	21.740.000,00	121.450.000,00	48.703,00	42.741,00	-	16.644,00	16.644,00
200	Buko Selatan	SMP Negeri Satu Atap Matamaling	539.965,00	12.058,00	552.023,00	70.000.000	34.188,00		70.034.188,00	7.200.000,00	50.390.465,00	12.429.780,00	70.020.245,00	12.058,00	34.188,00	519.720,00	-	519.720,00
201	Buko Selatan	SMP Negeri 4 Buko Selatan Satap	400.922,00	10.995,00	411.917,00	47.150.000	26.950,00		47.176.950,00	3.150.000,00	30.900.922,00	12.600.000,00	46.650.922,00	7.240,00	-	900.000,00	30.705,00	930.705,00
202	Tinangkung Utara	SMP negeri 1 Tinangkung Utara	1.004.179,00	139.426,00	1.143.605,00	213.484.000	78.354,00		213.562.354,00	59.640.000,00	150.110.000,00	4.000.000,00	213.750.000,00	139.426,00		738.179,00	78.354,00	816.533,00
203	Tinangkung Utara	SMP Negeri Satu Atap Palam	20.000,00	39.411,00	59.411,00	91.250.000	30.000,00		91.280.000,00	27.792.000,00	63.478.000,00	-	91.270.000,00	39.411,00		-	30.000,00	30.000,00
204	Bulagi Selatan	SMP Negeri 4 bulagi selatan	350.000,00	15.352,00	365.352,00	74.650.000	29.263,00		74.679.263,00	36.600.000,00	38.400.000,00	-	75.000.000,00	-		-	44.615,00	44.615,00
205	Liang	SMP Negeri 4 Liang	354.757,00	16.814,00	371.571,00	37.500.000	15.400,00		37.515.400,00	9.450.000,00	28.054.757,00	-	37.504.757,00	-	124,00	350.000,00	32.090,00	382.090,00
Jumlah			**425.567.137,51**	**10.256.004,00**	**435.823.141,51**	**18.895.579.613,00**	**8.148.425,76**	**84.037.129,00**	**18.987.765.167,76**	**4.951.020.500,00**	**12.659.283.819,21**	**1.527.244.410,00**	**19.137.548.729,21**	**9.195.010,00**	**3.535.766,00**	**267.635.150,30**	**5.673.653,76**	**273.308.804,06**

Lampiran 05

KAS DANA BOP PAUD DAN BOP PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PER 31 DESEMBER 2023

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL			PENDAPATAN			PENERIMAAN JASA GIRO 2023	BELANJA			PENYETORAN JASA GIRO SEBELUM 2023	PENYETORAN JASA GIRO TAHUN 2023	SALDO AKHIR		
		SILPA PEMKAB												SILPA PEMDA		
		KAS DARI PENDAPATAN DANA BOP - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB	BOP TAHAP 1	BOP TAHAP 2	BOP AFIRMASI / KINERJA		PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL			KAS DARI PENDAPATAN DANA BOP - SILPA SEKOLAH	KAS DARI JASA GIRO	JUMLAH SILPA PEMKAB
1	2	3	4	6 = 3 + 4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 16 + 17
BOP PAUD																
1	TK Negeri Alakasing	5.322.300,00	18.456,00	5.340.756,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	11.370,00	0,00	25.722.300,00	0,00	0,00	6.578,00	0,00	23.248,00	23.248,00
2	TK Negeri Bakalinga	1.200.000,00	31.176,00	1.231.176,00	9.300.000,00	9.114.000,00	0,00	6.868,00	0,00	19.614.000,00	0,00	7.465,00	1.919,00	0,00	28.660,00	28.660,00
3	TK Negeri Bangunemo	0,00	20.260,00	20.260,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	9.176,00	0,00	16.200.000,00	0,00	4.834,00	8.522,00	0,00	16.080,00	16.080,00
4	TK Negeri Bobu	8.977.100,00	27.764,00	9.004.864,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.216,00	0,00	44.977.100,00	0,00	10.118,00	11.088,00	0,00	24.774,00	24.774,00
5	TK Negeri Bulagi	3.600.000,00	12.543,00	3.612.543,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.553,00	0,00	19.200.000,00	0,00	5.549,00	4.781,00	600.000,00	10.766,00	610.766,00
6	TK Negeri Bunepuso	5.510.000,00	19.366,00	5.529.366,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	14.644,00	0,00	28.910.000,00	0,00	0,00	8.804,00	0,00	25.206,00	25.206,00
7	TK Negeri Harapan Baru Sosom	600.000,00	8.462,00	608.462,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	6.301,00	0,00	10.800.000,00	0,00	3.817,00	3.681,00	0,00	7.265,00	7.265,00
8	TK Negeri Kindandal	3.600.000,00	16.053,00	3.616.053,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	8.575,00	0,00	18.600.000,00	0,00	16.053,00	8.575,00	0,00	0,00	0,00
9	TK Negeri Kombutokan	13.800.000,00	21.692,00	13.821.692,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	16.503,00	0,00	47.400.000,00	0,00	21.692,00	9.126,00	0,00	7.377,00	7.377,00
10	TK Negeri Lalengan	16.760.400,00	20.144,00	16.780.544,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	7.873,00	0,00	16.040.400,00	1.920.000,00	0,00	4.293,00	12.000.000,00	23.724,00	12.023.724,00
11	TK Negeri Landonan Bebeau	20.740.000,00	34.120,00	20.774.120,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	15.757,00	0,00	40.255.000,00	0,00	0,00	9.773,00	7.485.000,00	40.104,00	7.525.104,00
12	TK Negeri Liang	2.400.000,00	11.434,00	2.411.434,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	7.403,00	0,00	14.230.000,00	0,00	4.469,00	7.403,00	770.000,00	6.965,00	776.965,00
13	TK Negeri Lolantang	3.600.100,00	15.842,00	3.615.942,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	6.630,00	0,00	14.400.000,00	0,00	7.750,00	3.669,00	100,00	11.053,00	11.153,00
14	TK Negeri Lopito	12.750.000,00	32.023,00	12.782.023,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	19.316,00	0,00	47.550.000,00	0,00	32.023,00	19.316,00	0,00	0,00	0,00
15	TK Negeri Luksagu	17.400.000,00	26.891,00	17.426.891,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	17.435,00	0,00	52.710.900,00	0,00	13.218,00	10.505,00	1.289.100,00	20.603,00	1.309.703,00
16	TK Negeri Meselesek	1.020.000,00	9.860,00	1.029.860,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	7.097,00	0,00	13.020.000,00	0,00	3.670,00	4.245,00	0,00	9.042,00	9.042,00
17	TK Negeri Lukpanenteng	8.400.000,00	25.601,00	8.425.601,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	11.881,00	0,00	30.000.000,00	0,00	13.220,00	6.524,00	0,00	17.738,00	17.738,00
18	TK Negeri Palam	8.400.000,00	23.164,00	8.423.164,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	18.070,00	0,00	41.400.000,00	0,00	9.117,00	11.508,00	0,00	20.609,00	20.609,00
19	TK Negeri Patukuki	12.860.000,00	30.980,00	12.890.980,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	17.800,00	0,00	48.260.000,00	0,00	12.414,00	10.590,00	0,00	25.776,00	25.776,00
20	TK Negeri Peling Lalomo	4.200.000,00	15.457,00	4.215.457,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.882,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	17.841,00	17.841,00
21	TK Negeri Percontohan	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	7.163,00	0,00	20.400.000,00	0,00	0,00	5.669,00	0,00	1.494,00	1.494,00
22	TK Negeri Pertiwi Salakan	18.373.900,00	45.249,00	18.419.149,00	25.800.000,00	25.800.000,00	60.000.000,00	60.744,00	0,00	61.465.900,00	8.508.000,00	29.737,00	60.744,00	60.000.000,00	15.512,00	60.015.512,00
23	TK Negeri Ponding-Ponding	13.800.000,00	25.052,00	13.825.052,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	17.309,00	0,00	48.600.000,00	0,00	12.749,00	10.232,00	0,00	19.380,00	19.380,00
24	TK Negeri Sakay	2.400.000,00	15.741,00	2.415.741,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	6.670,00	0,00	13.100.000,00	0,00	5.724,00	3.819,00	100.000,00	12.868,00	112.868,00
25	TK Negeri Salangano	6.000.000,00	24.430,00	6.024.430,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	12.519,00	0,00	27.600.000,00	0,00	8.123,00	6.879,00	0,00	21.947,00	21.947,00
26	TK Negeri Sampaka	3.600.000,00	32.998,00	3.632.998,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	9.974,00	0,00	18.000.000,00	0,00	9.332,00	5.135,00	0,00	28.505,00	28.505,00
27	TK Negeri Seasa	3.000.000,00	16.684,00	3.016.684,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.920,00	0,00	13.100.000,00	0,00	6.909,00	3.288,00	100.000,00	12.407,00	112.407,00
28	TK Negeri Tataba	4.800.000,00	17.320,00	4.817.320,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.206,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	4.667,00	0,00	20.859,00	20.859,00
29	TK Negeri Tatarandang	10.800.000,00	36.575,00	10.836.575,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	21.736,00	0,00	49.800.000,00	0,00	11.358,00	13.938,00	0,00	33.015,00	33.015,00
30	TK Pembina Salakan	17.200.000,00	29.257,00	17.229.257,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	17.137,00	0,00	37.000.000,00	0,00	9.217,00	9.813,00	12.000.000,00	27.364,00	12.027.364,00
Jumlah BOP PAUD		**231.113.800,00**	**664.594,00**	**231.778.394,00**	**343.800.000,00**	**343.614.000,00**	**60.000.000,00**	**402.728,00**	**0,00**	**873.755.600,00**	**10.428.000,00**	**258.558,00**	**278.582,00**	**94.344.200,00**	**530.182,00**	**94.874.382,00**
BOP Pendidikan dan Kesetaraan																
1	SKB Banggai Kepulauan	0,00	16.576,00	16.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,00	0,00	0,00	9.002,00	9.002,00
Jumlah BOP Pendidikan dan Kesetaraan		**0,00**	**16.576,00**	**16.576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.574,00**	**0,00**	**0,00**	**9.002,00**	**9.002,00**
Jumlah BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraa		**231.113.800,00**	**681.170,00**	**231.794.970,00**	**343.800.000,00**	**343.614.000,00**	**60.000.000,00**	**402.728,00**	**0,00**	**873.755.600,00**	**10.428.000,00**	**266.132,00**	**278.582,00**	**94.344.200,00**	**539.184,00**	**94.883.384,00**

Lampiran 06

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KAS DANA KAPITASI PADA FKTP
PER 31 DESEMBER 2023

NO	NAMA FKTP	SALDO AWAL	TAMBAH				KURANG					SILPA SEHARUSNYA	SETOR SILPA JKN KE RKUD	SALDO AKHIR		
			JASA GIRO 2023 BELUM DISETOR	PENERIMAAN			BELANJA				KOREKSI SILPA			SILPA JKN	JASA GIRO	JUMLAH
				PENERIMAAN DARI BPJS	PENGEMBALIAN TEMUAN	JUMLAH	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH						
1	Puskesmas Totikum	19.946.078,00	0,00	293.719.974,00	0,00	293.719.974,00	0,00	219.566.906,00	0,00	219.566.906,00	0,00	94.099.146,00	94.099.146,00	0,00	0,00	0,00
2	Puskesmas Salakan	207.211.146,00	0,00	451.354.464,00	0,00	451.354.464,00	0,00	205.947.954,00	37.342.100,00	243.290.054,00	29.972.678,00	385.302.878,00	384.885.378,00	417.500,00	0,00	417.500,00
3	Puskesmas Tataba	489.523,00	0,00	187.772.169,00	0,00	187.772.169,00	0,00	174.773.892,00	4.150.000,00	178.923.892,00	0,00	9.337.800,00	9.337.800,00	0,00	0,00	0,00
4	Puskesmas Lolantang	10.660.336,00	0,00	183.013.389,00	0,00	183.013.389,00	0,00	179.444.652,00	0,00	179.444.652,00	0,00	14.229.073,00	14.213.970,00	15.103,00	0,00	15.103,00
5	Puskesmas Bulagi	2.938.935,00	0,00	287.818.158,00	0,00	287.818.158,00	0,00	226.554.987,00	0,00	226.554.987,00	0,00	64.202.106,00	64.200.499,00	1.607,00	0,00	1.607,00
6	Puskesmas Patukuki	113.426,00	0,00	218.482.263,00	0,00	218.482.263,00	0,00	170.505.136,00	9.355.644,00	179.860.780,00	0,00	38.734.909,00	38.602.426,00	132.483,00	0,00	132.483,00
7	Puskesmas Sabang	3.467.168,00	0,00	238.348.800,00	0,00	238.348.800,00	0,00	224.451.929,00	0,00	224.451.929,00	0,00	17.364.039,00	17.364.039,00	0,00	0,00	0,00
8	Puskesmas Lumbi - Lumbia	4.439.761,00	0,00	176.428.175,00	0,00	176.428.175,00	0,00	172.605.669,00	3.500.000,00	176.105.669,00	0,00	4.762.267,00	4.587.267,00	175.000,00	0,00	175.000,00
9	Puskesmas Mansamat	24.828.116,00	0,00	196.529.493,00	0,00	196.529.493,00	0,00	130.161.510,00	4.653.490,00	134.815.000,00	0,00	86.542.609,00	86.542.609,00	0,00	0,00	0,00
10	Puskesmas Saleati	18.692.600,00	0,00	189.294.072,00	0,00	189.294.072,00	0,00	156.578.736,00	0,00	156.578.736,00	0,00	51.407.936,00	51.407.936,00	0,00	0,00	0,00
11	Puskesmas Tinangkung Utara	161.876.827,00	0,00	220.914.251,00	0,00	220.914.251,00	0,00	130.839.234,00	17.190.000,00	148.029.234,00	0,00	234.761.844,00	234.761.844,00	0,00	0,00	0,00
12	Puskesmas Totikum Selatan	2.859.116,00	0,00	211.888.712,00	0,00	211.888.712,00	0,00	158.686.548,00	0,00	158.686.548,00	0,00	56.061.280,00	56.061.280,00	0,00	0,00	0,00
13	Puskesmas Bakalan Raya	626.999,00	0,00	100.790.882,00	7.237.655,00	108.028.537,00	0,00	39.957.300,00	0,00	39.957.300,00	0,00	68.698.236,00	48.906.836,00	19.791.400,00	0,00	19.791.400,00
14	Puskesmas Bonepuso	10.239.400,00	146.567,00	30.588.323,00	0,00	30.588.323,00	0,00	27.369.994,00	0,00	27.369.994,00	0,00	13.457.729,00	0,00	13.457.729,00	146.567,00	13.604.296,00
15	RS Pratama Bilabanggai	818.930,00	0,00	302.430.844,00	0,00	302.430.844,00	0,00	300.725.765,00	0,00	300.725.765,00	0,00	2.524.009,00	2.524.009,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**469.208.361,00**	**146.567,00**	**3.289.373.969,00**	**7.237.655,00**	**3.296.611.624,00**	**0,00**	**2.518.170.212,00**	**76.191.234,00**	**2.594.361.446,00**	**29.972.678,00**	**1.141.485.861,00**	**1.107.495.039,00**	**33.990.822,00**	**146.567,00**	**34.137.389,00**

Lampiran 07

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KAS DI BENDAHARA BOK
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PKM	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA				SALDO AKHIR
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH	
1	Puskesmas Totikum	0,00	1.021.697.000,00	105.849.784,00	747.975.000,00	0,00	853.824.784,00	167.872.216,00
2	Puskesmas Salakan	0,00	789.606.000,00	249.981.219,00	514.038.117,00	0,00	764.019.336,00	25.586.664,00
3	Puskesmas Tataba	0,00	1.171.408.000,00	168.807.332,00	945.330.500,00	0,00	1.114.137.832,00	57.270.168,00
4	Puskesmas Lolantang	0,00	1.884.319.000,00	250.687.600,00	1.558.058.355,00	0,00	1.808.745.955,00	75.573.045,00
5	Puskesmas Bulagi	0,00	1.348.394.000,00	160.187.563,00	1.124.009.500,00	0,00	1.284.197.063,00	64.196.937,00
6	Puskesmas Patukuki	0,00	1.018.177.000,00	149.718.451,00	843.108.400,00	0,00	992.826.851,00	25.350.149,00
7	Puskesmas Sabang	0,00	1.087.143.000,00	150.187.357,00	877.039.500,00	0,00	1.027.226.857,00	59.916.143,00
8	Puskesmas Lumbi-Lumbia	0,00	980.672.000,00	123.888.400,00	779.910.000,00	0,00	903.798.400,00	76.873.600,00
9	Puskesmas Mansamat	0,00	879.358.000,00	128.812.472,00	699.960.000,00	0,00	828.772.472,00	50.585.528,00
10	Puskesmas Saleati	0,00	1.363.017.000,00	170.143.763,00	1.096.489.500,00	0,00	1.266.633.263,00	96.383.737,00
11	Puskesmas Tinangkung Utara	0,00	670.666.000,00	89.784.419,00	443.137.600,00	0,00	532.922.019,00	137.743.981,00
12	Puskesmas Totikum Selatan	0,00	811.105.000,00	120.358.802,00	592.097.000,00	0,00	712.455.802,00	98.649.198,00
13	Puskesmas Bakalan Raya	0,00	471.408.000,00	160.022.398,00	281.185.000,00	0,00	441.207.398,00	30.200.602,00
Jumlah		**0,00**	**13.496.970.000,00**	**2.028.429.560,00**	**10.502.338.472,00**	**0,00**	**12.530.768.032,00**	**966.201.968,00**

Lampiran 08

REKAPITULASI KAS LAINNYA PADA BENDAHARA PENGELUARAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam Rupiah)

NO	NAMA OPD	DANA CSR	PAJAK	JUMLAH KAS LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 + 4*
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		-	-
	BOS SD			
	- Sekolah Dasar Inpres Abason		39.500,00	39.500,00
	- Sekolah Dasar Inpres Bolonan		1.024.646,00	1.024.646,00
	- Sekolah Dasar Inpres Sambiut		217.800,00	217.800,00
	- Sekolah Dasar Inpres Sampaka		561.700,00	561.700,00
	- Sekolah Dasar Negeri 1 Kombutokan		120.000,00	120.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri Batangbabasal		3.390.789,00	3.390.789,00
	- Sekolah Dasar Negeri Lopito		2.884.750,00	2.884.750,00
	- Sekolah Dasar Negeri Pembina Sambiut		790.185,00	790.185,00
	- Sekolah Dasar Negeri Salangano		416.000,00	416.000,00
	- Sekolah Dasar Nosuon		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres 2 Kombutokan		732.710,00	732.710,00
	- Sekolah Dasar Inpres Babang		210.400,00	210.400,00
	- Sekolah Dasar Inpres Kokondong		200.400,00	200.400,00
	- Sekolah Dasar Inpres Lolantang		204.320,00	204.320,00
	- Sekolah Dasar Inpres Palabatu 2		333.198,00	333.198,00
	- Sekolah Dasar Inpres Pandaluk		247.500,00	247.500,00
	- Sekolah Dasar Inpres Toi-Toi		120.000,00	120.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri Balalon		2.267.978,00	2.267.978,00
	- Sekolah Dasar Negeri Momotan		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Osan		3.655.774,00	3.655.774,00
	- Sekolah Dasar Negeri Palabatu I		120.000,00	120.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri Pipilogot		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Sabelak		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Suit		129.400,00	129.400,00
	- Sekolah Dasar Negeri Tatarandang		1.407.359,00	1.407.359,00
	- Sekolah Dasar Negeri Unu		320.000,00	320.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri Labotankandi		543.955,00	543.955,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Bonepuso		517.026,00	517.026,00
	- Sekolah Dasar Inpres 3 Bulagi		1.276.297,00	1.276.297,00
	- Sekolah Dasar Inpres Boloy		408.198,00	408.198,00
	- Sekolah Dasar Inpres Komba-Komba		264.000,00	264.000,00
	- Sekolah Dasar Inpres Oluno		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Alul		411.200,00	411.200,00
	- Sekolah Dasar Negeri I Bulagi		335.500,00	335.500,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Sumondung		195.420,00	195.420,00
	- Sekolah Dasar Negeri Lalanday		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Meselesek		995.345,00	995.345,00
	- Sekolah Dasar Negeri Montomisan		45.680,00	45.680,00
	- Sekolah Dasar Negeri Pembina Bulagi		587.777,00	587.777,00
	- Sekolah Dasar Negeri Seasa		555.634,00	555.634,00
	- Sekolah Dasar Negeri Sosom		296.216,00	296.216,00
	- Sekolah Dasar Negeri Tolo		607.917,00	607.917,00
	- Sekolah Dasar Negeri Toolon		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Kayubet		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Kambal		42.000,00	42.000,00
	- Sekolah Dasar 3 Inpres Liang		4.179.087,00	4.179.087,00
	- Sekolah Dasar Inpres Kinandal		70.000,00	70.000,00
	- Sekolah Dasar Inpres Pinalong		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres Popidolon		625.730,00	625.730,00
	- Sekolah Dasar Inpres Selekan		642.793,00	642.793,00
	- Sekolah Dasar Negeri 1 Okumel		1.740.265,00	1.740.265,00
	- Sekolah Dasar Negeri Apal		1.218.788,00	1.218.788,00
	- Sekolah Dasar Negeri Balayon		247.200,00	247.200,00

Lampiran 08

NO	NAMA OPD	DANA CSR	PAJAK	JUMLAH KAS LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 + 4*
	- Sekolah Dasar Negeri Basosol		144.200,00	144.200,00
	- Sekolah Dasar Negeri Boyomoute		334.400,00	334.400,00
	- Sekolah Dasar Negeri Loolong		434.600,00	434.600,00
	- Sekolah Dasar Negeri Mamulusan		568.836,00	568.836,00
	- Sekolah Dasar Negeri Pembina Liang		515.763,00	515.763,00
	- Sekolah Dasar Negeri 2 Inpres Liang		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri 2 Inpres Okumel		584.498,00	584.498,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Binuntuli		666.497,00	666.497,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Tomboniki		842.342,00	842.342,00
	- Sekolah Dasar Inpres 1 Salakan		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres Kautu		69.600,00	69.600,00
	- Sekolah Dasar Inpres Tompudau		353.360,00	353.360,00
	- Sekolah Dasar Negeri 2 Salakan		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri 3 Salakan		421.873,00	421.873,00
	- Sekolah Dasar Negeri Ambelang		2.392.666,00	2.392.666,00
	- Sekolah Dasar Negeri Bakalan		1.312.941,00	1.312.941,00
	- Sekolah Dasar Negeri Bulungkobit		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Bungin		1.189.776,00	1.189.776,00
	- Sekolah Dasar Negeri Kuakon		516.000,00	516.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri Manggalai		303.080,00	303.080,00
	- Sekolah Dasar Negeri Pembina Salakan		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Saiyong		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres 2 Paisubatu		374.846,00	374.846,00
	- Sekolah Dasar Inpres Lalengan		176.500,00	176.500,00
	- Sekolah Dasar Inpres Okulo		322.919,00	322.919,00
	- Sekolah Dasar Inpres Palapat		356.400,00	356.400,00
	- Sekolah Dasar Negeri 1 Paisubatu		90.000,00	90.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri Batangono		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Ebenheiser		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Leme-Leme		1.344.443,00	1.344.443,00
	- Sekolah Dasar Negeri Olusi		1.262.564,00	1.262.564,00
	- Sekolah Dasar Negeri Pelinglalomo		310.000,00	310.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri Pembina Tataba		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Tatendeng		93.600,00	93.600,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Malanggong		281.550,00	281.550,00
	- Sekolah Dasar Inpres Kampung Baru		165.000,00	165.000,00
	- Sekolah Dasar Inpres Lomboan		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres Mansamat B		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Bobu		2.968.810,00	2.968.810,00
	- Sekolah Dasar Negeri Gansal		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Mansamat A		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Paisumosoni		635.700,00	635.700,00
	- Sekolah Dasar Negeri Sasampean		50.000,00	50.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri Tobing		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Lesantobungin		565.000,00	565.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Tinangkung		68.000,00	68.000,00
	- Sekolah Dasar Inpres 1 Kalumbatan		62.800,00	62.800,00
	- Sekolah Dasar Inpres 2 Kalumbatan		2.208.560,00	2.208.560,00
	- Sekolah Dasar Inpres 3 Kalumbatan		13.765.133,00	13.765.133,00
	- Sekolah Dasar Inpres Kanali		225.400,00	225.400,00
	- Sekolah Dasar Negeri Lobuton		1.882.966,00	1.882.966,00
	- Sekolah Dasar Negeri Mata		3.791.144,00	3.791.144,00
	- Sekolah Dasar Negeri Tobungku		528.030,00	528.030,00
	- Sekolah Dasar Negeri Tonuson		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres 2 Patukuki		5.195.954,00	5.195.954,00
	- Sekolah Dasar Inpres Luk		384.800,00	384.800,00
	- Sekolah Dasar Inpres Popisi		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres Sampekonan		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres Tabing		89.000,00	89.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri 1 Patukuki		339.900,00	339.900,00
	- Sekolah Dasar Negeri Bakum		1.142.496,00	1.142.496,00

Lampiran 08

NO	NAMA OPD	DANA CSR	PAJAK	JUMLAH KAS LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 + 4*
	- Sekolah Dasar Negeri Balombong		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Kolak		237.500,00	237.500,00
	- Sekolah Dasar Negeri Koyobunga		570.010,00	570.010,00
	- Sekolah Dasar Negeri Tolulos		1.794.248,00	1.794.248,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Lempek		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Tombos		140.000,00	140.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Tunggaling		370.909,00	370.909,00
	- Sekolah Dasar Negeri Alakasing		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres Lukpanenteng		2.486.684,00	2.486.684,00
	- Sekolah Dasar Inpres Mandok		84.000,00	84.000,00
	- Sekolah Dasar Inpres Minanga		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres Poganda		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Bakalinga		1.280.472,00	1.280.472,00
	- Sekolah Dasar Negeri Bolubung		294.000,00	294.000,00
	- Sekolah Dasar Negeri Montop		3.188.350,00	3.188.350,00
	- Sekolah Dasar Negeri Ombuli		246.123,00	246.123,00
	- Sekolah Dasar Negeri Paisuluno		1.280.457,00	1.280.457,00
	- Sekolah Dasar Negeri Sabang		611.364,00	611.364,00
	- Sekolah Dasar Negeri Sambulangan		1.607.980,00	1.607.980,00
	- Sekolah Dasar Inpres Bangunemo		217.500,00	217.500,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Koyobunga		331.900,00	331.900,00
	- Sekolah Dasar Inpres 3 Lumbi-Lumbia		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres Apal		2.107.176,00	2.107.176,00
	- Sekolah Dasar Inpres Buko		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres Labangun		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Inpres Matamaling		919.950,00	919.950,00
	- Sekolah Dasar Inpres Sapelang		285.100,00	285.100,00
	- Sekolah Dasar Inpres Seano		904.032,00	904.032,00
	- Sekolah Dasar Inpres Taepa		771.920,00	771.920,00
	- Sekolah Dasar Inpres Tatabau		1.975.539,00	1.975.539,00
	- Sekolah Dasar Negeri 1 Lumbi-Lumbia		2.880.031,00	2.880.031,00
	- Sekolah Dasar Negeri Alani		462.600,00	462.600,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres 2 Lumbi-Lumbia		1.677.053,00	1.677.053,00
	- Sekolah Dasar Negeri Lalong		2.188.837,00	2.188.837,00
	- Sekolah Dasar Negeri Luksagu		0,00	0,00
	- Sekolah Dasar Negeri Palam		1.554.500,00	1.554.500,00
	- Sekolah Dasar Negeri Ponding-Ponding		1.172.699,00	1.172.699,00
	- Sekolah Dasar Negeri Tatakalai		12.720.172,00	12.720.172,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangpanga		977.744,00	977.744,00
	- Sekolah Dasar Negeri Inpres Luksagu		1.939.770,00	1.939.770,00
	BOS SMP			
	- SMP Negeri 1 Totikum		937.306,00	937.306,00
	- SMP Negeri 2 Totikum		0,00	0,00
	- SMP Negeri 3 Totikum		0,00	0,00
	- SMP Negeri 4 Totikum		4.515.601,00	4.515.601,00
	- SMP Negeri 1 Bulagi Selatan		2.148.162,00	2.148.162,00
	- SMP Negeri 2 Bulagi Selatan		458.452,00	458.452,00
	- SMP Negeri 3 Bulagi Selatan		1.979.431,00	1.979.431,00
	- SMP Negeri Satap Tatarandang		1.220.415,00	1.220.415,00
	- SMP Negeri 1 Bulagi		1.871.300,00	1.871.300,00
	- SMP Negeri 2 Bulagi		1.134.400,00	1.134.400,00
	- SMP Negeri 3 Bulagi		4.410.325,00	4.410.325,00
	- SMP Negeri Satu Atap Alul		189.600,00	189.600,00
	- SMP Negeri 5 Satap Bulagi		721.000,00	721.000,00
	- SMP Negeri 1 Liang		2.895.800,00	2.895.800,00
	- SMP Negeri 2 Liang		3.232.063,00	3.232.063,00
	- SMP Negeri 3 Liang		347.550,00	347.550,00
	- SMP Negeri Satu Atap Kindandal		369.000,00	369.000,00
	- SMP Negeri Satu Atap Mamulusan		217.000,00	217.000,00
	- SMP Negeri 1 Tinangkung		0,00	0,00

Lampiran 08

NO	NAMA OPD	DANA CSR	PAJAK	JUMLAH KAS LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 + 4*
	- SMP Negeri 2 Tinangkung		5.405.653,00	5.405.653,00
	- SMP Negeri 3 Tinangkung		6.557.974,00	6.557.974,00
	- SMP Negeri 1 Buko		6.101.795,00	6.101.795,00
	- SMP Negeri 2 Buko		1.446.350,00	1.446.350,00
	- SMP Negeri Satap Ebenheizer		0,00	0,00
	- SMP Negeri Satu Atap Okulo		160.000,00	160.000,00
	- SMP Negeri Satu Atap Tatendeng		0,00	0,00
	- SMP Negeri 1 Tinangkung Selatan		0,00	0,00
	- SMP Negeri 2 Tinangkung Selatan		0,00	0,00
	- SMP Negeri 1 Totikum Selatan		740.009,00	740.009,00
	- SMP Negeri 2 Satu Atap Totikum Selatan		857.910,00	857.910,00
	- SMP Negeri 2 Totikum Selatan		210.000,00	210.000,00
	- SMP Negeri 1 Peling Tengah		2.709.089,00	2.709.089,00
	- SMP Negeri 2 Peling Tengah		1.014.637,00	1.014.637,00
	- SMP Negeri Satu Atap Popisi		80.500,00	80.500,00
	- SMP Negeri Satu Atap Tolulos		265.000,00	265.000,00
	- SMP Negeri 1 Bulagi Utara		1.554.258,00	1.554.258,00
	- SMP Negeri 2 Bulagi Utara		87.000,00	87.000,00
	- SMP Negeri 3 Bulagi Utara		709.200,00	709.200,00
	- SMP Negeri 4 Bulagi Utara		0,00	0,00
	- SMP Negeri Satu Atap Bakalinga		1.872.494,00	1.872.494,00
	- SMP Negeri Satu Atap Lukpanenteng		691.104,00	691.104,00
	- SMP Negeri Satu Atap Ombuli		52.000,00	52.000,00
	- SMP Negeri 1 Buko Selatan		10.767.128,00	10.767.128,00
	- SMP Negeri 2 Buko Selatan		669.000,00	669.000,00
	- SMP Negeri 3 Buko Selatan		0,00	0,00
	- SMP Negeri Satu Atap Matamaling		567.700,00	567.700,00
	- SMP Negeri 4 Buko Selatan Satap		344.375,00	344.375,00
	- SMP negeri 1 Tinangkung Utara		2.607.110,00	2.607.110,00
	- SMP Negeri Satu Atap Palam		320.540,00	320.540,00
	- SMP Negeri 4 Bulagi Selatan		1.821.877,00	1.821.877,00
	- SMP Negeri 4 Liang		808.842,00	808.842,00
	BOP PAUD & KESETARAAN			
	- TK Negeri Alakasing		132.000,00	132.000,00
	- TK Negeri Bakalinga		344.650,00	344.650,00
	- TK Negeri Bangunemo		0,00	0,00
	- TK Negeri Bobu		181.000,00	181.000,00
	- TK Negeri Bulagi		0,00	0,00
	- TK Negeri Bunepuso		860.315,00	860.315,00
	- TK Negeri Harapan Baru Sosom		0,00	0,00
	- TK Negeri Kindandal		279.572,00	279.572,00
	- TK Negeri Kombutokan		24.000,00	24.000,00
	- TK Negeri Lalengan		0,00	0,00
	- TK Negeri Landonan Bebeau		0,00	0,00
	- TK Negeri Liang		30.400,00	30.400,00
	- TK Negeri Lolantang		60.000,00	60.000,00
	- TK Negeri Lopito		0,00	0,00
	- TK Negeri Luksagu		41.600,00	41.600,00
	- TK Negeri Meselesek		0,00	0,00
	- TK Negeri Lukpanenteng		0,00	0,00
	- TK Negeri Palam		496.822,00	496.822,00
	- TK Negeri Patukuki		462.545,00	462.545,00
	- TK Negeri Peling Lalomo		0,00	0,00
	- TK Negeri Percontohan		0,00	0,00
	- TK Negeri Pertiwi Salakan		310.500,00	310.500,00
	- TK Negeri Ponding-Ponding		418.909,00	418.909,00
	- TK Negeri Sakay		0,00	0,00
	- TK Negeri Salangano		120.000,00	120.000,00
	- TK Negeri Sampaka		0,00	0,00
	- TK Negeri Seasa		0,00	0,00

Lampiran 08

NO	NAMA OPD	DANA CSR	PAJAK	JUMLAH KAS LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 3 + 4*
	- TK Negeri Tataba		0,00	0,00
	- TK Negeri Tatarandang		270.000,00	270.000,00
	- TK Pembina Salakan		0,00	0,00
	- SKB KAB.BANGKEP		0,00	0,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			0,00
	- BPKAD CSR Bangkep	222.575.042,00		222.575.042,00
JUMLAH		**222.575.042,00**	**210.912.267,00**	**433.487.309,00**

Lampiran 09

PIUTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

No	Jenis Pajak	Perangkat Daerah	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Penyesuaian Pokok	Penghapusan Piutang	Saldo Pokok Setelah Penyesuaian	Penetapan Pokok 2023	Pembayaran Pokok 2023	Piutang Pokok per 31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) - (9)
1	Pajak Hotel								
	Piutang Pajak Hotel	Badan Pendapatan	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	55.291.000,00	37.224.000,00	18.457.000,00
	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	Badan Pendapatan	2.085.000,10	0,00	0,00	2.085.000,10	91.672.200,00	69.409.700,10	24.347.500,00
	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	Badan Pendapatan	2.824.000,00	0,00	0,00	2.824.000,00	21.832.000,00	21.818.000,00	2.838.000,00
2	Piutang Pajak Restoran								
	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Badan Pendapatan	24.315.000,00	0,00	0,00	24.315.000,00	37.795.800,00	35.169.800,00	26.941.000,00
	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	Badan Pendapatan		0,00	0,00	0,00	1.119.252.702,00	1.119.252.702,00	0,00
3	Piutang Pajak Hiburan								
	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	Badan Pendapatan	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.375.000,00	1.875.000,00	1.180.000,00
4	Piutang Pajak Reklame								
	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	Badan Pendapatan	33.980.218,00	0,00	0,00	33.980.218,00	40.077.918,00	36.584.483,00	37.473.653,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan								
	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Badan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.059.727,00	2.793.562.564,00	268.497.163,00
6	Piutang Pajak Air Tanah								
	Piutang Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00	1.188.000,00	1.084.000,00	848.000,00
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan								
	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Badan Pendapatan	393.464.281,00	0,00	0,00	393.464.281,00	1.040.199.976,75	1.038.461.088,75	395.203.169,00
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)								
	Piutang PBBP2	Badan Pendapatan	230.308.814,00	(957.914,00)	0,00	229.350.900,00	1.416.390.435,00	1.409.160.895,00	236.580.440,00
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BP								
	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	Badan Pendapatan	3.903.500,00	0,00	0,00	3.903.500,00	63.938.910,00	63.938.910,00	3.903.500,00
JUMLAH			**693.694.813,10**	**(957.914,00)**	**0,00**	**692.736.899,10**	**6.951.073.668,75**	**6.627.541.142,85**	**1.016.269.425,00**

Lampiran 10

PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

No	Jenis Retribusi	Perangkat Daerah	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Penyesuaian Pokok	Penghapusan Piutang	Saldo Pokok Setelah Penyesuaian	Penetapan Pokok 2023	Pembayaran Pokok 2023	Piutang Pokok per 31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) - (9)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan								
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	121.172.920,00	0,00	0,00	121.172.920,00	1.083.372.261,00	1.204.545.181,00	0,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Dinas Kesehatan (RSUD Trikora)	3.477.521.600,00	866.011.800,00	0,00	4.343.533.400,00	6.891.749.025,00	11.235.282.425,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan								
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	330.069.000,00	330.069.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum								
	Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	136.315.000,00	138.315.000,00	6.200.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar								
	Piutang Retribusi Pelataran	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00
	Piutang Retribusi Los	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	72.947.500,00	0,00	0,00	72.947.500,00	93.715.000,00	87.025.000,00	79.637.500,00
	Piutang Retribusi Kios	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	20.682.000,00	0,00	0,00	20.682.000,00	114.655.000,00	110.075.000,00	25.262.000,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekom								
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah								
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Badan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	298.658.132,00	144.758.132,00	153.900.000,00
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	Badan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pemakaian Ruangan	Badan Pendapatan	5.104.000,00	0,00	0,00	5.104.000,00	0,00	0,00	5.104.000,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.900.416,00	(50.900.416,00)	0,00	0,00	0,00		0,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	50.900.416,00	0,00	50.900.416,00	305.486.146,00	292.253.139,00	64.133.423,00
7	Retribusi Tempat Pelelangan								
	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	51.811.000,00	51.811.000,00	0,00
8	Retribusi Rumah Potong Hewan								
	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	21.957.000,00	21.957.000,00	0,00
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan								
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	137.514.600,00	137.514.600,00	2.450.000,00

Lampiran 10

No	Jenis Retribusi	Perangkat Daerah	Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Penyesuaian Pokok	Penghapusan Piutang	Saldo Pokok Setelah Penyesuaian	Penetapan Pokok 2023	Pembayaran Pokok 2023	Piutang Pokok per 31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) + (6)	(8)	(9)	(10) = (7) + (8) - (9)
10	Retribusi Penyeberangan di Air								
	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.579.500,00	9.579.500,00	0,00
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan								
	Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan	Dinas Pekerjaan Umum dan	6.097.000,00	0,00	0,00	6.097.000,00	59.316.000,00	59.316.000,00	6.097.000,00
12	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol								
	Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan	Dinas Perindustrian, Perdagangan,		0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
13	Retribusi Izin Usaha Perikanan								
	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha	Dinas Perikanan		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
JUMLAH			**3.765.075.436,00**	**866.011.800,00**	**0,00**	**4.631.087.236,00**	**9.615.597.664,00**	**13.903.900.977,00**	**342.783.923,00**

Lampiran 11

DAFTAR PIUTANG PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
ANGSURAN PIUTANG PT. TASPEN (PERSERO)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	NAMA OPD	TGL SK PENSIUN (SK BUPATI)	TMT PENSIUN	TANGGAL SKPP	SISA UTANG PER DESEMBER 2022	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	PIUTANG 2023	TOTAL PIUTANG	PENYETO-RAN 2023	TOTAL PIUTANG PER 31 DES 2023
1	BAYU PAWARTO.ST 197507282007011000	PUPR		1-Apr-19	17-Sep-19	2.869.100		2.869.100		2.869.100	-	2.869.100
2	MARTHINUS BAPISA 196010012014111000	SMP Buko		1-Nov-19	15-Oct-19	34.786.600		34.786.600		34.786.600	-	34.786.600
3	HARDI HI.R.PANDIPA.A.Ma.Pd 196104121985121002	SD Tinangkung		16-Oct-18	13-Dec-19	3.000.000	500.000	3.500.000		3.500.000		3.500.000
	JUMLAH TAHUN 2019					**40.655.700,00**	**500.000,00**	**41.155.700,00**	**-**	**41.155.700,00**	**-**	**41.155.700,00**
1	SUKARMAN / JUNAEDA 19620817 198512 1 003	SD Tinangkung Utara		30-Dec-19	5-Feb-20	3.600.000		3.600.000		3.600.000	3.600.000	-
2	SAHARI PITAAN, S.Pd / MAHMUD JUNI 19641110 198307 2 001	SD Buko Selatan		3-Jul-20	24-Aug-20	3.800.000		3.800.000		3.800.000	3.800.000	-
	JUMLAH TAHUN 2020					**7.400.000,00**	**-**	**7.400.000,00**	**-**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**-**
1	AGUS SULLE 196208282006041010	SLTP se Kec. Liang	14-Dec-20	1-Sep-20	4-Jan-21	1.100.000		1.100.000		1.100.000	1.100.000	-
2	SALMAN SOSIBONG, S.Pd / EFELINA TJOANTHO 197406222007011019	SLTP se Kec. Buko	14-Dec-20	1-Jan-20	7-Jan-21	3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000	-
3	ANDREAS Y. RORIMPANDEY 196601041986031010	Satuan Polisi Pamong Praja	30-Dec-20	1-Jul-20	18-Jan-21	6.000.000		6.000.000		6.000.000	6.000.000	-
4	SAIDI ODE UMA 196709092000071001	SD se Kec. Bulagi Selatan	19-Jul-21	1-Oct-20	14-Sep-21	1.500.000		1.500.000		1.500.000	1.500.000	-
	JUMLAH TAHUN 2021					**11.600.000**	**-**	**11.600.000**	**-**	**11.600.000**	**11.600.000**	**-**
1	YATIM. A, A.Ma.Pd 196203181984122003	SD se Kec. Totikum	19-Dec-21	1-Apr-22	2-Mar-22	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	-
2	NARSIN GAGAMO 196602051994031016	Kec. Tinangkung	22-Okt-22	1-Jun-22	6-Des-22		38.696.700	38.696.700		38.696.700	27.196.700	11.500.000
3	HERNY KAMINDANG 196210151982012012	SD Kec. Tinangkung	28-Sep-22	1-Nov-22	7-Okt-22		4.482.920	4.482.920		4.482.920	4.482.920	-
4	BAHMID 196409122007011026	Kec. Liang	2-Apr-22	1-Oct-22	7-Sep-22		5.127.906	5.127.906		5.127.906	5.127.906	-

Lampiran 11

NO	NAMA/NIP	NAMA OPD	TGL SK PENSIUN (SK BUPATI)	TMT PENSIUN	TANGGAL SKPP	SISA UTANG PER DESEMBER 2022	KOREKSI SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	PIUTANG 2023	TOTAL PIUTANG	PENYETO-RAN 2023	TOTAL PIUTANG PER 31 DES 2023
5	A. IDRUS MADDATU 196410022007011011	Kec. Tinangkung	3-Apr-22	1-Nov-22	26-Okt-22		7.169.844	7.169.844		7.169.844	7.169.844	-
6	NURNANINGSIH SALDRAK 196207121982072005	SD se Kec.Bulagi	15-Sep-22	1-Agst-22	6-Okt-22	6.207.120	10.500.000	16.707.120		16.707.120	16.707.120	-
	JUMLAH TAHUN 2022					7.207.120	65.977.370	73.184.490	-	73.184.490	61.684.490	11.500.000
1	EMILIA SIABIDA 196301301985122001	SD Kec. TOTIKUM	4-Oct-22	1-Feb-23	2-Feb-23			-	344.840	344.840	344.840	-
2	RUSTAM BANGOSON 196304211985121002	SD se Kec.Buko selatan	17-Nov-22	1 mei 23	13 April 23			-	15.459.360	15.459.360	5.559.360	9.900.000
3	VALENTINA NUKAK 197606272006042019	SD se Kec. Totikum	17-Nov-22	1-Sep-22	10-Jan-23			-	4.187.800	4.187.800	4.187.800	-
4	PETRUS SAAPO, A.Md 196504121993031012	POLPP	19-Okt-22	1-Mei-23	13-Apr-23			-	2.453.040	2.453.040	2.453.040	-
5	JUSLIN TUMBU 196507071986031017	SLTP 1 BULAGI	31-May-23	1-Ags-23	17-Jul-23			-	4.707.300	4.707.300	4.707.300	-
	JUMLAH TAHUN 2023					**-**	**-**	**-**	**27.152.340**	**27.152.340**	**17.252.340**	**9.900.000**
	T O T A L (TAHUN 2019+2020+2021+2022+2023)					**66.862.820**	**66.477.370**	**133.340.190**	**27.152.340**	**160.492.530**	**97.936.830**	**62.555.700**

Lampiran 12

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR PIUTANG PENDAPATAN BLUD
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA BLUD	PIUTANG PENDAPATAN BLUD PER 31 DESEMBER 2023
1	RSUD Trikora	1.607.714.500,00
2	RS Pratama Bilabanggai	56.230.000,00
3	Puskesmas Totikum	36.640.000,00
4	Puskesmas Salakan	19.345.000,00
5	Puskesmas Tataba	0,00
6	Puskesmas Lolantang	3.020.000,00
7	Puskesmas Bulagi	48.880.000,00
8	Puskesmas Patukuki	12.800.000,00
9	Puskesmas Sabang	0,00
10	Puskesmas Lumbi - Lumbia	2.890.000,00
11	Puskesmas Mansamat	13.320.000,00
12	Puskesmas Saleati	9.040.000,00
13	Puskesmas Tinangkung Utara	34.995.000,00
14	Puskesmas Totikum Selatan	29.700.000,00
15	Puskesmas Bakalan Raya	2.400.000,00
16	Puskesmas Bonepuso	3.200.000,00
Jumlah		**1.880.174.500,00**

Lampiran 13

LAPORAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK PROVINSI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PER 31 DESEMBER 2023

No.	URAIAN	TARGET			REALISASI DBH TA.2023	REALISASI PENYALURAN			SELISIH/ SILPA	KET
		SK Gub : 900.1.14.3/ 23/BAPENDA-G.ST/2023	SK Gub: (Kurang Salur) 900.1.14.3/81 /BAPENDA-G.ST/2023	SK Gub (APBDP) :900.1,14.3/551/BAPENDA-G.ST/2023		NO SP2D/Tanggal	JUMLAH			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	11
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya									
1	**Pajak kendaraan Bermotor**	**3.869.820.450**	**1.182.964.082**	**3.969.131.323**	**4.413.185.033**		**1.182.964.082**	**3.411.762.407**	**1.001.422.626**	
	TW I					05/08/2023 03522/SP2D-LS/BPKAD/2023		991.092.601		
	TW II					08/09/2023 09476/SP2D-LS/BPKAD/2023		937.725.985		
	TW III					31/10/2023 13861/SP2D-LS/BPKAD/2023		1.129.095.029		
	TW IV					29/12/2023 23444/SP2D-LS/BPKAD/2023		353.848.792		
	Kurang Salur 2022					12/05/2023 17236/SP2D-LS/BPKAD/2023	1.182.964.082			
2	**BBNKB**	**4.450.293.518**	**831.155.271**	**4.515.283.793**	**4.847.523.069**		**831.155.271**	**3.997.684.386**	**849.838.683**	
	TW I					05/08/2023 03522/SP2D-LS/BPKAD/2023		1.184.727.116		
	TW II					08/09/2023 09476/SP2D-LS/BPKAD/2023		1.181.049.591		
	TW III					31/10/2023 13861/SP2D-LS/BPKAD/2023		1.245.197.618		
	TW IV					29/12/2023 23444/SP2D-LS/BPKAD/2023		386.710.061		
	Kurang Salur 2022					12/05/2023 17236/SP2D-LS/BPKAD/2023	831.155.271			
3	**Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**	**9.201.509.205**	**2.089.959.115**	**12.183.975.837**	**11.351.928.727**		**2.089.959.115**	**9.220.939.516**	**2.130.989.211**	
	TW I					05/08/2023 03522/SP2D-LS/BPKAD/2023		2.766.723.171		
	TW II					08/09/2023 09476/SP2D-LS/BPKAD/2023		2.779.424.349		
	TW III					31/10/2023 13861/SP2D-LS/BPKAD/2023		2.711.264.667		
	TW IV					29/12/2023 23444/SP2D-LS/BPKAD/2023		963.527.329		
	Kurang Salur 2022					12/05/2023 17236/SP2D-LS/BPKAD/2023	2.089.959.115			
4	**Pajak air Permukaan**	**292.444.231**	**22.186.443**	**474.826.923**	**497.850.668**		**22.186.443**	**414.912.642**	**82.938.026**	
	TW I					05/08/2023 03522/SP2D-LS/BPKAD/2023		79.425.298		
	TW II					08/09/2023 09476/SP2D-LS/BPKAD/2023		115.178.692		
	TW III					31/10/2023 13861/SP2D-LS/BPKAD/2023		167.888.737		
	TW IV					29/12/2023 23444/SP2D-LS/BPKAD/2023		52.419.915		
	Kurang Salur 2022					12/05/2023 17236/SP2D-LS/BPKAD/2023	22.186.443			
5	**Pajak Rokok**	**7.586.483.773**		**9.123.447.045**	**8.373.312.833**			**8.373.312.833**	-	
	TW I					05/08/2023 03522/SP2D-LS/BPKAD/2023		3.398.472.395		
	TW II					08/09/2023 09476/SP2D-LS/BPKAD/2023		1.881.772.391		
	TW III					31/10/2023 13861/SP2D-LS/BPKAD/2023		1.675.415.883		
	TW IV					29/12/2023 23455/SP2D-LS/BPKAD/2023		1.417.652.164		
	JUMLAH TOTAL	**25.400.551.177**	**4.126.264.911**	**30.266.664.921**	**29.483.800.330**		**4.126.264.911**	**25.418.611.784**	**4.065.188.546**	

Lampiran 14

PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PER 31 DESEMBER 2023

No	Jenis Pajak	Perangkat Daerah	Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023					Piutang Pokok per 31 Desember 2023	Piutang Bersih per 31 Desember 2023
					Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	) = (6) + (7) + (8) +	(11) = (7) + (8) - (9)	(12) = (11) - (10)
1	Pajak Hotel										
	Piutang Pajak Hotel	Badan Pendapatan	390.000,00	195.000,00	90.335,00			390.000,00	480.335,00	18.457.000,00	17.976.665,00
	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	Badan Pendapatan	2.085.000,10	959.210,05	114.162,50	10.000,00	185.000,00	1.045.000,00	1.354.162,50	24.347.500,00	22.993.337,50
	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	Badan Pendapatan	2.824.000,00	2.588.765,00	735,00		28.000,00	2.635.000,00	2.663.735,00	2.838.000,00	174.265,00
2	Piutang Pajak Restoran										
	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Badan Pendapatan	24.315.000,00	18.372.600,00	17.430,00	176.000,00	1.210.000,00	19.275.000,00	20.678.430,00	26.941.000,00	6.262.570,00
	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	Badan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Pajak Hiburan										
	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	Badan Pendapatan	1.680.000,00	809.375,00		37.500,00		805.000,00	842.500,00	1.180.000,00	337.500,00
4	Piutang Pajak Reklame										
	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	Badan Pendapatan	33.980.218,00	28.612.829,32	18.273,43	197.460,38	541.444,00	30.761.476,25	31.518.654,05	37.473.653,00	5.954.998,95
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan										
	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Badan Pendapatan	0,00	0,00	1.342.485,82	0,00	0,00	0,00	1.342.485,82	268.497.163,00	267.154.677,19
6	Piutang Pajak Air Tanah										
	Piutang Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan	744.000,00	744.000,00	520,00			744.000,00	744.520,00	848.000,00	103.480,00

Lampiran 14

No	Jenis Pajak	Perangkat Daerah	Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023					Piutang Pokok per 31 Desember 2023	Piutang Bersih per 31 Desember 2023
					Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	) = (6) + (7) + (8) +	(11) = (7) + (8) - (9)	(12) = (11) - (10)
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan										
	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Badan Pendapatan	393.464.281,00	393.464.281,00	8.694,44			393.464.281,00	393.472.975,44	395.203.169,00	1.730.193,56
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)										
	Piutang PBBP2	Badan Pendapatan	230.308.814,00	224.200.104,03	72.576,66			222.065.108,00	222.137.684,66	236.580.440,00	14.442.755,34
9	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)										
	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	Badan Pendapatan	3.903.500,00	3.903.500,00				3.903.500,00	3.903.500,00	3.903.500,00	0,00
JUMLAH			**693.694.813,10**	**673.849.664,40**	**1.665.212,84**	**420.960,38**	**1.964.444,00**	**675.088.365,25**	**679.138.982,47**	**1.016.269.425,00**	**337.130.442,54**

Lampiran 15

PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PER 31 DESEMBER 2023

No	Jenis Retribusi	Perangkat Daerah	Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023					Piutang Pokok per 31 Desember 2023	Piutang Bersih per 31 Desember 2023
					Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (7) + (8) + (9)	(11) = (7) + (8) - (9)	(12) = (11) - (10)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan										
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Dinas Kesehatan	Rp 121.172.920,00	Rp 18.646.336,78					Rp -	Rp -	Rp -
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Dinas Kesehatan (RSUD Trikora)	Rp 3.477.521.600,00	Rp 257.726.328,00					Rp -	Rp -	Rp -
2	Retribusi Pelayanan										
	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	Rp -						Rp -	Rp -	Rp -
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum										
	Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	Rp 8.200.000,00	Rp 8.200.000,00				Rp 6.200.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp 6.200.000,00	Rp -
4	Retribusi Pelayanan Pasar										
	Piutang Retribusi Pelataran	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp -						Rp -	Rp -	Rp -
	Piutang Retribusi Los	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp 72.947.500,00	Rp 63.255.900,00	Rp 6.775,00	Rp 280.000,00	Rp 4.472.500,00	Rp 66.537.500,00	Rp 71.296.775,00	Rp 79.637.500,00	Rp 8.340.725,00
	Piutang Retribusi Kios	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp 20.682.000,00	Rp 12.226.925,00	Rp 7.825,00	Rp 329.500,00	Rp 3.340.000,00	Rp 13.722.000,00	Rp 17.399.325,00	Rp 25.262.000,00	Rp 7.862.675,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi										
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp -						Rp -	Rp -	Rp -
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah										
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Badan Pendapatan	Rp -		Rp 76.500,00	Rp 3.005.000,00	Rp 54.275.000,00		Rp 57.356.500,00	Rp 153.900.000,00	Rp 96.543.500,00
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	Badan Pendapatan	Rp -						Rp -	Rp -	Rp -

Lampiran 15

No	Jenis Retribusi	Perangkat Daerah	Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023					Piutang Pokok per 31 Desember 2023	Piutang Bersih per 31 Desember 2023
					Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (7) + (8) + (9)	(11) = (7) + (8) - (9)	(12) = (11) - (10)
	Retribusi Pemakaian Ruangan	Badan Pendapatan	Rp 5.104.000,00	Rp 5.104.000,00				Rp 5.104.000,00	Rp 5.104.000,00	Rp 5.104.000,00	Rp -
	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 50.900.416,00	Rp -					Rp -	Rp -	Rp -
	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp -	Rp 50.900.416,00	Rp 30.875,00	Rp 340.510,80	Rp 1.702.554,00	Rp 50.900.416,00	Rp 52.974.355,80	Rp 64.133.423,00	Rp 11.159.067,20
7	Retribusi Tempat Pelelangan										
	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Dinas Perikanan	Rp -						Rp -	Rp -	Rp -
8	Retribusi Rumah Potong Hewan										
	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	Rp -						Rp -	Rp -	Rp -
9	Retribusi Pelayanan										
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	Rp 2.450.000,00	Rp 2.450.000,00				Rp 2.450.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp 2.450.000,00	Rp -
10	Retribusi Penyeberangan di Air										
	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	Dinas Perhubungan	Rp -						Rp -	Rp -	Rp -
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan										
	Piutang Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 6.097.000,00	Rp 6.097.000,00				Rp 6.097.000,00	Rp 6.097.000,00	Rp 6.097.000,00	Rp -
12	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol										
	Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp -						Rp -	Rp -	Rp -
13	Retribusi Izin Usaha Perikanan										
	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	Dinas Perikanan	Rp -						Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH			**Rp 3.765.075.436,00**	**Rp 424.606.905,78**	**Rp 121.975,00**	**Rp 3.955.010,80**	**Rp 63.790.054,00**	**Rp 151.010.916,00**	**Rp 218.877.955,80**	**Rp 342.783.923,00**	**Rp 123.905.967,20**

Lampiran 16

PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak	Perangkat Daerah	Saldo Akhir Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023					Piutang Pokok per 31 Desember 2023	Piutang Bersih per 31 Desember 2023
					Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (7) + (8) + (9)	(11) = (7) + (8) - (9)	(12) = (11) - (10)
1	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-					-	2.994.781,00	2.994.781,00
2	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.042.080,18	-					-	-	-
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66.862.820,00	-				62.555.700,00	62.555.700,00	62.555.700,00	-
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik	Dinas Perikanan	-	-				226.250.000,00	226.250.000,00	226.250.000,00	-
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-					-	46.516.950,00	46.516.950,00
6	Piutang Pendapatan BLUD	Dinas Kesehatan	-	-	9.400.872,50				9.400.872,50	1.880.174.500,00	1.870.773.627,50
JUMLAH			**67.904.900,18**	**-**	**9.400.872,50**	**-**	**-**	**288.805.700,00**	**298.206.572,50**	**2.218.491.931,00**	**1.920.285.358,50**

Lampiran 17

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KERTAS KERJA KOREKSI PENERIMAAN HIBAH OBAT BUFFER STOCK DARI PROVINSI
TAHUN 2023

No.	Bulan	Uraian	Penerimaan Obat Buffer dari	
			Jumlah	Rupiah
1	2	3	4	5
1.	Januari	MB Dewasa	6	240.768,00
		HIV I Virocheck HIV 1/2	1.000	8.391.000,00
		Rapid 2 (standar Q HIV 1/2 Ab 3 LINE	200	2.100.000,00
		Rapid 3 (standar Q HIV 1/2 Ab 3 LINE	200	2.288.000,00
		Indec HIV 1/2 dan Syphilis Combo	500	218.719.000,00
		Reagen Sipilis Trepocheck Shyphilis (RB-TS25)	1.000	8.096.000,00
		Jumlah	**2.906,00**	**239.834.768,00**
2.	Februari	DT	150	2.617.500,00
		DPT HB Hib	550	42.141.000,00
		Alat Suntik 0,5 ml	1.800	2.142.000,00
		Vaksin PCV	300	57.197.100,00
		ADS 5 ml	200	270.840,00
		Jumlah	**3.000,00**	**104.368.440,00**
3.	Maret	Prokain Benzil Penisilin inj	6	53.040,00
		Oksitosin Inj.	500	13.252.500,00
		Primaquin tablet 15 mg	100	24.200,00
		Vaksin PCV	400	76.262.800,00
		DT	300	5.235.000,00
		Td	300	4.635.000,00
		Pelarut MR Rubella	200	30.230.000,00
		HB0	600	13.962.000,00
		DPT HB Hib	150	11.493.000,00
		MR Rubella	200	30.230.000,00
		Vaksin Polio	470	9.183.800,00
		Vaksin BCG	300	18.042.000,00
		Vaksin IPV	200	28.908.000,00
		Pelarut BCG	300	18.042.000,00
		Droper Polio	470	9.183.800,00
		Diazepam Cairan Inj. 5 mg, 10 amp	510	787.950,00
		RDT Malaria	125	603.750,00
		Giemsa 100 ml	5	1.252.500,00
		Emersial Oil 50 ml	6	1.221.000,00
		Allupurinol 100 mg	2.200	231.000,00
		Dexamethasone 0,5 tablet (corsona)	10.000	2.050.000,00
		Salbutamol tablet 4 mg	4.900	695.800,00
		Infuset Dewasa	900	2.880.000,00
		Domperidon tablet 10 mg	2.100	157.500,00
		Ketokonazole 200 mg	100	440.000,00
		MB Dewasa	24	963.072,00
		DBS Kit	5	134.900,00
		Jumlah	**25.371,00**	**280.154.612,00**
4.	April	ABATE	20	1.188.000,00
		Obat Anti Tuberkulosis Anak	20	5.735.740,00

Lampiran 17

No.	Bulan	Uraian	Penerimaan Obat Buffer dari	
			Jumlah	Rupiah
1	2	3	4	5
		Vaksin Anti Rabies (Verorab)	140	21.420.000,00
		SD HBSAg (RDT HBSAg)	2.500	20.457.500,00
		RDT HIV	700	5.985.700,00
		Reagen ziel nielsen	50	9.626.350,00
		Vaksin Pfizer 6 Dosis	5	2.835.000,00
		RDT DBD Combo	550	189.750,00
		Tuberculin	10	5.899.090,90
		Vaksin Miningitis Meningokokus	36	8.872.884,00
		Rapid Sphilis	700	8.015.000,00
		Indec HIV 1/2 dan Syphilis Combo	500	218.719.000,00
		Jumlah	**5.231,00**	**308.944.014,90**
5.	Mei	Plester	30	1.575.000,00
		OAT KDT (Dosis Harian)	10	5.124.590,00
		Jumlah	**40,00**	**6.699.590,00**
6.	Juni	Retinol (Vit.A) 100.000 IU Kapsul Lunak (Biru)	2.900	1.603.700,00
		Tablet Tambah Darah	350.000	89.250.000,00
		MBT -Combi Adult	18	291.708,00
		MBT -Combi Child	6	136.764,00
		Obat Anti Tuberkolosis Dewasa Kategori I	16	7.668.272,00
		Diazepam Cairan Inj. 5 mg, 10 amp	50	77.250,00
		Diazepam 5 MG	1.000	108.000,00
		Haloperidol 5 mg	300	16.200,00
		Trihexipenidyel 2 mg	300	18.900,00
		Dexamethasone 0,5 (Corsona tablet)	7.200	1.476.000,00
		Ampisilin serbuk injeksi 1 gr	100	947.300,00
		OAT KDT (Dosis Harian)	36	18.448.524,00
		Vaksin sinopac 10 Dosis	25	-
		Vaksin Covid Indovac	25	-
		Jumlah	**361.976,00**	**120.042.618,00**
7.	Juli	Retinol (Vit.A) 200.000 IU Kapsul Lunak (Merah)	20.000	12.740.000,00
		Tablet Tambah Darah	905.000	230.775.000,00
		Magnesium Sulfat Injeksi 20 % (MgSo4 20)	30	99.840,00
		Magnesium Sulfat Injeksi 40 % (MgSo4 40)	48	182.208,00
		MBT -Combi Adult	9	145.854,00
		Albendazole 400 mg	20.000	7.340.000,00
		Vaksin Anti Rabies (Verorab)	150	22.950.000,00
		Pelarut MR Rubella	500	75.575.000,00
		HB0	1.000	23.270.000,00
		Vaksin Polio	500	9.770.000,00
		Droper Polio	500	9.770.000,00
		Haloperidol 5 mg	1.000	54.000,00
		Resperidone 2 mg	500	143.500,00
		RDT HIV	500	4.275.500,00
		Alat Suntik 0,5 ml	4.800	5.952.000,00
		ADS 5 ml	500	677.100,00
		Fitomenadion Injeksi	210	675.990,00
		Euthyrox	50	40.050,00

Lampiran 17

No.	Bulan	Uraian	Penerimaan Obat Buffer dari	
			Jumlah	Rupiah
1	2	3	4	5
		Jumlah	**955.297,00**	**404.436.042,00**
8.	Agustus	Obat Anti Tuberkulosis Anak	10	2.867.870,00
		Vaksin Hepatitis B Imune Globulin	25	33.125.000,00
		DPT HB Hib	400	30.648.000,00
		Pot Sputum	800	4.307.200,00
		DBS Kit	10	269.800,00
		Vaksin HPV	500	805.182.000,00
		Vaksin Rotavac	400	90.000.000,00
		Leaflet Rotavac	80	-
		Droper Rotavac	400	-
		OAT K. Harian Kimia Farma	32	17.919.840,00
		Jumlah	**2.657,00**	**984.319.710,00**
9.	September	zink tablet 20 mg	11.200	2.833.600,00
		Garam Oralit	3.600	990.000,00
		Methylergometrin tab	700	189.700,00
		MBT -Combi Adult	24	388.944,00
		Dehidro Artemisin+piperaquin	45	85.500,00
		Diazepam 5 MG	1.000	108.000,00
		Alat Suntik 0,5 ml	9.000	10.710.000,00
		Allupurinol 100 mg	1.000	105.000,00
		Salbutamol tablet 4 mg	1.000	142.000,00
		Ketokonazole 200 mg	1.000	4.400.000,00
		Safety BOX	75	1.050.000,00
		Vaksin HPV	600	966.218.400,00
		OAT K. Harian Kimia Farma	32	17.919.840,00
		Multiple Micronutrient Suplement	1.260	-
		Jumlah	**30.536,00**	**1.005.140.984,00**
10.	Oktober	Garam Oralit	3.100	852.500,00
		Artesunat inj vial 60 mg	2	139.796,00
		Primaquin tablet 15 mg	200	48.400,00
		Td	300	4.635.000,00
		Pelarut MR Rubella	500	75.575.000,00
		DPT HB Hib	414	31.720.680,00
		MR Rubella	500	75.575.000,00
		Vaksin Polio	200	3.908.000,00
		Vaksin BCG	100	6.014.000,00
		Vaksin IPV	200	28.908.000,00
		Pelarut BCG	50	3.007.000,00
		Droper Polio	200	3.908.000,00
		Vaksin PCV	350	66.729.950,00
		Benzatine Penisiline	10	145.000,00
		RDT HIV	700	5.985.700,00
		Alat Suntik 0,5 ml	7.200	8.568.000,00
		ADS 0,05 ml	600	910.800,00
		Safety BOX	75	1.050.000,00
		ADS 5 ml	1.900	2.572.980,00
		RDT DBD Combo	480	165.600,00

Lampiran 17

No.	Bulan	Uraian	Penerimaan Obat Buffer dari	
			Jumlah	Rupiah
1	2	3	4	5
		Rapid Sphilis	700	8.015.000,00
		Rapid 2 (standar Q HIV 1/2 Ab 3 LINE	100	1.050.000,00
		Rapid 3 (standar Q HIV 1/2 Ab 3 LINE	100	1.144.000,00
		OAT K. Harian Kimia Farma	32	17.919.840,00
		Kombipak Cefixime + Aztrmicyn	10	120.000,00
		Jumlah	**18.023,00**	**348.668.246,00**
11.	November	MBT -Combi Adult	24	388.944,00
		Vaksin Anti Rabies (Verorab)	150	22.950.000,00
		Vaksin Hepatitis B Imune Globulin	25	33.125.000,00
		SD HBSAg (RDT HBSAg)	850	6.955.550,00
		Amitriptillin Tab.25 mg	3.300	551.100,00
		Diazepam 5 MG	3.000	324.000,00
		Diazepam Cairan Inj. 5 mg, 10 amp	150	231.750,00
		Haloperidol 5 mg	1.300	70.200,00
		Haloperidol Inj	200	21.800.000,00
		Trihexipenidyel 2 mg	2.500	157.500,00
		Resperidone 2 mg	2.600	746.200,00
		Triuflokoperazine Tab	500	110.000,00
		Phenolbarbital tablet 30 mg	100	19.700,00
		Safety Box	150	2.100.000,00
		Anti HBS Hepatitis Strip	10	1.600.000,00
		Vaksin HBiG Dewasa	540	27.729.540,00
		Kartu Imunisasi HbIg Dewasa	540	540.000,00
		Jumlah	**15.939,00**	**119.399.484,00**
12.	Desember	Mineral mix	360	1.073.160,00
		Retinol (Vit.A) 200.000 IU Kapsul Lunak (Merah)	2.000	1.274.000,00
		Obat Anti Tuberkulosis Anak	4	1.147.148,00
		Alat Suntik 0,5 ml	5.500	6.545.000,00
		Safety Box	150	2.100.000,00
		Dexamethasone 0,5 tablet (corsona)	1.000	205.000,00
		Oxy Salep Mata	100	277.400,00
		Ctm biasa	3.000	687.000,00
		Salbutamol tablet 4 mg	400	56.800,00
		Infuset Dewasa	50	160.000,00
		OAT K. Harian Kimia Farma	32	17.919.840,00
		Cetrizine HCL	4.000	260.000,00
		Metil Prednisolon 8 mg	1.500	1.060.500,00
		Metronidazole 500 mg	1.500	541.500,00
		Abacavir (ABC) Lamivudin 3TC 120/60 mg	14	679.672,00
		Dolutegravir (DTG) 10 mg	3	208.422,00
		TLD (Tenofovir TDF/Lamivudin 3TC)	40	14.437.200,00
		TLE (Tenofovir TDF/Lamivudin3TC/Efavirens)	96	8.671.680,00
		Jumlah	**19.749,00**	**57.304.322,00**
		Total Penerimaan Hibah Obat Buffer Stock	**1.440.725,00**	**3.979.312.830,90**

Lampiran 18

REKAPITULASI OBAT-OBATAN HIBAH DARI BKKBN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	URAIAN	No. SBBK	Tanggal SBBK	Saldo Persediaan 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023
1	IUD Coper T	-	-	87.500,00	-	87.500,00	-
2	Povidone Iodida 10 % BMHP	-	-	29.250,00	-	29.250,00	-
3	IUD Coper T	-	-	125.000,00	-	125.000,00	-
4	Susuk KB II Plus Inserter	-	-	3.449.700,00	-	3.449.700,00	-
5	Dermafix T	-	-	84.700,00	-	84.700,00	-
6	Ads 3 ML BMHP (implant)	-	-	17.180,00	-	17.180,00	-
7	Mask Tie On	-	-	14.000,00	-	14.000,00	-
8	Surgical Glove No. 7,5 BMHP	-	-	48.600,00	-	48.600,00	-
9	Duk Steril	-	-	130.000,00	-	130.000,00	-
10	Asam Mefenamat 500 Mg BMHP	-	-	23.400,00	-	23.400,00	-
11	Lidocaine Injeksi BMHP	-	-	17.820,00	-	17.820,00	-
12	Pil KB	-	-	2.304.000,00	-	2.304.000,00	-
13	Susuk KB II Plus Inserter	-	-	25.872.750,00	-	25.872.750,00	-
14	Dermafix T	-	-	635.250,00	-	635.250,00	-
15	Ads 3 ML BMHP (Implant)	-	-	128.850,00	-	128.850,00	-
16	Syringe 1 Ml	-	-	450.000,00	-	450.000,00	-
17	Mask Tie On	-	-	105.000,00	-	105.000,00	-
18	Surgical Glove No. 7,5 BMHP	-	-	729.000,00	-	729.000,00	-

Lampiran 18

NO	URAIAN	No. SBBK	Tanggal SBBK	Saldo Persediaan 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023
19	Suntik KB	-	-	2.412.500,00	-	2.412.500,00	-
20	Povidone iodida 10% BMHP	-	-	19.500,00	-	19.500,00	-
21	Handsanitizer 100 Ml	-	-	32.550,00	-	32.550,00	-
22	Pil Progestin	-	-	1.205.100,00	-	1.205.100,00	-
23	Duk Steril	-	-	975.000,00	-	975.000,00	-
24	Asam Mefenamat 500 Mg BMHP	-	-	175.500,00	-	175.500,00	-
25	Lidocaine Injeksi BMHP	-	-	160.380,00	-	160.380,00	-
26	IUD Coper T	-	-	125.000,00	-	125.000,00	-
27	Safety Box	-	-	51.226,00	-	51.226,00	-
28	Kondom	-	-	3.164.760,00	-	3.164.760,00	-
29	Susuk KB II Plus Inserter	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	86.242.500,00	86.242.500,00	-
30	Dermafix T	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	2.117.500,00	2.117.500,00	-
31	ADS 3 ML BMHP Implant	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	429.500,00	429.500,00	-
32	Syringe 1 Ml	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-
33	Mask Tie On	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	350.000,00	350.000,00	-
34	Surgical Glove No. 7,5 BMHP	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	2.430.000,00	2.430.000,00	-
35	Suntik KB	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	19.300.000,00	19.300.000,00	-
36	Povidone Iodida 10 % BMHP	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	311.000,00	311.000,00	-
37	Handsanitizer	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	325.500,00	325.500,00	-
38	Pil Progestin	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	2.008.500,00	2.008.500,00	-
39	Duk Steril	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	3.450.000,00	3.450.000,00	-
40	Asam Mefenamat 500 Mg BMHP	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	585.000,00	585.000,00	-

Lampiran 18

NO	URAIAN	No. SBBK	Tanggal SBBK	Saldo Persediaan 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023
41	Lidocaine Injeksi BMHP	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	534.600,00	534.600,00	-
42	Safety Box	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	145.000,00	145.000,00	-
43	Kondom	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	1.582.380,00	1.582.380,00	-
44	Pil KB	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	4.608.000,00	4.608.000,00	-
45	IUD Coper T	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	685.550,00	-	685.550,00
46	ADS 3 ML BMHP Suntik	04/SP.03.06/J1/I/2023	19 Januari 2023	-	1.718.000,00	1.718.000,00	-
47	Syringe 3 ML	25/SP.03.06/J1/V/2023	27 April 2023	-	900.000,00	900.000,00	-
48	Suntik KB	25/SP.03.06/J1/V/2023	27 April 2023	-	241.250,00	241.250,00	-
49	Hand Sanitizer 100 ML	25/SP.03.06/J1/V/2023	27 April 2023	-	542.500,00	542.500,00	-
50	Pil Progestin	25/SP.03.06/J1/V/2023	27 April 2023	-	4.418.700,00	4.418.700,00	-
51	Safety Box	25/SP.03.06/J1/V/2023	27 April 2023	-	362.500,00	-	362.500,00
52	Kondom	25/SP.03.06/J1/V/2023	27 April 2023	-	131.865,00	131.865,00	-
53	Suntik KB	25/SP.03.06/J1/V/2023	27 April 2023	-	4.032.000,00	4.032.000,00	-
54	IUD Coper T	25/SP.03.06/J1/V/2023	27 April 2023	-	452.463,00	452.463,00	-
55	ADS 3 ML BMHP Suntik	25/SP.03.06/J1/V/2023	27 April 2023	-	730.150,00	730.150,00	-
56	Obat Suntik KB Kombinasi (Gestin) F3)	25/SP.03.06/J1/V/2023	27 April 2023	-	21.375.000,00	21.375.000,00	-
57	Susuk KB II Plus Inserter	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	34.497.000,00	34.497.000,00	-
58	Dermafix T	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	825.200,00	825.200,00	-
59	Syringe 3 ML	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	1.889.800,00	1.889.800,00	-
60	Syringe 1 Ml	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-
61	Masker	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	255.000,00	255.000,00	-
62	Sarung Tangan Steril	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	973.200,00	973.200,00	-

Lampiran 18

NO	URAIAN	No. SBBK	Tanggal SBBK	Saldo Persediaan 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023
63	Suntik KB Progrestin	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	16.887.500,00	16.887.500,00	-
64	Pil Progestin	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	1.606.800,00	1.606.800,00	-
65	Duk Steril Disposable	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	1.386.000,00	1.386.000,00	-
66	Lidocaine Injeksi BMHP	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	178.200,00	178.200,00	-
67	Kondom	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	1.582.380,00	1.582.380,00	-
68	IUD Coper T	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	2.742.200,00	2.454.269,00	287.931,00
69	Suntik KB Kombinasi (Gestin F3)	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	5.937.500,00	5.937.500,00	-
70	Povidone Iodida 10% BMHP	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	131.960,00	131.960,00	-
71	Pil KB Kombinasi	55/SP.03.06/J1/VIII/2023	9 Agustus 2023	-	5.760.000,00	5.760.000,00	-
72	Implan 2 Batang	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	517.455.000,00	-	517.455.000,00
73	Plester Steril	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	12.378.000,00	-	12.378.000,00
74	Sarung Tangan Steril	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	3.712.758,00	-	3.712.758,00
75	Sarung Tangan Steril	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	14.764.200,00	-	14.764.200,00
76	Lidocaine Injeksi BMHP	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	2.454.705,00	-	2.454.705,00
77	Lidocaine Injeksi BMHP	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	968.500,00	-	968.500,00
78	Povidon Iodida 10% BMHP	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	1.979.400,00	-	1.979.400,00
79	Masker	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	2.400.000,00	-	2.400.000,00
80	Duk Steril Disposable	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	20.748.000,00	-	20.748.000,00
81	Pil Kombinasi	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	6.912.000,00	5.184.000,00	1.728.000,00
82	Pil Progestin	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	8.034.000,00	-	8.034.000,00
83	Suntik KB Kombinasi (Gestin F3)	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	23.750.000,00	-	23.750.000,00
84	Suntik KB Progrestin	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	28.950.000,00	9.650.000,00	19.300.000,00

Lampiran 18

NO	URAIAN	No. SBBK	Tanggal SBBK	Saldo Persediaan 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023
85	Kondom	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	6.593.250,00	-	6.593.250,00
86	Asam Mefenamat 500 Mg BMHP	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	4.200.000,00	-	4.200.000,00
87	Safety Box	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	1.450.000,00	362.500,00	1.087.500,00
88	Syringe 3 ML	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	9.449.000,00	-	9.449.000,00
89	IUD Coper T	71/SP.03.06/J1/XI/2023	22 November 2023	-	2.056.650,00	-	2.056.650,00
JUMLAH				**42.573.516,00**	**906.517.661,00**	**294.696.233,00**	**654.394.944,00**

Lampiran 19

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR SALDO PERSEDIAAN 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	OPD	SALDO PERSEDIAAN												Total
		Alat Tulis Kantor	Alat Listrik	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Bahan Bakar dan Pelumas	Isi tabung gas	Suku Cadang Alat Angkutan	Obat	Natura	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	Bahan Lainnya	Bahan Cetakan	Persediaan untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	
1	Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan	3.412.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.412.800,00
2	Dinas Kesehatan	-	275.000,00	-	3.228.200,00	44.055.900,00	39.612.588,00	7.966.062.917,55	-	-	4.501.990.919,61	-	-	12.555.225.525,16
3	Dinas Pekerjaan Umum, Dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.840.000,00	-	31.840.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	22.400.000,00	-	-	-	-	22.400.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	213.898.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.490.000,00	-	394.388.800,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	654.394.944	-	-	-	-	-	654.394.944,00
14	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859.500,00	-	859.500,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Perikanan	-	-	2.760.000,00	-	14.977.500	-	-	-	-	8.350.000	-	19.000.000,00	45.087.500,00
21	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Bagian Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Bagian Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Bagian Administrasi Kesra Dan Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Bagian Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Totikum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Bulagi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Bulagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Liang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Tinangkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Buko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Tinangkung Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Totikum Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Peling Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Bulagi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Buko Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Tinangkung Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	385.000,00	-	-	-	-	2.585.700,00	71.324.200	103.635.000	-	-	177.929.900,00
46	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.440.000,00
49	Badan Pendapatan Daerah	7.032.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.017.715	-	137.050.465,00
50	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**229.784.350,00**	**275.000,00**	**3.145.000,00**	**3.228.200,00**	**59.033.400,00**	**39.612.588,00**	**8.620.457.861,55**	**24.985.700,00**	**71.324.200,00**	**4.613.975.919,61**	**343.207.215,00**	**19.000.000,00**	**14.028.029.434,16**

Lampiran 20

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR OBAT EXPIRE DATE (ED)

No	Uraian	Saldo s/d 31 Desember 2022	ED/Rusak/Usang Tahun 2023	Jumlah	Penghapusan Tahun 2023	Saldo Obat ED/Rusak/Usang Per 31 Desember 2023
I.	**DINAS KESEHATAN**					
	Instalasi Farmasi Kesehatan/Puskesmas/RSUD Bilabanggai	8.010.263.089,91	3.253.977.797,50	11.264.240.887,41	-	11.264.240.887,41
	RSUD Trikora Salakan	335.329.777,79	73.821.050,84	409.150.828,63	164.461.771,64	244.689.056,99
	Jumlah obat ED Dinas Kesehatan	**8.345.592.867,70**	**3.327.798.848,34**	**11.673.391.716,04**	**164.461.771,64**	**11.508.929.944,40**

Lampiran 21

REKAPITULASI UTANG PFK SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam Rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	UTANG PFK
BOS SD		
1	Sekolah Dasar Inpres Abason	39.500,00
2	Sekolah Dasar Inpres Bolonan	1.024.646,00
3	Sekolah Dasar Inpres Sambiut	217.800,00
4	Sekolah Dasar Inpres Sampaka	561.700,00
5	Sekolah Dasar Negeri 1 Kombutokan	120.000,00
6	Sekolah Dasar Negeri Batangbabasal	3.390.789,00
7	Sekolah Dasar Negeri Lopito	2.884.750,00
8	Sekolah Dasar Negeri Pembina Sambiut	790.185,00
9	Sekolah Dasar Negeri Salangano	416.000,00
10	Sekolah Dasar Nosuon	-
11	Sekolah Dasar Negeri Inpres 2 Kombutokan	732.710,00
12	Sekolah Dasar Inpres Babang	210.400,00
13	Sekolah Dasar Inpres Kokondong	200.400,00
14	Sekolah Dasar Inpres Lolantang	204.320,00
15	Sekolah Dasar Inpres Palabatu 2	333.198,00
16	Sekolah Dasar Inpres Pandaluk	247.500,00
17	Sekolah Dasar Inpres Toi-Toi	120.000,00
18	Sekolah Dasar Negeri Balalon	2.267.978,00
19	Sekolah Dasar Negeri Momotan	-
20	Sekolah Dasar Negeri Osan	3.655.774,00
21	Sekolah Dasar Negeri Palabatu I	120.000,00
22	Sekolah Dasar Negeri Pipilogot	-
23	Sekolah Dasar Negeri Sabelak	-
24	Sekolah Dasar Negeri Suit	129.400,00
25	Sekolah Dasar Negeri Tatarandang	1.407.359,00
26	Sekolah Dasar Negeri Unu	320.000,00
27	Sekolah Dasar Negeri Labotankandi	543.955,00
28	Sekolah Dasar Negeri Inpres Bonepuso	517.026,00
29	Sekolah Dasar Inpres 3 Bulagi	1.276.297,00
30	Sekolah Dasar Inpres Boloy	408.198,00
31	Sekolah Dasar Inpres Komba-Komba	264.000,00
32	Sekolah Dasar Inpres Oluno	-
33	Sekolah Dasar Negeri Alul	411.200,00
34	Sekolah Dasar Negeri I Bulagi	335.500,00
35	Sekolah Dasar Negeri Inpres Sumondung	195.420,00
36	Sekolah Dasar Negeri Lalanday	-
37	Sekolah Dasar Negeri Meselesek	995.345,00
38	Sekolah Dasar Negeri Montomisan	45.680,00
39	Sekolah Dasar Negeri Pembina Bulagi	587.777,00
40	Sekolah Dasar Negeri Seasa	555.634,00
41	Sekolah Dasar Negeri Sosom	296.216,00
42	Sekolah Dasar Negeri Tolo	607.917,00
43	Sekolah Dasar Negeri Toolon	-
44	Sekolah Dasar Negeri Inpres Kayubet	-

Lampiran 21

NO	NAMA SEKOLAH	UTANG PFK
45	Sekolah Dasar Negeri Kambal	42.000,00
46	Sekolah Dasar 3 Inpres Liang	4.179.087,00
47	Sekolah Dasar Inpres Kinandal	70.000,00
48	Sekolah Dasar Inpres Pinalong	-
49	Sekolah Dasar Inpres Popidolon	625.730,00
50	Sekolah Dasar Inpres Selekan	642.793,00
51	Sekolah Dasar Negeri 1 Okumel	1.740.265,00
52	Sekolah Dasar Negeri Apal	1.218.788,00
53	Sekolah Dasar Negeri Balayon	247.200,00
54	Sekolah Dasar Negeri Basosol	144.200,00
55	Sekolah Dasar Negeri Boyomoute	334.400,00
56	Sekolah Dasar Negeri Loolong	434.600,00
57	Sekolah Dasar Negeri Mamulusan	568.836,00
58	Sekolah Dasar Negeri Pembina Liang	515.763,00
59	Sekolah Dasar Negeri 2 Inpres Liang	-
60	Sekolah Dasar Negeri 2 Inpres Okumel	584.498,00
61	Sekolah Dasar Negeri Inpres Binuntuli	666.497,00
62	Sekolah Dasar Negeri Inpres Tomboniki	842.342,00
63	Sekolah Dasar Inpres 1 Salakan	-
64	Sekolah Dasar Inpres Kautu	69.600,00
65	Sekolah Dasar Inpres Tompudau	353.360,00
66	Sekolah Dasar Negeri 2 Salakan	-
67	Sekolah Dasar Negeri 3 Salakan	421.873,00
68	Sekolah Dasar Negeri Ambelang	2.392.666,00
69	Sekolah Dasar Negeri Bakalan	1.312.941,00
70	Sekolah Dasar Negeri Bulungkobit	-
71	Sekolah Dasar Negeri Bungin	1.189.776,00
72	Sekolah Dasar Negeri Kuakon	516.000,00
73	Sekolah Dasar Negeri Manggalai	303.080,00
74	Sekolah Dasar Negeri Pembina Salakan	-
75	Sekolah Dasar Negeri Inpres Saiyong	-
76	Sekolah Dasar Inpres 2 Paisubatu	374.846,00
77	Sekolah Dasar Inpres Lalengan	176.500,00
78	Sekolah Dasar Inpres Okulo	322.919,00
79	Sekolah Dasar Inpres Palapat	356.400,00
80	Sekolah Dasar Negeri 1 Paisubatu	90.000,00
81	Sekolah Dasar Negeri Batangono	-
82	Sekolah Dasar Negeri Ebenheiser	-
83	Sekolah Dasar Negeri Leme-Leme	1.344.443,00
84	Sekolah Dasar Negeri Olusi	1.262.564,00
85	Sekolah Dasar Negeri Pelinglalomo	310.000,00
86	Sekolah Dasar Negeri Pembina Tataba	-
87	Sekolah Dasar Negeri Tatendeng	93.600,00
88	Sekolah Dasar Negeri Inpres Malanggong	281.550,00
89	Sekolah Dasar Inpres Kampung Baru	165.000,00
90	Sekolah Dasar Inpres Lomboan	-
91	Sekolah Dasar Inpres Mansamat B	-
92	Sekolah Dasar Negeri Bobu	2.968.810,00
93	Sekolah Dasar Negeri Gansal	-

Lampiran 21

NO	NAMA SEKOLAH	UTANG PFK
94	Sekolah Dasar Negeri Mansamat A	-
95	Sekolah Dasar Negeri Paisumosoni	635.700,00
96	Sekolah Dasar Negeri Sasampean	50.000,00
97	Sekolah Dasar Negeri Tobing	-
98	Sekolah Dasar Negeri Inpres Lesantobungin	565.000,00
99	Sekolah Dasar Negeri Inpres Tinangkung	68.000,00
100	Sekolah Dasar Inpres 1 Kalumbatan	62.800,00
101	Sekolah Dasar Inpres 2 Kalumbatan	2.208.560,00
102	Sekolah Dasar Inpres 3 Kalumbatan	13.765.133,00
103	Sekolah Dasar Inpres Kanali	225.400,00
104	Sekolah Dasar Negeri Lobuton	1.882.966,00
105	Sekolah Dasar Negeri Mata	3.791.144,00
106	Sekolah Dasar Negeri Tobungku	528.030,00
107	Sekolah Dasar Negeri Tonuson	-
108	Sekolah Dasar Inpres 2 Patukuki	5.195.954,00
109	Sekolah Dasar Inpres Luk	384.800,00
110	Sekolah Dasar Inpres Popisi	-
111	Sekolah Dasar Inpres Sampekonan	-
112	Sekolah Dasar Inpres Tabing	89.000,00
113	Sekolah Dasar Negeri 1 Patukuki	339.900,00
114	Sekolah Dasar Negeri Bakum	1.142.496,00
115	Sekolah Dasar Negeri Balombong	-
116	Sekolah Dasar Negeri Kolak	237.500,00
117	Sekolah Dasar Negeri Koyobunga	570.010,00
118	Sekolah Dasar Negeri Tolulos	1.794.248,00
119	Sekolah Dasar Negeri Inpres Lempek	-
120	Sekolah Dasar Negeri Inpres Tombos	140.000,00
121	Sekolah Dasar Negeri Inpres Tunggaling	370.909,00
122	Sekolah Dasar Negeri Alakasing	-
123	Sekolah Dasar Inpres Lukpanenteng	2.486.684,00
124	Sekolah Dasar Inpres Mandok	84.000,00
125	Sekolah Dasar Inpres Minanga	-
126	Sekolah Dasar Inpres Poganda	-
127	Sekolah Dasar Negeri Bakalinga	1.280.472,00
128	Sekolah Dasar Negeri Bolubung	294.000,00
129	Sekolah Dasar Negeri Montop	3.188.350,00
130	Sekolah Dasar Negeri Ombuli	246.123,00
131	Sekolah Dasar Negeri Paisuluno	1.280.457,00
132	Sekolah Dasar Negeri Sabang	611.364,00
133	Sekolah Dasar Negeri Sambulangan	1.607.980,00
134	Sekolah Dasar Inpres Bangunemo	217.500,00
135	Sekolah Dasar Negeri Inpres Koyobunga	331.900,00
136	Sekolah Dasar Inpres 3 Lumbi-Lumbia	-
137	Sekolah Dasar Inpres Apal	2.107.176,00
138	Sekolah Dasar Inpres Buko	-
139	Sekolah Dasar Inpres Labangun	-
140	Sekolah Dasar Inpres Matamaling	919.950,00
141	Sekolah Dasar Inpres Sapelang	285.100,00
142	Sekolah Dasar Inpres Seano	904.032,00

Lampiran 21

NO	NAMA SEKOLAH	UTANG PFK
143	Sekolah Dasar Inpres Taepa	771.920,00
144	Sekolah Dasar Inpres Tatabau	1.975.539,00
145	Sekolah Dasar Negeri 1 Lumbi-Lumbia	2.880.031,00
146	Sekolah Dasar Negeri Alani	462.600,00
147	Sekolah Dasar Negeri Inpres 2 Lumbi-Lumbia	1.677.053,00
148	Sekolah Dasar Negeri Lalong	2.188.837,00
149	Sekolah Dasar Negeri Luksagu	-
150	Sekolah Dasar Negeri Palam	1.554.500,00
151	Sekolah Dasar Negeri Ponding-Ponding	1.172.699,00
152	Sekolah Dasar Negeri Tatakalai	12.720.172,00
153	Sekolah Dasar Negeri Inpres Bangpanga	977.744,00
154	Sekolah Dasar Negeri Inpres Luksagu	1.939.770,00
BOS SMP		
1	SMP Negeri 1 Totikum	937.306,00
2	SMP Negeri 2 Totikum	-
3	SMP Negeri 3 Totikum	-
4	SMP Negeri 4 Totikum	4.515.601,00
5	SMP Negeri 1 Bulagi Selatan	2.148.162,00
6	SMP Negeri 2 Bulagi Selatan	458.452,00
7	SMP Negeri 3 Bulagi Selatan	1.979.431,00
8	SMP Negeri Satap Tatarandang	1.220.415,00
9	SMP Negeri 1 Bulagi	1.871.300,00
10	SMP Negeri 2 Bulagi	1.134.400,00
11	SMP Negeri 3 Bulagi	4.410.325,00
12	SMP Negeri Satu Atap Alul	189.600,00
13	SMP Negeri 5 Satap Bulagi	721.000,00
14	SMP Negeri 1 Liang	2.895.800,00
15	SMP Negeri 2 Liang	3.232.063,00
16	SMP Negeri 3 Liang	347.550,00
17	SMP Negeri Satu Atap Kindandal	369.000,00
18	SMP Negeri Satu Atap Mamulusan	217.000,00
19	SMP Negeri 1 Tinangkung	-
20	SMP Negeri 2 Tinangkung	5.405.653,00
21	SMP Negeri 3 Tinangkung	6.557.974,00
22	SMP Negeri 1 Buko	6.101.795,00
23	SMP Negeri 2 Buko	1.446.350,00
24	SMP Negeri Satap Ebenheizer	-
25	SMP Negeri Satu Atap Okulo	160.000,00
26	SMP Negeri Satu Atap Tatendeng	-
27	SMP Negeri 1 Tinangkung Selatan	-
28	SMP Negeri 2 Tinangkung Selatan	-
29	SMP Negeri 1 Totikum Selatan	740.009,00
30	SMP Negeri 2 Satu Atap Totikum Selatan	857.910,00
31	SMP Negeri 2 Totikum Selatan	210.000,00
32	SMP Negeri 1 Peling Tengah	2.709.089,00
33	SMP Negeri 2 Peling Tengah	1.014.637,00
34	SMP Negeri Satu Atap Popisi	80.500,00
35	SMP Negeri Satu Atap Tolulos	265.000,00

Lampiran 21

NO	NAMA SEKOLAH	UTANG PFK
36	SMP Negeri 1 Bulagi Utara	1.554.258,00
37	SMP Negeri 2 Bulagi Utara	87.000,00
38	SMP Negeri 3 Bulagi Utara	709.200,00
39	SMP Negeri 4 Bulagi Utara	-
40	SMP Negeri Satu Atap Bakalinga	1.872.494,00
41	SMP Negeri Satu Atap Lukpanenteng	691.104,00
42	SMP Negeri Satu Atap Ombuli	52.000,00
43	SMP Negeri 1 Buko Selatan	10.767.128,00
44	SMP Negeri 2 Buko Selatan	669.000,00
45	SMP Negeri 3 Buko Selatan	-
46	SMP Negeri Satu Atap Matamaling	567.700,00
47	SMP Negeri 4 Buko Selatan Satap	344.375,00
48	SMP negeri 1 Tinangkung Utara	2.607.110,00
49	SMP Negeri Satu Atap Palam	320.540,00
50	SMP Negeri 4 Bulagi Selatan	1.821.877,00
51	SMP Negeri 4 Liang	808.842,00
BOP PAUD & KESETARAAN		
1	TK Negeri Alakasing	132.000,00
2	TK Negeri Bakalinga	344.650,00
3	TK Negeri Bangunemo	-
4	TK Negeri Bobu	181.000,00
5	TK Negeri Bulagi	-
6	TK Negeri Bunepuso	860.315,00
7	TK Negeri Harapan Baru Sosom	-
8	TK Negeri Kindandal	279.572,00
9	TK Negeri Kombutokan	24.000,00
10	TK Negeri Lalengan	-
11	TK Negeri Landonan Bebeau	-
12	TK Negeri Liang	30.400,00
13	TK Negeri Lolantang	60.000,00
14	TK Negeri Lopito	-
15	TK Negeri Luksagu	41.600,00
16	TK Negeri Meselesek	-
17	TK Negeri Lukpanenteng	-
18	TK Negeri Palam	496.822,00
19	TK Negeri Patukuki	462.545,00
20	TK Negeri Peling Lalomo	-
21	TK Negeri Percontohan	-
22	TK Negeri Pertiwi Salakan	310.500,00
23	TK Negeri Ponding-Ponding	418.909,00
24	TK Negeri Sakay	-
25	TK Negeri Salangano	120.000,00
26	TK Negeri Sampaka	-
27	TK Negeri Seasa	-
28	TK Negeri Tataba	-
29	TK Negeri Tatarandang	270.000,00
30	TK Pembina Salakan	-
KESETARAAN		

Lampiran 21

NO	NAMA SEKOLAH	UTANG PFK
1	SKB KAB.BANGKEP	-
JUMLAH		**210.912.267,00**

Lampiran 22

DAFTAR UTANG BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

NO	NAMA OPD	NILAI TPP	IURAN PEMDA (4%)	POTONGAN		JUMLAH BERSIH
				IWP (1%)	PPh	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=3-5-6*
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	145.323.925	7.347.429	1.836.852	7.167.848	136.319.225
2	Dinas Kesehatan	850.890.490	42.423.630	10.605.908	42.000.772	798.283.811
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	102.114.539	4.897.934	1.224.484	6.817.582	94.072.473
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman &Pertanahan	58.966.285	2.391.477	597.860	5.167.643	53.200.782
5	Dinas Perhubungan	57.978.078	2.500.092	625.023	3.870.083	53.482.972
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	36.868.171	1.614.777	406.354	3.485.295	32.976.522
7	Dinas Lingkungan Hidup	40.180.578	1.832.086	458.022	3.871.216	35.851.340
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55.692.390	2.322.192	580.548	4.277.908	50.833.934
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37.204.101	1.747.911	436.978	2.507.785	34.259.338
10	Dinas Sosial	46.067.433	1.958.639	489.653	3.786.746	41.791.034
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAP2 dan KB	59.252.457	2.613.375	653.344	4.785.692	53.813.421
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.957.433	1.462.159	365.533	2.367.424	29.224.477
13	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	66.630.468	2.914.289	728.566	5.983.287	59.918.615
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM	59.723.954	2.423.539	605.885	4.854.124	54.263.945
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	46.509.985	2.011.598	502.899	4.665.232	41.341.854
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	48.785.264	2.301.024	575.256	4.093.362	44.116.646
17	Dinas Perikanan	52.032.629	2.626.191	656.548	4.351.774	47.024.307
18	Dinas Pariwisata	35.321.329	1.549.683	387.421	2.666.079	32.267.829
19	Dinas Ketahanan Pangan	45.818.315	2.174.691	543.667	4.302.834	40.971.814
20	Dinas Pertanian	147.097.585	6.536.125	1.630.384	11.729.669	133.737.532
21	Satuan Polisi Pamong Praja	72.965.294	2.946.367	736.592	5.144.858	67.083.844
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Litbang Daerah	80.671.236	3.751.909	937.977	6.913.005	72.820.254
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	74.812.924	3.385.388	846.347	5.489.586	68.476.991
24	Badan Pendapatan Daerah	64.695.751	2.828.728	707.182	5.088.876	58.899.693
25	Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan SDM	68.287.126	3.118.992	779.729	4.161.325	63.346.072
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.520.683	2.162.999	540.750	3.183.121	31.796.812
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41.673.719	1.782.606	445.651	3.007.783	38.220.285

Lampiran 22

NO	NAMA OPD	NILAI TPP	IURAN PEMDA (4%)	POTONGAN		JUMLAH BERSIH
				IWP (1%)	PPh	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=3-5-6*
28	Sekretariat DPRD	52.899.384	2.257.093	564.273	3.387.234	48.947.877
29	Sekretariat Daerah	154.543.137	6.645.168	1.661.285	13.982.330	138.899.522
30	Inspektorat	117.287.992	4.659.671	1.164.918	9.019.229	107.103.845
31	Kecamatan Totikum	37.438.796	1.623.390	405.848	2.246.132	34.786.816
32	Kecamatan Bulagi	52.956.967	2.143.389	535.847	2.513.181	49.907.939
33	Kecamatan Tinangkung Selatan	23.303.608	974.049	243.508	1.467.517	21.592.583
34	Kecamatan Totikum Selatan	32.091.874	1.389.043	347.261	1.775.088	29.969.525
35	Kecamatan Peling Tengah	34.997.949	1.420.315	355.069	1.687.487	32.955.393
36	Kecamatan Bulagi Utara	38.560.157	1.607.149	401.787	2.367.102	35.791.268
37	Kecamatan Buko Selatan	17.857.129	977.740	244.435	1.123.291	16.489.403
38	Kecamatan Tinangkung Utara	33.020.027	1.382.245	345.552	1.832.173	30.842.302
39	Kecamatan Buko	28.225.214	1.312.555	328.129	1.580.735	26.316.350
40	Kecamatan Bulagi Selatan	31.407.812	1.358.345	339.586	1.771.269	29.296.957
41	Kecamatan Liang	38.436.897	1.738.362	434.577	1.689.535	36.312.785
42	Kecamatan Tinangkung	31.657.995	1.505.978	376.489	1.771.502	29.510.004
	J U M L A H	**3.187.727.080**	**146.620.324**	**36.653.975**	**213.954.716**	**2.937.118.389**

Lampiran 23

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
REKAPITULASI UTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI ASN
TAHUN ANGGARAN 2023

(DALAM RUPIAH)

A. Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN di FKTP

No	Nama FKTP	Jasa Pelayanan dari Non Kaptasi JKN				Jasa Pelayanan Pasien Umum				Total
		2019	2020	2023	Jumlah	2020	2022	2023	Jumlah	
1	Salakan	1.916.750,00	22.392.450,00	14.786.926,00	39.096.126,00	0,00	0,00	4.640.000,00	4.640.000,00	43.736.126,00
2	Mansamat	12.705.000,00	20.273.190,00	32.028.964,00	65.007.154,00	0,00	0,00	5.740.000,00	5.740.000,00	70.747.154,00
3	Patukuki	0,00	13.912.560,00	10.669.448,00	24.582.008,00	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00	25.844.008,00
4	Totikum	82.070.500,00	27.184.440,00	105.823.266,00	215.078.206,00	0,00	0,00	9.113.000,00	9.113.000,00	224.191.206,00
5	Saleati	0,00	12.394.567,00	16.564.316,00	28.958.883,00	44.500.000,00	13.125.000,00	2.154.000,00	59.779.000,00	88.737.883,00
6	Bulagi	6.840.000,00	31.720.500,00	69.916.225,00	108.476.725,00	0,00	0,00	8.585.000,00	8.585.000,00	117.061.725,00
7	Sabang	10.546.000,00	26.761.500,00	13.874.000,00	51.181.500,00	0,00	0,00	2.869.000,00	2.869.000,00	54.050.500,00
8	Lolantang	0,00	13.909.140,00	13.631.518,00	27.540.658,00	0,00	0,00	4.028.000,00	4.028.000,00	31.568.658,00
9	Tataba	13.837.500,00	42.039.210,00	16.781.325,00	72.658.035,00	0,00	0,00	6.407.000,00	6.407.000,00	79.065.035,00
10	Lumbi-Lumbia	1.624.000,00	18.102.345,00	6.379.478,00	26.105.823,00	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00	27.050.823,00
11	Tinangkung Utara	0,00	19.615.410,00	112.785.970,00	132.401.380,00	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00	134.866.380,00
12	Totikum Selatan	6.636.000,00	10.555.260,00	65.599.450,00	82.790.710,00	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	84.830.710,00
13	Bakalan Raya	406.000,00	1.898.100,00	928.000,00	3.232.100,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	3.464.100,00
14	Bonepuso	0,00	0,00	2.782.840,00	2.782.840,00	0,00	1.890.000,00	670.000,00	2.560.000,00	5.342.840,00
15	RSP Bilabanggai	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.809.988,00	7.809.988,00	7.809.988,00
Jumlah A		**136.581.750,00**	**260.758.672,00**	**482.551.726,00**	**879.892.148,00**	**44.500.000,00**	**15.015.000,00**	**58.959.988,00**	**118.474.988,00**	**998.367.136,00**

B. Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN RSUD Trikora

No.	Klaim BPJS yang Belum dibayarkan Jasanya	Jumlah
1	NOVEMBER COVID-19 2022	354.150,00
2	APRIL 2023	289.914.163,00
3	MEI 2023	641.536.785,00
4	JUNI 2023	511.889.580,00
5	KLAIM COVID MEI 2023	58.822.650,00
Jumlah B		**1.502.517.328,00**
Jumlah A + B		**2.500.884.464,00**

Lampiran 24

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
REKAPITULASI UTANG BELANJA PEGAWAI BLUD (RSUD TRIKORA)
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	BULAN PELAYANAN	UTANG JASA MEDIK PER 31 DESEMBER 2023	
A. Klaim BPJS			
1	SEPTEMBER 2023 BPJS	Rp	64.236.875,00
2	SUSULAN AGUSTUS 2023 BPJS	Rp	48.484.485,00
3	OKTOBER 2023 BPJS	Rp	467.224.605,00
4	SUSULAN SEPTEMBER 2023 BPJS	Rp	54.351.900,00
5	NOVEMBER 2023 BPJS	Rp	551.750.670,00
6	SUSULAN SEPTEMBER PENDING II 2023	Rp	2.312.370,00
7	SUSULAN OKTOBER PENDING II RI 2023	Rp	14.847.255,00
8	SUSULAN OKTOBER PENDING I RI 2023	Rp	44.754.615,00
9	SUSULAN NOVEMBER RJ + RI 2023	Rp	44.203.230,00
10	DESEMBER REGULER RJ + RI 2023	Rp	534.292.110,00
11	SUSULAN PENDING I DESEMBER RI 2023	Rp	36.408.690,00
12	SUSULAN NOPEMBER RI 2023	Rp	17.438.198,00
13	SUSULAN PENDING 2 DESEMBER RI 2023	Rp	29.438.347,00
	Jumlah A	**Rp**	**1.909.743.350,00**
B. Pelayanan Pasien Umum			
1	Desember 2023	Rp	84.709.500,00
	Jumlah B	**Rp**	**84.709.500,00**
	Jumlah A + B	**Rp**	**1.994.452.850,00**

Lampiran 25

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPUALAUAN
UTANG BELANJA BARANG DAN JASA BLUD (UTANG KEPADA PMI)
TAHUN ANGGARAN 2023

Bulan	Jumlah Pasien	Jumlah Permintaan (Kolf)	Harga	Utang Jasa Pelayanan
Januari	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	23	33	Rp 240.000,00	Rp 7.920.000,00
Juli	45	64	Rp 240.000,00	Rp 15.360.000,00
Agustus	62	81	Rp 240.000,00	Rp 19.440.000,00
Septembar	49	58	Rp 240.000,00	Rp 13.920.000,00
Oktober	75	91	Rp 240.000,00	Rp 21.840.000,00
November	92	120	Rp 240.000,00	Rp 28.800.000,00
Desember	57	76	Rp 240.000,00	Rp 18.240.000,00
TOTAL	**403**	**523**		**Rp 125.520.000,00**

-

Lampiran 26

RINCIAN SALDO BELANJA OPERASI PER OPD
KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	(%)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	6.616.698.064,00	6.463.505.302,00	(153.192.762,00)	97,68
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.173.196.707,00	7.901.772.510,00	(13.271.424.197,00)	37,32
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.199.217.792,00	3.073.083.020,00	(126.134.772,00)	96,06
4	Badan Pendapatan Daerah	5.081.084.165,00	4.736.210.157,00	(344.874.008,00)	93,21
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.581.642.794,00	20.209.512.218,00	(1.372.130.576,00)	93,64
6	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Litbang	8.282.147.946,00	7.819.605.577,00	(462.542.369,00)	94,42
7	Bagian Administrasi Pembangunan	923.101.000,00	913.389.900,00	(9.711.100,00)	98,95
8	Bagian Hukum	1.139.753.800,00	1.120.455.700,00	(19.298.100,00)	98,31
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.396.960.075,00	3.362.920.893,00	(34.039.182,00)	99,00
10	Bagian Organisasi	744.460.500,00	727.570.701,00	(16.889.799,00)	97,73
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	757.490.000,00	749.316.895,00	(8.173.105,00)	98,92
12	Bagian Perekonomian	709.168.900,00	706.074.599,00	(3.094.301,00)	99,56
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	825.159.250,00	791.293.565,00	(33.865.685,00)	95,90
14	Bagian Tata Pemerintahan	577.648.500,00	570.860.993,00	(6.787.507,00)	98,82
15	Bagian Umum	61.421.371.253,00	30.887.482.317,00	(30.533.888.936,00)	50,29
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.621.380.497,00	3.502.015.231,00	(119.365.266,00)	96,70
17	Dinas Kesehatan	132.254.020.837,00	118.844.064.057,00	(13.409.956.780,00)	89,86
18	Dinas Ketahanan Pangan	3.762.661.742,00	3.691.578.026,00	(71.083.716,00)	98,11
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.664.682.540,00	2.598.472.214,00	(66.210.326,00)	97,52
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.109.246.820,00	4.034.276.496,00	(74.970.324,00)	98,18
21	Dinas Lingkungan Hidup	4.452.825.769,00	4.362.230.312,00	(90.595.457,00)	97,97
22	Dinas Pariwisata	2.687.242.541,00	2.537.368.320,00	(149.874.221,00)	94,42
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.395.633.530,00	15.770.299.553,00	(1.625.333.977,00)	90,66
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.357.180.525,00	4.866.477.260,00	(490.703.265,00)	90,84
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	9.318.136.860,00	8.715.086.196,00	(603.050.664,00)	93,53
26	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.478.348.573,00	3.183.202.469,00	(295.146.104,00)	91,51
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	3.694.614.824,00	3.644.749.698,00	(49.865.126,00)	98,65
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	174.484.039.372,00	167.237.296.527,21	(7.246.742.844,79)	95,85
29	Dinas Perhubungan	6.588.538.255,00	6.402.436.044,00	(186.102.211,00)	97,18
30	Dinas Perikanan	11.182.468.108,00	10.119.473.032,00	(1.062.995.076,00)	90,49
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha	4.961.488.390,00	4.780.015.147,00	(181.473.243,00)	96,34
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.403.031.156,00	3.315.071.659,00	(87.959.497,00)	97,42
33	Dinas Pertanian	10.616.243.944,00	10.046.305.974,00	(569.937.970,00)	94,63
34	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.124.316.533,00	4.802.525.413,00	(321.791.120,00)	93,72
35	Dinas Sosial	6.527.489.415,00	6.393.516.864,00	(133.972.551,00)	97,95
36	Inspektorat	8.672.561.163,00	8.584.322.117,00	(88.239.046,00)	98,98
37	Kec. Buko	2.285.283.510,00	2.158.343.651,00	(126.939.859,00)	94,45
38	Kec. Buko Selatan	1.729.354.389,00	1.657.206.142,00	(72.148.247,00)	95,83
39	Kec. Bulagi	3.486.151.164,00	3.431.013.056,00	(55.138.108,00)	98,42
40	Kec. Bulagi Selatan	2.750.186.782,00	2.709.285.092,00	(40.901.690,00)	98,51
41	Kec. Bulagi Utara	2.706.741.868,00	2.663.769.951,00	(42.971.917,00)	98,41
42	Kec. Liang	2.602.343.698,00	2.564.200.128,00	(38.143.570,00)	98,53
43	Kec. Peling Tengah	2.370.272.374,00	2.320.567.628,00	(49.704.746,00)	97,90
44	Kec. Tinangkung	2.752.402.951,00	2.663.930.838,00	(88.472.113,00)	96,79
45	Kec. Tinangkung Selatan	1.751.744.120,00	1.680.484.770,00	(71.259.350,00)	95,93
46	Kec. Tinangkung Utara	1.932.587.213,00	1.886.483.499,00	(46.103.714,00)	97,61
47	Kec. Totikum	2.402.308.570,00	2.338.898.019,00	(63.410.551,00)	97,36
48	Kec. Totikum Selatan	2.069.656.783,00	2.026.153.347,00	(43.503.436,00)	97,90
49	Satuan Polisi Pamong Praja	8.190.754.387,00	7.924.154.738,00	(266.599.649,00)	96,75
50	Sekretariat DPRD	26.504.408.945,00	23.587.721.278,00	(2.916.687.667,00)	89,00
Jumlah		**624.319.448.894,00**	**547.076.049.093,21**	**(77.243.399.800,79)**	**87,63**

Lampiran 27

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI PER OPD
KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023 DAN 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%) 2023	Realisasi 2022
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.171.350.064,00	3.127.233.527,00	98,61	3.151.300.947,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.279.162.254,00	2.177.373.750,00	95,53	2.310.129.885,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.660.751.792,00	1.616.892.349,00	97,36	1.761.861.633,00
4	Badan Pendapatan Daerah	3.500.901.350,00	3.237.530.628,00	92,48	3.289.166.565,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.748.762.795,00	15.206.586.502,00	96,56	14.473.561.243,00
6	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Litbang	3.538.926.614,00	3.465.895.298,00	97,94	3.590.477.667,00
7	Bagian Administrasi Pembangunan	50.160.000,00	50.160.000,00	100,00	49.200.000,00
8	Bagian Hukum	61.980.000,00	61.980.000,00	100,00	76.740.000,00
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	70.560.000,00	70.560.000,00	100,00	73.440.000,00
10	Bagian Organisasi	81.980.000,00	80.940.000,00	98,73	72.960.000,00
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	268.140.000,00	268.140.000,00	100,00	406.800.000,00
12	Bagian Perekonomian	91.560.000,00	90.480.000,00	98,82	80.960.000,00
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	71.110.000,00	71.110.000,00	100,00	79.260.000,00
14	Bagian Tata Pemerintahan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	103.260.000,00
15	Bagian Umum	51.717.462.243,00	21.389.487.733,00	41,36	11.359.811.941,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.530.287.388,00	2.458.150.141,00	97,15	2.584.120.024,00
17	Dinas Kesehatan	58.090.190.501,00	55.500.671.404,00	95,54	54.842.416.782,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	2.105.576.142,00	2.053.991.422,00	97,55	2.091.540.476,00
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.573.405.600,00	1.534.688.274,00	97,54	1.834.126.327,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.629.325.120,00	1.567.246.671,00	96,19	1.515.325.361,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	1.858.039.234,00	1.788.994.923,00	96,28	1.990.709.961,00
22	Dinas Pariwisata	1.662.112.770,00	1.591.451.542,00	95,75	1.807.572.617,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.608.199.600,00	5.513.987.835,00	98,32	5.815.264.371,00
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.847.271.105,00	1.772.944.825,00	95,98	2.090.794.365,00
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.928.961.860,00	2.790.406.519,00	95,27	3.101.146.846,00
26	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.154.036.078,00	2.054.273.929,00	95,37	2.153.459.376,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	2.619.259.704,00	2.575.793.073,00	98,34	2.537.746.108,00
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	144.529.563.217,00	139.571.691.698,00	96,57	140.717.256.263,00
29	Dinas Perhubungan	2.677.565.244,00	2.602.077.403,00	97,18	2.480.203.543,00
30	Dinas Perikanan	2.496.879.708,00	2.416.541.989,00	96,78	2.260.576.468,00
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.452.380.000,00	2.388.264.173,00	97,39	2.402.800.165,00
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.282.234.866,00	2.226.934.428,00	97,58	2.318.153.052,00
33	Dinas Pertanian	6.639.588.878,00	6.550.239.184,00	98,65	6.685.766.423,00
34	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.528.686.308,00	2.486.970.696,00	98,35	2.678.124.621,00
35	Dinas Sosial	1.972.887.340,00	1.930.470.568,00	97,85	2.126.089.521,00
36	Inspektorat	4.036.142.208,00	3.948.664.612,00	97,83	4.003.171.609,00
37	Kec. Buko	1.930.587.910,00	1.805.427.051,00	93,52	1.988.083.238,00
38	Kec. Buko Selatan	1.401.773.714,00	1.329.672.842,00	94,86	1.342.644.596,00
39	Kec. Bulagi	2.819.874.314,00	2.765.474.631,00	98,07	2.753.032.715,00
40	Kec. Bulagi Selatan	1.409.197.282,00	1.369.895.592,00	97,21	1.354.573.390,00
41	Kec. Bulagi Utara	1.956.258.868,00	1.918.966.951,00	98,09	2.070.983.647,00
42	Kec. Liang	2.239.795.692,00	2.202.622.126,00	98,34	2.164.672.650,00
43	Kec. Peling Tengah	2.108.863.770,00	2.059.385.024,00	97,65	2.187.908.684,00
44	Kec. Tinangkung	2.149.960.528,00	2.077.122.615,00	96,61	2.323.814.578,00
45	Kec. Tinangkung Selatan	1.398.412.920,00	1.334.375.972,00	95,42	1.512.547.544,00
46	Kec. Tinangkung Utara	1.612.996.788,00	1.572.020.047,00	97,46	1.665.863.059,00
47	Kec. Totikum	1.991.266.870,00	1.933.533.019,00	97,10	2.081.885.886,00
48	Kec. Totikum Selatan	1.651.209.878,00	1.610.668.247,00	97,54	1.552.849.868,00
49	Satuan Polisi Pamong Praja	2.955.284.102,00	2.864.038.255,00	96,91	2.579.927.187,00
50	Sekretariat DPRD	11.783.224.787,00	11.476.019.286,00	97,39	10.403.467.997,00
Jumlah		**373.972.907.406,00**	**332.586.846.754,00**	**88,93**	**324.897.549.199,00**

Lampiran 28

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PER OPD
KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023 DAN 2022

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%) 2023	Realisasi 2022
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.445.348.000,00	3.336.271.775,00	96,83	3.635.010.141,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.989.648.520,00	1.974.012.827,00	99,21	1.701.299.050,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.538.466.000,00	1.456.190.671,00	94,65	2.556.224.611,00
4	Badan Pendapatan Daerah	1.580.182.815,00	1.498.679.529,00	94,84	1.901.491.103,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.832.879.999,00	5.002.925.716,00	85,77	5.412.059.715,00
6	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Litbang	4.743.221.332,00	4.353.710.279,00	91,79	4.087.446.618,00
7	Bagian Administrasi Pembangunan	872.941.000,00	863.229.900,00	98,89	925.637.450,00
8	Bagian Hukum	1.077.773.800,00	1.058.475.700,00	98,21	1.374.852.032,00
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.018.900.075,00	1.984.860.893,00	98,31	2.150.012.944,00
10	Bagian Organisasi	662.480.500,00	646.630.701,00	97,61	600.137.300,00
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	489.350.000,00	481.176.895,00	98,33	763.684.374,00
12	Bagian Perekonomian	617.608.900,00	615.594.599,00	99,67	925.570.116,00
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	754.049.250,00	720.183.565,00	95,51	1.189.049.228,00
14	Bagian Tata Pemerintahan	548.848.500,00	542.060.993,00	98,76	1.210.057.190,00
15	Bagian Umum	9.703.909.010,00	9.497.994.584,00	97,88	5.821.465.804,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.091.093.109,00	1.043.865.090,00	95,67	1.477.772.174,00
17	Dinas Kesehatan	73.018.830.336,00	62.273.392.653,00	85,28	61.807.829.994,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	1.075.237.600,00	1.055.738.604,00	98,19	1.679.998.899,00
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.019.276.940,00	991.783.940,00	97,30	1.686.456.585,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.479.921.700,00	2.467.029.825,00	99,48	2.848.645.484,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	2.594.786.535,00	2.573.235.389,00	99,17	2.639.599.952,00
22	Dinas Pariwisata	1.025.129.771,00	945.916.778,00	92,27	2.147.575.592,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.683.033.930,00	10.151.961.718,00	86,89	8.041.752.608,00
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.509.909.420,00	3.093.532.435,00	88,14	2.211.994.840,00
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.240.175.000,00	5.775.979.677,00	92,56	4.450.957.512,00
26	Dinas Pemuda dan Olahraga	504.012.495,00	378.628.540,00	75,12	1.425.572.474,00
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	1.075.355.120,00	1.068.956.625,00	99,40	1.399.961.254,00
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.258.210.555,00	22.190.182.069,21	91,47	16.521.771.326,43
29	Dinas Perhubungan	3.910.973.011,00	3.800.358.641,00	97,17	4.211.578.259,00
30	Dinas Perikanan	2.867.088.400,00	2.280.678.902,00	79,55	3.182.877.717,00
31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.509.108.390,00	2.391.750.974,00	95,32	3.671.940.798,00
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.120.796.290,00	1.088.137.231,00	97,09	1.095.187.850,00
33	Dinas Pertanian	2.841.270.066,00	2.669.092.790,00	93,94	4.119.723.783,00
34	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.534.420.225,00	2.315.554.717,00	91,36	2.627.720.135,00
35	Dinas Sosial	1.705.547.075,00	1.671.051.296,00	97,98	1.936.604.450,00
36	Inspektorat	4.636.418.955,00	4.635.657.505,00	99,98	4.374.115.098,00
37	Kec. Buko	354.695.600,00	352.916.600,00	99,50	333.199.735,00
38	Kec. Buko Selatan	327.580.675,00	327.533.300,00	99,99	415.619.927,00
39	Kec. Bulagi	571.896.850,00	571.158.425,00	99,87	1.481.886.935,00
40	Kec. Bulagi Selatan	1.340.989.500,00	1.339.389.500,00	99,88	255.982.063,00
41	Kec. Bulagi Utara	556.239.000,00	550.803.000,00	99,02	593.927.350,00
42	Kec. Liang	362.548.006,00	361.578.002,00	99,73	249.090.500,00
43	Kec. Peling Tengah	261.408.604,00	261.182.604,00	99,91	309.631.014,00
44	Kec. Tinangkung	540.157.093,00	524.522.893,00	97,11	594.336.130,00
45	Kec. Tinangkung Selatan	353.331.200,00	346.108.798,00	97,96	274.583.870,00
46	Kec. Tinangkung Utara	319.590.425,00	314.463.452,00	98,40	366.640.103,00
47	Kec. Totikum	411.041.700,00	405.365.000,00	98,62	427.874.900,00
48	Kec. Totikum Selatan	418.446.905,00	415.485.100,00	99,29	415.920.878,00
49	Satuan Polisi Pamong Praja	5.235.470.285,00	5.060.116.483,00	96,65	4.404.823.000,00
50	Sekretariat DPRD	14.721.184.158,00	12.111.701.992,00	82,27	12.944.954.507,00
Jumlah		**213.350.782.625,00**	**191.836.809.175,21**	**89,92**	**190.882.105.372,43**

Lampiran 29

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PER OPD
KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%) 2023
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	656.627.000,00	656.427.000,00	99,97
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	134.000.000,00	133.974.000,00	99,98
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.761.000.000,00	1.753.856.000,00	99,59
4	Badan Pendapatan Daerah	108.500.000,00	108.289.000,00	99,81
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	277.500.000,00	273.500.000,00	98,56
6	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Litbang	282.595.578,00	281.642.800,00	99,66
7	Bagian Administrasi Pembangunan	152.490.000,00	152.252.500,00	99,84
8	Bagian Hukum	90.896.500,00	90.829.000,00	99,93
9	Bagian Organisasi	73.256.000,00	73.256.000,00	100,00
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	453.500.000,00	438.130.000,00	96,61
11	Bagian Perekonomian	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
13	Bagian Umum	1.468.505.000,00	1.460.612.000,00	99,46
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	365.489.625,00	365.489.000,00	100,00
15	Dinas Kesehatan	8.458.050.905,00	6.860.151.453,00	81,11
16	Dinas Ketahanan Pangan	33.670.000,00	33.670.000,00	100,00
17	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	446.120.000,00	446.120.000,00	100,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	531.654.000,00	531.654.000,00	100,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	39.049.500,00	38.200.000,00	97,82
20	Dinas Pariwisata	31.750.106,00	30.545.463,00	96,21
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.906.732.100,00	63.128.928.181,00	89,03
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	71.411.120,00	71.046.000,00	99,49
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	135.000.000,00	128.800.000,00	95,41
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.792.296,00	38.792.296,00	100,00
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.844.627.837,00	50.016.598.126,00	92,89
26	Dinas Perhubungan	2.662.094.920,00	2.475.680.000,00	93,00
27	Dinas Perikanan	146.000.000,00	96.000.000,00	65,75
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	114.342.000,00	113.558.000,00	99,31
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	373.825.685,00	373.812.685,00	100,00
30	Dinas Pertanian	646.081.490,00	577.850.000,00	89,44
31	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.745.076.980,00	3.516.637.200,00	93,90
32	Inspektorat	68.500.000,00	68.500.000,00	100,00
33	Kec. Buko Selatan	49.950.000,00	49.950.000,00	100,00
34	Kec. Bulagi	129.880.000,00	129.880.000,00	100,00
35	Kec. Bulagi Selatan	210.000.000,00	207.470.000,00	98,80
36	Kec. Bulagi Utara	120.150.000,00	119.650.000,00	99,58
37	Kec. Liang	295.000.000,00	292.330.000,00	99,09
38	Kec. Peling Tengah	270.000.000,00	269.568.000,00	99,84
39	Kec. Tinangkung	264.194.150,00	263.894.150,00	99,89
40	Kec. Tinangkung Selatan	47.326.500,00	47.300.000,00	99,94
41	Kec. Totikum Selatan	223.500.000,00	223.199.000,00	99,87
42	Satuan Polisi Pamong Praja	252.392.000,00	252.108.000,00	99,89
43	Sekretariat DPRD	950.325.000,00	933.316.000,00	98,21
Jumlah		**151.052.856.292,00**	**137.246.465.854,00**	**90,86**

Lampiran 30

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL TANAH PER OPD
KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%) 2023
1	Dinas Kesehatan	145.889.000,00	145.889.000,00	100,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.875.131.000,00	3.066.057.908,00	79,12
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	530.000.000,00	206.903.000,00	39,04
Jumlah		**4.551.020.000,00**	**3.418.849.908,00**	**75,12**

Lampiran 31

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PER OPD
KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%) 2023
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	656.627.000,00	656.427.000,00	99,97
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	134.000.000,00	133.974.000,00	99,98
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	360.000.000,00	356.966.000,00	99,16
4	Badan Pendapatan Daerah	108.500.000,00	108.289.000,00	99,81
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	277.500.000,00	273.500.000,00	98,56
6	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Litbang	282.595.578,00	281.642.800,00	99,66
7	Bagian Administrasi Pembangunan	152.490.000,00	152.252.500,00	99,84
8	Bagian Hukum	90.896.500,00	90.829.000,00	99,93
9	Bagian Organisasi	73.256.000,00	73.256.000,00	100,00
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	338.500.000,00	323.480.000,00	95,56
11	Bagian Perekonomian	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
13	Bagian Umum	621.505.000,00	617.105.000,00	99,29
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	365.489.625,00	365.489.000,00	100,00
15	Dinas Kesehatan	2.268.960.583,00	1.615.037.577,00	71,18
16	Dinas Ketahanan Pangan	33.670.000,00	33.670.000,00	100,00
17	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	34.120.000,00	34.120.000,00	100,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	531.654.000,00	531.654.000,00	100,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	39.049.500,00	38.200.000,00	97,82
20	Dinas Pariwisata	31.750.106,00	30.545.463,00	96,21
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	602.581.000,00	600.930.000,00	99,73
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	71.411.120,00	71.046.000,00	99,49
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.792.296,00	38.792.296,00	100,00
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.679.756.349,00	7.521.302.810,00	97,94
25	Dinas Perhubungan	512.494.920,00	512.380.000,00	99,98
26	Dinas Perikanan	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil	95.000.000,00	94.738.000,00	99,72
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	333.427.685,00	333.426.685,00	100,00
29	Dinas Pertanian	125.408.490,00	124.208.000,00	99,04
30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	152.781.980,00	152.781.000,00	100,00
31	Inspektorat	68.500.000,00	68.500.000,00	100,00
32	Kec. Buko Selatan	49.950.000,00	49.950.000,00	100,00
33	Kec. Bulagi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
34	Kec. Bulagi Selatan	110.000.000,00	107.470.000,00	97,70
35	Kec. Bulagi Utara	20.150.000,00	20.150.000,00	100,00
36	Kec. Liang	295.000.000,00	292.330.000,00	99,09
37	Kec. Peling Tengah	120.000.000,00	119.800.000,00	99,83
38	Kec. Tinangkung	114.194.150,00	113.894.150,00	99,74
39	Kec. Tinangkung Selatan	47.326.500,00	47.300.000,00	99,94
40	Kec. Totikum Selatan	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
41	Satuan Polisi Pamong Praja	252.392.000,00	252.108.000,00	99,89
42	Sekretariat DPRD	719.525.000,00	704.816.000,00	97,96
Jumlah		**17.992.755.382,00**	**17.125.860.281,00**	**95,18**

Lampiran 32

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PER OPD KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%) 2023
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80.000.000,00	79.800.000,00	99,75
2	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	115.000.000,00	114.650.000,00	99,70
3	Bagian Umum	847.000.000,00	843.507.000,00	99,59
4	Dinas Kesehatan	5.589.146.322,00	4.645.332.876,00	83,11
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.300.808.000,00	6.630.814.273,00	90,82
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	135.000.000,00	128.800.000,00	95,41
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.538.811.700,00	42.200.802.716,00	92,67
8	Dinas Perhubungan	348.000.000,00	347.880.000,00	99,97
9	Dinas Perikanan	100.000.000,00	50.000.000,00	50,00
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	19.342.000,00	18.820.000,00	97,30
11	Dinas Pertanian	242.403.000,00	242.203.000,00	99,92
12	Kec. Bulagi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
13	Kec. Bulagi Selatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
14	Kec. Bulagi Utara	100.000.000,00	99.500.000,00	99,50
15	Kec. Peling Tengah	150.000.000,00	149.768.000,00	99,85
16	Kec. Totikum Selatan	214.000.000,00	213.699.000,00	99,86
17	Sekretariat DPRD	216.900.000,00	214.600.000,00	98,94
Jumlah		**61.196.411.022,00**	**56.180.176.865,00**	**91,80**

Lampiran 33

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR BELANJA MODAL T.A 2023
PER 31 DESEMBER 2023

No	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
1	Sekretariat DPRD	-	704.816.000,00	214.600.000,00	13.900.000,00	-	933.316.000,00
2	Setda Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-
3	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-
4	Setda Bagian Administrasi Pembangunan	-	152.252.500,00	-	-	-	152.252.500,00
5	Setda Bagian Administrasi Perekonomian	-	108.000.000,00	-	-	-	108.000.000,00
6	Setda Bagian Hukum	-	90.829.000,00	-	-	-	90.829.000,00
7	Setda Bagian Organisasi	-	73.256.000,00	-	-	-	73.256.000,00
8	Setda Bagian Umum	-	617.105.000,00	843.507.000,00	-	-	1.460.612.000,00
9	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00
10	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	323.480.000,00	114.650.000,00	-	-	438.130.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.066.057.908,00	600.930.000,00	6.630.814.273,00	52.831.126.000,00	-	63.128.928.181,00
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	152.781.000,00	-	3.363.856.200,00	-	3.516.637.200,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	512.380.000,00	347.880.000,00	1.615.420.000,00	-	2.475.680.000,00
14	Dinas Perhubungan	-	531.654.000,00	-	-	-	531.654.000,00
15	Dinas Kesehatan	145.889.000,00	1.615.037.577,00	4.645.332.876,00	453.892.000,00	-	6.860.151.453,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.903.000,00	7.521.302.810,00	42.200.802.716,00	-	87.589.600,00	50.016.598.126,00
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	-	128.800.000,00	-	-	128.800.000,00
18	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	34.120.000,00	-	412.000.000,00	-	446.120.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	71.046.000,00	-	-	-	71.046.000,00
21	Dinas Sosial	-	356.966.000,00	79.800.000,00	1.317.090.000,00	-	1.753.856.000,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	365.489.000,00	-	-	-	365.489.000,00
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pertanian	-	124.208.000,00	242.203.000,00	211.439.000,00	-	577.850.000,00
25	Dinas Ketahanan Pangan	-	33.670.000,00	-	-	-	33.670.000,00
26	Dinas Perikanan	-	46.000.000,00	50.000.000,00	-	-	96.000.000,00
27	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	94.738.000,00	18.820.000,00	-	-	113.558.000,00
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	38.792.296,00	-	-	-	38.792.296,00

Lampiran 33

No	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	273.500.000,00	-	-	-	273.500.000,00
30	Badan Pendapatan Daerah	-	108.289.000,00	-	-	-	108.289.000,00
31	Inspektorat	-	68.500.000,00	-	-	-	68.500.000,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	-	281.642.800,00	-	-	-	281.642.800,00
33	Dinas Lingkungan Hidup	-	38.200.000,00	-	-	-	38.200.000,00
34	Dinas Pariwisata	-	30.545.463,00	-	-	-	30.545.463,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	133.974.000,00	-	-	-	133.974.000,00
36	Satuan Polisi Pamong Praja	-	252.108.000,00	-	-	-	252.108.000,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	656.427.000,00	-	-	-	656.427.000,00
38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	333.426.685,00	-	-	40.386.000,00	373.812.685,00
39	Kecamatan Tinangkung	-	113.894.150,00	-	150.000.000,00	-	263.894.150,00
40	Kecamatan Totikum	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Liang	-	292.330.000,00	-	-	-	292.330.000,00
42	Kecamatan Bulagi	-	5.000.000,00	100.000.000,00	24.880.000,00	-	129.880.000,00
43	Kecamatan Buko	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Bulagi Selatan	-	107.470.000,00	100.000.000,00	-	-	207.470.000,00
45	Kecamatan Tinangkung Selatan	-	47.300.000,00	-	-	-	47.300.000,00
46	Kecamatan Buko Selatan	-	49.950.000,00	-	-	-	49.950.000,00
47	Kecamatan Bulagi Utara	-	20.150.000,00	99.500.000,00	-	-	119.650.000,00
48	Kecamatan Peling Tengah	-	119.800.000,00	149.768.000,00	-	-	269.568.000,00
49	Kecamatan Totikum Selatan	-	9.500.000,00	213.699.000,00	-	-	223.199.000,00
50	Kecamatan Tinangkung Utara	-	-	-	-	-	-
GRAND TOTAL		**3.418.849.908,00**	**17.125.860.281,00**	**56.180.176.865,00**	**60.393.603.200,00**	**127.975.600,00**	**137.246.465.854,00**

Lampiran 33a

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR ASET TETAP TANAH
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG			SALDO AKHIR TAHUN 2023
			BELANJA MODAL	REKLAS AKUN DALAM KIB	HASIL PENILAIAN TANAH (73 REGISTER)	MUTASI ANTAR OPD	HIBAH	REKLASIFIKASI AKUN DALAM KIB	REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB	
1	Sekretariat DPRD	769.874.000,00	-	-		-	-	-		769.874.000,00
2	Setda Bagian Tata Pemerintahan	6.216.855.858,00	-	-		-	-	(1.716.626.858,00)		4.500.229.000,00
3	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-		-	-	-		-
4	Setda Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-		-	-	-		-
5	Setda Bagian Administrasi Perekonomian	-	-	-		-	-	-		-
6	Setda Bagian Hukum	-	-	-		-	-	-		-
7	Setda Bagian Organisasi	-	-	-		-	-	-		-
8	Setda Bagian Umum	11.419.731.250,00	-	-	5.200.800.000,00	-	-	-		16.620.531.250,00
9	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-		-	-	-		-
10	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-		-	-	-		-
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.924.873.440.567,97	3.066.057.908,00	56.500.000,00	3.679.630.000,00	-		(56.500.000,00)	(133.867.000,00)	1.931.485.261.475,97
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.364.867.900,00			466.320.000,00	1.093.143.050,00	-	-		9.924.330.950,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	121.054.510,00				-	-	-		121.054.510,00
14	Dinas Perhubungan	6.066.573.587,00			1.044.259.000,00	78.608.000,00	(254.236.500,00)	-		6.935.204.087,00
15	Dinas Kesehatan	19.180.607.156,00	145.889.000,00		732.089.500,00	1.316.000,00	-	-		20.059.901.656,00
16	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan	1.461.998.000,00				-	-	-		1.461.998.000,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.199.443.030,00	206.903.000,00		1.593.225.000,00	179.999.808,00	-	-	(106.997.000,00)	12.072.573.838,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.429.958.700,00			1.217.040.000,00	-	-	-		2.646.998.700,00
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.157.864.800,00				-	-	-		1.157.864.800,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.350.000,00				-	-	-		20.350.000,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-				9.400.000,00	-	-		9.400.000,00
22	Dinas Sosial	-				-	-	-		-
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-				-	-	-		-
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	175.000.000,00	-			104.160.000,00	-	-		279.160.000,00
25	Dinas Pertanian	1.888.180.000,00	-			-	-	-		1.888.180.000,00
26	Dinas Ketahanan Pangan	-	-			-	-	-		-
27	Dinas Perikanan	521.846.900,00	-			-	-	-		521.846.900,00
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	10.163.194.138,00	-			-	-	-		10.163.194.138,00
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-			-	-	-		-
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	361.524.700,00	-			250.000.000,00	-	-		611.524.700,00
31	Badan Pendapatan Daerah	87.369.000,00	-			-	-	-		87.369.000,00
32	Inspektorat	62.400.000,00	-			-	-	-		62.400.000,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	270.670.000,00	-			-	-	-		270.670.000,00
34	Dinas Lingkungan Hidup	449.792.000,00	-			-	-	-		449.792.000,00
35	Dinas Pariwisata	64.879.000,00	-			-	-	-		64.879.000,00

Lampiran 33a

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG			SALDO AKHIR TAHUN 2023
			BELANJA MODAL	REKLAS AKUN DALAM KIB	HASIL PENILAIAN TANAH (73 REGISTER)	MUTASI ANTAR OPD	HIBAH	REKLASIFIKASI AKUN DALAM KIB	REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB	
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.370.000,00	-	-		-	-	-		18.370.000,00
37	Satuan Polisi Pamong Praja	203.589.000,00	-	-		-	-	-		203.589.000,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	281.720.000,00	-	-		-	-	-		281.720.000,00
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	274.794.000,00	-	-	-		274.794.000,00
40	Kecamatan Tinangkung	319.369.080,00	-	-	897.389.000,00	-	-	-		1.216.758.080,00
41	Kecamatan Totikum	123.788.400,00	-	-	107.352.000,00	-	-	-		231.140.400,00
42	Kecamatan Liang	474.869.000,00	-	-		-	-	-		474.869.000,00
43	Kecamatan Bulagi	732.305.000,00	-	-	8.820.000,00	-	-	-		741.125.000,00
44	Kecamatan Buko	272.930.000,00	-	-	159.960.000,00	-	-	-		432.890.000,00
45	Kecamatan Bulagi Selatan	716.747.500,00	-	-	45.686.000,00	-	-	-		762.433.500,00
46	Kecamatan Tinangkung Selatan	444.350.000,00	-	-	298.300.000,00	-	-	-		742.650.000,00
47	Kecamatan Buko Selatan	1.336.883.000,00	-	-	752.104.000,00	-	(298.000.000,00)	-		1.790.987.000,00
48	Kecamatan Bulagi Utara	485.575.000,00	-	-		-	-	-		485.575.000,00
49	Kecamatan Peling Tengah	779.635.262,00	-	-		-	-	-		779.635.262,00
50	Kecamatan Totikum Selatan	208.536.210,00	-	-	225.654.000,00	-	-	-		434.190.210,00
51	Kecamatan Tinangkung Utara	633.150.000,00	-	-		-	-	-		633.150.000,00
1	Kelurahan Salakan	33.168.000,00	-	-	3.425.106.000,00	-	-	-		3.458.274.000,00
2	Kelurahan Bulagi	1.920.000,00	-	-		-	-	-		1.920.000,00
3	Kelurahan Sabang	1.848.000,00	-	-		-	-	-		1.848.000,00
GRAND TOTAL		**2.012.396.228.548,97**	**3.418.849.908,00**	**56.500.000,00**	**20.128.528.500,00**	**1.716.626.858,00**	**(552.236.500,00)**	**(1.773.126.858,00)**	**(240.864.000,00)**	**2.035.150.506.456,97**

Lampiran 33b

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG							SALDO AKHIR TAHUN 2023
			BELANJA MODAL	REKLAS AKUN DALAM KIB	REKLAS AKUN ANTAR KIB	MUTASI ANTAR OPD	REKLAS AKUN KE BEBAN BARANG & JASA	HIBAH	REKLASIFIKASI AKUN DALAM KIB	REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB	MUTASI ANTAR OPD	PENGHAPUSAN BMD	EKSTRACOM	
1	Sekretariat DPRD	24.782.011.227,00	704.816.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(732.950.000,00)	(72.910.000,00)	24.680.967.227,00
2	Setda Bagian Tata Pemerintahan	812.375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		812.375.000,00
3	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat	727.356.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		727.356.000,00
4	Setda Bagian Administrasi Pembangunan	3.180.438.730,00	152.252.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.000.000,00)	3.302.691.230,00
5	Setda Bagian Administrasi Perekonomian	462.105.675,00	108.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	(15.000.000,00)	-	-	-	(1.000.000,00)	569.105.675,00
6	Setda Bagian Hukum	1.093.518.546,00	90.829.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.184.347.546,00
7	Setda Bagian Organisasi	2.463.411.292,00	73.256.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.536.667.292,00
8	Setda Bagian Umum	28.548.262.507,00	617.105.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	(664.500.000,00)	(149.400.000,00)	28.351.467.507,00
9	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.660.925.567,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.675.925.567,00
10	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.135.241.900,00	323.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.458.721.900,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.453.970.738,00	600.930.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(1.319.225.713,00)	-	(2.000.000,00)	28.733.675.025,00
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.398.999.103,00	152.781.000,00	-	817.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-		9.369.430.103,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.673.002.058,00	531.654.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.204.656.058,00
14	Dinas Perhubungan	19.777.936.887,00	512.380.000,00	-	674.690.000,00	1.319.225.713,00	-	-	-	-	-	-		22.284.232.600,00
15	Dinas Kesehatan	76.726.937.841,84	1.615.037.577,00	975.000.000,00	-	-	-	(110.842.628,00)	(975.000.000,00)	-	-	-	(104.070.445,00)	78.127.062.345,84
16	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan	35.007.114.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		35.007.114.390,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.934.041.058,00	7.521.302.810,00	54.000.000,00	-	-	-	(665.786.456,00)	(54.000.000,00)	-	-	(700.502.084,00)	(2.303.155.116,00)	45.785.900.212,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.425.308.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.425.308.000,00
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.195.092.275,00	34.120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.120.000,00)	2.204.092.275,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.662.527.690,00	71.046.000,00	-	-	203.000.000,00	-	-	-	-	-	-		1.936.573.690,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.492.772.639,00	356.966.000,00	-	-	-	(119.528.000,00)	-	-	-	-	-	(8.989.500,00)	6.721.221.139,00
22	Dinas Sosial	1.701.075.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.701.075.375,00
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.312.785.177,00	365.489.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.678.274.177,00
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.136.324.511,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9.136.324.511,97
25	Dinas Pertanian	9.981.132.067,67	124.208.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(73.350.000,00)	10.031.990.067,67
26	Dinas Ketahanan Pangan	2.179.646.388,33	33.670.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.213.316.388,33
27	Dinas Perikanan	8.351.552.475,00	46.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.397.552.475,00
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	7.557.356.095,00	94.738.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.652.094.095,00
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.949.448.431,00	38.792.296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.000.000,00)	1.985.240.727,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12.099.286.615,00	273.500.000,00	-	-	187.500.000,00	-	(65.000.000,00)	-	-	(203.000.000,00)	-		12.292.286.615,00
31	Badan Pendapatan Daerah	4.857.890.490,00	108.289.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.966.179.490,00
32	Inspektorat	3.241.955.825,00	68.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.310.455.825,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	5.489.518.611,00	281.642.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.000.000,00)	5.770.161.411,00
34	Dinas Lingkungan Hidup	11.578.324.315,00	38.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11.616.524.315,00
35	Dinas Pariwisata	3.041.392.725,00	30.545.463,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.383.865,00)	3.069.554.323,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.006.065.937,00	133.974.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.976.000,00)	3.116.063.937,00
37	Satuan Polisi Pamong Praja	4.995.974.550,00	252.108.000,00	-	-	-	-	-	-	(19.500.000,00)	-	-	(67.868.000,00)	5.160.714.550,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.316.252.226,00	656.427.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(85.000.000,00)	6.887.679.226,00
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.876.190.400,00	333.426.685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.000.000,00)	3.207.617.085,00
40	Kecamatan Tinangkung	2.803.716.262,00	74.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.878.416.262,00
41	Kecamatan Totikum	2.504.235.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.504.235.375,00
42	Kecamatan Liang	1.376.746.500,00	292.330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(65.000.000,00)	1.604.076.500,00
43	Kecamatan Bulagi	2.927.815.600,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.932.815.600,00
44	Kecamatan Buko	1.507.080.193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.507.080.193,00
45	Kecamatan Bulagi Selatan	2.397.444.488,00	107.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.504.914.488,00
46	Kecamatan Tinangkung Selatan	1.807.488.736,00	47.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.000.000,00)	1.839.788.736,00
47	Kecamatan Buko Selatan	2.156.963.000,00	49.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	(187.500.000,00)	-		2.019.413.000,00
48	Kecamatan Bulagi Utara	1.757.337.601,00	20.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.777.487.601,00
49	Kecamatan Peling Tengah	2.128.368.910,00	119.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.248.168.910,00
50	Kecamatan Totikum Selatan	2.395.655.000,00	9.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.405.155.000,00
51	Kecamatan Tinangkung Utara	1.614.109.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.614.109.800,00
1	Kelurahan Salakan	15.904.000,00	39.194.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		55.098.150,00
2	Kelurahan Bulagi	571.391.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		571.391.125,00
3	Kelurahan Sabang	279.864.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		279.864.000,00

Lampiran 33b

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG							SALDO AKHIR TAHUN 2023
			BELANJA MODAL	REKLAS AKUN DALAM KIB	REKLAS AKUN ANTAR KIB	MUTASI ANTAR OPD	REKLAS AKUN KE BEBAN BARANG & JASA	HIBAH	REKLASIFIKASI AKUN DALAM KIB	REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB	MUTASI ANTAR OPD	PENGHAPUSAN BMD	EKSTRACOM	
GRAND TOTAL		418.529.641.928,81	17.125.860.281,00	1.044.000.000,00	1.492.340.000,00	1.709.725.713,00	(119.528.000,00)	(841.629.084,00)	(1.044.000.000,00)	(19.500.000,00)	(1.709.725.713,00)	(2.097.952.084,00)	(3.035.222.926,00)	431.034.010.115,81

Lampiran 33c

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH								MUTASI KURANG							SALDO AKHIR TAHUN 2023
			BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI AKUN DARI BELANJA BARANG & JASA	HIBAH	REKLAS AKUN DALAM KIB	REKLAS AKUN ANTAR KIB	HASIL KAPITALISASI BMD	HUTANG PEMDA PADA PIHAK KE TIGA	MUTASI ANTAR OPD	KOREKSI NILAI	REKLAS AKUN KE BEBAN BARANG & JASA	HIBAH	REKLASIFIKASI AKUN DALAM KIB	REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB	MUTASI ANTAR OPD	PENGHAPUSAN BMD	
1	Sekretariat DPRD	35.147.241.761,61	214.600.000,00	-	-	-	-	-			-	(11.900.000)	-	-	-			35.349.941.761,61
2	Setda Bagian Tata Pemerintahan	280.193.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			280.193.000,00
3	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-
4	Setda Bagian Administrasi Pembangunan	161.953.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			161.953.000,00
5	Setda Bagian Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-
6	Setda Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-
7	Setda Bagian Organisasi	299.711.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			299.711.000,00
8	Setda Bagian Umum	34.451.990.222,00	843.507.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-			-	-	-	-	-			35.297.997.222,00
9	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-
10	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	114.650.000,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			114.650.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.052.333.395,03	6.630.814.273,00	-	-	10.500.000,00	5.770.209.000,00	-			-	-	-	(10.500.000)	(1.251.059.376)	(5.645.203.113)		61.557.094.179,03
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.112.236.480,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			2.112.236.480,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-		715.237.000,00	-	-	-	-	-			715.237.000,00
14	Dinas Perhubungan	30.067.012.297,00	347.880.000,00	-	-	-	-	-		1.084.692.028,00	-	-	-	-	(223.960.000)		(51.172.277)	31.224.452.048,00
15	Dinas Kesehatan	110.834.519.003,00	4.386.229.519,00	-	-	15.725.150,00	199.257.850,00	-	11.315.000,00		-	-	-	(15.725.150)	(2.932.951.369)		(391.610.000)	112.106.760.004,00
16	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan	22.888.504.248,00	259.103.357,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-		(199.818.000)	22.947.789.605,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	256.779.978.627,00	42.200.802.716,00	-	-	597.188.450,00	-	49.400.000,00	17.525.350,00		(46.516.950)	(8.000.000)	(293.896.850)	(597.188.450)	(4.473.551.006)		(10.821.135.189)	283.404.606.698,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	8.406.463.450,00	128.800.000,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			8.535.263.450,00
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	655.051.000,00	-	-	-	-	-	-		115.358.824,00	-	-	-	-	-			770.409.824,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	865.533.000,00	-	-	-	-	-	-		149.689.000,00	-	-	-	-	-			1.015.222.000,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.904.793.000,00	79.800.000,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			1.984.593.000,00
22	Dinas Sosial	678.897.040,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			678.897.040,00
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.116.705.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			1.116.705.000,00
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.241.683.376,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			7.241.683.376,00
25	Dinas Pertanian	12.880.025.834,00	242.203.000,00	-	-	-	77.473.000,00	-		1.776.963.100,00	-	-	-	-	-	(474.003.000)		14.502.661.934,00
26	Dinas Ketahanan Pangan	3.303.975.409,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			3.303.975.409,00
27	Dinas Perikanan	6.706.596.380,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-			-	(50.000.000)	-	-	-			6.706.596.380,00
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	30.121.638.684,00	18.820.000,00	-	865.200.000,00	-	-	-			-	-	-	-	-			31.005.658.684,00
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	888.046.000,00	-	-	-	-	-	-		474.003.000,00	-	-	-	-	-			1.362.049.000,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.016.795.901,90	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			10.016.795.901,90
31	Badan Pendapatan Daerah	4.593.436.601,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			4.593.436.601,00
32	Inspektorat	1.447.855.000,00	-	-	-	-	-	-		404.486.673,00	-	-	-	-	-			1.852.341.673,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	2.852.371.024,00	-	-	-	-	-	-		985.077.550,00	-	-	-	-	-			3.837.448.574,00
34	Dinas Lingkungan Hidup	1.969.610.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			1.969.610.000,00
35	Dinas Pariwisata	3.661.750.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			3.661.750.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.130.853.650,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			1.130.853.650,00
37	Satuan Polisi Pamong Praja	1.192.219.824,00	-	-	-	-	19.500.000,00	-			-	-	-	-	-			1.211.719.824,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.227.945.000,00	-	-	-	-	-	-		216.343.824,00	-	-	-	-	-			1.444.288.824,00
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.858.600.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			1.858.600.000,00
40	Kecamatan Tinangkung	5.945.609.350,00	-	-	-	-	-	14.825.000,00			-	-	-	-	-			5.960.434.350,00
41	Kecamatan Totikum	5.455.703.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			5.455.703.000,00
42	Kecamatan Liang	2.077.298.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			2.077.298.000,00
43	Kecamatan Bulagi	3.368.940.300,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			3.368.940.300,00
44	Kecamatan Buko	3.426.508.901,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			3.426.508.901,00
45	Kecamatan Bulagi Selatan	4.983.411.900,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			5.083.411.900,00
46	Kecamatan Tinangkung Selatan	3.709.361.500,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			3.709.361.500,00
47	Kecamatan Buko Selatan	3.524.835.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			3.524.835.000,00
48	Kecamatan Bulagi Utara	4.171.461.100,00	99.500.000,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			4.270.961.100,00
49	Kecamatan Peling Tengah	3.887.674.738,00	149.768.000,00	-	-	-	-	-			204.147.159	-	-	-	-			4.241.589.897,00
50	Kecamatan Totikum Selatan	3.685.246.310,00	213.699.000,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			3.898.945.310,00
51	Kecamatan Tinangkung Utara	2.475.666.500,00	-	-	-	-	-	-		197.355.114,00	-	-	-	-	-			2.673.021.614,00
1	Kelurahan Salakan	1.156.343.536,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			1.156.343.536,00
2	Kelurahan Bulagi	983.910.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			1.083.910.000,00
3	Kelurahan Sabang	1.190.137.000,00	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			1.190.137.000,00
GRAND TOTAL		**703.838.625.342,54**	**56.180.176.865,00**	**2.500.000,00**	**865.200.000,00**	**623.413.600,00**	**6.066.439.850,00**	**64.225.000,00**	**28.840.350,00**	**6.119.206.113,00**	**157.630.209**	**(69.900.000)**	**(293.896.850)**	**(623.413.600)**	**(8.881.521.751)**	**(6.119.206.113)**	**(11.463.735.466)**	**746.494.583.550,54**

Lampiran 33d

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG			SALDO AKHIR TAHUN 2023
			BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI AKUN DARI BELANJA BARANG & JASA	REKLAS AKUN DALAM KIB	REKLAS AKUN ANTAR KIB	REKLAS AKUN KE BEBAN BARANG & JASA	REKLASIFIKASI AKUN DALAM KIB	REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB	
1	Sekretariat DPRD	1.392.182.645,00	13.900.000,00				(13.900.000)	-	-	1.392.182.645,00
2	Setda Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Setda Bagian Administrasi Pembangunan	53.988.000,00	-	-	-	-	-	-	-	53.988.000,00
5	Setda Bagian Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Setda Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Setda Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Setda Bagian Umum	224.457.500,00	-	-	-	-	-	-	-	224.457.500,00
9	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.147.703.734.281,67	52.831.126.000,00	5.000.000,00	463.401.000,00	3.517.329.900,00	(450.000)	(463.401.000)	(2.043.495.300)	1.202.013.244.881,67
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	55.126.723.855,00	3.363.856.200,00	-	1.500.500,00	-	(2.800.500)	(1.500.500)	(817.650.000)	57.670.129.555,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Perhubungan	43.503.568.892,00	1.615.420.000,00	-	77.990.000,00	223.960.000,00	(10.000.000)	(77.990.000)	(674.690.000)	44.658.258.892,00
15	Dinas Kesehatan	13.840.532.500,00	453.892.000,00	-	126.600.000,00	13.480.000,00	-	(126.600.000)	-	14.307.904.500,00
16	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan	2.715.462.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.715.462.000,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	737.807.000,00	412.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.149.807.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.665.787.750,00	1.317.090.000,00	-	199.510.000,00	-	(20.980.000)	(199.510.000)	-	26.961.897.750,00
22	Dinas Sosial	28.903.000,00	-	-	-	-	-	-	-	28.903.000,00
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	124.328.000,00	-	-	-	-	-	-	-	124.328.000,00
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	444.634.000,00	-	-	-	-	-	-	-	444.634.000,00
25	Dinas Pertanian	48.920.108.848,00	211.439.000,00	-	-	123.997.000,00	(145.600.000)	-	-	49.109.944.848,00
26	Dinas Ketahanan Pangan	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
27	Dinas Perikanan	539.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	539.475.000,00
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3.817.510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.817.510.000,00
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	685.839.000,00	-	-	-	-	-	-	-	685.839.000,00
31	Badan Pendapatan Daerah	44.876.400,00	-	-	-	-	-	-	-	44.876.400,00
32	Inspektorat	141.114.000,00	-	-	-	-	-	-	-	141.114.000,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	154.543.000,00	-	-	-	-	-	-	-	154.543.000,00
34	Dinas Lingkungan Hidup	3.906.400.950,00	-	-	-	-	-	-	-	3.906.400.950,00

Lampiran 33d

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG			SALDO AKHIR TAHUN 2023
			BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI AKUN DARI BELANJA BARANG & JASA	REKLAS AKUN DALAM KIB	REKLAS AKUN ANTAR KIB	REKLAS AKUN KE BEBAN BARANG & JASA	REKLASIFIKASI AKUN DALAM KIB	REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB	
35	Dinas Pariwisata	970.466.000,00	-	-	-	-	-	-	-	970.466.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.051.200,00	-	-	-	-	-	-	-	25.051.200,00
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Tinangkung	65.808.000,00	-	-	-	-	-	-	-	65.808.000,00
41	Kecamatan Totikum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Liang	1.129.437.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.129.437.500,00
43	Kecamatan Bulagi	-	24.880.000,00	-	-	-	-	-	-	24.880.000,00
44	Kecamatan Buko	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Bulagi Selatan	239.380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	239.380.000,00
46	Kecamatan Tinangkung Selatan	29.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	29.900.000,00
47	Kecamatan Buko Selatan	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00
48	Kecamatan Bulagi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Kecamatan Peling Tengah	110.131.000,00	-	-	-	-	-	-	-	110.131.000,00
50	Kecamatan Totikum Selatan	264.640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	264.640.000,00
51	Kecamatan Tinangkung Utara	47.775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	47.775.000,00
4	Kelurahan Salakan	1.681.111.074,00	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.831.111.074,00
5	Kelurahan Bulagi	469.050.000,00	-	-	-	-	-	-	-	469.050.000,00
6	Kelurahan Sabang	540.626.940,00	-	-	-	-	-	-	-	540.626.940,00
1	Kelurahan Lompio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kelurahan Tanobonunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kelurahan Dodung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAND TOTAL		**1.355.400.353.335,67**	**60.393.603.200,00**	**5.000.000,00**	**869.001.500,00**	**3.878.766.900,00**	**(193.730.500)**	**(869.001.500)**	**(3.535.835.300)**	**1.415.948.157.635,67**

Lampiran 33e

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG				SALDO AKHIR TAHUN 2023
			BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI AKUN DARI BELANJA BARANG & JASA	REKLAS AKUN DALAM KIB	HIBAH	REKLASIFIKASI AKUN DALAM KIB	PENGHAPUSAN BMD	EKSTRACOM	
1	Sekretariat DPRD	236.649.500,00	-	-	-	-	-		-	236.649.500,00
2	Setda Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-		-	-
3	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.300.000,00	-	-	-	-	-		-	5.300.000,00
4	Setda Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-		-	-
5	Setda Bagian Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-	-		-	-
6	Setda Bagian Hukum	27.340.000,00	-	-	-	-	-		-	27.340.000,00
7	Setda Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-		-	-
8	Setda Bagian Umum	132.800.000,00	-	-	-	-	-		-	132.800.000,00
9	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-		-	-
10	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-		-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.370.000,00	-	-	-	-	-		-	29.370.000,00
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	-	-	-		-	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-		-	-
14	Dinas Perhubungan	207.268.000,00	-	-	-	-	-		-	207.268.000,00
15	Dinas Kesehatan	62.720.000,00	-	-	-	-	-		-	62.720.000,00
16	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan	3.096.050,00	-	-	-	-	-		-	3.096.050,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.123.161.499,00	87.589.600,00	-	3.984.600,00	(20.374.500)	(3.984.600)	(176.874.120)	(34.295.700)	9.979.206.779,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	207.716.400,00	-	-	-	-	-		-	207.716.400,00
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.200.000,00	-	-	-	-	-		-	2.200.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-		-	-
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-
22	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-		-	-
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-		-	-
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-		-	-
25	Dinas Pertanian	20.000.000,00	-	-	-	-	-		-	20.000.000,00
26	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-		-	-
27	Dinas Perikanan	200.000.000,00	-	-	-	-	-		-	200.000.000,00
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	34.897.000,00	-	-	-	-	-		-	34.897.000,00
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-		-	-
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.500.000,00	-	-	-	(4.500.000)	-		-	-
31	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-
32	Inspektorat	-	-	-	-	-	-		-	-

Lampiran 33e

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG				SALDO AKHIR TAHUN 2023
			BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI AKUN DARI BELANJA BARANG & JASA	REKLAS AKUN DALAM KIB	HIBAH	REKLASIFIKASI AKUN DALAM KIB	PENGHAPUSAN BMD	EKSTRACOM	
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	89.782.000,00	-	-	-	-	-		-	89.782.000,00
34	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-		-	-
35	Dinas Pariwisata	79.200.000,00	-	-	-	-	-		-	79.200.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-		-	-
37	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-		-	-
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-	-		-	-
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	204.241.630,00	40.386.000,00	83.500.000,00	-	-	-		(38.340.274)	289.787.356,00
40	Kecamatan Tinangkung	-	-	-	-	-	-		-	-
41	Kecamatan Totikum	106.500.000,00	-	-	-	-	-		-	106.500.000,00
42	Kecamatan Liang	-	-	-	-	-	-		-	-
43	Kecamatan Bulagi	-	-	-	-	-	-		-	-
44	Kecamatan Buko	2.500.000,00	-	-	-	-	-		-	2.500.000,00
45	Kecamatan Bulagi Selatan	-	-	-	-	-	-		-	-
46	Kecamatan Tinangkung Selatan	-	-	-	-	-	-		-	-
47	Kecamatan Buko Selatan	16.000.000,00	-	-	-	-	-		-	16.000.000,00
48	Kecamatan Bulagi Utara	-	-	-	-	-	-		-	-
49	Kecamatan Peling Tengah	5.000.000,00	-	-	-	-	-		-	5.000.000,00
50	Kecamatan Totikum Selatan	-	-	-	-	-	-		-	-
51	Kecamatan Tinangkung Utara	1.500.000,00	-	-	-	-	-		-	1.500.000,00
4	Kelurahan Salakan	-	-	-	-	-	-		-	-
5	Kelurahan Bulagi	-	-	-	-	-	-		-	-
6	Kelurahan Sabang	-	-	-	-	-	-		-	-
1	Kelurahan Lompio	-	-	-	-	-	-		-	-
2	Kelurahan Tanobonunungan	-	-	-	-	-	-		-	-
3	Kelurahan Dodung	-	-	-	-	-	-		-	-
GRAND TOTAL		**11.801.742.079,00**	**127.975.600,00**	**83.500.000,00**	**3.984.600,00**	**(24.874.500)**	**(3.984.600)**	**(176.874.120)**	**(72.635.974)**	**11.738.833.085,00**

Lampiran 33f

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2023

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG		SALDO AKHIR TAHUN 2023
			REKLAS AKUN ANTAR KIB	REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB	PENGHAPUSAN BMD	
1	Sekretariat DPRD	16.000.000,00	-	-		16.000.000,00
2	Setda Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-		-
3	Setda Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-		-
4	Setda Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-		-
5	Setda Bagian Administrasi Perekonomian	-	-	-		-
6	Setda Bagian Hukum	-	-	-		-
7	Setda Bagian Organisasi	-	-	-		-
8	Setda Bagian Umum	-	-	-		-
9	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-		-
10	Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-		-
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.986.950.750,00	3.294.554.676,00	(9.153.671.900)		13.127.833.526,00
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	837.500.000,00	-	-		837.500.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-		-
14	Dinas Perhubungan	99.880.000,00	-	-		99.880.000,00
15	Dinas Kesehatan	620.800.889,00	2.919.471.369,00	(199.257.850)		3.341.014.408,00
16	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan	-	-	-		-
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.214.622.555,00	4.580.548.006,00	-		5.795.170.561,00
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	45.210.000,00	-	-		45.210.000,00
19	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.200.000,00	-	-		5.200.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.920.000,00	-	-		19.920.000,00
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	231.286.000,00	-	-		231.286.000,00
22	Dinas Sosial	-	-	-		-
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-		-

Lampiran 33f

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG		SALDO AKHIR TAHUN 2023
			REKLAS AKUN ANTAR KIB	REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB	PENGHAPUSAN BMD	
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-		-
25	Dinas Pertanian	619.895.474,00		(201.470.000)		418.425.474,00
26	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-		-
27	Dinas Perikanan	392.030.180,00	-	-	(132.140.180)	259.890.000,00
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	99.850.000,00	-	-		99.850.000,00
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.000.000,00	-	-		8.000.000,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-		-
31	Badan Pendapatan Daerah	207.621.000,00	-	-		207.621.000,00
32	Inspektorat	-	-	-		-
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	2.230.612.000,00	-	-		2.230.612.000,00
34	Dinas Lingkungan Hidup	546.954.500,00	-	-		546.954.500,00
35	Dinas Pariwisata	-	-	-		-
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-		-
37	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-		-
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-		-
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-		-
40	Kecamatan Tinangkung	7.400.000,00	-	-		7.400.000,00
41	Kecamatan Totikum	12.000.000,00	-	-		12.000.000,00
42	Kecamatan Liang	-	-	-		-
43	Kecamatan Bulagi	-	-	-		-
44	Kecamatan Buko	-	-	-		-
45	Kecamatan Bulagi Selatan	-	-	-		-
46	Kecamatan Tinangkung Selatan	-	-	-		-
47	Kecamatan Buko Selatan	10.000.000,00	-	-		10.000.000,00
48	Kecamatan Bulagi Utara	19.800.000,00	-	-		19.800.000,00
49	Kecamatan Peling Tengah	-	-	-		-

Lampiran 33f

NO	SKPD	SALDO AWAL TAHUN 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG		SALDO AKHIR TAHUN 2023
			REKLAS AKUN ANTAR KIB	REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB	PENGHAPUSAN BMD	
50	Kecamatan Totikum Selatan	-	-	-		-
51	Kecamatan Tinangkung Utara	37.290.000,00	-	-		37.290.000,00
4	Kelurahan Salakan	-	-	-		-
5	Kelurahan Bulagi	-	-	-		-
6	Kelurahan Sabang	-	-	-		-
1	Kelurahan Lompio	-	-	-		-
2	Kelurahan Tanobonunungan	-	-	-		-
3	Kelurahan Dodung	-	-	-		-
GRAND TOTAL		**26.268.823.348,00**	**10.794.574.051,00**	**(9.554.399.750)**	**(132.140.180)**	**27.376.857.469,00**

Lampiran 34a

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KECAMATAN	DESA		BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHP)	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHR)	TOTAL BPH/BHR
1	Kec. Totikum	1	Sobonon	3.934.897,00	8.769.523,00	12.704.420,00
		2	Bolonan	4.837.655,00	7.910.672,00	12.748.327,00
		3	Sakay	6.043.272,00	10.504.403,00	16.547.675,00
		4	Sambiut	5.406.259,00	8.340.098,00	13.746.357,00
		5	Tone	3.700.718,00	8.769.523,00	12.470.241,00
		6	Abason	6.189.449,00	7.910.672,00	14.100.121,00
		7	Salangano	5.015.014,00	7.910.672,00	12.925.686,00
		8	Batang Babasal	7.196.020,00	7.910.672,00	15.106.692,00
		9	Sampaka	5.769.986,00	7.910.672,00	13.680.658,00
		10	Lopito	6.243.123,00	7.910.672,00	14.153.795,00
		11	Kombutokan	10.931.057,00	17.890.524,00	28.821.581,00
2	Kec. Totikum Selatan	12	Tonuson	3.360.149,00	22.155.408,00	25.515.557,00
		13	Tobungku	3.693.893,00	7.910.672,00	11.604.565,00
		14	Nulion	7.186.176,00	7.910.672,00	15.096.848,00
		15	Peley	3.765.169,00	7.910.672,00	11.675.841,00
		16	Kalumbatan	5.183.489,00	22.170.976,00	27.354.465,00
		17	Kanali	3.655.404,00	7.910.672,00	11.566.076,00
		18	Mata	3.881.248,00	7.910.672,00	11.791.920,00
		19	Lobuton	3.154.587,00	7.910.672,00	11.065.259,00
3	Kec. Tinangkung	20	Manggalai	4.134.694,00	7.910.672,00	12.045.366,00
		21	Ambelang	5.608.148,00	7.910.672,00	13.518.820,00
		22	Saiyong	4.607.533,00	63.597.158,00	68.204.691,00
		23	Tompodau	8.007.721,00	106.203.588,00	114.211.309,00
		24	Baka	30.384.859,00	180.468.460,00	210.853.319,00
		25	Bongganan	8.489.403,00	141.033.444,00	149.522.847,00
		26	Kautu	5.762.642,00	66.345.483,00	72.108.125,00
		27	Bakalan	3.953.884,00	7.910.672,00	11.864.556,00
		28	Bulungkobit	3.979.374,00	10.706.748,00	14.686.122,00
		29	Bungin	4.731.819,00	7.910.672,00	12.642.491,00
4	Kec. Tinangkung Selatan	30	Paisumosoni	4.089.554,00	7.910.672,00	12.000.226,00
		31	Tobing	4.161.191,00	12.104.443,00	16.265.634,00
		32	Tobungin	3.843.339,00	7.910.672,00	11.754.011,00
		33	Gansal	4.537.939,00	7.910.672,00	12.448.611,00
		34	Bobu	3.980.564,00	7.910.672,00	11.891.236,00
		35	Mansamat B	4.272.877,00	12.514.115,00	16.786.992,00
		36	Mansamat A	4.036.134,00	8.652.077,00	12.688.211,00
		37	Kampung Baru	5.919.772,00	7.910.672,00	13.830.444,00
		38	Tinangkung	4.066.926,00	8.597.753,00	12.664.679,00
5	Kec. Tinangkung Utara	39	Palam	8.335.496,00	8.597.753,00	16.933.249,00
		40	Luksagu	7.078.561,00	7.910.672,00	14.989.233,00
		41	Tatakalai	6.402.322,00	7.910.672,00	14.312.994,00
		42	Ponding-ponding	5.834.601,00	8.340.098,00	14.174.699,00
		43	Lalong	6.268.522,00	7.910.672,00	14.179.194,00
		44	Bampanga	4.589.313,00	7.910.672,00	12.499.985,00
6	Kec. Liang	45	Momulusan	3.509.124,00	7.910.672,00	11.419.796,00
		46	Kinandal	3.231.547,00	7.910.672,00	11.142.219,00
		47	Tomboniki	3.213.518,00	7.910.672,00	11.124.190,00
		48	Okumel	4.166.180,00	10.074.977,00	14.241.157,00
		49	Popidolon	3.317.314,00	7.910.672,00	11.227.986,00
		50	Tangkop	3.292.928,00	7.910.672,00	11.203.600,00
		51	Binuntuli	3.826.736,00	7.910.672,00	11.737.408,00
		52	Saleati	4.223.760,00	7.910.672,00	12.134.432,00
		53	Bajo	3.071.226,00	7.910.672,00	10.981.898,00

NO	KECAMATAN	DESA		BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHP)	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHR)	TOTAL BPH/BHR
		54	Liang	6.039.746,00	20.376.899,00	26.416.645,00
		55	Balayon	3.211.868,00	7.910.672,00	11.122.540,00
		56	Basosol	3.703.050,00	7.910.672,00	11.613.722,00
		57	Boyou Moute	3.508.727,00	7.910.672,00	11.419.399,00
		58	Apal	3.333.586,00	7.910.672,00	11.244.258,00
		59	Selekan	3.417.006,00	7.910.672,00	11.327.678,00
		60	Loolong	3.219.981,00	7.910.672,00	11.130.653,00
7	Kec. Peling Tengah	61	Tolulos	4.100.485,00	10.942.417,00	15.042.902,00
		62	Popisi	3.718.331,00	7.910.672,00	11.629.003,00
		63	Labibi	4.193.244,00	7.910.672,00	12.103.916,00
		64	Luk	3.895.735,00	7.910.672,00	11.806.407,00
		65	Tombos	3.558.465,00	7.910.672,00	11.469.137,00
		66	Alakasing	5.127.077,00	7.910.672,00	13.037.749,00
		67	Patukuki	6.693.986,00	18.405.835,00	25.099.821,00
		68	Koyobunga	4.021.321,00	7.910.672,00	11.931.993,00
		69	Kolak	4.312.053,00	7.910.672,00	12.222.725,00
		70	Balombong	3.744.160,00	7.910.672,00	11.654.832,00
		71	Tunggaling	3.617.684,00	7.910.672,00	11.528.356,00
8	Kec. Bulagi	72	Tolo	3.376.122,00	7.910.672,00	11.286.794,00
		73	Lalanday	3.223.233,00	7.910.672,00	11.133.905,00
		74	Montomisan	3.017.072,00	7.910.672,00	10.927.744,00
		75	Sosom	3.708.592,00	7.910.672,00	11.619.264,00
		76	Alul	3.917.617,00	7.910.672,00	11.828.289,00
		77	Bulagi Dua	4.049.808,00	7.910.672,00	11.960.480,00
		78	Boloy	4.023.918,00	7.910.672,00	11.934.590,00
		79	Meselesek	3.701.242,00	7.910.672,00	11.611.914,00
		80	Oluno	3.556.780,00	9.147.418,00	12.704.198,00
		81	Sumondung	3.126.717,00	7.910.672,00	11.037.389,00
		82	Kayubet	2.967.116,00	7.910.672,00	10.877.788,00
		83	Peling Seasa	5.459.872,00	9.198.949,00	14.658.821,00
		84	Komba-komba	4.103.826,00	7.982.816,00	12.086.642,00
		85	Kambal	3.042.113,00	9.628.375,00	12.670.488,00
		86	Toolon	3.091.763,00	7.910.672,00	11.002.435,00
9	Kec. Bulagi Selatan	87	Bone Puso	3.959.945,00	7.910.672,00	11.870.617,00
		88	Pandaluk	4.329.663,00	7.910.672,00	12.240.335,00
		89	Palabatu Dua	2.917.977,00	7.910.672,00	10.828.649,00
		90	Tatarandang	3.505.117,00	7.910.672,00	11.415.789,00
		91	Lemelu	3.389.029,00	7.910.672,00	11.299.701,00
		92	Osan	3.426.573,00	7.910.672,00	11.337.245,00
		93	Balalon	3.277.493,00	10.220.982,00	13.498.475,00
		94	Sabelak	3.167.697,00	7.910.672,00	11.078.369,00
		95	Suit	3.239.046,00	7.910.672,00	11.149.718,00
		96	Palabatu Satu	3.421.405,00	7.910.672,00	11.332.077,00
		97	Mangais	3.220.947,00	7.910.672,00	11.131.619,00
		98	Unu	3.511.451,00	7.910.672,00	11.422.123,00
		99	Babang	3.043.697,00	7.910.672,00	10.954.369,00
		100	Momotan	3.004.461,00	7.910.672,00	10.915.133,00
		101	Labotankandi	3.438.535,00	7.910.672,00	11.349.207,00
		102	Nggolobuton	3.233.163,00	7.910.672,00	11.143.835,00
		103	Boluni	3.696.813,00	7.910.672,00	11.607.485,00
		104	Pipilogot Paisupaisu	3.133.641,00	7.910.672,00	11.044.313,00
		105	Toy-toy	3.702.943,00	7.910.672,00	11.613.615,00
		106	Lolantang	3.959.273,00	23.765.926,00	27.725.199,00
10	Kec. Bulagi Utara	107	Bangunemo	4.344.036,00	7.910.672,00	12.254.708,00
		108	Paisulamo	3.461.987,00	7.910.672,00	11.372.659,00
		109	Montop	4.080.109,00	16.262.314,00	20.342.423,00

Lampiran 34a

NO	KECAMATAN	DESA		BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHP)	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHR)	TOTAL BPH/BHR
		110	Bolubung	3.393.708,00	7.910.672,00	11.304.380,00
		111	Bakalinga	5.751.349,00	7.910.672,00	13.662.021,00
		112	Sambulangan	4.403.066,00	40.049.317,00	44.452.383,00
		113	Koyobunga	3.221.299,00	7.910.672,00	11.131.971,00
		114	Ombuli	3.376.514,00	7.910.672,00	11.287.186,00
		115	Luk Panenteng	4.526.518,00	7.910.672,00	12.437.190,00
		116	Minanga	3.383.123,00	7.910.672,00	11.293.795,00
		117	Mandok	3.693.768,00	7.910.672,00	11.604.440,00
11	Kec. Buko	118	Paisu Batu	4.692.709,00	8.511.868,00	13.204.577,00
		119	Batangono	4.178.225,00	7.910.672,00	12.088.897,00
		120	Leme-Leme Bungin	3.322.726,00	50.492.348,00	53.815.074,00
		121	Leme-Leme Darat	4.184.499,00	18.663.662,00	22.848.161,00
		122	Talas-Talas	4.325.600,00	7.910.672,00	12.236.272,00
		123	Okulo Potil	4.520.558,00	7.910.672,00	12.431.230,00
		124	Tetendeng	4.500.369,00	7.910.672,00	12.411.041,00
		125	Olusi	3.553.954,00	7.910.672,00	11.464.626,00
		126	Lalengan	5.522.912,00	9.198.949,00	14.721.861,00
		127	Peling Lalomo	5.917.606,00	7.910.672,00	13.828.278,00
		128	Labasiano	4.542.936,00	7.910.672,00	12.453.608,00
		129	Tataba	4.362.328,00	8.340.098,00	12.702.426,00
		130	Malanggong	5.260.295,00	7.910.672,00	13.170.967,00
12	Kec. Buko Selatan	131	Kambani	3.864.956,00	11.861.388,00	15.726.344,00
		132	Tatabau	3.841.732,00	7.910.672,00	11.752.404,00
		133	Buko	4.331.499,00	7.910.672,00	12.242.171,00
		134	Palapat	3.347.241,00	7.910.672,00	11.257.913,00
		135	Lumbi-lumbia	5.211.384,00	24.635.515,00	29.846.899,00
		136	Labangun	3.122.947,00	7.910.672,00	11.033.619,00
		137	Seano	3.358.057,00	7.910.672,00	11.268.729,00
		138	Apal	3.067.235,00	7.910.672,00	10.977.907,00
		139	Lelang Matamaling	3.840.776,00	8.597.753,00	12.438.529,00
		140	Landonan Bebeau	4.522.681,00	7.910.672,00	12.433.353,00
		141	Sapelang	3.106.336,00	7.910.672,00	11.017.008,00
JUMLAH TOTAL				**628.573.289,00**	**1.859.007.925,00**	**2.487.581.214,00**

Lampiran 34b

RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA 2023
1	Kec. Totikum	1	Sobonon	328.545.700,00
		2	Bolonan	331.717.000,00
		3	Sakay	339.989.400,00
		4	Sambiut	338.334.400,00
		5	Tone	328.732.900,00
		6	Abason	348.407.500,00
		7	Salangano	351.301.400,00
		8	Batang Babasal	356.657.600,00
		9	Sampaka	345.727.500,00
		10	Lopito	360.868.800,00
		11	Kombutokan	419.035.300,00
2	Kec. Totikum Selatan	12	Tonuson	339.829.500,00
		13	Tobungku	337.699.800,00
		14	Nulion	363.881.500,00
		15	Peley	343.062.500,00
		16	Kalumbatan	596.184.000,00
		17	Kanali	331.181.900,00
		18	Mata	350.827.300,00
		19	Lobuton	347.893.600,00
3	Kec. Tinangkung	20	Manggalai	357.912.500,00
		21	Ambelang	398.579.700,00
		22	Saiyong	342.660.600,00
		23	Tompodau	344.670.900,00
		24	Baka	408.293.900,00
		25	Bongganan	429.114.600,00
		26	Kautu	404.321.400,00
		27	Bakalan	344.614.900,00
		28	Bulungkobit	353.520.800,00
		29	Bungin	355.914.900,00
4	Kec. Tinangkung Selatan	30	Paisumosoni	336.738.800,00
		31	Tobing	340.990.400,00
		32	Tobungin	347.632.500,00
		33	Gansal	349.280.100,00
		34	Bobu	355.742.300,00
		35	Mansamat B	333.367.400,00
		36	Mansamat A	349.088.600,00
		37	Kampung Baru	365.813.000,00
		38	Tinangkung	369.198.100,00
5	Kec. Tinangkung Utara	39	Palam	388.022.100,00
		40	Luksagu	408.049.400,00

Lampiran 34b

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA 2023
		41	Tatakalai	383.733.700,00
		42	Ponding-ponding	367.072.100,00
		43	Lalong	355.911.000,00
		44	Bampanga	331.795.800,00
6	Kec. Liang	45	Momulusan	343.268.300,00
		46	Kinandal	352.554.800,00
		47	Tomboniki	330.304.000,00
		48	Okumel	377.841.000,00
		49	Popidolon	343.441.100,00
		50	Tangkop	327.690.100,00
		51	Binuntuli	341.859.100,00
		52	Saleati	337.184.600,00
		53	Bajo	363.984.100,00
		54	Liang	352.372.100,00
		55	Balayon	331.573.200,00
		56	Basosol	335.879.200,00
		57	Boyou Moute	324.362.900,00
		58	Apal	355.268.200,00
		59	Selekan	338.432.300,00
		60	Loolong	328.417.100,00
7	Kec. Peling Tengah	61	Tolulos	374.967.000,00
		62	Popisi	350.521.600,00
		63	Labibi	351.283.000,00
		64	Luk	348.577.200,00
		65	Tombos	361.612.900,00
		66	Alakasing	402.713.700,00
		67	Patukuki	391.156.800,00
		68	Koyobunga	341.969.800,00
		69	Kolak	343.544.600,00
		70	Balombong	349.712.200,00
		71	Tunggaling	343.295.700,00
8	Kec. Bulagi	72	Tolo	336.898.900,00
		73	Lalanday	345.968.700,00
		74	Montomisan	332.891.000,00
		75	Sosom	354.640.000,00
		76	Alul	354.780.500,00
		77	Bulagi Dua	349.182.100,00
		78	Boloy	339.852.600,00
		79	Meselesek	352.872.900,00
		80	Oluno	346.377.900,00
		81	Sumondung	331.476.100,00
		82	Kayubet	325.776.900,00
		83	Peling Seasa	354.099.200,00

Lampiran 34b

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA 2023
		84	Komba-komba	340.581.200,00
		85	Kambal	345.460.200,00
		86	Toolon	335.186.300,00
9	Kec. Bulagi Selatan	87	Bone Puso	353.481.700,00
		88	Pandaluk	356.783.400,00
		89	Palabatu Dua	320.060.900,00
		90	Tatarandang	362.584.300,00
		91	Lemelu	354.277.900,00
		92	Osan	347.052.100,00
		93	Balalon	333.157.200,00
		94	Sabelak	342.600.400,00
		95	Suit	329.129.800,00
		96	Palabatu Satu	330.002.000,00
		97	Mangais	331.394.700,00
		98	Unu	348.362.800,00
		99	Babang	361.623.100,00
		100	Momotan	329.115.600,00
		101	Labotankandi	335.158.700,00
		102	Nggolobuton	340.889.300,00
		103	Boluni	334.230.200,00
		104	Pipilogot Paisupaisu	328.266.600,00
		105	Toy-toy	349.376.300,00
		106	Lolantang	332.367.900,00
10	Kec. Bulagi Utara	107	Bangunemo	354.938.300,00
		108	Paisuluno	342.570.200,00
		109	Montop	367.264.900,00
		110	Bolubung	333.949.600,00
		111	Bakalinga	368.468.500,00
		112	Sambulangan	351.050.600,00
		113	Koyobunga	329.956.200,00
		114	Ombuli	377.518.400,00
		115	Luk Panenteng	392.901.900,00
		116	Minanga	334.278.900,00
		117	Mandok	329.258.500,00
11	Kec. Buko	118	Paisu Batu	377.745.300,00
		119	Batangono	378.762.600,00
		120	Leme-Leme Bungin	334.353.200,00
		121	Leme-Leme Darat	344.535.200,00
		122	Talas-Talas	338.907.700,00
		123	Okulo Potil	361.908.800,00
		124	Tetendeng	357.582.800,00
		125	Olusi	335.588.500,00
		126	Lalengan	348.311.900,00

Lampiran 34b

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA 2023
		127	Peling Lalomo	356.767.400,00
		128	Labasiano	325.837.800,00
		129	Tataba	337.151.100,00
		130	Malanggong	357.957.700,00
12	Kec. Buko Selatan	131	Kambani	346.745.000,00
		132	Tatabau	353.051.000,00
		133	Buko	333.764.600,00
		134	Palapat	335.831.600,00
		135	Lumbi-lumbia	413.819.300,00
		136	Labangun	343.303.900,00
		137	Seano	348.397.600,00
		138	Apal	353.707.900,00
		139	Lelang Matamaling	340.120.100,00
		140	Landonan Bebeau	368.857.500,00
		141	Sapelang	334.065.700,00
JUMLAH TOTAL				**49.700.893.300,00**

Lampiran 35

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DARI HASIL PENILAIAN TANAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	D	K
1	**Setda Bagian Umum**	1.3.1.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	5.200.800.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		5.200.800.000,00
2	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	1.3.1.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.679.630.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		3.679.630.000,00
3	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	1.3.1.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	466.320.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		466.320.000,00
4	**Dinas Perhubungan**	1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.044.259.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		1.044.259.000,00
5	**Dinas Kesehatan**	1.3.1.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	494.237.000,00	
		1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	237.852.500,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		732.089.500,00
6	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	1.3.1.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	206.758.000,00	
		1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.386.467.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		1.593.225.000,00
7	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**	1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.217.040.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		1.217.040.000,00
8	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	274.794.000,00	

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	D	K
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		274.794.000,00
9	**Kecamatan Tinangkung**	1.3.1.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	544.180.000,00	
		1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	353.209.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		897.389.000,00
10	**Kecamatan Totikum**	1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	107.352.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		107.352.000,00
11	**Kecamatan Bulagi**	1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	8.820.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		8.820.000,00
12	**Kecamatan Buko**	1.3.1.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	71.880.000,00	
		1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	88.080.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		159.960.000,00
13	**Kecamatan Bulagi Selatan**	1.3.1.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	45.686.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		45.686.000,00
14	**Kecamatan Tinangkung Selatan**	1.3.1.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	203.756.000,00	
		1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	94.544.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		298.300.000,00
15	**Kecamatan Buko Selatan**	1.3.1.01.01.0007	Tanah Persil Lainnya	752.104.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		752.104.000,00
16	**Kecamatan Totikum Selatan**	1.3.1.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	95.634.000,00	
		1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	130.020.000,00	

Lampiran 35

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	D	K
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		225.654.000,00
17	**Kelurahan Salakan**	1.3.1.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	111.202.000,00	
		1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	181.996.000,00	
		1.3.1.01.03.0001	Tanah Lapangan Olah Raga	3.131.908.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		3.425.106.000,00
JUMLAH TOTAL MENAMBAH NILAI ASET TANAH DARI HASIL PENILAIAN TANAH SEBANYAK 73 REGESTER SERTIFIKAT TA				**20.128.528.500,00**	**20.128.528.500,00**

Lampiran 36

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
HIBAH KE MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit
1	**Dinas Perhubungan**	3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas	254.236.500,00	
		1.3.1.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		254.236.500,00
2	**Kecamatan Buko Selatan**	3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas	298.000.000,00	
		1.3.1.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		298.000.000,00
JUMLAH MENGURANGI ASET TETAP TANAH ATAS HIBAH KE MASYARAKAT				**552.236.500,00**	**552.236.500,00**
1	**KECAMATAN BULAGI UTARA (Kelurahan Sabang)**	3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas	491.810.000,00	
		1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap Yang tidak Digunakan Dalam Opersional Pemerintah		491.810.000,00
JUMLAH MENGURANGI ASET LAINNYA (ASET PINJAM PAKAI) ATAS HIBAH KE MASYARAKAT				**1.596.283.000,00**	**1.596.283.000,00**
JUMLAH TOTAL HIBAH KE MASYARAKAT				**3.192.566.000,00**	**3.192.566.000,00**

Lampiran 37

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
REKLASIFIKASI AKUN DARI TANAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit	NO SP2D	TGL SP2D
1	**Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang**	1.3.3.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Rehabilitas Mess Kejaksaan)	133.867.000,00			
		1.3.1.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		133.867.000,00	18.02/04.0/000300/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023	22 Dec 2023
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Gedung Bangunan				
JUMLAH MENAMBAH NILAI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				**133.867.000,00**	**133.867.000,00**		
2	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	1.3.6.01.01.0001.01	Tanah Dalam Pengerjaan	106.997.000,00			
		1.3.1.01.03.0011	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah		106.997.000,00		
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)				
JUMLAH MENAMBAH NILAI ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)				**106.997.000,00**	**106.997.000,00**		
JUMLAH TOTAL REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB MENGURANGI ASET TETAP TANAH				**240.864.000,00**	**240.864.000,00**		

Lampiran 38

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
REKLASIFIKASI AKUN DARI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT	NO SP2D	TGL SP2D
1	**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan**	1.3.2.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	817.650.000,00			
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Prencanaan Pengadaan Lampu Jalan Desa Bakalan, Bungin, Montomisan, Penyediaan PJU Desa Mansamat A, Mansamat B dan Desa Oluno		17.350.000,00	18.02/04.0/000031/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.02/5/2023	2023-05-31
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pengawasan Pengadaan Lampu Jalan Desa Bakalan, Bungin, Montomisan, Penyediaan PJU Desa Mansamat A, Mansamat B dan Desa Oluno		23.160.000,00	18.02/04.0/000098/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.03/10/2023	2023-10-13
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pekerjaan Penyediaan Penerangan Jalan Umum Desa Mansamat A		67.893.000,00	18.02/04.0/000081/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.03/9/2023	2023-09-07
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pekerjaan Penyediaan Penerangan Jalan Umum Desa Mansamat B		67.823.000,00	18.02/04.0/000082/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.03/9/2023	2023-09-07
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan Desa Oluno		102.093.000,00	18.02/04.0/000084/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.03/9/2023	2023-09-13
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan Desa Montomosan		85.888.000,00	18.02/04.0/000085/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.03/9/2023	2023-09-13
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain -Pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan Desa Bakalan		85.006.000,00	18.02/04.0/000093/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.03/9/2023	2023-09-29
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pekerjaan Pengadaan Lampu Jalan Desa Bungin		85.145.000,00	18.02/04.0/000094/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.03/9/2023	2023-09-29
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Perencanaan Pengadaan Lampu Jalan, PJU dan Saluran Tegangan Rendah		8.849.000,00	18.02/04.0/000121/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.04/12/2023	2023-12-22
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pengawasan Pengadaan PJU		9.800.000,00	18.02/04.0/000123/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.05/12/2023	2023-12-29
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pekerjaan Pengadaan PJU Desa Balayon		89.840.000,00	18.02/04.0/000131/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.05/12/2023	2023-12-29
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pekerjaan Pengadaan PJU Desa Mansamat B		44.852.000,00	18.02/04.0/000133/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.05/12/2023	2023-12-29
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pekerjaan Pengadaan PJU Rumah Jabatan Eselon III		44.564.000,00	18.02/04.0/000140/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.05/12/2023	2023-12-29

Lampiran 38

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT	NO SP2D	TGL SP2D
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pekerjaan Pengadaan PJU Ibu Kota Kec. Bulagi Selatan		85.387.000,00	18.02/04.0/000136/LS/1.04.2.10.0.00.01.0000/P.05/12/2023	2023-12-29
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Peralatan dan Mesin				
2	**Dinas Perhubungan**	1.3.2.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	674.690.000,00			
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Perencanaan Pembangunan dan Pengadaan Lampu Jalan/Solar Sell Desa Ponding - Ponding		5.000.000,00	18.02/04.0/000017/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P.01/3/2023	2023-03-31
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pekerjaan Pembangunan dan Pengadaan Lampu Jalan/Solar Sell Ds. Ponding-Ponding		170.890.000,00	18.02/04.0/000068/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P.02/8/2023	2023-08-29
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pengawasan Pembangunan dan Pengadaan Lampu Jalan / Solar Sell Desa Ponding - Ponding		3.000.000,00	18.02/04.0/000073/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P.02/8/2023	2023-08-29
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Perencanaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Lengan Satu Luar Kota Salakan		24.000.000,00	18.02/04.0/000040/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2023	2023-06-09
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pembangunan dan Pengadaan Lampu Jalan/Solar Cell Luar Kota Salakan		462.000.000,00	18.02/04.0/000057/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2023	2023-07-14
		1.3.4.03.10.0001	Instalasi Lain - Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Penerangan Jalan Umum Lengan Satu Luar Kota Salakan		9.800.000,00	18.02/04.0/000064/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2023	2023-07-20
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Peralatan dan Mesin				
JUMLAH MENAMBAH PERALATAN dan MESIN DARI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN (MENGURANGI Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan)				**1.492.340.000,00**	**1.492.340.000,00**		
1	**Dinas Pekerjaan Umum, Pe**	1.3.6.01.01.0001	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	2.043.495.300,00			
		1.3.4.01.01.0003	Jalan Kabupaten (Lanjutan Jalan Paal -Sampekonan (fisik 80.701%)		851.341.400,00	18.02/04.0/000379/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023	2023-12-29
		1.3.4.01.01.0003	Jalan Kabupaten (Pek. Rekonstruksi Jalan Ruas: Tetendeng-Kokolomboi (fisik 74,109%))		1.111.739.900,00	18.02/04.0/000366/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023	2023-12-29
		1.3.4.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor (Pek.Pembangunan Saluran Drainase Desa Manggalai 89,4%)		80.414.000,00	18.02/04.0/000386/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023	2023-12-29
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)				
JUMLAH MENAMBAH NILAI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN ATAS REKLASIFIKASI DARI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN (MEGURANGI NILAI JIJ)				**2.043.495.300,00**	**2.043.495.300,00**		

Lampiran 38

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT	NO SP2D	TGL SP2D
JUMLAH TOTAL REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB DARI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN				**3.535.835.300,00**	**3.535.835.300,00**		

Lampiran 39

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
REKLASIFIKASI AKUN KE BEBAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	**BPBD**	8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	119.528.000,00	
		1.3.02.05.02.0006	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		119.528.000,00
JUMLAH MENGURANGi NILAI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN				**119.528.000,00**	**119.528.000,00**
1	**Sekretariat DPRD**	8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	11.900.000,00	
		1.3.03.01.02.0001	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rumah Negara Golongan I		11.900.000,00
2	**Dinas Pendidikan dan Kebu**	8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	8.000.000,00	
		1.3.3.04.01.0003	Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Pilar/Tugu/Tanda Lainnya		4.000.000,00
		1.3.3.04.01.0004	Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Pagar		4.000.000,00
3	**Dinas Perikanan**	8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50.000.000,00	
		1.3.3.01.01.0034	Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung Pabrik		50.000.000,00
JUMLAH MENGURANGi NILAI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				**69.900.000,00**	**69.900.000,00**
1	**Sekretariat DPRD**	8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	13.900.000,00	
		1.3.04.03.01.0005	Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan - Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		13.900.000,00
2	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000,00	

Lampiran 39

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
		1.3.04.01.01.0003	Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan - Jalan Kabupaten		450.000,00
3	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan**	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.450.000,00	
		1.3.04.01.01.0005	Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan - Jalan Desa		1.450.000,00
		8.1.02.03.04.0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	1.350.500,00	
		1.3.04.03.10.0001	Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan - Instalasi Lain		1.350.500,00
4	**Dinas Perhubungan**	8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	10.000.000,00	
		1.3.04.03.10.0001	Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan - Instalasi Lain		10.000.000,00
5	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	8.1.02.02.09.0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	20.980.000,00	
		1.3.04.02.04.0001	Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan - Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam		20.980.000,00
6	**Dinas Pertanian**	8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	145.600.000,00	
		1.3.04.01.01.0009	Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan - Jalan Khusus		145.600.000,00
JUMLAH MENGURANGi NILAI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				**193.730.500,00**	**193.730.500,00**
JUMLAH TOTAL REKLASIFIKASI AKUN KE BEBAN BELANJA (MENGURANGI ASET TETAP)				**383.158.500,00**	**383.158.500,00**

Lampiran 40

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
REKLASIFIKASI AKUN DARI PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit	NO SP2D	TGL SP2D
1	**Satuan Polisi Pamong Praja**	1.3.3.03.01.0005.	Bangunan Menara Perambuan Lainnya (Pengadaan Penampung Air)	19.500.000,00			
		1.3. 2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Belanja Modal Pengadaan Penampung Air		19.500.000,00	18.02/04.0/000031/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/P.03/8/2023	31 Aug 2023
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan				
JUMLAH MENAMBAH NILAI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				**19.500.000,00**	**19.500.000,00**		
1	**Dinas Kesehatan**	1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	110.842.628,00			
		1.3.2.02.01.0004	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Kendaraan Bermotor Beroda Dua		16.168.628,00		
		1.3.2.05.02.0001	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Meubelair		7.040.000,00		
		1.3.2.05.03.0003	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kursi Kerja Pejabat		8.250.000,00		
		1.3.2.06.01.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Studio Vidio dan Film		38.354.000,00		
		1.3.2.08.04.0004	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Recorder Display		3.630.000,00		
		1.3.2.10.01.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Personal Komputer		37.400.000,00		
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Aset Lainnya Atas Sisa Hibah Ke Banggai Laut (Aset Pinjam Pakai)				
2	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	665.786.456,00			
		1.3.2.03.03.0010	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Timbangan/Biara		12.906.795,00		
		1.3.2.05.02.0001	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Meubelair		88.550.000,00		
		1.3.2.05.02.0004	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Pendingin		6.050.000,00		
		1.3.2.05.02.0006	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		19.057.500,00		
		1.3.2.05.03.0001	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Meja Kerja Pejabat		9.700.000,00		
		1.3.2.05.03.0003	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Kursi Kerja Pejabat		8.000.000,00		
		1.3.2.06.01.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Studio Vidio dan Film		30.371.324,00		
		1.3.2.08.03.0001	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga Prakter Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia		25.487.000,00		
		1.3.2.08.03.0005	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga Prakter Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah		35.380.367,00		
		1.3.2.08.03.0007	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga Prakter Sekolah Bidang Studi : IPS		13.970.880,00		
		1.3.2.10.01.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Personal Komputer		301.813.590,00		
		1.3.2.10.02.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Mini Komputer		112.299.000,00		
		1.3.2.10.02.0004	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan Jaringan		2.200.000,00		

Lampiran 40

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit	NO SP2D	TGL SP2D
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Aset Lainnya Atas Sisa Hibah Ke Banggai Laut (Aset Pinjam Pakai)				
3	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	65.000.000,00			
		1.3.2.10.01.0002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Personal Komputer		65.000.000,00		
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Aset Lainnya Atas Sisa Hibah Ke Banggai Laut (Aset Pinjam Pakai)				
JUMLAH MENAMBAH NILAI ASET LAINNYA ATAS SISA HIBAH KE BANGGAI LAUT (ASET PINJAM PAKAI)				**841.629.084,00**	**841.629.084,00**		
JUMLAH TOTAL REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB MENGURANGI ASET PERALATAN DAN MESIN				**861.129.084,00**	**861.129.084,00**		

Lampiran 41

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR EKSTRACOM ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
T.A 2023

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin				Barang	Peralatan dan Mesin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Sekretariat DPRD**	1	1.3.2.05.002.001.002	0142	Meja Kerja Kayu	Olimpic	-	-Olimpik Krem	Pembelian	2023	1	790.000,00
		2	1.3.2.05.002.001.031	0001 s/d 0098	Kursi Tamu	Fronline	-	-Almanium, Busa Kain, Biru	Pembelian	2023	98	63.210.000,00
		3	1.3.2.05.002.001.031	0098	Kursi Tamu	Fronline	-	Almanium, Busa Kain, Biru	Pembelian	2023	1	645.000,00
		4	1.3.2.05.002.001.031	0110	Kursi Tamu	Fronline	-	-	Pembelian	2023	1	645.000,00
		5	1.3.2.05.002.006.077	0001 s/d 0002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	-	Pembelian	2023	2	1.980.000,00
		6	1.3.2.05.002.006.077	0001 s/d 0002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Mito	-	-	Pembelian	2023	2	1.980.000,00
		7	1.3.2.05.002.006.077	0446	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	-Besi	Pembelian	2023	1	690.000,00
		8	1.3.2.05.002.006.077	0449	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	-Besi, Almanium	Pembelian	2023	1	990.000,00
		9	1.3.2.05.002.006.077	0450	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	-Plastik, Kertas	Pembelian	2023	1	990.000,00
		10	1.3.2.05.002.006.077	0451	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	-Plastik Kertas	Pembelian	2023	1	990.000,00
JUMLAH											**109**	**72.910.000,00**
2	**Dinas Pertanian**	1	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0002	Kursi Lipat	ATAKA	-	BESI/KAYU	Pembelian	2023	2	1.222.500,00
		2	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0002	Kursi Lipat	ELITE	-	BESI/KAYU	Pembelian	2023	2	1.222.500,00
		3	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0003	Kursi Lipat	FORTUNER	-	BESI/KAYU	Pembelian	2023	3	1.833.750,00
		4	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0005	Kursi Lipat	ELITE	-	BESI/ KAYU	Pembelian	2023	5	3.056.250,00
		5	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0008	Kursi Lipat	NO NAME	-	BESI/ KAYU	Pembelian	2023	8	4.890.000,00
		6	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0011	Kursi Lipat	CHITOSE	-	BESI/KAYU	Pembelian	2023	11	6.723.750,00
		7	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0022	Kursi Lipat	CHITOSE	-	BESI/ KAYU	Pembelian	2023	22	13.447.500,00
		8	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0023	Kursi Lipat	FUTURA	-	BESI/KAYU	Pembelian	2023	23	14.058.750,00
		9	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0039	Kursi Lipat	FUTURA	-	BESI/ KAYU	Pembelian	2023	39	23.838.750,00
		10	1.3.2.05.002.001.036	0662	Kursi Lipat	ATAKA	-	BESI/ KAYU	Pembelian	2023	1	611.250,00
		11	1.3.2.05.002.001.036	0670	Kursi Lipat	CHITOSE	-	BESI / KAYU	Pembelian	2023	1	611.250,00
		12	1.3.2.05.002.001.036	0672	Kursi Lipat	FORTUNER	-	BESI/ KAYU	Pembelian	2023	1	611.250,00
		13	1.3.2.05.002.001.036	0682	Kursi Lipat	FORTUNER	-	BESI / KAYU	Pembelian	2023	1	611.250,00
		14	1.3.2.05.002.001.036	0733	Kursi Lipat	NO NAME	-	BESI /KAYU	Pembelian	2023	1	611.250,00
JUMLAH											**120**	**73.350.000,00**
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	1	1.3.2.10.002.003.007	0001	External	TOSHIBA / 1 TB	-SN 42PATODUTLTH	- PLASTIK/HITAM	Pembelian	2023	1	1.000.000,00
		2	1.3.2.10.002.003.007	0002	External	TOSHIBA / 1 TB	-SN 42OGT1SLTU8H	-plastik/Hitam	Pembelian	2023	1	1.000.000,00
JUMLAH											**2**	**2.000.000,00**
4	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	1	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0008	Kursi Kayu	-	-	Kayu/Busa/Cokelat/Hitam	Pembelian	2023	8	2.000.000,00

Lampiran 41

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin				Barang	Peralatan dan Mesin
JUMLAH											**8**	**2.000.000,00**
5	**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**	1	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0016	Kursi Lipat	Chitose / 542 E	-	Campuran / Hitam	Pembelian	2023	16	12.320.000,00
		2	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0016	Kursi Lipat	NEW STAR / MC 18	-	Campuran / Hitam Putih	Pembelian	2023	16	12.800.000,00
JUMLAH											**32**	**25.120.000,00**
6	**Dinas Pariwisata**	1	1.3.2.05.001.005.088	0006	Alat Kantor Lainnya	Power Pack / -	19302410082	Besi/Silver	Pembelian	2023	1	1.196.719,00
		2	1.3.2.05.002.005.002	0001	Kompor Gas (Alat Dapur)	RINAI, RI - 522C / 2 Mata	2306490046	Stainless/Hitam	Pembelian	2023	1	593.573,00
		3	1.3.2.05.002.005.009	0001	Tabung Gas	Brigh Gas / 5,5 Kg	-	Besi/merah muda	Pembelian	2023	1	593.573,00
JUMLAH											**3**	**2.383.865,00**
7	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	1	1.3.2.10.002.003.017	0001	External/ Portable Hardisk	Sea Gate / Warna abu-abu	NABZMAK3	Piber Class, Alumunium	Pembelian	2023	1	1.000.000,00
		2	1.3.2.10.002.003.017	0002	External/ Portable Hardisk	Sea Gate / Warna abu-abu	NABZMM8W	Piber Class, Alumunium	Pembelian	2023	1	1.000.000,00
		3	1.3.2.10.002.003.017	0003	External/ Portable Hardisk	Sea Gate / Warna abu-abu	NABZMN6W	Piber Class, Alumunium	Pembelian	2023	1	1.000.000,00
JUMLAH											**3**	**3.000.000,00**
8	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	1	1.3.2.05.002.001.025	0001 s/d 0040	Kasur/Spring Bed	-	-	BUSA	Pembelian	2023	40	23.976.000,00
JUMLAH											**40**	**23.976.000,00**
9	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan**	1	1.3.2.10.002.003.007	0019	External	THOSIBA / DTP10	SN : 528DT178TV8H	Plastik	Pembelian	2023	1	1.000.000,00
JUMLAH											**1**	**1.000.000,00**
10	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	1	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0100	Kursi Lipat	CHITOSE	-	Besi/Busa	Pembelian	2023	100	85.000.000,00
JUMLAH											**100**	**85.000.000,00**
11	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	1	1.3.2.01.003.013.003	0001 s/d 0002	Knives (Pisau Selam)	Scuba Pro	-	Besi/Hitam	Pembelian	2023	2	888.000,00
		2	1.3.2.01.003.013.004	0001 s/d 0004	Dive Lights (Senter Selam)	Mares	-	Besi/Hitam	Pembelian	2023	4	5.772.000,00
		3	1.3.2.01.003.013.014	0001 s/d 0003	peralatan selam lainnya (dst)	Zoe Pro	-	Karet/Hitam	Pembelian	2023	3	2.329.500,00
JUMLAH											**9**	**8.989.500,00**
12	**Bagian Umum**	1	1.3.2.05.002.001.033	0001 s/d 0298	Kursi Biasa	Crown	-	besi/busa/warna biru	Pembelian	2023	298	148.404.000,00
		2	1.3.2.05.002.001.033	0219	Kursi Biasa	Crown	-	-besi/busa/warna biru	Pembelian	2023	1	498.000,00
		3	1.3.2.05.002.001.033	0260	Kursi Biasa	Crown	-	besi/busa/warna birubesi/busa/warna biru	Pembelian	2023	1	498.000,00
JUMLAH											**300**	**149.400.000,00**
13	**Bagian Administrasi Perekonomian**	1	1.3.2.10.002.003.017	0001	External/ Portable Hardisk	Expansion	7636490063428 NAA36KY1	Campuran Plastik/Hitam	Pembelian	2023	1	1.000.000,00
JUMLAH											**1**	**1.000.000,00**
14	**Bagian Administrasi Pembangunan**	1	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0050	Kursi Lipat	Chitose / Chitose	-	-	Pembelian	2023	50	30.000.000,00
JUMLAH											**50**	**30.000.000,00**
15	**Satuan Polisi Pamong Praja**	1	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0065	Kursi Besi/Metal	Inferma	-	Besi/Hitam	Pembelian	2023	65	64.718.000,00

Lampiran 41

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin				Barang	Peralatan dan Mesin
		2	1.3.2.15.001.003.001	0001 s/d 0003	alat deteksi lainnya lainnya (dst)	Garret Metal Detektor	-	Plastik, Alumunium/Hitam	Pembelian	2023	3	1.050.000,00
		3	1.3.2.15.001.003.001	0001 s/d 0003	alat deteksi lainnya lainnya (dst)	Mirror Inspektion / Model V3	-	Kaca, Alumunium/Hitam	Pembelian	2023	3	2.100.000,00
					JUMLAH						**71**	**67.868.000,00**
16	**Kecamatan Tinangkung Selatan**	1	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0025	Kursi Lipat	TIGER	-	besi/hitam	Pembelian	2023	25	15.000.000,00
					JUMLAH						**25**	**15.000.000,00**
17	**Kecamatan Liang**	1	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0002	Kursi Besi/Metal	FRONTLINE / Sandaran Busa	-	-	Pembelian	2023	2	1.000.000,00
		2	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0125	Kursi Besi/Metal	FRONTLINE / Sandaran Busa	-	Besi/Busa/Merah	Pembelian	2023	125	62.500.000,00
		3	1.3.2.05.002.001.003	0002	Kursi Besi/Metal	FRONTLINE / Sandaran Busa	-	-Besi/Busa/ Merah	Pembelian	2023	1	500.000,00
		4	1.3.2.05.002.001.003	0015	Kursi Besi/Metal	FRONTLINE / Sandaran Busa	-	Besi/Busa/ Merah	Pembelian	2023	1	500.000,00
		5	1.3.2.05.002.001.003	0023	Kursi Besi/Metal	FRONTLINE / Sandaran Busa	-	Kursi Besi/Metal (Sandaran Besi/Busa/Merah	Pembelian	2023	1	500.000,00
					JUMLAH						**130**	**65.000.000,00**
18	**Dinas Kesehatan**	1	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0037	Kursi Lipat	BIG PLAN	-	Besi busa / Hitam	Pembelian	2023	37	22.198.335,00
		2	1.3.2.10.002.003.017	0003	External/ Portable Hardisk	Seagate / -	SN: NT2202N0	Fiber Plastik / Hitam	Pembelian	2023	1	990.000,00
		3	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0040	Kursi Lipat	BIG PLAN	-	Besi busa /hitam	Pembelian	2023	40	23.998.200,00
		4	02.07.02.05.025	0011	Alat Kesehatan Umum lainnya	Sinoheart / Arm BA-801	Lot: L220880038	Plastik Fiber, putih	BOS/JKN	2023	1	150.000,00
		5	02.07.02.05.025	0012	Alat Kesehatan Umum lainnya	- / -	-	Plasti Fiber	BOS/JKN	2023	1	150.000,00
		6	02.07.02.05.025	0013	Alat Kesehatan Umum lainnya	Thermometer / YHW-5	Lot: 70221031	Plastik fiber, putih	BOS/JKN	2023	1	520.000,00
		7	1.3.2.05.002.001.036	0001	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026687	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		8	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0042	Kursi Lipat	BIG PLAN	-	Besi busa / Hitam	Pembelian	2023	42	25.198.110,00
		9	1.3.2.05.002.001.036	0002	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026681	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		10	1.3.2.05.002.001.036	0003	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026683	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		11	1.3.2.05.002.001.036	0004	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026684	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		12	1.3.2.05.002.001.036	0005	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026685	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		13	1.3.2.05.002.001.036	0006	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026602	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		14	1.3.2.05.002.001.036	0007	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026642	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		15	1.3.2.05.002.001.036	0008	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026646	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		16	1.3.2.05.002.001.036	0009	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026645	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		17	1.3.2.05.002.001.036	0010	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026644	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		18	1.3.2.05.002.001.036	0011	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026454	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin				Barang	Peralatan dan Mesin
		19	1.3.2.05.002.001.036	0012	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026453	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		20	1.3.2.05.002.001.036	0013	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026448	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		21	1.3.2.05.002.001.036	0014	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026449	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		22	1.3.2.05.002.001.036	0015	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026447	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		23	1.3.2.05.002.001.036	0016	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026597	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		24	1.3.2.05.002.001.036	0017	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026598	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		25	1.3.2.05.002.001.036	0018	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026600	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		26	1.3.2.05.002.001.036	0019	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026601	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		27	1.3.2.05.002.001.036	0020	Kursi Lipat	Chitose / -	SN: 210929026599	Besi busa, Hitam silver	BOS/JKN	2023	1	770.790,00
		28	1.3.2.05.002.006.077	0001 s/d 0020	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Dimout Deluxe Series	-	aluminium, putih	BOS/JKN	2023	20	13.000.000,00
		29	02.07.02.05.025	0012	Alat Kesehatan Umum lainnya	Dopler Fetal Heart Detector / LT-800+	AKL: 21101713397	Plastik fiber, putih	BOS/JKN	2023	1	1.200.000,00
		30	02.07.02.05.025	0001 s/d 0005	Alat Kesehatan Umum lainnya	APAR	-	Besi/Merah	Pembelian	2023	5	1.250.000,00
JUMLAH											**169**	**104.070.445,00**
19	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	1	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0030	Kursi Kayu	-	-	-Kayu/Pernis	Pembelian	2023	30	7.500.000,00
		2	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0030	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/Pernis	Pembelian	2023	30	12.000.000,00
		3	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0002	Kursi Lipat	Chitose	-	-Busa/Besi	Pembelian	2023	2	1.400.000,00
		4	1.3.2.05.002.001.036	531	Kursi Lipat	-	-	-Besi/busa/hitam	Pembelian	2023	1	700.000,00
		5	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0030	Meubeleur lainnya	-	-	-kayu/Coklat muda	Pembelian	2023	30	9.750.000,00
		6	1.3.2.19.001.002.018	0001 s/d 0005	Peralatan Permainan lainnya	-	-	-plastik	Pembelian	2023	5	3.700.000,00
		7	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0006	Kursi Besi/Metal	siamas	-	-Kayu/kuning	Pembelian	2023	6	2.100.000,00
		8	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0008	Kursi Kayu	-	-	Busa/Besi/Biru	BOS/JKN	2023	8	4.440.000,00
		9	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0193	Kursi Kayu	-	-	-Kayu/Kuning	Pembelian	2023	193	112.700.000,00
		10	1.3.2.05.002.001.004	7	Kursi Kayu	-	-	kayu/kuning-	Pembelian	2023	1	700.000,00
		11	1.3.2.05.002.001.004	10	Kursi Kayu	-	-	-	Pembelian	2023	1	700.000,00
		12	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0033	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/hitam	Pembelian	2023	33	16.500.000,00
		13	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0066	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/tiner	Pembelian	2023	66	33.000.000,00
		14	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0129	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/Kuning	Pembelian	2023	129	99.200.000,00
		15	1.3.2.05.002.001.034	0001 s/d 0033	Bangku Sekolah	-	-	-Kayu/kuning	Pembelian	2023	33	9.900.000,00
		16	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0002	Kursi Lipat	-	-	-besi/busa/hitam	Pembelian	2023	2	1.600.000,00
		17	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0002	Kursi Lipat	Chitoose / Diamond Chair	-	Besi Chrom/Merah	BOS/JKN	2023	2	800.000,00

Lampiran 41

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin				Barang	Peralatan dan Mesin
		18	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0003	Kursi Lipat	-	-	-besi/busa/biru	Pembelian	2023	3	2.550.000,00
		19	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0006	Kursi Lipat	-	-	-Kayu/tiner	Pembelian	2023	6	2.100.000,00
		20	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0006	Kursi Lipat	-	-	-Besi	Pembelian	2023	6	2.100.000,00
		21	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0008	Kursi Lipat	-	-	-Besi /busa	Pembelian	2023	8	2.800.000,00
		22	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0002	Meubeleur lainnya	Pintu Tunggal	-	kayu/Hijau	BOS/JKN	2023	2	1.500.000,00
		23	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0010	Meubeleur lainnya	-	-	Kayu / Kuning	BOS/JKN	2023	10	2.750.000,00
		24	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0012	Meubeleur lainnya	Napolly	-	Plastik/Hijau	BOS/JKN	2023	12	2.597.400,00
		25	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0018	Meubeleur lainnya	-	-	-	Pembelian	2023	18	7.200.000,00
		26	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0102	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/Coklat	Pembelian	2023	102	40.800.000,00
		27	1.3.2.05.002.004.006	0001 s/d 0002	Kipas Angin	Miyako KAS - 1607	-	Plastik/Putih	BOS/JKN	2023	2	1.400.000,00
		28	1.3.2.05.002.005.026	1	Alat Dapur lainnya	-	-	Besi/orage	BOS/JKN	2023	1	452.400,00
		29	1.3.2.05.002.006.059	0001 s/d 0010	Gordyin/Kray	Gorden	-	Kain/Coksu	BOS/JKN	2023	10	4.999.995,00
		30	1.3.2.05.002.006.059	0001 s/d 0030	Gordyin/Kray	-	-	Kain / Pink Cream	BOS/JKN	2023	30	1.648.350,00
		31	1.3.2.05.002.006.077	0001 s/d 0015	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	Kain / Pink Cream	BOS/JKN	2023	15	2.997.000,00
		32	1.3.2.06.001.001.036	1	Microphone/Wireless MIC	Sony	-	Plastik/Hitam	BOS/JKN	2023	1	500.000,00
		33	1.3.2.06.001.001.096	2	peralatan studio audio lainnya (dst)	-	-	Besi/Hitam	BOS/JKN	2023	1	750.000,00
		34	1.3.2.06.002.001.022	0001 s/d 0002	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	-	-	plastik/besi/hitam	BOS/JKN	2023	2	1.800.000,00
		35	1.3.2.10.002.003.018	18	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	-	-Fiber/putih	Pembelian	2023	1	522.222,00
		36	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0049	Kursi Kayu	-	-	-Kayu/kuning	Pembelian	2023	49	35.900.000,00
		37	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0010	Meja Sekolah	Meja Siswa / KAYU	-	Kayu/Kuning	BOS/JKN	2023	10	3.500.000,00
		38	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0033	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/kuning	Pembelian	2023	33	26.400.000,00
		39	1.3.2.05.002.001.033	0001 s/d 0010	Kursi Biasa	Kursi siswa	-	maron	BOS/JKN	2023	10	2.500.000,00
		40	1.3.2.05.002.001.036	1	Kursi Lipat	Chitose	-	-Besi Busa/Hitam	Pembelian	2023	1	770.700,00
		41	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0020	Kursi Lipat	-	-	-besi/busa/hitam	Pembelian	2023	20	16.000.000,00
		42	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0006	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/Coklat muda	Pembelian	2023	6	4.200.000,00
		43	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0010	Meubeleur lainnya	-	-	-Besi/busa	Pembelian	2023	10	8.000.000,00
		44	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0010	Meubeleur lainnya	-	-	- Besi/busa/Merah	Pembelian	2023	10	7.708.000,00
		45	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0060	Meubeleur lainnya	-	-	Kayu/Coklat muda	Pembelian	2023	60	42.000.000,00
		46	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0066	Meubeleur lainnya	-	-	- Kayu/Milamin/put ih	Pembelian	2023	66	52.140.000,00
		47	1.3.2.05.002.004.006	0001 s/d 0002	Kipas Angin	Kenix	-	Besi/Plastik	BOS/JKN	2023	2	1.100.000,00

Lampiran 41

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin				Barang	Peralatan dan Mesin
		48	1.3.2.05.002.004.006	2	Kipas Angin	Miyako / KAW-1662	PC0005..01.01.HE	Plastik/hijau	BOS/JKN	2023	1	520.000,00
		49	1.3.2.05.002.005.002	1	Kompor Gas (Alat Dapur)	Progas	PF45N73T	HItam	BOS/JKN	2023	1	500.000,00
		50	1.3.2.05.002.005.009	1	Tabung Gas	Brightgas	-	Pink/BESI	BOS/JKN	2023	1	420.000,00
		51	1.3.2.05.002.006.077	1	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	-besi/merah muda	BOS/JKN	2023	1	300.000,00
		52	1.3.2.05.002.006.077	2	Alat Rumah Tangga Lain-lain	He-522C	-	Seng/Hitam	BOS/JKN	2023	1	500.000,00
		53	1.3.2.06.001.001.036	1	Microphone/Wireless MIC	KISEKI	-	Plastik	BOS/JKN	2023	1	500.000,00
		54	1.3.2.06.001.001.096	2	peralatan studio audio lainnya (dst)	Letavo	-	plastik/besi	BOS/JKN	2023	1	500.000,00
		55	1.3.2.10.002.003.017	1	External/ Portable Hardisk	EXPANSION	-	Plastik	BOS/JKN	2023	1	1.242.000,00
		56	1.3.2.10.002.003.018	18	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	-	-Fiber/Puith	Pembelian	2023	1	522.222,00
		57	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0030	Kursi Besi/Metal	-	-	- Besi/busa/Merah	Pembelian	2023	30	23.124.000,00
		58	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0011	Kursi Kayu	-	-	-Kayu/Pernis	Pembelian	2023	11	7.700.000,00
		59	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0011	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/Pernis	Pembelian	2023	11	8.800.000,00
		60	1.3.2.05.002.001.024	0001 s/d 0006	Meja 1/2 Biro	-	-	KAYU	BOS/JKN	2023	6	5.550.000,00
		61	1.3.2.05.002.001.029	0001 s/d 0006	Kursi Fiber Glas/Plastik	Olymplast	-	Plastik / Merah	BOS/JKN	2023	6	2.000.000,00
		62	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0002	Kursi Lipat	-	-	-Busa/Besi	Pembelian	2023	2	1.541.600,00
		63	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0003	Kursi Lipat	-	-	-Besi/busa	Pembelian	2023	3	2.310.600,00
		64	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0006	Kursi Lipat	Chitose	-	-Besi/busa	Pembelian	2023	6	4.620.000,00
		65	1.3.2.05.002.001.036	9	Kursi Lipat	-	-	-Besi/Busa/Hitam	Pembelian	2023	1	770.000,00
		66	1.3.2.05.002.001.039	0001 s/d 0011	Meja Komputer	-	-	-Kayu/merah	Pembelian	2023	11	3.300.000,00
		67	1.3.2.05.002.001.050	6	Meubeleur lainnya	-	-	-besi/kain	Pembelian	2023	1	870.000,00
		68	1.3.2.05.002.004.006	0001 s/d 0004	Kipas Angin	SEKAI	-	Besi	BOS/JKN	2023	4	3.400.000,00
		69	1.3.2.05.002.006.059	0001 s/d 0010	Gordyin/Kray	-	-	Kain / Kuning	BOS/JKN	2023	10	2.300.000,00
		70	1.3.2.05.002.006.077	0001 s/d 0023	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	KAIN	BOS/JKN	2023	23	1.300.000,00
		71	1.3.2.10.002.003.018	18	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	-	-Fiber/Putih	Pembelian	2023	1	522.222,00
		72	1.3.2.05.001.005.088	5	Alat Kantor Lainnya	Advan / Orbit Star A1	AA1000000TZ0142204	Plastik	BOS/JKN	2023	1	1.230.000,00
		73	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0055	Kursi Kayu	-	-	-Kayu/Kuning	Pembelian	2023	55	38.500.000,00
		74	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0055	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/Kuning	Pembelian	2023	55	44.000.000,00
		75	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0069	Meja Sekolah	-	-	-	Pembelian	2023	69	34.500.000,00
		76	1.3.2.05.002.001.034	0001 s/d 0069	Bangku Sekolah	-	-	-	Pembelian	2023	69	20.700.000,00
		77	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0003	Kursi Lipat	-	-	-besi/busa/hitam	Pembelian	2023	3	2.400.000,00
		78	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0006	Kursi Lipat	CHITOS	-	-	Pembelian	2023	6	2.100.000,00
		79	1.3.2.05.002.001.050	1	Meubeleur lainnya	-	-	KAYU/KACA/COKLAT	BOS/JKN	2023	1	350.000,00

Lampiran 41

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin				Barang	Peralatan dan Mesin
		80	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0006	Meubeleur lainnya	-	-	KAYU/MILAMIN	BOS/JKN	2023	6	2.100.000,00
		81	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0010	Kursi Besi/Metal	-	-	- Besi/busa/Merah	Pembelian	2023	10	7.708.000,00
		82	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0002	Kursi Kayu	Kursi Kayu Busa	-	Kayu Busa	BOS/JKN	2023	2	1.200.000,00
		83	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0011	Kursi Kayu	Meja Siswa	-	Kayu	BOS/JKN	2023	11	3.300.000,00
		84	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0011	Kursi Kayu	-	-	-Kayu/Pernis	Pembelian	2023	11	7.700.000,00
		85	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0011	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/Pernis	Pembelian	2023	11	8.800.000,00
		86	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0033	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/Kuning	Pembelian	2023	33	16.500.000,00
		87	1.3.2.05.002.001.034	0001 s/d 0033	Bangku Sekolah	-	-	-Kayu/Kuning	Pembelian	2023	33	9.900.000,00
		88	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0005	Kursi Lipat	-	-	-Besi/busa/Hitam	Pembelian	2023	5	3.852.200,00
		89	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0006	Kursi Lipat	-	-	-Besi	Pembelian	2023	6	2.100.000,00
		90	1.3.2.05.002.001.036	3	Kursi Lipat	-	-	-Besi/buas	Pembelian	2023	1	770.000,00
		91	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0008	Meubeleur lainnya	-	-	Besi busa/Merah	Pembelian	2023	8	6.166.400,00
		92	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0011	Meubeleur lainnya	-	-	-kayu/merah	Pembelian	2023	11	3.300.000,00
		93	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0012	Meubeleur lainnya	-	-	-Besi busa/Merah	Pembelian	2023	12	9.249.600,00
		94	1.3.2.05.002.001.050	28	Meubeleur lainnya	-	-	-besi/kain	Pembelian	2023	1	870.000,00
		95	1.3.2.10.002.003.018	0001 s/d 0002	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	-	-Fiber/Putih	Pembelian	2023	2	1.044.444,00
		96	1.3.2.10.002.004.004	1	Modem	Modem B312	-	plastik	BOS/JKN	2023	1	935.000,00
		97	1.3.2.10.002.004.033	1	Peralatan Jaringan lainnya	RB Mikrotik	-	plastik	BOS/JKN	2023	1	1.405.000,00
		98	1.3.2.10.002.004.033	2	Peralatan Jaringan lainnya	-	-	plastik	BOS/JKN	2023	1	385.000,00
		99	1.3.2.05.001.005.088	2	Alat Kantor Lainnya	SUOER With Buzzer SAA-1000na	-	Elektronika Aluminium/Hijau	BOS/JKN	2023	1	999.000,00
		100	1.3.2.05.001.005.088	4	Alat Kantor Lainnya	Bola Dunia/ GLOBE	-	Fiber dan Besi/biru dan hitam	BOS/JKN	2023	1	1.200.000,00
		101	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0010	Kursi Besi/Metal	-	-	- Besi/busa/merah	Pembelian	2023	10	7.708.000,00
		102	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0010	Kursi Besi/Metal	-	-	- Besu/Busa/Merah	Pembelian	2023	10	7.708.000,00
		103	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0012	Kursi Kayu	-	-	kayu /coklat	BOS/JKN	2023	12	3.600.000,00
		104	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0049	Kursi Kayu	-	-	-kayu/Kuning	Pembelian	2023	49	34.300.000,00
		105	1.3.2.05.002.001.004	19	Kursi Kayu	-	-	-	Pembelian	2023	1	700.000,00
		106	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0012	Meja Sekolah	-	-	kayu /coklat	BOS/JKN	2023	12	4.200.000,00
		107	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0050	Meja Sekolah	-	-	-kayu/kuning	Pembelian	2023	50	40.000.000,00
		108	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0004	Kursi Lipat	-	-	-Besi/Busa/hitam	Pembelian	2023	4	3.111.200,00

Lampiran 41

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin				Barang	Peralatan dan Mesin
		109	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0010	Kursi Lipat	-	-	-besi/busa	Pembelian	2023	10	7.708.000,00
		110	1.3.2.05.002.001.036	2	Kursi Lipat	-	-	-Besi/busa	Pembelian	2023	1	770.000,00
		111	1.3.2.05.002.001.036	3	Kursi Lipat	-	-	-besi/busa/silver	Pembelian	2023	1	800.000,00
		112	1.3.2.05.002.001.036	3	Kursi Lipat	-	-	- besi/busa	Pembelian	2023	1	770.000,00
		113	1.3.2.05.002.001.036	6	Kursi Lipat	-	-	-Basi/Busa/hitam	Pembelian	2023	1	770.000,00
		114	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0006	Meubeleur lainnya	-	-	-Besi/busa	Pembelian	2023	6	4.620.000,00
		115	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0010	Meubeleur lainnya	-	-	-kayu/merah	Pembelian	2023	10	3.000.000,00
		116	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0020	Meubeleur lainnya	-	-	-besi/busa/merah	Pembelian	2023	20	15.416.000,00
		117	1.3.2.05.002.001.050	3	Meubeleur lainnya	-	-	-Basi/kain	Pembelian	2023	1	870.000,00
		118	1.3.2.10.002.003.018	0001 s/d 0002	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	-	-Fiber/puith	Pembelian	2023	2	1.044.444,00
		119	1.3.2.10.002.004.033	1	Peralatan Jaringan lainnya	Smartcom	-	Fiber / Putih	BOS/JKN	2023	1	1.282.000,00
		120	1.3.2.05.001.005.088	0001 s/d 0002	Alat Kantor Lainnya	HUAWEI	-	Plastik/Aluminium/Putih	BOS/JKN	2023	2	2.400.000,00
		121	1.3.2.05.001.005.088	0001 s/d 0002	Alat Kantor Lainnya	HUAWEI	-	Plastik/Aluminium/Putih	BOS/JKN	2023	2	1.600.000,00
		122	1.3.2.05.001.005.088	0001 s/d 0003	Alat Kantor Lainnya	-	Guofengtai/GF-Z99Y	Plastik	BOS/JKN	2023	3	2.700.000,00
		123	1.3.2.05.001.005.088	5	Alat Kantor Lainnya	YUASA / aki 32 Ah	-	Plastik/Aluminium/Merah Putih	BOS/JKN	2023	1	800.000,00
		124	1.3.2.05.001.005.088	8	Alat Kantor Lainnya	MATSUNAGA	-	Plastik/Aluminium/Merah	BOS/JKN	2023	1	700.000,00
		125	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0030	Kursi Besi/Metal	-	-	- Besi/busa/merah	Pembelian	2023	30	23.119.000,00
		126	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0101	Kursi Kayu	-	-	-Kayu/kuning	Pembelian	2023	101	70.700.000,00
		127	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0101	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/Kuning	Pembelian	2023	101	80.800.000,00
		128	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0003	Kursi Lipat	-	-	-Busa/Besi	Pembelian	2023	3	2.312.100,00
		129	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0008	Kursi Lipat	-	-	-Besi/busa	Pembelian	2023	8	6.165.800,00
		130	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0013	Kursi Lipat	-	-	-Besi/busa/hitam	Pembelian	2023	13	9.122.200,00
		131	1.3.2.05.002.001.036	2	Kursi Lipat	-	-	-Besi /Busa/hitam	Pembelian	2023	1	770.000,00
		132	1.3.2.05.002.001.036	3	Kursi Lipat	-	-	-Besi busa/hitam	Pembelian	2023	1	770.000,00
		133	1.3.2.05.002.001.036	3	Kursi Lipat	-	-	-Basi/busa/hitam	Pembelian	2023	1	770.000,00
		134	1.3.2.05.002.001.050	1	Meubeleur lainnya	-	-	- Besi/busa/Merah	Pembelian	2023	1	770.800,00
		135	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0003	Meubeleur lainnya	-	-	- Besi/busah/Merah	Pembelian	2023	3	2.312.400,00
		136	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0005	Meubeleur lainnya	-	-	-Besi busa/Biru	Pembelian	2023	5	3.850.000,00
		137	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0006	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/Biru/Putih	Pembelian	2023	6	4.624.800,00
		138	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0017	Meubeleur lainnya	-	-	-Besi /busa	Pembelian	2023	17	13.103.600,00
		139	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0019	Meubeleur lainnya	-	-	-	Pembelian	2023	19	14.645.200,00

Lampiran 41

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin				Barang	Peralatan dan Mesin
		140	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0082	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/Pernis	Pembelian	2023	82	62.099.200,00
		141	1.3.2.05.002.001.050	3	Meubeleur lainnya	-	-	-Basi /Busa	Pembelian	2023	1	770.800,00
		142	1.3.2.05.002.001.050	3	Meubeleur lainnya	-	-	-Basi/busa	Pembelian	2023	1	770.800,00
		143	1.3.2.05.002.001.050	5	Meubeleur lainnya	-	-	-Busa/besi	Pembelian	2023	1	770.800,00
		144	1.3.2.05.002.001.050	7	Meubeleur lainnya	-	-	-Busa/Basi	Pembelian	2023	1	770.800,00
		145	1.3.2.05.002.001.050	28	Meubeleur lainnya	-	-	-besi/kain	Pembelian	2023	1	870.000,00
		146	1.3.2.05.002.001.050	30	Meubeleur lainnya	-	-	-BBesi busa/Biru	Pembelian	2023	1	770.000,00
		147	1.3.2.05.002.001.050	31	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/ Pernis	Pembelian	2023	1	700.000,00
		148	1.3.2.10.002.003.018	18	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	-	-Fiber/Puith	Pembelian	2023	1	522.222,00
		149	1.3.2.10.002.003.018	18	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	-	-Fiber/Putih	Pembelian	2023	1	522.222,00
		150	1.3.2.10.002.004.004	1	Modem	-	-	PLastik	BOS/JKN	2023	1	1.498.500,00
		151	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0004	Kursi Lipat	-	-	besi/busa	Pembelian	2023	4	3.080.000,00
		152	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0006	Kursi Lipat	-	-	-Besi/busa/biru	Pembelian	2023	6	2.100.000,00
		153	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0007	Kursi Lipat	-	-	-Besi/busa	Pembelian	2023	7	5.510.000,00
		154	1.3.2.05.002.001.036	36	Kursi Lipat	-	-	-Besi/Busa/Hitam	Pembelian	2023	1	770.000,00
		155	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0002	Meubeleur lainnya	-	-	-	Pembelian	2023	2	1.500.000,00
		156	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0005	Meubeleur lainnya	-	-	KAYU DAN TRIPLEKS KAIN BALIHO	BOS/JKN	2023	5	1.998.000,00
		157	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0010	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/Merah	Pembelian	2023	10	3.000.000,00
		158	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0011	Meubeleur lainnya	-	-	-Besi/busa	Pembelian	2023	11	8.478.400,00
		159	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0066	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/kuning	Pembelian	2023	66	26.400.000,00
		160	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0099	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/Coklat muda	Pembelian	2023	99	74.300.000,00
		161	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0100	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/Coklta muda	Pembelian	2023	100	75.000.000,00
		162	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0145	Meubeleur lainnya	-	-	-kayu/pernis	Pembelian	2023	145	108.700.000,00
		163	1.3.2.10.002.003.018	1	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	-	Plastik	BOS/JKN	2023	1	999.000,00
		164	1.3.2.10.002.003.018	18	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	-	-Fiber/putih	Pembelian	2023	1	522.222,00
		165	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0020	Kursi Besi/Metal	SEMAS	-	-Besi/busa/Biru	Pembelian	2023	20	15.416.000,00
		166	1.3.2.05.002.001.004	1	Kursi Kayu	-	-	Kayu/Pernis	Pembelian	2023	1	700.000,00
		167	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0075	Kursi Kayu	-	-	-Kayu/Pernis	Pembelian	2023	75	52.500.000,00
		168	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0088	Kursi Kayu	-	-	-kayu/kuning	Pembelian	2023	88	61.600.000,00
		169	1.3.2.05.002.001.004	19	Kursi Kayu	-	-	-	Pembelian	2023	1	700.000,00
		170	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0089	Meja Sekolah	-	-	-kayu/kuning	Pembelian	2023	89	71.200.000,00
		171	1.3.2.05.002.001.036	1	Kursi Lipat	-	-	-Basi /busa/hitam	Pembelian	2023	1	770.000,00
		172	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0006	Kursi Lipat	-	-	-Besi/Busa/Hitam	Pembelian	2023	6	4.741.400,00
		173	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0007	Kursi Lipat	-	-	-Besi/busa	Pembelian	2023	7	5.570.000,00

Lampiran 41

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin				Barang	Peralatan dan Mesin
		174	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0010	Kursi Lipat	Vinyl	-	Besi /Busa	BOS/JKN	2023	10	5.000.000,00
		175	1.3.2.05.002.001.036	3	Kursi Lipat	-	-	-Basi/Busa/hitam	Pembelian	2023	1	770.000,00
		176	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0005	Meubeleur lainnya	-	-	Kayu/Kuning	BOS/JKN	2023	5	1.500.000,00
		177	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0005	Meubeleur lainnya	-	-	Kayu/Kuning	BOS/JKN	2023	5	2.000.000,00
		178	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0010	Meubeleur lainnya	-	-	Kayu	BOS/JKN	2023	10	3.000.000,00
		179	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0010	Meubeleur lainnya	-	-	Kayu	BOS/JKN	2023	10	5.000.000,00
		180	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0100	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/Coklat Muda	Pembelian	2023	100	75.000.000,00
		181	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0113	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/Pernis	Pembelian	2023	113	80.316.000,00
		182	1.3.2.05.002.001.050	5	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/merah	Pembelian	2023	1	800.000,00
		183	1.3.2.05.002.001.050	6	Meubeleur lainnya	-	-	-Basi/Kain	Pembelian	2023	1	870.000,00
		184	1.3.2.05.002.001.050	7	Meubeleur lainnya	-	-	'Melamin/Putih	BOS/JKN	2023	1	700.000,00
		185	1.3.2.05.002.001.050	9	Meubeleur lainnya	-	-	-	Pembelian	2023	1	800.000,00
		186	1.3.2.05.002.001.050	33	Meubeleur lainnya	-	-	-besi/kain	Pembelian	2023	1	870.000,00
		187	1.3.2.05.002.001.050	78	Meubeleur lainnya	-	-	-Kayu/Hitam	Pembelian	2023	1	300.000,00
		188	1.3.2.05.002.006.059	0001 s/d 0030	Gordyin/Kray	-	-	Kain	BOS/JKN	2023	30	2.250.000,00
		189	1.3.2.05.002.006.077	0001 s/d 0030	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	Besi	BOS/JKN	2023	30	1.050.000,00
		190	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0010	Kursi Kayu	-	-	Kayu/Hijau	BOS/JKN	2023	10	1.598.400,00
		191	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0010	Meja Sekolah	-	-	Kayu/Hijau	BOS/JKN	2023	10	2.099.565,00
		192	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0031	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/Kuning	Pembelian	2023	31	15.500.000,00
		193	1.3.2.05.002.001.023	2	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/ kuning	Pembelian	2023	1	500.000,00
		194	1.3.2.05.002.001.023	6	Meja Sekolah	-	-	Kayu/Kuning	Pembelian	2023	1	500.000,00
		195	1.3.2.05.002.001.029	0001 s/d 0025	Kursi Fiber Glas/Plastik	Olymplas	OL203	Plastik/Coklat	BOS/JKN	2023	25	3.375.000,00
		196	1.3.2.05.002.001.029	0001 s/d 0050	Kursi Fiber Glas/Plastik	Olymplast	-	Plastik/Cokelat	BOS/JKN	2023	50	8.749.575,00
		197	1.3.2.05.002.001.034	0001 s/d 0032	Bangku Sekolah	-	-	-Kayu/Kuning	Pembelian	2023	32	9.600.000,00
		198	1.3.2.05.002.001.034	16	Bangku Sekolah	-	-	-Kayu/ Kuning	Pembelian	2023	1	300.000,00
		199	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0006	Kursi Lipat	chitoss	-	-Besi	Pembelian	2023	6	2.100.000,00
		200	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0008	Kursi Lipat	CHITOS	-	BESI / BUSA / HITAM	BOS/JKN	2023	8	4.000.000,00
		201	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0002	Meubeleur lainnya	Papan Data	-	Kayu/putih	BOS/JKN	2023	2	1.200.000,00
		202	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0005	Meubeleur lainnya	-	-	Kayu	BOS/JKN	2023	5	2.608.000,00
		203	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0006	Meubeleur lainnya	Nappoly/Napolly BIG 211	-	Plastik/Merah	BOS/JKN	2023	6	899.766,00
		204	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0010	Meubeleur lainnya	-	-	KayuCoklat/	BOS/JKN	2023	10	4.500.000,00
		205	1.3.2.10.002.003.017	1	External/ Portable Hardisk	DA DRIVE	N8YM09A00A01657	Plastik/Black	BOS/JKN	2023	1	850.000,00

Lampiran 41

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG						JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	Barang	Peralatan dan Mesin
		206	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0002	Kursi Besi/Metal	chitos	-	-besi/busa	Pembelian	2023	2	700.000,00
		207	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0006	Kursi Besi/Metal	-	-	-Kayu/kuning	Pembelian	2023	6	2.100.000,00
		208	1.3.2.05.002.001.003	2	Kursi Besi/Metal	chitos	-	-besi	Pembelian	2023	1	350.000,00
		209	1.3.2.05.002.001.004	0001 s/d 0033	Kursi Kayu	-	-	-Kayu/kuning	Pembelian	2023	33	9.900.000,00
		210	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0002	Meja Sekolah	-	-60x55x68	-kayu	Pembelian	2023	2	1.000.000,00
		211	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0032	Meja Sekolah	-	-	-Kayu/tiner	Pembelian	2023	32	16.000.000,00
		212	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0050	Meja Sekolah	MEJA KAYU	-	KAYU	BOS/JKN	2023	50	20.250.000,00
		213	1.3.2.05.002.001.023	0001 s/d 0066	Meja Sekolah	-	-	-kayu	Pembelian	2023	66	33.000.000,00
		214	1.3.2.05.002.001.023	27	Meja Sekolah	60X55X68	-	-Kayu/tiner	Pembelian	2023	1	500.000,00
		215	1.3.2.05.002.001.023	63	Meja Sekolah	60x55x68	-	-kayu	Pembelian	2023	1	500.000,00
		216	1.3.2.05.002.001.034	0001 s/d 0065	Bangku Sekolah	-	-	-kayu	Pembelian	2023	65	19.500.000,00
		217	1.3.2.05.002.001.034	9	Bangku Sekolah	-	-	-	Pembelian	2023	1	300.000,00
		218	1.3.2.05.002.001.034	31	Bangku Sekolah	41x44x80	-	-kayu	Pembelian	2023	1	300.000,00
		219	1.3.2.05.002.001.034	56	Bangku Sekolah	-	-	-kayi	Pembelian	2023	1	300.000,00
		220	1.3.2.05.002.001.034	57	Bangku Sekolah	-	-41x44x80	-kayu	Pembelian	2023	1	300.000,00
		221	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0002	Kursi Lipat	-	-	-besi/busa/merah	Pembelian	2023	2	1.541.400,00
		222	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0008	Kursi Lipat	-	-	-Besi/busa	Pembelian	2023	8	6.166.400,00
		223	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0010	Kursi Lipat	CHITOSE	-	BESI/BUSA	BOS/JKN	2023	10	4.500.000,00
		224	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0019	Meubeleur lainnya	-	-	-besi/busa/merah	Pembelian	2023	19	14.645.200,00
		225	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0050	Meubeleur lainnya	NAPOLLY	-	PLASTIK/TEBAL	BOS/JKN	2023	50	8.250.000,00
		226	1.3.2.05.002.001.050	0001 s/d 0075	Meubeleur lainnya	Napoly/Plastik	-	Palstik/Coklat	BOS/JKN	2023	75	16.650.000,00
		227	1.3.2.05.002.001.050	7	Meubeleur lainnya	-	-	-besi/busa	Pembelian	2023	1	770.800,00
		228	1.3.2.05.002.006.077	0001 s/d 0005	Alat Rumah Tangga Lain-lain	WESTAFEL ALUMUNIUM	-	Alminium/Silver	BOS/JKN	2023	5	2.473.080,00
		229	1.3.2.10.002.005.001	2	Peralatan Komputer lainnya	Matsunaga/SVC 3000NA	-	Putih merah/Besi	BOS/JKN	2023	1	800.865,00
		230	1.3.2.05.002.001.003	0001 s/d 0020	Kursi Besi/Metal	-	-	-Besi/busa/Biru	Pembelian	2023	20	15.416.000,00
		231	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0002	Kursi Lipat	-	-	-Besi/Busa/Hitam	Pembelian	2023	2	1.541.600,00
		232	1.3.2.05.002.001.036	0001 s/d 0008	Kursi Lipat	-	-	-Besi/busa	Pembelian	2023	8	6.166.200,00
		233	1.3.2.05.002.001.036	3	Kursi Lipat	-	-	-Basi/busa/hitam	Pembelian	2023	1	770.000,00
		234	1.3.2.05.002.001.050	64	Meubeleur lainnya	-	-	-Basi/Kain	Pembelian	2023	1	870.000,00
		235	1.3.2.05.002.006.077	1	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	Kain	BOS/JKN	2023	1	200.000,00
JUMLAH											**3.986**	**2.303.155.116,00**
TOTAL EKSTRAKOMPATABEL TAHUN 2023											**5.159**	**3.035.222.926,00**

Lampiran 42

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	MUTASI	JENIS	NAMA OPD	NAMA ASET 1	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.010.017	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	9.000.000,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	85.000.000,00
3	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15.000.000,00
4	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	19.975.200,00
5	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.006.039	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa atas lainnya (dst)	68.715.328,00
6	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.006.039	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa atas lainnya (dst)	3.060.760,00
7	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.006.039	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa atas lainnya (dst)	68.715.328,00
8	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.006.039	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa atas lainnya (dst)	3.060.760,00
9	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	3.000.000,00
10	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2.500.000,00
11	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.05.002.006.005	Amplifier	2.500.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN ATAS HIBAH KE SMA/SMK PROVINSI SULAWESI TENGAH, SK NO. 160						**280.527.376,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2.490.000,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.001.020.018	alat laboratorium fisika lainnya (dst)	5.720.000,00
3	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.001.048.014	alat laboratorium biologi lainnya (dst)	3.190.000,00
4	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.001.048.014	alat laboratorium biologi lainnya (dst)	2.286.950,00
5	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	7.915.600,00
6	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	5.167.800,00
7	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	5.227.200,00
8	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	8.954.000,00
9	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	6.625.032,00
10	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.001.001	Mainframe (Komputer Jaringan)	49.538.947,00
11	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
12	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
13	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
14	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
15	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
16	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
17	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
18	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
19	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
20	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
21	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
22	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
23	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
24	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
25	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00

Lampiran 42

NO	MUTASI	JENIS	NAMA OPD	NAMA ASET 1	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
26	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
27	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
28	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
29	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
30	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
31	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
32	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	10.105.650,00
33	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.020.712,00
34	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	5.665.035,00
35	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	19.949.566,00
36	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.010.017	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	19.800.000,00
37	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.010.017	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	16.000.000,00
38	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.010.017	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	5.000.000,00
39	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.010.017	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	4.000.000,00
40	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.010.017	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	5.800.000,00
41	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.010.017	alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian lainnya (dst)	2.350.000,00
42	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	19.949.566,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN ATAS HIBAH KE SEKOLAH SWASTA, SK NO. 409						**419.974.708,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Bagian Umum	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	664.500.000,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Sekretariat DPRD	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	267.700.000,00
3	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Sekretariat DPRD	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	465.250.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN ATAS PENJUALAN LANGSUNG KENDARAAN DINAS MANTAN PEJABAT, SK NO. 515						**1.397.450.000,00**
	JUMLAH TOTAL PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN						**2.097.952.084,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	525.000.000,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	221.027.400,00
3	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	201.700.000,00
4	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	168.200.000,00
5	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	168.200.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN ATAS HIBAH KE SMA/SMK PROVINSI SULAWESI TENGAH, SK NO. 160						**1.284.127.400,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Kesehatan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.006.010	Bangunan Klinik/Puskesmas	86.700.000,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Kesehatan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.030.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	199.818.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DI AKIBATKAN KONDISI RUSAK BERAT , SK NO. 241						**286.518.000,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	199.672.650,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	198.000.000,00
3	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	114.332.750,00
4	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	349.650.000,00
5	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	135.000.000,00
6	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	116.468.566,00
7	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	486.500.000,00
8	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	233.420.611,00
9	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	214.515.050,00

Lampiran 42

NO	MUTASI	JENIS	NAMA OPD	NAMA ASET 1	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
10	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	99.680.100,00
11	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	103.250.612,00
12	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	452.248.675,00
13	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	250.000.000,00
14	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	280.000.000,00
15	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.002.002.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	272.000.000,00
16	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	217.630.126,00
17	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	172.849.000,00
18	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.04.001.004.001	Pagar Permanen	96.200.625,00
19	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	94.080.850,00
20	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	183.054.792,00
21	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	143.025.650,00
22	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	195.000.000,00
23	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	90.577.000,00
24	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	243.121.450,00
25	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	306.463.344,00
26	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	309.668.725,00
27	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	139.600.000,00
28	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	213.420.610,00
29	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	183.054.792,00
30	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.002.002.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	120.000.000,00
31	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	102.919.612,00
32	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	292.620.450,00
33	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	208.500.000,00
34	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	125.279.000,00
35	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	289.392.975,00
36	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	320.328.490,00
37	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	119.027.810,00
38	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	227.049.555,00
39	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	183.054.792,00
40	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	217.800.000,00
41	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	259.019.152,00
42	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	307.066.625,00
43	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	339.707.000,00
44	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	196.756.350,00
45	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.002.002.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	136.000.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN HIBAH KE SEKOLAH SWASTA , SK NO. 409						**9.537.007.789,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Kesehatan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.006.010	Bangunan Klinik/Puskesmas	184.670.500,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Kesehatan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.006.010	Bangunan Klinik/Puskesmas	120.239.500,00
3	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Perhubungan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.018.002	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	51.172.277,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DI AKIBATKAN KONDISI RUSAK BERAT , SK NO. 478						**356.082.277,00**

Lampiran 42

NO	MUTASI	JENIS	NAMA OPD	NAMA ASET 1	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH TOTAL PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN						**11.463.735.466,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Perikanan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	132.140.180,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP KOSTRUKSI DALAM PENGERJAAN DI AKIBATKAN KONDISI RUSAK BERAT , SK NO. 478						**132.140.180,00**
	JUMLAH TOTAL PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP KOSTRUKSI DALAM PENGERJAAN						**132.140.180,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ASET TETAP LAINNYA	1.3.5.02.001.001.001	Alat Musik Tradisional/Daerah	25.075.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP LAINNYA (ATL) ATAS HIBAH KE SMA/SMK PROVINSI SULAWESI TENGAH, SK NO. 160						**25.075.000,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ASET TETAP LAINNYA	1.3.5.02.001.001.001	Alat Musik Tradisional/Daerah	7.680.000,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ASET TETAP LAINNYA	1.3.5.01.001.001.006	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	7.619.120,00
3	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ASET TETAP LAINNYA	1.3.5.01.001.001.012	Buku Umum Lain-lain	45.500.000,00
4	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ASET TETAP LAINNYA	1.3.5.01.001.001.003	Ilmu Pengetahuan Umum	45.500.000,00
5	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET TETAP**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ASET TETAP LAINNYA	1.3.5.01.001.001.012	Buku Umum Lain-lain	45.500.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP LAINNYA (ATL) ATAS HIBAH KE SEKOLAH SWASTA, SK NO. 409						**151.799.120,00**
	JUMLAH TOTAL PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP LAINNYA (ATL)						**176.874.120,00**
	JUMLAH TOTAL PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP						**13.870.701.850,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TANAH	1.3.1.01.001.004.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	288.000.000,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TANAH	1.3.1.01.001.004.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	30.000.000,00
3	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TANAH	1.3.1.01.001.004.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	200.000.000,00
4	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TANAH	1.3.1.01.001.004.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	49.906.000,00
5	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TANAH	1.3.1.01.001.004.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	400.000.000,00
6	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TANAH	1.3.1.01.001.004.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	10.000.000,00
7	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TANAH	1.3.1.01.001.004.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	8.000.000,00
8	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TANAH	1.3.1.01.001.004.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	34.802.000,00
9	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TANAH	1.3.1.01.001.004.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	14.260.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET LAINNYA (ASET PINJAM PAKAI) ATAS HIBAH KE SMA/SMK PROVINSI SULAWESI TENGAH, SK NO. 160						**1.034.968.000,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2.490.000,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	6.760.000,00
3	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	3.380.000,00
4	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.001.020.018	alat laboratorium fisika lainnya (dst)	5.720.000,00
5	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.001.048.014	alat laboratorium biologi lainnya (dst)	11.538.450,00
6	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.001.048.014	alat laboratorium biologi lainnya (dst)	3.190.000,00
7	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.001.048.014	alat laboratorium biologi lainnya (dst)	2.286.950,00
8	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	7.915.600,00
9	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	5.167.800,00
10	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	5.227.200,00
11	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	8.954.000,00
12	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	6.760.000,00
13	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.001.020.018	alat laboratorium fisika lainnya (dst)	5.720.000,00
14	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.001.048.014	alat laboratorium biologi lainnya (dst)	11.538.450,00
15	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.001.048.014	alat laboratorium biologi lainnya (dst)	3.190.000,00
16	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.001.048.014	alat laboratorium biologi lainnya (dst)	2.286.950,00
17	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	7.915.600,00

Lampiran 42

NO	MUTASI	JENIS	NAMA OPD	NAMA ASET 1	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
18	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	5.167.800,00
19	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	5.227.200,00
20	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.005.068	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah lainnya (dst)	8.954.000,00
21	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.007.002	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ips lainnya (dst)	10.000.000,00
22	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.010.001	Gitar Sopanish	5.605.576,00
23	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.010.004	Orgen/Electrone	7.842.966,00
24	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	19.995.572,00
25	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	19.949.566,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET LAINNYA (ASET PINJAM PAKAI) ATAS HIBAH KE SEKOLAH SWASTA, SK NO. 409						**182.783.680,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	500.800.000,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Bagian Umum - Sekretariat Daerah	PERALATAN DAN MESIN	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	443.900.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET LAINNYA (ASET PINJAM PAKAI) ATAS PENJUALAN KENDARAAN DINAS PENSIUNAN PEJABAT, SK. NO. 515						**944.700.000,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	99.900.000,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	723.800.000,00
3	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	126.500.000,00
4	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	134.400.000,00
5	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	99.483.000,00
6	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	221.027.400,00
7	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	243.420.610,00
8	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	290.000.000,00
9	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	240.000.000,00
10	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	227.500.000,00
11	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	99.915.000,00
12	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	214.195.080,00
13	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	525.000.000,00
14	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	166.420.610,00
15	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	134.112.000,00
16	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	79.500.000,00
17	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	89.900.000,00
18	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.002.003.004	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	30.100.000,00
19	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	107.600.000,00
20	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	75.900.000,00
21	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	115.204.610,00
22	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	221.027.400,00
23	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	99.935.000,00
24	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	378.627.348,00
25	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	221.027.400,00
26	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	480.700.000,00
27	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	117.700.000,00
28	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	122.100.000,00
29	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	94.200.000,00

Lampiran 42

NO	MUTASI	JENIS	NAMA OPD	NAMA ASET 1	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
30	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.002.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	94.100.000,00
31	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	144.700.000,00
32	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	178.000.000,00
33	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	178.000.000,00
34	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	232.600.000,00
35	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.005	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	218.185.200,00
36	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	525.000.000,00
37	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	34.100.000,00
38	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	170.600.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET LAINNYA (ASET PINJAM PAKAI) ATAS HIBAH KE SMA/SMK PROVINSI SULAWESI TENGAH, SK NO. 160						**7.554.480.658,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.005.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	290.000.000,00
2	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.010.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	195.000.000,00
3	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.016.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	240.000.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET LAINNYA (ASET PINJAM PAKAI) ATAS HIBAH KE SEKOLAH SWASTA, SK NO. 378						**725.000.000,00**
1	MUTASI KURANG	PENGHAPUSAN **ASET LAINNYA**	Kecamatan Buko	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	396.816.000,00
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET LAINNYA (ASET RUSAK BERAT) ATAS HIBAH KE SEKOLAH SWASTA, SK NO. 378						**396.816.000,00**
	JUMLAH PENGURANGAN/PENGHAPUSAN ASET LAINNYA						**10.838.748.338,00**
	TOTAL PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA						**24.709.450.188,00**

Lampiran 43

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KOREKSI KURANG NILAI PENCATATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit	KETERANGAN
1	**DINAS KESEHATAN**	1.3.3.01.02.0003	Aset Tetap Rmah Negara Golongan III	1,00		Koreksi Kurang Nilai Pencatatat Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Pada Dinas Kesehatan
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		1,00	
2	**KECAMATAN PELING TENGAH**	1.3.3.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	204.147.159,00		Koreksi Kurang Pencatatat Nilai Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Pada Kec. Peling Tengah
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		204.147.159,00	
JUMLAH PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				**204.147.160,00**	**204.147.160,00**	

Lampiran 44

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
HASIL DARI KAPITALISASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	OPD	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
1	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	1.3.3.01.01.0010	Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Pembangunan Wc SDN Luksagu	500.000,00		Koreksi Nilai Ekstracom dari Hasil Kapitalisasi BMD sebagai Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung Bangunan Pada Dinasi Pendidikan dan Kebudayaan
		1.3.3.01.02.0003	Aset Tetap Rmah Negara Golongan III	11.700.000,00		
		1.3.3.01.02.0003	Aset Tetap Rmah Negara Golongan III	17.100.000,00		
		1.3.3.01.02.0003	Aset Tetap Rmah Negara Golongan III	3.900.000,00		
		1.3.3.01.02.0003	Aset Tetap Rmah Negara Golongan III	16.200.000,00		
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		49.400.000,00	
2	**KECAMATAN TINANGKUNG**	1.3.3.01.01.0009	Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.825.000,00		Koreksi Nilai Ekstracom dari Hasil Kapitalisasi BMD sebagai Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung Bangunan Pada Dinasi Kecamatan Tinangkung
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		14.825.000,00	
JUMLAH PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				**64.225.000,00**	**64.225.000,00**	

Lampiran 45

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
HIBAH DARI KEMENTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit
1	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**	1.3.3.01.001.0012	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	865.200.000,00	
		3.1.01.01.01.0001	Koreksi Ekuitas		865.200.000,00
			Penambahan Nilai Gedung Hibah Dari Kementrian		
JUMLAH PENAMBAHAN GEDUNG DARI HIBAH KEMENTRIAN				**865.200.000,00**	**865.200.000,00**

Lampiran 46

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
REKLASIFIKASI AKUN DARI BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit
1	**BAGIAN UMUM**	1.3.3.01.02.0001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2.500.000,00	
		8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural		1.000.000,00
		8.1.02.02.09.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		1.500.000,00
			Reklasifikasi akun Dari Belanja Jasa untuk menambah nilai Aset Tetap Gedung Bangunan		
2	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan**	1.3.4.02.07.0003	Bangunan Pembuangan Air Kotor	5.000.000,00	
		8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (Jasa Pengawasan)		5.000.000,00
			Reklasifikasi akun Dari Belanja Jasa untuk menambah nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan		
3	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	1.3.5.01.01.0001	Buku Umum	83.500.000,00	
		8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		12.500.000,00
		8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli		67.000.000,00
		8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman		4.000.000,00
			Reklasifikasi akun Dari Belanja Jasa untuk menambah nilai Aset Tetap Lainnya		
PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP DARI BELANJA BARANG DAN JASA				**91.000.000,00**	**91.000.000,00**

Lampiran 47

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
REKLASIFIKASI AKUN DARI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	**Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang**	1.3.3.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pembangunan Gedung DISPUPR)	5.636.342.000,00	
		1.3.6.01.01.0001.03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (KDP)		5.636.342.000,00
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Gedung Bangunan		
2	**Dinas Kesehatan**	1.3.3.01.01.0025	Bangunan Lantai Jemur Permanen (Pekerjaan Penataan Halaman Kantor PMI)	199.257.850,00	
		1.3.6.01.01.0001.03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (KDP)		199.257.850,00
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Gedung Bangunan		
3	**Dinas Pertanian**	1.3.3.01.01.0015	*Gedung Pemotogan Hewan Permanen (Pembangunan Tempat Pemotongan Hewan Desa Tobungku)*	77.473.000,00	
		1.3.6.01.01.0001.03	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (KDP)		77.473.000,00
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Gedung Bangunan		
JUMLAH MENAMBAH NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN ATAS REKLASIFIKASI DARI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (MEGURANGI NILAI KDP)				**5.913.072.850,00**	**5.913.072.850,00**
1	**Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang**	1.3.4.01.01.0003	Jalan Kabupaten Arteri (Peningkatan Jalan Ruas Patukuki - Tolulos Kec. Peling Teng	1.651.809.900,00	
		1.3.4.01.01.0003	Jalan Kabupaten Arteri (Rehabilitasi jalan Ruas Salakan - Bakatua)	414.288.000,00	
		1.3.4.01.01.0003	Jalan Kabupaten Arteri (Peningkatan Jalan Ruas : Dalam Kota Salakan)	1.293.542.000,00	
		1.3.4.02.07.0003	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan (embangunan Sistem Dranase Desa Tom	157.690.000,00	
		1.3.6.01.01.0001.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan		3.517.329.900,00
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Jalan Irigasi dan Jaringan		
2	**Dinas Pertanian**	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus Lain-Lain (Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tatabau)	123.997.000,00	
		1.3.6.01.01.0001.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan		123.997.000,00
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Jalan Irigasi dan Jaringan		
JUMLAH MENAMBAH NILAI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN ATAS REKLASIFIKASI DARI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (MENGURANGI NILAI KDP)				**3.641.326.900,00**	**3.641.326.900,00**
JUMLAH TOTAL REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB DARI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)				**9.554.399.750,00**	**9.554.399.750,00**

Lampiran 48

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
HUTANG BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit
1	**DINAS KESEHATAN**	1.3.3.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	11.315.000,00	
		2.1.06.08.01.0006	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja_Bangunan Kesehatan		11.315.000,00
2	**DIKBUD**	1.3.3.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	17.525.350,00	
		2.1.06.08.01.0040	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal_Rumah Negara Gol III		17.525.350,00
				28.840.350,00	**28.840.350,00**

Lampiran 49

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
REKLASIFIKASI AKUN DARI GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit	NO SP2D	TGL SP2D
1	**Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang**	1.3.6.01.01.0001	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.251.059.376,00			
		1.3.3.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor - Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Liang (65,149%)		767.801.376,00	18.02/04.0/000390/LS/ 1.03.0.00.0.00.01.0000 /P.05/12/2023	29 Dec 2023
		1.3.3.01.01.0036	Taman - Pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana taman bermain anak (76,638%)		483.258.000,00	18.02/04.0/000362/LS/ 1.03.0.00.0.00.01.0000 /P.05/12/2023	29 Dec 2023
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)				
2	**Dinas Kesehatan**	1.3.6.01.01.0001	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2.919.471.369,00			
		1.3.3.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi (Pembangunan gedung IFK (DAK FISIK) (Fisik 70,82%))		2.919.471.369,00	18.02/04.0/000354/LS/ 1.02.0.00.0.00.01.0000 /P.04/12/2023	15 Dec 2023
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)				
3	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	1.3.6.01.01.0001	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	4.473.551.006,00			
		1.3.3.01.01.0008	Pembangunan Tempat Wudhu Kawasan Lipu Adino/Imam Sahban (50%)		96.097.000,00	18.02/04.0/000435/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000 /P.03/10/2023	2023-10-31
		1.3.3.01.01.0013	Pembangunan Pos Jaga Lipu Adino/Imam Sahban (50%)		80.247.000,00	18.02/04.0/000438/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000 /P.03/10/2023	2023-10-31
		1.3.3.01.01.0025	Pembangunan GAZEBO Lipu Adino/Imam Sahban (50%)		26.748.000,00	18.02/04.0/000439/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000 /P.03/10/2023	2023-10-31
		1.3.3.04.01.0004	Pembangunan Gerbang Makam Lipu Adino/Imam Sahban (50%)		53.497.000,00	18.02/04.0/000426/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000 /P.03/10/2023	2023-10-30
		1.3.3.04.01.0004	Pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah SDN Apal (80,167%)		120.370.000,00	18.02/04.0/000430/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000 /P.03/10/2023	2023-10-30
		1.3.3.04.01.0004	Pembangunan Pagar Sekolah SDN Paisuluno (75%)		112.612.500,00	18.02/04.0/000429/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000 /P.03/10/2023	2023-10-30
		1.3.3.01.01.0010	Pembangunan Toilet/Jamban Ramah Anak SDN Inpres Lesan (95%)		143.101.092,00	18.02/04.0/000855/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000 /P.05/12/2023	2023-12-29

Lampiran 49

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit	NO SP2D	TGL SP2D
		1.3.3.01.01.0010	Pekerjaan Pemb Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMPN 2 Totsel (91,6%)		411.738.936,00	18.02/04.0/000474/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P.03/11/2023	2023-11-13
		1.3.3.01.01.0010	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Pembina Salakan (95,007 %)		3.429.139.478,00	18.02/04.0/000761/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P.05/12/2023	2023-12-29
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)				
JUMLAH MENAMBAH NILAI ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)				**8.644.081.751,00**	**8.644.081.751,00**		
3	**Dinas Perhubungan**	1.3.4.01.02.0011	Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	223.960.000,00			
		1.3.3.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara (Biaya Belanja Perencanaan Pembangunan Plensengan Fery Desa Bakalan)		10.000.000,00	18.02/04.0/000046/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2023	2023-06-21
		1.3.3.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara (Bel Tgh MC01&MC 02(Fisik 100%) Ats Pekerjaan Pembangunan Plensengan Feri Desa Bakalan)		184.960.000,00	18.02/04.0/000112/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023	2023-12-29
		1.3.3.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara (Biaya Belanja Pengawasan Pembangunan Plensengan Feri Desa Bakalan)		5.000.000,00	18.02/04.0/000113/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2023	2023-12-29
		1.3.3.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara (Bel Perencanaan Pembangunan Plensengan&Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Kapal Fery Leme-Leme Bungin)		24.000.000,00	18.02/04.0/000044/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/P.02/6/2023	2023-06-21
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah NILAI Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ)				
4	**Dinas Kesehatan**	1.3.4.02.04.0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	13.480.000,00			
		1.3.3.01.01.0006	Bangunan Kesehatan (jasa konsultansi pengawasan lanjutan talud pkm salakan)		5.980.000,00	18.02/04.0/000400/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023	22 Dec 2023
		1.3.3.01.01.0025	Bangunan Terbuka (Jasa Konsultansi Perencanaan Lanjutan Talud Puskesmas Salakan)		7.500.000,00	18.02/04.0/000152/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/8/2023	21 Aug 2023
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah NILAI Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ)				
JUMLAH MENAMBAH NILAI ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN (JIJ)				**237.440.000,00**	**237.440.000,00**		
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	293.896.850,00			
		1.3.3.01.01.0002	Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Bangunan Gudang		144.195.850,00		
		1.3.3.04.01.0004	Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Pagar		149.701.000,00		
			Reklasifikasi akun antar Kib menambah Aset Lainnya Atas Sisa Hibah Ke Banggai Laut (Aset Pinjam Pakai)				
JUMLAH MENAMBAH NILAI ASET LAINNYA ATAS SISA HIBAH KE BANGGAI LAUT (ASET PINJAM PAKAI)				**293.896.850,00**	**293.896.850,00**		

Lampiran 49

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit	NO SP2D	TGL SP2D
JUMLAH TOTAL REKLASIFIKASI AKUN ANTAR KIB MENGURANGI ASET GEDUNG DAN BANGUNAN				9.175.418.601,00	9.175.418.601,00		

Lampiran 50

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
HUTANG BELANJA MODAL
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	20.374.500,00	
		1.3.5.01.01.0001	Aset Tetap Aset Tetap Lainnya (ATL) - Buku Umum		20.374.500,00
2	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	4.500.000,00	
		1.3.5.01.01.0007	Aset Tetap Aset Tetap Lainnya (ATL) - Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		4.500.000,00
JUMLAH MENAMBAH NILAI ASET LAINNYA (ASET RUSAK BERAT) ATAS SISA HIBAH KE BANGGAI LAUT				**24.874.500,00**	**24.874.500,00**
JUMLAH TOTAL PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA (ATL)				**24.874.500,00**	**24.874.500,00**

Lampiran 51

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR EKSTRACOM ASET TETAP LAINNYA
T.A 2023

NOMOR		NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	JUMLAH	
Urut	SKPD	Urut	KODE REKENING	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin				Barang	Aset Tetap Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1.3.5.01.001.001.012	0001 s/d 0416	Buku Umum Lain-lain	-	-	-	Pembelian	2023	416	34.236.274,00
		2	1.3.5.01.001.003.001	0001 s/d 0063	Agama Islam	-	-	-	Pembelian	2023	63	4.104.000,00
JUMLAH											**479**	**38.340.274,00**
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1.3.5.01.001.001.003	0001 s/d 0004	Ilmu Pengetahuan Umum	-	-	-	BOS/JKN	2023	4	309.600,00
		2	1.3.5.01.001.001.012	0001 s/d 0060	Buku Umum Lain-lain	-	-	-	BOS/JKN	2023	60	4.576.600,00
		3	1.3.5.01.001.003.001	0001 s/d 0004	Agama Islam	-	-	-	BOS/JKN	2023	4	263.200,00
		4	1.3.5.01.001.003.002	0001 s/d 0004	Agama Kristen	-	-	-	BOS/JKN	2023	4	846.800,00
		5	1.3.5.01.001.005.004	0001 s/d 0004	Buku Ilmu Bahasa Lain-lain	-	-	-	BOS/JKN	2023	4	316.400,00
		6	1.3.5.01.001.006.001	0001 s/d 0008	Matematika	-	-	-	BOS/JKN	2023	8	378.800,00
		7	1.3.5.01.001.008.009	0001 s/d 0016	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain	-	-	-	BOS/JKN	2023	16	865.400,00
		8	1.3.5.01.001.001.012	0001 s/d 0114	Buku Umum Lain-lain	-	-	-	BOS/JKN	2023	114	4.887.400,00
		9	1.3.5.01.001.003.005	0001 s/d 0020	buku agama lainnya (dst)	-	-	-	BOS/JKN	2023	20	1.300.000,00
		10	1.3.5.01.001.008.009	0001 s/d 0264	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-lain	-	-	-	BOS/JKN	2023	264	7.019.400,00
		11	1.3.5.01.001.001.012	0001 s/d 0070	Buku Umum Lain-lain	-	-	-	BOS/JKN	2023	70	6.286.900,00
		12	1.3.5.01.001.001.003	0001 s/d 0004	Ilmu Pengetahuan Umum	-	-	-	BOS/JKN	2023	4	155.600,00
		13	1.3.5.01.001.003.001	4	Agama Islam	-	-	-	BOS/JKN	2023	1	61.800,00
		14	1.3.5.01.001.005.002	24	Pengetahuan Bahasa Indonesia	-	-	-	BOS/JKN	2023	1	83.000,00
		15	1.3.5.01.001.008.008	0001 s/d 0003	Permainan dan Olah Raga	-	-	-	BOS/JKN	2023	3	239.800,00
		16	1.3.5.01.001.001.003	0001 s/d 0035	Ilmu Pengetahuan Umum	-	-	-	BOS/JKN	2023	35	1.500.000,00
		17	1.3.5.01.001.001.003	0001 s/d 0026	Ilmu Pengetahuan Umum	-	-	-	BOS/JKN	2023	26	2.295.000,00
		18	1.3.5.01.001.001.006	0001 s/d 0030	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	-	-	-	BOS/JKN	2023	30	1.650.000,00
		19	1.3.5.01.001.001.012	0001 s/d 0006	Buku Umum Lain-lain	-	-	-	BOS/JKN	2023	6	660.000,00
		20	1.3.5.01.001.003.001	0001 s/d 0010	Agama Islam	-	-	-	BOS/JKN	2023	10	600.000,00
JUMLAH											**684**	**34.295.700,00**
TOTAL EKSTRAKOMPATABEL TAHUN 2023											**1.163,00**	**72.635.974,00**

Lampiran 52

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PIUTANG PIHAK KETIGA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	Debet	Kredit
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	1.1.06.15.61.016	Piutang Pihak Ketiga Atas Kelebihan Pembayaran Bangunan Gedung Perpusakaan	46.516.950,00	
		1.3.3.01.01.0016	Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Rehab Gedung Perpustakaan SDN Inpres Sambiut		46.516.950,00
JUMLAH PIUTANG PIHAK KETIGA ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN				**46.516.950,00**	**46.516.950,00**

Lampiran 53

PEMERINTAH DARAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAFTAR PEMBAYARAN YANG DILUNCURKAN TAHUN 2024 (RETENSI 5%)
(HUTANG BELANJA MODAL)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SKPD	KODE REKENING		URAIAN		NO SPK	TGL SPK	PIHAK KETIGA		NILAI KONTRAK	REALISASI	RINCIAN HUTANG PIHAK KETIGA (RETENSI)				JUMLAH
		KODE REK. AKUNTANSI 108	URAIAN REKENING					NAMA PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK			TANAH	PERALATAN & MESIN	BANGUNAN & GEDUNG	JALAN IRIGASI dan JARINGAN	
1	**DINAS KESEHATAN**	1.3.3.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	1	Rehabilitas Puskesmas Pembantu Desa Apal	000.3.2/171/SPK/Dinkes	4-Dec-23	CV. SENTRAL ABADI	HARDIANTO SUNARTAN	136.444.000,00	125.129.000,00			11.315.000,00		11.315.000,00
2	**DIKBUD**	1.3.3.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	2	Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 2 BULAGI (DAU SG)	800/178/SPK/DIKBUD-BANGKEP/IX/2023	26-Sep-23	CV. DZAKY PRATAMA	AKBAR, ST	139.444.000,00	121.918.650,00			17.525.350,00		17.525.350,00
1	BAGIAN UMUM	1.3.3.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	1	Pembuatan Profil Papan Nama Kantor Bupati	100/53/PPK/SPK-APBD/BAG.UMUM/2018	5-Jul-18	CV. GRAIN ARS	INDRAWAN SAHI	49.948.000,00	47.450.600,00	-	-	2.497.400,00		2.497.400,00
2	BAGIAN UMUM	1.3.3.01.01.0002	Bangunan Gudang	2	Penataan Halaman Gudang Kantor Bupati	100/52/PPK/SPK-APBD/BAG.UMUM/2018	5-Jul-18	CV. ISOKU IKI	SUHERMAN LATULO	79.877.000,00	75.883.150,00	-	-	3.993.850,00		3.993.850,00
3	DINAS PUPR	1.3.4.01.01.0003	Jalan Kabupaten	3	Pembangunan Jalan Desa Kampung Baru (ABT)	620/ 146 / SPK / PJ-DAU / ABT/ PUPR / 2018	22-Nov-18			129.540.000,00	126.540.000,00	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00
1	**DIKBUD**	1.3.1.01.03.0010	Tanah untuk Bangunan Jaringan	1	Pembangunan Lapangan Volly Putra SMPN 1 Bulagi	425.46/SPK/PPK-DIKPORA/2017	16-May-17			71.059.000,00	67.506.050,00	3.552.950,00	-	-	-	3.552.950,00
2	**PERHUBUNGAN**	1.3.3.01.01.0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2	Pemb. Tambatan Perahu Desa Komba-Komba (DAK Afirmasi)	550/040/KONT./PUPRHUB/VIII/2017	18-Aug-17			783.344.000,00	783.343.300,00	-	-	700,00	-	700,00
3	**DINAS PUPR**	1.3.4.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3	Pek. Tanggul Pantai Desa Ambelang	615/14/SPK/PTPO-DAU/PUPRHUB/2017	29-Mar-17			171.460.000,00	169.740.000,00	-	-	-	1.720.000,00	1.720.000,00
1	**DINKES**	1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1	Pematangan Lahan Puskesmas Lolantang	900/1338.1/Dinkes	13-Jun-16			153.594.000,00	145.914.300,00	7.679.700,00		-	-	7.679.700,00
2	**DINKES**	1.3.3.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Sambulangan	900/1340.1/Dinkes	13-Jun-16			199.767.000,00	189.778.650,00	-		9.988.350,00	-	9.988.350,00
3	**DIKBUD**	1.3.3.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3	Pekerjaan Pembangunan Pagar TK Desa Ponding-Ponding	011/1/SPK/DIKBUD/2016	18-Jul-16			99.900.000,00	94.905.000,00	-		4.995.000,00	-	4.995.000,00
4	**PERTANIAN**	1.3.3.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	4	Pembangunan Tempat Parkir Kantor	05/SPK/BAPELLUH/2016	16-Jun-16			29.950.000,00	28.452.500,00	-		1.497.500,00	-	1.497.500,00
5	**PERTANIAN**	1.3.3.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	5	Pembangunan Rumah Dinas Buko	07/SPK/KONST.BAPELUH/2016	22-Aug-16			44.939.000,00	42.692.050,00	-		2.246.950,00	-	2.246.950,00
6	**DLH**	1.3.3.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	6	Lanjutan Pembangunan Laboratorium LH	660/133/SPK/DAU/BPLH/2016	13-Jun-16			49.945.000,00	47.447.750,00	-		2.497.250,00	-	2.497.250,00
7	**DINAS PUPR**	1.3.4.01.01.0003	Jalan Kabupaten	7	Pek.Peningkatan Jalan (DAK-IPD) Ruas Jalan:Palam-Sambiut	620/063/KONT./PJ-DAK.IPD/PU/2016	6-Jun-16	PT.SENTRAL SARI JAYA	ONESIMUS SURIADI	4.587.331.410,00	4.229.020.586,00	-	-	-	358.310.824,00	358.310.824,00
8	**DINAS PUPR**	1.3.4.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	8	Pek.Pemb. Palat Duiker Luk Labibi Kec.Peling Tengah	611/06/SPK-DAU/PU/2016	1-Nov-16	CV. WAJO SEDERHANA	ABD. WAHAB	35.000.000,00	33.250.000,00	-	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00
1	**DINAS PUPR**	1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1	Pembebasan Lahan Gedung Kantor		2015			144.624.000,00	137.392.880,00	7.231.120,00		-	-	7.231.120,00
2	**DINAS PUPR**	1.3.3.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	2	Rehabilitasi Rumah Jabatan Eselon II Lokasi Kecamatan Tinangkung	641/26/6.c/DAU-PSPA/PU/2015	14-Sep-15	CV ATOM JAYA		99.102.000,00	94.146.900,00	-		4.955.100,00	-	4.955.100,00
3	**DIKBUD**	1.3.3.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3	Pekerjaan Pembangunan Pagar SMPN 2 Pleing Tengah	47.1/SPK-CONSTRC/DIKBUD/2015	10-Nov-15			158.000.000,00	150.100.000,00	-		7.900.000,00	-	7.900.000,00
4	**PORA**	1.3.3.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4	Pembangunan Lapangan Volly SMPN 2 Peling tengah	34/SPK/PORA/2015	11-Sep-15			83.650.000,00	79.467.500,00	-		4.182.500,00	-	4.182.500,00
5	**PORA**	1.3.3.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Tataba	33/SPK/PORA/2015	11-Sep-15			139.400.000,00	132.430.000,00	-		6.970.000,00	-	6.970.000,00
6	**DISPENCAPIL**	1.3.3.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	6	Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor	10/SPK/DAU/DISPENCAPIL/2015	14-Sep-15			65.500.000,00	62.225.000,00	-		3.275.000,00	-	3.275.000,00
7	**KB**	1.3.3.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7	Pembangunan pagar dan Rabat Kantor Balai Penyuluh KB Desa Palapat Kec. Buko Selatan	13/PPBJ-SPK/BPPKB/2015	12-Aug-15			137.100.000,00	130.245.000,00	-		6.855.000,00	-	6.855.000,00
8	**DINAS PERIKANAN**	1.3.3.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	8	PEMBANGUNAN POS PENGAWASAN KEC TINUT (T.A 2014)					89.050.000,00	84.597.500,00	-		4.452.500,00	-	4.452.500,00
9	**BAPENDA**	1.3.3.02.01.0002	Tugu	9	Pembangunan Billboard Double Pole 2 Kaki (T.A 2015)	175/004/SPK/SET-DPRD/2015	7/23/2015			149.720.000,00	142.234.000,00	-		7.486.000,00	-	7.486.000,00
10	**BAPENDA**	1.3.3.02.01.0002	Tugu	10	Pembangunan Billboard 1 Kaki di kec. Bulagi utara (T.A 2015)	175/20/SPK-APBDP/SET-DPRD/2015	12/11/2015			127.369.000,00	121.000.550,00	-		6.368.450,00	-	6.368.450,00
11	**BAPENDA**	1.3.3.02.01.0002	Tugu	11	Pembangunan Billboard Kec. Buko 1 Kaki (T.A 2015)	175/19/SPK-APBDP/SET-DPRD/2015	12/11/2015			127.369.000,00	121.000.550,00	-		6.368.450,00	-	6.368.450,00
12	**DPRD**	1.3.4.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	12	Pembangunan Tanggul Gedung Kantor Set.DPD (T.A 2015)	175/009/SPK/SET-DPRD/2015	6/17/2015			149.704.500,00	145.213.365,00	-		-	4.491.135,00	4.491.135,00
13	**DINAS PUPR**	1.3.4.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	13	Pekerjaan Plat Duiker Desa Kampung Baru	611/44/DRS-DAU/PU/2015	7-Sep-15	CV TRI PRATAMA PUTRA		49.916.000,00	47.420.200,00	-		-	2.495.800,00	2.495.800,00
14	**DINAS PUPR**	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	14	Pembangunan Jalan Rabat Desa Tobing	620/40/20.C/PPIP/PU/2015	2-Sep-15	CV. KISARA MASTIM		99.500.000,00	94.525.000,00	-		-	4.975.000,00	4.975.000,00

Lampiran 53

NO	SKPD	KODE REKENING		URAIAN		NO SPK	TGL SPK	PIHAK KETIGA		NILAI KONTRAK	REALISASI	RINCIAN HUTANG PIHAK KETIGA (RETENSI)				JUMLAH
		KODE REK. AKUNTANSI 108	URAIAN REKENING					NAMA PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK			TANAH	PERALATAN & MESIN	BANGUNAN & GEDUNG	JALAN IRIGASI dan JARINGAN	
15	DINAS PUPR	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	15	Pembangunan Rabat Beton Desa Leme-Leme	620/30/10.C/PPIP/PU/2015	2-Sep-15	CV. BULAGI UTARA		99.758.000,00	94.770.100,00	-		-	4.987.900,00	4.987.900,00
16	DINAS PUPR			16	Pembangunan Jalan Dalam Kota Patukuki					129.959.000,00	123.461.050,00	-		-	6.497.950,00	6.497.950,00
17	DINAS PUPR	1.3.4.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	17	Pekerjaan Riol Desa Malanggong Kec.Buko	611/39/DRS-DAU/PU/2015	1-Sep-15	CV.ALAM FANTASI GROUP		199.186.000,00	189.226.700,00	-		-	9.959.300,00	9.959.300,00
18	DINAS PUPR	1.3.4.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	18	Pekerjaan Riol Desa Tataba Kec.Buko	611/40/DRS-DAU/PU/2015	1-Sep-15	CV.ALAM FANTASI GROUP		199.592.000,00	189.612.400,00	-		-	9.979.600,00	9.979.600,00
19	DINAS PUPR	1.3.4.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	19	pekerjaan Riol dan Plat Duiker Desa Lolantang	611/43/DRS-DAU/PU/2015	1-Sep-15			199.752.000,00	189.764.400,00	-		-	9.987.600,00	9.987.600,00
20	DINAS PUPR	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	20	Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Desa Tetendeng	620/29/9.C/PPIP/PU/2015	2-Sep-15	CV. PUTRA BANGGAI		199.785.000,00	189.795.750,00	-		-	9.989.250,00	9.989.250,00
21	DINAS PUPR	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	21	Pembangunan Jalan Rabat Desa Sumondung Kec. Bulagi	620/36/16.C/PPIP/PU/2015	2-Sep-15	CV.ASZURA JUSTIN PERKASA		199.814.000,00	189.823.300,00	-		-	9.990.700,00	9.990.700,00
22	DINAS PUPR	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	22	Pembangunan Ruas Jalan Lingkungan Pemukiman Menuju Lapangan Desa Lumbi-Lumbia	620/57/24.d/PPIP/PU/2015	17-Sep-15	CV. USAHA BARU PRATAMA		239.208.000,00	227.247.600,00	-		-	11.960.400,00	11.960.400,00
23	DINAS PUPR	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	23	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pandaluk	620/58/5.d/PPIP/PU/2015	17-Sep-15	CV. CITRA SULAWESI		326.482.000,00	310.157.900,00	-		-	16.324.100,00	16.324.100,00
24	DINAS PUPR	1.3.4.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	24	Pekerjaan Drainase Desa Sambiut Dusun 3 Kaulalongo	611/28/DRS-DAU/PU/2015	1-Sep-15	CV. KISARA MASTIM		149.296.000,00	126.545.700,00	-		-	22.750.300,00	22.750.300,00
25	PERUMAHAN	1.3.4.04.02.0002	Jaringan Distribusi	25	Pekerjaan Penambahan Travo 25 kVa Desa Tolulos	540/051/SPK-KONST/DESDM-APBDP/2015	11-Dec-15			159.808.000,00	151.817.600,00	-		-	7.990.400,00	7.990.400,00
26	PERTANIAN	1.3.4.02.06.0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	26	Pembangunan DAM Parit di desa Lalom Kec. Tinangkung Utara					54.912.000,00	52.166.400,00	-		-	2.745.600,00	2.745.600,00
27	PERTANIAN	1.3.4.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	27	Pekerjaan Pembuatan Embung Desa Lopito Kec.Totikum	82.1/PPBJ-SPK/DKP3/2015	1-Oct-15			49.940.000,00	47.443.000,00	-		-	2.497.000,00	2.497.000,00
1	DINAS PUPR			1	Pembangunan Lap.Sepak Bola Desa Paisubatu Kec.Buko (T.A. 2014)	600/07/SPK-PSPOR/PU/2014	15-Aug-14			179.842.000,00	170.849.900,00	8.992.100,00		-	-	8.992.100,00
2	DIKBUD	1.3.1.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2	Pekerjaan Penimbunan Halaman SMP Negri 2 Peling Tengah Kec.Peling Tengah					194.950.000,00	185.202.500,00	9.747.500,00		-	-	9.747.500,00
3	DPRD	1.3.3.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	3	Pembangunan Selasar Garasi SET DPRD (T.A 2014)		2014			75.000.000,00	71.250.000,00	-		3.750.000,00	-	3.750.000,00
4	DINAS PUPR	1.3.3.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4	Pembangunan Tribun Sepak Bola Desa Kautu (T.A 2014)	660/06/SPK-PSPOR/PU/204	15-Aug-14			59.900.000,00	56.905.000,00	-		2.995.000,00	-	2.995.000,00
14	DINKES	1.3.3.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi	14	REHAB INSTALASI FARMASI KABUPATEN (IFK) (T.A 2014)	900/1067.4/DINKES/2014	18-Jul-14			16.500.000,00	14.850.000,00	-		1.650.000,00	-	1.650.000,00
15	DLH	1.3.3.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	15	Lanjutan Tambahan Ruang Lab BPLH Kab. Bangkep (TH. 2014)	660/14/SPK/TR-LAB/DAU/BPLH/2014	16-Jul-14			17.820.000,00	16.929.000,00	-		891.000,00		891.000,00
16	BPBD	1.3.3.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	16	Pembangunan Garasi Mobil Rumah Dinas (T.A. 2014)	360/14/SPK/DAU/BPBD/2014	28-Apr-14			76.900.000,00	73.055.000,00	-		3.845.000,00		3.845.000,00
5	DINAS PUPR	1.3.4.04.01.0004	Jaringan Sambungan ke Rumah	5	Tong Fiber Desa Lobuton Kec. Totikum Selatan (T.A 2014)	690/10/SPK-AB-DAU/PU/2014	15-Aug-14			49.670.000,00	47.186.500,00	-		-	2.483.500,00	2.483.500,00
6	DINAS PUPR	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	6	Lanjutan Jalan Rabat Desa Tatakalai 105 M (T.A 2014)	620/23/PIP/PU/2014	15-Aug-14			99.790.000,00	94.800.500,00	-		-	4.989.500,00	4.989.500,00
7	DINAS PUPR	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	7	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Alasan (T.A 2014)	620/21/PIP/PU/2014	15-Aug-14			99.855.000,00	94.862.250,00	-		-	4.992.750,00	4.992.750,00
8	DINAS PUPR	1.3.4.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	8	Normalisasi Sungai Desa Abason (T.A 2014)	635/23/SPK/NS-DBH/PU/2014	3-Sep-14			99.873.000,00	94.879.350,00	-		-	4.993.650,00	4.993.650,00
9	DINAS PUPR	1.3.4.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	9	Pembangunan Tanggul Desa Bolubung (T.A 2014)	615/24.b/SPK/PTPO-DAU/PU/2014	25-Aug-14			99.895.000,00	94.900.250,00	-		-	4.994.750,00	4.994.750,00
10	DINAS PUPR	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	10	Pemb.Jalan Lingk. Desa Tobing Kec.TinangSel, 600 Meter (T.A 2014)	620/11/PIP/PU/2014	15-Aug-14			144.807.000,00	137.566.650,00	-		-	7.240.350,00	7.240.350,00
11	DINAS PUPR	1.3.4.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	11	Pipanisasi Desa Kambal Kec.Bulagi (T.A 2014)	690/14/SPK-AB-DAU/PU/2014	15-Aug-14			149.357.000,00	141.889.150,00	-		-	7.467.850,00	7.467.850,00
12	DINAS PUPR	1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	12	Pemb.Jalan Lingk.Desa Koyobunga Kec.Peling Tengah (T.A 2014)	620/09/PIP/PU/2014	15-Aug-14			293.115.000,00	278.459.250,00	-		-	14.655.750,00	14.655.750,00
13	PERHUBUNGAN	1.3.4.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	13	LANJUTAN PEKERJAAN DERMAGA DESA TOBING KEC. TINANGKUNG SELATAN (T.A. 2014)	550/006/SPK-KONST/Dishubkominfo/2014	20-Oct-14			59.946.000,00	56.948.700,00	-		-	2.997.300,00	2.997.300,00
												37.203.370,00	**-**	**128.501.350,00**	**557.218.259,00**	**722.922.979,00**

LAMPIRAN 54

LAPORAN KEUANGAN PDAM UNAUDIT

TAHUN 2023

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jln. Bukit Trikora No. 13 Salakan

LAPORAN
KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PDAM PAISU MOLINO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SYAMSUL BAHRI, SE
Jabatan	: Direktur PDAM Kab. Banggai Kepulauan
Alamat Kantor	: Salakan
Nomor Telepon	: +628114565896

Menyatakan bahwa :
1. Bertanggung jawab atas isi Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK ETAP.
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan disusun atas dasar Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang efektif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Salakan, 26 Maret 2023
Direktur PDAM Kab. Banggai Kepulauan

SYAMSUL BAHRI, SE

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2b, 3	1,606,339,674	1,087,626,395
Piutang Usaha	2c, 4	4,990,379,229	4,354,441,129
Penyisihan Kerugian Piutang		(3,885,234,729)	(3,885,234,729)
Piutang Usaha Bersih		1,105,144,500	469,206,400
Piutang Lain-lain	5	369,907,278	272,628,580
Persediaan	2d,6	471,319,528	347,606,728
Jumlah Aset Lancar		3,552,710,980	2,177,068,103
Aset Tetap	2e, 7		
Harga Perolehan Aset Tetap		20,058,705,884	20,039,407,716
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(13,229,012,404)	(11,994,305,675)
Nilai Buku Aset Tetap		6,829,693,480	8,045,102,041
TOTAL ASET		10,382,404,460	10,222,170,144
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	2g, 8	15,484,471	33,976,621
Kewajiban Jangka Panjang	2g, 9	171,681,719	171,681,719
Jumlah Kewajiban		187,166,190	205,658,340
EKUITAS	10		
Kekayaan PEMDA Yang Dipisahkan		10,749,805,000	9,749,805,000
Hibah (PDAM Kabupaten Banggai)		2,623,752,862	2,623,752,862
Modal Hibah Pemda Banggai Kepulauan		10,673,138,116	10,673,138,116
Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian)		(13,274,311,340)	(8,452,481,648)
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan		(577,146,368)	(4,577,702,526)
Jumlah Ekuitas		10,195,238,270	10,016,511,804
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10,382,404,460	10,222,170,144

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Kekayaan PEMDA Dipisahkan	Hibah PDAM Banggai	Modal Hibah Pemda Bangkep	Saldo Laba	Jumlah
Saldo Per 31 Desember 2021	8,749,805,000	2,623,752,862	10,673,138,116	(8,452,481,648)	13,594,214,330
Penyertaan Modal Tahun 2022	1,000,000,000				1,000,000,000
Laba (Rugi) Tahun 2022				(4,577,702,526)	(4,577,702,526)
Koreksi Saldo Laba					-
Saldo Per 31 Desember 2022	9,749,805,000	2,623,752,862	10,673,138,116	(13,030,184,174)	10,016,511,804
Penyertaan modal tahun 2023	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000
Laba/(Rugi) Tahun 2023	-	-	-	(577,146,368)	(577,146,368)
Koreksi Saldo Laba				(244,127,171)	(244,127,171)
Saldo Per 31 Desember 2023	10,749,805,000	2,623,752,862	10,673,138,116	(13,851,457,713)	10,195,238,270

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Tahun Berjalan	(577,146,368)	(4,212,579,502)
Penyesuaian:		
Penyusutan	1,234,706,729	2,163,051,440
Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian)	(244,127,171)	372,722
Penurunan/(Kenaikan) Piutang Usaha	(295,854,487)	(433,399,275)
Penurunan/(Kenaikan) Piutang Lainnya	(97,278,698)	60,680,215
Penurunan/(Kenaikan) Persediaan	(123,712,800)	(212,230,100)
Kenaikan/(Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek	(18,492,150)	46,738,185
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(121,904,945)	(2,587,366,315)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pengurangan/(Penambahan) Aset Tetap	(19,298,168)	(680,226,500)
Arus Kas Bersih dan Aktivitas Investasi	(19,298,168)	(680,226,500)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan/(Penurunan) Penyertaan	1,000,000,000	1,000,000,000
Penyerahaan Aset Tetap Pada Pemda Banggai Laut	-	-
Kenaikan Imbalan Pasca Kerja	-	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1,000,000,000	1,000,000,000
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS SETARA KAS	858,796,888	245,835,650
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	747,542,787	501,707,137
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	1,606,339,674	747,542,787

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 3 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan dan dimuat dalam Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2004.

b. Tujuan dan Kegiatan Usaha

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat dan menunjang penerimaan keuangan daerah, dengan kegiatan usaha perusahaan yaitu :

1. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum
2. Mengarahkan, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien
3. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan berkesinambungan

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 690/11/KPTS/PDAM/B/III/2008, dengan susunan sebagai berikut :

1 Badan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 230 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2022, maka susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan

2 Direktur

Berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 310 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Syamsul Bahri, SE

Dalam Melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh kepala-kepala bagian sebagai berikut:

a	Kepala Bagian Administrasi & Umum	:	Dedis
	Membawahi Sub Bagian :		
	- Keuangan	:	Wahyudi Laganja
	- Hubungan Langganan	:	Ery Hasnianty
	- Umum dan Personalia	:	Tadjudin
b	Kepala Bagian Teknik	:	Syahril Papude, S.Pd
	Membawahi Sub Bagian :		
	- Produksi	:	Samin Saimu
	- Transmisi dan Distribusi	:	Idilham Matahur
	- Perencanaan Tehnik	:	Mastopel

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011.

Manajemen perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2023 dengan angka komparatif 2023 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktifitas operasi, investasi dan pendanaan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya".

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan estimasi tingkat ketidaktertagihan saldo piutang pada akhir tahun. Piutang usaha dibedakan menjadi piutang Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

d Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP).

Penyisihan untuk persediaan usang dan lambat bergerak ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Umur Ekonomis	Tarif Penyusutan
Bukan Bangunan		
Kelompok 1	4	25%
Kelompok 2	8	12.5%
Kelompok 3	16	6.25%
Kelompok 4	20	5%
Bangunan		
Permanen	20	5%
Non permanen	10	10%

Klasifikasi aset dalam kelompok aset tetap dilakukan sesuai dengan kelompok aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

f Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset berwujud diukur pada biaya perolehan dikurangi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai aset.

g. Kewajiban

Kewajiban dinyatakan dengan lengkap agar tergambar seluruh kewajiban perusahaan yang terhutang pada akhir tahun.

Hutang jangka panjang dicatat berdasarkan realisasi penarikan dana ditambah dengan bunga masa tenggang yang tidak jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang. Kewajiban bunga atas hutang jangka panjang yang timbul selama masa tenggang tidak yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang dicatat dalam perkiraan "Bunga Masa Tenggang".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

i. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 23 tentang Imbalan Kerja. Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 adalah program imbalan pasti.

j. Penghasilan dan Beban

Penghasilan *(income)* meliputi pendapatan *(revenues)* dan keuntungan *(gains)*. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa seperti penjualan air, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan.

Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam melaksanakan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban administrasi, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasa berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas, persediaan, dan aset tetap. kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa.

k. Imbalan Kerja

Perusahaan belum mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK-ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan Kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayar imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

1. Laporan Keuangan Pokok

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP). Laporan Keuangan Lengkap berdasarkan SAK ETAP Bab 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

3. KAS DAN SETARA KAS

Saldo kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Kas kecil	387,533,674	38,149,361
Bank:		
BRI Bangkep (516401003914536) A	56,454,544	46,292,679
BRI Bangkep (516401003914539) B	55,623	622,670,269
Bank Sulteng Cabang Banggai Kepulauan	1,162,295,833	380,514,086
Jumlah	1,606,339,674	1,087,626,395

4. PIUTANG USAHA

Saldo piutang usaha per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Piutang rekening air	4,987,679,229	4,351,741,129
Piutang non rekening air	2,700,000	2,700,000
Penyisihan kerugian piutang rekening air	(3,885,234,729)	(3,885,234,729)
Piutang usaha bersih	1,105,144,500	469,206,400

5. PIUTANG NON USAHA

Piutang non usaha per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Piutang pegawai	369,907,278	272,628,580
	369,907,278	272,628,580

6. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar:

	2023	2022
Suku cadang	204,120,528	136,202,728
Pipa-pipa	70,475,000	22,875,000
Meter air	7,345,000	-
Aksesories	189,379,000	188,529,000
Jumlah persediaan	471,319,528	347,606,728

7. ASET TETAP

Rekonsiliasi aset tetap untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2023			
	31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	31-Des-23
Harga perolehan:				
Tanah & penyempurnaan tanah	47,480,000	10,750,000	-	58,230,000
Instalasi sumber air	316,925,700	-	-	316,925,700
Instalasi pompa	495,677,001	3,000,000	-	498,677,001
Instalasi pengolahan air	39,107,250	-	-	39,107,250
Instalasi transmisi dan distribusi	16,807,013,098	5,961,000	-	16,812,974,098
Bangunan & gedung	485,813,850	51,937,000	-	537,750,850
Kendaraan & alat angkut	897,794,813	38,200,000	-	935,994,813
Inventaris dan perabot kantor	734,228,504	124,817,668	-	859,046,172
Aset tetap dalam pengerjaan	215,367,500	(215,367,500)	-	-
Jumlah harga perolehan	20,039,407,716	19,298,168	-	20,058,705,884
Akumulasi penyusutan:				
Instalasi sumber air	(281,835,700)	(15,846,285)	-	(297,681,985)
Instalasi pompa	(127,142,201)	(24,783,850)	-	(151,926,051)
Instalasi pengolahan air	(36,788,300)	(1,844,766)	-	(38,633,066)
Instalasi transmisi dan distribusi	(10,163,809,113)	(915,665,458)	-	(11,079,474,571)
Bangunan dan gedung	(145,205,044)	(13,522,318)	-	(158,727,362)
Kendaraan dan alat pengangkut	(680,457,063)	(96,226,926)	-	(776,683,989)
Inventaris dan perabot kantor	(559,068,254)	(166,817,126)	-	(725,885,380)
Jumlah akumulasi penyusutan	(11,994,305,675)	(1,234,706,729)	-	(13,229,012,404)
Nilai buku	8,045,102,041			6,829,693,480

7. ASET TETAP (Lanjutan)

	31 Desember 2022			
	31-Des-21	Penambahan	Pengurangan	31-Des-22
Harga perolehan:				
Tanah & penyempurnaan tanah	25,480,000	22,000,000	-	47,480,000
Instalasi sumber air	280,425,700	36,500,000	-	316,925,700
Instalasi pompa	189,330,001	-	-	495,677,001
Instalasi pengolahan air	36,666,250	2,441,000	-	39,107,250
Instalasi transmisi dan distribusi	16,628,567,598	178,445,500	-	16,807,013,098
Bangunan & gedung	137,841,350	347,972,500	-	485,813,850
Kendaraan & alat angkut	851,471,813	46,323,000	-	897,794,813
Inventaris dan perabot kantor	570,360,504	163,868,000	-	734,228,504
Aset tetap dalam pengerjaan	215,367,500	-	-	215,367,500
Jumlah harga perolehan	18,935,510,716	797,550,000	-	20,039,407,716
Akumulasi penyusutan :				
Instalasi sumber air	(277,775,700)	(4,060,000)		(281,835,700)
Instalasi pompa	(82,844,501)	(44,297,700)		(127,142,201)
Instalasi pengolahan air	(36,666,250)	(122,050)		(36,788,300)
Instalasi transmisi dan distribusi	(8,361,629,609)	(1,802,179,504)		(10,163,809,113)
Bangunan dan gedung	(49,091,108)	(96,113,936)		(145,205,044)
Kendaraan dan alat pengangkut	(604,915,313)	(75,541,750)		(680,457,063)
Inventaris dan perabot kantor	(418,331,754)	(140,736,500)		(559,068,254)
Jumlah akumulasi penyusutan	(9,831,254,235)	(2,163,051,440)	-	(11,994,305,675)
Nilai buku	9,104,256,480			8,045,102,041

8. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar:

	2023	2022
Utang Usaha	15,484,471	33,976,621
Utang Pajak	-	-
Jumlah Kewajiban	15,484,471	33,976,621

9. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

Saldo Kewajiban Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Nilai Wajar Aset Program	159,495,292	159,495,292
Kewajiban Aktuaria	331,177,011	331,177,011
Jumlah Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	171,681,719	171,681,719

9. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Adapun asumsi yang digunakan dalam perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	Asumsi
Tabel Mortalita	Annuity 1949 Modified
Tingkat bunga	8.00%
Tingkat kenaikan PhDP	4.50%
Usia pensiun normal	56
Maksimum manfaat pensiun peserta	80% x PhDP
Maksimum manfaat pensiun direksi	75% x PhDP

10 MODAL DAN CADANGAN

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Kekayaan pemda Kab Banggai Kepulauan yang dipisahkan	10,749,805,000	9,749,805,000
Hibah (PDAM Kab. Banggai)	2,623,752,862	2,623,752,862
Modal hibah Pemda Banggai Kepulauan	10,673,138,116	10,673,138,116
Laba ditahan (akumulasi kerugian)	(13,274,311,340)	(8,452,481,648)
Laba /(Rugi) tahun berjalan	(577,146,368)	(4,577,702,526)
Jumlah modal dan cadangan	10,195,238,270	10,016,511,803

11. PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha selama tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Pendapatan air		
- Harga air	3,530,141,500	3,457,245,300
- Penjualan air tanki	9,640,000	31,600,000
- Administrasi	1,199,708,500	1,156,900,500
Jumlah pendapatan air	4,739,490,000	4,645,745,800
Pendapatan non air		
- Pendapatan sambungan baru	25,922,000	100,900,000
- Pendapatan penyambungan kembali	6,300,000	5,700,000
- Pendapatan denda	224,940,300	215,491,000
- Pendapatan Mutasi Meter	3,600,000	-
- Pendapatan balik nama	5,100,000	3,900,000
- Pendapatan non air lainnya	-	14,939,000
Jumlah pendapatan non air	265,862,300	340,930,000
Jumlah pendapatan usaha	5,005,352,300	4,986,675,800

12. PENDAPATAN LAIN NON USAHA

Pendapatan lain non usaha untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	2023	2022
Pendapatan bunga deposito	-	-
Pendapatan jasa giro	-	23,225,788
Rupa-rupa pendapatan lainnya	33,233,818	2,595,070
Jumlah pendapatan lain-lain	33,233,818	25,820,858

13. BEBAN SUMBER AIR

Beban Sumber untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Biaya pegawai	152,191,700	122,547,300
Pemakaian bahan bakar	142,408,000	195,931,000
Biaya Listrik	246,503,576	323,051,597
Rupa-rupa biaya sumber	11,980,000	1,650,000
Pemeliharaan sumber	38,603,000	39,107,000
Biaya penyusutan sumber	15,846,285	2,030,000
Jumlah beban sumber air	607,532,561	684,316,897

14. BEBAN PENGOLAHAN AIR

Beban pengolahan air untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	2023	2022
Biaya pegawai	-	-
Pemakaian bahan pembantu	-	-
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air	22,757,750	30,445,000
Biaya penyusutan pengolahan	1,844,766	-
Biaya penyusutan pompa	24,783,850	22,148,850
Jumlah beban pengolahan air	49,386,366	52,593,850

15. BEBAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

Beban transmisi dan distribusi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Biaya pegawai	647,964,400	596,599,300
Biaya Bahan Bakar	18,132,000	15,027,000
Rupa-rupa biaya transmisi & distribusi	400,000	-
Biaya pemeliharaan transmisi & distribusi	187,560,200	291,583,700
Biaya penyusutan transmisi & distribusi	915,665,458	798,861,252
Jumlah	1,769,722,058	1,702,071,252

16. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban Umum dan administrasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	2023	2022
Gaji & honor	736,698,250	783,417,600
Tunjangan	1,137,950,300	1,022,964,692
Dana atau Iuran Pensiun dan Asuransi	120,879,757	81,335,087
Biaya Lembur	1,800,000	-
Insentif / kesejahteraan karyawan	17,075,000	62,497,725
Pakaian dinas	700,000	-
Sumbangan / Bantuan untuk karyawan	2,000,000	3,250,000
Pendidikan & latihan	-	-
Rupa-rupa Biaya Pegawai	-	-
ATK & foto copy	15,483,440	22,776,850
Barang Cetakan	-	-
Perlengkapan komputer	-	-
Telepon, telex, telegram	10,716,000	10,105,924
Rapat & tamu, konsumsi	31,749,500	35,814,250
Biaya Pos & Materai	506,000	306,000
Listrik & Penerangan	21,416,000	12,197,500
Biaya Cleaning Service	9,300,000	6,000,000
Rupa-Rupa Biaya Kantor	31,672,000	34,186,000
Biaya Pembacaan Meter	13,973,000	18,400,000
Biaya Penagihan Rekening (Fee)	195,873,230	213,590,975
Biaya Pencetakan Form. Rekening	-	-
Biaya Pengihan Penerbitan Rekening	-	-
Rupa-Rupa Biaya Hubungan dan langganan	35,928,610	33,550,655
Biaya Survey & Penelitian	-	700,000
Biaya Perencanaan Teknik	5,050,000	200,000
Rupa-Rupa Biaya Litbang	-	-
Pemeliharaan Inventaris Kantor	1,043,000	200,000
Pemeliharaan Kendaraan	98,014,000	139,059,140
Pembelian BBM & Oli	105,479,800	91,497,500
Biaya Surat-surat Kendaraan Dinas	303,000	-
Service Kendaraan Dinas	-	-
Pemeliharaan Bangunan	15,100,000	60,542,000
Pemeliharaan Instalasi Kantor	15,400,000	2,824,000
Pemeliharaan Taman & Lapangan	4,390,000	104,060,000
Biaya Penyisihan Piutang	-	3,095,368,297
Biaya Penghapusan Piutang	-	-
Biaya Iuran Berlangganan	3,600,000	3,600,000
Biaya Iuran Keanggotaan	-	11,054,693
Biaya Badan Pengawas	97,847,100	93,189,975
Biaya Perjalanan Dinas (SPPD)	49,715,000	91,115,445

Biaya Jasa Profesional	-	25,000,000
Biaya Audit	30,000,000	50,000,000
Biaya Sewa	12,900,000	32,400,000
Biaya Pajak Pemda / Perizinan	56,430,734	189,044,555
Biaya Bantuan / Sumb. u/ Mitra	500,000	3,200,000
Rupa-Rupa Biaya Umum Lainnya	33,031,410	250,640,000
Biaya Penyusutan Inst. Non Pabrik	276,566,370	200,921,743
	3,189,091,501	6,785,010,606

17. BEBAN LUAR USAHA

Beban luar usaha selama tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Beban administrasi bank	-	1,083,555
	-	1,083,555

18. PERPAJAKAN

Dalam melaksanakan kewajiban atas perpajakan, Perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan laba kena pajak tahun 2023 dan 2022 yaitu sebagai berikut:

	2023	2022
Laba bersih kena pajak	(577,146,368)	(4,212,579,502)
Koreksi fiskal positif:		
Beban pakaian dinas	700,000	185,000
Beban sumbangan dan bantuan karyawan	2,000,000	2,500,000
Beban bantuan untuk mitra PDAM	500,000	770,000
Koreksi fiskal negatif:		
Pendapatan jasa giro	-	(2,595,070)
	(573,946,368)	(4,211,719,572)

19. INFORMASI TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN SEBAGAI BAGIAN DARI LAPORAN KEUANGAN POKOK

Kerugian Kumulatif

Perusahaan mengalami kerugian terus-menerus dengan jumlah akumulasi kerugian sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.451.110.848 dengan rincian sebagai berikut:

Rugi kumulatif sampai tahun 2022	(13,274,311,340)
Rugi tahun 2023	(577,146,368)
Rugi kumulatif sampai tahun 2023	(13,851,457,708)

19. INFORMASI TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN SEBAGAI BAGIAN DARI LAPORAN KEUANGAN POKOK (Lanjutan)

Manajemen telah melakukan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan diantaranya:

a. Meminta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Atas permintaan tersebut PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan memperoleh dukungan dalam bentuk penyertaan modal sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 yaitu:

Tahun 2005	1,700,000,000
Tahun 2008	200,000,000
Tahun 2010	300,000,000
Tahun 2011	199,805,000
Tahun 2012	100,000,000
Tahun 2013	1,000,000,000
Tahun 2014	500,000,000
Tahun 2015	500,000,000
Tahun 2017	1,125,000,000
Tahun 2018	1,125,000,000
Tahun 2020	1,000,000,000
Tahun 2021	1,000,000,000
Tahun 2022	1,000,000,000
Tahun 2023	1,000,000,000
	10,749,805,000

b. Merencanakan Penyesuaian tarif yang akan diajukan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan DPRD.

c. Telah menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap bagian yang ada.

LAMPIRAN 55

LAPORAN KEUANGAN RS PRATAMA BILABANGGAI

TAHUN 2023

2023

BLUD UPTD RS PRATAMA
BILABANGGAI

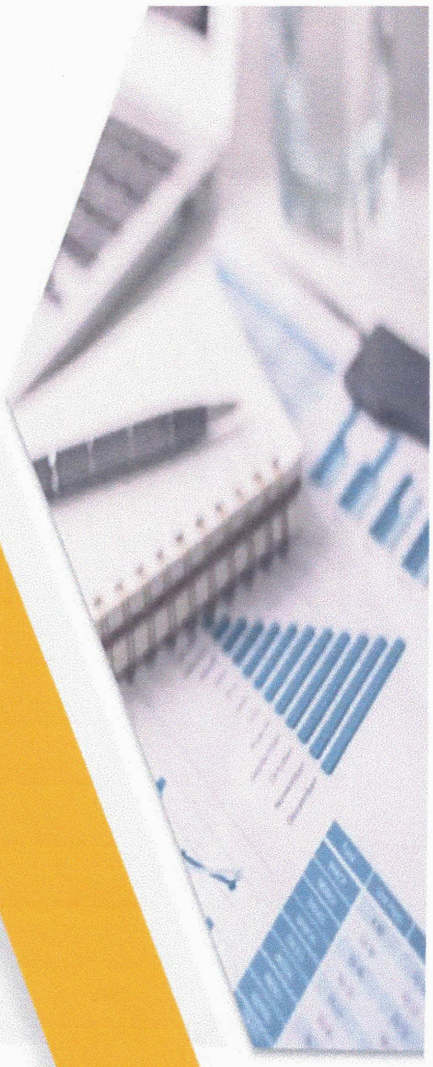

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
- LAPORAN ARUS KAS
- LAPORAN OPERASIONAL
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
- NERACA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karuniaNYA sehingga kami dapat menyelesaikan Catatan atas Laporan Keuangan BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan OPD sebagai entitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Laporan Keuangan ini memuat segala transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan dalam jangka waktu satu tahun memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan.

Apal Buko Selatan, 15 Maret 2024

DIREKTUR BLUD UPTD RS PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dr. SELVYANI PASOMBA
NIP. 19920908 201903 2 004

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Catatan atas Laporan Keuangan BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-Sal); (c) Laporan Arus Kas (LAK); (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (f) Neraca, dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Apal Buko Selatan, 15 Maret 2024

DIREKTUR BLUD UPTD RS PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
RS PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN

dr. SELVYANI PASOMBA
NIP. 19920908 201903 2 004

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Maksud dan Tujuan 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Sistematika 3
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 6
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 6
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan . 6
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 8
3.1 Laporan Realisasi Anggaran 8
3.2 Laporan Perubahan Saldo Sisa Anggaran Lebih 13
3.3 Laporan Arus Kas 15
3.4 Laporan Operasional 18
3.5 Laporan Perubahan Ekuitas 20
3.6 Neraca 22
3.7 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban 24
BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 25
4.1 Gambaran Umum 25
4.2 Struktur Organisasi 25
BAB V PENUTUP 27
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pendapatan BLUD 6
Tabel 2.2 Belanja BLUD 6
Tabel 3.1 Pendapatan-LRA 8
Tabel 3.2 Belanja BLUD 8
Tabel 3.3 Komposisi Pencapaian Realisasi Belanja 9
Tabel 3.4 Belanja Operasi 9
Tabel 3.5 Belanja Pegawai 10
Tabel 3.6 Belanja Barang dan Jasa 10
Tabel 3.7 Belanja Barang Pakai Habis 11
Tabel 3.8 Belanja Jasa 11
Tabel 3.9 Belanja Pemeliharaan 12
Tabel 3.10 Belanja Perjalanan Dinas 12
Tabel 3.11 Belanja Modal 13
Tabel 3.12 Surflus/Defisit-LRA 13
Tabel 3.13 Rincian Laporan Perubahan SAL 14
Tabel 3.14 Arsu Kas Masuk dari Aktivasi Operasi 16
Tabel 3.15 Arus Kas Keluar dari Aktivasi Operasi 16
Tabel 3.16 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris 17
Tabel 3.17 Rincian Penerimaan dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Arus Kas Masuk ... 17
Tabel 3.18 Rincian R/K Penerimaan Arus Kas Masuk 17
Tabel 3.19 Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 17
Tabel 3.20 Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Arus Kas Keluar 18
Tabel 3.21 Rincian R/K Penerimaan Arus Kas Masuk 18
Tabel 3.22 Pendapatan-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 19
Tabel 3.23 Beban LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 19
Tabel 3.24 Kegiatan Non Operasional 20
Tabel 3.25 Surplus/Defisit LO 20
Tabel 3.26 Laporan Ekuitas 21
Tabel 3.27 Aset 22
Tabel 3.28 Persediaan 23
Tabel 4.1 Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara UPTD BLUD RS Pratama Bilabanggai 26

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi. Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para Pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang sudah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan dalam bentuk CaLK, tujuan penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil–hasil yang telah dicapai;
4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber–sumber penerimaan baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 Ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang milik Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 300 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD RS Pratama Bilabanggai.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Perangkat Daerah

- 3.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1. Pendapatan – LRA

3.1.2. Belanja

3.1.3. Surplus/Defisit – LRA

3.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

3.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

3.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

3.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

3.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

3.3 Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas

3.3.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

3.3.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

3.3.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

3.3.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

3.3.5. Kenaikan/Penurunan Arus Kas

3.4 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

3.4.1. Pendapatan – LO

3.4.2. Beban

3.4.3. Kegiatan Non Operasional

3.4.4. Pos Luar Biasa

3.5 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

3.5.1. Ekuitas Awal

3.5.2. RK Konsolidasi Kas BLUD

3.5.3. Surplus/Defisit-LO

3.5.4. Ekuitas Akhir

3.6 Penjelasan pos-pos Neraca

3.6.1. Aset

3.6.2. Kewajiban

3.6.3. Ekuitas

3.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Perangkat Daerah.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran BLUD pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki pagu anggaran BLUD pada tahun 2023 sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan BLUD

Tabel 2.1 Pendapatan BLUD

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)
BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai	629.886.041,00	383.432.937,00	60,87
Jumlah	**629.886.041,00**	**383.432.937,00**	**60,87**

2.1.2 Belanja BLUD

Tabel 2.2 Belanja BLUD

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)
BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai	630.704.971,00	383.432.937,00	60,87
Jumlah	630.704.971,00	383.432.937,00	60,87

2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam rangka memaksimalkan peningkatan realisasi belanja yang efektif dan efisien memang dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam melakukan tindakan nyata di lapangan dalam melakukan terobosan-terobosan yang cepat, tepat dan aktual secara berimbang dan dinamis. Kendala/hambatan dalam pelaksanaan BLUD pada Tahun Anggaran 2023, antara lain:

1. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target pendapatan

   Persentase realisasi pendapatan BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 sebesar 60,87%, hal ini dikarenakan sumber pendapatan yang berasal dari pasien rawat inap yang tidak sesuai dengan target dan sedikitnya pendapatan dari pasien umum dikarenakan berlakunya program *Universal Health Coverage* (UHC).

2. Penyebab capaian target belanja.

   Persentase realisasi Belanja BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 sebesar 45,31%. Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100% dari pagu anggaran. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan adalah:

   a. Proses penyesuaian BLUD yang masih baru;
   b. Waktu penyesuaian penggunaan aplikasi Eblud yang relatif singkat;
   c. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
   d. Adanya faktor kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;
   e. Satuan harga yang ditetapkan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan *riil*.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3. 1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1 Pendapatan - LRA

Laporan realisasi anggaran BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, dan surplus/defisit-LRA, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Adapun perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan antara tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pendapatan-LRA

Tahun 2023		Tahun 2022	
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
629.886.041,00	383.432.937,00	0,00	0,00

Pada Tahun 2023, target untuk Pendapatan BLUD sebesar Rp.629.886.041,00 dengan realisasi sebesar Rp.383.432.937,00 (60,87%). Sedangkan, pada Tahun 2022 anggaran dan realisasi sejumlah Rp.0,00 (0%) hal ini dikarenakan Rumah Sakit belum menerapkan pola tata kelola keuangan BLUD melainkan pendapatan masih masuk ke dalam pos rekening JKN dan PAD. Adapun persentase capaian pendapatan tahun 2023 belum maksimal di sebabkan sumber pendapatan yang berasal dari pasien rawat inap yang tidak sesuai dengan target dan sedikitnya pendapatan dari pasien umum dikarenakan berlakunya program *Universal Health Coverage* (UHC).

3.1.2 Belanja

Sebagai penerapan dari kebijakan Belanja BLUD, perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Belanja BLUD

Tahun 2023		Tahun 2022	
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
630.704.971,00	285.793.152,00	0,00	0,00

Anggaran Belanja BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Bisnis Anggaran (DBA) Nomor 1.02.0.00.0.00.03.01.06.04 tanggal 27 Oktober 2023, bahwa belanja BLUD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp. 630.704.971,00 dan terealisasi sebesar Rp. 285.793.152,00 atau 45,31%. Komposisi pencapaian realisasi belanja disajikan dibawah ini:

Tabel 3.3 Komposisi Pencapaian Realisasi Belanja

Kode Rekening	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
5	**BELANJA**	**630.704.971,00**	**285.793.152,00**	**45,31**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**612.704.375,00**	**285.793.152,00**	**46,64**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	394.132.195,00	226.562.082,00	57,48	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	218.572.180,00	59.231.070,00	27,10	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**18.000.596,00**	**0,00**	-	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	18.000.596,00	0,00	-	0,00
	Surplus/(Defisit)	**(818.930,00)**	**97.639785,00**	-	**0,00**

Realisasi anggaran Belanja BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2023 sebesar Rp. 285.793.152,00 atau sebesar 45,31% dari anggaran belanja sebesar Rp. 630.704.971,00. Penjelasan lebih lanjut anggaran dan realisasi setiap jenis Belanja BLUD diuraikan sebagai berikut ini:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan realisasi anggaran belanja untuk kegiatan operasional BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan yang memberi manfaat jangka pendek, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Belanja Operasi

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
Belanja Operasi	**612.704.375,00**	**285.793.152,00**	**326.911.223,00**	**46,64**
- Belanja Pegawai	394.132.195,00	226.562.082,00	167.570.113,00	57,48
- Belanja Barang dan Jasa	218.572.180,00	59.231.070,00	159.341.110,00	27,10

Realisasi belanja operasi BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.285.793.152,00 atau 46,64% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp.612.704.375,00.

Realisasi belanja operasi BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Berikut penjelasannya pada masing-masing pos belanja :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dengan realisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 226.562.082,00 atau 57,48% dari pagu anggaran sebesar Rp. 394.132.195,00. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 tidak mencapai 100% dari pagu anggaran dikarenakan realisasi pendapatan JKN Non Kapitasi dan pendapatan Pasien Umum belum diterima secara penuh dan pembayaran jasa medis dilakukan berdasarkan jumlah pegawai yang ada. Berikut rincian dan komposisinya:

Tabel 3.5 Belanja Pegawai

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	394.132.195,00	226.562.082,00	167.570.113,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 59.231.070,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 218.572.180,00. Berikut rincian dan komposisi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 :

Tabel 3.6 Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	218.572.180,00	59.231.070,00	159.341.110,00

a) Belanja Barang Pakai Habis

Tabel 3.7 Belanja Barang Habis Pakai

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	**131.082.180,00**	**25.251.070,00**	**105.831.110,00**
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.000.000,00	9.000.000,00	30.000.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	15.220.000,00	0,00	15.220.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.149.250,00	5.159.250,00	5.990.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	912.000,00	126.000,00	786.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.380.000,00	600.000,00	780.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	10.365.820,00	10.365,820,00	0,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	53.055.110,00	0,00	53.055.110,00

Belanja Barang Pakai Habis dari pagu anggaran **Rp.131.082.180,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp.25.251.070,00** dengan persentase **19,26%** kemudian yang tidak dapat direalisasikan sebesar **Rp 105.831.110,00** atau dengan persentase **80,74%.** Anggaran Barang Pakai Habis tersebut belum dapat diklaim 100% sesuai pagu anggaran karena anggaran yang belum masuk sepenuhnya ke dalam kas penerimaan. Di samping itu ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Rumah Sakit seperti belanja obat-obatan dikarenakan estimasi barang sampai yang melewati batas ketentuan.

b) Belanja Jasa

Tabel 3.8 Belanja Jasa

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Jasa	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**	**0,00**
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00

Belanja jasa dengan pagu anggaran **Rp. 4.080.000,00** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 4.080.000,00** atau dengan persentase mencapai **100%.**

c) Belanja Pemeliharaan

Tabel 3.9 Belanja Pemeliharaan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pemeliharaan	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

Belanja pemeliharaan dengan pagu anggaran **Rp.15.000.000,00** dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 0,00** atau dengan persentase **0%**. Hal ini dikarenakan anggaran JKN Non Kapitasi yang menjadi sumber anggaran belanja pemeliharaan tidak mencapai target sehingga untuk pos belanja pemeliharaan tidak dapat direalisasikan.

d) Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 3.10 Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	**68.410.000,00**	**29.900.000,00**	**38.510.000,00**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.410.000,00	29.900.000,00	38.510.000,00

B

Belanja perjalanan dinas dengan pagu anggaran **Rp.68.410.000,00** dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 29.900.000,00** atau dengan persentase **43,71%.** Hal ini dikarenakan anggaran yang tidak masuk sepenuhnya sesuai target sehingga untuk pos belanja perjalanan dinas tidak dapat direalisasikan 100% sesuai pagu anggaran.

2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 0,00 dari anggaran sebesar Rp. 18.000.596,00. Berikut rincian jenis dan komposisi belanja modal BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun anggaran 2023 :

Tabel 3.11 Belanja Modal

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Modal	**18.000.596,00**	**0,00**	**18.000.596,00**
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	13.000.596,00	0,00	13.000.596,00

Belanja Modal dengan pagu Anggaran Rp.18.000.596,00 dengan realisasi Rp.0,00 (0%). Hal ini diakibatkan karena sulitnya mencari pihak ketiga/rekanan yang *approve* untuk menyediakan barang-barang tersebut dengan estimasi kedatangan yang relatif singkat.

3.1.3 Surplus/Defisit-LRA

Tabel 3.12 Surflus/Defisit-LRA

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
SURPLUS / DEFISIT	(818.930,00)	97.639.785,00	(98.458.715,00)

BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan kebijakan anggaran defisit sebesar Rp. 818.930,00 yang dalam pelaksanaan terdapat defisit/surplus sebesar Rp. 98.458.715,00. Hal ini disebabkan karena waktu penyesuaian BLUD yang relatif singkat sehingga semua kegiatan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Disamping itu juga semua program dan kegiatan yang tertuang di dalam DBA Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan (Perbup Nomor 33 Tahun 2021).

3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada satu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau sisa kurang pembiayaan anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang berkenaan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan Perubahan SAL BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Uraian		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	-	-
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-	-
3.	**Sub Total (1 – 2)**	-	-
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	97.639.785,00	-
5.	**Sub Total (3 + 4)**	**97.639.785,00**	-
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7.	Lain-lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		**97.639.785,00**	**0,00**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan telah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2023 adalah sebesar Rp 97.639.785,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2023 sebesar Rp 0,00;
- Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan SAL yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Pada tahun 2023 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar Rp 0,00;
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan sebesar Rp 97.639.785,00. merupakan SiLPA setelah koreksi;
- Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp 0,00;
- Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 sebesar Rp 97.639.785,00.

3.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2023. Pada Tahun 2023 Rumah Sakit belum memiliki Saldo

Anggaran Lebih (SAL) Awal, dikarenakan UPTD BLUD RS Pratama Bilabanggai menjadi BLUD pada bulan Juli Tahun 2023.

3.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan pada tahun 2023 sebesar Rp. 0,00. Hal ini disebabkan tidak adanya Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

3.2.3 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp 0,00. Tidak adanya Koreksi Kesalahan Pembukuan pada tahun sebelumnya dikarenakan UPTD BLUD RS Pratama Bilabanggai menjadi BLUD pada bulan Juli Tahun 2023.

3.2.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam BLUD selama satu periode pelaporan. SiLPA sebelum koreksi tahun 2023 sebesar Rp 97.639.785,00.

3.2.5 Sisa Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp.97.639.785,00.

3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

3.3.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023 sebesar Rp.97.639.785,00 merupakan selisih lebih jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp.383.432.937,00 dibandingkan dengan jumlah arus kas keluar

dari aktivitas operasi sebesar Rp.285.793.152,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a.	**ARUS KAS MASUK**		
1)	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	8.111.169,00	0,00
2)	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	375.321.768,00	0,00
3)	Pendapatan Hasil Kerjasama	0,00	0,00
4)	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
5)	Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	0,00
6)	Pendapatan APBN/APBD	0,00	0,00
Jumlah		**383.432.937,00**	**0,00**

Tabel Arus 3.15 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a.	**ARUS KAS KELUAR**		
1)	Pembayaran Pegawai	226.562.082,00	0,00
2)	Pembayaran Jasa	29.331.070,00	0,00
3)	Pembayaran Pemeliharaan	0,00	0,00
4)	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	0,00	0,00
5)	Pembayaran Perjalanan Dinas	29.000.000,00	0,00
6)	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Jumlah		**285.793.152,00**	**0,00**

3.3.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2023 sebesar Rp. 0,00. Hal ini disebabkan tidak adanya kegiatan investasi yang dilakukan oleh BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai.

3.3.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaa tahun 2023 sebesar Rp. 0,00. Hal ini karena tidak adanya kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai.

3.3.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2023 sebesar Rp. 79.818,00 Merupakan selisih lebih jumlah arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp. 678.102.250,00 dibandingkan dengan jumlah arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp. 678.022.432,00 yang merupakan pengeluaran untuk pengeluaran perhitungan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a.	**ARUS KAS MASUK**		
1)	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	8.796.343,00	0,00
2)	R/K Penerimaan	669.305.907,00	0,00
Jumlah		**678.102.250,00**	**0,00**

Rincian penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagai berikut :

Tabel 3.17 Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Arus Kas Masuk

No.	Uraian	Nilai Penerimaan	
1	Iuran Wajib Pegawai	Rp	1.085.834,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp	5.962.190,00
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp	209.799,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	1.538.520,00
Jumlah		Rp	**8.796.343,00**

Tabel 3.18 Rincian R/K Penerimaan Arus Kas Masuk

No.	Uraian	Nilai Penerimaan	
1	Arus masuk kas aktivitas operasi	Rp	383.432.937,00
2	Arus keluar kas aktivitas operasi	Rp	285.793.152,00
3	Arus kas bersih aktivitas transitoris	Rp	79.818,00
Jumlah		Rp	**669.305.907,00**

Tabel 3.19 Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
a.	**ARUS KAS KELUAR**		
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8.796.343,00	0,00
2	R/K Pengeluaran	669.226.089,00	0,00
Jumlah		**678.022.432,00**	**0,00**

Tabel 3.20 Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Arus Kas Keluar

No.	Uraian	Nilai Pengeluaran
1	Iuran Wajib Pegawai	Rp 1.085.834,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 5.962.190,00
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 209.799,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp 1.538.520,00
Jumlah		Rp **8.796.343,00**

Tabel 3.21 Rincian R/K Penerimaan Arus Kas Keluar

No.	Uraian	Nilai Penerimaan
1	Arus masuk kas aktivitas operasi	Rp 383.432.937,00
2	Arus keluar kas aktivitas operasi	Rp 285.793.152,00
Jumlah		Rp **669.226.089,00**

3.3.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/Penurunan Kas sebesar Rp. 97.719.603,00 merupakan penjumlahan dari ketiga arus kas bersih, yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasi, Arus Kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih aktivitas pendanaan, dan Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris.

3.4 Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur yakni pendapatan-LO dan beban-LO serta surplus/defisit operasional. Pengakuan atas pendapatan-LO dan beban-LO berdasarkan *acrual basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun anggaran 2023. Penjelasan mengenai akun-akun laporan operasional tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

3.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan–LO adalah hak BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada periode Tahun 2023 BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki Pendapatan Rp. 383.432.937,00 seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini :

Tabel 3.22 Pendapatan – LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
Pendapatan-LO	383.432.937,00	0,00	383.432.937,00	**100**

3.4.2 Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan. Saldo beban tersebut hanya terdiri dari beban operasi dengan rincian dan komposisi sebagai berikut :

Tabel 3.23 Beban-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
BEBAN DAERAH	**275.427.332,00**	**0,00**	**275.427.332,00**	**100**
BEBAN OPERASI	**275.427.332,00**	**0,00**	**275.427.332,00**	**100**
Beban Pegawai	226.562.082,00	0,00	226.562.082,00	100
Beban Barang dan Jasa	48.865.250,00	0,00	48.865.250,00	100
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0

3.4.3 Kegiatan Non Operasional

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, kerugian penurunan nilai aset, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Adapun surplus/deficit dari kegiatan non operasional BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2023 berjumlah Rp. 0,00. Adapun rincinnya sebegai berikut :

Tabel 3.24 Kegiatan Non Operasional

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERSIONAL	0,00	0,00	0,00	-
Surplus/defisit penjualan aset nonlancar	0,00	0,00	0,00	-
(Kerugian) Penurunan nilai asset	0,00	0,00	0,00	-
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0,00	0,00	0,00	-

3.4.4 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa merupakan peristiwa atau transaksi yang bersifat tidak biasa dan jarang terjadi. Item ini juga bukan bagian dari kegiatan operasional OPD yang kemudian kegiatan tersebut tidak diharapkan terjadi secara berkelanjutan. Salah contoh pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa dan beban luar biasa.

Pada BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai untuk item pos luar biasa seperti pendapatan luar biasa dan beban luar biasa tidak di temui pada laporan operasional BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai, sehingga hal ini tidak akan diberikan penjelasan pada laporan operasional.

3.4.5. Surplus/Defisit LO

Adapun surplus/defisit LO BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp. 108.005.605,00. Nilai ini diperoleh dari akumulasi pendapatan dikurangi dengan akumulasi beban Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.25 Serflus/Defisit LO

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
SURPLUS / DEFISIT	108.005.605,00	0,00	108.005.605,00	100

3.5 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.26 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

	2023	2022
EKUITAS AWAL	300.000,00	-
RK KONSOLIDASI KAS BLUD	(2.883.719,00)	-
RK KONSOLIDASI ASET	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	108.005.605,00	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediannya	-	-
Selisih Revaluasi Asset Tetap	-	-
Lain-lain	-	-
Ekuitas Akhir	**105.421.886,00**	-

3.5.1 Ekuitas Awal

Saldo Awal Ekuitas BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 sebesar Rp 300.000,00 merupakan saldo pembukaan rekening di bulan Oktober tahun 2023.

3.5.2 RK Konsolidasi Kas BLUD

RK konsolidasi kas BLUD dengan nominal Rp. 2.883.719,00 merupakan setoran ke Kas Daerah yang dilakukan atas arahan dari tim reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terkait dana JKN sebelum BLUD.

3.5.3 Surplus/defisit – LO

Surplus/defisit LO merupakan selisih antara pendapatan LO dengan beban. BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 mengalami surplus LO sebesar Rp 108.005.605,00. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas laporan operasional.

3.5.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas untuk dikonsolidasikan BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 sebesar Rp 105.421.886,00.

3.6 Penjelasan Pos – Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022. Berikut ini disajikan penjelasan atas saldo akun yang tercantum dalam Neraca posisi 31 Desember 2023.

3.6.1 Aset

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.27 Aset

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
ASET	105.421.886,00	300.000,00
ASET LANCAR	105.421.886,00	300.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	100.000,00	100.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	100.000,00	100.000,00
Kas di BLUD	94.856.066,00	100.000,00
Kas Lainnya Setara Kas	-	-
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	-	-
Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	-	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLUD	-	-
Penyisihan Piutang Tidak tertagih	-	-
Belanja Dibayar Dimuka	-	-
Bagian Lancar Pinjaman	-	-
Uang Muka Belanja	-	-
Persediaan Badan Layanan Umum	10.365.820,00	-
JUMLAH ASET LANCAR	105.421.886,00	300.000,00
ASET TETAP	-	-
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	-	-
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	-	-
JUMLAH ASET TETAP	-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	-	-

ASET LAINNYA	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Dana Kelolaan	-	-
Aset Yang Di Batasi Penggunaannya	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain-Lain	-	-
Akumulasi Amortisasi	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA	-	-
JUMLAH ASET	**105.421.886,00**	**300.000,00**

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.100.000,00 yang mana ini merupakan saldo saat pembukaan rekening bendahara penerimaan BLUD.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.100.000,00. Ini merupakan saldo saat pembukaan rekening bendahara pengeluaran BLUD.

c. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.365.820,00 dengan persentase sebesar 100% dari saldo persediaan tahun 2023. Adapun rincian persediaan tersebut terdiri atas:

Tabel 3.28 Persediaan

URAIAN	(Rp)
Alat listrik – Genset	10.365.820,00

3.6.2 Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00. Hal ini disebabkan BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai tidak memiliki utang beban dan kewajiban kepada pihak ketiga selama Tahun Anggaran 2023.

3.6.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 105.421.886,00. Nilai ekuitas sama dengan nilai yang ada di Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023.

3.7 Pengungkapan atas Pos – Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan Dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual pada Perangkat Daerah.

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan dipimpin oleh seorang Direktur dengan 3 Sub Bagian serta 2 Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional 49 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 35 orang.

4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 terdiri dari :

1. Direktur BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai: dr. Selvyani Pasomba
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program : Abd. Nazar Ahmad, SKM
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset : Yasmin Saalan, SKM
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Ngatimin Sarbono, A.Md.Kep, SKM
5. Kepala Seksi Pelayanan Medik : Heprin Sosibong, A.Md.Kep
6. Kepala Seksi Keperawatan Medik : Helda Yuningsih Lasabung, S.Kep.,Ns

Berikut rekapitulasi Aparatur Sipil Negara BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan per 31 Desember 2023 berjumlah 49 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara
BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Per 31 Desember 2023

	Jumlah
Gol. III	20
Gol. II	3
Gol. X	2
Gol. IX	4
Gol. VII	20
Total	**49**

BAB V

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 secara keseluruhan. Semoga catatan atas Laporan Keuangan ini membantu, mempermudah dan memperjelas pemahaman pembaca Laporan Keuangan dalam mengevaluasi kinerja BLUD UPTD RS Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan.

Apal Buko Selatan, 15 Maret 2024

DIREKTUR BLUD UPTD RS PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
RS PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN

dr. SELVYANI PASOMBA
NIP.19920908 201903 2 004

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN REALISASI BIAYA LAYANAN UMUM DAERAH

(SUMBER DANA BLUD)

AKHIR TAHUN

TAHUN 2023

OPD : 1.02.0.00.0.00.03 - RSUD

Unit Pelaksana : 1.02.0.00.0.00.03.01 - RSUD Pratama BilaBanggai

NO	URAIAN	ANGGARAN	2023	%	2022
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	4.800.000,00	8.111.169,00	168,98	-
3	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan	625.086.041,00	375.321.768,00	60,04	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	-	-	-	-
7	Pendapatan APBN/APBD	-	-	-	-
8	**JUMLAH PENDAPATAN BLUD**	**629.886.041,00**	**383.432.937,00**	**60,87**	-
9					
10	**JUMLAH PENDAPATAN**	**629.886.041,00**	**383.432.937,00**	**60,87**	-
11					
12	**BELANJA**				
13	**BELANJA OPERASI**				
14	Belanja Pegawai	394.132.195,00	226.562.082,00	57,48	-
15	Belanja Barang dan Jasa	218.572.180,00	59.231.070,00	27,10	-
16	Belanja Bunga	-	-	-	-
17	Belanja Lain - Lain	-	-	-	-
18	**JUMLAH BELANJA OPERASI**	**612.704.375,00**	**285.793.152,00**	**46,64**	-
19					
20	**BELANJA MODAL**				
21	Belanja Tanah	-	-	-	-
22	Belanja Peralatan dan Mesin	18.000.596,00	-	-	-
23	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
24	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
25	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
26	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
27	**JUMLAH BELANJA MODAL**	**18.000.596,00**	-	-	-
28					
29	**JUMLAH BELANJA**	**630.704.971,00**	**285.793.152,00**	**45,31**	-
30					
31	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT**	**(818.930,00)**	**97.639.785,00**	**(11.922,85)**	-
32					
33	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**				
34	**PEMBIAYAAN**				
35	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
36	Penggunaan SiLPA	818.930,00	-	-	-
37	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-
38	Penerimaan dari Divestasi	-	-	-	-
39	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-	-	-
40	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**818.930,00**	-	-	-
41					
42	**Arus Keluar Kas**				
43	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
44	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
45	Pengeluaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
46	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-	-	-
47	Penyetoran Kas BLUD Ke kas Daerah	-	2.947.574,00	-	-
48	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	-	-	-	-

NO	URAIAN	ANGGARAN	2023	%	2022
1	2	3	4	5	6
49	**JUMLAH Arus Keluar Kas**	-	**2.947.574,00**	-	-
50					
51					
52	**JUMLAH PMBIAYAAN**				
53					
54	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**	-	**100.587.359,00**	-	-

Banggai Kepulauan, 31 Desember 2023
Pimpinan BLUD RS Pratama Bilabanggai

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
RS PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN

dr. Selvyani Pasomba
NIP : 19920908 201903 2 004

NO	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
56	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	**(2.947.574,00)**	-	**(2.947.574,00)**	-
57					
58	**Arus Kas dari Aktifitas Transitoris**				
59	**Arus Masuk Kas**				
60	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	8.796.343,00	-	8.796.343,00	-
61	R/K Penerimaan	672.253.481,00	-	672.253.481,00	-
62	**Jumlah Arus Masuk Kas**	**681.049.824,00**	-	681.049.824,00	-
63	**Arus Keluar Kas**				
64	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	8.796.343,00	-	8.796.343,00	-
65	R/K Pengeluaran	669.226.089,00	-	669.226.089,00	-
66	**Jumlah Arus Keluar Kas**	**678.022.432,00**	-	678.022.432,00	-
67	**Arus Kas dari Aktifitas Transitoris**	**3.027.392,00**	-	**3.027.392,00**	-
68					
69	**Kenaikan/Penurunan Arus Kas**	**97.719.603,00**	-	**97.719.603,00**	-
70					

JUMLAH ARUS KAS BERSIH	94.756.066,00
SALDO AWAL	300.000,00
SALDO AKHIR	95.056.066,00

Banggai Kepulauan, 31 Desember 2023

Pimpinan BLUD RS Pratama Bilabanggai

dr. Selvyani Pasomba

NIP : 19920908 201903 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN OPERASIONAL

(SUMBER DANA BLUD)

Akhir Tahun 2023

OPD : 1.02.0.00.0.00.03 - RSUD

Unit Pelaksana : 1.02.0.00.0.00.03.01 - RSUD Pratama BilaBanggai

NO	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
2	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	8.111.169,00	-	8.111.169,00	100,00
3	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan	375.321.768,00	-	375.321.768,00	100,00
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	-	-	-	-
7	Pendapatan APBN / APBD	-	-	-	-
8	**JUMLAH PENDAPATAN**	**383.432.937,00**	-	**383.432.937,00**	**100,00**
9					
10	**BEBAN**				
11	Beban Pegawai	226.562.082,00	-	226.562.082,00	100,00
12	Beban Persediaan	14.885.250,00	-	14.885.250,00	100,00
13	Beban Jasa	4.080.000,00	-	4.080.000,00	100,00
14	Beban Pemeliharaan	-	-	-	-
15	Beban Langganan Daya dan Jasa	-	-	-	-
16	Beban Perjalanan Dinas	29.900.000,00	-	29.900.000,00	100,00
17	Beban Penyusutan Aset	-	-	-	-
18	Beban Bunga	-	-	-	-
19	Beban Lain-Lain	-	-	-	-
20	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
21	**JUMLAH BEBAN**	**275.427.332,00**	-	**275.427.332,00**	**100,00**
22					
23	**SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL**	**108.005.605,00**	-	**108.005.605,00**	**100,00**
24					
25	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
26	Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	-	-	-	-
27	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	-	-	-	-
28	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-	-
29	Lainnya	-	-	-	-
30	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	-	-	-	-
31					
32	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**	**108.005.605,00**	-	**108.005.605,00**	**100,00**
33					
34	**POS LUAR BIASA**				
35	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
36	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
37	**JUMLAH POS LUAR BIASA**	-	-	-	-
38					
39	**SURPLUS/DEFISIT LO**	**108.005.605,00**	-	**108.005.605,00**	**100,00**
40					

Banggai Kepulauan, 31 Desember 2023

Pimpinan BLUD RS Pratama Bilabanggai

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN RS PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN

dr. Selvyani Pasomba

NIP : 19920908 201903 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (BLUD)

Akhir Tahun 2023

OPD : 1.02.0.00.0.00.03 - RSUD

Unit Pelaksana : 1.02.0.00.0.00.03.01 - RSUD Pratama BilaBanggai

NO	URAIAN	2023	2022
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	300.000,00	-
2	RK KONSOLIDASI KAS BLUD	(2.883.719,00)	-
3	RK KONSOLIDASI ASET	-	-
4	SURPLUS/DEFISIT LO	108.005.605,00	-
5	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKSANAAN/KESALAHAN MENDASAR		
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	SELISIH REVALUASI ASSET TETAP	-	-
8	LAIN-LAIN	-	-
9	EKUITAS AKHIR	105.421.886,00	-

Banggai Kepulauan, 31 Desember 2023

Pimpinan BLUD RS Pratama Bilabanggai

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
RS PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN

dr. Selvyani Pasomba

NIP : 19920908 201903 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN NERACA

(SUMBER DANA BLUD)

Akhir Tahun 2023

OPD : 1.02.0.00.0.00.03 - RSUD

Unit Pelaksana : 1.02.0.00.0.00.03.01 - RSUD Pratama BilaBanggai

NO	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
1	**ASET**				
2	**ASET LANCAR**				
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	100.000,00	100.000,00	-	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan	100.000,00	100.000,00	-	-
5	Kas di BLUD	94.856.066,00	100.000,00	94.756.066,00	94.756,07
6	Kas Lainnya Setara Kas	-	-	-	-
7	Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	-	-	-	-
8	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	-	-	-	-
9	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	-	-	-	-
10	Penyisihan Piutang Tidak tertagih	-	-	-	-
11	Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-	-
12	Bagian Lancar Pinjaman	-	-	-	-
13	Uang Muka Belanja	-	-	-	-
14	Persediaan Badan Layanan Umum	10.365.820,00	-	10.365.820,00	-
15	**JUMLAH ASET LANCAR**	**105.421.886,00**	**300.000,00**	**105.121.886,00**	**35.040,63**
16					
17	**ASET TETAP**				
18	Tanah	-	-	-	-
19	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
20	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
21	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
22	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
23	Kostruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
24	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
25	**JUMLAH ASET TETAP**	-	-	-	-
26					
27	**JUMLAH ASET TETAP**	-	-	-	-
28					
29	**PIUTANG JANGKA PANJANG**				
30	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-
31	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
32	Penyisihan Piutang Tidak tertagih	-	-	-	-
33	**JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG**	-	-	-	-
34					
35	**ASET LAINNYA**				
36	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
37	Dana Kelolaan	-	-	-	-
38	Aset Yang Di Batasi Penggunaannya	-	-	-	-
39	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
40	Aset Lain-Lain	-	-	-	-
41	Akumulasi Amortisasi	-	-	-	-
42	**JUMLAH ASET LAINNYA**	-	-	-	-
43					
44	**JUMLAH ASET**	**105.421.886,00**	**300.000,00**	**105.121.886,00**	**35.040,63**
45					
46	**KEWAJIBAN**				

NO	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
47	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**				
48	Utang Usaha	-	-	-	-
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-
50	Utang Pajak	-	-	-	-
51	Utang Kepada KUN	-	-	-	-
52	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
53	Belanja Yang Masih Harus di Bayar	-	-	-	-
54	Pendapatan di Terima dimuka	-	-	-	-
55	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
56	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	-	-	-	-
57					
58	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**				
59	Utang Jangka Panjang	-	-	-	-
60	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	-	-	-	-
61	**JUMLAH KEWAJIBAN**	-	-	-	-
62					
63	**EKUITAS**				
64	EKUITAS	105.421.886,00	300.000,00	105.121.886,00	35.040,63
65	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**105.421.886,00**	**300.000,00**	**105.121.886,00**	**35.040,63**
66					

Banggai Kepulauan, 31 Desember 2023
Pimpinan BLUD RS Pratama Bilabanggai

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
RS PRATAMA BILABANGGAI BUKO SELATAN

dr. Selvyani Pasomba
NIP : 19920908 201903 2 004

LAMPIRAN 56

LAPORAN KEUANGAN RSUD TRIKORA SALAKAN

TAHUN 2023

LAPORAN KEUANGAN

TANGGAL 31 DESEMBER 2023

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SURAT PERNYATAAN DIREKTUR	i
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	ii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	2
NERACA	3
LAPORAN OPERASIONAL	4
LAPORAN ARUS KAS	5
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7- 23
DFTAR LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1, RASIO KEUANGAN	
LAMPIRAN 2, RINCIAN PERSEDIAAN LAYANAN	
LAMPIRAN 3, RINCIAN PERSEDIAAN NON-LAYANAN	

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
RSUD TRIKORA SALAKAN
Jl. Trans Peling Km 5 No. 01 Salakan Kode Pos 94785
Telepon (0462) 2222118, Email : rsudtrikorasalakan@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SULAWESI TENGAH
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Feldy Deki, Sp.B
NIP : 19880517 201704 1 001
Alamat kantor : Jl. Trans Peling Km. 5 Tompudau, Tinangkung, Banggai Kepulauan
Jabatan : Direktur

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Banggai Kepulauan tahun 2023 terlampir.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indenesia (IAI)
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat dengan lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Banggai Kepulauan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani sesuai ketentuan dalam perjanjian kerjasama dan peraturan yang berlaku.

Salakan, 30 Maret 2024
Yang menyatakan,

dr. Feldy Deki, Sp. B
Direktur
NIP 19880517 201704 1 001

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DRS. THOMAS, BLASIUS, WIDARTOYO & REKAN
(CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS)
Izin Usaha No. KEP-43/KM.1/2010

Jl. Taman Kendangsari No. 7 Surabaya 60292
Telp (031) 8496920 Fax (031) 8496920
E-mail widartoyo@gmail.com
www.kap-tbw.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00066/3.0213/AU.5/11/0550-1/1/III/2024

Kepada
Yth. Direktur RSUD Trikora Salakan
Kabupaten Banggai Kepulauan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan RSUD Trikora Salakan, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023 serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan RSUD Trikora Salakan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap RSUD Trikora Salakan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan periode tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 tidak dilakukan audit oleh akuntan publik, namun kami telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat bahwa saldo per 31 Desember 2022 tidak mengandung kesalahan penyajian material yang berdampak pada laporan keuangan periode tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Penekanan Suatu Hal

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, mengatur antara lain:
   a. Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pasal 3 ayat (1));
   b. PKP Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang (Pasal 20 ayat (1));
2. RSUD Trikora Salakan terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam klasifikasi Instansi Pemerintah (status BLU) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa obat kepada pasien rawat jalan dan belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
3. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 (4a)).

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan RSUD Trikora Salakan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi RSUD Trikora Salakan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan RSUD Trikora Salakan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal RSUD Trikora Salakan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan RSUD Trikora Salakan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh

hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan RSUD Trikora Salakan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Surabaya, 30 Maret 2024
Kantor Akuntan Publik
Drs. Thomas, Blasius, Widartoyo & Rekan

Drs. Widartoyo, Ak, MM, M.Si, CPA, CA
Akuntan Publik Reg. No. AP.0550

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan Nomor	2023			Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
I. Pendapatan					
1. Pendapatan BLUD					
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	4.2.1	18.235.242.925	18.108.522.425	99,31	16.542.538.517
Pendapatan usaha lainnya	4.2.3	2.996.129	2.996.129	100,00	-
Jumlah pendapatan BLUD		**18.238.239.054**	**18.111.518.554**	**99,31**	**16.542.538.517**
2. Pendapatan Transfer APBD					
Alokasi anggaran belanja barang dan jasa	4.2.4	9.635.627.791	8.809.966.236	91,43	9.281.772.227
Alokasi anggaran belanja modal	4.2.4	259.274.357	259.274.357	100,00	4.426.685.806
Alokasi Bantuan Dana Tak Terduga	4.2.4				
Jumlah pendapatan transfer APBD		**9.894.902.148**	**9.069.240.593**	**91,66**	**13.708.458.033**
Jumlah pendapatan		**28.133.141.202**	**27.180.759.147**	**96,61**	**30.250.996.550**
II. Belanja					
1. Belanja Operasi					
Belanja pegawai	4.2.5	11.143.169.755	10.241.355.924	91,91	13.118.910.412
Belanja barang dan jasa	4.2.6	16.727.700.961	15.232.763.714	91,06	12.705.400.332
Jumlah belanja operasi		**27.870.870.716**	**25.474.119.638**	**91,40**	**25.824.310.744**
2. Belanja Modal					
Belanja gedung dan bangunan	4.2.9	259.274.357	259.103.357	99,93	2.743.589.636
Jumlah belanja modal		**259.274.357**	**259.103.357**	**99,93**	**4.426.685.806**
Jumlah belanja		**28.130.145.073**	**25.733.222.995**	**91,48**	**30.250.996.550**
Surplus (Defisit) LRA		**2.996.129**	**1.447.536.152**		-
III. Pembiayaan					
1. Penerimaan Pembiayaan					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI					
Penerimaan pinjaman	4.2.10			-	
Penggunaan SILPA tahun lalu	4.2.11	-	-		
Jumlah penerimaan pembiayaan		-	-	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan					
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI					
Pembayaran pokok pinjaman	4.2.12				
Administrasi bank/bunga bank	4.2.13				
Jumlah pengeluaran pembiayaan		-	-	-	-
Pembiayaan neto		-	-	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		**2.996.129**	**1.447.536.152**	**48.313,55**	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Salakan, 30 Maret 2024
Direktur

dr. Feldy Deki, Sp. B
NIP. 19880517 201704 1 001

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Per Tanggal 31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Saldo anggaran lebih awal	-	-	-	-
Penggunaan SAL	-	-	-	-
Sub total	**-**	**-**	**-**	**-**
SiLPA/SiKPA sesuai LRA	1.447.536.152	-	1.447.536.152	-
Sub total	**1.447.536.152**	**-**	**1.447.536.152**	**-**
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	**1.447.536.152**	**-**	**1.447.536.152**	**-**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Salakan, 30 Maret 2024
Direktur

dr. Feldy Deki, Sp. B
NIP. 19880517 201704 1 001

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NERACA
Per Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan Nomor	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
Aset					
Aset Lancar					
Kas di Bendahara Pengeluaran					
Kas dan setara kas	4.3.1	1.447.536.152	-	1.447.536.152	-
Piutang layanan	4.3.2	1.608.210.700	3.477.518.700	(1.869.308.000)	(53,75)
Piutang lain-lain	4.3.3	-	525.215.509	(525.215.509)	(100,00)
Persediaan	4.3.4	4.358.004.794	3.350.784.423	1.007.220.371	30,06
Jumlah aset lancar		**7.413.751.646**	**7.353.518.632**	**60.233.014**	**0,82**
Aset Tetap					
Tanah	4.3.5	1.461.998.000	1.461.998.000	-	-
Peralatan dan mesin	4.3.5	35.007.114.390	35.007.114.390	-	-
Gedung dan bangunan	4.3.5	22.947.789.605	22.888.504.248	59.285.357	0,26
Jalan, irigasi dan jaringan	4.3.5	2.715.462.000	2.715.462.000	-	-
Aset tetap lainnya	4.3.5	3.096.050	3.096.050	-	-
Akumulasi penyusutan	4.3.5	(28.857.257.207)	(23.476.353.143)	(5.380.904.064)	22,92
Jumlah aset tetap		**33.278.202.838**	**38.599.821.545**	**(5.321.618.707)**	**(13,79)**
JUMLAH ASET		**40.691.954.484**	**45.953.340.177**	**(5.261.385.693)**	**(11,45)**
Kewajiban dan Ekuitas					
Kewajiban					
Kewajiban Jangka Pendek					
Utang usaha	4.3.6	125.520.000	-	125.520.000	-
Belanja yang masih harus dibayar	4.3.7	3.502.991.628	5.326.825.262	(1.823.833.634)	(34,24)
Jumlah kewajiban jangka pendek		**3.628.511.628**	**5.326.825.262**	**(1.698.313.634)**	**(31,88)**
Jumlah Kewajiban		**3.628.511.628**	**5.326.825.262**	**(1.698.313.634)**	**(31,88)**
Ekuitas	4.3.8	**37.063.442.856**	**40.626.514.915**	**(3.563.072.060)**	**(8,77)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**40.691.954.484**	**45.953.340.177**	**(5.261.385.693)**	**(11,45)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Salakan, 30 Maret 2024
Direktur

RSUD TRIKORA SALAKAN

dr. Feldy Deki, Sp. B
NIP. 19809[illegible] 201704 1 001

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan Nomor	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
Kegiatan Operasional					
Pendapatan					
Pendapatan layanan dari masyarakat	4.4.1	16.239.214.425	-	16.239.214.425	-
Pendapatan APBD	4.4.2	15.896.566.286	-	15.896.566.286	-
Pendapatan usaha lainnya	4.4.3	2.996.129	-	2.996.129	-
Jumlah Pendapatan		**32.138.776.840**	**-**	**32.138.776.840**	**-**
Beban					
Beban pegawai	4.4.4	16.249.327.476	-	16.249.327.476	-
Beban barang dan jasa	4.4.5	8.062.136.789	-	8.062.136.789	-
Beban persediaan	4.4.6	5.561.887.997	-	5.561.887.997	-
Beban pemeliharaan	4.4.7	161.984.000	-	161.984.000	-
Beban perjalanan dinas	4.4.8	132.667.119	-	132.667.119	-
Beban penyusutan dan amortisasi	4.4.9	5.380.904.064	-	5.380.904.064	-
Beban lain-lain		199.818.000	-	199.818.000	-
Jumlah Beban		**35.748.725.445**	**-**	**35.748.725.445**	**-**
Surplus/Defisit Operasional		**(3.609.948.605)**	**-**	**(3.609.948.605)**	**-**
SURPLUS/DEFISIT LO		**(3.609.948.605)**	**-**	**(3.609.948.605)**	**-**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Salakan, 30 Maret 2024
Direktur

RSUD TRIKORA SALAKAN

dr. Fadly Deki, Sp. B
NIP. 19880517 201704 1 001

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Kenaikan (Penurunan) %
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Arus Kas Masuk				
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	18.108.522.425	16.542.538.517	1.565.983.908	9,47
Pendapatan APBD	9.069.240.593	13.708.458.033	(4.639.217.440)	(33,84)
Pendapatan usaha lainnya	2.996.129	-	2.996.129	-
Jumlah arus kas masuk	**27.180.759.147**	**30.250.996.550**	**(3.070.237.403)**	**(10,15)**
Arus Kas Keluar				
Belanja pegawai	10.241.355.924	13.118.910.412	(2.877.554.488)	(21,93)
Belanja barang dan jasa	15.232.763.714	12.705.400.332	2.527.363.382	19,89
Jumlah arus kas keluar	**25.474.119.638**	**25.824.310.744**	**(350.191.106)**	**(1,36)**
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	**1.706.639.509**	**4.426.685.806**	**(2.720.046.297)**	**(61,45)**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk	-	-	-	-
Arus Kas Keluar				
Perolehan peralatan dan mesin	-	1.683.096.170	(1.683.096.170)	(100,00)
Perolehan gedung dan bangunan	259.103.357	2.743.589.636	(2.484.486.279)	(90,56)
Jumlah arus kas keluar	**259.103.357**	**4.426.685.806**	**(4.167.582.449)**	**(94,15)**
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	**(259.103.357)**	**(4.426.685.806)**	**4.167.582.449**	**(94,15)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
Arus Kas Keluar			-	
Penyetoran ke Kas Negara	-	-	-	-
Jumlah arus kas keluar	-	-	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	-	-	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris				
Arus Kas Masuk	-	-	-	-
Arus Kas Keluar			-	-
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	-	-	-	-
Kenaikan/penurunan kas	**1.447.536.152**	**-**	**1.447.536.152**	**-**
Saldo awal kas setara kas	-	-	-	-
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	**1.447.536.152**	**-**	**1.447.536.152**	**-**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Salakan, 30 Maret 2024
Direktur

RSUD TRIKORA SALAKAN

dr. Feldy Deki, Sp. B
NIP. 19880527 201704 1 001

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
1. Ekuitas awal	40.626.514.915	40.626.514.915	-	-
2. Perubahan				
Surplus(defisit) - LO	(3.609.948.605)	-	(3.609.948.605)	-
EKUITAS AKHIR	**37.016.566.311**	**40.626.514.915**	**(3.609.948.605)**	**(8,89)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Salakan, 30 Maret 2024
Direktur

RSUD TRIKORA SALAKAN

dr. Feldy Deki, Sp. B
NIP. 19880517 201704 1 001

I. Pendahuluan

Untuk mewujudkan manajemen rumah sakit yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan operasional rumah sakit harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional RSUD menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b) Manajemen
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
c) Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan RSUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;perundang-undangan;
b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana RSUD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e) Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi RSUD berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan RSUD apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

a) Undang–Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b) Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
c) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

d) Peraturan Pemerintah nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 171);
e) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140);
f) Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
g) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
h) Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1818 tahun 2015); dan
i) Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan nomor 299 tahun 2023 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka penyajian laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan peraturan tersebut.

Perkembangan PSAP Baru

1. PSAP nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan efektif berlaku per 1 Januari 2021.
2. PSAP nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi Efektif berlaku per 1 Januari 2022.
3. PSAP nomor 17 tentang Properti Investasi Efektif berlaku per 1 Januari 2022.

Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan RSUD Trikora Salakan Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Berbasis Akrual Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Pendekatan penyusunan laporan keuangan
- 1.4 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
- 2.1 Sejarah pendirian
- 2.2 Tempat kedudukan
- 2.3 Visi, misi dan motto
- 2.4 Struktur organisasi
- 2.5 Kepegawaian

Bab III. Kebijakan Akuntansi
- 3.1 Entitas pelaporan
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4 Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan rekening-rekening akuntansi

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Bab IV. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keungan
- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 4.3 Neraca
- 4.4 Laporan Operasional
- 4.5 Laporan Arus Kas
- 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V. Penutup

II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

2.1 Sejarah Singkat

Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan rumah sakit milik pemerintah yang berlokasi di Salakan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu satuan perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas Badan, dan Kecamatan kabupaten Banggai Kepulauan.

Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 Tahun 2018 tentang uaraian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD Trikora Salakan yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah.

2.2 Produk Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah rumah sakt tipe C dengan 5 pelayanan dasar diantaranya:
1. Pelayanan administrasi dan manajemen;
2. Pelayanan medis;
3. Pelayanan gawat darurat;
4. Pelayanan keperawatan; dan
5. Pelayanan rekam medis.

Pelayanan jasa yang ditawarkan oleh pihak rumah sakit kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan adalah:
1. Instalasi Rawat Jalan, terdiri atas 7 poliklinik: umum, gigi, mata, kandungan, syaraf, penyakit dalam dan anak
2. Instalasi Rawat Inap, terdiri atas: VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, HCU, PICU, Isolasi, VK,.
3. Unit Gawat Darurat (UGD).
4. Ruang operasi.
5. Instalasi Radiologi dan CT Scan.
6. Instalasi Laboratorium Patologi Kinik.
7. Instalasi Farmasi.
8. Instalasi Gizi.
9. Instalasi Rehabilitasi Medik.

2.3 Tempat Kedudukan

Jl. Trans Peling Km. 5 Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, telp. (0462)2222118

2.4 Visi, Misi dan Tujuan

2.4.1 Visi

Banggai Kepulauan Berdaya Saing, Sejahtera dan Merata.

2.4.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, misi pelayanan yang dikembangkan Rumah Sakit adalah:

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
2. Menurunnya angka stunting;
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian covid-19.

2.4.3 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia.

NPWP: 95.383.727.5.832.000

2.5 Struktur Organisasi

	31-Dec-23
Pejabat Pengelola:	
Direktur	: dr. Feldy Deki, Sp. B
Kepala Bagian Tata Usaha	: Demiyanus Soolani, SKM. M.Kes
Kepala Bidang Pelayanan	: Marson Biathan, SH. M.Kes
Kepala Bidang Penunjang	: Arung Cina, S.Si, Apt

2.6 Kepegawaian

Terdiri atas:

	31-Dec-23
Pegawai ASN	106 orang
Pegawai PPPK	68 orang
Pegawai honorer	130 orang
Jumlah Karyawan	**304 orang**

III. Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Pelaporan

1. RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini RSUD Luwuk Kabupaten Banggai menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan Keuangan RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan ini sebagai entitas pelaporan tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, karena terdapat perbedaan kebijakan akuntansi.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan- LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Basis akrual adalah pengakuan transaksi pada saat terjadinya, tidak terbatas pada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat jasa sudah diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya, tidak terbatas pada saat transaksi pengeluaran kas untuk keperluan operasional, khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan histroris. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan umtuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasar akrual (*accrual basis*);
c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset RSUD Luwuk Kabupaten Banggai; dan
e. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan *(perpectual)* .

Dalam menyusun laporan keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan *(adjustment)* ke tahun buku berikutnya.

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi

3.4.1 Dasar Akuntansi

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh KSAP dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan keuangan (CaLK). Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

3.4.2 Kas dan Setara Kas

Pengertian

Merupakan uang tunai dan simpanan di bank dalam bentuk rekening giro dan deposito untuk masa paling lama 3 bulan sejak tanggal penempatan, yang siap dan bebas digunakan.

Setara kas (*cash on equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominalnya.

Unsur-unsur dalam kas dan setara kas, antara lain:

a. Kas di Bendahara Penerimaan; dan
b. Kas di Bendahara Pengeluaran.

Pengakuan

Pada saat diterima atau dibayarkan.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

3.4.2 Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

Pengungkapan

- Rincian kas di bendahara, rekening giro dan deposito; dan
- Untuk deposito diungkapkan besarnya suku bunga, jangka waktu dan nama bank.

3.4.3 Piutang Layanan

Pengertian

Merupakan pendapatan jasa layanan yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca 31 Desember.

Pengakuan

Bertambah pada saat pasien pulang, berkurang pada saat diterima pembayaran atau koreksi kesalahan maupun penghapusan.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal dan disesuaikan dengan penurunan nilai (jika ada).

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

- Dirinci per nama pasien dan penanggung pembayaran.

3.4.4 Persediaan

Pengertian

Merupakan aset berupa barang habis pakai medis dan non medis yang disediakan untuk pelayanan kesehatan, pemeliharaan aset dan keperluan administrasi.

Pengakuan

Persediaan diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat pemakaian atau penyerahan. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah harga terakhir karena perputaran persediaan tergolong cepat.

Pengukuran

Sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi mana yang lebih rendah. Nilai realisasi adalah nilai wajar dikurang beban untuk menjual persediaan. Persediaan yang kadaluarsa dikeluarkan dari saldo persediaan.

Penyajian

Sisa persediaan disajikan di neraca, sedangkan persediaan yang terpakai atau digunakan disajikan sebagai beban persediaan dalam laporan operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis persediaan; dan
- Dikeluarkan dari persediaan jika terdapat persediaan yang kadaluarsa dalam periode laporan.

3.4.5 Aset Tetap

Pengertian

Aset tetap adalah aset berwujud yang:

a. Dimiliki untuk digunakan dalam proses operasional, produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif;
b. Digunakan lebih dari satu tahun;
c. Berwujud;
d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
f. Memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

3.4.5 Aset Tetap (Lanjutan)

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat siap digunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan posisi dan kondisi yang direncanakan. Jika aset tetap tidak memberikan manfaat lagi untuk kegiatan operasional, maka harus dieliminasi dari aset tetap.

Pengakuan awal aset tetap dalam neraca awal RSUD menggunakan dasar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan; atau nilai wajar.

Pengukuran

Seluruh biaya yang direalisasi untuk pengadaan aset tetap sejak perencanaan sampai pada posisi dan kondisi aset tetap dapat digunakan, maka biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya perolehan. Namun jika biaya perolehan tersebut berbeda signifikan dengan nilai wajar untuk memperoleh aset yang bersangkutan, maka perbedaan signifikan tersebut diakui sebagai kerugian dan dilaporkan dalam laporan operasional.

Secara periodik, nilai tercatat aset tetap harus dilakukan review dan dilakukan penyesuaian jika terdapat perbedaan signifikan dengan nilai wajarnya. Jika nilai tercatat lebih besar dari nilai wajar, maka harus diakui adanya kerugian penurunan nilai dan dilaporkan dalam laporan operasional. Sedangkan jika nilai tercatat lebih rendah dari nilai wajar, maka dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan akumulasi penyusutan.

Kapitalisasi pengeluaran yang memenuhi syarat aset tetap ditentukan minimal Rp300.000,-. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomi dari kondisi normal aset tetap, tidak boleh dikapitalisasi.

Pengeluaran di bawah minimal jumlah kapitalisasi diakui sebagai biaya barang dan jasa.

Metode penyusutan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan ketentuan:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
Bangunan:		
Bangunan permanen	40 tahun	2,5%
Bangunan non permanen	20 tahun	5%
Inventaris:		
Kelompok I	4 tahun	25%
Kelompok II	8 tahun	12,5%

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Aset tetap dirinci per golongan dan jenis
- Metode penyusutan;
- Rekonsiliasi saldo awal ke saldo akhir;
- Penyesuaian nilai tercatat; dan
- Penghapusan.

3.4.6 Utang Usaha

Pengertian

Merupakan jumlah yang harus dibayar pada masa yang akan datang yang terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

3.4.6 Utang Usaha (Lanjutan)

Penyajian

- Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek, jika jatuh temponya paling lama 1 (satu) tahun.
- Disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, jika jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kewajiban dan debiturnya; dan
- Persyaratan pinjaman, suku bunga (jika ada) dan tanggal jatuh temponya.

3.4.7 Ekuitas

Pengertian

Merupakan hak residual Pemda pemilik RSUD atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.

Pengakuan

- Pada saat awal BLUD dari hasil inventarisasi neraca awal;
- Pada saat terjadi surplus/defisit berdasarkan laporan operasional; dan
- Pada saat terjadi koreksi saldo awal karena kesalahan.

Pengukuran

- Harga perolehan atau nilai wajar; dan
- Selisih antara aset dan kewajiban, khusus untuk neraca awal.

Penyajian

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3.4.8 Pendapatan Jasa Layanan

Pengertian

1. Pendapatan LO
   Merupakan kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang timbul atas penyerahan barang dan jasa kepada pasien atau pihak yang menanggung.

2. Pendapatan LRA
   Merupakan kas dan setara kas yang diterima atas penyerahan barang dan jasa kepada pasien atau pihak yang menanggung.

Pengakuan

1. Pendapatan LO
   - Pada saat selesai pelayanan pasien yaitu saat pasien pulang; dan
   - Untuk sistem kapitasi yang tidak harus dipertanggungjawabkan jumlah dan beban pasien yang telah dilayani, pendapatan diakui pada saat uang diterima.

2. Pendapatan LRA
   Pada saat kas dan setara kas diterima RSUD.

Pengukuran

- Sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pasien yang bersangkutan; dan
- Sedangkan untuk sistem kapitasi, sesuai dengan uang yang diterima.

3.4.8 Pendapatan Jasa Layanan (Lanjutan)

Penyajian

1. Pendapatan LO
   Disajikan di laporan operasional.
2. Pendapatan LRA
   Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per nama dan pihak yang menanggung pembayaran.

3.4.9 Pendapatan APBD

Pengertian

- ional (pegawai, barang dan jasa dan Promkes) dan belanja modal.
- Penerimaan berupa barang (obat, barang habis pakai, aset tetap, dan aset lainnya).

Pengakuan

Pada saat pencairan SP2D.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di laporan operasional dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per jenis belanja dan per nomor SP2D sebagai lampiran.

3.4.10 Beban dan Belanja

Pengertian

1. Beban
   Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul baik atas aktivitas operasional maupun non operasional.
2. Belanja
   Merupakan semua pengeluaran kas dan setara kas dari Bendahara Pengeluaran RSUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan, kecuali transaksi pembiayaan.

Pengakuan

1. Beban
   Pada saat terjadi transaksi.
2. Belanja
   Pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran RSUD.

Pengukuran

1. Beban
   Sebesar harga perolehan.
2. Belanja
   Sebesar kas dan setara kas yang dikeluarkan.

Penyajian

1. Beban
   Disajikan di laporan operasional dengan golongan beban operasional dan beban non operasional.
2. Belanja
   Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

3.4.10 Beban dan Belanja (Lanjutan)

Pengungkapan

Beban operasional dirinci sesuai dengan fungsi beban.

3.4.11 Kerugian

Pengertian

Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa luar biasa.

Pengakuan

Pada saat terjadinya penurunan aset atau kenaikan kewajiban.

Pengukuran

Sebesar kerugian nilai aset atau kewajiban yang akan dibayar.

Penyajian

Disajikan di laporan operasional dalam kelompok beban non operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kerugian.
- Dijelaskan sebab-sebab terjadinya kerugian.

3.4.12 Setor ke Kas Daerah

Pengertian

Merupakan pengeluaran kas yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pengakuan

Pada saat terjadinya pengeluaran kas.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kerugian.
- Dijelaskan sebab-sebab terjadinya kerugian.

IV. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan

4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan

Terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Pendapatan BLUD			
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	18.235.242.925	18.108.522.425	99,31
Pendapatan usaha lainnya	2.996.129	2.996.129	
Jumlah pendapatan BLUD	18.238.239.054	18.111.518.554	99,31
2. Pendapatan Transfer APBD			
Alokasi anggaran belanja barang dan jasa	9.635.627.791	8.809.966.236	91,43
Alokasi anggaran belanja modal	259.274.357	259.274.357	100,00
Jumlah pendapatan transfer APBD	9.894.902.148	9.069.240.593	91,66
Jumlah pendapatan	**28.133.141.202**	**27.180.759.147**	**96,61**

4.1.2 Belanja

Terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi			
1. Belanja pegawai	11.143.169.755	10.241.355.924	91,91
2. Belanja barang dan jasa	16.727.700.961	15.232.763.714	91,06
Jumlah belanja operasi	**27.870.870.716**	**25.474.119.638**	**91,40**
Belanja Modal			
Belanja gedung dan bangunan	-	-	-
Belanja peralatan dan mesin	259.274.357	259.103.357	99,93
Jumlah belanja modal	**259.274.357**	**259.103.357**	**99,93**
Jumlah belanja	**28.130.145.073**	**25.733.222.995**	**91,48**

4.1.3 Pembiayaan

Terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Penerimaan Pembiayaan			
Penggunaan SILPA tahun lalu	-	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan			
Pembiayaan netto	**-**	**-**	**-**

4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Terdiri atas:

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
Saldo anggaran lebih awal	-	-	-	-
Surplus (Defisit) LRA	1.447.536.152	-	1.447.536.152	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**1.447.536.152**	**-**	**1.447.536.152**	**-**

4.3 Neraca

4.3.1 Kas dan Setara Kas

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
Bank				
Bank Sulteng - 0060201145756	124.322	-	124.322	-
Bank Sulteng - 0060102012143	1.447.411.830	-	1.447.411.830	-
Jumlah	**1.447.536.152**	**-**	**1.447.536.152**	**-**

4.3.2 Piutang Layanan

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	%
Pasien JKN	1.608.210.700	3.477.518.700	(1.869.308.000)	(53,75)
Jumlah	**1.608.210.700**	**3.477.518.700**	**(1.869.308.000)**	**(53,75)**

4.3.3 Piutang Lain-lain

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Pinjaman Jaspel	-	525.215.509	(525.215.509)	(100,00)
Jumlah	**-**	**525.215.509**	**(525.215.509)**	**(100,00)**

4.3.4 Persediaan

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Persediaan layanan:				
Obat-obatan & BMHP	4.262.033.106	3.237.923.969	1.024.109.137	31,63
Jumlah	4.262.033.106	3.237.923.969	1.024.109.137	31,63
Persediaan non layanan:				
Alat tulis kantor	-	68.700	(68.700)	(100,00)
Benda pos	-	144.000	(144.000)	(100,00)
Alat listrik	275.000	275.000	-	-
Alat kantor lainnya	-	4.005.000	(4.005.000)	(100,00)
BBM & Pelumas	3.228.200	5.824.000	(2.595.800)	(44,57)
Isi tabung gas	44.055.900	34.320.000	9.735.900	28,37
Sukucadang alat angkutan	39.612.588	33.789.299	5.823.289	17,23
Barang cetakan	-	25.634.455	(25.634.455)	(100,00)
Perabot kantor	8.800.000	8.800.000	-	-
Jumlah	95.971.688	112.860.454	(16.888.766)	(14,96)
Jumlah persediaan	4.358.004.794	3.350.784.423	1.007.220.371	30,06
Jumlah	**4.358.004.794**	**3.350.784.423**	**1.007.220.371**	**30,06**

Rincian pada lampiran 2

4.3.5 Aset Tetap

Terdiri atas:

Tahun 2023

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
Biaya perolehan:				
Tanah	1.461.998.000	-	-	1.461.998.000
Peralatan dan mesin	35.007.114.390	259.103.357	199.818.000	35.066.399.747
Gedung dan bangunan	22.888.504.248	-	-	22.888.504.248
Jalan, irigasi dan jaringan	2.715.462.000	-	-	2.715.462.000
Aset tetap lainnya	3.096.050	-	-	3.096.050
Jumlah	**62.076.174.688**	**259.103.357**	**199.818.000**	**62.135.460.045**
Akumulasi penyusutan:				
Peralatan dan mesin:	21.439.422.771	4.873.979.480	-	26.313.402.251
Gedung dan bangunan	1.536.931.117	421.014.802	-	1.957.945.919
Jalan, irigasi dan jaringan	499.999.255	85.909.782	-	585.909.037
Jumlah	**23.476.353.143**	**5.380.904.064**	**-**	**28.857.257.207**
Jumlah nilai buku	**38.599.821.545**			**33.278.202.838**

Rincian pada lampiran 3

4.3.6 Utang Usaha

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	Kenaikan/Penurunan %
Utang PMI	125.520.000	-	125.520.000	-
Jumlah nilai buku	**125.520.000**	**-**	**125.520.000**	**-**

4.3.7 Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Terdiri atas:

	2023	2022		Kenaikan/Penurunan Rp	Kenaikan/Penurunan %
Beban jasa pelayanan:					
Jasa pelayanan BLUD Tahun 2023	1.270.758.035	-		1.270.758.035	-
Jasa pelayanan BLUD Desember 2023	676.818.270	-	#	676.818.270	-
Jasa pelayanan Medik APBD	1.508.538.778	5.326.825.262	#	(3.818.286.484)	(71,68)
Jumlah	3.456.115.083	5.326.825.262		(1.870.710.179)	(35,12)
Biaya operasional:					
	-	-		-	
Jumlah	-	-		-	-
Jumlah	**3.456.115.083**	**5.326.825.262**		**(1.870.710.179)**	**(35,12)**

4.3.8 Ekuitas

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	Kenaikan/Penurunan %
Ekuitas awal	40.626.514.915	40.626.514.915	-	-
Koreksi	-	-	-	-
Saldo surplus (defisit) LO	(3.609.948.605)	-	(3.609.948.605)	-
Jumlah	**37.016.566.311**	**40.626.514.915**	**(3.609.948.605)**	**(8,89)**

4.4 Laporan Operasional

4.4.1 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	Kenaikan/Penurunan %
Pasien BPJS	15.259.264.600	-	15.259.264.600	-
Pasien umum	979.949.825	-	979.949.825	-
Jumlah	**16.239.214.425**	**-**	**16.239.214.425**	**-**

4.4.2 Pendapatan APBD

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	Kenaikan/Penurunan %
Alokasi anggaran belanja pegawai	6.827.325.693	-	6.827.325.693	-
Alokasi belanja barang dan jasa	8.809.966.236	-	8.809.966.236	-
Alokasi anggaran belanja modal	259.274.357	-	259.274.357	-
Jumlah	**15.896.566.286**	**-**	**15.896.566.286**	**-**

4.4.3 Pendapatan Usaha Lainnya

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	%
Jasa Giro	2.996.129	-	2.996.129	-
Jumlah	**2.996.129**	**-**	**2.996.129**	**-**

4.4.4 Beban Pegawai

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	%
Gaji dan Tunjangan ASN	6.827.325.693	-	6.827.325.693	-
Honor PJ Pengelolaan keuangan	160.680.000	-	160.680.000	-
Honor pengadaan barang dan jasa	8.160.000	-	8.160.000	-
Jasa pengolaan BMD	10.800.000	-	10.800.000	-
Jasa Pelayanan	9.242.361.783	-	9.242.361.783	-
Jumlah	**16.249.327.476**	**-**	**16.249.327.476**	**-**

4.4.5 Beban Persediaan

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	%
Obat	4.394.777.016	-	4.394.777.016	-
Alat tulis kantor	152.908.750	-	152.908.750	-
Benda pos	19.740.000	-	19.740.000	-
Alat listrik	28.600.000	-	28.600.000	-
Alat kantor lainnya	162.069.999	-	162.069.999	-
BBM & Pelumas	75.213.600	-	75.213.600	-
Isi tabung gas	570.914.900	-	570.914.900	-
Sukucadang alat angkutan	37.434.822	-	37.434.822	-
Barang cetakan	120.228.910	-	120.228.910	-
Jumlah	**5.561.887.997**	**-**	**5.561.887.997**	**-**

4.4.6 Beban Jasa

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	%
Jasa tenaga kesehatan	6.657.390.000	-	6.657.390.000	-
Jasa kalibrasi	35.532.000	-	35.532.000	-
Jasa pengolahan sampah	204.177.630	-	204.177.630	-
Jasa tenaga ahli	147.994.649	-	147.994.649	-
Makanan dan minuman rapat	133.435.000	-	133.435.000	-
Makanan dan minuman tamu	5.925.000	-	5.925.000	-
Makanan dan minum fasilitas kesehat	323.849.116	-	323.849.116	-
Iklan	4.200.000	-	4.200.000	-
Telpon, internat, TV kabel, air dan listı	520.216.594	-	520.216.594	-
Pajak dan perijinan	19.116.800	-	19.116.800	-
Sewa peralatan umum	3.520.000	-	3.520.000	-
Sewa rumah	6.780.000	-	6.780.000	-
Jumlah	**8.062.136.789**	**-**	**8.062.136.789**	**-**

4.4.7 Beban Pemeliharaan

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	Kenaikan/Penurunan %
Pemeliharaan kendaraan	19.500.000	-	19.500.000	-
Pemeliharaan bangunan	49.944.500	-	49.944.500	-
Pemeliharaan peralatan	36.000.000	-	36.000.000	-
Pemeliharaan alat kedokteran	49.339.500	-	49.339.500	-
Pemeliharaan komputer	7.200.000	-	7.200.000	-
Jumlah	**161.984.000**	**-**	**161.984.000**	**-**

4.4.8 Beban Perjalanan Dinas

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	Kenaikan/Penurunan %
Perjalanan Dinas	36.876.600	-	36.876.600	-
Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.339.169	-	75.339.169	-
Perjalanan Dinas paket meeting luar k	20.451.350	-	20.451.350	-
Jumlah	**132.667.119**	**-**	**132.667.119**	**-**

4.4.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	Kenaikan/Penurunan %
Peralatan dan mesin	4.873.979.480	-	4.873.979.480	-
Gedung dan bangunan	421.014.802	-	421.014.802	-
Jalan, irigasi dan jaringan	85.909.782	-	85.909.782	-
Jumlah	**5.380.904.064**	**-**	**5.380.904.064**	**-**

4.4.10 Beban Lain-lain

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	Kenaikan/Penurunan %
Penghapusan Aset Tetap	199.818.000	-	199.818.000	-

4.5 Laporan Arus Kas (LAK)

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	Kenaikan/Penurunan %
Arus kas masuk				
Pendapatan jasa layanan dari masvarakat	18.108.522.425	16.542.538.517	1.565.983.908	9,47
Pendapatan APBD	9.069.240.593	13.708.458.033	(4.639.217.440)	(33,84)
Pendapatan usaha lainnya	2.996.129	-	2.996.129	-
Jumlah arus kas masuk	27.180.759.147	30.250.996.550	(3.070.237.403)	(10,15)
Arus kas keluar				
Belanja pegawai	10.241.355.924	13.118.910.412	(2.877.554.488)	(21,93)
Belanja barang dan jasa	15.232.763.714	12.705.400.332	2.527.363.382	19,89
Jumlah arus kas keluar	25.474.119.638	25.824.310.744	(350.191.106)	(1,36)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi	**1.706.639.509**	**4.426.685.806**	**(2.720.046.297)**	**(61,45)**

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	%
Arus kas masuk				
Arus kas keluar				
Perolehan peralatan dan mesin	-	1.683.096.170	(1.683.096.170)	(100,00)
Perolehan gedung dan bangunan	259.103.357	2.743.589.636	(2.484.486.279)	(90,56)
Jumlah arus kas keluar	259.103.357	4.426.685.806	(4.167.582.449)	(94,15)
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	**(259.103.357)**	**(4.426.685.806)**	**4.167.582.449**	**(94,15)**

4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	%
Arus kas masuk	-	-		
Arus kas keluar				
Penyetoran ke Kas Negara	-	-	-	-
Jumlah arus kas keluar	-	-	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	**-**	**-**	**-**	**-**

4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Rp	%
Arus kas masuk	-	-	-	
Arus kas keluar	-	-	-	
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	**-**	**-**	**-**	

4.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Ekuitas awal	40.626.514.915	40.626.514.915	-	-
Perubahan:				
Surplus (defisit) LO	(3.609.948.605)	-	(3.609.948.605)	-
Ekuitas akhir	**37.016.566.311**	**40.626.514.915**	**(3.609.948.605)**	**(8,89)**

V. Penutup

Direktur RSUD Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebenaran isi laporan keuangan.

Pejabat pengelola RSUD Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 30 Maret 2024

Demikian laporan Keuangan RSUD Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2023 ini kami susun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berkepentingan.

Lampiran 1

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

RASIO KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2023

No.	Nama Rasio	Perhitungan	Satuan	2023
A	**Rasio Likuiditas**			
1	Rasio lancar	Aset lancar/kewajiban jangka pendek	%	204,32
2	Rasio cepat	(Aset lancar-persediaan)/kewajiban jangka pendek	%	8,42
3	Rasio kas	Kas dan setara kas/kewajiban jangka pendek	%	39,89
B	**Rasio Solvabilitas**			
1	Rasio kewajiban thd aset	Kewajiban/aset	%	8,92
2	Rasio kewajiban thd ekuitas	Kewajiban/ekuitas	%	9,79
C	**Rasio Aktivitas**			
1	Perputaran aset	Pendapatan jasa layanan/aset	x	0,40
2	Perputaran piutang usaha	Pendapatan jasa layanan/piutang usaha	x	10,10
3	Perputaran persediaan	Beban persediaan/persediaan	x	1,85
D	**Rasio Rentabilitas**			
1	Surplus (defisit) thd pendapatan	Surplus (defisit)/pendapatan	%	(11,23)
2	Pengembalian aset	Surplus (defisit)/aset	%	(8,87)
3	Pengembalian ekuitas	Surplus (defisit)/ekuitas	%	(9,74)
4	Proporsi beban persediaan	Beban persediaan/pendapatan jasa layanan	%	49,65
5	*Cost Recovery Ratio*	Pendapatan BLUD/total beban	%	45,43

Lampiran 2

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

RINCIAN PERSEDIAAN LAYANAN

Per Tanggal 31 Desember 2023 Dan 2022

No	Jenis dan Lokasi Barang	2023	2022
1	Obat Gudang Farmasi	1.312.812.129	53.991.152
2	Obat Gudang Farmasi dari Dinkes	-	2.974.400
3	Obat Dana Perkada	2.137.269	57.665.486
4	Obat Bantuan Cocid-19	412.800	1.461.400
5	Obat Dana DID	6.643.350	67.363.320
6	Obat ABT	91.019.223	367.293.357
7	BMHP Gudang Farmasi	1.059.865.285	176.002.361
8	BMHP Gudang Farmasi dari Dinkes	123.824.440	126.749.856
9	BMHP Dana Perkada	218.117.135	446.655.454
10	BMHP Bantuan Cocid-19	56.035.645	81.003.715
11	BMHP Dana DID	31.183.393	111.523.083
12	BMHP ABT	239.443.569	538.062.954
13	Obat - Rawat Inap	268.783.398	23.425.034
14	Obat Dana Perkada - Rawat Inap	1.787.882	20.179.703
15	Obat dari Dinkes - Rawat Inap	8.864.485	14.487.584
16	Obat Bantuan Cocid-19 - Rawat inap	-	1.203.796
17	Obat Dana DID - Rawat Inap	10.444.181	28.558.573
18	Obat ABT - Rawat Inap	27.982.408	129.752.197
19	Obat - Rawat Jalan	39.895.970	1.011.018
20	Obat Dana Perkada - Rawat Jalan	1.435.426	6.311.617
21	Obat dari Dinkes - Rawat Jalan	-	414.129
22	Obat Bantuan Cocid-19 - Rawat Jalan	20.210	337.152
23	Obat Dana DID - Rawat Inap	940.876	1.568.429
24	Obat ABT - Rawat Jalan	3.491.585	22.718.289
25	BMHP - Rawat Inap	96.896.304	30.766.897
26	BMHP Dana Perkada - Rawat Inap	23.621.877	39.870.790
27	BMHP dari Dinkes - Rawat Inap	-	5.442.500
28	BMHP Bantuan Cocid-19 - Rawat inap	-	-
29	BMHP Dana DID - Rawat Inap	45.453.046	95.878.089
30	BMHP ABT - Rawat Inap	40.761.936	64.582.657
31	BMHP - Rawat Jalan	1.812.064	468.200
32	BMHP Dana Perkada - Rawat Jalan	141.200	301.100
33	BMHP Dana DID - Rawat Inap	67.135	71.466
34	BMHP ABT - Rawat Jalan	175.956	-
35	BMHP - Ruang UGD	2.198.557	2.323.062
36	BMHP Dana Perkada - UGD	70.778	1.241.610
37	BMHP Covid-19 - UGD	333.125	11.225
38	BMHP Dinkes - UGD	173.196	27.500
39	BMHP ABT - UGD	819.943	-
40	BMHP DID - UGD	-	-
41	BMHP - Ruang Anak	1.209.411	279.392
42	BMHP Dinkes - Ruang Anak	122.256	27.500
43	BMHP Dana Perkada - Ruang Anak	4.188	890.808
44	BMHP ABT - Ruang Anak	146.000	-

No	Jenis dan Lokasi Barang	2023	2022
45	BMHP - Ruang Perinatologi	246.120	580.089
46	BMHP Dinkes - Ruang Perinatologi	163.008	13.750
47	BMHP Dana Perkada - R Perinatologi	-	414.738
48	BMHP ABT - R Perinatologi	-	165.000
49	BMHP - Ruang ROB	1.060.389	354.201
50	BMHP Dinkes - Ruang ROB	-	13.750
51	BMHP Dana Perkada - Ruang ROB	-	89.477
52	BMHP ABT - Ruang ROB	314.474	-
53	BMHP - R Dewasa/Interna	906.026	433.810
54	BMHP Perkada - R Dewasa/Interna	150.000	178.954
55	BMHP ABT - R Dewasa/Interna	301.981	-
56	BMHP - R Radiologi	2.068.354	1.566.620
57	BMHP Dana Perkada - R Radiologi	290.522	18.696.033
58	BMHP ABT - R Radiologi	13.889.500	-
59	BMHP - R HCU	1.359.002	567.610
60	BMHP Dinkes - R HCU	-	27.500
61	BMHP Dana Perkada - R HCU	291.557	466.295
62	BMHP ABT- R HCU	198.000	569.448
63	BMHP - Ruang Operasi	3.400.751	1.059.824
64	BMHP Dana Perkada - Ruang Operasi	-	603.625
65	BMHP ABT - Ruang Operasi	1.197.818	-
66	BMHP - R Poliklinik	189.407	1.524.600
67	BMHP Dana Perkada - R Poliklinik	-	514.216
68	BMHP ABT - R Poliklinik	-	103.400
69	BMHP - R Poli Gigi	121.555	101.970.716
70	BMHP ABT - R Poli Gigi	390.100	-
71	BMHP - R Rekam Medik	678.000	65.286
72	BMHP Dana Perkada - R Rekam Medik	-	1.184.750
73	BMHP ABT - R Rekam Medik	707.000	-
74	BMHP - Ruang CSSD	10.772.305	15.429.063
75	BMHP - Ruang Laundry	37.954	-
76	BMHP Dana Perkada - Ruang Laundry	150.261	-
77	BMHP ABT - Ruang Laundry	146.000	-
78	BMHP - Ruang Bedah	-	272.460
79	BMHP Dana Perkada - Ruang Bedah	-	540.641
80	BMHP Dinkes - Ruang Bedah	-	13.750
81	BMHP - Ruang Gizi	-	140.350
82	BMHP Dana Perkada - Ruang Gizi	70.242	55.261
83	BMHP ABT - Ruang Gizi	130.801	-
84	BMHP DBHCT - Ruang Gizi	-	61.490
85	BMHP - Ruang Laboratorium	391.117.509	58.499.396
86	BMHP Dinkes - Ruang Laboratorium	18.829.310	12.165.596
87	BMHP Covid-19 - Ruang Laboratorium	-	119.680.000
88	BMHP Perkada - Ruang Laboratorium	50.824.024	102.358.989
89	BMHP DID - Ruang Laboratorium	15.824.160	63.258.956
90	BMHP ABT - Ruang Laboratorium	27.059.346	211.387.471
	Jumlah	**4.262.033.106**	**3.237.923.969**

Lampiran 3

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

RINCIAN PERSEDIAAN NON LAYANAN

Per Tanggal 31 Desember 2022

No	Nama Barang	Jumlah (Qty)		Jumlah (Rp)	
		2023	2022	2023	2022
A	ALAT TULIS KANTOR				
1	Tinta Printer Warna	-	1	-	68.700
	Jumlah Alat Tulis Kantor			-	68.700
B	MATERAI				
1	Materai 10000	-	12	-	144.000
	Jumlah Materai			-	144.000
C	ALAT LISTRIK				
1	Stop Kontak Panasonic	5	5	125.000	125.000
2	Saklar Seri Panasonic	6	6	150.000	150.000
	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik			275.000	275.000
D	ALAT PEMBERSIH DAN BAHAN PEMBERSIH				
1	Kantong Sampah Plastik Hitam Besar	-	24	-	1.080.000
2	Kantong Sampah Plastik Hitam Sedang	-	54	-	2.430.000
3	Plastik Sampah Kuning Sedang	-	11	-	495.000
	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			-	4.005.000
E	BAHAN BAKAR MINYAK/GAS				
1	Oli Mesin Potong Rumput	-	2	-	80.000
2	Oli Mesin Potong Rumput	14	19	595.000	807.500
3	- Oli Mesin Generator	40	80	1.672.000	3.344.000
4	- Oli Mesin Generator	-	4	-	144.000
5	- Oli SAE 140 (Mesin Potong Rumput)	20	21	850.000	892.500
6	Air Radiator	1	5	111.200	556.000
	Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas			3.228.200	5.824.000
F	ISI TABUNG GAS				
1	Pengisian Tabung Gas Oksigen	-	156	-	34.320.000
2	Pengisian Tabung Gas Oksigen	189	-	44.055.900	-
	Jumlah Isi Tabung Gas			44.055.900	34.320.000
G	SUKU CADANG				
1	Oli Mesin 0,8	-	5	-	253.460
2	Ban Kendaraan (205--65-R15)	-	4	-	3.514.680
3	Ban Kendaraan (205--65-R15)	4	-	3.468.000	-
4	Ban Kendaraan (215--65-R16)	-	2	-	1.757.200
5	Ban Kendaraan (215--65-R16)	1	-	885.000	-
6	Ban Kendaraan (185--65-R15)	-	1	-	675.900
7	Ban Kendaraan (185--65-R15)	-	4	-	2.703.144
8	Ban Kendaraan (185--65-R15)	8	-	5.600.000	-
9	Ban Kendaraan (175-65-R14)	-	1	-	636.472
10	Ban Kendaraan (175-65-R14)	-	4	-	2.545.600
11	Ban Kendaraan (175-65-R14)	7	-	4.459.000	-
12	Ban Mobil Yhundai	6	8	5.699.448	7.599.264
13	Ban Dalam Calya	21	21	1.638.000	1.638.000
14	Peleks Mobil	2	2	1.520.000	1.520.000
15	Pulp Pamp	1	1	800.000	800.000
16	Pulp Pamp Toyota Hailux	2	1	9.000.000	4.500.000
17	Aki Mobil Yuasa 70 Amf	1	1	1.325.453	1.325.453
18	Aki 12V 70 A GS	-	1	-	1.363.065
19	Aki 12V 70 A	1	-	1.427.000	-
20	Aki 12V 50 A GS	1	3	985.687	2.957.061
21	Aki 12V 35 A	1	-	855.000	-
22	Aki 12V 100 A	1	-	1.950.000	-
	JUMLAH SUKU CADANG			39.612.588	33.789.299

No	Nama Barang	Jumlah (Qty)		Jumlah (Rp)	
		2023	2022	2023	2022
H	**PENGGANDAAN DAN BAHAN CETAK**				
1	**Check List dan Observasi Transfusi**	**-**	**8**	**-**	519.816
2	**Sensus Harian Pasien Rawat Inap**	**-**	**8**	**-**	375.936
3	**Permintaan Darah dan Transpusi Darah**	**-**	**7**	**-**	328.944
4	**Pengkajian Kebutuhan Edukasi Pasien dan Keluarga**	**-**	**7**	**-**	454.839
5	**Lembar BPJS**	**-**	**10**	**-**	469.920
6	**Map Status Pasien**	**-**	**1.535**	**-**	15.350.000
7	**Blanko Resep**	**-**	**6.000**	**-**	3.000.000
8	**Catatan Perkembangan Pelayanan Terintegritas**	**-**	**7.500**	**-**	3.750.000
9	**Pantograf**	**-**	**750**	**-**	375.000
10	**Pengantar Laboratorium**	**-**	**20**	**-**	10.000
11	**Pengkajian Awal RJ**	**-**	**1.000**	**-**	500.000
12	**Ringkasan Poliklinik**	**-**	**1.000**	**-**	500.000
	JUMLAH BAHAN CETAK DAN PENGGANDAAN			**-**	**25.634.455**
I	**ALAT / BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA**				
1	**Regulator Oksigen**	**11**	**11**	**8.800.000**	8.800.000
	JUMLAH ALAT / BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA			**8.800.000**	**8.800.000**
	Jumlah persediaan non layanan			**95.971.688**	**112.860.454**